



**Bersatu**  
**Menyongsong Era Baru**  
*United for a New Era*

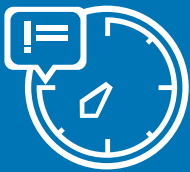
**Laporan Tahunan • 2022 • Annual Report**



**Bersatu  
Menyongsong  
Era Baru**  
*United for a New Era*

**Laporan Tahunan • 2022**  
*Annual Report*





# PERNYATAAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB DISCLAIMER

Laporan tahunan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil kinerja operasi, kebijakan, rencana, strategi, proyeksi, serta tujuan AirNav Indonesia. Pengungkapan laporan tahunan ini mengacu pada ketentuan SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Publik, sebagai satu-satunya peraturan yang dirujuk dalam pembuatan laporan tahunan, yang sekaligus menjadi kriteria dalam *Annual Report Award (ARA) 2022*. Adapun laporan ini disajikan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang dapat diakses di situs web resmi Perusahaan [www.airnavindonesia.co.id](http://www.airnavindonesia.co.id).

Laporan tahunan ini memuat kata “Perusahaan”, “AirNav Indonesia”, dan “AirNav” yang didefinisikan sebagai Perum LPPNPI. Kata “Kami” juga digunakan untuk memudahkan penyebutan Perum LPPNPI secara umum. Dalam penyusunannya, terdapat pernyataan prospektif yang dibuat berdasarkan kondisi terkini dan asumsi kondisi mendatang sesuai dengan kegiatan usaha AirNav Indonesia. Oleh karena itu pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual yang berbeda.

*The annual report of Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) or AirNav Indonesia presents the financial statement, operational performance, policies, plans, strategies, projections, and objectives of AirNav Indonesia. Disclosure of this annual report refers to the provisions of SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 concerning Annual Reports of Public Companies as the only regulation referred to in preparing annual reports and the criteria for the 2022 Annual Report Award (ARA). This report is presented in two languages, namely Indonesian and English, and can be accessed on the Company's official website: [www.airnavindonesia.co.id](http://www.airnavindonesia.co.id).*

*This annual report uses “Company”, “AirNav Indonesia”, and “AirNav” to refer to Perum LPPNPI and “We” as a reference to Perum LPPNPI in general. Forward-looking statements are presented based on current conditions and forward-looking perspectives of the business operations of AirNav Indonesia. Therefore, such statements are subject to risk and uncertainties that may lead actual developments to differ.*





## TEMA SAMPUL COVER THEME

### Bersatu Menyongsong Era Baru

Tahun 2022 menjadi titik balik bagi penerbangan Indonesia setelah meredanya pandemi COVID-19. Peningkatan aktivitas penerbangan baik domestik maupun internasional terus berlangsung, seiring pelonggaran kebijakan penerbangan dan permulaan era kenormalan baru. Di tahun ini, AirNav Indonesia memperoleh amanah baru untuk mengelola ruang udara di kawasan Natuna dan Tanjung Pinang. Tentunya, AirNav Indonesia telah mempersiapkan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), melakukan sejumlah inovasi, serta senantiasa mengoptimalkan tingkat pelayanannya. Seluruh insan AirNav Indonesia berkolaborasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, bertaraf internasional, dengan mengutamakan keselamatan, efisiensi inovasi, dan mendukung operasi yang ramah.

### United for a New Era

2022 was a turning point for Indonesian aviation after the subsiding COVID-19 pandemic. Along with the ease of aviation policies and the beginning of a new normal, the number of domestic and international flights continued to rise. Since 2022, AirNav Indonesia has been responsible for airspace in Natuna and Tanjung Pinang. Therefore, AirNav prepared the technology and human resources, created several innovations, and optimized its service. All AirNav Indonesia personnel collaborated to provide the best international service while prioritizing safety, flight efficiency, and environmental friendliness.





# PROGRAM UTAMA AIRNAV INDONESIA 2022:

THE 2022 KEY PROGRAMS  
OF AIRNAV INDONESIA

**AIRNAV INDONESIA  
MEMILIKI LIMA  
PROGRAM UTAMA  
YAITU:**

*The five key programs  
of AirNav Indonesia are*

**Transformasi Bisnis Pelayanan  
Navigasi Penerbangan untuk  
Meningkatkan Efisiensi Proses  
Bisnis dan Kinerja Keuangan**

*Business Transformation of  
the Air Navigation Services  
to Improve Efficiency of  
Business Process and Financial  
Performance*

1





2

**Meningkatkan Kualitas Keselamatan dan Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan di Papua**  
*Quality Improvement of Safety and Security of Air Navigation Services in Papua*

3

**Pengembangan Pelayanan Navigasi Penerbangan di Natuna**  
*Development of Air Navigation Services in Natuna*

4

**Mendukung Program Pemerintah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Penerbangan Melalui Pengembangan Pelayanan Navigasi di Bandara dan Pengoperasian Bandara KSPN**  
*Support to the Government Programs to Increase Aviation Growth Through Improvement of Navigation Services at Airports and Their Operation in National Tourism Strategic Areas*

5

**Peningkatan Kualitas Keselamatan dan Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan di Wilayah Indonesia Timur.**  
*Quality Improvement of Safety and Security of Air Navigation Services in Eastern Indonesia*



# DAFTAR ISI

## Table of Contents

2	PERNYATAAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB DISCLAIMER
3	TEMA SAMPUL COVER THEME
4	PROGRAM UTAMA AIRNAV INDONESIA 2022: <i>THE 2022 KEY PROGRAMS OF AIRNAV INDONESIA</i>
10	JEJAK LANGKAH MILESTONES

### 12 IKHTISAR UTAMA MAIN HIGHLIGHTS

14	Ikhtisar Data Keuangan Penting <i>Important Financial Highlights</i>
20	Ikhtisar Operasional dan Organisasi <i>Operational and Organizational Highlights</i>
22	Ikhtisar Saham dan/atau Modal <i>Share and/or Capital Highlights</i>
23	Peristiwa Penting 2022 <i>2022 Highlighted Events</i>

### 24 LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT

26	Laporan Dewan Pengawas <i>Supervisory Board Report</i>
32	Laporan Direksi <i>Board of Directors Report</i>

### 40 PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

42	Informasi Umum dan Identitas Perusahaan <i>General Information and Company Identity</i>
44	Riwayat Singkat AirNav Indonesia <i>Brief History of AirNav Indonesia</i>
47	Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan <i>Vision, Mission, and Company Values</i>
48	Bidang Usaha, Produk dan Jasa <i>Business Line, Products and Services</i>
56	Wilayah Operasi <i>Operational Area</i>
58	Struktur Organisasi <i>Corporate Structure</i>





94

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN***MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS*

60	Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri <i>List of Industry Association Membership</i>	97	Tinjauan Perekonomian dan Industri <i>Economy and Industry Overview</i>	144	Realisasi Investasi Barang Modal <i>Realized Investment in Capital Goods</i>
61	Profil Dewan Pengawas <i>Supervisory Board Profile</i>	101	Sasaran Strategis Tahun 2022 <i>Strategic Objectives for 2022</i>	146	Target dan Realisasi <i>Target and Realization</i>
68	Profil Direksi <i>Board of Directors Profile</i>	112	Tinjauan Operasi per Segmen Usaha <i>Operational Overview by Lines of Business</i>	148	Prospek Usaha <i>Business Prospect</i>
79	Sumber Daya Manusia (SDM) <i>Human Resources (HR)</i>	132	Aspek Pemasaran <i>Marketing Aspect</i>	149	Proyeksi Tahun 2023 <i>2023 Projection</i>
86	Informasi Pemilik Modal <i>Shareholder Information</i>	134	Kinerja Keuangan Komprehensif <i>Comprehensive Financial Performance</i>	151	Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing <i>Impact of Foreign Currency Exchange Rates</i>
86	Informasi tentang Kronologis Penanaman Modal Perusahaan <i>Information About the Company's Capital Investment Chronology</i>	138	Kemampuan Menghasilkan Laba <i>Profit Generating Ability</i>	152	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan <i>Information and Material Facts Following Date of Accounting Report</i>
88	Lembaga dan Profesi Penunjang <i>Supporting Institutions and Professions</i>	141	Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang <i>Solvency Ratio and Receivables Collectability Ratio</i>	152	Kebijakan Penggunaan Laba Bersih dan Informasi Setoran Penyisihan Laba Bersih kepada Pemilik Modal <i>Policy on Net Profit Allocation and Information of Deposit of Net Profit Provision to the Shareholders</i>
89	Penghargaan dan Sertifikasi <i>Awards and Certification</i>	143	Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal <i>Capital Structure and the Management Policy</i>	153	Perpajakan dan Kontribusi Terhadap Negara <i>Taxation and Contribution to the State</i>
		144	Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal <i>Material Commitment for Capital Goods Investment</i>		





162

**TATA KELOLA PERUSAHAAN**  
CORPORATE GOVERNANCE

- 154 Informasi tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) serta Informasi tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum  
*Information on Employee Share Ownership Program and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP) and Realization of Public Offering*
- 154 Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal  
*Material Information on Investments, Expansion, Divestment, Consolidation/Mergers, Acquisitions, and/or Debt/Capital Restructuring*
- 154 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi  
*Material Transactions Related to Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliations/Related Parties*

- 157 Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi  
*Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events*
- 157 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan dan Dampaknya terhadap Perusahaan  
*Changes in Laws and Their Significant Impacts on the Company*
- 158 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan  
*Changes in Accounting Policies and Its Impact on the Company*
- 158 Tingkat Kesehatan Perusahaan  
*Organizational Health Index*
- 160 Informasi Kelangsungan Usaha  
*Information on Business Continuity*

- 164 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik  
*Good Corporate Governance*
- 174 Kepemilikan Modal dan Kementerian Terkait  
*Capital Ownership and Related Ministries*
- 176 Rapat Pembahasan Bersama (RPB)  
*Shareholder Meeting*
- 179 Dewan Pengawas  
*Supervisory Board*
- 188 Direksi  
*Board of Directors*
- 198 Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi  
*Nomination and Remuneration of the Supervisory Board and the Board of Directors*
- 202 Organ Pendukung Dewan Pengawas  
*Supporting Bodies of the Supervisory Board*
- 202 KOMITE AUDIT  
*Audit Committee*
- 208 KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG  
*Risk Management and GCG Committee*
- 214 KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
*Nomination and Remuneration Committee*





219	<b>SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS</b> <i>Secretariat of Supervisory Board</i>
222	<b>Organ Pendukung Direksi</b> <i>Board of Directors Supporting Organs</i>
223	<b>Sekretaris Perusahaan</b> <i>Corporate Secretary</i>
227	<b>Satuan Pengawasan Intern</b> <i>The Internal Auditor</i>
233	<b>Sistem Pengendalian Internal</b> <i>Internal Control System</i>
237	<b>Akuntan Publik</b> <i>Public Accountant</i>
238	<b>Sistem Manajemen Risiko</b> <i>Risk Management System</i>
247	<b>Perkara Hukum</b> <i>Lawsuit</i>
249	<b>Kode Etik</b> <i>Code of Ethics</i>
251	<b>Akses Informasi dan Data Perusahaan</b> <i>Access to Company Information and Data</i>

254	<b>Sistem Pelaporan Pelanggaran</b> <i>Whistleblowing System</i>
257	<b>Kebijakan Antikorupsi</b> <i>Anti-corruption Policy</i>
258	<b>Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)</b> <i>Asset Declaration for Public Officials (LHKPN)</i>

260	<b>TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN</b> <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>
-----	---

262	<b>LAMPIRAN</b> <i>APPENDIX</i>
-----	------------------------------------

280	<b>SURAT PERNYATAAN DIREKSI</b> <i>DIRECTORS' STATEMENT LETTER</i>
-----	---

281	<b>SURAT PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS</b> <i>SUPERVISORY BOARD'S STATEMENT LETTER</i>
-----	---

282	<b>LAPORAN KEUANGAN AUDIT</b> <i>AUDITED FINANCIAL STATEMENTS</i>
-----	--



# JEJAK LANGKAH

## MILESTONES

### 2012

- ✈ Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia sebagai dasar pembentukan AirNav Indonesia.
- ✈ *The Government of the Republic of Indonesia ratified Government Regulation No. 77 of 2012 on Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia as the legal basis for the establishment of AirNav Indonesia.*

### 2014

- ✈ Penambahan pengelolaan layanan navigasi penerbangan menjadi 193 bandara pada 1 Oktober.
- ✈ AirNav Indonesia menempati gedung Kantor Pusat yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda Tangerang pada bulan Maret.
- ✈ Peningkatan kapasitas *runway* di Bandara Soekarno-Hatta dari 68 pergerakan per jam menjadi 72 pergerakan per jam
- ✈ *The air navigation service under management grew to 193 airports on October 1st.*
- ✈ *AirNav Indonesia occupied the Head Office on Jl. Ir. H. Juanda Tangerang in March.*
- ✈ *The runway capacity in Soekarno-Hatta Airport increased from 68 movements per hour to 72 movements per hour.*

### 2016

- ✈ Peresmian *Air Traffic Control System Top Sky* di Makassar Air Traffic Services Center (MATSC) pada 16 Januari.
- ✈ AirNav Indonesia menjalin kerja sama dengan ENAC (Perancis) dalam bidang pendidikan Magister dan pelatihan singkat Manajemen Pelayanan Navigasi Penerbangan berskala internasional.
- ✈ *AirNav Indonesia enunciated Air Traffic Control System Top Sky in the Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) on January 16th.*
- ✈ *AirNav Indonesia cooperated with ENAC (France) in Master's Degree and short courses in Air Navigation Service Management with the international standard.*

### 2013

- ✈ AirNav Indonesia resmi beroperasi melayani 26 bandara pada tanggal 16 Januari.
- ✈ *AirNav Indonesia officially started to operate on January 16, 2013, serving 26 airports.*

### 2015

- ✈ AirNav Indonesia mengelola layanan navigasi penerbangan di 273 bandara.
- ✈ AirNav Indonesia menjalin kerja sama peningkatan kapasitas penerbangan dengan NATS (Inggris) di Jakarta Air Traffic Service Center.
- ✈ Implementasi sistem aplikasi (*web-based*) untuk manajemen slot penerbangan di 35 bandara bernama Chronos.
- ✈ Kerja sama dengan MITRE on IMANS.
- ✈ *AirNav Indonesia provided air navigation service in 273 airports.*
- ✈ *AirNav Indonesia cooperated with NATS (the United Kingdom) to increase the capacity of runways in the Jakarta Air Traffic Service Center.*
- ✈ *AirNav Indonesia implemented a web-based system, called Chronos, for airline slot management in 35 airports.*
- ✈ *AirNav Indonesia cooperated with MITRE on IMANS.*



## 2017

- ✈ Peresmian menara baru di Pontianak, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang.
- ✈ Peningkatan kapasitas runway Bandara Soekarno-Hatta menjadi 81 pergerakan/ jam
- ✈ Audit ICAO USOAP menunjukkan peningkatan keselamatan penerbangan di Indonesia di mana layanan navigasi penerbangan berkontribusi nilai 86,4%.
- ✈ *AirNav Indonesia inaugurated new towers in Pontianak, Pangkal Pinang, and Tanjung Pinang.*
- ✈ *AirNav Indonesia increased the runway capacity in Soekarno-Hatta Airport to 81 movements per hour.*
- ✈ *Audit ICAO USOAP revealed the improvement of aviation safety in Indonesia and the score of the air navigation service at 86.4%.*

## 2020

- ✈ Peresmian pelayanan navigasi pengoperasian runway 3 Bandara Soekarno Hatta pada 23 Januari.
- ✈ Peresmian menara ATC Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) pada 28 Agustus.
- ✈ AirNav Indonesia memperkuat layanan PBN melalui implementasi fase 1 domestic RNAV2 En-route pada 30 Januari, redesign VFR route wilayah Papua dan Jakarta pada 3 Desember.
- ✈ *The air navigation service in Runway 3 of Soekarno Hatta Airport was inaugurated on January 23.*
- ✈ *The ATC Tower of Yogyakarta International Airport (YIA) was inaugurated on August 28.*
- ✈ *AirNav Indonesia strengthened PBN services by implementing phase 1 domestic RNAV2 En-route on January 30 and redesigning VFR routes for Papua and Jakarta areas on December 3.*

## 2021

- ✈ Pelayanan navigasi penerbangan di Bandara Jendral Besar Soedirman (Purbalingga), Bandara Ngloram (Blora), Bandara Khusus Smart Semelagi (Kalimantan Barat), dan Bandara Sibisa (Parapat).
- ✈ Implementasi berbagai inovasi untuk menunjang kelancaran operasional (ATFM Ground Delay Program, IoT, pelayanan FIS, PBN Route RNAV2 Phase Cluster 1 dan 2, VFR Route, dan STREAM 2.0).
- ✈ Peningkatan pelayanan surveillance yang dilayani oleh Palembang APP.
- ✈ Penyusunan instrumen Flight Procedure di Lombok dan Kulonprogo.
- ✈ Uji coba User Preferred Route (UPR).
- ✈ *Air navigation services at Jenderal Besar Sudirman Airport (Purbalingga), Ngloram Airport (Blora), Smart Semelagi Special Airport (West Kalimantan), and Sibisa Airport (Parapat)*
- ✈ *Various innovations to support smooth operation (ATFM Ground Delay Program, IoT, FIS services, PBN Route RNAV2 Phase Cluster 1 and 2, VFR Route, and STREAM 2.0)*
- ✈ *Improvement of Surveillance Services served by Palembang APP*
- ✈ *Preparation of Flight Procedure Instruments in Lombok and Kulonprogo*
- ✈ *User Preferred Route (UPR) trial*

## 2018

- ✈ Peresmian menara ATC Bandara Ahmad Yani Semarang pada tanggal 7 Juni.
- ✈ Peresmian menara ATC Bandara Kertajati Majalengka pada tanggal 24 Mei.
- ✈ *Ahmad Yani Semarang Airport ATC Tower was inaugurated on Jun 7.*
- ✈ *Kertajati Majalengka Airport ATC Tower was inaugurated on May 24.*

## 2019

- ✈ Peresmian menara ATC Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) pada tanggal 10 September.
- ✈ Penerapan performance based navigation (PBN) yang memungkinkan pembuatan jalur penerbangan (ATS route) semakin fleksibel dengan menggunakan Global Navigation Satellite System (GNSS).
- ✈ *Inauguration of the Yogyakarta International Airport (YIA) ATC tower on September 10.*
- ✈ *The application of performance-based navigation (PBN) using the Global Navigation Satellite System (GNSS) allowed flexible flight routes (ATS routes).*

## 2022

- ✈ Mendukung proses realignment FIR Jakarta - FIR Singapura
- ✈ Implementasi RNAV2 Phase 2 Cluster Kupang
- ✈ Implementasi PBN Domestic Route RNAV2 Cluster 3 Surabaya - Papua
- ✈ Peresmian menara ATC baru di Banjarmasin dan Lampung
- ✈ Implementasi Aplikasi NavGATE
- ✈ Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Airnav Indonesia dengan IATA
- ✈ *Support the alignment process of FIR Jakarta - FIR Singapore*
- ✈ *Implementation of RNAV2 Phase 2 Kupang Cluster*
- ✈ *Implementation of PBN Domestic Route RNAV2 Surabaya - Papua Cluster 3*
- ✈ *Inauguration of the new ATC towers in Banjarmasin and Lampung*
- ✈ *Implementation of NavGATE Application*
- ✈ *The signing of the Cooperation Agreement between AirNav Indonesia and IATA*





# IKHTISAR UTAMA

MAIN  
HIGHLIGHTS





Kantor Pusat AirNav Indonesia di Kota Tangerang, Banten.  
*AirNav Head Office in Tangerang, Banten.*





## Ikhtisar Data Keuangan Penting

### Important Financial Highlights

### Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

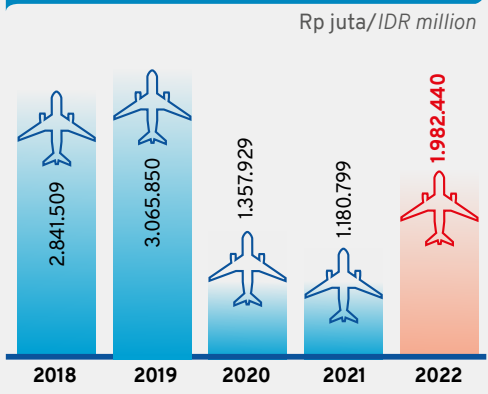
#### Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

dalam jutaan rupiah/in million rupiah

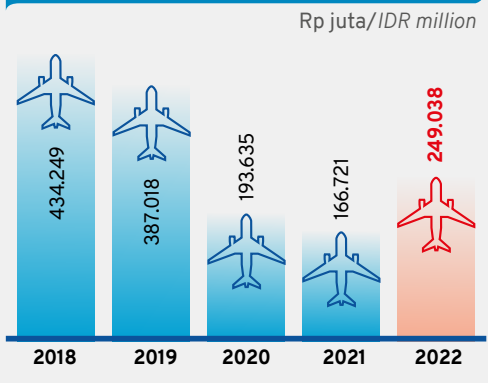
URAIAN Description	2022	2021	2020	2019	2018	(%) YoY 2021-2022	(%) CAGR 2018-2022
<b>Pendapatan Usaha</b> <i>Operating Revenue</i>							
Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Jelajah <i>En-route Navigation Charges</i>	1.982.440	1.180.799	1.357.929	3.065.850	2.841.509	67,89	(6,95)
Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Terminal <i>Terminal Navigation Charges</i>	249.038	166.721	193.635	387.018	434.249	49,37	(10,52)
Jumlah Pendapatan Usaha <i>Total Operating Revenues</i>	2.231.478	1.347.520	1.551.464	3.452.869	3.275.758	65,60	(7,39)
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	(2.059.300)	(1.974.363)	(2.443.607)	(2.912.915)	(2.869.186)	(4,3)	(6,42)
Laba Usaha <i>Operating Profit</i>	172.178	(626.843)	(892.143)	539.954	406.572	127,47	(15,79)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain <i>Other (Expenses) Revenues</i>	37.581	20.186	116.620	129.170	121.583	86,2	(20,93)
Laba Sebelum Pajak <i>Earnings Before Tax</i>	209.758	(606.657)	(775.524)	668.124	528.154	134,6	(16,86)
Manfaat (Beban) Pajak <i>Tax Benefits (Expenses)</i>	(55.233)	116.866	195.083	(167.949)	(146.708)	(147,3)	(17,75)
Laba Bersih - Tahun Berjalan <i>Profit for the Current Year</i>	154.525	(489.791)	(580.441)	500.175	381.446	131,5	(16,53)
Laba Komprehensif Lain <i>Other Comprehensive Income</i>	543	(1.140)	(9.879)	887	7.011	147,7	(40,05)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan - Setelah Pajak <i>Comprehensive Income for the Current Year - After Tax</i>	155.068	(490.931)	(590.320)	501.062	388.458	131,6	(16,78)
EBITDA/ EBITDA	478.200	(351.41)	(544.052)	884.248	803.348	236,08	(9,86)



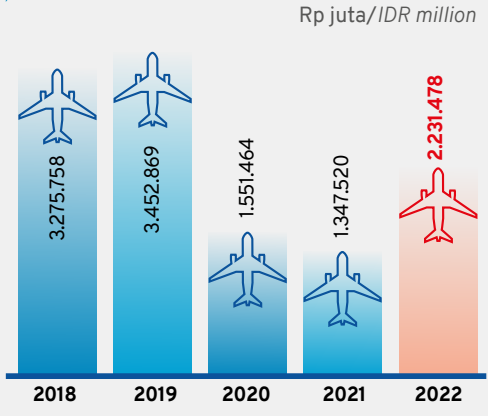
**PENDAPATAN USAHA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN JELAJAH**  
En-route Navigation Charges



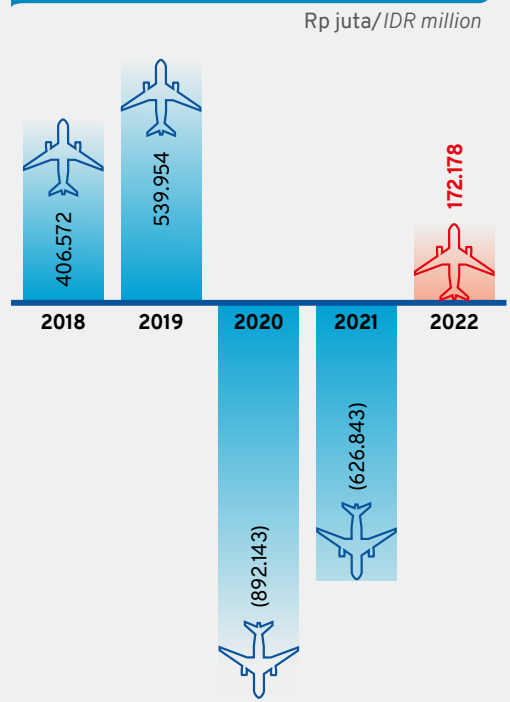
**PENDAPATAN USAHA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN TERMINAL**  
Terminal Navigation Charges



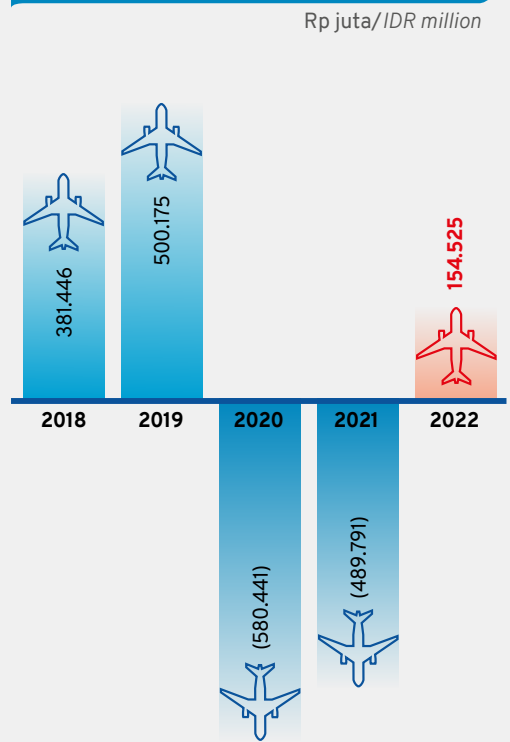
**JUMLAH PENDAPATAN USAHA**  
Operating Revenues



**LABA USAHA**  
Operating Profit



**LABA BERSIH - TAHUN BERJALAN**  
Net Income - for the Current Year





## Posisi Keuangan

### Financial Position

dalam jutaan rupiah/in million rupiah

URAIAN Description	2022	2021	2020	2019*)	2018*)	(%) YoY 2021-2022	(%) CAGR 2018-2022
<b>Aset</b> Assets							
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	2.451.900	1.898.274	2.616.711	3.839.173	3.558.962	129,16	(7,18)
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	2.489.816	2.729.328	2.458.742	2.276.235	2.041.860	91,22	4,05
Jumlah Aset Total Assets	4.941.716	4.627.602	5.075.453	6.120.804	5.600.822	106,79	(2,47)
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b> Liabilities and Equity							
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	700.455	526.900	495.568	925.916	946.135	132,94	(5,84)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	65.631	80.141	68.394	39.488	30.349	81,89	16,68
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	766.086	607.041	563.962	965.404	976.484	126,20	(4,74)
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.175.630	4.020.561	4.511.491	5.155.400	4.654.338	103,86	(2,15)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	4.941.716	4.627.602	5.075.453	6.120.804	5.630.822	106,79	(2,58)

\*) Disajikan kembali/ \*) Restatement

## Arus Kas

### Cash Flow

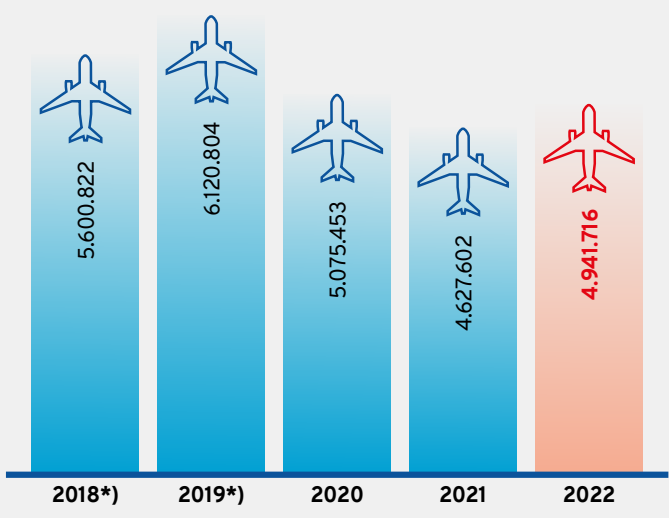
dalam jutaan rupiah/in million rupiah

URAIAN Description	2022	2021	2020	2019*)	2018*)	(%) YoY 2021-2022	(%) CAGR 2018-2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Business Operation	543.774	(451.630)	(913.260)	758.684	274.871	220,40	14,62
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment	(27.852)	(191.373)	(198.156)	(452.729)	(211.831)	85,45	(33,35)
Arus Kas dari Aktivitas Keuangan Cash Flow from Financing	(2.745)	(5.321)	(7.246)	-	-	48,41	(27,64)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas/Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	513.177	(648.325)	(1.118.663)	305.955	63.039	179,15	52,10
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	1.092.703	1.744.757	2.860.993	2.569.182	2.506.143	(37,37)	(15,30)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	1.611.781	1.092.703	1.744.757	2.860.993	2.569.182	47,50	(8,90)

\*) Disajikan kembali/ \*) Restatement

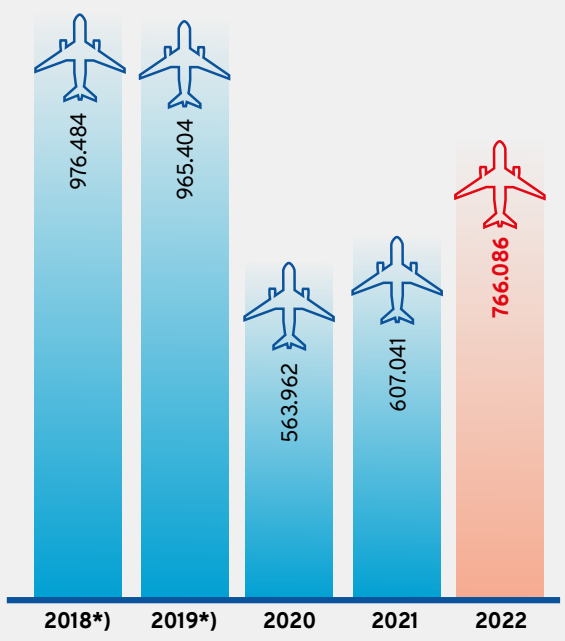
**JUMLAH ASET**  
Assets

Rp juta/IDR million



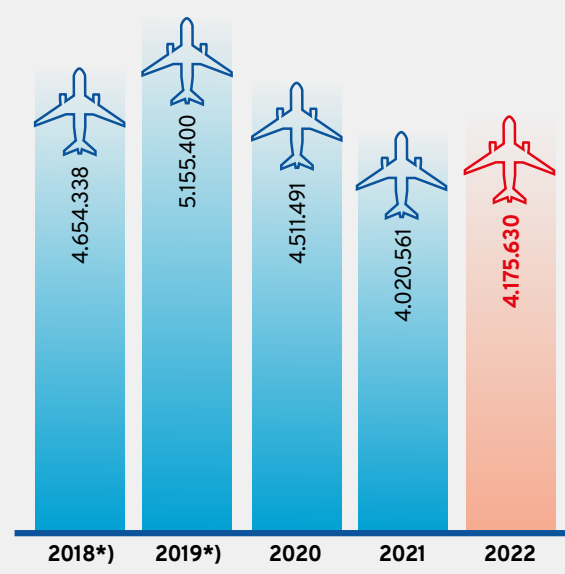
**JUMLAH LIABILITAS**  
Liabilities

Rp juta/IDR million



**JUMLAH EKUITAS**  
Equities

Rp juta/IDR million



\*) Disajikan kembali/ Restatement.

## Rasio Keuangan

### Financial Ratios

dalam % kecuali dinyatakan lain/ in %, except stated differently

URAIAN Description	2022	2021	2020	2019*)	2018*)	(%) YoY 2021-2022	(%) CAGR 2018-2022
<b>Rasio Operasi</b> <i>Operational Ratio</i>							
Periode Penagihan (hari) <i>Collection Period (day)</i>	112	120	107,90	75,00	87,02	93,33	5,18
Perputaran Persediaan (hari) <i>Inventory Turnover (day)</i>	7	12	12	5	4	58,33	11,84
Perputaran Total Aset (TATO) <i>Total Asset Turnover (TATO)</i>	47,07	31,20	33,94	24,80	60,62	150,87	(4,93)
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset/ <i>Total Assets Equity to Total Assets Ratio</i>	37,47	41,70	38,02	14,61	18,22	89,86	15,51
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) <i>Operational Expenses to Operational Revenues</i>	92,28	146,52	157,55	84,36	87,59	62,98	1,05
<b>Rasio Profitabilitas</b> <i>Profitability Ratio</i>							
Rasio Laba Bersih terhadap Aset <i>Return on Assets (ROA)</i>	3,14	(10,58)	(11,44)	8,17	6,77	129,68	(14,24)
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas <i>Return on Equity (ROE)</i>	3,71	(21,23)	(24,29)	24,80	17,86	117,48	(26,97)
Rasio Laba Bersih terhadap Investasi <i>Return on Investment (ROI) (%)</i>	387,8	(158,48)	(124,3)	33,62	60,99	344,70	44,77
Rasio Laba Usaha terhadap Pendapatan <i>Operating Profit Margin (OPM) (%)</i>	7,72	(46,52)	(57,55)	15,64	12,41	116,60	(9,06)
Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan <i>Net Profit Margin (NPM)</i>	6,95	(36,55)	(37,41)	14,49	11,64	119,02	(9,80)
EBITDA Margin <i>EBITDA Margin</i>	21,43	(26,08)	(35,07)	25,61	24,52	182,17	(2,66)
<b>Rasio Likuiditas</b> <i>Liquidity Ratio</i>							
Rasio Kas <i>Cash Ratio</i>	230,10	207,38	352,07	308,99	271,54	110,96	(2,92)
Rasio Lancar <i>Current Ratio</i>	350,04	360,27	528,02	414,64	379,33	97,16	(1,66)



Tampilan layar menunjukkan bagan laporan posisi keuangan AirNav Indonesia.  
The screen displaying the chart of AirNav Indonesia's financial position report

URAIAN Description	2022	2021	2020	2019*)	2018*)	(%) YoY 2021-2022	(%) CAGR 2018-2022
<b>Rasio Solvabilitas</b> Solvability Ratio							
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	18,35	15,10	12,50	18,73	20,98	121,52	(2,64)
Rasio Liabilitas terhadap Aset Debt to Assets Ratio	15,5	13,12	11,11	15,77	17,34	118,14	(2,22)
<b>Rasio Pertumbuhan</b> Growth Ratio							
Pendapatan Usaha Operating Revenues	65,6	(13,15)	(55,07)	5,41	17,56	598,86	30,16
Laba Usaha Operating Profit	(127,47)	(29,73)	(16,09)	1,52	23,91	428,76	(239,75)
Laba Bersih - Tahun Berjalan Net Income - For the Current Year	(131,59)	(15,61)	(216,05)	31,13	-20,94	842,99	44,43
Aset Assets	6,79	(8,82)	(17,07)	8,7	8,11	176,98	(3,49)
Liabilitas Liabilities	26,2	7,63	(41,58)	(1,13)	3,85	343,38	46,75
Ekuitas Equity	6,79	(10,88)	(12,49)	10,77	9,04	162,41	(5,56)

\*) Disajikan kembali/ \*) Restatement

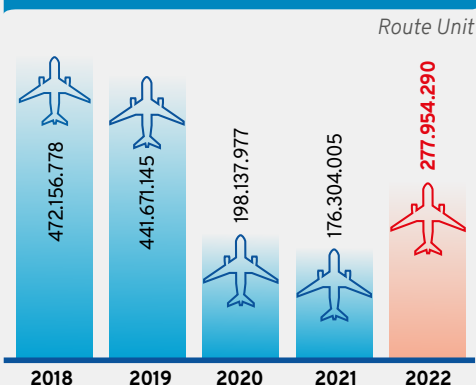


## Ikhtisar Operasional dan Organisasi Operational and Organizational Highlights

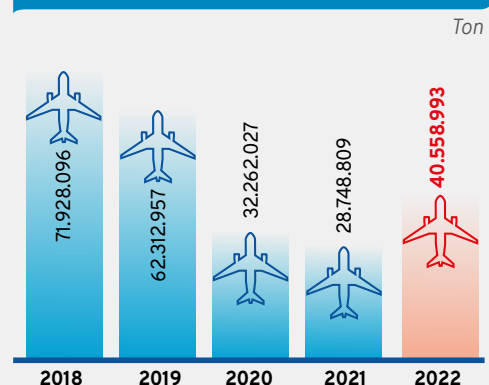
### Ikhtisar Operasional Operational Highlights

URAIAN Description	2022	2021	2020	2019	2018	(%) YoY 2021-2022	(%) CAGR 2018-2022
<b>Produksi En-Route (Route Unit) En-Route Production (Route Unit)</b>							
Penerbangan Domestik Domestic Flights	125.981.202	98.594.214	99.016.276	162.517.195	191.783.702	127,78	(8,06)
Penerbangan Internasional International Flights	54.561.220	22.182.556	35.665.003	114.355.802	114.616.317	245,96	(13,80)
Penerbangan Lintas Udara Overflights	97.411.868	55.527.235	63.456.698	164.798.148	165.756.759	175,43	(10,09)
<b>Total Produksi En-Route Total En-Route Production</b>	<b>277.954.290</b>	176.304.005	198.137.977	441.671.145	472.156.778	157,66	(10,05)
<b>Produksi Navigasi Terminal (Ton) Terminal Navigation Production (Ton)</b>							
Penerbangan Domestik Domestic Flights	33.412.061	25.339.170	27.239.996	46.577.035	56.144.390	131,86	(9,86)
Penerbangan Internasional International Flights	7.146.932	3.409.639	5.022.031	15.735.922	15.783.706	209,61	(14,65)
<b>Total Produksi Navigasi Terminal Total Terminal Navigation Production</b>	<b>40.558.993</b>	28.748.809	32.262.027	62.312.957	71.928.096	141,08	(10,83)
<b>Investasi (Rp Juta) Investment (IDR-Million)</b>							
<b>Total Investasi Total Investment</b>	<b>39.847</b>	309.057	466.956	1.487.534	625.461	12,89	(42,34)

#### TOTAL PRODUKSI EN-ROUTE Total En-Route Production



#### TOTAL PRODUKSI NAVIGASI TERMINAL Total Terminal Navigation Production



## Ikhtisar Organisasi

### Organizational Highlights

URAIAN Description	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah Karyawan (orang) Number of Employees (person)	4.922	4.993	5.109	5.117	5.150
Pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan *) Achievement of Organizational Health Index *)	85,5 "Sehat AA" "Healthy AA"	70,00 "Sehat A" "Healthy A"	70,00 "Sehat A" "Healthy A"	90,60 "Sehat AA" "Healthy AA"	92,40 "Sehat AA" "Healthy AA"
Skor Penilaian Penerapan GCG **) GCG Score **)	89,62	83,16	81,96	84,95	83,16

\*) Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

\*\*\*) Penilaian penerapan GCG mengacu kepada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

\*) Assessment of Organizational Health Index is administered based on the Minister of State-owned Enterprises Decision No. KEP-100/MBU/2002 on Assessment of State-owned Enterprise Health Index

\*\*\*) GCG Assessment refers to the Copy of the Secretary to Ministry of State-owned Enterprises Decision No.SK 16/S.MBU/2012, dated June 6, 2012, on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance in SOEs.



**AirNav Indonesia mencatat 1 kecelakaan kerja dan nihil kejadian terkait keselamatan yang disebabkan oleh gangguan teknis pada ATC sepanjang tahun 2018-2022. Pengungkapan terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3), indeks kualitas pelayanan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) telah diungkapkan secara terperinci dalam Laporan Keberlanjutan AirNav Indonesia 2022.**

*AirNav Indonesia recorded one (1) work accident and zero safety-related incidents caused by technical problems at ATC from 2018–2022. Disclosures of occupational health and safety (OHS), service quality index, and partnership and community development programs are available in detail in the 2022 Sustainability Report of AirNav Indonesia.*





## Ikhtisar Saham dan/atau Modal *Share and/or Capital Highlights*

### Informasi Saham

Kepemilikan AirNav Indonesia sepenuhnya berada pada Pemerintah Indonesia. Adapun berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum), kepemilikan modal AirNav berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

### *Information on Shares*

*The Government of Indonesia solely owns AirNav Indonesia. Based on Law No. 19 of 2003 on SOEs and Government Regulation No. 13 of 1998 on State-owned General Companies (Perum), AirNav's capital is state assets separated and not divided into shares.*

### Informasi tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen

AirNav Indonesia memiliki kewajiban untuk mencadangkan laba bersih paling sedikit 20% dari modal Perusahaan untuk menutup potensi kerugian Perusahaan. Apabila dana cadangan telah melebihi 20% dari modal Perusahaan, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN dapat memutuskan penggunaan kelebihan dana cadangan tersebut untuk keperluan Perusahaan.

### *Information on Profit Allocation and Dividend Payout*

*AirNav is obliged to reserve its net profit, at least 20% of the company capital, to cover its potential loss. Should the reserve exceed 20% of the company capital, the Government, represented by the Minister of SOEs, may allocate the excess for the company's purposes.*

### Informasi tentang Aksi Korporasi

AirNav Indonesia tidak melakukan aksi korporasi pada tahun 2022.

### *Information on Corporate Action*

*AirNav Indonesia did not take any corporate action in 2022.*

### Informasi tentang Penerbitan Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, serta Pendanaan Lainnya

AirNav Indonesia tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, serta bentuk pendanaan lainnya, sehingga tidak terdapat pengungkapan informasi terkait materi tersebut.

### *Information on the Issuance of Bonds, Sukuk or Convertible Bonds, as Well as Other Funding*

*AirNav Indonesia does not issue bonds, sukuk, convertible bonds, and other forms of funding, so there is no disclosure of information on these matters.*



## Peristiwa Penting 2022 2022 Highlighted Events



**Januari**  
January

**Penandatanganan Penyesuaian FIR (Realignment FIR)**

*The signing of FIR Alignment*



**Januari**  
January

**Implementasi PBN Route RNAV 2 Phase 2 Cluster - Kupang**

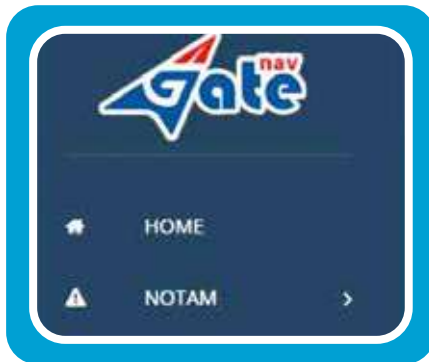
*Implementation of PBN Route RNAV 2 Phase 2 Cluster - Kupang*



**Maret**  
March

**Peresmian Gedung Menara Pengawas (Tower) baru di Banjarmasin dan Lampung**

*Inauguration of the new control towers in Banjarmasin and Lampung*



**November**  
November



**Implementasi Aplikasi NavGATE; Dukungan pada kegiatan kenegaraan yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan Ajang Balap Motor Dunia WBSK Mandalika**

*Implementation of NavGATE Application; Support for the national events, namely the G20 Summit and the Mandalika WSBK Race.*



**November**  
November



**Implementasi PBN Domestic Route RNAV 2 Cluster 3 Surabaya-Papua**

*Implementation of PBN Domestic Route RNAV2 Surabaya - Papua Cluster 3*



**Oktober**  
October



**Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama AirNav Indonesia dengan IATA**

*The signing of the Cooperation Agreement between AirNav Indonesia and IATA*





# LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT  
REPORT





Tower AirNav Indonesia Cabang Yogyakarta.  
*AirNav Indonesia Tower in Yogyakarta Branch*





## Laporan Dewan Pengawas *Supervisory Board Report*



**NOVIE RIYANTO R.**  
**Ketua Dewan Pengawas**  
*Chair of The Supervisory Board*





### PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG KAMI HORMATI,

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh rahmatNya, AirNav Indonesia mampu menghadapi tantangan, pulih menyongsong era baru, dan mencatatkan pencapaian signifikan di tahun 2022. Perkenankan kami, selaku Dewan Pengawas menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja AirNav Indonesia selama tahun 2022.

Pelonggaran syarat penerbangan dan pembukaan pembatasan penerbangan internasional telah berdampak pada pergerakan lalu lintas penerbangan. Peningkatan lalu lintas penerbangan terus terjadi di tahun 2022, meskipun konflik geopolitik Rusia Ukraina memicu inflasi energi, avtur pesawat, dan komoditas lainnya. AirNav Indonesia sebagai perusahaan yang mengelola lalu lintas udara mencatat bahwa pergerakan lalu lintas penerbangan domestik, internasional, dan lintas udara (*overflying*) yang masing-masing meningkat sebesar 26%, 136%, dan 90% *year on year* (YoY). Peningkatan tersebut diproyeksikan akan terus berlangsung seiring dengan pemulihan sektor aviasi.

### PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN DAN PENGARAHAN KEPADA DIREKSI

Kami melakukan pengawasan terhadap implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), pelaksanaan program investasi, penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan, sistem teknologi informasi, kebijakan dan pelaksanaan organisasi dan sumber daya manusia (SDM), kebijakan pengadaan, kebijakan mutu dan layanan, serta pengawasan terhadap peraturan perundangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. Kami menilai bahwa Direksi telah melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan dengan baik, serta mampu mengeksekusi strategi dan kebijakan strategis di tahun 2022. Penilaian tersebut didasari oleh realisasi pencapaian target kinerja sebesar 98,58% dari RKAP.

### ESTEEMED STAKEHOLDERS,

*Let us send our praises and gratitude to God Almighty. By His grace, AirNav Indonesia could face challenges, recover and welcome the new era, and record significant achievements in 2022. Please allow us, the Supervisory Board, to present our supervision report on AirNav Indonesia's performance in 2022.*

*The easing of flight requirements and the loosening of international flight restrictions impacted air traffic movement. The air traffic kept increasing in 2022, even though the Russia-Ukraine geopolitical conflict encourage inflation in energy, aviation turbine fuel, and other commodities. As a company that manages air traffic, AirNav Indonesia noted that domestic and international movement and overflying increased respectively by 26%, 136%, and 90% year on year (YoY). This increase is projected to continue in line with the recovery in aviation.*

### SUPERVISION ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE STRATEGY AND DIRECTIONS FOR THE BOARD OF DIRECTORS

*We supervised the implementation of the Company's Long-term Plan, the Company Work Program and Budget (WPB), investment programs, the provision of air navigation services, information technology systems, organizational and human resources (HR) policies and their implementation, procurement policies, quality and service policies, and supervision of laws, regulations, and agreements with third parties. We assessed that the Board of Directors performed its management duty well and could execute strategies and strategic policies in 2022. This assessment is made based on the achievement of its performance target, which is 98.58% of the Company WPB.*



Kami mengamati kinerja keuangan AirNav Indonesia meningkat cukup signifikan di tahun 2022. Tercatat pendapatan usaha sebesar Rp2,23 triliun, meningkat sebesar Rp883,96 miliar atau setara dengan 65,60% apabila dibandingkan periode tahun 2021 yang sebesar Rp1,35 triliun. Kami berupaya menjaga efektivitas pengeluaran dan meningkatkan efisiensi biaya, sehingga beban usaha hanya meningkat 4,30% YoY di tengah meningkatnya kegiatan operasi Perusahaan pascapandemi COVID-19. Di akhir 2022, AirNav Indonesia telah mencatatkan laba usaha sebesar Rp172,18 miliar, yang meningkat Rp799,02 miliar atau setara 127,47% dibandingkan tahun 2021 yang kalau itu rugi Rp626,84 miliar. Kami menilai bahwa kinerja keuangan AirNav Indonesia sangat baik di sepanjang 2022 dan diharapkan akan terus pulih ke depannya.

Dewan Pengawas juga mengamati bahwa AirNav Indonesia senantiasa menjaga integritas pelayanan navigasi penerbangan dalam melayani seluruh penerbangan di ruang udara Indonesia, termasuk Kepulauan Riau dan Natuna yang dialihkan ke FIR Jakarta pada tahun 2022. Direksi telah melakukan investasi dengan skala prioritas keselamatan penerbangan, baik investasi pada peralatan produksi, infrastruktur, jaringan, maupun teknologi informasi. Peningkatan kualitas SDM juga secara konsisten dilaksanakan melalui AirNav Training Center. Kami menilai Direksi telah menjalankan strategi-strategi inisiatif maupun objektif dengan baik. Seluruh implementasi strategi perusahaan telah difokuskan untuk mencapai sasaran *Seamless Air Traffic Management (ATM)*, *Safety Performance*, *Customer Satisfaction*, *Corporate Sustainability*, dan *Integrated Information System*.

Dewan Pengawas berpendapat bahwa strategi maupun kebijakan strategis yang telah dilaksanakan tetap perlu untuk dievaluasi dan terus ditingkatkan, mengingat tantangan di industri penerbangan yang cukup dinamis. Oleh karenanya, kami secara konsisten memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi agar strategi dan kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan RJPP tahun 2020-2024 dan mendukung tercapainya target kinerja RKAP tahun 2022. Kami telah membangun komunikasi yang baik dengan Direksi, dan secara rutin menghadiri rapat gabungan untuk membahas berbagai isu strategis, maupun membahas

*We observe that AirNav Indonesia's financial performance increased significantly in 2022. Its revenue was recorded at IDR 2.23 trillion, an increase of IDR 883.96 billion or 65.60% from 2021, which was IDR 1.35 trillion. The company seeks to maintain spending effectiveness and improve cost efficiency so the operating expenses only increased 4.30% YoY amidst the increase in the company's operating activities post-COVID-19-pandemic. By the end of 2022, AirNav Indonesia recorded an operating profit of IDR 172.18 billion, an increase of IDR 799.02 billion or 127.47% from 2021, in which if the company experienced a loss of IDR 626.84 billion. We consider that AirNav Indonesia's financial performance was excellent throughout 2022 and it is expected that its performance will continue to recover in the future.*

*The Supervisory Board also observed that AirNav Indonesia kept maintaining the integrity of its air navigation services in serving all flights in Indonesian air space, including Riau and Natuna Islands, which were transferred to Jakarta FIR in 2022. The Board of Directors has invested in aviation safety as a priority scale, such as production equipment, infrastructure, network, and information technology. Improvement of HR quality was also consistently administered through the AirNav Training Center. We assessed that the Board of Directors implemented the initiative and objective strategies well. The entire implementation of the company's strategy has focused on achieving the targets of Seamless Air Traffic Management (ATM), Safety Performance, Customer Satisfaction, Corporate Sustainability, and Integrated Information System.*

*The Supervisory Board believes that strategies and strategic policies implemented need evaluation and continuous improvement, given the challenges in the dynamic aviation industry. Therefore, we consistently provided advice and recommendations for the Board of Directors to ensure that the strategies and policies taken were in line with the 2020-2024 Company Long-term Plan and supported the achievement of performance targets of the 2022 Company WPB. We also have established good communication with the Board of Directors and regularly attended joint meetings to discuss various strategic issues and other matters requiring approval from both*



hal-hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak. Direksi telah mengikuti saran dan rekomendasi yang diberikan selama tahun 2022.

Kami juga melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung melalui kunjungan kerja ke lapangan. Kami dapat memantau kinerja unit layanan maupun kantor cabang, mengetahui kendala, tantangan, potensi usaha, serta memberikan rekomendasi perbaikan dengan lebih tepat sasaran, melalui kegiatan kunjungan kerja. Adapun selama tahun 2022, kami melakukan kunjungan kerja, yakni ke Unit Pelayanan Pagar Alam, Kantor Cabang Padang, Unit Pelayanan Lubuklinggau, Kantor Cabang Solo, Kantor Cabang Surabaya, Kantor Cabang MATSC, dan Kantor Cabang Sentani.

#### **PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA TAHUN 2023**

Kami percaya sektor aviasi akan semakin pulih di tahun 2023. Kami optimis terhadap prospek usaha perusahaan ke depan, dan telah menganalisis target dan proyeksi yang tertuang dalam RKAP tahun 2023. Kami memandang target dan proyeksi yang disusun dalam RKAP 2023 telah disusun dengan memperhatikan kondisi makroekonomi, baik global maupun nasional, dan kondisi industri penerbangan. Asumsi maupun perhitungan yang digunakan telah sesuai dengan asumsi penyusunan RAPBN 2023, yang menjadi dasar penyusunan RKAP BUMN tahun 2023. Kami mendukung prospek usaha yang telah disusun Direksi, dengan senantiasa memberikan saran dan arahan kepada Direksi untuk pencapaian target RKAP 2023.

Kami percaya, AirNav Indonesia akan terus bertumbuh positif baik secara kinerja keuangan, operasional, maupun dalam kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). AirNav Indonesia telah menandatangani *memorandum of understanding* (MoU) dengan International Air Transport Association (IATA) pada 19 Oktober 2022 terkait kolaborasi dalam rangka meningkatkan keselamatan dan efisiensi pelayanan navigasi penerbangan. Adapun fokus kesepakatan tersebut adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan pengelolaan *Air Traffic Management* (ATM) dan peningkatan efisiensi pelayanan navigasi penerbangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan rute penerbangan internasional berbasis preferensi operator penerbangan, atau *User-Preferred Routes* (UPRs) yang telah berkontribusi dalam peningkatan efisiensi penerbangan. UPRs memiliki potensi tinggi untuk mengurangi emisi gas buang bahan bakar di udara. Sepanjang tahun 2022, emisi karbon yang berhasil direduksi adalah 120,96 ton CO<sub>2</sub>. Hal ini sejalan dengan kebijakan *net zero emission* Pemerintah RI di tahun 2060, dan *net zero emission* penerbangan di tahun 2050.

*parties. The Board of Directors has followed the suggestions and recommendations provided in 2022.*

*We also conducted direct supervision through site visits. We could monitor service units and branch offices' performance; identify constraints, challenges, and business potential; and recommend focused improvements through site visits. In 2022, we conducted site visits to Pagar Alam Service Unit, Padang Branch Office, Lubuklinggau Service Unit, Solo Branch Office, Surabaya Branch Office, MATSC Branch Office, and Sentani Branch Office.*

#### **OUTLOOK ON BUSINESS PROSPECTS IN 2023**

*We believe that the aviation sector will recover further in 2023. We are optimistic about the company's business prospects in the future and have analyzed the targets and projections outlined in the 2023 Company WPB. We view that the targets and projections prepared in the 2023 Company WPB have considered both global and national macroeconomic conditions and the condition of the aviation industry. The assumptions and calculations follow the assumptions in preparing the 2023 State Budget Bill, which becomes the basis for preparing the 2023 SOE Company WPB. We support the business prospects prepared by the Board of Directors by continuously advising and providing directions for the Board of Directors to achieve the targets of the 2023 Company WPB.*

*We believe that AirNav Indonesia will continue to grow positively in its finance, operation, environmental, social, and governance (ESG) performance. On October 19, 2022, AirNav Indonesia signed a memorandum of understanding (MoU) with the International Air Transport Association (IATA) regarding collaboration to improve the safety and efficiency of air navigation services. The focus of this agreement is improving human resources (HR) quality, improving Air Traffic Management (ATM), and increasing the efficiency of air navigation services. One of the areas of concern is the development of international flight routes based on airline operator preferences or User-Preferred Routes (UPRs), which have contributed to increasing flight efficiency. UPRs are highly potential to reduce gas emissions in the air. In 2022, carbon emissions were reduced to 120.96 tons of CO<sub>2</sub>. This is in line with the Government of Indonesia's net zero emission policy in 2060 and net zero emission in aviation in 2050.*



## PANDANGAN ATAS IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

AirNav Indonesia telah memulai penerapan tata kelola perusahaan sejak perusahaan mulai beroperasi di tahun 2013. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pendampingan untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di lingkungan AirNav Indonesia. Dalam perjalanannya, AirNav Indonesia akan terus meningkatkan implementasi GCG, dan melakukan penilaian setiap tahun terhadap kualitas penerapan GCG. Adapun hasil penilaian penerapan GCG tahun 2022 adalah sebesar 89,618 dengan kategori 'Sangat Baik'. Perusahaan senantiasa berupaya menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan tim penilai, dengan tujuan meningkatkan kualitas penerapan GCG.

Dewan Pengawas menilai setiap fungsi telah berupaya untuk melaksanakan praktik GCG sesuai dengan prinsip dan pilar *governance*. Kami mengamati bahwa penerapan GCG di AirNav Indonesia telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan pemenuhan terhadap regulasi yang berlaku maupun aspirasi dari pemilik modal. Kami menilai AirNav Indonesia telah memiliki kecukupan sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko, serta pedoman pelaksanaan GCG lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian hasil penilaian Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX) untuk dimensi efektivitas sistem tata kelola korporasi sebesar 89,27% dengan kategori 'Sangat Baik'. Adapun secara keseluruhan, AirNav Indonesia memperoleh hasil penilaian ICORPAX tahun buku 2022 sebesar 82,93%, dengan kategori 'Sangat Baik'. Kami memberikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh manajemen atas penerapan GCG dan berharap manajemen dapat terus meningkatkan kualitas penerapan GCG.

Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan perusahaan dengan didukung oleh organ pendukung Dewan Pengawas, yang meliputi Sekretaris Dewan Pengawas, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan GCG, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Kami melakukan penilaian kinerja organ pendukung

## OUTLOOK ON CORPORATE GOVERNANCE

*AirNav Indonesia has started corporate governance since its business operation in 2013. The Finance and Development Supervisory Agency assists with good corporate governance (GCG) within AirNav Indonesia. In its journey, AirNav Indonesia will continuously improve its GCG and conduct an annual assessment of its GCG quality. The score of the 2022 GCG was 89.618 in the 'Very Good' category. The company always tries to follow up on the recommendations from the assessment team to improve the Company GCG quality.*

*The Supervisory Board evaluates that each function strives to practice GCG following the principles and pillars of governance. We observe that the GCG in AirNav Indonesia has been running effectively and efficiently by complying with applicable regulations and shareholder's aspirations. We assess that AirNav Indonesia has an adequate internal control system, risk management system, and other GCG guidelines. This is proven by the Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX) score for the dimensions of the corporate governance system effectiveness at 89.27%, in the 'Very Good' category. The overall score of AirNav Indonesia was 82.93%, in the 'Very Good' category, in the 2022 fiscal year based on the ICORPAX assessment. We highly appreciate all management for its GCG and hope that management can continuously improve its GCG quality.*

*The Supervisory Board performs its function of the company with the support of its supporting bodies, namely the Secretary to the Supervisory Board, the Audit Committee, the Risk Management and GCG Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. We evaluate the performance of supporting bodies based on their*



berdasarkan keaktifan, kehadiran dalam rapat, serta kriteria pelaporan yang digunakan oleh Dewan Pengawas dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi. Kami menilai seluruh organ pendukung telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dan telah membantu efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

#### APRESIASI

Kami memberikan apresiasi yang mendalam kepada Kementerian BUMN selaku pemilik modal, Kementerian Perhubungan selaku kementerian teknis, dan kementerian lainnya atas kepercayaan dan arahan yang diberikan selama ini. Kami juga memberikan apresiasi kepada Direksi, organ pendukung Dewan Pengawas, dan seluruh karyawan AirNav Indonesia, atas komitmen dan dedikasinya untuk senantiasa memberikan kinerja terbaik. Apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik regulator, maskapai penerbangan sebagai pengguna jasa layanan navigasi penerbangan, dan berbagai pihak yang telah mendukung AirNav Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya. Mari kita lanjutkan dan tingkatkan kerja sama dan dedikasi kita, untuk semakin memberikan kinerja terbaik dan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan.

*activity, meeting attendance, and reporting criteria used by the Supervisory Board in providing directions and input to the Board of Directors. We deemed that all supporting bodies performed their duties and function well and improved the effectiveness of duties performed by the Supervisory Board.*

#### ACKNOWLEDGMENT

*We highly appreciate the Ministry of SOEs as the shareholder, the Ministry of Transportation as the technical ministry, and other ministries for their trust and direction. We also appreciate the Board of Directors, the supporting bodies of the Supervisory Board, and all employees of AirNav Indonesia for their commitment and dedication to continuously providing the best performance. We also express our high appreciation to all stakeholders, namely regulators, airlines as our users of air navigation services, and various parties who have supported AirNav Indonesia in running its business operation. Let's continue and improve our cooperation and increase our dedication to further provide the best performance and added value to all stakeholders.*

**Jakarta, Juli 2023** | Jakarta, July 2023  
Atas nama Dewan Pengawas,  
On behalf of the Supervisory Board

NOVIE RIYANTO R.

**Ketua Dewan Pengawas**  
Chair of the Supervisory Board





## Laporan Direksi *Board of Directors Report*



**POLANA BANGUNINGSIH PRAMESTI**  
**Direktur Utama**  
*President Director*





### PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG KAMI HORMATI,

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas perkenan-Nya, AirNav Indonesia kembali pulih dan mampu mencatatkan kinerja positif di tahun 2022.

Pergerakan lalu lintas penerbangan kembali meningkat di sepanjang 2022. AirNav Indonesia mencatat lalu lintas penerbangan domestik, internasional, dan lintas udara berturut-turut sebesar 26%, 136%, dan 90% year on year (YoY). International Air Transport Association (IATA) memproyeksikan pergerakan lalu lintas penerbangan akan terus mengalami peningkatan dan dapat pulih sepenuhnya pada tahun 2023-2024. Tentunya momentum pemulihan penerbangan dan era *new normal* ini disambut seluruh insan AirNav Indonesia dengan senantiasa bersinergi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam pengelolaan navigasi udara.

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PENCAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN

AirNav Indonesia menetapkan fokus pencapaian di tahun 2022 pada tahap “*Enhancing Organization and Process*” yakni perubahan struktur organisasi dengan mengacu pada konsep operasi dan tuntutan proses bisnis yang semakin sistematis. Fokus tersebut dijabarkan dalam 6 program utama, yang meliputi transformasi proses bisnis, peningkatan kinerja dan optimalisasi pendapatan non PJNP; mempertahankan dan meningkatkan kualitas keselamatan serta keamanan pelayanan navigasi penerbangan; persiapan pelayanan navigasi penerbangan di atas Kepulauan Riau; mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan operasional dan *cost efficiency*; memaksimalkan penerimaan pembayaran dari pengguna jasa; serta penyesuaian struktur organisasi korporat. Dalam pelaksanaannya, program difokuskan pada 4 aspek, yaitu pengelolaan operasional dan *safety*, sumber daya manusia (SDM), fasilitas pelayanan dan teknologi informasi, serta keuangan.

Kami merumuskan strategi, target, Rencana

### ESTEEMED STAKEHOLDERS,

*Let us begin with praise and gratitude to God Almighty. By His Grace, AirNav Indonesia has recovered and could record a positive performance in 2022.*

*The air traffic movement has increased in 2022. AirNav Indonesia recorded that domestic and international movement and overflying rose respectively by 26%, 136%, and 90% year on year (YoY). The International Air Transport Association (IATA) projects that air traffic movements will continue to increase and will be fully recovered in 2023-2024. Of course, all AirNav Indonesia personnel welcomed the momentum for aviation recovery and the new normal by continuously synergizing to provide the best service in air navigation management.*

### THE IMPLEMENTATION OF STRATEGIES AND STRATEGIC POLICIES AND CORPORATE PERFORMANCE ACHIEVEMENT

*AirNav Indonesia sets its focus of achievement in 2022 at the "Enhancing Organization and Process" stage, namely changes in the organizational structure regarding the concepts of operations and demands for increasingly systematic business processes. This focus is outlined in 6 (six) key programs, namely business process transformation, performance improvement and optimization of revenues aside from air navigation services; continuation and improvement of the safety and security quality of air navigation services; preparation of air navigation services in Riau Islands; continuation and improvement of the operational service performance and cost efficiency; optimization of payment receipts from service users; and adjustments to the corporate organizational structure. In its implementation, the program focuses on 4 (four) aspects, namely operational management and safety, human resources (HR), service and information technology facilities, and finance.*

*We formulated strategies, targets, Management*



Kerja Manajemen (RKM), serta langkah-langkah strategis yang akan ditempuh perusahaan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Kami menyusun RKAP dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan industri penerbangan, kebutuhan dan proses bisnis perusahaan, serta proyeksi dan prospek usaha perusahaan. Seluruh anggota Direksi terlibat secara aktif dalam perancangan maupun pelaksanaan RKAP, dan telah menandatangani pakta integritas Direksi, sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan RKAP. Adapun RKAP berfungsi sebagai pedoman dan pengendalian bagi Direksi dan seluruh entitas perusahaan dalam melaksanakan kegiatan, dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi perusahaan, serta target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami bersyukur atas pencapaian kinerja Perusahaan sepanjang tahun 2022. AirNav Indonesia mencatatkan produksi pelayanan jasa navigasi penerbangan (PJNP) jelajah dan terminal di tahun 2022 sebanyak 277.954.290 rute dan 40.558.993 ton, meningkat sebesar 57,66% dan 41,08% apabila dibandingkan dengan produksi PJNP 2021. Peningkatan pendapatan usaha berbanding lurus dengan peningkatan produksi, yakni tercatat sebesar Rp883,96 miliar, naik dari Rp1,35 triliun menjadi Rp2,23 triliun, atau setara dengan 65,60% dibandingkan pendapatan usaha tahun 2021. Meningkatnya produksi telah mempengaruhi peningkatan beban usaha. Perusahaan mencatat beban usaha meningkat sebesar Rp84,94 miliar atau setara dengan 4,30% dari Rp1,97 triliun di tahun 2021 menjadi Rp2,06 triliun di tahun 2022. Meski demikian, persentase peningkatan beban usaha relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan pendapatan. Hal tersebut merupakan dampak positif dari upaya dan konsistensi Perusahaan dalam menjalankan efisiensi biaya dan menjadikan *cost efficiency ratio* sebagai salah satu *key performance indicator* (KPI) korporat.

Pada aspek operasional dan keselamatan, AirNav Indonesia melaksanakan program peningkatan pelayanan di ruang udara lapis atas, lapis bawah, layanan *aerodrome*, dan *flight information service* (FIS) dengan tujuan

*Work Plans, and strategic steps to be taken by the company into the Company Work Program and Budget (WPB). We prepared the Company WPB by considering the economic conditions and the aviation industry, the company's needs and business processes, as well as the company's projections and business prospects. All members of the Board of Directors were actively involved in the Company WPB preparation and implementation and signed the integrity pact of the Board of Directors as a commitment to implementing the Company WPB. The Company WPB functions as guidelines and control for the Board of Directors and all corporate entities in holding activities to achieve the company's vision and missions, targets, and goals.*

*We are grateful for the achievement of the Company's performance in 2022. AirNav Indonesia recorded the production of En-route navigation and terminal navigation in 2022 was 277,954,290 routes and 40,558,993 tons respectively, an increase of 57.66% and 41.08% when compared to the previous production. The increase in operating revenue was directly aligned with the increase in production. The revenue was IDR883.96 billion, an increase from IDR1.35 trillion to IDR 2.23 trillion, or a rise of 65.60% from 2021. The increase in production has affected the increase in operating expenses. The company recorded that the operating expenses increased by IDR84.94 billion, equivalent to 4.30%, from IDR 1.97 trillion in 2021 to IDR 2.06 trillion in 2022. However, the percentage of increase in operating expenses was lower than the percentage of increase in revenues. This is a positive impact of the Company's efforts and consistency in conducting cost efficiency and making the cost efficiency ratio one of the corporate key performance indicators (KPI).*

*In terms of operational and safety aspects, AirNav Indonesia implemented a program for improving services in the upper and lower levels of airspace, aerodrome services, and flight information services (FIS) to increase the safety, effectiveness,*



meningkatkan keselamatan, efektivitas, dan efisiensi operasional penerbangan. Pada ruang udara lapis atas, Perusahaan mempersiapkan implementasi *Performance Based Navigation (PBN)* rute regional 2 antara Jakarta-Singapura dan rute PBN domestik 2 antara Surabaya dan Papua. Adapun implementasi rute PBN domestik berpotensi menghemat bahan bakar senilai Rp74 miliar dan mengurangi emisi CO<sub>2</sub> sebesar 34.258 ton setiap tahunnya. Sementara pada layanan FIS, Perusahaan menuntaskan konsolidasi layanan menjadi 6 lokasi dengan tujuan peningkatan kualitas suara dan jangkauan radio frekuensi tinggi dengan menggunakan teknologi radio *HF Spira-cone*.

Salah satu momentum penting dalam perjalanan AirNav Indonesia di tahun 2022 adalah penandatanganan persetujuan penyesuaian batas antara *Flight Information Region (FIR)* Indonesia dan Singapura pada 25 Januari 2022, yang kemudian disahkan dalam Perpres No. 109 Tahun 2022. Dengan penyesuaian FIR Jakarta, AirNav Indonesia memperoleh amanah untuk mengelola ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna. Kami memastikan kesiapan fasilitas, prosedur, teknologi, dan SDM secara berkesinambungan dalam mengemban amanah tersebut.

Momentum lain dalam perjalanan AirNav Indonesia di tahun 2022 adalah peresmian Training Center yang berfungsi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara mandiri dalam rangka meningkatkan kompetensi personel navigasi penerbangan. AirNav Indonesia juga telah memperoleh sertifikasi 143 tentang penyelenggara pendidikan dan pelatihan bidang navigasi penerbangan, yang memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk menyelenggarakan pusat pelatihan dengan tenaga pengajar internal. Kami berupaya memberdayakan sekaligus meningkatkan kompetensi SDM sebagai bentuk kontribusi pada navigasi penerbangan di Indonesia.

## PENCAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET

Pengukuran kinerja perusahaan berdasar pada KPI yang tercantum dalam kontrak manajemen. Terdapat 5 indikator yang melekat pada KPI korporasi, yakni nilai ekonomi dan sosial, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi dan pengembangan talenta. Kami mengamati, secara keseluruhan AirNav Indonesia mampu merealisasikan target RKAP 2022, dengan realisasi KPI sebesar 98,58%.

Pada segi finansial, AirNav Indonesia merealisasikan EBITDA, dan *cash flow from operating activities (CFO)*

*and efficiency of flight operations. In the upper level of the air space, the company prepared the implementation of Performance Based Navigation (PBN) regional route 2 between Jakarta-Singapore and domestic PBN route 2 between Surabaya and Papua. The implementation of the domestic PBN route has the potential to save IDR74 billion in fuel and reduce CO<sub>2</sub> emissions by 34,258 tons annually. Regarding FIS services, the company completed the service consolidation into 6 (six) locations to improve sound quality and expand high-frequency radio coverage using HF Spira-cone radio technology.*

*One of the important moments in AirNav Indonesia's journey in 2022 is signing the boundary adjustment agreement between Indonesia and Singapore Flight Information Region (FIR) on 25 January 2022, which was later ratified in Presidential Regulation No. 109 of 2022. With the adjustment of the Jakarta FIR, AirNav Indonesia has been mandated to manage the air space over Riau and Natuna Islands. We have ensured the readiness of facilities, procedures, technology, and human resources on an ongoing basis in performing this mandate.*

*Another momentum in AirNav Indonesia's journey in 2022 is the inauguration of the Training Center for holding education and training sessions independently to improve the competency of air navigation personnel. AirNav Indonesia has also obtained Certification 143 regarding education and training providers in air navigation, which authorizes companies to organize training centers with their internal teaching staff. We strive to empower and improve human resource competence as our contribution to air navigation in Indonesia.*

## REALIZATION TO TARGET

*The company's performance measurement is based on the KPIs outlined in the management contract. There are 5 (five) indicators adhered to the corporate KPIs, namely economic and social value, business model innovation, technology leadership, increase in investment, and talent development. We observe that overall AirNav Indonesia realized the 2022 Company WPB target, with a KPI score of 98.58%.*

*From the financial perspective, AirNav Indonesia generated EBITDA and cash flow from operating activities (CFO)*



sebesar Rp478,20 miliar dan Rp543,77 miliar, terealisasi 137,33% dan 206,36% apabila dibandingkan target RKAP yang sebesar Rp348,22 miliar dan Rp263,50 miliar. Nilai ROCC-WACC terealisasi 577,85% dari target yang ditetapkan, sementara target *average collection period* terealisasi 30,55% dari target RKAP. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar maskapai belum dapat pulih sepenuhnya dari dampak pandemi COVID-19 di tahun 2022. Oleh karenanya, kami melakukan restrukturisasi piutang dan mitigasi risiko lainnya untuk memperbaiki kinerja rerata periode penagihan.

Sementara pada segi operasional dan sosial, kami mencatat realisasi terhadap ketersediaan fasilitas telekomunikasi penerbangan sebesar 99,25%, serta prosedur PBN untuk Papua dan sekitarnya sebesar 100%. Kami mencatatkan nihil kecelakaan yang melibatkan pelayanan ATS dan telah memenuhi target KPI *safety rate*, dengan realisasi 100,03% dibandingkan target RKAP. Kinerja keselamatan penerbangan tidak terlepas dari dukungan teknologi dan investasi, baik sistem informasi, jaringan, peralatan, dan fasilitas produksi. Adapun realisasi target KPI kepemimpinan teknologi dan peningkatan investasi tercatat sebesar 100%.

Pada sisi tata kelola, kami melakukan penataan dan penyederhanaan organisasi perusahaan, serta penguatan tata kelola dan fungsi manajemen, yang dirumuskan dalam KPI inovasi model bisnis. Tercatat realisasi KPI penataan dan penyederhanaan organisasi perusahaan sebesar 133,33% dan penguatan tata kelola sebesar 100% dari target RKAP. Sementara pada sisi SDM, AirNav Indonesia mendukung pengembangan talenta dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan untuk menduduki jabatan manajemen melalui nominasi talenta. Tercatat realisasi KPI perempuan dan millennial dalam nominasi talenta sebesar 103,20% dan 206,73%.

Meski telah berhasil pulih dan mencatat kinerja operasional dan keuangan yang positif di sepanjang 2022, Perusahaan akan tetap mengelola setiap aspek untuk menjaga kinerja yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, Perusahaan juga mengelola risiko akibat dampak pandemi

of IDR478.20 billion and IDR543.77 billion, a realization of 137.33% and 206.36% compared to the Company WPB targets of IDR348.22 billion and IDR263.50 billion. The ROCC-WACC value was realized at 577.85% of the set target, while the *average collection period* was at 30.55% of the Company WPB target. This happened because most airlines were not fully recovered from the impact of the COVID-19 pandemic in 2022. Therefore, we restructured receivables and other risk mitigation to improve the performance of the *average collection period*.

From the operational and social perspective, we recorded that the realization of the availability of aeronautical telecommunication facilities was at 99.25% and the PBN procedure for Papua and its surroundings was at 100%. We recorded zero accidents involving ATS services and met the KPI *safety rate* target, with a realization of 100.03% compared to the Company WPB target. Aviation safety performance is inseparable from technological support and investment, including information systems, networks, equipment, and production facilities. The realization of the KPI target for technology leadership and increased investment was recorded at 100%.

From the governance perspective, we restructured and simplified the company's organization and strengthened our governance and management functions, which were formulated in the business model innovation KPI. The KPI realization of structuring and simplification of the company's organization was at 133.33% and the company met 100% of the Company WPB target for strengthening governance. From the HR perspective, AirNav Indonesia supported talent development and provided equal opportunities for each employee to occupy management positions through talent nominations. The realization of female and millennial KPIs for the talent nominations was at 103.20% and 206.73% respectively.

Even though it successfully recovered and recorded positive operational and financial performance in 2022, the company will continue to manage every aspect to maintain its sustainable performance. Therefore, the company also manages risks due to the impact of the COVID-19 pandemic, which



COVID-19 yang masih membutuhkan solusi hingga saat ini. Dampak pandemi COVID-19 masih dirasakan oleh AirNav Indonesia di tahun 2022 yaitu penurunan kemampuan keuangan maskapai dalam membayar kewajibannya kepada perusahaan, baik piutang *current* maupun *non current*. Tingkat kolektibilitas maskapai tersebut berdampak pada terganggunya aliran kas masuk perusahaan. Langkah strategis yang diambil Perusahaan untuk memperbaiki kinerja arus kas dan mengurangi kerugian yaitu dengan melakukan efisiensi biaya. Kami mengutamakan program yang bersifat *mandatory*, dan memfokuskan investasi pada kebutuhan penggantian peralatan serta menunda program investasi yang bersifat pengembangan. Kami berupaya meningkatkan pendapatan lain di luar pendapatan PJNP dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset oleh pihak ketiga.

### PROSPEK DAN PROYEKSI KINERJA TAHUN 2023

Kami memandang prospek usaha pelayanan jasa navigasi penerbangan akan terus meningkat di tahun 2023. Peningkatan tersebut sejalan dengan pembukaan pembatasan penerbangan internasional dan pelonggaran syarat penerbangan sesuai Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, No 1 Tahun 2023 tanggal 9 Juni 2023, serta pernyataan World Health Organization (WHO) tentang berakhirnya status kedaruratan COVID-19 pada 5 Mei 2023. Manajemen optimis bahwa tahun 2023 akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Manajemen memproyeksikan pertumbuhan produksi PJNP jelajah dan terminal di tahun 2023 sebesar 357.607.272 *route unit* dan 46.250.250 ton. Sejalan dengan pertumbuhan produksi, pendapatan usaha tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2,92 triliun. Beban usaha tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp2,65 triliun, sementara laba usaha ditargetkan sebesar Rp269 miliar. Adapun asumsi dan perhitungan yang digunakan mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro 2023, sebagaimana disampaikan dalam RKAP tahun 2023.

Pencapaian program kerja di tahun 2023 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, efisien dan efektif, demi memulihkan dan menjaga kondisi keuangan Perusahaan namun tetap memprioritaskan pada peningkatan pelayanan dan keselamatan penerbangan. Adapun program utama AirNav Indonesia tahun 2023 meliputi: transformasi proses bisnis, peningkatan kinerja dan optimalisasi pendapatan non PJNP; mempertahankan dan meningkatkan kualitas keselamatan serta keamanan pelayanan navigasi penerbangan; persiapan pelayanan navigasi penerbangan di atas Kepulauan Riau;

*requires solutions to this date. In 2022, AirNav Indonesia still experienced the impact of the COVID-19 pandemic, namely a decrease in the airline's financial ability to pay its obligations, which are current and non-current receivables, to the company. Airlines' low collectability level disrupted the company's cash inflow. The company conducted cost efficiency as strategic steps to improve its cash flow performance and reduce losses. We prioritized mandatory programs, focused on investment in the needs for equipment replacement, and delayed investment programs targeting Revenue from Air Navigation by optimizing asset utilization by third parties.*

### 2023 PROSPECTS AND PERFORMANCE PROJECTIONS

*We predict that the business prospects for air navigation services will continue to rise in 2023. This increase is in line with the loosening of international flight restrictions and the easing of flight requirements according to the Circular Letter of the Chairperson of the Task Force for Handling COVID-19 No. 1 of 2023 dated June 9, 2023 and the statement of the World Health Organization (WHO) on the end of the COVID-19 emergency status on May 5, 2023. The management is optimistic that 2023 will be better than the previous year.*

*The management projects that En-route navigation services and terminal navigation services will grow to 357,607,272 route units and 46,250,250 tons in 2023. In line with production growth, the operating revenues in 2023 are targeted at IDR2.92 trillion, while the operating expenses in 2023 are projected at IDR2.65 trillion. Meanwhile, the operating profit is targeted at IDR269 billion. These assumptions and calculations refer to the basic macroeconomic assumptions for 2023, as stated in the 2023 Company WPB.*

*In achieving the work programs in 2023, they will follow the principle of prudence, efficiency, and effectiveness to restore and maintain the company's financial condition while prioritizing service improvement and aviation safety. The key programs of AirNav Indonesia in 2023 are business process transformation, performance improvement and optimization of revenues aside from air navigation services; continuation and improvement of the safety and security quality of air navigation services; preparation of air navigation services in Riau Islands; continuation and improvement of the operational service performance and*



mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan operasional dan *cost efficiency*; memaksimalkan penerimaan pembayaran dari pengguna jasa; serta penyesuaian struktur organisasi korporat.

### **PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN**

AirNav Indonesia senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Penerapan GCG diselaraskan dengan tata nilai yang berlaku di lingkup perusahaan dan berlaku bagi seluruh insan perusahaan. AirNav Indonesia memiliki pedoman pelaksanaan GCG, pedoman perilaku, pedoman penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP), pedoman pengendalian gratifikasi, yang senantiasa dimutakhirkan sesuai kebutuhan perusahaan dan regulasi yang berlaku. Adapun AirNav Indonesia telah memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada 14 Oktober 2016.

AirNav Indonesia melakukan penilaian terhadap penerapan GCG setiap tahun, di mana skor penilaian penerapan GCG tahun 2022 tercatat sebesar 89,62 dengan predikat 'Sangat Baik'. AirNav Indonesia senantiasa menindaklanjuti rekomendasi *area of improvement* penerapan kualitas yang diberikan, untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan perusahaan. AirNav Indonesia juga melakukan penilaian Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX) untuk mengukur akuntabilitas BUMN. Adapun di tahun 2022 hasil capaian ICORPAX sebesar 82,93%, dengan kategori 'Sangat Baik'.

Direksi mengelola perusahaan dengan dukungan organ pendukung Direksi, yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan, Biro Perencanaan, Biro Hukum, Biro Pengadaan, dan Satuan Pengawasan Intern. Direksi menilai seluruh organ pendukung telah memberikan kinerja terbaiknya, yang dibuktikan dengan terpenuhinya realisasi target KPI maupun pencapaian rencana kerja manajemen (RKM). Direksi juga menilai Perusahaan telah memiliki sistem pengendalian internal maupun sistem

*cost efficiency; optimization of payment receipts from service users; and adjustments to the corporate organizational structure.*

### **IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE**

*AirNav Indonesia continuously implements good corporate governance (GCG) as its accountability to stakeholders. The implementation of GCG is aligned with the values applied within the company and to all company personnel. AirNav Indonesia has guidelines for implementing GCG, guidelines for behavior, guidelines for the anti-bribery management system implementation, and guidelines for gratification control, which are constantly updated according to company needs and applicable regulations. Meanwhile, AirNav Indonesia received ISO 37001:2016 certification regarding the Anti-Bribery Management System on October 14, 2016.*

*AirNav Indonesia evaluates its GCG every year and its GCG assessment score in 2022 was recorded at 89.62, with the title 'Very Good'. AirNav Indonesia kept following up on recommendations for areas of improvement for the quality provided to improve the GCG quality within the company. AirNav Indonesia was also assessed based on the Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX) to measure SOE accountability. In 2022, the ICORPAX achievement was 82.93%, in the 'Very Good' category.*

*The Board of Directors manages the company with the support of its supporting bodies, namely the Corporate Secretary, Planning Bureau, Legal Bureau, Procurement Bureau, and Internal Control Unit. The Board of Directors assessed that all supporting bodies performed their best, as seen from their realization of KPI targets and the achievement of the Management Work Plan. The Board of Directors also assessed that the Company has an adequate internal control system and risk management system, which ensures that*



manajemen risiko yang memadai, yang memastikan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

#### APRESIASI

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN selaku pemilik modal serta Kementerian Perhubungan selaku kementerian teknis, atas kepercayaan, arahan, dan saran yang diberikan. Kami juga memberikan apresiasi kepada Dewan Pengawas yang senantiasa memberikan nasihat dan pengarahan yang diperlukan dalam pengelolaan perusahaan. Terima kasih kami sampaikan kepada regulator, pengelola, maskapai pengguna jasa, pemasok dan mitra yang telah memberikan kepercayaan kepada AirNav Indonesia.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh Insan AirNav Indonesia atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan selama tahun 2022. Mari terus bersatu dan bersinergi dalam menyongsong kinerja dan masa depan yang lebih baik. Mari terus memberikan layanan navigasi penerbangan terbaik yang berintegritas, mengutamakan keselamatan, inovatif, efisien, serta mendukung praktik lingkungan, sosial, tata kelola (LST) yang berkelanjutan.

*the company's management is aligned with GCG principles.*

#### ACKNOWLEDGMENT

*We would like to thank the Ministry of SOEs as the shareholder and the Ministry of Transportation as the technical ministry for the trust, directions, and advice given. We also appreciate the Supervisory Board for their advice and necessary directions in managing the company. We also thank the regulators, managers, airlines as service users, suppliers, and partners who have trusted AirNav Indonesia.*

*We also express our appreciation to all AirNav Indonesia personnel for their hard work and dedication in 2022. Let's continue uniting and synergizing to welcome a better performance and future. Let's keep providing the best air navigation services with integrity, while prioritizing safety, being innovative and efficient, and supporting sustainable environmental, social, and governance (LST) practices.*

**Jakarta, Juli 2023** | Jakarta, July 2023  
Atas nama Direksi,  
*On behalf of the Board of Directors*

**POLANA BANGUNINGSIH PRAMESTI**

**Direktur Utama**  
*President Director*  
*President Director*





# PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY  
PROFILE





Seluruh insan AirNav Indonesia didorong untuk menerapkan spirit AKHLAK dalam menjalankan tugas demi mewujudkan penerbangan yang aman dan nyaman.  
All AirNav Indonesia personnel are encouraged to live the AKHLAK spirit in performing their duties to achieve safe and comfortable flights.



## Informasi Umum dan Identitas Perusahaan *General Information and Company Identity*



### **NAMA PERUSAHAAN** *Company Name*

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI)

### **PENYEBUTAN** *Brand Name*

AirNav Indonesia

### **STATUS BADAN HUKUM** *Legal Entity Status*

Perusahaan Umum (Perum) / Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



### **TANGGAL PENDIRIAN** *Date of Establishment*

13 September 2012, mulai beroperasi 16 Januari 2013  
*September 13, 2012, started to operate on January 16, 2013*

### **DASAR HUKUM PENDIRIAN** *Legal Basis of Establishment*

- Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2012 tentang Perum LPPNPI
- *Law No. 1 of 2009 on Aviation*
- *Government Regulation (PP) No. 77 of 2012 on Perum LPPNPI*



### **BIDANG USAHA** *Business Line*

Jasa pelayanan navigasi penerbangan  
*Air navigation service*





**JARINGAN LAYANAN**  
*Service Network*

- 2 Area Control Center (ACC)
- 10 APP Surveillance
- 10 APP Procedural
- 15 APP Procedural - Tower (TWR) (Combined)
- 35 TWR
- 11 Aeronautical Information Services (AIS)
- 220 Aerodrome Flight Information Service (AFIS)
- 6 Flight Information Center (FIC)

**PENGELOLAAN NAVIGASI PENERBANGAN**  
*Air Navigation Under Management*



**292** Bandara  
292 airports

**KEPEMILIKAN**  
*Ownership*

Pemerintah Republik Indonesia, 100%  
Government of the Republic of Indonesia, 100%

**JUMLAH MODAL**  
*Total Capital*



Rp2.446.042.977.444 berupa aset peralatan navigasi penerbangan  
IDR2,446,042,977,444 in air navigation assets

**JUMLAH KARYAWAN (SUMBER DAYA MANUSIA)**  
*Total Employees*



**4.922**  
orang, per 31 Desember 2022  
4,922 people as of December 31, 2022

**KANTOR PUSAT**  
*Head Office*

Gedung AirNav Indonesia  
Jl. Ir. H. Juanda No.1  
Tangerang, Banten 15121 Indonesia

Telepon | *Phone*  
+62 21 5591 5000

Faksimile | *Facsimile*  
+62 21 5591 5000

Surel | *Email*  
humas@airnavindonesia.co.id

Situs Web | *Website*  
www.airnavindonesia.co.id





## Riwayat Singkat AirNav Indonesia *Brief History of AirNav Indonesia*



### Sekilas tentang Perum LPPNPI (AirNav Indonesia)

Perum LPPNPI atau AirNav Indonesia berdiri sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan berstandar internasional yang mengutamakan keselamatan dan keamanan penggunaannya. Secara resmi, Perusahaan berdiri pada tanggal 13 September 2012 dan mulai beroperasi sejak tanggal 16 Januari 2013. Adapun dasar hukum pendirian

### *A Glimpse of Perum LPPNPI (AirNav Indonesia)*

*The establishment of Perum LPPNPI or AirNav Indonesia is the embodiment of the commitment of the Indonesia Government to provide international standard flight navigation services that prioritize its users' safety and security. AirNav Indonesia was officially established on September 13, 2012 and the company started its operation on January 16, 2013. The legal basis for the*





Berdiri sejak tahun 2012, AirNav Indonesia berkomitmen untuk selalu menjaga dan meningkatkan keselamatan penerbangan.  
*Established in 2012, AirNav Indonesia is committed to continuously maintaining and improving flight safety.*

perusahaan adalah Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI). Sejak berdiri, Perusahaan belum pernah melakukan pergantian nama.

Terdapat 2 (dua) hal yang melatarbelakangi pendirian AirNav Indonesia, yakni rangkap tugas yang diemban PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero), serta hasil audit *Universal Safety Oversight Audit Program and Safety Performance (USOAP)* tahun 2005 dan ketentuan International Civil Aviation Organization (ICAO) tahun 2007. Selain itu, pengelolaan navigasi penerbangan masih dilakukan secara terpisah oleh bandara unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, pemerintah daerah, pihak swasta, dan militer, dengan perbedaan kebijakan, standar kerja, peralatan, dan fasilitas. Kehadiran AirNav Indonesia sebagai operator tunggal yang secara khusus menangani pelayanan navigasi penerbangan sangat diperlukan untuk mengakomodasi rekomendasi ICAO sekaligus meningkatkan keselamatan penerbangan.

AirNav Indonesia menerima pengalihan pengelolaan navigasi penerbangan dari PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), dan Dirjen Perhubungan Udara pada tanggal 16 Januari 2013. Proses ini ditandai dengan pengalihan pelayanan navigasi penerbangan di 26 bandara, beserta dukungan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan operasionalnya. Selanjutnya, secara bertahap dilakukan pengalihan layanan navigasi penerbangan di sejumlah bandara. Yaitu, pada tahun 2014 sebanyak 193 bandara, tahun 2015 sebanyak 273 bandara, tahun 2016 dan 2017 sebanyak 275 bandara, serta tahun 2018 dan 2019 sebanyak 286 bandara. Sampai dengan akhir tahun 2022, AirNav Indonesia telah memberikan pelayanan navigasi penerbangan sebanyak 292 bandara di seluruh Indonesia sampai dengan akhir tahun pelaporan.

establishment is Law No. 1 of 2009 on Aviation and Government Regulation (PP) No. 77 of 2012 on Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) (Perum LPPNPI). Since its establishment, the Company has never changed its name.

There were 2 (two) reasons behind AirNav Indonesia establishment, namely the dual duties of PT Angkasa Pura I (Persero) and PT Angkasa Pura II (Persero) and the results of the 2005 Universal Safety Oversight Audit Program and Safety Performance (USOAP) and the provisions of the International Civil Aviation Organization (ICAO) in 2007. In addition, air navigation was managed separately among the airport technical implementation units of the Directorate General of Civil Aviation, local governments, private parties, and the military, with different policies, work standards, equipment, and facilities. AirNav Indonesia, as the sole operator of air navigation services, was urgently needed to accommodate ICAO recommendations and improve aviation safety.

The air navigation management from PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), and the Director General of Civil Aviation was transferred to AirNav Indonesia on January 16, 2013. Air navigation services at 26 airports, along with the human resources (HR) and operational equipment, were transferred. Other air navigation services at a number of airports was gradually transferred. In 2014, there were 193 airports and 273 airports in 2015. In 2016 and 2017, there were 275 airports. In 2018 and 2019, there were 286 airports. Until the end of 2022, AirNav Indonesia has provided air navigation services to 292 airports throughout Indonesia by the end of this reporting year.

## Logo Perusahaan Company Logo

Perusahaan menetapkan logo perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.003/ LPPNPI/ III/2013 tentang Identitas Perusahaan. Adapun makna logo perusahaan sebagai berikut:

*The company set forth the company logo based on the Decree of the Board of Directors No. KEP.003/LPPNPI/III/2013 on Company Identity. The meaning of the company logo is as follows.*



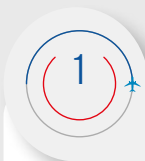
- Garis lengkung berwarna putih melintang ibarat garis lintang yang mengelilingi bumi, melambangkan perusahaan siap berkerja sama dengan semua pemangku kepentingannya.

*A white crossing curved line represents the latitude surrounding the Earth, symbolizing that the company is ready to cooperate with all relevant stakeholders.*



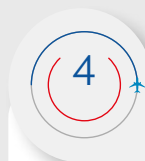
- Tulisan "AirNav" terletak di tengah melambangkan harmoni. Nama "AirNav" ditujukan agar perusahaan lebih mudah dikenal, merupakan kependekan dari *Air Navigation* atau navigasi penerbangan, menunjukkan identitas perusahaan sebagai penyelenggara layanan navigasi penerbangan.

*The word "AirNav" in the middle symbolizes harmony. The name "AirNav" is intended to make the company easier to recognize and is an abbreviation for Air Navigation or air navigation. It represents the company's identity as an air navigation service provider.*



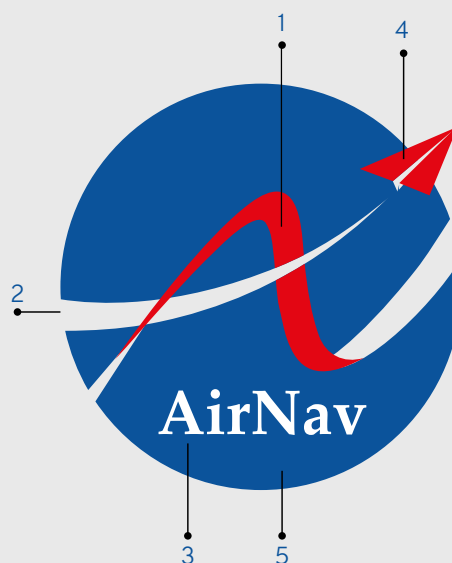
- Pita berwarna merah putih berbentuk huruf "A" dan "N" melambangkan bahwa perusahaan didirikan atas dasar persatuan dan kesatuan serta didedikasikan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*The red and white ribbon in forming the letters "A" and "N" symbolizes that this Company was founded based on unity and is dedicated to the Unitary State of the Republic of Indonesia.*



- Bentuk pesawat kertas berwarna merah putih yang mengudara melambangkan bahwa perusahaan siap membawa Indonesia menuju bangsa yang maju dan disegani oleh dunia internasional.

*A red and white paper airplane in the air symbolizes that the company is ready to support Indonesia towards becoming a developed nation and a respected country among the international community.*



- Latar belakang berbentuk lingkaran solid ibarat bola dunia yang bermakna bahwa perusahaan berkelas dunia, serta warna biru melambangkan keluasan cara berfikir dan bertindak.

*The solid circle background symbolizes a globe, meaning that AirNav is a world-class company, and blue represents open-mindedness and expanded action.*





## Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

### Vision, Mission, and Company Values

#### Visi

Vision



Menjadi penyedia jasa pelayanan navigasi penerbangan bertaraf internasional.

*To become an air navigation service provider with international standard.*

#### Misi

Mission



Menyediakan layanan navigasi penerbangan yang mengutamakan keselamatan, efisiensi penerbangan, dan ramah lingkungan demi memenuhi ekspektasi pengguna jasa.

*To provide environmentally friendly air navigation services, prioritizing safety and comfort to meet users' expectation.*

#### Penetapan Visi dan Misi Perusahaan

Penetapan visi dan misi AirNav Indonesia dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi dengan mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020-2024, dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022.

#### Set Forth of the Company's Vision and Mission

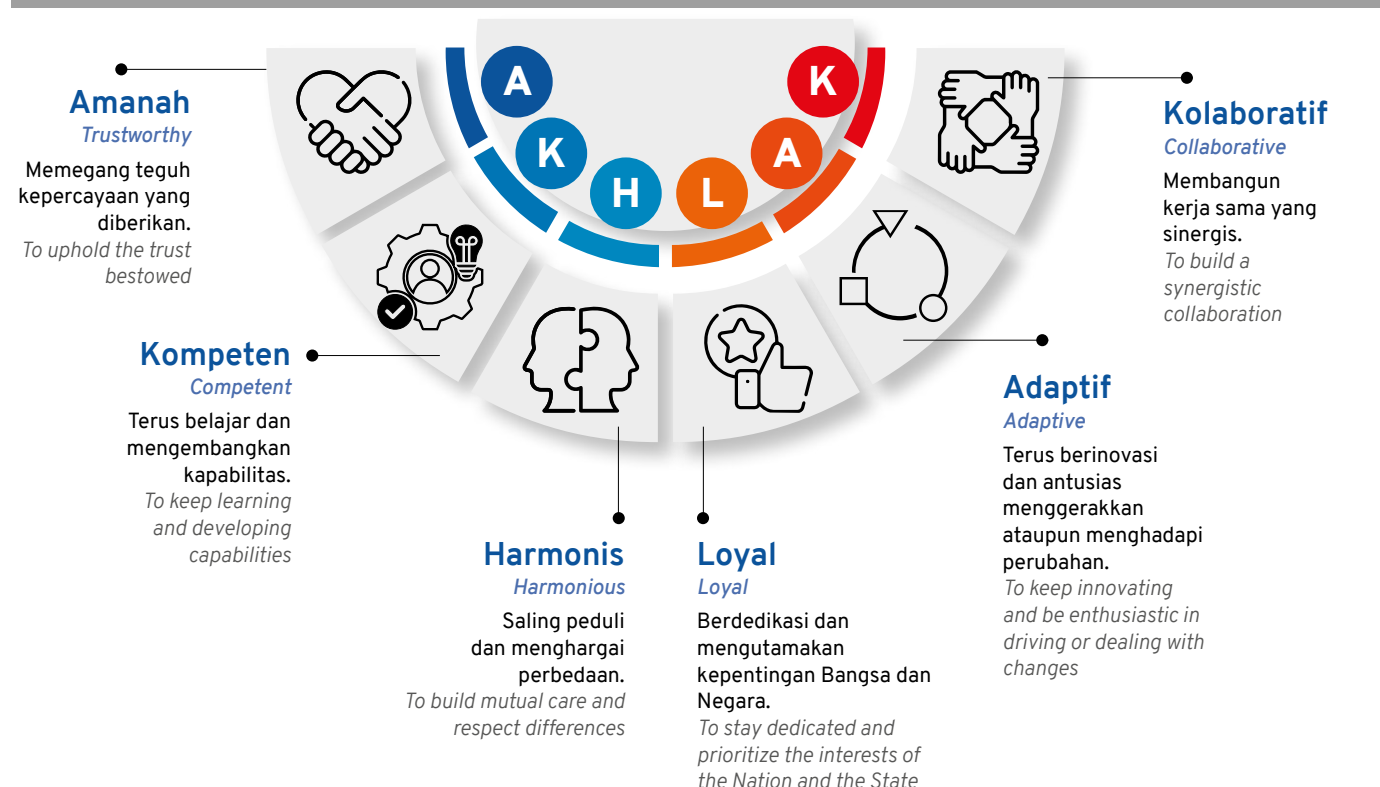
The Supervisory Board and the Board of Directors set forth the vision and mission of AirNav Indonesia with reference to 2020-2024 Long-Term Company Plan and were stated in the 2022 Company Work and Budget Plan (WBP).

#### Nilai Perusahaan

AirNav Indonesia menerapkan nilai perusahaan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian BUMN No.SE-7/MBU/07/2020 tertanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

#### The Company Value

AirNav Indonesia lives its corporate values, following the Circular Letter of Ministry of SOE No.SE-7/MBU/07/2020, dated 1 July, 2020, on Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises.







## Bidang Usaha, Produk dan Jasa *Business Line, Products and Services*

### Kegiatan Usaha sesuai Anggaran Dasar Terakhir dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan

AirNav Indonesia menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pelayanan navigasi penerbangan. Dalam perjalanannya, Perusahaan mengembangkan kegiatan usaha sebagai berikut:

*Business Operations Based on the Latest Articles of Association and Running Business Operations*

*AirNav Indonesia operates business operations in air navigation services. Along its way, the company expanded its business operations.*

1



#### Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang terdiri dari:

- a. Pelayanan pemandu lalu lintas penerbangan;
- b. Pelayanan informasi penerbangan; dan
- c. Pelayanan kesiagaan.

#### *Air Traffic Services, including:*

- a. Air traffic control services;*
- b. Aeronautical information services; and*
- c. Alerting services*

2



#### Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan yang terdiri dari:

- a. Pelayanan aeronautika tetap;
- b. Pelayanan aeronautika bergerak; dan
- c. Pelayanan radio navigasi aeronautika.

#### *Aeronautical Telecommunication Services, including:*

- a. Fixed aeronautical services;*
- b. Mobile aeronautical services; and*
- c. Aeronautical radio navigation services*

3



#### Pelayanan Informasi Aeronautika (PIA) yang terdiri dari:

- a. Pelayanan informasi aeronautika dan peta penerbangan;
- b. Penerbitan dan penyebarluasan Notam (*notice to airmen*); dan
- c. Pelayanan informasi aeronautika bandar udara.

#### *Aeronautical Information Services (AIS), including:*

- a. Aeronautical information and charting services;*
- b. Publication and distribution of NOTAM (notice to airmen); and*
- c. Airport aeronautical information services*

4



#### Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (MET).

AirNav Indonesia berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memberikan layanan informasi meteorologi penerbangan (*Aeronautical Meteorology Service/MET*).

#### *Aeronautical Meteorological Information Services (MET)*

*AirNav Indonesia coordinates with the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency to provide Aeronautical Meteorology Service (MET).*

5



#### Pelayanan Informasi Pencarian dan Pertolongan (SAR).

AirNav Indonesia berkoordinasi dengan Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (BASARNAS) untuk memberikan layanan informasi pencarian dan pertolongan (SAR).

#### *Search and Rescue (SAR) Information Services*

*AirNav Indonesia coordinates with the National Search and Rescue Agency to provide Search and Rescue (SAR) Information Services.*



## Pelayanan Navigasi Penerbangan

AirNav Indonesia mengelola dan melayani navigasi penerbangan di ruang udara Indonesia seluas 7.539.693 km<sup>2</sup>, pasca-penandatanganan kesepakatan bilateral perjanjian *realignment* batas antara FIR Jakarta dan FIR Singapura pada tanggal 25 Januari 2022. Pelayanan navigasi penerbangan di Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya dilakukan FIR Singapura disepakati akan dialihkan ke FIR Jakarta. Kesepakatan tersebut kemudian disahkan oleh Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura.

Adapun FIR Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1 FIR Jakarta, meliputi ruang udara bagian barat Indonesia, yang dikelola oleh Jakarta Air Traffic Services Center (JATSC) beserta unit-unit di bawahnya; dan
- 2 FIR Ujung Pandang, meliputi bagian timur Indonesia, yang dikelola oleh Makassar Air Traffic Services Center (MATSC), beserta unit-unit di bawahnya.

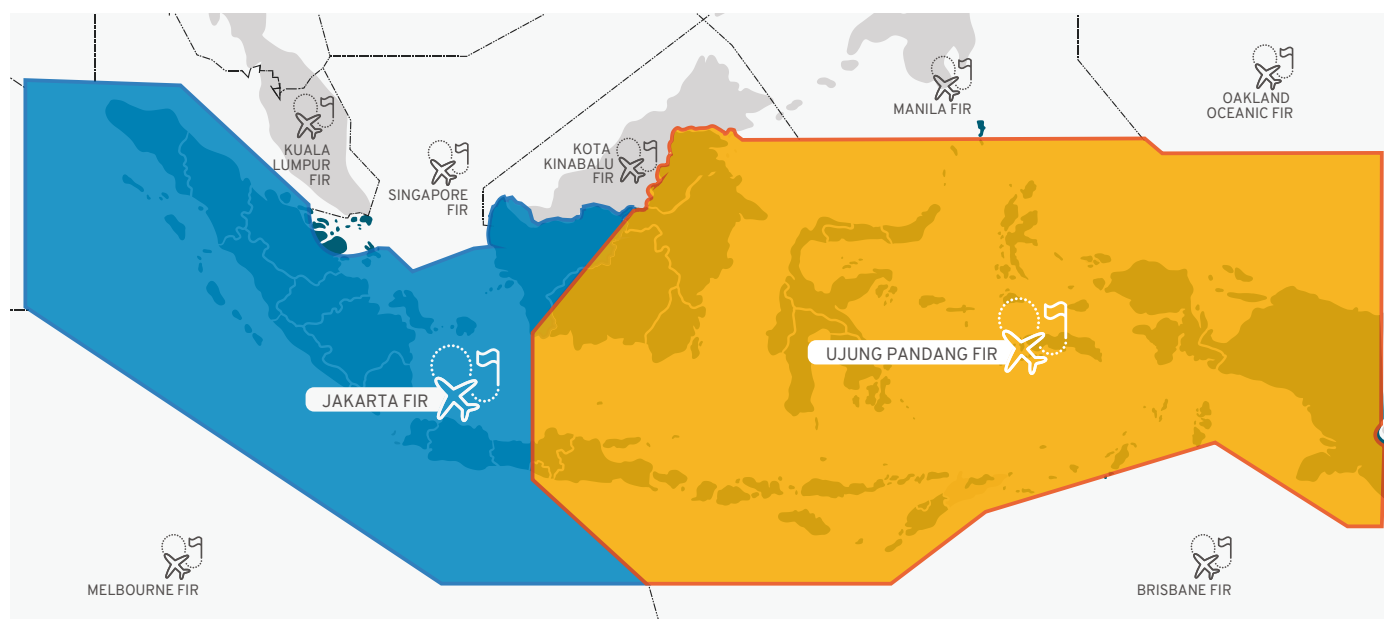
## Air Navigation Services

AirNav Indonesia manages and serves air navigation in Indonesian airspace, covering an area of 7,539,693 km<sup>2</sup>, after the signing of the bilateral agreement on the *realignment* of the boundary between Jakarta FIR and Singapore FIR on January 25, 2022. Previously managed by Singapore FIR, air navigation services in the Riau and Natuna Islands were transferred to the Jakarta FIR. The agreement was ratified by Presidential Regulation No. 109 of 2022 on Ratification of the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore regarding the Alignment of the Boundary between the Jakarta Flight Information Region and the Singapore Flight Information Region.

The Indonesian FIR is divided into two, namely:

- 1 Jakarta FIR, covering the airspace of the western part of Indonesia, which is managed by the Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC) and its units; and
- 2 Ujung Pandang FIR, covering the eastern part of Indonesia, which is managed by the Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), and its units.

**Peta Layanan Navigasi Berdasarkan Ruang Udara**  
Map of Air Navigation Services Based on the Airspace



Ruang udara Indonesia berbatasan langsung dengan sejumlah ruang udara negara lain, di antaranya Australia (Melbourne FIR dan Brisbane FIR), Srilanka (Colombo FIR), Singapura (Singapore FIR), Malaysia (Kuala Lumpur FIR dan Kota Kinabalu FIR), Filipina (Manila FIR), Amerika Serikat (Oakland Oceanic FIR), Papua Nugini (Port Moresby FIR), dan India (Chennai FIR).

*Indonesia's airspace is directly adjacent to Australia (Melbourne FIR and Brisbane FIR), Sri Lanka (Colombo FIR), Singapore (Singapore FIR), Malaysia (Kuala Lumpur FIR and Kinabalu FIR), Philippines (Manila FIR), United States (Oakland FIR), Papua New Guinea (Port Moresby FIR) and India (Chennai FIR).*

Selama tahun 2022, setiap harinya AirNav Indonesia melayani rata-rata 4.210 pergerakan pesawat, baik yang bersifat *take-off* atau *landing* maupun penerbangan lintas (*overflying*) antar negara di ruang udara Indonesia. Jumlah rute penerbangan yang dikelola AirNav Indonesia sebanyak 181 rute yang terdiri atas 117 rute domestik dan 64 rute internasional.

*AirNav Indonesia serves an average of 4,210 aircraft movements daily, including take-off, landing, and international overflights in Indonesian airspace. AirNav Indonesia manages 181 flight routes, including 117 domestic routes and 64 international routes.*

## Sebaran Rute Penerbangan yang Dikelola AirNav Indonesia

*Route Distribution Managed by AirNav Indonesia*

### • ATS RUTE DOMESTIK

*ATS Domestic Route*

Jumlah Rute  
Total Route

**11**

rute di FIR Jakarta & Ujung Pandang  
*routes in Jakarta FIR and Ujung Pandang FIR*

Panjang Rute  
Length of Route

**9.198,3 NM**

Jumlah Rute  
Total Route

**30**

rute di FIR Jakarta  
*routes in Jakarta FIR*

Panjang Rute  
Length of Route

**11.663,8 NM**

Jumlah Rute Domestik  
Total Domestic Routes

**117 ATS**

Panjang Rute (Nautical Miles)  
Length of Route (Nautical Mile)

**48.744,8 NM**

Jumlah Rute  
Total Route

**76**

rute di FIR Ujung Pandang  
*routes in Ujung Pandang FIR*

Panjang Rute  
Length of Route

**27.882,7 NM**

### • ATS RUTE INTERNASIONAL

*ATS International Route*

Jumlah Rute  
Total Route

**7**

rute di FIR Jakarta & Ujung Pandang  
*routes in Jakarta FIR and Ujung Pandang FIR*

Panjang Rute  
Length of Route

**7.715,3 NM**

Jumlah Rute  
Total Route

**33**

rute di FIR Jakarta  
*routes in Jakarta FIR*

Panjang Rute  
Length of Route

**16.355,3 NM**

Jumlah ATS Rute  
Internasional  
Total ATS International Route

**64 ATS**

Panjang Rute (Nautical Miles)  
Length of Route (Nautical Mile)

**38.455,1 NM**

Jumlah Rute  
Total Route

**24**

rute di FIR Ujung Pandang  
*routes in Ujung Pandang FIR*

Panjang Rute  
Length of Route

**14.384,5 NM**



Berdasarkan ruang lingkup operasi, pelayanan navigasi penerbangan dibedakan menjadi *Aerodrome Control Tower (TWR)*, *Approach Control Unit (APP)*, *Area Control Center (ACC)*, *Aerodrome Flight Information Service (AFIS)*, dan *Flight Information Centre (FIC)*. Sementara, berdasarkan prosedur jenis layanan dibedakan atas *Aerodrome Control Tower (TWR)*, *Approach* dan *Area Control Procedural (APP Procedural dan ACC Procedural)*, *Approach Control Surveillance (APS)*, *Area Control Surveillance (ACS)*, serta perpaduan antara TWR dan APP procedural (*combined*). Adapun secara sederhana profil layanan yang diberikan, lokasi, beserta tipikal ruang udara yang dilayani AirNav Indonesia diilustrasikan pada gambar berikut.

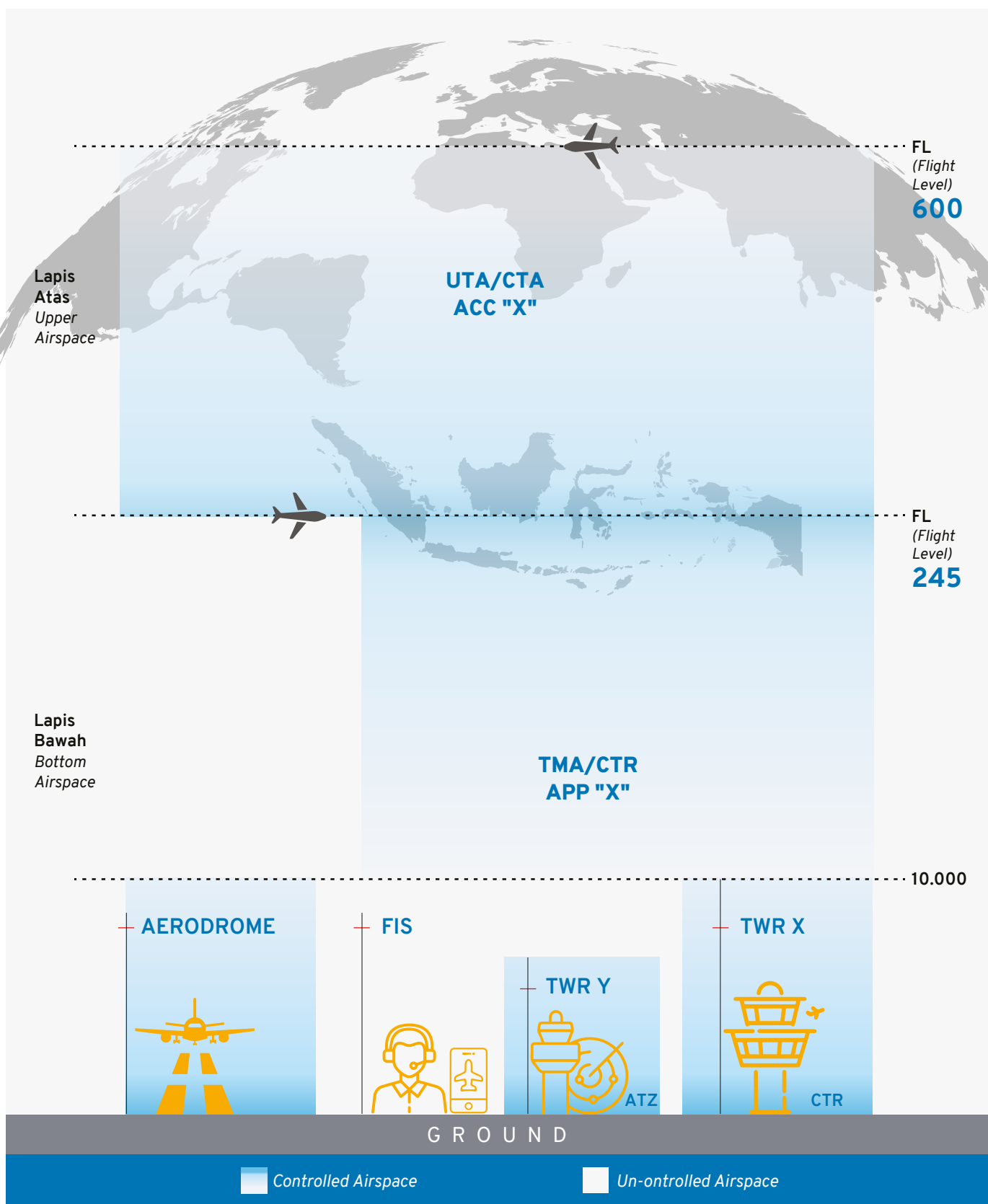
Based on the scope of operations, air navigation services are divided into *Aerodrome Control Tower (TWR)*, *Approach Control Unit (APP)*, *Area Control Center (ACC)*, *Aerodrome Flight Information Service (AFIS)*, and *Flight Information Centre (FIC)*. Meanwhile, based on the type of service procedure, the categories are *Aerodrome Control Tower (TWR)*, *Approach* and *Area Control Procedural (APP Procedural and ACC Procedural)*, *Approach Control Surveillance (APS)*, *Area Control Surveillance (ACS)*, as well as a combination of TWR and APP procedural. The following figure briefly illustrates the services provided, the location, and the typical airspace by AirNav Indonesia.

## Profil Unit Layanan

### Service Unit Profile



**Tipikal Ruang Udara**  
Typical Airspace



## Pengembangan Produk dan Jasa

Perusahaan menetapkan kriteria target yang harus dicapai secara simultan, yakni kinerja keselamatan dengan *Acceptable Level of Safety Performance (ALoSP)* dari rasio 1,43 di tahun 2020 menjadi 1,33 di tahun 2024, dan pemenuhan kepuasan pengguna sesuai kriteria *Preferred Aerodrome/Airspace and Route Specification (PARS)* dan *Preferred Air Traffic Management Service Level (PASL)*. Untuk mencapai target tersebut, Perusahaan menerapkan teknologi navigasi *Aviation System Block Upgrade (ASBU)* yang digagas oleh ICAO. Adapun ASBU diturunkan melalui dokumen *APAC Seamless ANS Plan* yang menjadi rujukan spesifik bagi negara-negara di Asia Pasifik.

Sesuai peta jalan penyelenggaraan navigasi penerbangan, AirNav Indonesia telah menerapkan program pencapaian target *ICAO APAC Seamless ANS Plan*, melalui kegiatan sebagai berikut:

### 1 Pengembangan pelayanan navigasi penerbangan melalui sentralisasi pelayanan *surveillance* pada 12 lokasi *Approach Control Office (APP)*.

Program ini bertujuan untuk menjadikan ruang udara lapis bawah menjadi *seamless* dengan menyeragamkan pelayanan dari prosedur non-radar (*procedural*) menjadi prosedur radar (*surveillance*). Kapasitas ruang udara lapis bawah seolah-olah bertambah dikarenakan jarak minimal antar pesawat dapat direduksi. Dampak program ini akan meningkatkan tingkat keselamatan dan efisiensi operasional penerbangan bagi para pengguna jasa.

AirNav Indonesia telah menerapkan program ini sejak 28 Januari 2021 di dua CTR-TMA yang dikelola oleh Palembang APP yaitu, Pangkal Pinang dan Padang. Dilanjutkan di Bengkulu CTR, Jambi CTR, dan Tanjung Pandan CTR pada 27 Januari 2022, dan akan diimplementasikan secara bertahap sehingga terealisasi seluruhnya pada tahun 2026. Selain itu, AirNav Indonesia juga menyelesaikan sentralisasi pelayanan FIS yang sebelumnya pada 14 lokasi menjadi 6 lokasi.

### 2 Program *User Preferred Route (UPR)*

Program ini merupakan kerja sama dengan International Air Transport Association (IATA) yang bertujuan untuk meningkatkan lalu lintas penerbangan. Melalui UPR, maskapai penerbangan jalur internasional dapat memilih rute penerbangan yang paling efektif dengan spesifikasi tertentu.

## Product and Service Development

The company sets target criteria to be achieved simultaneously. The ratio of safety performance, called *Acceptable Level of Safety Performance (ALoSP)*, gradually changes from 1.43 in 2020 to 1.33 in 2024. Customer satisfaction is evaluated based on the *Preferred Aerodrome/Airspace and Route Specification (PARS)* and *Preferred Air Traffic Management Service Level (PASL)*. To achieve this target, the company implemented navigation technology called *Aviation System Block Upgrade (ASBU)*, initiated by ICAO. ASBU was issued in the *APAC Seamless ANS Plan* for a specific reference for countries in the Asia Pacific.

Following the air navigation roadmap, AirNav Indonesia has implemented programs to achieve the target of the *ICAO APAC Seamless ANS Plan*, through the following activities:

### 1 Development of air navigation services through centralized *surveillance* services at 12 *Approach Control Offices (APP)*

This program aims to make the lower airspace seamless by shifting services from non-radar procedures (*procedural*) to radar procedures (*surveillance*). The capacity of the lower layer airspace seems to increase because the minimum distance between aircraft can be reduced. This program will increase civil aviation safety and efficiency for service users.

This program has been running since January 28, 2021, in two CTR-TMA managed by Palembang APP, namely Pangkal Pinang and Padang. The program was expanded in Bengkulu CTR, Jambi CTR, and Tanjung Pandan CTR on January 27, 2022. The program is expected to be fully operational in all offices by 2026. In addition, AirNav Indonesia has also completed the centralization of FIS from 14 locations to 6 locations.

### 2 *User Preferred Route (UPR)* Program

This program is a collaboration with the International Air Transport Association (IATA), which aims to increase air traffic. Through UPR, airlines of international routes can choose the most effective routes based on certain specifications.



3

**Program Performance Based Navigation (PBN)**  
PBN merupakan program untuk meningkatkan ruang udara lapis atas (*control area* dan *upper control area*), dengan menggunakan *Global Navigation Satellite System* (GNSS). Implementasi PBN dikategorikan menjadi PBN *En-route Domestic*, PBN Terminal dan IAP Domestik serta PBN *En-route* Internasional. Melalui PBN, rute penerbangan semakin pendek, jarak separasi berkurang, dan pilihan fleksibilitas terbang yang beragam, sehingga meningkatkan keselamatan dan berpotensi menghemat pemakaian bahan bakar serta mengurangi emisi CO<sub>2</sub>.

3

**Performance-based Navigation (PBN)**  
*Performance-based Navigation (PBN) is a program to increase upper airspace (control areas and upper control areas). This program uses the Global Navigation Satellite System (GNSS). The implementation is categorized into PBN in Domestic En-route, PBN in Domestic Terminal and IAP, and PBN in International En-Route. PBN shortens flight routes, decreases separation distances, and creates flexible flight options. Thus, safety improves, fuel consumption potentially decreases, and CO<sub>2</sub> emissions can be reduced.*

4

**Peta Penerbangan Digital Airnav Indonesia (Nav Earth)**  
Peta penerbangan digital (Nav Earth) merupakan sebuah aplikasi peta penerbangan digital secara *real time* untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi penerbangan. Selain itu, Nav Earth bertujuan untuk menyediakan peta penerbangan digital yang mudah diakses, praktis, menjangkau seluruh ruang udara Indonesia, dan dapat digunakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

4

**Airnav Indonesia Digital Aeronautical Charts (Nav Earth)**  
*The digital aeronautical chart (Nav Earth) is a real-time digital aeronautical chart application to improve aviation safety and efficiency. Besides that, Nav Earth aims to provide easily accessible and practical digital aeronautical charts that cover all Indonesian airspace and benefit all interested parties.*

## Fasilitas Produksi

### Production Facilities



Pelayanan navigasi udara membutuhkan dukungan peralatan pendukung seperti peralatan komunikasi, navigasi, surveilans, automasi, sistem informasi aeronautika, alat penunjang teknik, serta menara ATC. AirNav Indonesia melakukan peninjauan kapasitas dan kualitas alat, serta melakukan penyesuaian utilitas dan alat produksi secara berkala. Hal tersebut dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas, sekaligus memastikan kualitas kinerja operasional dan keselamatan penerbangan.

*Air navigation services require supporting equipment, such as telecommunication equipment, navigation equipment, surveillance equipment, automation, aeronautical information systems, technical support tools, and ATC towers. AirNav Indonesia reviews the equipment capacity and quality and periodically adjusts utilities and production equipment. Therefore, efficiency, effectiveness, the quality of operational performance, and civil aviation safety can be assured.*



**Fasilitas Produksi**  
Production Facilities

URAIAN Description	2022	2021	2020
<b>Komunikasi/ Communication</b>			
VHF AG	785	785	774
Major World Air Route Area (MWARA)	2	2	5
Regional and Domestic Air Route Area (RDARA)	15	15	15
HF SSB	73	73	143
ATIS	48	48	40
Voice Recording	144	144	142
VCSS	26	26	24
AMSC	-	41	78
AMHS	-	2	2
CPDLC	1	1	1
Teleprinter	-	-	-
Jumlah Komunikasi/ Total Telecommunication	1.094	1.137	1.224
<b>Navigasi/ Navigation</b>			
NDB	51	58	75
DVOR	77	79	79
DME	77	80	80
ILS	44	43	43
Jumlah Navigasi/ Total Navigation	249	261	277
<b>Surveilans/ Surveillance</b>			
Primary Surveillance Radar (PSR)	1	1	2
Secondary Surveillance Radar (SSR)	-	-	-
Monopulse & Secondary Surveillance Radar (MSSR)	28	28	27
Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS -B)	49	49	32
Jumlah Surveilans/ Total Surveillance	78	78	61
<b>Automasi/ Automation - ATC Automation System</b>			
	58	15	15
<b>Sistem Informasi Aeronautika/ Aeronautical Information System</b>			
IAIS	11	21	21
Notam System	1	1	1
Jumlah Sistem Informasi Aeronautika/ Total Aeronautical Information System	12	22	22
<b>Alat Penunjang Teknik/ Technical Support Tool</b>			
Genset/ Generator Set	231	231	206
Trafo / Transformer	65	65	61
UPS	564	564	546
Jumlah Alat Penunjang Teknik/ Total Technical Support Tools	860	860	813
<b>Menara ATC/ ATC Towers</b>			
	142	142	124
<b>Jumlah Alat Produksi/ Total Production Equipment</b>			
	<b>2.493</b>	<b>2.515</b>	<b>2.536</b>



## Wilayah Operasi Operational Area

**A**irNav Indonesia mengelola navigasi penerbangan di seluruh Indonesia melalui 292 jaringan kantornya. Wilayah operasional Perusahaan mencakup 1 wilayah *military controlled area* di Yogyakarta, 56 wilayah *aerodrome traffic zones* (ATZ), 92 wilayah *flight information zones* (FIZ), dan 125 wilayah *aeronautical zones* (AZ) lainnya.

**A**irNav Indonesia operates 292 offices to cover air navigation across the nation. The company's operational areas cover 1 *military controlled area* in Yogyakarta, 56 *aerodrome traffic zones* (ATZ), 92 *flight information zones* (FIZ), and 125 other *aeronautical zones* (AZ).

## Jaringan Kantor Office Network

KANTOR PELAYANAN Services Office	JUMLAH LOKASI Total Location
Kantor Pusat/ <i>Head Office</i>	1
Kantor Cabang Utama <i>Main Branch Office</i>	2
Kantor Cabang/ <i>Branch Office</i>	28
Kantor Cabang Pembantu <i>Sub-Branch Office</i>	34
Kantor Pelayanan Informasi Aeronautika (PIA)/ <i>Aeronautical Information Services (AIS) Office</i>	1
Kantor Unit Pelayanan Navigasi Penerbangan/ <i>Air Navigation Services Unit Office</i>	229
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>292</b>



**Peta Sebaran Kantor Cabang dan Cabang Pembantu**  
*Distribution of Branch Offices and Sub-branch Offices*



**KANTOR CABANG**  
Branch Offices

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. JATSC           | 15. Bandung      |
| 2. MATSC           | 16. Semarang     |
| 3. Medan           | 17. Banjarmasin  |
| 4. Palembang       | 18. Palangkaraya |
| 5. Yogyakarta      | 19. Tarakan      |
| 6. Surabaya        | 20. Manado       |
| 7. Denpasar        | 21. Kendari      |
| 8. Balikpapan      | 22. Lombok       |
| 9. Sentani         | 23. Kupang       |
| 10. Pontianak      | 24. Ambon        |
| 11. Banda Aceh     | 25. Wamena       |
| 12. Pekanbaru      | 26. Nabire       |
| 13. Tanjung Pinang | 27. Sorong       |
| 14. Halim          | 28. Merauke      |



**KANTOR CABANG PEMBANTU**  
Sub-branch Offices

- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Palu           | 18. Rengat                  |
| 2. Luwuk          | 19. Padang                  |
| 3. Gunung Sitoli  | 20. Curug                   |
| 4. Pangkal Pinang | 21. Cirebon                 |
| 5. Jambi          | 22. Pangkalan Bun           |
| 6. Banyuwangi     | 23. Sampit                  |
| 7. Malang         | 24. Malinau                 |
| 8. Sumenep        | 25. Ternate                 |
| 9. Labuan Bajo    | 26. Gorontalo               |
| 10. Samarinda     | 27. Bima                    |
| 11. Berau         | 28. Sumbawa                 |
| 12. Biak          | 29. Ende                    |
| 13. Oksibil       | 30. Tual, Karel Sadsuitubun |
| 14. Timika        | 31. Manokwari               |
| 15. Ketapang      | 32. Tanah Merah             |
| 16. Bengkulu      | 33. Batam                   |
| 17. Solo          | 34. Natuna                  |



Informasi rinci tentang alamat dan kontak kantor cabang AirNav Indonesia dapat diakses melalui situs web Perusahaan dengan alamat [www.airnavindonesia.co.id](http://www.airnavindonesia.co.id)

*Detail information on the address and contact of AirNav Indonesia branch offices is available on [www.airnavindonesia.co.id](http://www.airnavindonesia.co.id)*





# Struktur Organisasi Corporate Structure

## DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS



**POLANA BANGUNINGSIH PRAMESTI**

Direktur Utama  
President Director



**MOKHAMMAD KHATIM**

Direktur Operasi  
Director of Operations



**AHMAD NURDIN AULIA**

Direktur Teknik  
Director of Engineering



**BAMBANG RIANTO**

Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi  
Director of Safety, Security & Standardization

**Setio Anggoro**

Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Navigasi Penerbangan  
Division Head of Planning & Development of Air Navigation Service

**Yasrul**

Kepala Divisi Pengendalian Pelayanan Navigasi Penerbangan  
Head Division of Controlling of Air Navigation Service

**Hermana Soegijantoro**

Kepala Divisi Data dan Evaluasi Pelayanan Navigasi Penerbangan  
Head Division of Data & Evaluation of Air Navigation Service

**Made Gede Nugraha Dewantara**

Kepala Divisi Teknik Desain dan Rekayasa  
Head Division of Technical & Engineering Design

**Widiyanto**

Kepala Divisi Kesiapan Fasilitas Teknik  
Head Division of Technical Facilities Readiness

**Manshuri**

PT Kepala Divisi Manajemen Data dan Logistik  
Head Division of Data Management & Logistic

**Novy Pantaryanto**

Kepala Divisi Keselamatan & Jaminan Kualitas  
Head Division of Safety and Quantity Assurance

**Suwandi**

Kepala Divisi Standardisasi & Sertifikasi Navigasi Penerbangan  
Head Division of Standardization & Certification Air Navigation

**Rizwan Noor Hasfrian**

Kepala Divisi Keamanan, Kesehatan & Lingkungan Kerja  
Head Division of Security, Health & Work Environment

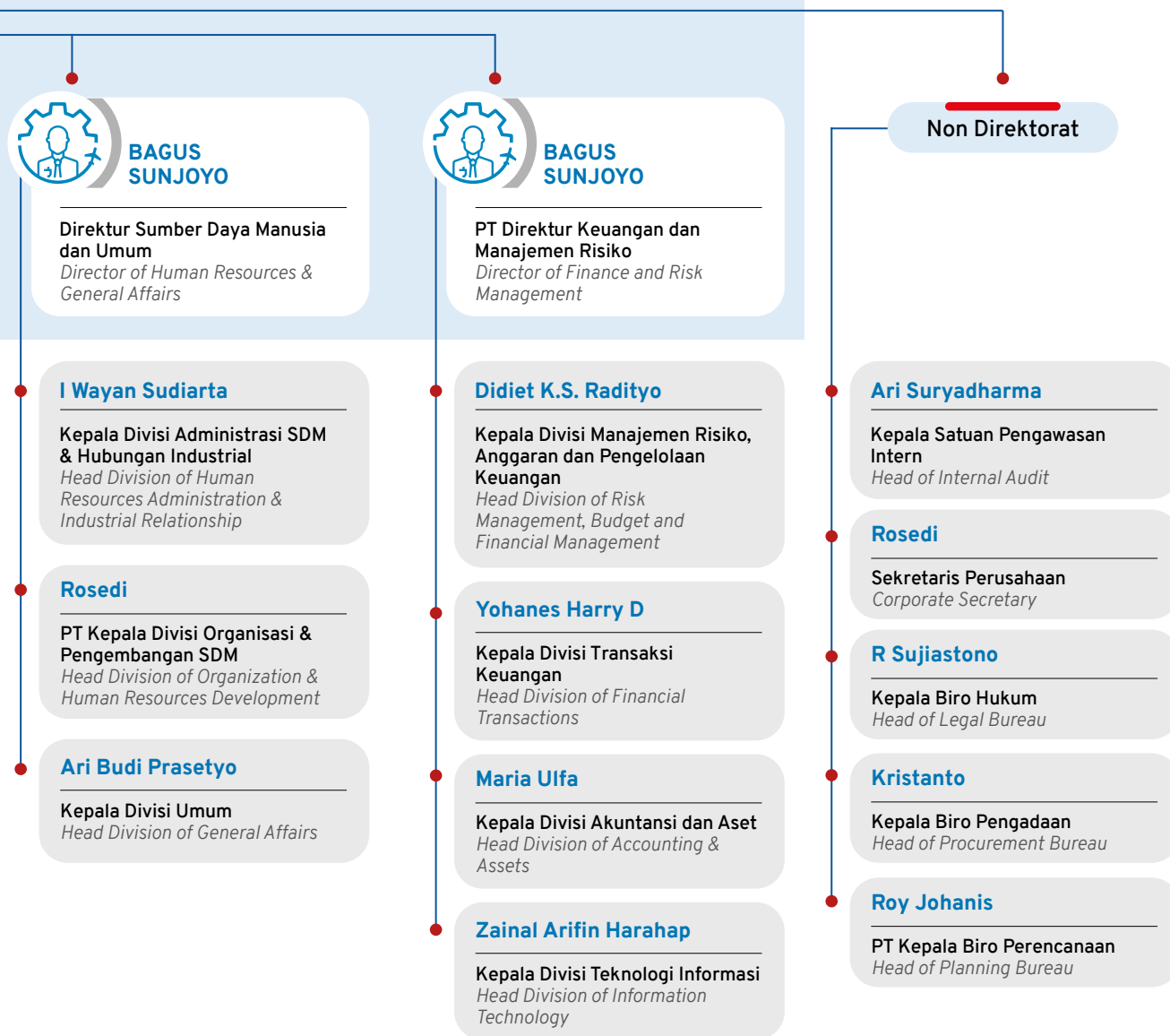
## HEAD OFFICE

Branch Office



Struktur organisasi Perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi No. PER.009/LPPNPI/IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Pusat.

The corporate structure refers to Board of Directors Regulation No. PER.009/LPPNPI/IX/2022, dated 1 September 2022 on Organization and Management of the Head Office of Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.







## Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri *List of Industry Association Membership*

**A**irNav Indonesia turut berpartisipasi dalam asosiasi penerbangan internasional. Melalui keanggotaan asosiasi, Perusahaan mendapatkan informasi terkini berupa pengetahuan, praktik penerapan teknologi terbaru, dan regulasi yang berlaku dalam industri navigasi penerbangan. Perusahaan juga terlibat dalam pembuatan panduan dan manual untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan penerbangan di kawasan regional maupun internasional. Adapun sebagai anggota Perusahaan berkontribusi membayar iuran keanggotaan rutin dalam asosiasi, dan tidak berpartisipasi dalam proyek penyediaan dana substantif.

**A**irNav Indonesia participates in international aviation associations. From the association, the company obtains the latest information on the air navigation industry, such as knowledge, practices for state-of-art technology, and applicable regulations. The company contributes to guidelines and manual preparation to improve air navigation services and aviation safety regionally and internationally. As a member, the company contributes regular membership fees to the association and does not provide substantive funding.

### Keanggotaan dalam Asosiasi *AirNav Indonesia Memberships*

NAMA ASOSIASI <i>Association</i>	POSISI <i>Status</i>
 <b>International Civil Aviation Organization (ICAO)</b>	<b>Anggota</b> <i>Member</i>
 <b>The Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO)</b>	<b>Anggota</b> <i>Member</i>





## Profil Dewan Pengawas Supervisory Board Profile

**D**ewan Pengawas AirNav Indonesia terdiri dari 5 (lima) orang anggota dengan seorang di antaranya menjabat sebagai ketua. Masa jabatan Dewan Pengawas selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Terdapat pergantian komposisi Dewan Pengawas yang disebabkan rotasi/promosi atas kebutuhan perusahaan.

**T**he Supervisory Board of AirNav Indonesia consists of 5 (five) members, with one serving as chairperson. The tenure of the Supervisory Board is for five years, but the members can be re-elected for the next term. There is a change in the composition of the Supervisory Board due to rotation/promotion based on the company's needs.



ELFI AMIR | TRI WAHYUNINGSIH RETNO MULYANI | NOVIE RIYANTO R. | DARYATMO | ENDRA GUNAWAN

### Komposisi Dewan Pengawas 2022 Supervisory Board Composition in 2022

DEWAN PENGAWAS PER 1 JANUARI <i>Supervisory Board as of January 1</i>	JABATAN <i>Position</i>	DEWAN PENGAWAS PER 31 DESEMBER <i>Supervisory Board as of December 31</i>
Novie Riyanto R.	Ketua/ <i>Chairperson</i>	Novie Riyanto R.
Elfi Amir	Anggota/ <i>Member</i>	Sigit Hani Hadiyanto
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani	Anggota/ <i>Member</i>	Tri Wahyuningsih Retno Mulyani
Daryatmo	Anggota/ <i>Member</i>	Daryatmo
Anindita Eka Wibisono	Anggota/ <i>Member</i>	Endra Gunawan



**NOVIE RIYANTO R.**

**Ketua Dewan Pengawas**

*Chairperson of the Supervisory Board*



**Masa Jabatan**

*Tenure*

**20 Maret 2020 s.d 16 Februari 2023**

*March 20, 2020 to February 16, 2023*

**Periode Jabatan**

*Appointment Period*

**Periode pertama**

*First period*

**Kewarganegaraan**

*Citizenship*

**WNI**

*Indonesian*

**Usia**

*Age*

**56 tahun**

*56 years old*

**Domisili**

*Domicile*

**Tangerang, Banten**



<p><b>Dasar Hukum Penunjukan</b> <i>Legal Basis of Appointment</i></p>	<p>SK Menteri BUMN No. SK-89/MBU/03/2020 tanggal 20 Maret 2020</p>	<p><i>The Minister of SOE Decree No. SK-89/MBU/03/2020, dated March 20, 2020</i></p>
<p><b>Pendidikan</b> <i>Education</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✈ Magister (S2) bidang <i>Aeronautical Exploitation</i> dari <i>Ecole Nationale de L'aviation Civile</i> (ENAC), Toulouse, Prancis (1998).</li> <li>✈ Sarjana (S1) Teknik Geodesi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1991).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✈ <i>Master's in aeronautical exploitation at the Ecole Nationale de L'aviation Civile</i> (ENAC), Toulouse, France (1998)</li> <li>✈ <i>Bachelor's in geodetic engineering at Gadjah Mada University, Yogyakarta</i> (1991)</li> </ul>
<p><b>Riwayat Profesi</b> <i>Professional History</i></p>	<p>Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas, Beliau merupakan Direktur Utama Perusahaan yang diangkat pada 2 Maret 2017. Beliau memulai karier dalam dunia penerbangan sipil khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai Kepala Standardisasi Bagian Navigasi Penerbangan, Direktorat Keselamatan Penerbangan (2001-2006); Deputi Direktur Sistem dan Tata Cara Navigasi Penerbangan, Direktorat Keselamatan Penerbangan (2006-2009); Deputi Direktur Standardisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan (2009-2014); Kepala Daerah Kewenangan II Medan (2014-2015); dan Direktur Navigasi Penerbangan, Kementerian Perhubungan (2015-2016). Beliau juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2020-2023).</p>	<p><i>Before serving as Chairperson of the Supervisory Board, he was the Company President Director appointed on March 2, 2017. He started his career in the world of civil aviation, especially within the Ministry of Transportation as Head of Standardization for Air Navigation Division at the Directorate of Civil Aviation Safety (2001-2006), Deputy Director of Air Navigation Systems and Procedures at the Directorate of Air Navigation Safety (2006-2009), Deputy Director of Standardization and Certification of Air Navigation at Directorate of Air Navigation (2009-2014), Head of Regional Authority II Medan (2014-2015), and Director of Air Navigation at Ministry of Transportation (2015-2016). He also serves as Director General of Civil Aviation at the Ministry of Transportation (2020-present).</i></p>
<p><b>Rangkap Jabatan</b> <i>Concurrent Position</i></p>	<p>Direktur Jenderal Perhubungan Udara</p>	<p><i>Directorate General of Civil Aviation</i></p>
<p><b>Hubungan Afiliasi</b> <i>Affiliation</i></p>	<p>Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya maupun dengan Direksi. Namun, Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemilik Modal Perusahaan, Pemerintah Indonesia, melalui rangkap jabatan pada Kementerian Perhubungan selaku kementerian teknis.</p>	<p><i>He has no affiliation with other Supervisory Boards or the Board of Directors. However, he is affiliated with the Government of Indonesia as the Company's Shareholder through his concurrent position at the Ministry of Transportation as the technical ministry.</i></p>





**SIGIT HANI HADIYANTO**

Anggota Dewan Pengawas  
Supervisory Board Member

■ <b>Masa Jabatan</b> <i>Tenure</i>	31 Agustus 2022-30 Agustus 2027 <i>August 31, 2022 to August 30, 2027</i>
■ <b>Periode Jabatan</b> <i>Appointment Period</i>	Periode pertama <i>First period</i>
■ <b>Kewarganegaraan</b> <i>Citizenship</i>	WNI <i>Indonesian</i>
■ <b>Usia</b> <i>Age</i>	48 tahun <i>48 years old</i>
■ <b>Domisili</b> <i>Domicile</i>	Jakarta
■ <b>Dasar Hukum Penunjukan</b> <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK Menteri BUMN No. SK-187/MBU/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 <i>The Minister of SOE Decree No. SK-187/MBU/08/2022, dated August 31, 2022</i>

**Pendidikan**  
*Education*

- ✈ DII Penerbang PLP Curug-Tangerang
- ✈ S1 Manajemen Universitas Terbuka (2003)
- ✈ S2 Master Transportasi UPN Veteran (2009)
- ✈ Three-Year Diploma in aviator at Indonesia Aviation Polytechnic in Curug, Tangerang
- ✈ Bachelor's in Management at Open University (2003)
- ✈ Master's in transportation at UPN Veteran (2009)

**Riwayat Profesi**  
*Professional History*

- ✈ Direktur Navigasi Penerbangan (2021-sekarang)
- ✈ Kasubdit Teknik Navigasi Penerbangan Direktorat Navigasi Penerbangan (Maret-September 2021)
- ✈ Kasubdit Operasi Pesawat Udara (2019-2021) dan Kasubdit Standar (2018-2019) pada Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.
- ✈ Kepala Balai Kesehatan Penerbangan (2018)
- ✈ Director of Air Navigation (2021 – present)
- ✈ Subdivision Head of Air Navigation Engineering at Directorate of Air Navigation (March – September 2021)
- ✈ Subdivision Head of Aviation Operations (2019–2021) and Subdivision Head of Standard (2018–2019) at Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations
- ✈ Head of Aviation Health Agency (2018)

**Rangkap Jabatan**  
*Concurrent Position*

Direktur Navigasi Penerbangan *Director of Air Navigation*

**Hubungan Afiliasi**  
*Affiliation*

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya maupun dengan Direksi. Namun, Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemilik Modal Perusahaan, Pemerintah Indonesia, melalui rangkap jabatan pada Kementerian Perhubungan selaku kementerian teknis.

*He has no affiliation with other Supervisory Boards or the Board of Directors. However, he is affiliated with the Government of Indonesia as the Company's Shareholder through his concurrent position at the Ministry of Transportation as the technical ministry.*





**TRI WAHYUNINGSIH  
RETNO MULYANI**

Anggota Dewan Pengawas  
Supervisory Board Member

■ <b>Masa Jabatan</b> <i>Tenure</i>	30 Mei 2018 s.d 29 Mei 2023 <i>May 30, 2018 to May 29, 2023</i>
■ <b>Periode Jabatan</b> <i>Appointment Period</i>	Periode pertama <i>First period</i>
■ <b>Kewarganegaraan</b> <i>Citizenship</i>	WNI <i>Indonesian</i>
■ <b>Usia</b> <i>Age</i>	57 tahun <i>57 years old</i>
■ <b>Domisili</b> <i>Domicile</i>	Jakarta
■ <b>Dasar Hukum Penunjukan</b> <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK Menteri BUMN No. SK-145/MBU/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 <i>The Minister of SOE Decree No.SK-145/MBU/05/2018 dated May 30</i>

**Pendidikan**  
*Education*

- ✈ Magister Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2004)
- ✈ Sarjana Hukum dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (1989)

- ✈ *Master's in law at Catholic Parahyangan University, Bandung (2004)*
- ✈ *Bachelor's in law at Jenderal Sudirman University, Purwokerto (1989)*

**Riwayat Profesi**  
*Professional History*

- ✈ Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat (2017-sekarang)
- ✈ Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara (2016-2017)
- ✈ Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur (2014- 2016)

- ✈ *Director of Law and Public Relations (2017-present)*
- ✈ *Researcher in Optimization of State Assets (2016-2017)*
- ✈ *Head of East Kalimantan Regional Office at the Directorate General of State Assets Management (2014-2016)*

**Rangkap Jabatan**  
*Concurrent Position*

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan

*Director of Law and Public Relations at the Directorate General of State Assets Management of the Ministry of Finance*

**Hubungan Afiliasi**  
*Affiliation*

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya maupun dengan Direksi. Namun, Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemilik Modal Perusahaan, Pemerintah Indonesia, melalui rangkap jabatan pada Kementerian Keuangan.

*She has no affiliation with other Supervisory Boards or the Board of Directors. However, she is affiliated with the Government of Indonesia as the Company's Shareholder through his concurrent position at the Ministry of Transportation as the technical ministry.*



**DARYATMO**

Anggota Dewan Pengawas  
Supervisory Board Member

■ <b>Masa Jabatan</b> <i>Tenure</i>	8 Januari 2019 s.d 7 Januari 2024 <i>January 8, 2019 to January 7, 2024</i>
■ <b>Periode Jabatan</b> <i>Appointment Period</i>	Periode pertama <i>First period</i>
■ <b>Kewarganegaraan</b> <i>Citizenship</i>	WNI <i>Indonesian</i>
■ <b>Usia</b> <i>Age</i>	67 tahun <i>67 years old</i>
■ <b>Domisili</b> <i>Domicile</i>	Bogor, Jawa Barat
■ <b>Dasar Hukum Penunjukan</b> <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK Menteri BUMN No. SK-14/MBU/01/2019 tanggal 8 Januari 2019 <i>The Minister of SOE Decree No. SK-14/MBU/01/2019 dated January 8, 2019</i>

**Pendidikan**  
*Education*

- ✈ Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Terbuka Kota Tangerang Selatan (1999)
- ✈ Program Pendidikan Reguler Angkatan Lemhannas (2005)
- ✈ Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (1999)
- ✈ Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (1994)
- ✈ Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (1987)
- ✈ Pendidikan Akademi Angkatan Udara (1978)
- ✈ Bachelor's in political science at the Open University of South Tangerang City (1999)
- ✈ Regular Education Program of the National Defense Institute (2005)
- ✈ Staff and Command School of the Indonesian National Armed Forces (1999)
- ✈ Air Force Staff and Command School (1994)
- ✈ Air Force Unit Command School (1987)
- ✈ Air Force Academy (1978)

**Riwayat Profesi**  
*Professional History*

Berkarier di TNI Angkatan Udara (AU), dengan beberapa jabatan yang pernah diemban adalah Pati Mabes AU (2013), Kasum TNI (2012-2013), KaBasarnas (2011-2012), Aspers Panglima TNI (2010-2011), Dankodikau (2009-2010), Kadis Persau (2007-2009), dan Kadispen AU (2006-2007).

*He made his career at Indonesian Air Force and served at several positions, such as General at Pati Air Force Headquarters (2013), Chief of General Staff of the Indonesian Armed Forces (2012-2013), Head of the National Search and Rescue Agency (2011-2012), Chief of Personnel Staff, Commander of the Indonesian Armed Forces (2010-2011), Head of the Air Force Education Command (2009-2010), Head of the Air Force Personnel Service (2007-2009), Head of the Air Force Information Service (2006-2007).*

**Rangkap Jabatan**  
*Concurrent Position*

Tidak memiliki rangkap jabatan.  
*He has no concurrent position.*

**Hubungan Afiliasi**  
*Affiliation*

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya maupun dengan Direksi.  
*He has no affiliation with other members of the Supervisory Boards or the Board of Directors.*





**ENDRA GUNAWAN**  
Anggota Dewan Pengawas  
Supervisory Board Member

■ <b>Masa Jabatan</b> <i>Tenure</i>	17 Mei 2022 s.d 16 Mei 2027 <i>May 17, 2022 to May 16, 2027</i>
■ <b>Periode Jabatan</b> <i>Appointment Period</i>	Periode pertama <i>First period</i>
■ <b>Kewarganegaraan</b> <i>Citizenship</i>	WNI <i>Indonesian</i>
■ <b>Usia</b> <i>Age</i>	40 tahun <i>40 years old</i>
■ <b>Domisili</b> <i>Domicile</i>	Jakarta
■ <b>Dasar Hukum Penunjukan</b> <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK Menteri BUMN No. SK-117/MBU/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 <i>The Minister of SOE Decree . SK-117/MBU/05/2022 dated May 17, 2022</i>

**Pendidikan**  
*Education*

- ✈ Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia (2011)
- ✈ Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Indonesia (2011)
- ✈ Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (2007)

- ✈ *Master's in economy at University of Indonesia (2011)*
- ✈ *Professional Accounting Education at University of Indonesia (2011)*
- ✈ *Bachelor's in accounting at University of Indonesia (2007)*

**Riwayat Profesi**  
*Professional History*

Berkarier di Kementerian BUMN sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung.

*He made his career in the Ministry of SOE as an Assistant Deputy of Tourism and Supporting Services.*

**Rangkap Jabatan**  
*Concurrent Position*

Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung.

*Assistant Deputy of Tourism and Supporting Services*

**Hubungan Afiliasi**  
*Affiliation*

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya maupun dengan Direksi.

*He has no affiliation with other members of the Supervisory Boards or the Board of Directors.*



## Profil Direksi Board of Directors Profile

**D**ireksi AirNav Indonesia terdiri dari 6 (enam) orang anggota dengan seorang di antaranya menjabat sebagai Direktur Utama. Masa jabatan Direksi selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Terdapat pergantian komposisi Direksi yang disebabkan oleh rotasi / promosi atas kebutuhan perusahaan.

**T**he Board of Directors of AirNav Indonesia consists of 6 (six) members, including the President Director. The tenure of the Board of Directors is for five years. They can be re-elected for the next period. There is a change in the composition of the Board of Directors due to rotation/promotion based on the company's needs.

### Komposisi Direksi 2022 Board of Directors Composition in 2022

DIREKSI PER 1 JANUARI <i>The Board of Directors as of January 1</i>	JABATAN <i>Position</i>	DIREKSI PER 31 DESEMBER <i>The Board of Directors as of December 31</i>
Mohamad Pramintohadi Sukarno	Direktur Utama <i>President Director</i>	Polana Banguningsih Pramesti
Mokhammad Khatim	Direktur Operasi <i>Director of Operations</i>	Mokhammad Khatim
Bambang Rianto	Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standardisasi <i>Director of Safety, Security, and Standardization</i>	Bambang Rianto
Ahmad Nurdin Aulia	Direktur Teknik <i>Director of Engineering</i>	Ahmad Nurdin Aulia
Bagus Sunjoyo	Direktur SDM dan Umum <i>Director of HR and GA</i>	Bagus Sunjoyo
Hendroyono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance and Risk Management</i>	Bagus Sunjoyo





**Seperti garis di langit yang tak terlihat, keberhasilan kami bersumber dari kolaborasi yang kuat dan visi yang jelas untuk menghadirkan layanan terbaik bagi penerbangan Indonesia.**

*Like the ecliptic, our success stems from a strong collaboration and a clear vision to provide the best service for Indonesian aviation.*



MOKHAMMAD  
KHATIM

POLANA  
BANGUNINGSIH  
PRAMESTI

BAMBANG  
RIANTO

AHMAD NURDIN  
AULIA

BAGUS  
SUNJOYO



**POLANA BANGUNINGSIH PRAMESTI**

Direktur Utama  
President Director

■ <b>Masa Jabatan</b> <i>Tenure</i>	21 Januari 2022 s.d 20 Januari 2027 <i>January 21, 2022 to January 20, 2027</i>
■ <b>Periode Jabatan</b> <i>Appointment Period</i>	Periode pertama <i>First period</i>
■ <b>Kewarganegaraan</b> <i>Citizenship</i>	WNI <i>Indonesian</i>
■ <b>Usia</b> <i>Age</i>	61 tahun <i>61 years old</i>
■ <b>Domisili</b> <i>Domicile</i>	Jakarta
■ <b>Dasar Hukum Penunjukan</b> <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK Menteri BUMN No. SK-28/MBU/01/2022 tanggal 21 Januari 2022 <i>The Minister of SOE Decree No. SK-28/MBU/01/2022 dated January 21, 2022</i>

**Pendidikan**  
*Education*

- ✈️ *Post Graduation Diploma in Aerodrome Engineering di Singapore Aviation Academy and Nanyang University (1996)*
- ✈️ *Master Transportasi dari Institut Teknologi Bandung (1991)*
- ✈️ *Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1986)*
- ✈️ *Post Graduation Diploma in aerodrome engineering at Singapore Aviation Academy and Nanyang University (1996)*
- ✈️ *Master's in transportation at Bandung Institute of Technology (1991)*
- ✈️ *Bachelor's in civil engineering at Bandung Institute of Technology (1986)*

**Riwayat Profesi**  
*Professional History*

- ✈️ *Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Jan 2020- Des 2021)*
- ✈️ *Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2018 s.d Januari 2020)*
- ✈️ *Dewan Pengawas Perum LPPNPI (Jan 2019-Maret 2020)*
- ✈️ *Direktur Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Juni-November 2018)*
- ✈️ *Direktur Navigasi Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Februari-Mei 2018)*
- ✈️ *Direktur Teknik di PT Angkasa Pura I (Persero) (2013-2018)*
- ✈️ *Wakil Direktur Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (2007-2013)*
- ✈️ *Head of Transportation Management Agency in Jabodetabek (January 2020-December 2021)*
- ✈️ *Director General of Civil Aviation of the Ministry of Transportation (2018-January 2020)*
- ✈️ *The Supervisory Board of Perum LPPNPI (January 2019-March 2020)*
- ✈️ *Director of Airports at Directorate General of Civil Aviation (June-November 2018)*
- ✈️ *Director of Air Navigation at Directorate General of Civil Aviation (February-May 2018)*
- ✈️ *Director of Engineering at PT Angkasa Pura I (Persero) (2013-2018)*
- ✈️ *Vice Director of Airports at Directorate General of Civil Aviation (2007-2013)*

**Rangkap Jabatan**  
*Concurrent Position*

Tidak memiliki rangkap jabatan. *She has no concurrent positions.*

**Hubungan Afiliasi**  
*Affiliation*

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya maupun dengan Direksi. *She has no affiliation with the Shareholders, the Supervisory Board, or other Board of Directors.*





**MOKHAMMAD KHATIM**

**Direktur Operasi**

*Director of Operations*

■ <b>Masa Jabatan</b> <i>Tenure</i>	13 Juni 2019 s.d 12 Juni 2024 <i>June 13, 2019 to June 12, 2024</i>
■ <b>Periode Jabatan</b> <i>Appointment Period</i>	Periode pertama <i>First period</i>
■ <b>Kewarganegaraan</b> <i>Citizenship</i>	WNI <i>Indonesian</i>
■ <b>Usia</b> <i>Age</i>	56 tahun <i>56 years old</i>
■ <b>Domisili</b> <i>Domicile</i>	Tangerang, Banten
■ <b>Dasar Hukum Penunjukan</b> <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK Menteri BUMN No. SK-136/MBU/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 <i>The Minister of SOE Decree No. SK-136/MBU/06/2019 dated June 13, 2019</i>

**Pendidikan**  
*Education*

- ✈ Sarjana Manajemen SDM dari Universitas Mahasaraswati Denpasar (2002)
- ✈ Diploma (D4) Ahli Lalu Lintas Udara dari STPI Curug (2008)

- ✈ Bachelor's in human resources management at Mahasaraswati University (2002)
- ✈ Associate Degree in Air Traffic Controller at Indonesia Aviation Polytechnic in Curug (2008)

**Riwayat Profesi**  
*Professional History*

Memulai karier sebagai Asisten Kepala Biro Bidang Keselamatan pada Biro Manajemen Risiko Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (2012), *Safety Management System Department Head* Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (2013). Kemudian bergabung di AirNav Indonesia bersama pendirian AirNav Indonesia pada tahun 2013, sebagai:

- ✈ *Operational and System Risk Analysis Management Manager* Kantor Pusat (2013),
- ✈ *Finance & Adm Manager* Cab. Surabaya (2013-2014),
- ✈ *Finance & Adm Manager* Cabang JATSC Perum LPPNPI (2014- 2016),
- ✈ *HRMS & People Planning Senior Manager* Kantor Pusat Perum LPPNPI (2016),
- ✈ *Kepala Divisi Organisasi & Pengembangan Personalia* Kantor Pusat Perum LPPNPI (2016-2018), dan
- ✈ *General Manager* Cabang Surabaya (2018-2019).

*He started his career as Assistant to the Head Division of Safety for the Risk Management Bureau of the Head Office of PT Angkasa Pura I (2012), Department Head of Safety Management System for the Head Office of PT Angkasa Pura I (2013). Then, he joined AirNav Indonesia during its establishment in 2013 as*

- ✈ *Manager of Operational and System Risk Analysis Management for the Head Office (2013),*
- ✈ *Manager of Finance & Administration at Surabaya Branch (2013-2014),*
- ✈ *Manager of Finance & Administration for JATSC Branch of Perum LPPNPI (2014-2016),*
- ✈ *Senior Manager of HRMS & People Planning for Perum LPPNPI Head Office (2016),*
- ✈ *Division Head of Organization & Personnel Development of Perum LPPNPI Head Office (2016-2018), and*
- ✈ *General Manager of Surabaya Branch (2018-2019)*

**Rangkap Jabatan**  
*Concurrent Position*

Tidak memiliki rangkap jabatan.

*He has no concurrent position.*

**Hubungan Afiliasi**  
*Affiliation*

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya maupun dengan Direksi.

*He has no affiliation with the Shareholders, the Supervisory Board, or other Board of Directors.*





**BAMBANG RIANTO**

Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standarisasi

Director of Safety, Security, and Standardization

■ <b>Masa Jabatan</b> Tenure	4 Mei 2020 s.d 3 Mei 2025 May 4, 2020 to May 3, 2025
■ <b>Periode Jabatan</b> Appointment Period	Periode pertama First period
■ <b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	WNI Indonesian
■ <b>Usia</b> Age	60 tahun 60 years old
■ <b>Domisili</b> Domicile	Makassar, Sulawesi Selatan
■ <b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Legal Basis of Appointment	SK Menteri BUMN No. SK-135/MBU/05/2020 tanggal 4 Mei 2020 The Minister of SOE Decree No. SK-135/MBU/05/2020 dated May 4, 2020

**Pendidikan**  
Education

- ✈ Magister (S2) dari STIA LAN Makassar (2010)
- ✈ Sarjana (S1) dari STIA LAN Makassar (2008)
- ✈ Diploma 3 (D3) PLLU dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug (1998)

- ✈ Master's in public economic management at STIA LAN Makassar (2010)
- ✈ Bachelor's in public economic management at STIA LAN Makassar (2008)
- ✈ Three-Year Diploma in Air Traffic Controller at Indonesia Aviation Polytechnic in Curug (1998)

**Riwayat Profesi**  
Professional History

Memulai karier di Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (Senopen) Ujung Pandang sebagai Anggota *Flight Service* (1984-1990) dan *Supervisor Flight Service* (1990-1994), kemudian bergabung di PT Angkasa Pura I Bandara Hasanuddin (1994-2006), AP I - Pusat Pengendalian Lalu Lintas Penerbangan Makassar (PPLLPM) (2007-2010, 2011-2013) dan Kantor Pusat (2010-2011), hingga bergabung di Perusahaan sejak tahun 2013 dengan beberapa jabatan yang pernah diemban adalah *Deputy GM of ATS Operation MATSC* (2013), *Pts. General Manager MATSC* (2013- 2014), *General Manager MATSC* (2014-2015), dan *General Manager JATSC* (2015-2020).

He started his career at the Air Navigation Safety Operations Center (Senopen) Ujung Pandang as a Member of the Flight Service (1984-1990) and Supervisor Flight Service (1990-1994). Then, he joined PT Angkasa Pura (AP) I Hasanuddin Airport (1994-2006), Makassar Air Traffic Control Center (PPLLPM) (2007-2010 and 2011-2013) at AP I, and Head Office (2010-2011). After that, he joined the Company in 2013 and served in several positions, such as Deputy GM of ATS Operation at MATSC (2013), Acting General Manager of MATSC (2013-2014), General Manager of MATSC (2014-2015), and General Manager of JATSC (2015-2020).

**Rangkap Jabatan**  
Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan.

He has no concurrent position.

**Hubungan Afiliasi**  
Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya maupun dengan Direksi.

He has no affiliation with the Shareholders, the Supervisory Board, or other Board of Directors.





**AHMAD NURDIN AULIA**

Direktur Teknik

Director of Engineering

■ <b>Masa Jabatan</b> <i>Tenure</i>	25 Mei 2018 s.d 24 Mei 2023 <i>May 25, 2018 to May 24, 2023</i>
■ <b>Periode Jabatan</b> <i>Appointment Period</i>	Periode pertama <i>First period</i>
■ <b>Kewarganegaraan</b> <i>Citizenship</i>	WNI <i>Indonesian</i>
■ <b>Usia</b> <i>Age</i>	58 tahun <i>58 years old</i>
■ <b>Domisili</b> <i>Domicile</i>	Jakarta Selatan, DKI Jakarta
■ <b>Dasar Hukum Penunjukan</b> <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK Menteri BUMN No. SK-141/MBU/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 <i>The Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-141/MBU/05/2018 dated May 25, 2018</i>

<b>Pendidikan</b> <i>Education</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✈ Magister Teknik Informatika dari Universite Aix Marseilles III Perancis (2000)</li> <li>✈ Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1993)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✈ <i>Masters' in informatics engineering at Universite Aix Marseilles III France (2000).</i></li> <li>✈ <i>Bachelor's in electrical engineering at Sepuluh November Institute of Technology, Surabaya (1993)</i></li> </ul>
<b>Riwayat Profesi</b> <i>Professional History</i>	Berkarier di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan beberapa posisi penting antara lain sebagai Kabid Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikan Udara Kantor Otban IV- Bali (2015); Kepala Sub Direktorat Komunikasi Penerbangan, Dit. Navigasi Penerbangan (2015-2016); dan Kepala Sub Direktorat Teknik Navigasi Penerbangan, Dit. Navigasi Penerbangan (2016-2017).	<i>He pursued a career within the Ministry of Transportation with several important roles including Division Head of Security, Air Transport and Airworthiness of Otoban IV at Bali Office (2015); Sub-directorate Head of Aeronautical Communication at the Directorate of Air Navigation (2015-2016); and Sub-directorate Head of Air Navigation Engineering at the Directorate of Air Navigation (2016-2017)</i>
<b>Rangkap Jabatan</b> <i>Concurrent Position</i>	Tidak memiliki rangkap jabatan.	<i>He has no concurrent position.</i>
<b>Hubungan Afiliasi</b> <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya maupun dengan Direksi.	<i>He has no affiliation with the Shareholders, the Supervisory Board, or other Board of Directors.</i>



**BAGUS SUNJOYO**

Direktur SDM dan Umum  
Pelaksana Tugas Direktur Keuangan dan  
Manajemen Risiko

*Director of Human Resources and General Affairs  
Acting Director of Finance and Risk Management*

<b>Masa Jabatan</b> <i>Tenure</i>	10 Agustus 2020 s.d 9 Agustus 2025 <i>August 10, 2020 to August 9, 2025</i>
<b>Periode Jabatan</b> <i>Appointment Period</i>	Periode pertama <i>First period</i>
<b>Kewarganegaraan</b> <i>Citizenship</i>	WNI <i>Indonesian</i>
<b>Usia</b> <i>Age</i>	60 tahun <i>60 years old</i>
<b>Domisili</b> <i>Domicile</i>	Tangerang, Banten
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK Menteri BUMN No. SK-267/MBU/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 <i>The Minister of SOE Decree No.SK-267/MBU/08/2020 dated August 10, 2020</i>

**Pendidikan**  
*Education*

- Magister Manajemen dari STIE IPWI Jakarta (1999)
- Sarjana Teknik Logistik Penerbangan dari STT Dirgantara Jakarta (1997)

- Master's in management at STIE IPWI Jakarta (1999)*
- Bachelor's in aviation logistics engineering at STT Dirgantara Jakarta (1997)*

**Riwayat Profesi**  
*Professional History*

Beliau pernah menduduki beberapa posisi penting di lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain sebagai: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Sertifikasi dan Kelaikan Udara (2002-2005), Kepala Bidang Keamanan Kantor Administrasi Bandar Udara Juanda Surabaya (2005-2008), Kepala Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (2008-2013), Kepala Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (2013-2016), Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama – Soekarno Hatta (2016-2019), Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (2019-2020).

*He was in several important positions in the Ministry of Transportation, including serving as Subdivision Head of Administration at the Directorate of Certification and Airworthiness (2002-2005), Division Head of Security at Juanda Airport Administration Office in Surabaya (2005-2008), Head of Aviation Facilities Calibration Center (2008-2013), Head of Aviation Facility Calibration Agency (2013-2016), Chief of Airport Authority of Region I First Class – Soekarno Hatta (2016-2019) and Director of Aviation Facilities Calibration Center (2019-2020).*

**Rangkap Jabatan**  
*Concurrent Position*

Pelaksana Tugas Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

*Acting Director of Finance and Risk Management*

**Hubungan Afiliasi**  
*Affiliation*

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya maupun dengan Direksi.

*He has no affiliation with the Shareholders, the Supervisory Board, or other Board of Directors.*



AirNav Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pengawas dan Direksi yang telah berperan dan memberikan dedikasinya dalam membangun Perusahaan. Adapun profil Dewan Pengawas dan Direksi sebelum mengalami perubahan komposisi disampaikan berikut ini.

*AirNav Indonesia expresses its appreciation to the Supervisory Board and the Board of Directors who served and gave their dedication to the company. The following are profiles of the Supervisory Board and the Board of Directors before the composition change.*

1



**ELFI AMIR**

Anggota Dewan Pengawas  
Supervisory Board Member



- Warga negara Indonesia, usia 61 tahun, berdomisili di Jakarta Pusat, dan menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-249/MBU/09/2018 tanggal 28 September 2018.
- Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Elfi Amir sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan SK Menteri BUMN SK-187/MBU/08/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

*Indonesian citizen, 61 years old, domiciled in Central Jakarta, and served as the Supervisory Board member based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-249/MBU/09/2018 dated September 28, 2018*

*Shareholders dismissed Elfi Amir with honor as Supervisory Board member based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-187/MBU/08/2022 on Dismissal and Appointment of Supervisory Board Members.*

2



**ANINDITA EKA WIBISONO**

Anggota Dewan Pengawas  
Supervisory Board Member



- Warga negara Indonesia, usia 37 tahun, berdomisili di Depok, Jawa Barat, dan menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-227/MBU/07/2020 tanggal 06 Juli 2020.
- Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Anindita Eka Wibisono sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan SK Menteri BUMN SK-117/MBU/05/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

*Indonesian citizen, 37 years old, domiciled in Depok, West Java, and served as the Supervisory Board member based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-227/MBU/07/2020 dated July 6, 2020*

*Shareholders dismissed Anindita Eka Wibisono with honor as Supervisory Board member based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-117/MBU/05/2022 on Dismissal and Appointment of Supervisory Board Members.*



3



**MOHAMAD PRAMINTOHADI SUKARNO**

**Direktur Utama**

*Direktur Utama President Director*



- Warga negara Indonesia, usia 59 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan, Banten, dan menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-135/MBU/05/2020 tanggal 4 Mei 2020.
- Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Mohamad Pramintohadi Sukarno sebagai Direktur Utama berdasarkan SK Menteri BUMN SK-28/MBU/01/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Direksi.

*Indonesian citizen, 59 years old, domiciled in South Tangerang, Banten and served as the President Director based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-135/MBU/05/2020 dated May 4, 2020.*

*Shareholders dismissed Mohamad Pramintohadi Sukarno with honor as President Director based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-28/MBU/01/2022 on Dismissal and Appointment of Board of Directors.*

4



**HENDROYONO**

**Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko**

*Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management*



- Warga negara Indonesia, usia 63 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan, Banten, dan menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-141/MBU/05/2018 tanggal 25 Mei 2018.
- Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Hendroyono sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan SK Menteri BUMN SK-186/MBU/08/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi.

*Indonesian citizen, 63 years old, domiciled in South Tangerang, Banten and served as the Director of Finance and Risk Management based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-141/MBU/05/2018 dated May 25, 2018.*

*Shareholders dismissed Hendroyono with honor as Director of Finance and Risk Management based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-186/MBU/08/2022 on Dismissal and Appointment of Board of Directors.*



5



### TAUFIK HENDRA KUSUMA

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko  
*Director of Finance and Risk Management*



- Warga negara Indonesia, usia 46 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan, dan menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-186/MBU/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022.
- Pemegang Saham menonaktifkan Taufik Hendra Kusuma sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan SK-102/MBU/05/2023

*Indonesian citizen, 46 years old, domiciled in South Jakarta and served as the Director of Finance and Risk Management based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-186/MBU/08/2022 dated August 31, 2022*

*Shareholders relieved Taufik Hendra Kusuma of his post as Director of Finance and Risk Management based on the Decree of the Minister of SOE No. SK-102/MBU/05/2023.*

Terdapat perubahan Ketua Dewan Pengawas pada saat penyusunan Laporan Tahunan yang terjadi setelah berakhirnya periode pelaporan 31 Desember 2022. Ketua Dewan Pengawas Novie Riyanto R. ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dan digantikan oleh Maria Kristi Endah Murni sebagai perwakilan Direktur Jendral Perhubungan Udara.

*The Chairperson of the Supervisory Board was changed during the preparation of the Annual Report, after the end of the reporting period on December 31, 2022. Chairperson of the Supervisory Board Novie Riyanto R. was appointed Secretary General of the Ministry of Transportation. Maria Kristi Endah Murni has been filling this position as a representative for the Director General of Civil Aviation.*



**MARIA KRISTI ENDAH MURNI**

Ketua Dewan Pengawas  
Chairperson of the Supervisory Board

■ <b>Masa Jabatan</b> <i>Tenure</i>	Ditetapkan tanggal 16 Februari 2023 <i>Appointed on February 16, 2023</i>
■ <b>Periode Jabatan</b> <i>Appointment Period</i>	Periode pertama <i>First period</i>
■ <b>Kewarganegaraan</b> <i>Citizenship</i>	WNI <i>Indonesian</i>
■ <b>Usia</b> <i>Age</i>	58 tahun <i>58 years old</i>
■ <b>Domisili</b> <i>Domicile</i>	Jakarta
■ <b>Dasar Hukum Penunjukan</b> <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK-30/MBU/02/2023

**Pendidikan**  
*Education*

- ✈ Magister Hukum dari Universitas Indonesia Jakarta (2007)
- ✈ Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya (1989)

- ✈ *Master's in law at University of Indonesia, Jakarta (2007)*
- ✈ *Bachelor's in law at Airlangga University, Surabaya (1989)*

**Riwayat Profesi**  
*Professional History*

- ✈ Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Desember 2022 s.d saat ini)
- ✈ Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan (Juni s.d Desember 2022)
- ✈ Direktur Angkutan Udara (2017 s.d. Juni 2022)
- ✈ Komisaris PT GMF AeroAsia Tbk (2019 s.d. saat ini)
- ✈ Kepala Seksi Kerjasama Bilateral dan Perusahaan Angkutan Udara (2009-2014)
- ✈ Kasubdit Kerjasama Angkutan Udara, Direktorat Angkutan Udara (2014 s.d. 2017)
- ✈ Kepala Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri (2009)

- ✈ *Director General of Civil Aviation (December 2022-present)*
- ✈ *Expert for Safety and Transport Connectivity at the Ministry of Transportation (June- December 2022)*
- ✈ *Director of Air Transport (2017-June 2022)*
- ✈ *Commissioner of PT GMF AeroASia Tbk. (2019-present)*
- ✈ *Section Head of Bilateral and Airline Cooperation (2009-2014)*
- ✈ *Subdivision Head of Airline Cooperation at Directorate of Air Transport (2014-2017)*
- ✈ *Section Head of Scheduled International Commercial Aviation (2009)*

**Rangkap Jabatan**  
*Concurrent Position*

- ✈ Direktur Jenderal Perhubungan Udara
- ✈ Komisaris PT GMF AeroAsia Tbk

- ✈ *Director General of Civil Aviation*
- ✈ *Commissioner of PT GMF AeroASia Tbk.*

**Hubungan Afiliasi**  
*Affiliation*

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya maupun dengan Direksi. Namun, Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemilik Modal Perusahaan, Pemerintah Indonesia, melalui rangkap jabatan pada Kementerian Perhubungan selaku kementerian teknis.

*She has no affiliation with other Supervisory Boards or the Board of Directors. However, she is affiliated with the Government of Indonesia as the Company's Shareholder through her concurrent position at the Ministry of Transportation as the technical ministry.*





## Sumber Daya Manusia (SDM) Human Resources (HR)

SDM merupakan bagian yang sangat penting dan sekaligus menjadi kekuatan pendukung Perusahaan. Kualitas dan kompetensi SDM menjadi perhatian penting Perusahaan, dan senantiasa ditingkatkan melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi. Perusahaan juga melakukan sosialisasi budaya AKHLAK menjadi semangat dan nilai yang diterapkan oleh setiap SDMnya.

Pada tahun 2022, AirNav Indonesia memperoleh kepercayaan dari Pemerintah untuk mengelola pusat pelatihan secara mandiri dengan diterbitkannya sertifikasi 143. AirNav Indonesia dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan tenaga pengajar internal melalui AirNav Training Center. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mewujudkan SDM yang profesional dan berdaya saing global. Selain itu, AirNav Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara (PPSDM), untuk lebih meningkatkan kualitas pengembangan SDMnya. Kerja sama ini meliputi pertukaran data dan informasi terkait pengembangan SDM, penyelenggaraan pelatihan, pemanfaatan tenaga ahli dan pengajar, sarana dan prasarana, program magang, serta riset dan penelitian SDM.

HR is an essential part and the supporting body of the company. Therefore, human resources' quality and competency become a main concern for the company. It is constantly being improved through training, education, and certification. The company also holds education sessions on AKHLAK as the spirit and values of each HR personnel.

Since 2022, AirNav Indonesia has been trusted by the government to independently manage training centers because of the issuance of Civil Aviation Safety Regulations Part 143. AirNav Indonesia can organize education and training with internal teaching staff through the AirNav Training Center. This is one of the company's efforts to create professional and globally competitive human resources. In addition, AirNav Indonesia cooperates with the Aviation HR Development Center to improve HR quality. This collaboration includes data and information exchange related to HR development, training administration, experts and teaching staff, facilities and infrastructure, apprenticeship programs, and HR research.



AirNav Indonesia meningkatkan kompetensi karyawan melalui program pelatihan yang relevan dan efektif.  
*AirNav Indonesia improves employee competency through relevant and effective training programs.*



## ○ Jenis Pendidikan/Pelatihan/Sertifikasi dan Komposisi Kepesertaan Education/Training/Certification and Participant Composition

Jenis Pendidikan/ Pelatihan/Sertifikasi Education/Training/Certification	Tujuan Pendidikan/ Pelatihan/Sertifikasi Purpose of Education/Training/Certification	Level Jabatan Position Level	Komposisi Karyawan Employee Composition
Area Control Surveillance Training	Pemenuhan program strategis <i>realignment</i> FIR <i>Fulfillment of Strategic Program for FIR realignment</i>	10 - 15	48
Pelatihan Docker and Kubernetes <i>Docker and Kubernetes Training</i>	Pelatihan mengenai <i>data center management</i> untuk mendukung digitalisasi perusahaan <i>Training in data center management to support company digitalization</i>	10 dan 14	2
Dukungan untuk persiapan karyawan menghadapi masa purna bakti <i>Support for Employees in Retirement Preparation</i>	Untuk mempersiapkan karyawan menghadapi masa purnabakti dari setiap aspek <i>To prepare employees in retirement preparation in all aspects</i>	10-19	30
Reprogramming Program	Pelatihan Penanaman nilai <i>core value</i> AKHLAK ke perusahaan <i>Training in living AKHLAK as the company's core values</i>	10-19	30
Pelatihan <i>Executive Education Board Ready - High Performance Boards</i> <i>Executive Education Board Ready - High Performance Boards Training</i>	Untuk meningkatkan kompetensi dan juga kesiapan seorang pimpinan dalam menghadapi berbagai hal <i>To improve leaders' competence and readiness in facing upcoming challenges</i>	17-19	11



## ○ Biaya Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Cost

dalam jutaan rupiah/in million rupiah

Keterangan Description	Realisasi 2022 2022 Realization	Anggaran 2022 2022 Budget	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Realisasi Terhadap Target (%) Realization to Target (%)	Realisasi 2022 terhadap 2021 (%) 2022 Realization to 2021 Realization
Biaya Pelatihan dan Pendidikan <i>Education and Training Cost</i>	19.102	21.169	17.725	90,23	107,76



## Demografi Karyawan

AirNav Indonesia memiliki 4.922 karyawan. AirNav Indonesia memiliki personel Kodal TNI-AU, yakni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang bertugas memberikan pelayanan navigasi penerbangan di bandara enklave sipil. Adapun demografi karyawan berdasarkan jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan disampaikan dalam tabel berikut.

## Employee Demography

AirNav Indonesia has 4,922 employees. AirNav Indonesia has Command-and-Control Air Force personnel, who is Indonesian Air Force personnel, to provide air navigation services at civil enclave airports. The employee demographics based on gender, position, age, education level, and employment status are presented in the following table.

### ○ Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender (orang)

#### Employee Composition by Gender

Gender Gender	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		2022		2021		2020	
	Selisih/Discrepancy	%	Jumlah Number	Komposisi % Composition %	Jumlah Number	Komposisi % Composition %	Jumlah Number	Komposisi % Composition %
Laki-laki Male	(68)	(2,01)	3.318	30,71%%	3.386	69,03	3.464	69,21
Perempuan Female	(7)	(0,46)	1.512	67,41%	1.519	30,97	1.541	30,79
<b>Sub Jumlah Subtotal</b>	<b>(75)</b>	<b>(1,53)</b>	<b>4.830</b>	<b>100,00</b>	<b>4.905</b>	<b>100,00</b>	<b>5.005</b>	<b>100,00</b>
Kodal TNI-AU Command-and- Control Air Force personnel	4	4,55	92		88		104	
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>(71)</b>	<b>(1,42)</b>	<b>4.922</b>		<b>4.993</b>		<b>5.109</b>	

### ○ Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat/Level Jabatan (orang)

#### Employee Composition by Positions (Person)

Tingkat Jabatan Position Level	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		2022	2021	2020
	Selisih/Discrepancy	%			
19	(3)	(17,65)	14	17	18
18	1	4,55	23	22	25
17	(1)	(6,67)	14	15	22
16	(10)	(14,29)	130	140	145
15	(17)	(6,69)	237	254	271
14	(8)	(1,59)	494	502	521
13	4	1,25	323	319	330
12	101	27,82	464	363	368
11	335	50,83	994	659	669
10	(362)	(17,02)	1.765	2.127	2.139
9	(84)	(55,63)	67	151	155
8	(2)	(0,67)	298	300	302
Tanpa Grade/ No Level	(29)	(80,56)	7	36	41
<b>Sub Jumlah/ Subtotal</b>	<b>(75)</b>	<b>(1,53)</b>	<b>4.830</b>	<b>4.905</b>	<b>5.005</b>
Kodal TNI-AU/ Command-and- Control Air Force personnel	4	4,55	92	88	104
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>(71)</b>	<b>(1,42)</b>	<b>4.922</b>	<b>4.993</b>	<b>5.109</b>



## ○ Komposisi Karyawan Berdasarkan Fungsi Jabatan (orang)

Employee Composition by Work Functions (Person)

Fungsi Jabatan Work Function	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		2022	2021	2020
	Selisih/Discrepancy	%			
Air Traffic Controller (ATC)	(25)	(1,48)	1.669	1.694	1.700
Aeronautical Communication Officer	(6)	(1,18)	502	508	521
Teknik/Engineering	(12)	(1,06)	1.123	1.135	1.142
Aeronautical Information System (AIS) Officer	1	0,58	172	171	173
Managerial	(24)	(3,63)	637	661	704
Fungsional/Functional	0	0,00	87	87	97
Staf Administrasi/Administration Staff	(13)	(2,03)	628	641	663
Masa Persiapan Pensiun Retirement Preparation	4	50,00	12	8	5
<b>Sub Jumlah/Subtotal</b>	<b>(75)</b>	<b>(1,53)</b>	<b>4.830</b>	<b>4.905</b>	<b>5.005</b>
Kodal TNI - AU Command-and-Control Air Force personnel	4	4,55	92	88	104
<b>Jumlah/Total</b>	<b>(71)</b>	<b>(1,42)</b>	<b>4.922</b>	<b>4.993</b>	<b>5.109</b>

## ○ Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia (orang)

Employee Composition by Age (person)

Usia Age	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		2022	2021	2020
	Selisih/Discrepancy	%			
≥ 56 tahun/ years old	(15)	(26,79)	41	56	82
51-56 tahun/ years old	9	3,44	271	262	243
46-50 tahun/ years old	42	15,73	309	267	264
41-45 tahun/ years old	(56)	(11,00)	453	509	508
36-40 tahun/ years old	74	23,72	386	312	298
31-35 tahun/ years old	246	23,98	1.272	1.026	850
26-30 tahun/ years old	(54)	(2,77)	1.892	1.946	1848
21-25 tahun/ years old	(319)	(60,76)	206	525	899
< 20 tahun/ years old	(2)	(100,00)	0	2	13
<b>Sub Jumlah/Subtotal</b>	<b>(75)</b>	<b>(1,53)</b>	<b>4.830</b>	<b>4.905</b>	<b>5.005</b>
Kodal TNI - AU Command-and-Control Air Force personnel	4	4,55	92	88	104
<b>Jumlah/Total</b>	<b>(71)</b>	<b>(1,42)</b>	<b>4.922</b>	<b>4.993</b>	<b>5.109</b>

## ○ Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)

Employee Composition by Education Level (person)

Tingkat Pendidikan Education Level	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		2022	2021	2020
	Selisih/Discrepancy	%			
Strata 2 Master's Degree	(2)	(11,76)	15	17	20
Strata 1 Bachelor's Degree	(15)	(2,14)	686	701	725
Diploma 4 Associate Degree	(9)	(2,40)	366	375	386
Diploma 3 Three-Year Diploma	(33)	(1,06)	3.074	3.107	3.130
Diploma 2 Two-Year Diploma	(12)	(3,00)	388	400	418
Diploma 1 Diploma	(2)	(4,26)	45	47	51
SMA Senior High School	(2)	(0,78)	256	258	275
<b>Sub Jumlah</b> Subtotal	<b>(75)</b>	<b>(1,53)</b>	<b>4.830</b>	<b>4.905</b>	<b>5.005</b>
Kodal TNI - AU Command-and-Control Air Force personnel	4	4,55%	92	88	104
<b>Jumlah</b> Total	<b>(71)</b>	<b>-1,42%</b>	<b>4.922</b>	<b>4.993</b>	<b>5.109</b>

## ○ Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan (orang)

Employee Composition by Employment Status (person)

Status Ketenagakerjaan Description	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		2022	2021	2020
	Selisih/Discrepancy	%			
<b>Karyawan Tetap/ Permanent Employees</b>					
Karyawan Perum LPPNPI Perum LPPNPI Employees	(12,00)	(0,28)	4.223	4.235	4.283
Perbantuan PT Angkasa Pura I (Persero) Secondment from PT Angkasa Pura I (Persero)	(1,00)	(100,00)	0	1	1
Perbantuan PT Angkasa Pura II (Persero) Secondment from PT Angkasa Pura I (Persero)	(1,00)	(50,00)	1	2	2
Perbantuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Secondment from Civil Servants	(32,00)	(5,08)	598	630	677
<b>Jumlah Karyawan Tetap</b> Total Permanent Employees	<b>(46,00)</b>	<b>(0,94)</b>	<b>4.822</b>	<b>4.868</b>	<b>4.963</b>
<b>Karyawan Tidak Tetap/ Contract Employees</b>					
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Employment Agreement of Specified Time	(4,00)	(66,67)	2	6	14
Peserta Magang/ Apprentice	(25,00)	(96,15)	1	26	23
Penugasan/ Assignment	0,00	0,00	5	5	5
Gugus Tugas/ Task Force	0,00	0,00	0	0	0
<b>Jumlah Karyawan Tidak Tetap</b> Total Contract Employees	<b>(29,00)</b>	<b>(78,38)</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>42</b>
<b>Jumlah Karyawan/ Subtotal Employees</b>	<b>(75,00)</b>	<b>(1,53)</b>	<b>4.830</b>	<b>4.905</b>	<b>5.005</b>
Kodal TNI - AU Command-and-Control Air Force personnel	4,00	4,55	92	88	104
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>(71,00)</b>	<b>(1,42)</b>	<b>4.922</b>	<b>4.993</b>	<b>5.109</b>



## ○ Komposisi Karyawan Berdasarkan Penugasan Lokasi Kerja (orang) Employee Composition by Work Location (person)

Lokasi Kerja / Cabang Work Location/Branch	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2021-2022		2022	2021	2020
	Selisih/Discrepancy	%			
Kantor Pusat / Head Office	1,31	1,31	542	535	565
JATSC	1,55	1,55	656	646	652
MATSC	(2,70)	(2,70)	469	482	479
Medan	1,00	1,00	202	200	199
Palembang	49,32	49,32	218	146	149
Yogyakarta	11,40	11,40	127	114	113
Surabaya	0,93	0,93	216	214	209
Denpasar	(0,93)	(0,93)	212	214	209
Balikpapan	(1,27)	(1,27)	155	157	155
Sentani	(9,19)	(9,19)	168	185	194
Pontianak	(1,54)	(1,54)	128	130	134
Jambi	(52,63)	(52,63)	36	76	76
Banda Aceh	(1,52)	(1,52)	65	66	69
Pekanbaru	7,87	7,87	96	89	95
Tanjung Pinang	1,80	1,80	113	111	117
Batam	(16,67)	(16,67)	55	66	67
Padang	(13,95)	(13,95)	37	43	47
Pangkal Pinang	(43,64)	(43,64)	31	55	59
Halim	0,00	0,00	59	59	60
Bandung	(1,25)	(1,25)	79	80	78
Semarang	6,56	6,56	65	61	62
Solo	(21,05)	(21,05)	30	38	39
Banjarmasin	(5,71)	(5,71)	99	105	110
Palangkaraya	(2,22)	(2,22)	44	45	45
Tarakan	(3,80)	(3,80)	76	79	83
Manado	(5,22)	(5,22)	127	134	138
Kendari	(1,52)	(1,52)	65	66	67
Lombok	(2,70)	(2,70)	72	74	77
Kupang	(3,51)	(3,51)	110	114	120
Ambon	(11,76)	(11,76)	75	85	91
Wamena	(19,51)	(19,51)	33	41	41
Nabire	(10,20)	(10,20)	44	49	50
Sorong	(3,70)	(3,70)	78	81	85
Merauke	(23,88)	(23,88)	51	67	71
Pusat Informasi Aeronautika Aeronautical Information Center	(0,51)	(0,51)	197	198	200
<b>Sub Jumlah/Subtotal</b>	<b>(1,53)</b>	<b>(1,53)</b>	<b>4.830</b>	<b>4.905</b>	<b>5.005</b>
Kodal TNI - AU Command-and-Control Air Force personnel	4,55	4,55	92	88	104
<b>Jumlah/Total</b>	<b>(1,42)</b>	<b>(1,42)</b>	<b>4.922</b>	<b>4.993</b>	<b>5.109</b>





Petugas *Air Traffic Control* (ATC) AirNav Indonesia memandu pergerakan pesawat di Bandara Yogyakarta International Airport. Sebagai perusahaan yang mendukung keberlanjutan, AirNav Indonesia selalu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan produktif. Adopsi prinsip-prinsip kesetaraan kerja yang dilakukan AirNav Indonesia mampu mendorong keberagaman, kreativitas, dan kemajuan karier seluruh karyawan.

*AirNav Indonesia Air Traffic Control (ATC) officers guide aircraft movement at Yogyakarta International Airport. As a company supporting sustainability, AirNav Indonesia always creates an inclusive, fair, and productive work environment. AirNav Indonesia's adoption of the work equality principle is able to encourage diversity, creativity, and career advancement for all employees.*

AirNav Indonesia senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku terkait pengelolaan SDM. Perusahaan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), menciptakan lingkungan kerja yang layak, kesetaraan HAM, peningkatan kompetensi, serta aspek ketenagakerjaan lainnya. Adapun pengungkapan lebih lanjut tentang SDM disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan AirNav Indonesia 2022.

*AirNav Indonesia Indonesia always complies with applicable regulations regarding HR management. The company pays attention to occupational safety and health (OHS), a decent work environment, equality of human rights, competency improvement, and other employment aspects. Further disclosures about HR are presented in the 2022 Sustainability Report of AirNav Indonesia.*



## Informasi Pemilik Modal *Shareholder Information*

**K**epemilikan modal atas AirNav Indonesia sepenuhnya berada pada Pemerintah Republik Indonesia. Modal Perusahaan berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum). Adapun kuasa pemilik modal adalah Kementerian BUMN, sesuai PP No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjam) kepada Menteri Negara BUMN.

**C**apital ownership of AirNav Indonesia is owned solely by the Government of the Republic of Indonesia. The capital is state assets separated and not divided into shares, following Law No. 19 of 2003 on State-owned Enterprises and Government Regulation No. 13 of 1998 on State-owned General Companies (Perum). Based on Government Regulation No. 41 of 2003 on Delegation, Duties, and Authorities of the Minister of Finance in Public Companies (Persero), State-owned General Company (Perum), and State-owned Service Company (Perjan) to the Minister of State-Owned Enterprises, the Ministry of State-owned Enterprises has the authority of the Company's capital.



## Informasi tentang Kronologis Penanaman Modal Perusahaan *Information About the Company's Capital Investment Chronology*

### KRONOLOGIS PENANAMAN MODAL DAN JUMLAH MODAL PERUSAHAAN

*Chronology of Investment and Total Capital of the Company*



Peristiwa <i>Event</i>	Modal (Rp) <i>Capital (IDR)</i>	Keterangan <i>Description</i>
<p>Modal Perusahaan pada saat pendirian (PP No. 77 Tahun 2012)</p> <p><i>Company Capital during its establishment (Government Regulation No. 77 of 2012)</i></p>	97.952.690.300	<p>Pengalihan barang milik negara (BMN) pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2010 dan 2011 yang berbentuk Peralatan Navigasi Udara.</p> <p><i>Transfer of State-owned Assets to the Ministry of Transportation, in which the procurement of Air Navigation Equipment came from State Budget for Fiscal Years 2010 and 2011</i></p>



Peristiwa Event	Modal (Rp) Capital (IDR)	Keterangan Description	
Penambahan Modal Pemerintah Republik Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia <i>Addition of State Capital Inclusion based on the Government Regulation</i>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>PP No. 15 Tahun 2017 <i>Government Regulation No. 15 of 2017</i></li> </ul>	375.512.760.000	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.	<i>Addition of State Capital Inclusion of the Republic of Indonesia to the capital of Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PP No. 46 Tahun 2018 <i>Government Regulation No. 46 of 2018</i></li> </ul>	1.067.885.016.812	Pengurangan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) untuk dijadikan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan.	<i>Reduction of state capital inclusion of the Republic of Indonesia in PT Angkasa Pura I (Persero) and PT Angkasa Pura II (Persero) for addition of state capital inclusion to the company's capital</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PP No. 65 Tahun 2020 <i>Government Regulation No. 65 of 2020</i></li> </ul>	904.692.510.332	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.	<i>Addition of State Capital Inclusion of the Republic of Indonesia to the capital of Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia</i>
<b>Modal Perusahaan per 31 Desember 2022</b> <i>Company Capital as of December 31, 2022</i>	<b>2.446.042.977.444</b>		

## Informasi tentang Struktur Grup dan Kelompok Usaha serta Informasi tentang Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

AirNav Indonesia tidak memiliki struktur grup, kelompok usaha, entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan.

## Information on Business Groups, Its Structure and Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

AirNav Indonesia does not have a business group, business group structure, subsidiaries, associates, and joint ventures. Therefore, this Annual Report does not disclose information on these matters.





## Lembaga dan Profesi Penunjang

### Supporting Institutions and Professions

#### KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Public Accounting Firm (PAF)

	<b>Nama KAP</b> PAF Name	Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo No. Registrasi: 678/KM.1/2017	
	<b>Alamat</b> Address	Intiland Tower Lt. 18. Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Jakarta 10220	
	<b>Telepon</b> Phone	+62 21 570 7997, 571 2000	
	<b>Faksimile</b> Fax	+62 21 570 6118, 571 1818	
	<b>Surel</b> E-mail	hhes.sudirman@kreston.co.id	
	<b>Situs</b> Website	www.kreston.co.id	
	<b>Bentuk Jasa</b> Services Form	Audit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2022.	<i>Audit of Financial Statements, Financial Statements, and Micro and Small Enterprise (SME) Funding Programs for Fiscal Year 2022</i>
	<b>Jasa Lainnya</b> Other Services	Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi Capaian KPI, Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Pengendalian Intern.	<i>Evaluation Reports on the Company Performance, KPI Achievements, Reports on Compliance over Legislations and on Internal Control</i>
	<b>Periode Penugasan</b> Assignment Period	14 Oktober 2022 sampai dengan 10 Februari 2023	<i>October 14, 2022 until February 10, 2023</i>
	<b>Biaya</b> Cost	Rp1.166.249.250	



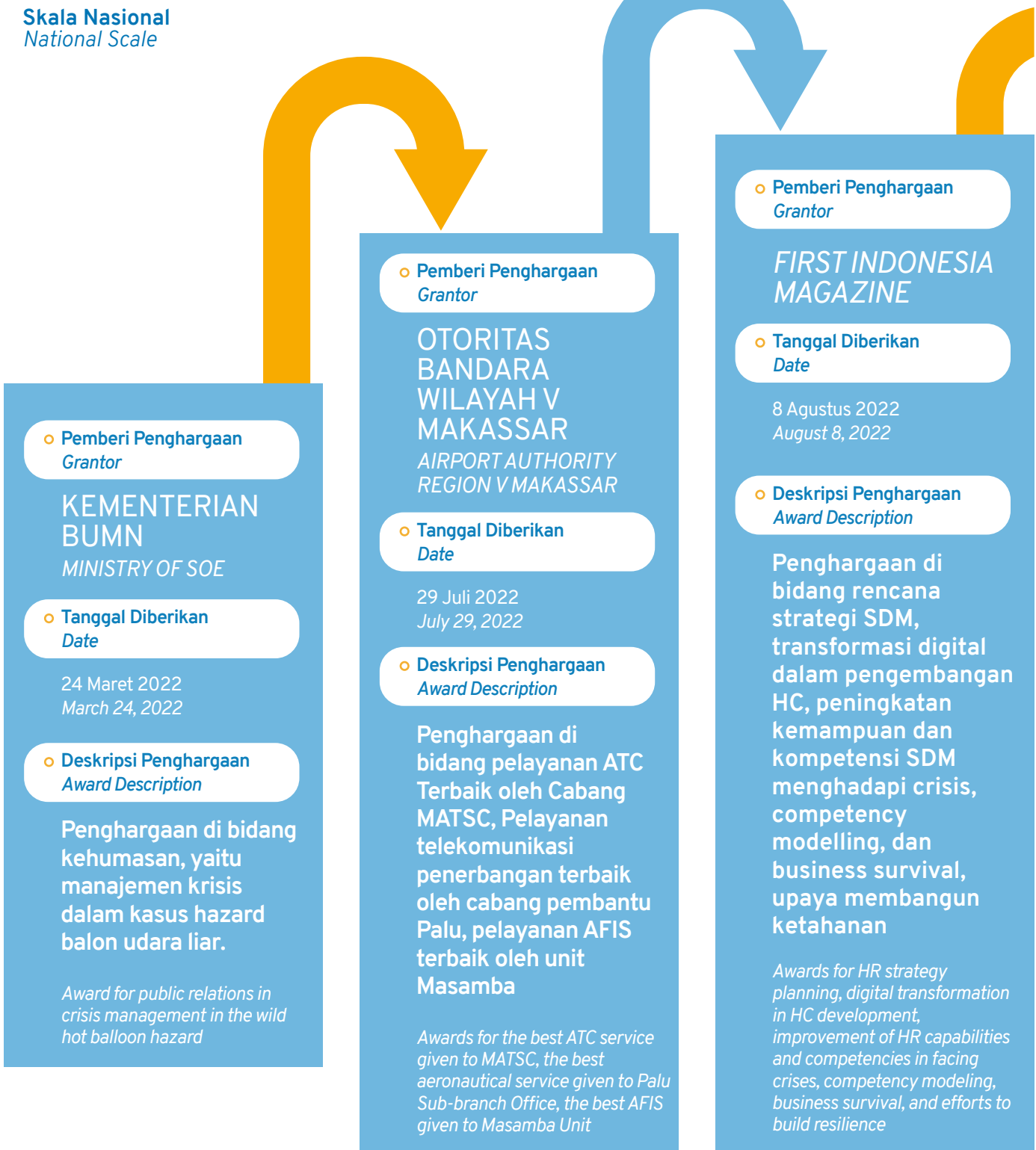


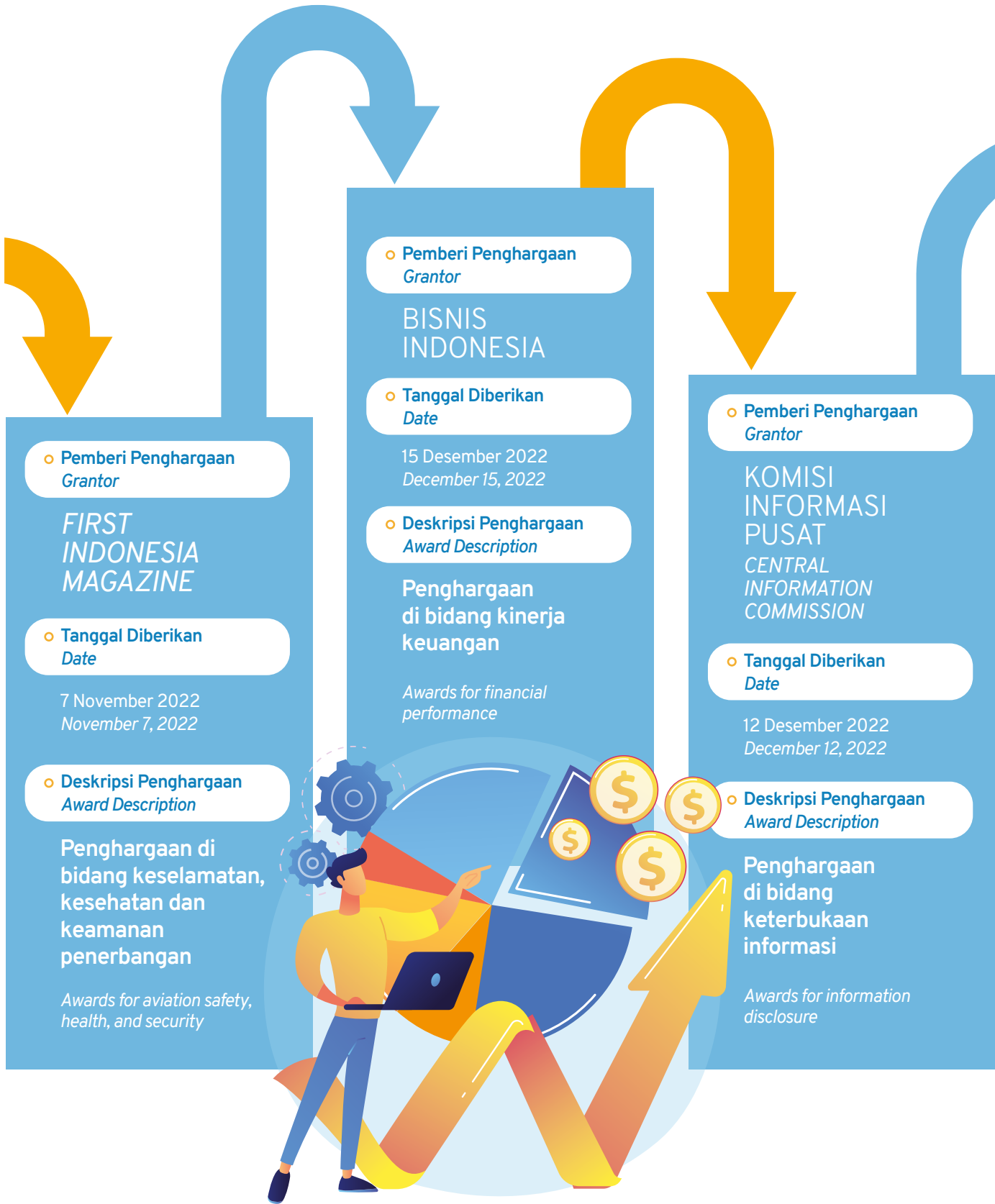
## Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certification

### ○ Penghargaan Awards



#### Skala Nasional National Scale







- **Pemberi Penghargaan Grantor**

**TOP BISNIS MAGAZINE**

- **Tanggal Diberikan Date**

5 Oktober 2022  
October 5, 2022

- **Deskripsi Penghargaan Award Description**

Penghargaan dibidang penerapan GRC dan Komitmen BOD atas komitmen menjalan GRC Program

*Awards for the implementation of GRC and BOD commitment to GRC*

- **Pemberi Penghargaan Grantor**

**NATIONAL CENTER FOR SUSTAINABILITY REPORT**

- **Tanggal Diberikan Date**

10 Oktober 2022  
October 10, 2022

- **Deskripsi Penghargaan Award Description**

Penghargaan atas penilaian buku kinerja keberlanjutan AirNav Indonesia

*Awards for the assessment of sustainability performance of AirNav Indonesia*

- **Pemberi Penghargaan Grantor**

**BEST BUMN 2022**

- **Tanggal Diberikan Date**

4 Desember 2022  
December 4, 2022

- **Deskripsi Penghargaan Award Description**

Penghargaan di bidang kinerja keuangan dan peningkatan pelayanan pada sektor transportasi udara

*Awards for the financial performance and service improvement in air transport*



## SERTIFIKASI CERTIFICATIONS



### CASR Part 171

#### o DESKRIPSI SERTIFIKAT *Certificate Description*

Dokumen yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada unit kerja di bawah badan hukum yang berisi perizinan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi yang berbasis di darat dan satelit.

*The Director General of Civil Aviation granted the official permission to the work unit with a legal entity as a telecommunication service provider based on land and satellites.*

#### o LEMBAGA PEMBERI/ *Certifier*

Direktur Jenderal Perhubungan Udara,  
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia  
*Director General of Civil Aviation for the Ministry of Transportation*

#### o DIBERIKAN KEPADA/ *Recipient*

175 Lokasi Operasi AirNav Indonesia  
*175 Airnav Indonesia's*

#### o MASA BERLAKU/ *Validity*

Sejak tanggal dikeluarkannya sertifikat sampai dinyatakan adanya pembekuan atau pencabutan.

*From the date of issuance of the certificate until its suspension or revocation*

### CASR Part 172

#### o DESKRIPSI SERTIFIKAT *Certificate Description*

Sertifikat CASR Part 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

*CASR Certificate Part 172 on Certification for Air Traffic Service Provider*

#### o LEMBAGA PEMBERI/ *Certifier*

Direktur Jenderal Perhubungan Udara,  
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

*Director General of Civil Aviation for the Ministry of Transportation*

#### o DIBERIKAN KEPADA/ *Recipient*

169 Lokasi Operasi AirNav Indonesia  
*169 Airnav Indonesia's operational areas*

#### o MASA BERLAKU/ *Validity*

Sejak tanggal dikeluarkannya sertifikat sampai dinyatakan adanya pembekuan, penarikan atau pembatalan.

*From the date of issuance of the certificate until its suspension or revocation*





### CASR Part 173

#### o DESKRIPSI SERTIFIKAT Certificate Description

Sertifikat CASR Part 173 tentang Penyelenggara Perancangan Prosedur Penerbangan  
*CASR Certificate Part 173 on Flight Procedure Design Service Provider*

#### o LEMBAGA PEMBERI Certifier

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.  
*Director General of Civil Aviation for the Ministry of Transportation*

#### o DIBERIKAN KEPADA Recipient

1 Kantor Pusat  
*1 Head office*

#### o MASA BERLAKU/ *Validity*

Sampai dinyatakan adanya pembekuan atau pencabutan.  
*Until its suspension or revocation*

### CASR Part 175

#### o DESKRIPSI SERTIFIKAT Certificate Description

Sertifikat CASR Part 175 tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika  
*CASR Certificate Part 175 on Aeronautical Information Service Provider*

#### o LEMBAGA PEMBERI Certifier

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia  
*Director General of Civil Aviation for the Ministry of Transportation*

#### o DIBERIKAN KEPADA Recipient

1 Kantor Pusat  
*1 Head office*

#### o MASA BERLAKU/ *Validity*

Sampai dinyatakan adanya pembekuan atau pencabutan.  
*Until its suspension or revocation*

### ISO 9001:2015

#### o DESKRIPSI SERTIFIKAT Certificate Description

Sertifikat ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu  
*Certificate ISO 9001: 2015 on Quality Management Systems*

#### o LEMBAGA PEMBERI Certifier

SGS Indonesia dengan akreditasi Nasional dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) & Internasional yaitu dari UKAS (United Kingdom Accreditation System)  
*SGS Indonesia with a national accreditation from KAN (National Accreditation Committee) and an international accreditation from UKAS (United Kingdom Accreditation System)*

#### o DIBERIKAN KEPADA Recipient

1 Kantor Pusat  
*1 Head office*

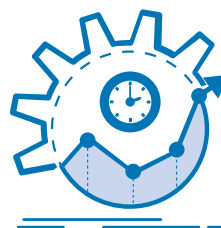
#### o MASA BERLAKU/ *Validity*

25 Februari 2020 s.d 9 Maret 2023  
*From February 25, 2020–March 9, 2023*



# ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS





Petugas AirNav Indonesia Cabang Kupang melakukan pelayanan navigasi penerbangan.  
*The personnel of AirNav Indonesia in the Kupang Branch provide air navigation services.*





Layanan navigasi penerbangan di AirNav Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pangkalpinang.  
*Air navigation services at the the Pangkalpinang Sub-branch Office of AirNav Indonesia.*

Tahun 2022 menjadi momentum titik balik bagi industri penerbangan. Pelonggaran pembatasan sosial dan persyaratan penerbangan udara mendorong peningkatan mobilitas masyarakat, yang berdampak pada peningkatan lalu lintas penerbangan. Peralihan masa pandemi COVID-19 menuju endemi menjadi permulaan era kenormalan baru bagi semua sektor, termasuk industri navigasi penerbangan. AirNav Indonesia menangkap momentum ini dengan terus bersatu dan mencatatkan sejumlah pencapaian positif di sepanjang tahun 2022.

The year 2022 is a turning point for the aviation industry. Easing social restrictions and air flight requirements led to increased mobility of people, which had an impact on increasing air traffic. The COVID-19 pandemic to endemic transition marked the beginning of a new normal era for all sectors, including the air navigation industry. AirNav Indonesia caught this momentum by staying united and recorded a number of positive achievements throughout 2022.





## Tinjauan Perekonomian dan Industri Economy and Industry Overview

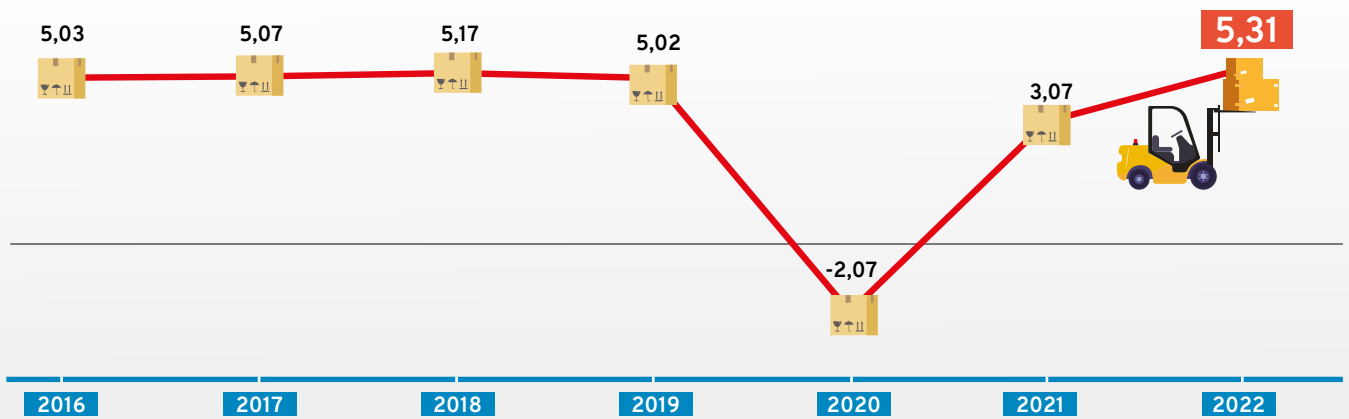
**B**ank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 sebesar 4,1%, sedikit melemah apabila dibandingkan pertumbuhan tahun 2021 yang sebesar 5,5%. Proyeksi tersebut didasari oleh kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, inflasi global, kebijakan nol-COVID di China, dan hambatan pasokan barang selama pembatasan sosial pandemi COVID-19. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi pemicu kenaikan harga energi, pangan, maupun komoditas lainnya, yang berimbas pada perekonomian global. Kondisi ini membuat Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022 menjadi 2,2%, dalam laporannya bertajuk *Global Economic Prospects* yang dirilis pada Juni 2022.

**T**he World Bank projected global economic growth in 2022 of 4.1%, slightly weaker than 2021 growth of 5.5%. This projection was based on the increase in interest rates from the United States Central Bank, global inflation, the zero-COVID policy in China, and the supply chain disruptions during the COVID-19 pandemic social restrictions. Russia's invasion of Ukraine has triggered an increase in the price of energy, food and other commodities, which has had an impact on the global economy. This condition prompted the World Bank to revise its 2022 global economic growth projection to 2.2%, in its report titled *Global Economic Prospects* released in June 2022.

Perekonomian Indonesia di tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dalam rilis berita resmi statistik No. 15/02/Th.XXVI tanggal 6 Februari 2023 tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan produk domestik bruto (PDB), Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan PDB tahun 2022 sebesar 5,31%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 yang sebesar 3,70%. Hasil tersebut bahkan melampaui PDB prapandemi tahun 2016-2019, yang berada pada kisaran 5,03-5,17%. Tercatat pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi dicapai sektor transportasi dan pergudangan, yakni sebesar 19,87%, dan sisi pengeluaran dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa, yakni sebesar 16,28%.

The Indonesian economy in 2022 showed positive growth. In the official news release statistics No. 15/02/Th.XXVI dated February 6, 2023 concerning Indonesia's economic growth based on Gross Domestic Product (GDP), the Central Agency on Statistics (BPS) stated that the 2022 GDP was 5.31%, higher than 2021 which was 3.70%. This result even exceeded the 2016-2019 pre-pandemic GDP, which was in the range of 5.03-5.17%. The highest recorded growth in terms of production was achieved by the transportation and warehousing sector at 19.87%. The expenditure side was achieved by exports of goods and services at 16.28%.

### ○ Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 2016-2022 (%) Gross Domestic Product Growth in 2015-2022 (%)



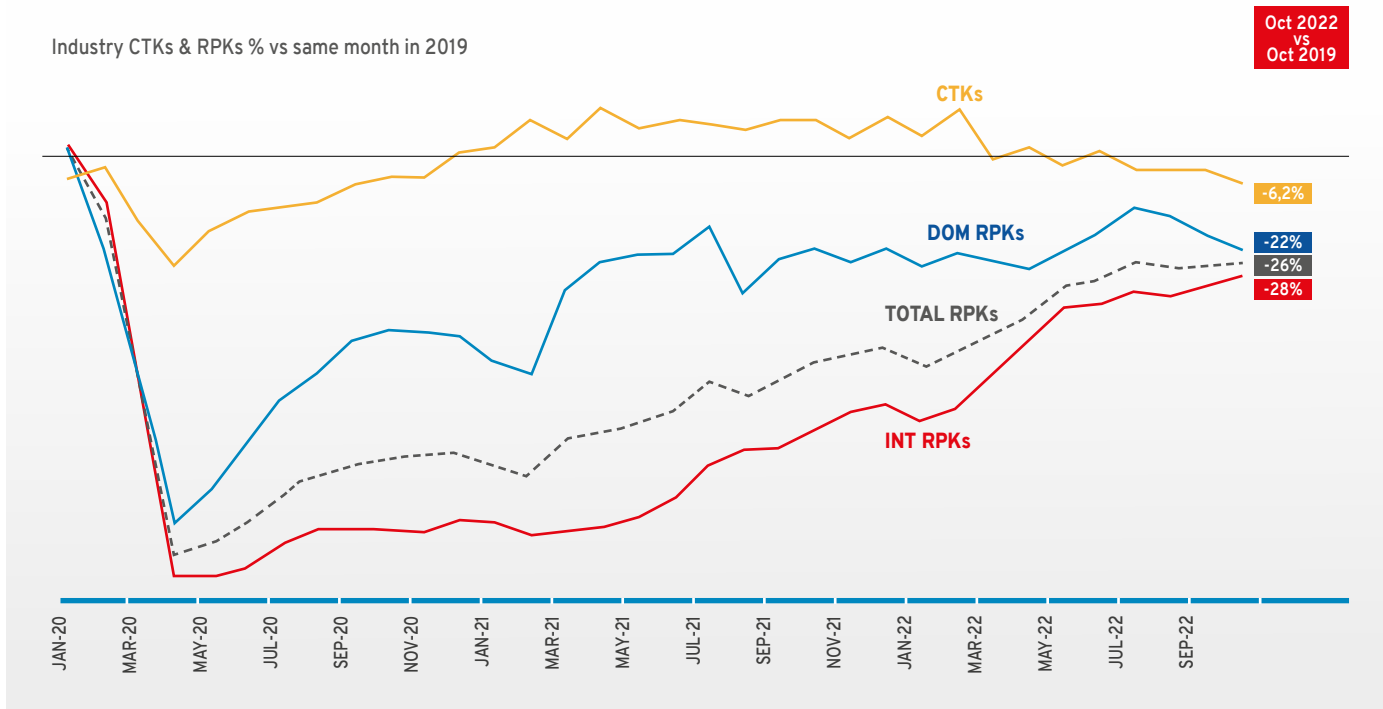
Sumber: Badan Pusat Statistik  
Source: The Central Agency on Statistics (BPS)

Pemulihan pada sektor penerbangan terus terjadi di sepanjang tahun 2022. International Air Transport Association (IATA) merilis *Air Passenger Market Analysis* Desember 2022 yang menyebutkan *Revenue Passenger Kilometer* (RPK) mengalami peningkatan signifikan. Adapun RPK merupakan indikator pendapatan bagi maskapai secara global. Apabila dibandingkan dengan RPK prapandemi, tercatat perbandingan RPK Desember 2022 meningkat menjadi 68,5% apabila dibandingkan RPK Desember 2021 yang sebesar 41,7%. Dalam siaran persnya, IATA juga menyebutkan pemulihan RPK dan *Cargo Tonne-Kilometres* (CTK) telah mencapai 74% dan 94% apabila dibandingkan dengan RPK dan CTK prapandemi.

*Recovery in the aviation sector continued throughout 2022. The International Air Transport Association (IATA) released the December 2022 Air Passenger Market Analysis which stated that the Revenue Passenger Kilometer (RPK) had experienced a significant increase. The RPK is a global indicator of revenue for airlines. When compared to the pre-pandemic RPK, it was recorded that the December 2022 RPK had increased to 68.5% compared to the December 2021 RPK which was 41.7%. In its press release, IATA also stated that the recovery of RPK and Cargo Tonne-Kilometres (CTK) had reached 74% and 94% compared to pre-pandemic RPK and CTK.*

**RPK dan CTK Tahun 2020-2022**  
*RPK and CTK in 2020-2022*

Industry CTKs & RPKs % vs same month in 2019



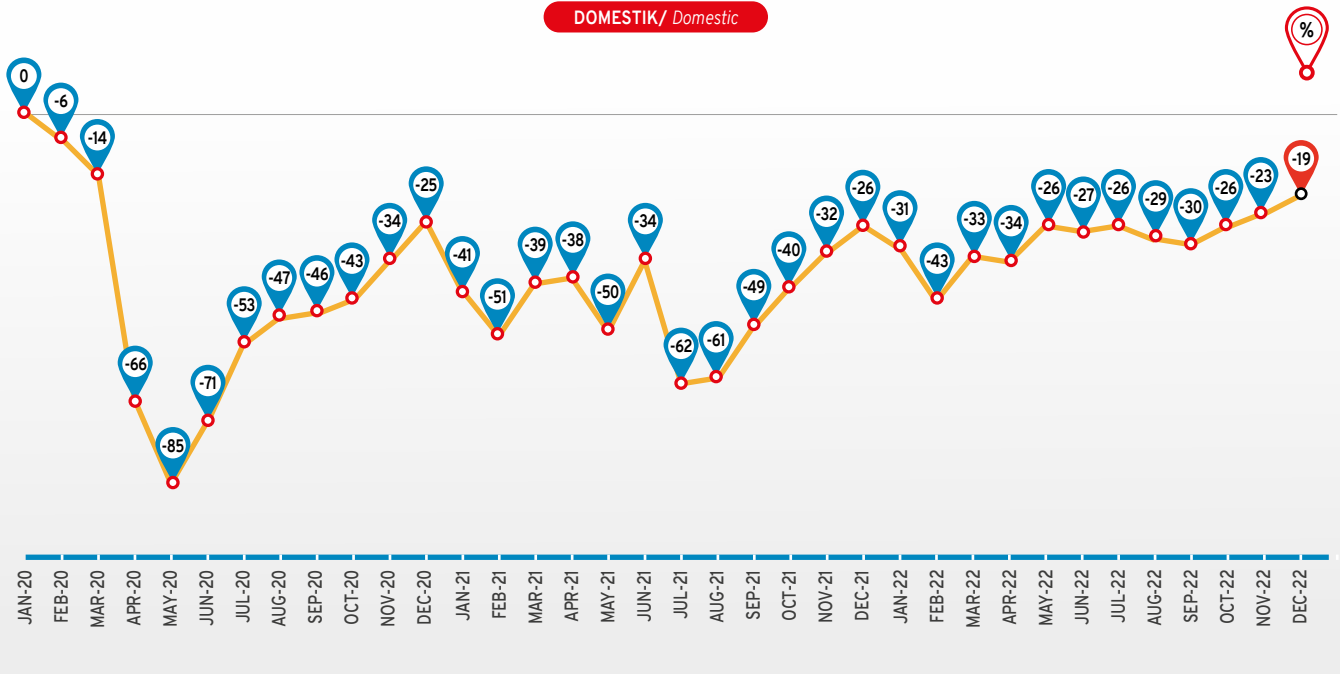
Source: IATA Monthly Statistics.

Sejalan dengan pemulihan transportasi udara, pergerakan lalu lintas penerbangan juga terus mengalami pemulihan, meskipun belum dapat menyamai pergerakan prapandemi. AirNav Indonesia mencatat pergerakan lalu lintas penerbangan domestik, internasional dan lintas udara (*overflying*) pada Desember 2022 berturut-turut sebesar -19%, -33%, dan -30% apabila dibandingkan *baseline* Januari 2020.

*In line with the recovery of air transportation, the movement of air traffic has also continued to recover although it has not been able to match pre-pandemic movements. AirNav Indonesia recorded movements of domestic, international, and overflying in December 2022 of -19%, -33% and -30% respectively compared to the January 2020 baseline.*

**Perbandingan Pergerakan Domestik 2020-2022 dengan Baseline Januari 2020**  
Domestic Movement Comparison in 2020-2022 with the January 2020 Baseline

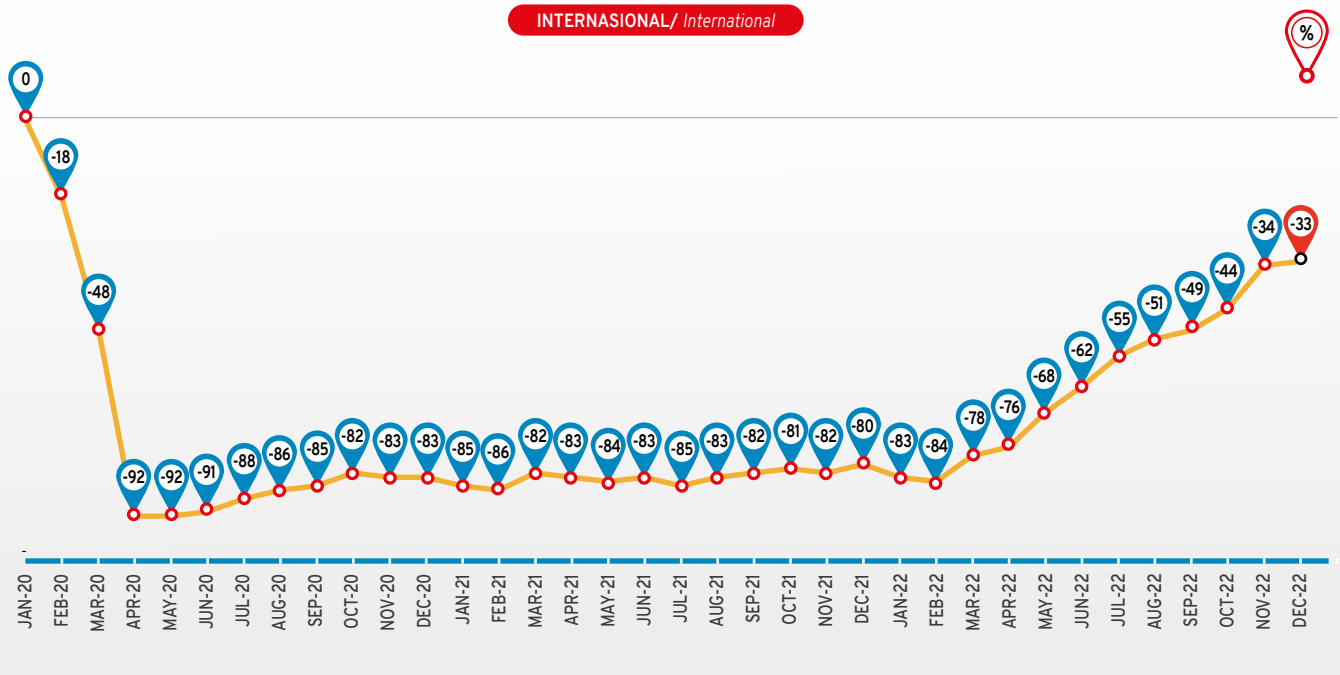
DOMESTIK/ Domestic



Source: Laporan Manajemen Tahun 2022 – Perum LPPNPI

**Perbandingan Pergerakan Internasional 2020-2022 dengan Baseline Januari 2020**  
International Movement Comparison in 2020-2022 with the January 2020 Baseline

INTERNASIONAL/ International



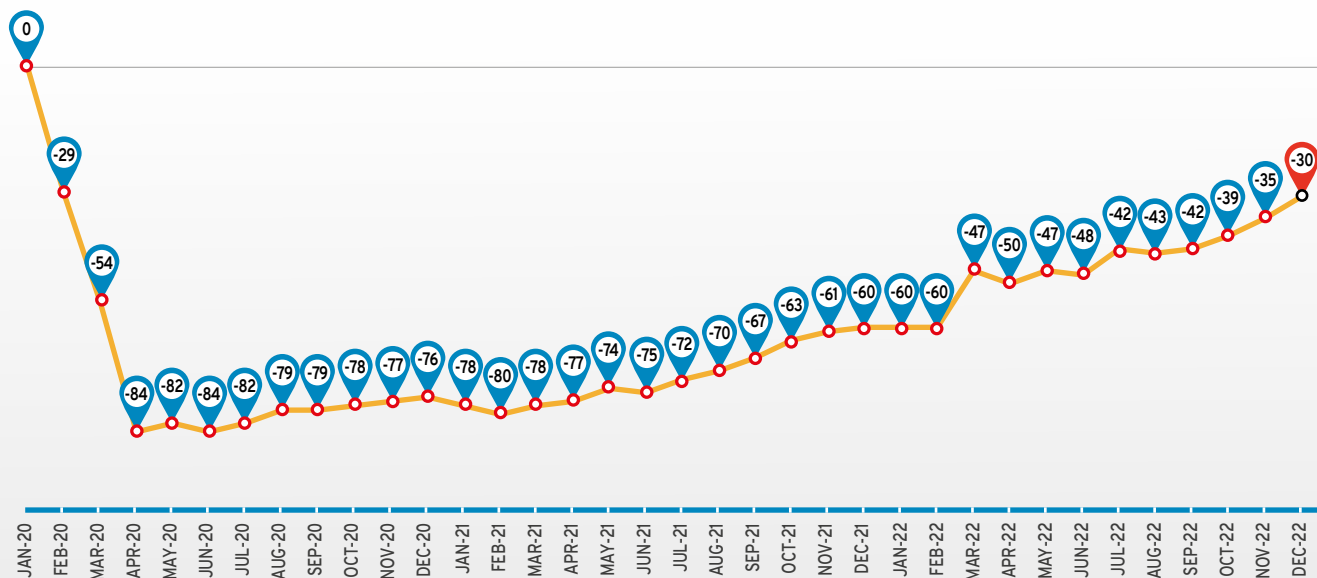
Source: Laporan Manajemen Tahun 2022 – Perum LPPNPI



## Perbandingan Pergerakan Overflying 2020-2022 dengan Baseline Januari 2020

Overflying Movement Comparison in 2020-2022 with the January 2020 Baseline

### OVERFLYING



Source: Laporan Manajemen Tahun 2022 – Perum LPPNPI

Sementara secara y.o.y pergerakan ketiga layanan pada Desember 2022 meningkat sebesar 26% untuk *traffic* domestik, 136% untuk *traffic* internasional, dan 90% untuk *traffic overflying* jika dibandingkan dengan Desember 2021. Peningkatan tersebut diproyeksikan akan terus berlangsung seiring dengan pemulihan sektor penerbangan global.

Meanwhile, on a YoY basis, the movement of the three services in December 2022 increased by 26% for domestic traffic, 136% for international traffic, and 90% for overflying traffic compared to December 2021. This increase is projected to continue in line with the recovery of the global aviation sector.

## Pergerakan Lalu Lintas Penerbangan 2021-2022

Air Traffic Movement in 2021-2022

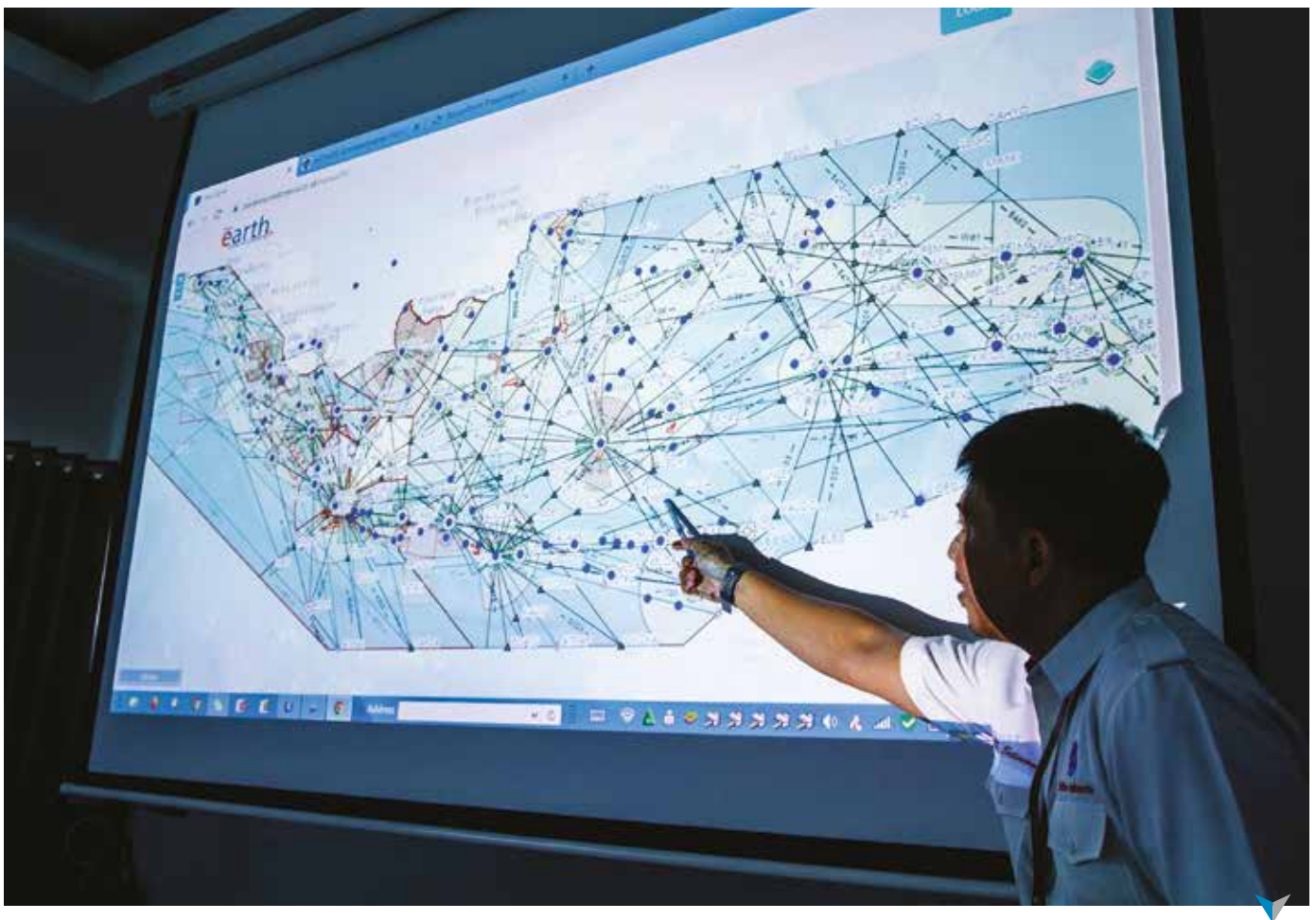
Pergerakan Lalu Lintas Penerbangan Air Traffic Movement	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Pergerakan/Movement		Pergerakan/Movement	%
Domestik/ Domestic	1.351.541	1.073.600	277.941	25,89
Internasional/ International	103.088	43.673	59.415	136,04
Overflying/ Overflying	81.982	43.149	38.833	89,99
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>1.536.611</b>	<b>1.160.422</b>	<b>376.189</b>	<b>32,42</b>
Rata-rata Traffic Movement per bulan Average Traffic Movement per month	128.051	96.702	31.349	32,42
Rata-rata Traffic Movement per hari Average Traffic Movement per day	4.210	3.179	1.031	32,43



## Sasaran Strategis Tahun 2022 *Strategic Objectives for 2022*

Sasaran strategis perusahaan tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020 - 2024. Dalam rancangan RJPP tersebut, perusahaan menetapkan sasaran strategis dengan sejumlah proses mengacu pada Tahapan Perumusan Strategi dan Tahapan Perencanaan Strategi dalam Sistem Manajemen Strategis. Dalam proses penetapan Sasaran Strategis, AirNav Indonesia menggunakan metode/tools *Balanced Scorecard*. Dengan menggunakan *Balanced Scorecard* memungkinkan perusahaan untuk menetapkan Sasaran strategis yang merupakan turunan dari Misi, Visi, dan Tujuan Perusahaan, dengan menekankan pada prinsip keseimbangan dan keselarasan antara perspektif keuangan dengan non keuangan serta aspek internal dengan aspek eksternal.

The company's strategic objectives for 2022 are outlined in the Company's Long Term Plan (RJPP) draft for 2020 - 2024. In the draft RJPP, the company determines strategic objectives with a number of processes referring to the Stages of Strategy Formulation and Stages of Strategic Planning in the Strategic Management System. In the process of setting Strategic Objectives, AirNav Indonesia uses the *Balanced Scorecard* method/tools. Using the *Balanced Scorecard* allows the company to set Strategic Objectives which are derivatives of the Company's Mission, Vision and Goals, by emphasizing the principles of balance and harmony between financial and non-financial perspectives as well as internal and external aspects.



Staf AirNav Indonesia Cabang Pembantu Pangkalpinang menunjukkan peta layanan navigasi penerbangan.  
*The AirNav Indonesia staff at the Pangkalpinang Sub-branch is pointing at an aeronautical chart.*

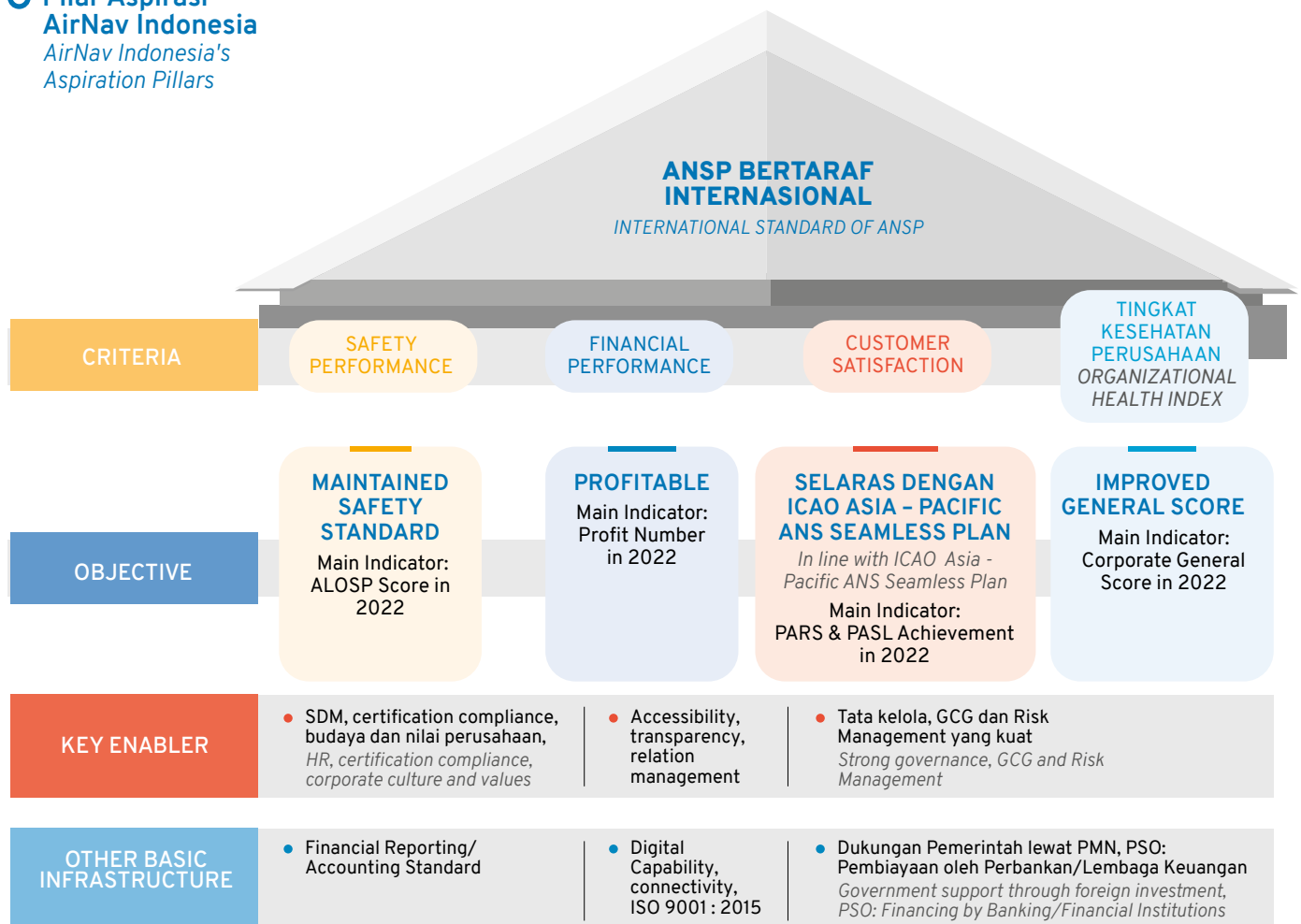




Sebagai perusahaan yang memiliki visi menjadi penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang bertaraf internasional, dengan salah satu nilai pelayanan yang ditawarkan yaitu komitmen untuk senantiasa memberikan kualitas pelayanan yang menekankan pada keselamatan dan keamanan sebagaimana tertuang dalam misi Perusahaan, AirNav Indonesia menurunkan nilai yang terkandung dalam misi dan visi tersebut sebagai sasaran utama yang harus dicapai dalam menjalankan bisnis Perusahaan, yaitu pemenuhan standar keselamatan dan standar operasional pelayanan. Namun, sebagai Perusahaan yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN, AirNav Indonesia turut memperhatikan aspek finansial guna menunjang keberlanjutan bisnis perusahaan (*business continuity/sustainability*). Oleh karena itu sebelum menetapkan sasaran strategis, AirNav Indonesia memetakan sasaran utama yang harus dicapai dalam menjalankan bisnisnya, yang selanjutnya dikelompokkan dalam 4 (empat) kriteria di mana setiap kriteria memiliki target utama. Adapun target utama tahun 2022 dari setiap kriteria ditunjukkan pada gambar Pilar Aspirasi AirNav Indonesia di bawah ini.

As a company with a vision of becoming an international standard air navigation service provider, one of the service values offered is the commitment to always providing quality service that emphasizes safety and security as stated in the Company's mission. AirNav Indonesia incorporates the values contained in the mission and vision as the main goals that must be achieved in running the Company's business, namely compliance with safety standards and service operational standards. However, as a company under the Ministry of SOEs, AirNav Indonesia also pays attention to financial aspects to support the company's business continuity/sustainability. Therefore, before setting strategic objectives, AirNav Indonesia maps out the main objectives that must be achieved in running its business, which are then grouped into 4 (four) criteria where each criterion has a main target. The main targets for 2022 for each criterion are shown in the figure of AirNav Indonesia's Aspiration Pillars below.

**Pilar Aspirasi AirNav Indonesia**  
*AirNav Indonesia's Aspiration Pillars*






Dengan sasaran utama yang telah ditetapkan sebelumnya, lebih mengarahkan AirNav Indonesia dalam merumuskan sasaran strategis. Setiap sasaran strategis selanjutnya dijabarkan menjadi inisiatif strategis yang merupakan strategi Perusahaan yang dilaksanakan guna mencapai target dalam sasaran strategis. Inisiatif strategis juga menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi (*action plan*) atau lebih umum disebut sebagai rencana kerja manajemen (RKM) di lingkungan AirNav Indonesia. Penjabaran sasaran strategis, inisiatif strategis beserta target (indikator) dan RKM terlah tertuang dalam rancangan RJPP tahun 2020 - 2024, namun untuk penetapan indikator beserta RKM tahunan secara rinci dan pasti termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah mengacu pada Aspirasi Pemegang Saham (APS) yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN setiap tahun.

*With the main objectives that have been previously set, it will direct AirNav Indonesia in formulating strategic objectives. Each strategic objectives is further translated into strategic initiatives which are the Company's strategy implemented to achieve the targets in the strategic objectives. Strategic initiatives are also a reference in preparing action plans or more commonly referred to as management work plans (RKM) within AirNav Indonesia. The elaboration of strategic objectives, strategic initiatives along with targets (indicators), and RKM has been set forth in the 2020 - 2024 RJPP draft. However, detailed and definite determination of indicators along with annual RKM can be found in the Corporate Work and Budget Plan (RKAP) which refers to the Shareholder Aspiration (APS) issued by the Ministry of SOE every year.*

## Sasaran Strategis (Strategic Objectives) dan Inisiatif Strategis (Strategic Initiatives) Tahun 2020-2024

## Strategic Objectives and Strategic Initiatives for 2020-2024

NO	STRATEGIC OBJECTIVES (SO)	STRATEGIC INITIATIVES (SI)
1	<p><b>Sarana dan Prasarana Pelayanan Navigasi Penerbangan yang Modern dan Handal</b></p>  <p><i>Modern and Reliable Air Navigation Service Facilities and Infrastructure</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pelayanan navigasi penerbangan di atas Kepulauan Riau.</li> <li>• Mempertahankan dan meningkatkan kualitas keselamatan serta keamanan pelayanan navigasi penerbangan.</li> <li>• Memberikan dukungan layanan navigasi dan peran sosial guna peningkatan ekonomi daerah termasuk pada wilayah 3T &amp; KSPN.</li> </ul> <p><i>• Preparation of air navigation services over the Riau Archipelago.</i></p> <p><i>• Maintain and improve the quality of safety and security of air navigation services.</i></p> <p><i>• Providing support for navigation services and social roles to improve the regional economy, including in the 3T &amp; KSPN areas.</i></p>
2	<p><b>Manajemen Pelayanan Navigasi Penerbangan yang Aman, Efektif dan Efisien</b></p>  <p><i>Management of Safe, Effective and Efficient Air Navigation Services</i></p>	<p>Mempertahankan &amp; meningkatkan kinerja pelayanan operasional &amp; cost efficiency.</p> <p><i>Maintain and improve operational service performance &amp; cost efficiency.</i></p>
3	<p><b>Teknologi Pendukung yang Mutakhir</b></p>  <p><i>Advanced Supporting Technology</i></p>	<p>Pembangunan AirNav Data Service sebagai barometer data penerbangan.</p> <p><i>Development of AirNav Data Service as a flight data barometer.</i></p>





NO	STRATEGIC OBJECTIVES (SO)	STRATEGIC INITIATIVES (SI)
<p>4</p>	<p><b>Peningkatan yang Berkelanjutan</b></p>  <p><i>Continuous Improvement</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Transformasi proses bisnis, peningkatan kinerja dan optimalisasi pendapatan Non PJNP.</li> <li>● Memaksimalkan penerimaan pembayaran dari pengguna jasa.</li> <li>● Perumusan <i>single specific airport pricing</i> sebagai dasar pengajuan subsidi pemerintah.</li> <li>● <i>Agile</i> dalam birokrasi dan kemudahan bisnis.</li> <li>● <i>Business process transformation, performance improvement and optimization of non-air navigation revenue.</i></li> <li>● <i>Maximizing receipts of payment from customers.</i></li> <li>● <i>Formulation of a single specific airport pricing as a basis for submitting government subsidies.</i></li> <li>● <i>Agile in bureaucracy and ease of business.</i></li> </ul>
<p>5</p>	<p><b>Manajemen Risiko</b></p>  <p><i>Risk Management</i></p>	<p>Optimalisasi manajemen risiko.</p> <p><i>Optimization of risk management.</i></p>
<p>6</p>	<p><b>Kompetensi SDM</b></p>  <p><i>HR Competence</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembentukan <i>AirNav Training Center</i>.</li> <li>● Penyesuaian (<i>shifting</i>) to talent management system.</li> <li>● <i>Establishment of AirNav Training Center.</i></li> <li>● <i>Shifting to talent management system.</i></li> </ul>
<p>7</p>	<p><b>Teknologi Informasi yang Efektif dan Terintegrasi</b></p>  <p><i>Effective and Integrated Information Technology</i></p>	<p>Penelitian, pengembangan, dan implementasi industri 4.0 pada pelayanan navigasi penerbangan.</p> <p><i>Research, development and implementation of industry 4.0 in air navigation services.</i></p>
<p>8</p>	<p><b>Struktur Organisasi yang Efektif</b></p>  <p><i>Effective Organizational Structure</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penguatan kinerja dan budaya inovasi.</li> <li>● Penyesuaian struktur organisasi korporat.</li> <li>● <i>Strengthening performance and innovation culture.</i></li> <li>● <i>Adjustment of corporate organizational structure.</i></li> </ul>
<p>9</p>	<p><b>Tata Kelola Perusahaan</b></p>  <p><i>Corporate Governance</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan penerapan <i>good corporate governance</i>.</li> <li>● Peningkatan <i>shareholder value</i>.</li> <li>● <i>Improving the implementation of good corporate governance.</i></li> <li>● <i>Improving shareholder value.</i></li> </ul>



AirNav Indonesia telah melakukan sejumlah program strategis sebagai salah satu upaya dan langkah dalam mencapai sasaran dan target perusahaan. Definisi program strategis bagi AirNav Indonesia salah satunya mengacu pada Proyek Strategis Nasional. Menurut Peraturan Presiden No. 3 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2021, Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dari pengertian tersebut, definisi program strategis bagi AirNav Indonesia adalah program baru yang bersifat strategis, dilihat dari segi dampak yang sifatnya positif dan/atau signifikan serta dapat dirasakan dalam waktu lama (jangka panjang). Adapun sejumlah program strategis yang dilakukan di tahun 2022 adalah:

*AirNav Indonesia has carried out a number of strategic programs to achieve the company's goals and targets. One of the definitions of a strategic program for AirNav Indonesia refers to the National Strategic Project. According to Presidential Regulation No. 3 of 2016 and Government Regulation no. 42 of 2021, National Strategic Projects are projects implemented by the Government, Regional Governments, and/or business entities that have a strategic nature to increase growth and equitable development in the context of improving community welfare and regional development. From this definition, a strategic program for AirNav Indonesia is defined as a new program that is strategic in nature, in terms of positive and/or significant impacts that can be felt in the long run. The following are strategic programs carried out in 2022:*

1 Melakukan peningkatan pelayanan pada ruang udara lapis atas baik *control area* dan *upper control area* dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasi maskapai sebagai customer utama perusahaan. Adapun program meliputi persiapan implementasi PBN *Regional Route RNP2* antara *City Pair* Jakarta dan Singapura, PBN *Domestic Route RNAV2 Cluster* Surabaya-Papua, serta menindaklanjuti percobaan ZEIN ATS *Inter-facility Data Communication (AIDC)* antara JATSC dan MATSC;

1 *Improving services in the upper airspace, both the control area and the upper control area, with the aim of improving the safety and efficiency of airline operations as the company's main customer. The program includes preparing for the implementation of PBN Regional Route RNP2 between City Pair Jakarta and Singapore, PBN Domestic Route RNAV2 Cluster Surabaya-Papua, as well as following up on the ZEIN ATS Inter-facility Data Communication (AIDC) trial between JATSC and MATSC;*

2 Melakukan peningkatan pelayanan pada ruang udara lapis bawah, baik *control zone*, *terminal control area*, dan *sector* yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional penerbangan. Adapun program berupa evaluasi rute *Visual Flight Rules (VFR)* di area Surabaya untuk mengevaluasi dan mengakomodasi kebutuhan jalur penerbangan VFR di wilayah Surabaya;

2 *Improving services in the lower airspace, including control zones, terminal control areas and sectors, with the aim of improving the safety and efficiency of flight operations. The program is in the form of evaluating Visual Flight Rules (VFR) routes in the Surabaya area to evaluate and accommodate the needs of VFR flight paths in the Surabaya area;*

3 Melakukan peningkatan pelayanan *Aerodrome* untuk peningkatan keselamatan penerbangan dan mengakomodasi kebutuhan pemberian navigasi penerbangan. Adapun program kerja meliputi implementasi prosedur helikopter di Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Sultan Hasanuddin Makassar, implementasi prosedur CTAF & TIBA;

3 *Improving Aerodrome services to improve flight safety and accommodate the need for providing air navigation. The work program includes implementing helicopter procedures at Tjilik Riwut Palangkaraya Airport, Sultan Hasanuddin Makassar, implementing CTAF & TIBA procedures;*

4 Melakukan peningkatan *Flight Information Service (FIS)*, dengan konsolidasi pengelolaan ruang udara *uncontrolled* dari 8 (delapan) lokasi menjadi 6 (enam) lokasi yakni sektor Pontianak ke Jakarta dan Sektor Palembang ke Medan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas suara dan jangkauan radio *High Frequency (HF)* dengan menggunakan teknologi radio HF *Spira-cone*;

4 *Improving the Flight Information Service (FIS), by consolidating the management of uncontrolled airspace from 8 (eight) locations to 6 (six) locations, namely the Pontianak sector to Jakarta and the Palembang sector to Medan. This initiative aims to improve the voice quality and range of High Frequency (HF) radio by using HF Spira-cone radio technology;*



5 Melakukan telaah terhadap *Service Continuity Guidance* (SCG) sebagai panduan pengelolaan personel, manajemen sektor dan *traffic*, serta mempersiapkan kompetensi personel operasional pelayanan dengan melakukan prosedur RESTART yaitu memberikan pembekalan hingga simulasi prosedur pelayanan sesuai dengan kondisi penerbangan normal pada saat sebelum pandemi;

5 *Conducting a review of Service Continuity Guidance (SCG) as a guideline for personnel management, sector management and traffic, as well as preparing the competence of service operational personnel by carrying out RESTART procedures, namely providing debriefing to simulating service procedures in accordance with normal flight conditions before the pandemic;*

6 *Realignment* FIR Jakarta, yaitu program strategis yang merupakan bentuk ekspansi pelayanan yang *profitable*. Melalui pelaksanaan program ini, terjadi penetapan kewenangan pelayanan navigasi penerbangan oleh Indonesia di ruang udara Natuna yang selama ini dilayani oleh Singapura, sehingga selanjutnya penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan di atas Natuna akan dilakukan oleh AirNav Indonesia. Hal ini memberikan potensi penambahan trafik penerbangan yang berdampak pada penambahan pendapatan usaha;

6 *FIR Jakarta realignment is a strategic program which is a form of profitable service expansion. Through the implementation of this program, Indonesia has determined the authority for air navigation services in the Natuna air space, which was served by Singapore. Therefore, AirNav Indonesia will then take over air navigation services in Natuna. This provides the potential for additional flight traffic which has an impact on increasing business income;*

7 Implementasi CRV, merupakan salah satu program yang dilakukan guna mewujudkan suatu jaringan pelayanan navigasi penerbangan secara terpadu, serasi, dan harmonis dalam lingkup nasional, regional dan internasional. AirNav Indonesia secara konstan dan berkesinambungan berupaya mengatasi keterbatasan koneksi jaringan dan komunikasi yang saat ini masih rentan terhadap gangguan;

7 *CRV implementation is one of the programs aimed to create an integrated, compatible, and harmonious network of air navigation services within the national, regional, and international scope. AirNav Indonesia is constantly and continuously trying to overcome the limitations of network connections and communications which are currently still vulnerable to interruptions;*

8 Implementasi dan pengembangan *host-to-host*, merupakan sistem yang dikembangkan secara internal oleh AirNav Indonesia guna memperbaiki kualitas penagihan terutama dari segi waktu. Dari penggunaan sistem *host-to-host*, AirNav Indonesia telah berhasil menurunkan/memperpendek *average collection period* (ACP) tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, meskipun belum mencapai angka ACP yang ditargetkan;

8 *Host-to-host implementation and development is a system developed internally by AirNav Indonesia to improve billing quality, especially in terms of time. By using the host-to-host system, AirNav Indonesia has succeeded in reducing/shortening the 2022 average collection period (ACP) compared to 2021, although it has not yet reached the targeted ACP figure;*

9 Optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan, yaitu merupakan salah satu bentuk inovasi bisnis AirNav Indonesia yang berdampak pada peningkatan pendapatan non PJNP. Dalam program ini, AirNav Indonesia menyewakan aset yang dimiliki kepada pihak ketiga, di antaranya menyewakan lahan untuk mesin anjungan tunai mandiri (ATM) milik sejumlah bank BUMN serta menyewakan lahan untuk penempatan *base transceiver station* (BTS) milik perusahaan telekomunikasi.

9 *Optimizing the utilization of company resources, which is business innovation by AirNav Indonesia to increase non-air navigation revenues. In this program, AirNav Indonesia leases its assets to third parties, including renting space for automatic teller machines (ATMs) belonging to a number of state-owned banks and base transceiver stations (BTS) owned by telecommunication companies.*



## Arah Pengembangan AirNav Indonesia

Secara umum, AirNav Indonesia memiliki arah pengembangan usaha yang dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1

Pengembangan usaha yang terkait dengan aktivitas/bisnis utama (*core activities*) AirNav Indonesia. Adapun kegiatan yang masuk dalam rencana pengembangan usaha ini di antaranya adalah:

- Optimalisasi penyelenggaraan navigasi penerbangan di teritori Indonesia yang belum terlayani, seperti Miangas dan Tanjung Datuk;
- Penyelenggaraan navigasi penerbangan di Bandara Khusus;
- Penyelenggaraan navigasi penerbangan untuk *unmanned aircraft system (UAS)/drone*.

2

Pengembangan usaha terkait kegiatan yang mendukung aktivitas/bisnis utama AirNav Indonesia. Adapun kegiatan yang merupakan rencana pengembangan usaha ini di antaranya adalah:

- Jasa konsultasi kepada pengguna jasa, seperti konsultasi konsep manajemen ruang udara, konsultasi jalur penerbangan dan prosedur penerbangan, serta konsultasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- Jasa lainnya, seperti penyediaan data penerbangan yang dapat digunakan untuk kepentingan komersial atau di luar kebutuhan operasional penerbangan;
- Pengembangan *AirNav Training Center*, yang salah satunya bertujuan untuk menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan yang terkait bidang navigasi penerbangan;
- Pengembangan *AirNav Repair Center*, yang salah satunya bertujuan menjadi mitra yang diandalkan bagi operator penerbangan di wilayah Asia Tenggara atau bahkan di Asia, melalui penyediaan kegiatan pemeliharaan peralatan navigasi penerbangan;
- Optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki AirNav Indonesia kepada pihak ketiga.

## Direction of AirNav Indonesia Development

In general, AirNav Indonesia has a direction of business development which is divided into the following 2 (two) groups:

1

Business development related to AirNav Indonesia's core activities/business. The activities included in this business development plan include:

- Optimizing the operation of air navigation in Indonesian territories that have not been served, such as Miangas and Tanjung Datuk;
- Organizing air navigation at Special Airports;
- Implementing air navigation for unmanned aircraft systems (UAS)/drones.

2

Business development related to activities that support AirNav Indonesia's main activities/business. The activities that constitute this business development plan include:

- Consultancy services for customers, such as airspace management concept consultancy, flight path and flight procedure consultancy, as well as Aviation Operation Safety Zone (KKOP) consultancy;
- Other services, such as providing flight data that can be used for commercial purposes or outside of flight operational needs;
- Development of the AirNav Training Center, which aims to organize training and education related to air navigation;
- Development of AirNav Repair Center, which aims to become a reliable partner for flight operators in the Southeast Asia region or even in Asia, by providing maintenance activities for air navigation equipment;
- Optimizing the utilization of assets owned by AirNav Indonesia to third parties.



Selain arah pengembangan usaha, AirNav Indonesia juga memiliki arah atas pengembangan aktifitas yang merupakan pemampu (*enabler activity*), yang merupakan pondasi dasar sebagai penunjang bisnis perusahaan secara menyeluruh. Peningkatan pada *enabler activity* ini akan memberikan nilai tambah serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan AirNav Indonesia. *Enabler activity* mencakup kegiatan terkait SDM, IT, sertifikasi, pengelolaan kinerja dan GCG, serta manajemen risiko. Sejumlah *enabler activity* memiliki arah pengembangan yang salah satunya mengacu pada Kementerian BUMN, seperti:

*In addition to the direction of business development, AirNav Indonesia also has a direction for the development of enabler activity which are the basic foundation to support the company's business as a whole. The increase in enabler activity will provide added value and improve the quality of services provided by AirNav Indonesia. Enabler activity includes activities related to HR, IT, certification, performance management and GCG, and risk management. A number of enabler activities have development directions, one of which refers to the Ministry of SOEs, such as:*

1



Pengembangan SDM, yang mengacu pada *grand strategy* pengelolaan SDM Kementerian BUMN, di antaranya melalui manajemen karir serta manajemen talenta. Selain itu, pengembangan SDM juga dilakukan melalui internalisasi AKHLAK sebagai upaya transformasi SDM dalam rangka menghasilkan individu yang berkarakter dan berdaya saing global;

*HR development refers to the grand strategy of HR management at the Ministry of SOEs through career management and talent management. In addition, HR development is also carried out through AKHLAK internalization as an effort to transform human resources in order to produce individuals with character and global competitiveness;*

2



Manajemen risiko perusahaan, di antaranya melalui perumusan risiko yang mengacu pada kebijakan selera risiko Kementerian BUMN, serta pelaksanaan penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) dengan menggunakan panduan penilaian RMI Kementerian BUMN;

*Corporate risk management is carried out through risk formulation referring to the risk appetite policy of the Ministry of SOEs, as well as the implementation of the Risk Maturity Index (RMI) assessment using the Ministry of SOEs' RMI assessment guide;*

3



Pengelolaan teknologi informasi (TI) yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/2018 tahun 2018, di antaranya digunakan dalam menyusun *Master Plan* TI, serta pelaksanaan penilaian tingkat maturitas TI dan INDI 4.0 sekaligus menyusun strategi/langkah tindak lanjut guna mengisi *gap* hasil penilaian.

*Management of information technology (IT) which refers to the Minister of SOEs Regulation No. Per-03/MBU/2018 of 2018, among others, is used in compiling an IT Master Plan, as well as carrying out IT and INDI 4.0 maturity level assessments including developing strategies/ follow-up steps to fill gaps in the assessment results.*



## Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi

AirNav Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap aspek keselamatan penerbangan sesuai tujuan awal pendirian Perusahaan. Pencapaian keselamatan (safety) menjadi salah satu kriteria penilaian kinerja pelayanan navigasi penerbangan. AirNav Indonesia mengukur *Acceptable Level of Safety Performance (AloSP)* setiap bulan dan mengadopsinya dalam *Safety Rate* yang menjadi salah satu *Key Performance Indicator (KPI)* perusahaan. Selain itu, AirNav Indonesia juga melakukan kegiatan pemenuhan program *Air Navigation Services Security Program (ANSSP)*, sertifikasi SMK3, implementasi *Security Information and Event Management*, serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) melalui Direktorat Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi.

Perusahaan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemantauan, dan evaluasi terhadap data, informasi, dan laporan keselamatan yang diterima dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan (*safety management system-SMS*). SMS memiliki pendekatan secara sistematis yakni reaktif dan proaktif untuk mengidentifikasi kondisi yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan (*hazards*), mengumpulkan data dan informasi keselamatan penerbangan, serta melakukan penilaian berkelanjutan terhadap risiko keselamatan penerbangan. SMS berfungsi sebagai mitigasi terhadap risiko keselamatan sebelum meningkat menjadi insiden atau kecelakaan.

Perusahaan menerima 5.580 laporan keselamatan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan klasifikasi laporan 6 *accident*, 39 *serious incident*, 107 *incident*, dan 5.428 *hazard*.

## Safety, Security and Standardization

AirNav Indonesia has a strong commitment to aviation safety aspects in accordance with the initial objectives of the company's establishment. The achievement of safety is one of the criteria for evaluating the performance of air navigation services. AirNav Indonesia measures the *Acceptable Level of Safety Performance (AloSP)* every month and adopts it in the *Safety Rate* which is one of the company's *Key Performance Indicators (KPI)*. In addition, AirNav Indonesia also carries out activities to fulfill the *Air Navigation Services Security Program (ANSSP)*, OHSMS certification, implementation of *Security Information and Event Management*, and environmental management and monitoring (*EMP-Environmental Monitoring Plan*) through the Directorate of Safety, Security and Standardization.

The company collects, monitors, and evaluates data, information, and safety reports by implementing a safety management system (*safety management system/SMS*). SMS has a systematic approach, namely reactive and proactive to identify conditions that have the potential to disrupt flight safety (*hazards*), collect flight safety data and information, and carry out ongoing assessments of aviation safety risks. SMS serves as a mitigation against safety risks before they escalate into incidents or accidents.

As of December 31, 2022, the company has received 5,580 safety reports classified as 6 accidents, 39 serious incidents, 107 incidents, and 5,428 hazards.

**LAPORAN KESELAMATAN**  
Safety reports

**5.580**

sampai dengan  
31 Desember 2022,  
As of December 31, 2022



dengan  
klasifikasi  
laporan  
reports  
classified

**6** accidents,

**39** serious incidents,

**107** incidents, and

**5.428** hazards.

Setiap kejadian keselamatan yang termasuk *accident*, *serious incident*, dan *incident* telah diteruskan kepada Dirjen Perhubungan Udara dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Sementara kategori *hazard* dianalisis lebih lanjut oleh internal Perusahaan. KNKT telah melakukan investigasi terhadap *accident* yang terjadi dan dipastikan bahwa AirNav Indonesia tidak berkontribusi sebagai faktor penyebab terjadinya *accident* tersebut.

AirNav Indonesia senantiasa melakukan evaluasi atas setiap laporan keselamatan yang diterima. Budaya pelaporan keselamatan cenderung meningkat setiap tahunnya, terutama pelaporan potensi bahaya (*hazard*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat maturitas dari implementasi SMS meningkat. Personel AirNav Indonesia terbuka dan proaktif dalam melaporkan kejadian keselamatan dan potensi bahaya untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.

*Every safety incident, including accidents, serious incidents, and incidents, has been forwarded to the Director General of Civil Aviation and the National Transportation Safety Committee (NTSC). Meanwhile, the hazard category is further analyzed internally by the Company. The KNKT has conducted an investigation into the accident that occurred and confirmed that AirNav Indonesia did not cause the accident.*

*AirNav Indonesia always evaluates every safety report it receives. The culture of safety reporting tends to increase every year, especially reporting potential hazards. This shows the increased maturity level of SMS implementation. AirNav Indonesia personnel are open and proactive in reporting safety incidents and potential hazards to improve flight safety.*

## Direktorat Teknik

Direktorat Teknik bertanggung jawab dalam menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi di bidang teknik pelayanan navigasi penerbangan. Terdapat 3 (tiga) divisi dalam direktorat teknik, yakni:

## Directorate of Engineering

*The Directorate of Engineering is responsible for managing the function of formulating and establishing policies and strategies in the engineering side of air navigation services. There are 3 (three) divisions under the Directorate of Engineering, namely:*

1

### Divisi Desain dan Rekayasa Teknik,

yang memiliki fungsi perencanaan dan pengembangan fasilitas navigasi penerbangan, pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan, pembuatan desain dan rekayasa fasilitas navigasi penerbangan, penyiapan dokumen teknis, serta melakukan proses pengadaan barang dan jasa terkait teknik. RKM Divisi Desain dan Rekayasa Teknik terdiri dari dua program, yaitu penunjang program investasi dan program dukungan PMN. Adapun realisasi program kerja Divisi pada tahun 2022, di antaranya pengujian hasil pekerjaan Tower Lampung; evaluasi dan perencanaan fasilitas VSCS Frequentis JATSC; penyusunan dokumen investasi usulan RKAP tahun 2023 pengadaan ATC system Medan; pembuatan dokumen KKO untuk program pengadaan dan penggantian ATC system di Balikpapan, Medan, Pontianak, Surabaya, Yogyakarta, JATSC, dan MATSC; serta pemeriksaan proteksi petir di *Grounding System* di Tanjung Pinang.

1

### Technical and Engineering Design Division,

*which is responsible for planning and developing air navigation service facilities, the maintenance of air navigation facilities, designing and engineering air navigation facilities, drafting technical documents as well as performing the procurement process of goods and services related to engineering. The Management Work Plan of Technical and Engineering Design Division consists of two programs, namely investment program support and State Equity Participation (PMN) support program. The realization of the Division's work program in 2022 includes testing the construction of Tower Lampung; evaluation and planning of VSCS Frequentis JATSC facilities; preparation of investment proposal documents for the 2023 Company Work Program and Budget (WPB) for the procurement of the Medan ATC system; preparation of KKO documents for ATC system's procurement and replacement programs in Balikpapan, Medan, Pontianak, Surabaya, Yogyakarta, JATSC, and MATSC; as well as inspection of lightning protection at the Grounding System in Tanjung Pinang.*





Petugas teknik AirNav Indonesia memeriksa peralatan navigasi penerbangan. Pemeriksaan dilakukan secara berkala untuk memastikan peralatan selalu berfungsi dengan baik.  
*AirNav Indonesia engineers are inspecting air navigation equipment. Regular check-ups are administered to ensure all equipment always functions properly.*

**2** **Divisi Kesiapan Fasilitas Teknik**  
Memiliki fungsi melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan progres fisik pekerjaan investasi dan eksploitasi pemeliharaan fasilitas. Adapun realisasi program kerja Divisi pada tahun 2022, di antaranya perbaikan fasilitas teknik, jaringan komunikasi teknik, optimalisasi dan pengiriman fasilitas teknik, dan pendampingan personal untuk perbaikan fasilitas.

**2** **Technical Facility Readiness Division**  
Has the function of carrying out facility operation and maintenance activities as well as supervising the implementation of the physical progress of investment work and facility maintenance exploitation. As for the realization of the Division's work program in 2022, it includes repairs on technical facilities, technical communication networks, optimization and delivery of technical facilities, and personal assistance for facility repairs.

**3** **Divisi Manajemen Data & Logistik**  
Memiliki tugas dalam melakukan pencatatan, pelaporan, dan menganalisa data terkait fasilitas navigasi penerbangan, serta melakukan evaluasi pelaksanaan investasi. Adapun realisasi program kerja Divisi pada tahun 2022, di antaranya pemetaan kekuatan Tower ATC di Perum LPPNPI terhadap ketahanan gempa, pengembangan implementasi aplikasi ALIMS, pendistribusian dan pengujian suku cadang, dan pengembangan aplikasi manajemen personel.

**3** **Data & Logistics Management Division**  
Has the duties of recording, reporting, and analyzing data related to air navigation facilities as well as evaluating the implementation of investments. As for the realization of the Division's work program in 2022, it includes mapping the earthquake resistance of the ATC Tower at Perum LPPNPI, developing the implementation of the ALIMS application, distributing and testing spare parts, and developing personnel management applications.





## Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

### Operational Overview by Lines of Business

**A**irNav Indonesia menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan dengan berfokus pada keselamatan penerbangan, dan tidak berorientasi pada keuntungan. Meskipun demikian AirNav Indonesia tetap memiliki kemandirian dalam memenuhi pembiayaan investasi, operasional serta pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan.

*AirNav Indonesia provides air navigation services with a focus on flight safety and a non-profit orientation. Nonetheless, AirNav Indonesia remains independent in fulfilling investment financing, operations and implementation service quality improvement programs.*



Petugas ATC AirNav Indonesia Cabang Kupang mencatat data pesawat yang akan mendarat dan lepas landas.  
*The AirNav Indonesia ATC officer of the Kupang Branch is recording data on landing and taking-off aircraft.*

### Segmen Berdasarkan Kegiatan Usaha

AirNav Indonesia menjalankan kegiatan usaha pelayanan navigasi penerbangan, meliputi:

#### Segment by Business Operations

*AirNav Indonesia runs business operations in air navigation services, including:*



**Pelayanan lalu lintas penerbangan**  
*Air traffic services (ATS)*



**Pelayanan telekomunikasi penerbangan**  
*Aviation telecommunication services*



**Pelayanan informasi aeronautika (PIA)**  
*Aeronautical information services (AIS)*



**Pelayanan informasi meteorologi penerbangan (MET)**  
*Flight meteorological information services (MET)*



**Pelayanan informasi pencarian dan pertolongan (SAR)**  
*Search and rescue information services (SAR)*



**PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN**  
*Air Traffic Service (ATS)*



Pelayanan lalu lintas penerbangan atau *Air Traffic Service (ATS)* memberikan pemanduan lalu lintas penerbangan dengan mengacu kepada 5 tujuan utama (5 *objective ATS*) yaitu:

*Air Traffic Service (ATS) provides air traffic guidance following these 5 ATS objectives, namely:*

- 1 Mencegah tabrakan antar pesawat
- 2 Mencegah tabrakan antar pesawat di area pergerakan rintangan di area tersebut
- 3 Mempercepat dan mempertahankan pergerakan lalu lintas udara
- 4 Memberikan saran dan informasi yang berguna untuk keselamatan dan efisiensi pengaturan lalu lintas udara
- 5 Memberitahukan kepada organisasi yang berwenang dalam pencarian pesawat yang memerlukan pencarian dan pertolongan sesuai dengan organisasi yang dipersyaratkan

- 1 *To prevent collisions between aircraft*
- 2 *To prevent collisions between aircraft on the maneuvering area and obstructions on that area*
- 3 *To expedite and maintain an orderly flow of air traffic*
- 4 *To provide advice and information useful for the safe and efficient conduct of flights*
- 5 *To notify appropriate organizations regarding aircraft in need of search and rescue aid, and assist such organizations as required*

Adapun pelayanan lalu lintas penerbangan terdiri dari:

- 1 **Pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan**  
AirNav Indonesia memberikan pelayanan pemanduan dengan mempertimbangkan jenis lalu lintas penerbangan, kepadatan arus lalu lintas penerbangan, kondisi sistem teknologi dan topografi, serta fasilitas dan kelengkapan navigasi penerbangan di pesawat udara.
- 2 **Pelayanan informasi penerbangan**  
AirNav Indonesia memberikan pelayanan berita dan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi keselamatan, keamanan, dan efisiensi penerbangan, khususnya di bandara-bandara yang tidak menyediakan layanan radar.
- 3 **Pelayanan kesiagaan**  
AirNav Indonesia membantu pesawat udara yang membutuhkan pertolongan SAR melalui koordinasi dengan instansi terkait, yaitu BASARNAS.

*Air Traffic Service (ATS) consists of:*

- 1 ***Air Traffic Control Service***  
*AirNav Indonesia provides guidance services by considering the traffic type and density, the state of technology and topography, as well as air navigation equipment on board the aircraft.*
- 2 ***Flight Information Service***  
*AirNav Indonesia provides helpful and beneficial news and information for aviation safety, security and efficiency, particularly at airports where radar services are not available.*
- 3 ***Alerting Service***  
*AirNav Indonesia assists aircrafts that are in need of SAR through coordination with a related agency, called BASARNAS*

Berdasarkan wilayah udara yang dilayani, pelayanan pemanduan lalu lintas udara pada ruang udara terkontrol terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

**a Aerodrome Control Service**

Pelayanan ini mengelola wilayah udara sekitar aerodrome dengan radius 5-10 NM yang disebut dengan *aerodrome traffic zone (ATZ)*. Layanan diberikan kepada pesawat terbang yang beroperasi maupun berada di bandar udara dan sekitarnya (*vicinity of aerodrome*). Kegiatannya mencakup *take off, landing, taxiing*, serta kegiatan lain di kawasan *maneuvering area* yang dilakukan di menara pengawas (*control tower*).

**b Approach Control Service**

Pelayanan ini mengelola wilayah dengan radius 30-150 NM dan ketinggian hingga 24.500 kaki (FL245) yang disebut *controlled zone (CTR)* hingga *terminal control area (TMA)*. Layanan diberikan kepada pesawat yang berada di ruang udara sekitar bandar udara, baik yang sedang melakukan pendekatan (*approach*) maupun yang baru berangkat, terutama bagi kegiatan penerbangan instrumen yang mengikuti aturan penerbangan instrumen atau biasa dikenal dengan *Instrument Flight Rules (IFR)*.

**c Area Control Service**

Pelayanan ini mengelola wilayah jelajah dengan batas sejauh FIR ketinggian mulai FL245 sampai F600, yang disebut *controlled area (CTA)* hingga *upper controlled area (UTA)*. Layanan yang diberikan kepada penerbang yang sedang menjelajah (*En-route flight*), terutama yang termasuk penerbangan terkontrol (*controlled flights*).

*Based on the airspace served, air traffic control service in controlled airspace is divided into three parts:*

**a Aerodrome Control Service**

*This service manages the airspace around the aerodrome with a radius of 5-10 NM, which is called the aerodrome traffic zone (ATZ). Services are provided to aircraft operating or located at the airport and its vicinity of aerodrome. The activities include take off, landing, taxiing, as well as other activities in the maneuvering area carried out in the control tower.*

**b Approach Control Service**

*This service manages areas with a radius of 30-150 NM and an altitude of up to 24,500 feet (FL245) which is called the controlled zone (CTR) to the terminal control area (TMA). The services are provided to aircrafts approaching or leaving the airspace around the airport, especially for instrument flight activities following Instrument Flight Rules (IFR).*

**c Area Control Service**

*This service manages En-route areas within the range of FIR heights from FL245 to F600, which are known as controlled areas (CTA) to upper controlled areas (UTA). The services are provided to pilots on En-route flights, especially controlled flights.*



AirNav Indonesia menyediakan layanan telekomunikasi penerbangan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/99/II/2009 tentang Petunjuk Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 Telekomunikasi Aeronautika dan Pelayanan Radio Navigasi. Layanan yang diberikan meliputi aeronautika tetap, aeronautika bergerak, dan radio navigasi aeronautika.

*AirNav Indonesia provides aeronautical telecommunication service under Directorate General of Civil Aviation Regulation No. SKE P/99/II/2009 concerning Instructions for Civil Aviation Safety Regulations Section 171 (Manual of Standard Part 171), Aeronautical Telecommunication and Radio Navigation Services. The services provided include fixed aeronautical, mobile aeronautical, and aeronautical radio navigation.*



1

**Pelayanan aeronautika tetap**

*(Aeronautical Fixed Service-AFS)*

Pelayanan telekomunikasi penerbangan antar stasiun tetap dengan sistem penyaluran berita penerbangan melalui jaringan komunikasi data penerbangan antarbandara atau *Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)*. Sistem AFTN berfungsi untuk bertukar jadwal penerbangan, berita cuaca, dan berita lain yang berhubungan dengan penerbangan, dengan menggunakan sistem komunikasi data penerbangan berbasis komputer atau *Automatic Message Switching Center (AMSC)*. Setiap bandara memiliki empat karakter alfabet yang menunjukkan alamat bandara, di mana tiga karakter menunjukkan unit di suatu bandara, dan satu karakter menunjukkan *filler*. Adapun peralatan yang digunakan dalam sistem ini antara lain *Automatic Message Switching Centre (AMSC)*, *teleprinter machine*, *HF SSB transceiver*, *Very Small Aperture Terminal (VSAT)*, *radio link*, *direct speech*, *ATS Message Handling System (AMHS)*, *ATN system*, dan *HF data link*.

**Aeronautical Fixed Service-AFS**

*It is an aeronautical telecommunication service between fixed stations with a system of channeling aeronautical information through the inter-airports flight data communication network or the Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN). The AFTN system is useful for providing an exchange of flight schedules, weather information, and other aviation-relevant information with a computer-based flight data communication system or Automatic Message Switching Center (AMSC). Each airport is identified by four alphabetical characters indicating the address of the airport: three alphabetical characters showing units in the airport and one alphabetical character indicating filler. The equipment used in this system includes Automatic Message Switching Center (AMSC), teleprinter machine, HF SSB transceiver, Very Small Aperture Terminal (VSAT), radio link, direct speech, ATS Message Handling System (AMHS), ATN system, and HF data link.*

2

**Pelayanan aeronautika bergerak**

*(Aeronautical Mobile Services-AMS)*

Pelayanan telekomunikasi antara unit pelayanan navigasi penerbangan di darat dengan pesawat udara, antar pesawat udara, suar radio yang menunjukkan posisi darurat (*emergency*) dan bahaya (*distress*), serta penyiaran informasi penerbangan. Adapun peralatan yang digunakan dalam layanan ini antara lain *High Frequency Air/Ground Communication (HF A/G)*, *VHF A/G*, *VHF-extended range*, *ATIS*, *VSCS*, *recorder*, *VHF data link*, *mode S*, dan *ATN system*.

**Aeronautical Mobile Services-AMS**

*AMS is telecommunications between air navigation service units on the ground with aircraft, between aircraft, radio beacons that indicate emergency and distress position, and flight information broadcast. The equipment used in this service includes High Frequency Air/Ground Communication (HF A/G), VHF A/G, VHF-extended range, ATIS, VSCS, recorder, VHF data link, S mode, and ATN system.*

3

**Pelayanan radio navigasi aeronautika**

*(Aeronautical Radio Navigation Service-ARNS)*

Pelayanan pertukaran informasi melalui perambatan gelombang radio untuk menentukan posisi, arah, kecepatan, dan karakteristik suatu benda demi kepentingan navigasi penerbangan dalam rangka mendukung keselamatan operasi pesawat. Pelayanan ini mencakup penetapan radio (*radar surveillance services*). Adapun peralatan yang digunakan antara lain *VHF* dan *HF air/ground voice communication*, *instrument landing system*, *distance measuring equipment*, *VHF Omni-Range (VOR)*, *Non-Directional Beacons (NDB)*, *flight data processing*, *flight information*, *radar data processing*, *primary* dan *secondary surveillance radar*, *automatic dependent surveillance system*, *voice switching and control*, *ATS point-to-point communication*, *air/ground data links*, *ground-to-ground data interchange networks*, *human machine interface systems*, termasuk *tower consoles*, *ATS workstations* dan *display*, suplai listrik darurat dan tidak terputus, kebutuhan esensial dari sebuah bangunan (listrik, AC, keamanan), *global navigation satellite system*, *aeronautical databases*, *meteorological display system*, *voice and data recording*.

**Aeronautical Radio Navigation Service-ARNS**

*It is an information exchange service through radio wave transmission to determine the position, direction, speed, and characteristics of an object for purposes of air navigation to support the safety of aircraft operations. This service includes radio surveillance (radar surveillance services). The equipment used includes VHF and HF air/ground voice communication, instrument landing systems, distance measuring equipment, VHF Omni-Range (VOR), Non-Directional Beacons (NDB), flight data processing, flight information, radar data processing, primary and secondary surveillance radar, automatic dependent surveillance system, voice switching and control, ATS point-to-point communication, air/ground data links, ground-to-ground data interchange networks, human machine interface systems, including tower consoles, ATS workstations and display, emergency and uninterrupted power supply, essential needs of a building (electricity, air conditioning, security), global navigation satellite system, aeronautical databases, meteorological display system, voice and data recording.*



**PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA (PIA)**

*Aeronautical Information Services (AIS)*



AirNav Indonesia menyediakan pelayanan informasi aeronautika, yang terdiri dari pengelolaan produk informasi aeronautika dan peta penerbangan, penerbitan dan penyebaran Notam (*notice to airmen*), dan pelayanan informasi aeronautika bandar udara. Pelayanan menjadi tugas pokok Pusat Informasi Aeronautika. Adapun publikasi yang dihasilkan berupa publikasi informasi aeronautika atau *Aeronautical Information Publication (AIP)*, amandement, *AIP supplement*, *NOTAM*, *ASHTAM*, *Aeronautical Information Circular (AIC)*, dan rancangan prosedur penerbangan.

*AirNav Indonesia provides aeronautical information services, which consist of managing aeronautical information products and flight charts, publication and distribution of NOTAM (notice to airmen), and airport aeronautical information services. Service becomes the main task of the Aeronautical Information Center. The publications include aeronautical information publications (AIP), amendments, AIP supplements, NOTAM, ASHTAM, Aeronautical Information Circular (AIC), and aviation procedural draft.*

**PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN (MET)**

*Aeronautical Meteorological Services (MET)*



AirNav Indonesia berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam menyediakan informasi meteorologi penerbangan. Adapun layanan informasi yang disediakan meliputi:

*AirNav Indonesia coordinates with the Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG) in providing meteorological information along the flight route. The services consist of the following:*

- 1 Terminal Aerodrome Forecast (TAFOR), setiap 6 jam;
- 2 METAR, setiap 30 menit;
- 3 SPECI, sewaktu-waktu ketika kondisi cuaca berubah signifikan;
- 4 Significant Meteorological Information (SIGMET), yaitu informasi perubahan kondisi cuaca di sepanjang jalur penerbangan (VA, siklon, fenomena cuaca);
- 5 AIRMET, yaitu potensi perubahan cuaca yang signifikan;
- 6 Aerodrome warnings, yaitu potensi perubahan cuaca yang signifikan;
- 7 Volcanic Ash Advisory (ASHTAM);
- 8 Tropical cyclone advisory; dan
- 9 Wind shear warning & alerts.

- 1 TAFOR (Terminal Aerodrome Forecast), every 6 hours;
- 2 METAR, every 30 minutes;
- 3 SPECI, at any time when weather conditions change significantly;
- 4 SIGMET (Significant Meteorological Information), which provides information on weather condition changes along the flight path (VA, cyclone, weather phenomenal);
- 5 AIRMET, which provides information on potential significant weather changes;
- 6 Aerodrome warnings on potentials for significant weather changes;
- 7 Volcanic Ash Advisory (ASHTAM);
- 8 Tropical cyclone advisory; And
- 9 Wind shear warning & alerts.





Petugas ATC memantau pergerakan pesawat di tower AirNav Indonesia Cabang Yogyakarta.  
*The ATC officer is monitoring aircraft movement from the AirNav Indonesia tower at the Yogyakarta branch.*

**PELAYANAN INFORMASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)**  
*Search and Rescue (SAR) Information Services*

AirNav Indonesia bekerja sama dengan Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS) dalam menyediakan layanan informasi pencarian dan pertolongan secara cepat dan akurat apabila terjadi kecelakaan pesawat udara. AirNav Indonesia melakukan pemasangan *Flight Monitoring System* Badan SAR Nasional di Kantor Cabang JATSC dan MATSC pasca penandatanganan Nota Kesepahaman antara AirNav Indonesia dengan BASARNAS pada 28 Januari 2015.

*AirNav Indonesia is in coordination with the National Search and Rescue Agency (BASARNAS) in providing swift and accurate search and rescue information service in the event of an airplane crash. AirNav installed the Flight Monitoring System of National Search and Rescue Agency at the Branch Office of JATSC and MATSC after the signing of the Memorandum of Understanding between AirNav Indonesia and BASARNAS on January 28, 2015.*

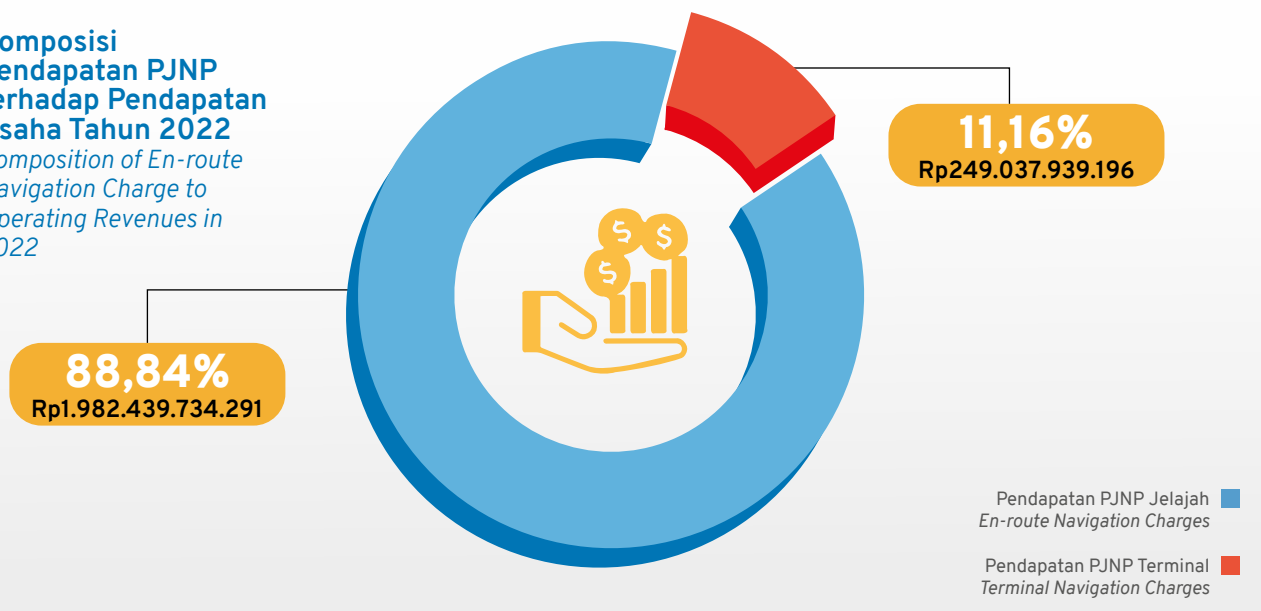
## Segmen Berdasarkan Layanan Jasa

Produksi pelayanan jasa navigasi penerbangan sangat bergantung pada jumlah pergerakan penerbangan baik penerbangan domestik, internasional, maupun lintas udara yang beroperasi dalam ruang udara Indonesia. Pendapatan usaha AirNav Indonesia berasal dari pelayanan jasa navigasi penerbangan (PJNP), yang dibedakan menjadi PJNP Jelajah dan PJNP Terminal. Segmen PJNP jelajah dan terminal masing-masing memberikan kontribusi sebesar 88,84% dan 11,16% terhadap pendapatan usaha perusahaan pada periode pelaporan.

## Segment by Services

The production of air navigation services is highly dependent on the number of flight movements of domestic, international or overflying flights operating in the Indonesian airspace. AirNav Indonesia's operating revenue comes from En-route Navigation Charge (PJNP), which are divided into En-route Navigation Charges and Terminal Navigation Charges. Both segments contributed 88.84% and 11.16%, respectively, to the company's operating revenues in the reporting period.

### Komposisi Pendapatan PJNP terhadap Pendapatan Usaha Tahun 2022 Composition of En-route Navigation Charge to Operating Revenues in 2022



Secara keseluruhan pendapatan usaha Perusahaan meningkat sebesar Rp883,96 miliar atau setara 65,60% apabila dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Overall, the Company's operating revenues increased by IDR883.96 billion or equivalent to 65.60% when compared to the previous period.

### Jumlah dan Kontribusi Segmen Layanan Jasa Terhadap Pendapatan Usaha Total and Contribution of Service Segments to Operating Revenues

Pendapatan Usaha Operating Revenues	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Rp Juta/ IDR million	%	Rp Juta/ IDR million	%	Rp Juta/ IDR million	%
Pendapatan PJNP Jelajah En-route Navigation Charge	1.982.440	88,84	1.180.799	87,63	801.641	67,89
Pendapatan PJNP Terminal Terminal Navigation Charge	249.038	11,16	166.721	12,37	82.317	49,38
<b>Jumlah Pendapatan Usaha Total Operating Revenues</b>	<b>2.231.478</b>	<b>100,00</b>	<b>1.347.520</b>	<b>100,00</b>	<b>883.958</b>	<b>65,60</b>

**PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN JELAJAH**  
*En-route Navigation Charges*

Segmen pelayanan jasa navigasi penerbangan (PJNP) jelajah mencakup pelayanan jasa navigasi yang dikenakan kepada seluruh penerbangan yang menjelajahi wilayah udara Indonesia, baik penerbangan domestik, internasional, maupun lintas udara. PJNP jelajah mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 63 Tahun 2019 Tanggal 14 Maret 2019 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. KP 853 Tahun 2018, tanggal 25 Mei 2018 sebagai dasar penetapan biaya.

The En-route Navigation Charge (PJNP) segment includes navigation services that are charged to all En-route flights, namely domestic, international, and overflying flights, within Indonesian airspace. En-route Navigation Charges refer to the Minister of Transportation Decree No. KM 63 of 2019 dated March 14, 2019 and the Regulation of the Minister of Transportation No. KP 853 of 2018, dated May 25, 2018 as the basis for determining the cost.

**Biaya PJNP Jelajah Tahun 2022**  
*En-route Navigation Charges in 2022*

Jenis PJNP Jelajah (En-Route) <i>Types of PJNP (En-Route)</i>	Biaya <i>Cost</i>	
Penerbangan domestik (dalam negeri)/ <i>Domestic flights</i>	Rp7.000,00/unit rute	IDR7,000.00/route unit
Penerbangan internasional (luar negeri)/ <i>International flights</i>	USD0,65/unit rute	USD0,65/route unit
Penerbangan lintas udara/ <i>Overflying flights</i>	USD0,65/unit rute	USD0,65/route unit

Perusahaan mencatatkan peningkatan produksi PJNP jelajah di sepanjang tahun 2022. Peningkatan tersebut tentunya dipengaruhi oleh peningkatan pergerakan lalu lintas udara pasca terkendalinya pandemi COVID-19 yang diikuti pelonggaran persyaratan penerbangan. Kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan MotoGP di Mandalika dan KTT G20 di Bali juga berpengaruh pada pergerakan lalu lintas udara, meskipun tidak signifikan.

The company recorded an increase in En-route Navigation production throughout 2022. This increase was certainly influenced by the hike in air traffic movements post COVID-19 pandemic which was followed by the ease of flight restrictions. During that year, Indonesia also had the honor to be the host for MotoGP in Mandalika and the G20 Summit in Bali, which affected the air traffic movements albeit not significantly.

**Produksi PJNP Jelajah**  
*En-route Navigation Production*

Keterangan <i>Description</i>	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i>	
	Rute/ Route		Rute/ Route	%
Penerbangan Domestik/ <i>Domestic Flights</i>	125.981.202	98.594.214	27.386.988	27,78
Penerbangan Internasional/ <i>International Flights</i>	54.561.220	22.182.556	32.378.664	145,96
Penerbangan Lintas Udara/ <i>Overflying Flights</i>	97.411.868	55.527.235	41.884.673	75,43
<b>Total Produksi PJNP Jelajah</b> <i>Total En-route Navigation Production</i>	<b>277.954.290</b>	<b>176.304.005</b>	<b>101.650.325</b>	<b>57,66</b>

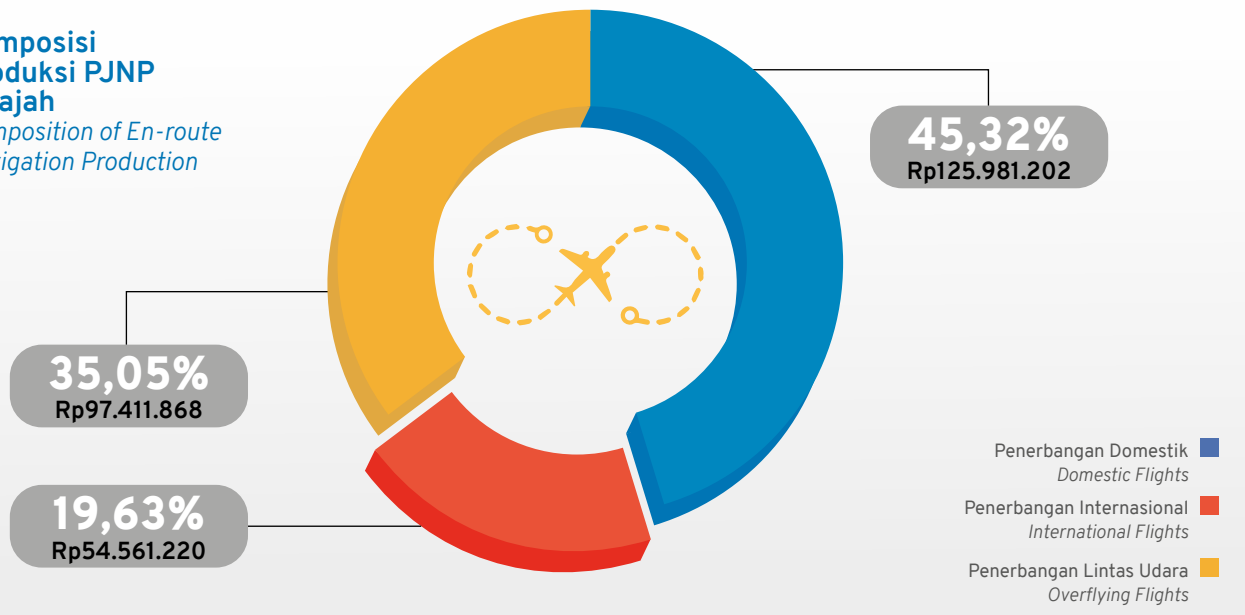




Total produksi PJNP jelajah pada periode pelaporan tercatat sebanyak 277.954.920 rute, mengalami peningkatan sebesar 57,66% dari periode tahun sebelumnya yang sebanyak 176.304.005 rute. Peningkatan terbesar terjadi pada penerbangan internasional sebesar 145,96%, disusul penerbangan lintas udara sebesar 75,43%. Secara komposisi, penerbangan domestik berkontribusi sebesar 45,32% terhadap total produksi PNJP jelajah. Sementara penerbangan internasional dan lintas udara berkontribusi sebesar 19,63% dan 35,05% terhadap total produksi PJNP jelajah.

The total En-route Navigation production in the reporting period was recorded at 277,954,920 routes, an increase of 57.66% from the previous year's period of 176,304,005 routes. The highest increase occurred in international flights by 145.96%, followed by overflying flights by 75.43%. By composition, domestic flights contributed 45.32% to the total En-route Navigation production. Meanwhile, international flights and overflying flight contributed 19.63% and 35.05%, respectively, to total En-route Navigation production.

**Komposisi Produksi PJNP Jelajah**  
*Composition of En-route Navigation Production*



Sejalan dengan peningkatan produksi, pendapatan usaha PJNP jelajah mengalami peningkatan pada periode pelaporan. AirNav Indonesia mencatat total pendapatan PJNP jelajah sebesar Rp1.982 miliar, meningkat Rp802 miliar atau setara 67,89% apabila dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp1.180 miliar. Keseluruhan pendapatan usaha PJNP jelajah, baik domestik, internasional, maupun lintas udara mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 27,93%, 158,94%, dan 82,36% apabila dibandingkan periode tahun sebelumnya.

In line with the increase in production, operating revenue from En-route Navigation Charges experienced an increase within the reporting period. AirNav Indonesia recorded En-route Navigation Charges of IDR1,982 billion, an increase of IDR802 billion or equivalent to 67.89% when compared to the previous period of IDR1,180 billion. The operating revenue from overall En-route Navigation Charges of domestic, international, and overflying flights, experienced an increase of 27.93%, 158.94% and 82.36%, respectively, when compared to the previous year's period.

## Pendapatan Usaha PJNP Jelajah

Operating Revenue from En-route Navigation Charges

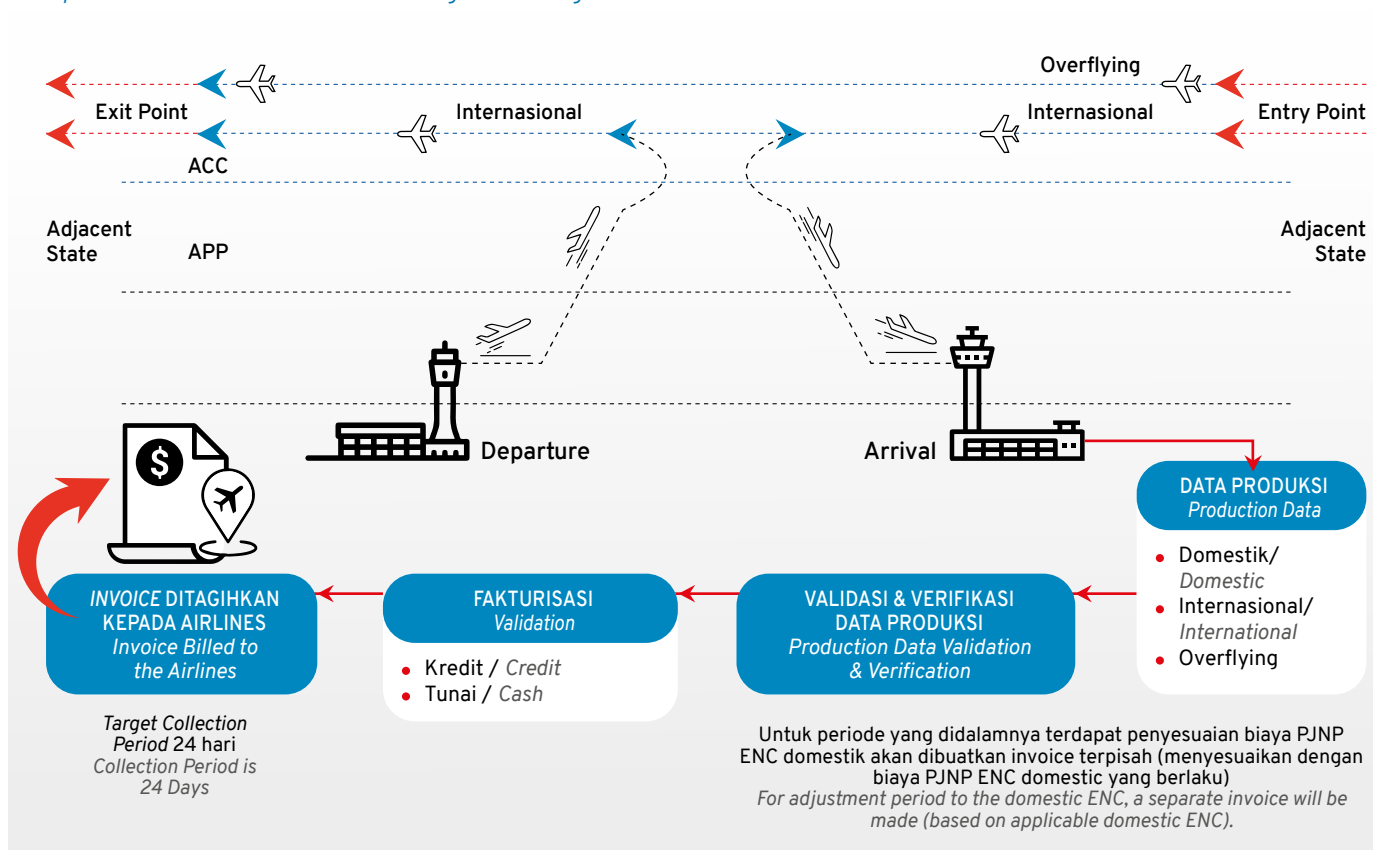
Keterangan Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	
			Nominal Rp Juta Nominal Rp million	%
Jasa Pelayanan Penerbangan Domestik Domestic Flight Services	716.085.818	559.767.776	156.318.042	27,93
Jasa Pelayanan penerbangan Internasional International Flight Services	456.218.518	176.184.307	280.034.211	158,94
Jasa Pelayanan Penerbangan Lintas Udara Overflying Flight Services	810.135.398	444.247.003	365.888.395	82,36
<b>Jumlah jasa Pelayanan Penerbangan</b> Total Aviation Services	<b>1.982.439.734</b>	<b>1.180.799.085</b>	<b>801.640.649</b>	<b>67,89</b>

Kegiatan operasi dan proses penagihan pendapatan usaha PJNP Jelajah digambarkan sebagai berikut:

Operating revenue of En-route Navigation Charges include business operations and billing process which can be seen in this chart:

## Proses Operasi PJNP Jelajah

Operational Process of En-route Navigation Charges





Segmen pelayanan jasa navigasi penerbangan (PJNP) terminal merupakan jasa yang dikenakan dari pelayanan navigasi penerbangan dalam area 20 km jangkauan pelayanan terhadap pesawat udara yang melakukan pendaratan di bandar udara atau aerodrome. PJNP terminal mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 63 tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 sebagai dasar penetapan biaya.

*Terminal Navigation Services is a service that is charged for air navigation services within a 20-kilometer area of service coverage for aircraft landing at airports or aerodromes. The Terminal Navigation Service referred to the Minister of Transportation Decision No. KM 63 of 2019, dated March 14, 2019, as the basis for determining charges.*

**Biaya PJNP Terminal 2022**  
*Terminal Navigation Charges (TNC) in 2022*

Jenis PJNP Terminal (TNC) <i>Terminal Navigation Charges (TNC)</i>	Biaya Charges
<b>Penerbangan domestik (dalam negeri)/ Domestic Flights</b>	
<i>Precision Approach Service</i>	Rp5.500,00/MTOW (Ton)
<i>NonPrecision Approach Service</i>	Rp10.000,00/MTOW (Ton)
<i>Flight Information Service</i>	Rp50.000/MTOW (Ton)
<b>Penerbangan internasional (luar negeri)/ International Flights</b>	
<i>Precision Approach Service</i>	USD0,67/MTOW (Ton)
<i>NonPrecision Approach Service</i>	USD1,21/MTOW (Ton)
<i>Flight Information Service</i>	USD6,06/MTOW (Ton)

Produksi PJNP terminal pada periode pelaporan sebanyak 40.558.993 ton, mengalami peningkatan sebanyak 11.810.184 ton, atau setara dengan 41,08% apabila dibandingkan periode tahun sebelumnya yang sebanyak 28.748.809 ton. Peningkatan signifikan terjadi pada penerbangan internasional yang meningkat 109,61% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pergerakan lalu lintas penerbangan internasional pasca pelonggaran kebijakan penerbangan pada mayoritas negara di dunia, termasuk Indonesia.

*Total production of Terminal Navigation Charges in the reporting period was 40,558,993 tons, an increase of 11,810,184 tons or equivalent to 41.08% compared to the previous year of 28,748,809 tons. A significant increase occurred in international flights by 109.61% from the previous year. This increase is in line with the increase in international air traffic movement after the easing of aviation policies in the majority of countries all over the world, including Indonesia.*

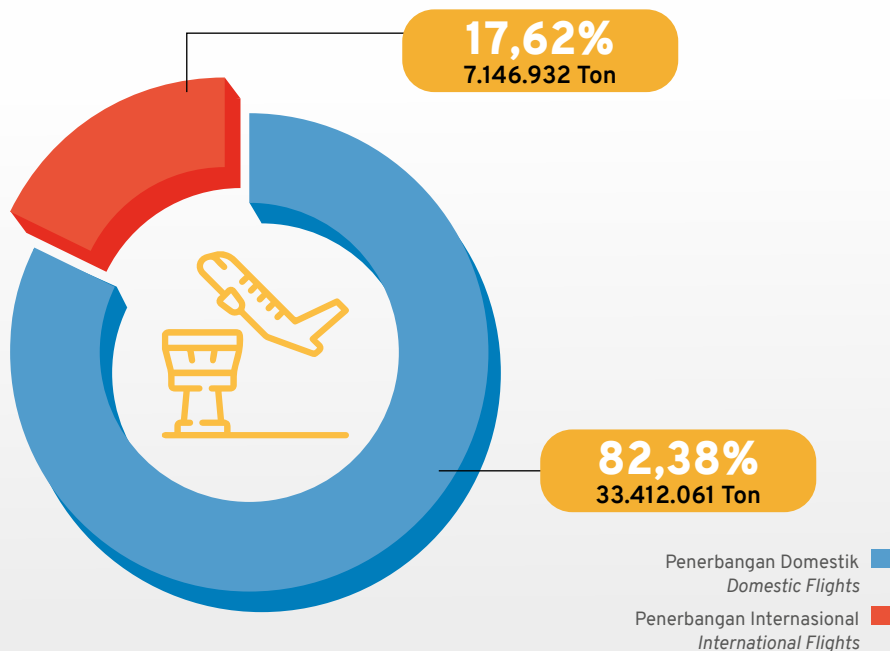
**Produksi PJNP Terminal**  
*Production of Terminal Navigation Charges*

Keterangan <i>Description</i>	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i>	
	Ton		Ton	%
Penerbangan Domestik/ <i>Domestic Flights</i>	33.412.061	25.339.170	8.072.891	31,86
Penerbangan Internasional/ <i>International Flights</i>	7.146.932	3.409.639	3.737.293	109,61
<b>Total Produksi PJNP Terminal</b> <i>Total Production of Terminal Navigation Charges</i>	<b>40.558.993</b>	<b>28.748.809</b>	<b>11.810.184</b>	<b>41,08</b>

Secara komposisi, penerbangan domestik berkontribusi sebesar 82,38% terhadap total produksi PNJP terminal. Sementara penerbangan internasional berkontribusi sebesar 17,62% terhadap total produksi PJNP terminal.

*In terms of composition, domestic flights contributed 82.38% to the total production of Terminal Navigation Charges. Meanwhile, international flights' contribution was 17.62%.*

**Komposisi Produksi PJNP Terminal**  
*The composition of Terminal Navigation Charges Production*



Sejalan dengan peningkatan produksi PJNP terminal, pendapatan usaha PJNP terminal juga mengalami peningkatan pada periode pelaporan. AirNav Indonesia mencatat total pendapatan PJNP terminal sebesar Rp249 miliar, meningkat Rp82 miliar atau setara 49,37% apabila dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp167 miliar. Keseluruhan pendapatan usaha PJNP terminal, baik jasa TNC domestik maupun jasa TNC internasional mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 33,73% dan 123,05% apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

*In line with the increase of Terminal Navigation Charges production, operating revenues from Terminal Navigation Charges also experienced an increase in the reporting period. AirNav Indonesia recorded total revenue of IDR249 billion, an increase of IDR82 billion or equivalent to 49.37% compared to the total revenue of IDR167 billion in the previous period. The operating revenue from Terminal Navigation Charges, both domestic and international TNC, experienced an increase of 33.73% and 123.05% respectively compared to the previous year.*

**Pendapatan Usaha PJNP Terminal**  
*Operating Revenues from Terminal Navigation Charges*

Pendapatan Usaha Operating Revenues	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Rp Ribu/ IDR Thousand		Rp Ribu/ IDR Thousand	%
Jasa TNC Domestik Domestic TNC	183.919.284	137.527.080	46.392.204	33,73%
Jasa TNC Internasional International TNC	65.118.655	29.194.127	35.924.528	123,05%
<b>Jumlah PJNP Terminal</b> <i>Total Operating Revenues from Terminal Navigation Charges</i>	<b>249.037.939</b>	<b>166.721.207</b>	<b>82.316.732</b>	<b>49,37%</b>

## Segmen Berdasarkan Wilayah Operasi

AirNav Indonesia mempraktikkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 yakni Segmen Operasi dalam Laporan Keuangan Teraudit yang memberikan informasi mengenai segmen berdasarkan wilayah operasi. AirNav Indonesia menyampaikan segmen yang terbagi menjadi 4 wilayah operasi, yakni: Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC), Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), Denpasar, dan Cabang yang dikelompokkan dalam segmen Lain-Lain.

## Segment by Operation Areas

AirNav Indonesia practices Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 5 "Operation Segment" in the Audited Financial Statements, which provide information on segments based on operation areas. AirNav Indonesia divides its segments into 4 operating areas: Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC), Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), Denpasar, and several branches grouped under the Others segment.

### Pergerakan Lalu Lintas Penerbangan Berdasarkan Wilayah Operasi Air Traffic Movement Based on Operation Area

Wilayah Operasi Operation Area	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Pergerakan/ Movement		Pergerakan/ Movement	%
JATSC	351.474	211.163	140.311	66,45
MATSC (mencakup Cabang MATSC dan unit-unit yang berada di bawahnya) <i>MATSC (including MATSC Branch Office and its underlying units)</i>	130.654	108.261	22.393	20,68
Denpasar (mencakup Cabang Denpasar dan unit-unit yang berada di bawahnya) <i>Denpasar (including Denpasar Branch Office and its underlying units)</i>	102.061	52.171	49.890	95,63
Surabaya (mencakup Cabang Surabaya dan unit-unit yang berada di bawahnya) <i>Surabaya (including Surabaya Branch Office and its underlying units)</i>	98.625	76.531	22.694	28,87
Lain-Lain (mencakup unit cabang dan unit-unit yang berada di bawahnya) <i>Others (including Branch Offices and their underlying units)</i>	853.797	713.206	140.591	19,71

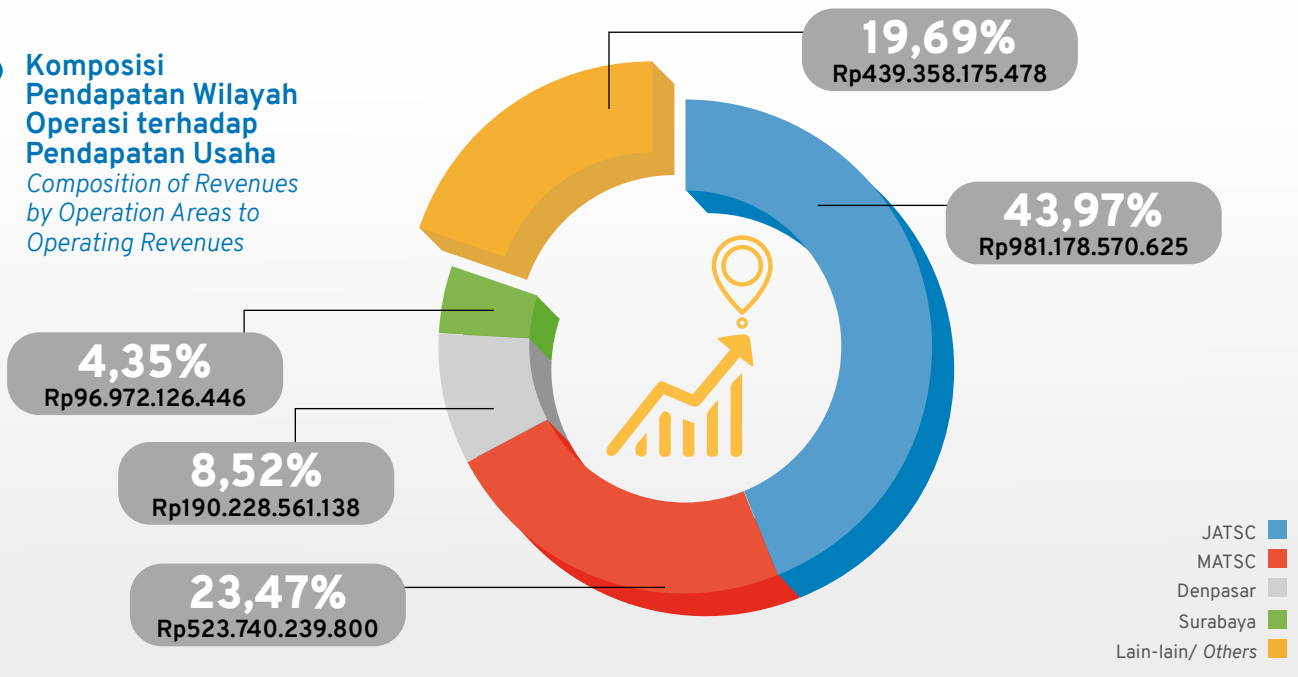
Keterangan: Data JATSC dan MATSC, sudah termasuk overflying

Note: JATSC and MATSC data includes overflying

AirNav Indonesia mencatat pergerakan lalu lintas penerbangan mengalami peningkatan pada periode pelaporan. Peningkatan terjadi di semua wilayah operasi dengan peningkatan terbesar di JATSC, yakni sebesar 112.309 pergerakan atau setara 37,14% dibandingkan periode tahun 2021. Pendapatan usaha terbesar dibukukan oleh JATSC, dengan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan, berturut-turut JATSC, MATSC, Denpasar, dan Lain-Lain sebesar 37,14%, 11,80%, 49,97%, dan 17,06%.

AirNav Indonesia recorded an increase in air traffic movements in the reporting period. The increase occurred in all operating areas with the largest in JATSC at 112,309 movements or equivalent to 37.14% compared to 2021. JATSC's revenue is the largest, with the contribution of operating revenues reaching 37.14% to the company's revenue. Meanwhile, the contributions of MATSC, Denpasar and Others were 11.80%, 49.97%, and 17.06% respectively.

**Komposisi Pendapatan Wilayah Operasi terhadap Pendapatan Usaha**  
*Composition of Revenues by Operation Areas to Operating Revenues*



Pada periode pelaporan, peningkatan pendapatan usaha terbesar dicapai oleh wilayah operasi Denpasar. Tercatat pendapatan usaha Denpasar sebesar Rp190,23 miliar, meningkat sebesar Rp149,27 miliar atau setara 364,47% apabila dibandingkan periode tahun sebelumnya. Kebangkitan sektor pariwisata dengan Bali sebagai destinasi wisata favorit berperan dalam peningkatan lalu lintas penerbangan. Selain itu pelaksanaan KTT G20 di Bali yang berada di wilayah operasi Denpasar memengaruhi pendapatan usaha wilayah Denpasar.

*In the reporting period, the largest increase in operating revenues was achieved by the Denpasar operation area. Denpasar recorded operating revenues of IDR190.23 billion, an increase of IDR149.27 billion or equivalent to 364.47% compared to the previous year. The revival of the tourism sector with Bali as a favorite tourist destination played a role in increasing air traffic. The G20 Summit in Bali, which took place in the Denpasar operation area, has also affected operating revenues for the region.*

**Jumlah dan Kontribusi Segmen Berdasarkan Wilayah Operasi terhadap Pendapatan Usaha**  
*Amount and Contribution of Segments by Operation Areas to Operating Revenues*

Wilayah Operasi <i>Operation Areas</i>	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i>	
	Rp Juta <i>IDR Million</i>	Kontribusi (%) <i>Contribution (%)</i>	Rp Juta <i>IDR Million</i>	Kontribusi (%) <i>Contribution (%)</i>	Rp Juta/ <i>IDR Million</i>	%
JATSC	981.178	43,97	546.640	40,57	434.538	79,49
MATSC	523.740	23,47	351.864	26,11	171.876	48,85
Denpasar	190.228	8,52	40.956	3,04	149.272	364,47
Surabaya	96.972	4,35	56.156	4,17	40.816	72,68
Lain-lain/ <i>Others</i>	439.358	19,69	351.904	26,11	87.454	24,85
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b> <i>Total Operating Revenues</i>	<b>2.231.477</b>	<b>100,00</b>	<b>1.347.520</b>	<b>100,00</b>	<b>883.957</b>	<b>65,60</b>

PEMBAHASAN KINERJA MASING-MASING SEGMENT BERDASARKAN WILAYAH OPERASI DISAMPAIKAN BERIKUT INI.

THE DESCRIPTION OF THE PERFORMANCE OF EACH OPERATIONS AREA CAN BE SEEN BELOW.



## JAKARTA AIR TRAFFIC SERVICE CENTER (JATSC)

Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC) merupakan unit cabang AirNav Indonesia yang mengelola Jakarta Flight Information Region (FIR), dengan cakupan ruang udara bagian barat Indonesia. JATSC mengelola navigasi penerbangan dengan lalu lintas terpadat di Indonesia. Adapun JATSC berlokasi di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

*Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC) is a branch unit of AirNav Indonesia that manages the Jakarta Flight Information Region (FIR), covering the western part of Indonesia airspace. JATSC, that manages air navigation with the densest traffic in Indonesia, is located at Soekarno Hatta Airport, Tangerang, Banten.*



Tower AirNav Indonesia Cabang JATSC.  
AirNav Indonesia Tower at JATSC Branch



**Kinerja Keuangan JATSC**  
Financial Performance of JATSC

Keterangan Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Rp Juta/ IDR Million		Rp Juta/ IDR Million	%
<b>Laba (Rugi)/ Profit (Loss)</b>				
Pendapatan Usaha/ Operating Revenues	981.179	546.640	434.539	79,49
Beban Usaha/ Operating Expenses	312.883	291.827	21.056	7,22
Laba (Rugi) Usaha/ Operating Profit (Loss)	668.296	254.813	413.483	162,27
<b>Posisi Keuangan/ Financial Position</b>				
Total Aset/ Total Assets	265.423	296.209	(30.786)	(10,39)%
Total Liabilitas/ Total Liabilities	(4.890.254)	(4.190.490)	(699.764)	16,70%
Total Ekuitas/ Total Equity	5.155.677	4.486.699	668.978	14,91%

Wilayah operasi JATSC menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik pada periode pelaporan. Tercatat pendapatan dan laba usaha mengalami peningkatan signifikan, yakni sebesar 79,49% dan 162,27% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan usaha meningkat dari Rp546,64 miliar menjadi Rp981,18 miliar, sementara laba meningkat dari Rp254,81 miliar menjadi Rp668,30 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan traffic penerbangan pasca COVID-19

Pemerintah Indonesia dan Singapura melakukan penandatanganan persetujuan penyesuaian batas antara FIR Jakarta dan FIR Singapura pada tanggal 25 Januari 2022. Persetujuan tersebut mengatur pengelolaan ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna di atas ketinggian 37 ribu kaki berada pada FIR Jakarta. Ke depannya ruang udara tersebut berpotensi memberikan peningkatan pendapatan usaha pada wilayah operasi JATSC.

Realisasi Liabilitas AirNav Indonesia Cabang JATSC mengalami penurunan sebesar Rp699,76 miliar atau setara dengan 16,70%, sedangkan Realisasi Ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp668,98 miliar atau setara dengan 14,91%. Dengan demikian, Total Aset AirNav Indonesia Cabang JATSC mengalami penurunan sebesar 30,79 miliar atau setara 10,39% dari Total Aset tahun sebelumnya.

JATSC showed excellent performance in the reporting period. Operating revenues and operating profit recorded a significant increase by 79.49% and 162.27% compared to the previous year. Operating revenues increased from IDR546.64 billion to IDR981.18 billion, while operating profit increased from IDR254.81 billion to IDR668.30 billion. This increase is in line with the increase in air traffic after COVID-19.

Indonesia and Singapore have signed an agreement to realign the boundary between the Jakarta FIR and the Singapore FIR on January 25, 2022. The agreement regulates the airspace over Riau and Natuna Islands at altitudes of 37 thousand feet and above to be managed as part of the Jakarta FIR. In the future, this airspace has the potential to increase operating revenues in JATSC.

Realized Liabilities of AirNav Indonesia at JATSC Branch Office decreased by IDR699.76 billion or equivalent to 16.70%, while Realized Equity increased by IDR668.98 billion or equivalent to 14.91%. Thus, Total Assets of AirNav Indonesia at JATSC Branch Office decreased by IDR30.79 billion or equivalent to 10.39% of the previous year's Total Assets.





## MAKASSAR AIR TRAFFIC SERVICE CENTER (MATSC)

Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) merupakan unit cabang AirNav Indonesia yang mengelola Ujung Pandang FIR, dengan cakupan ruang udara bagian timur Indonesia. MATSC membawahi beberapa unit, yaitu Cabang Pembantu Palu, Cabang Pembantu Luwuk, Unit Mamuju, Unit Masamba, Unit Poso, Unit Toli-toli, Unit Buol, Unit Tana Toraja, Unit Mamasa, Unit Bone, Unit Seko, Unit Rampi, Unit Bua, Unit Selayar, dan Unit Tojo Una-Una. Adapun MATSC berlokasi di Bandara Sultan Hasanuddin, Ujung Pandang.

Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) is a branch unit of AirNav Indonesia that manages the Ujung Pandang FIR, covering the eastern part of Indonesia airspace. MATSC oversees several units, such as Palu Sub-Branch, Luwuk Sub-Branch, Mamuju Unit, Masamba Unit, Poso Unit, Toli-toli Unit, Buol Unit, Tana Toraja Unit, Mamasa Unit, Bone Unit, Seko Unit, Rampi Unit, Bua Unit, Selayar Unit, and Tojo Una-Una Unit. MATSC is located at Sultan Hasanuddin Airport, Ujung Pandang.

### ○ Kinerja Keuangan MATSC Financial Performance of MATSC

Keterangan Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Rp Juta/ IDR Million		Rp Juta/ IDR Million	%
<b>Laba (Rugi)/ Profit (Loss)</b>				
Pendapatan Usaha/ Operating Revenues	523.740	351.865	171.875	48,85%
Beban Usaha/ Operating Expenses	200.040	181.956	18.084	9,94%
Laba (Rugi) Usaha/ Operating Profit (Loss)	323.700	169.909	153.791	90,51%
<b>Posisi Keuangan/ Financial Position</b>				
Total Aset/ Total Assets	197.321	219.454	(22.133)	(10,09)%
Total Liabilitas/ Total Liabilities	(3.214.888)	(2.868.731)	346.157	12,07%
Total Ekuitas/ Total Equity	3.412.209	3.088.185	324.024	10,49%

Wilayah operasi MATSC menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik pada periode pelaporan. Tercatat pendapatan dan laba usaha mengalami peningkatan signifikan, yakni sebesar 48,85% dan 90,51% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan usaha meningkat dari Rp351,87 miliar menjadi Rp523,74 miliar, sementara laba meningkat dari Rp169,91 miliar menjadi Rp323,70 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan traffic penerbangan pasca COVID-19.

Realisasi Liabilitas AirNav Indonesia Cabang MATSC mengalami peningkatan sebesar Rp346,16 miliar atau setara dengan 12,07%, sedangkan Realisasi Ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp324,02 miliar atau setara dengan 10,49%. Dengan demikian, Total Aset AirNav Indonesia Cabang MATSC mengalami penurunan sebesar Rp22,13 miliar atau setara 10,09% dari Total Aset tahun sebelumnya.

MATSC showed excellent performance in the reporting period. Operating revenues and operating profit experienced a significant increase by 48.85% and 90.51% compared to the previous year. Operating revenues increased from IDR351.87 billion to IDR523.74 billion, while operating profit increased from IDR169.91 billion to IDR323.70 billion. This increase is in line with the increase in air traffic after COVID-19.

Realized Liabilities of AirNav Indonesia at MATSC Branch Office increased by IDR346.16 billion or equivalent to 12.07%, while Realized Equity increased by IDR324.02 billion or equivalent to 10.49%. Thus, Total Assets of AirNav Indonesia at MATSC Branch Office decreased by IDR22.13 billion or equivalent to 10.09% of the previous year's Total Assets.

## DENPASAR

Wilayah operasi Denpasar mengelola kegiatan operasi dan usaha AirNav Indonesia pada bandara di Denpasar. Cabang Denpasar membawahi beberapa unit, yaitu Cabang Pembantu Labuan Bajo, Unit Waingapu, Unit Tambolaka, Unit Pagerungan, dan Unit Buleleng. Adapun cabang Denpasar berlokasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Denpasar operation area manages AirNav Indonesia's operations and business activities at the airport in Denpasar. Denpasar Branch Office oversees several units, such as Labuan Bajo Sub-Branch, Waingapu Unit, Tambolaka Unit, Pagerungan Unit, and Buleleng Unit. Denpasar Branch Office is located at I Gusti Ngurah Rai Airport, Denpasar, Bali.

### Kinerja Keuangan Wilayah Operasi Denpasar Financial Performance of Denpasar Operation Area

Keterangan Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Rp Juta/ IDR Million		Rp Juta/ IDR Million	%
<b>Laba (Rugi)/ Profit (Loss)</b>				
Pendapatan Usaha/ Operating Revenues	190.229	40.956	149.273	364,47%
Beban Usaha/ Operating Expenses	81.428	75.002	6.426	8,57%
Laba (Rugi) Usaha/ Operating Profit (Loss)	108.801	(34.046)	142.847	(419,57)%
<b>Posisi Keuangan/ Financial Position</b>				
Total Aset/ Total Assets	69.538	76.376	(6.838)	(8.95)%
Total Liabilitas/ Total Liabilities	(1.520.628)	(1.404.926)	(115.702)	8.24%
Total Ekuitas/ Total Equity	1.590.166	1.481.302	108.864	7.35%

Wilayah operasi Denpasar menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik pada periode pelaporan. Tercatat pendapatan dan laba usaha mengalami peningkatan signifikan, yakni sebesar 364,47% dan 419,57% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan usaha meningkat dari Rp40,96 miliar menjadi Rp190,23 miliar, sementara laba meningkat dari posisi rugi Rp34,05 miliar menjadi laba Rp108,80 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan traffic penerbangan pasca COVID-19.

Denpasar operation area showed excellent performance in the reporting period. Operating revenues and operating profit experienced a significant increase by 364.47% and 419.57% compared to the previous year. Operating revenues increased from IDR40.96 billion to IDR190.23 billion, while operating profit increased from a loss of IDR34.05 billion to a profit of IDR108.80 billion. This increase is in line with the increase in air traffic after COVID-19.

Realisasi Liabilitas AirNav Indonesia Cabang Denpasar mengalami peningkatan sebesar Rp115,70 miliar atau setara dengan 8,24%, sedangkan Realisasi Ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp108,86 miliar atau setara dengan 7,35%. Dengan demikian, Total Aset AirNav Indonesia Cabang Denpasar mengalami penurunan sebesar Rp6,84 miliar atau setara 8,95% dari Total Aset tahun sebelumnya.

Realized Liabilities of AirNav Indonesia at Denpasar Branch Office increased by IDR115.70 billion or equivalent to 8.24%, while Realized Equity increased by IDR108.86 billion or equivalent to 7.35%. Thus, Total Assets of AirNav Indonesia at Denpasar Branch Office decreased by IDR6.84 billion or equivalent to 8.95% of the previous year's Total Assets.



## SURABAYA

Wilayah operasi Surabaya mengelola kegiatan operasi dan usaha AirNav Indonesia pada bandara di Surabaya. Cabang Surabaya membawahi beberapa unit, yaitu Cabang Pembantu Banyuwangi, Unit Malang, Unit Sumenep, Unit Jember, Unit Bawean dan Unit Blora. Adapun cabang Surabaya berlokasi di Bandara Internasional Juanda, Surabaya.

Surabaya operation area manages AirNav Indonesia's operations and business activities at the airport in Surabaya. Surabaya Branch Office oversees several units, such as Banyuwangi Sub-Branch, Malang Unit, Sumenep Unit, Jember Unit, Bawean Unit, and Blora Unit. Surabaya Branch Office is located at Juanda International Airport, Surabaya.

### Kinerja Keuangan Surabaya Financial Performance of Surabaya

Keterangan Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Rp Juta/ IDR Million		Rp Juta/ IDR Million	%
<b>Laba (Rugi)/ Profit (Loss)</b>				
Pendapatan Usaha/ Operating Revenues	96.972	56.156	40.816	72,68%
Beban Usaha/ Operating Expenses	79.824	74.723	5.101	6,83%
Laba (Rugi) Usaha/ Operating Profit (Loss)	17.148	(18.567)	35.715	292,36%
<b>Posisi Keuangan/ Financial Position</b>				
Total Aset/ Total Assets	35.647	41.130	(5.483)	(13,33)%
Total Liabilitas/ Total Liabilities	(212.038)	(189.392)	22.646	11,96%
Total Ekuitas/ Total Equity	247.685	230.522	17.163	7,45%

Wilayah operasi Surabaya menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik pada periode pelaporan. Tercatat pendapatan dan laba usaha mengalami peningkatan signifikan, yakni sebesar 72,68% dan 292,36% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan usaha meningkat dari Rp56,16 miliar menjadi Rp96,97 miliar, sementara laba meningkat dari rugi Rp18,57 miliar menjadi Rp17,15 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan PJNP yang dilakukan Perusahaan.

Surabaya operation area showed excellent performance in the reporting period. Operating revenues and operating profit experienced a significant increase by 72.68% and 292.36% compared to the previous year. Operating revenues increased from IDR56.16 billion to IDR96.97 billion, while operating profit increased from a loss of IDR18.57 billion to IDR17.15 billion. This increase is in line with the increase in Air Navigation Charges made by the Company.

Realisasi Liabilitas AirNav Indonesia Cabang Surabaya mengalami peningkatan sebesar Rp22,65 miliar atau setara dengan 11,96%, sedangkan Realisasi Ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp17,16 miliar atau setara dengan 7,45%. Dengan demikian, Total Aset AirNav Indonesia Cabang Denpasar mengalami penurunan sebesar Rp5,48 miliar atau setara 13,33% dari Total Aset tahun sebelumnya.

Realized Liabilities of AirNav Indonesia at Surabaya Branch Office increased by IDR22.65 billion or equivalent to 11.96%, while Realized Equity increased by IDR17.16 billion or equivalent to 7.45%. Thus, Total Assets of AirNav Indonesia at Surabaya Branch Office decreased by IDR5.48 billion or equivalent to 13.33% from the previous year's Total Assets.



## LAIN-LAIN/ OTHERS

Segmen wilayah operasi Lain-Lain mengelola kegiatan operasi dan usaha AirNav Indonesia yang tidak termasuk pengelolaan JATSC, MATSC, dan Denpasar. Segmen wilayah operasi lain-lain termasuk Kantor Pusat dan Pengelolaan Cabang serta unit-unit yang berada di bawah masing-masing Cabang, yakni mencakup Cabang Surabaya, Medan, Palembang, Balikpapan, Pontianak, Yogyakarta, Sentani, Halim, Semarang, Batam, Palangkaraya, Wamena, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Banda Aceh, Lombok, Jambi, Bandung, Kendari, Tarakan, Padang, Pangkal Pinang, Nabire, Banjarmasin, Ambon, Kupang, Merauke, Sorong, dan Manado.

The Others operation area manages AirNav Indonesia's operations and business activities which exclude the management of JATSC, MATSC, and Denpasar. The Others operation area includes the Head Office and Branch Offices as well as their underlying units, in Surabaya, Medan, Palembang, Balikpapan, Pontianak, Yogyakarta, Sentani, Halim, Semarang, Batam, Palangkaraya, Wamena, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Banda Aceh, Lombok, Jambi, Bandung, Kendari, Tarakan, Padang, Pangkal Pinang, Nabire, Banjarmasin, Ambon, Kupang, Merauke, Sorong, and Manado.

### Kinerja Keuangan Wilayah Operasi Lain-Lain Financial Performance of Others

Keterangan Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Rp Juta/ IDR Million		Rp Juta/ IDR Million	%
<b>Laba (Rugi)/ Profit (Loss)</b>				
Pendapatan Usaha/ Operating Revenues	439.358	351.903	87.455	24,85%
Beban Usaha/ Operating Expenses	1.385.125	1.350.855	34.270	2,54%
Laba (Rugi) Usaha/ Operating Profit (Loss)	(945.768)	(998.952)	53.184	(5,32)%
<b>Posisi Keuangan/ Financial Position</b>				
Total Aset/ Total Assets	4.373.787	3.994.433	379.354	9,50%
Total Liabilitas/ Total Liabilities	10.603.894	9.260.580	1.343.314	14,51%
Total Ekuitas/ Total Equity	(6.230.108)	(5.266.147)	(963.961)	18,30%

Segmen wilayah operasi Lain-Lain mencatat peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp87,45 miliar atau setara dengan 24,85%. Pendapatan tahun 2022 tercatat sebesar Rp439,36 miliar, sementara tahun 2021 sebesar Rp351,90 miliar. Meskipun demikian pendapatan usaha belum dapat menutup beban usaha, sehingga wilayah operasi Lain-Lain mencatat kerugian sebesar Rp945,77 miliar.

The Others operation area recorded an increase in operating revenues by IDR87.45 billion or equivalent to 24.85%. The revenue in 2022 was recorded at IDR439.36 billion in 2022, while it was IDR351.90 billion in 2021. However, operating revenues had not been able to cover operating expenses, so the Others operation area recorded a loss of IDR945.77 billion.

Wilayah operasi Lain-Lain melayani area dengan pergerakan lalu lintas penerbangan yang relatif lebih lenggang dibandingkan wilayah operasi lainnya. Perusahaan tetap menyelenggarakan navigasi penerbangan pada wilayah tersebut, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan navigasi di seluruh wilayah ruang udara Indonesia. Perusahaan berupaya melakukan efisiensi biaya, dengan tetap memerhatikan keselamatan dan kualitas navigasi penerbangan. Adapun beban usaha tercatat meningkat sebesar Rp34,27 miliar atau setara dengan 2,54% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan beban usaha relatif lebih kecil dibandingkan peningkatan pendapatan, sehingga kerugian usaha dapat diminimalisir selama tahun 2022.

The Others segment serve areas with air traffic movements that are relatively not as busy as other operation areas. The company continued to operate air navigation in the area, as a form of commitment by the Indonesian Government to provide navigation services throughout the Indonesian airspace. The company sought to make cost efficiency, while still paying attention to the safety and quality of air navigation. Thus, operating expenses increased by IDR34.27 billion or equivalent to 2.54% compared to 2021. The increase in operating expenses was relatively smaller than the increase in operating revenues, so the operating loss could be minimized in 2022.



## Aspek Pemasaran Marketing Aspect

### Pangsa Pasar

AirNav Indonesia melayani seluruh navigasi penerbangan di ruang udara Indonesia. Layanan diberikan kepada semua pengguna layanan, yang meliputi penerbangan komersial, penerbangan pribadi dan helikopter, angkutan kargo dan logistik udara, sekolah penerbang, serta pemerintah dan militer.

### Market Share

AirNav Indonesia is the provider of air navigation services in Indonesian airspace. Services are provided to all customers, including commercial flights, private flights and helicopters, cargo and air logistics, aviation schools, as well as the government and the military.

### DAFTAR 10 BESAR MASKAPAI PENERBANGAN YANG MENJADI PELANGGAN PERUSAHAAN DISAMPAIKAN DALAM TABEL BERIKUT INI.

The top 10 airlines that became the Company's customers are presented in the following table.



#### Maskapai Pelanggan PJNP Jelajah En-Route Flight Airlines

Domestik/ Domestic		Internasional/ International	
1. Lion Mentari Airlines	6. Indonesia Airasia	1. Singapore Airlines	6. Scoot Tiger Air PTE. LTD
2. Batik Air Indonesia	7. Sriwijaya Air	2. Uni Arab Emirate	7. Saudi Arabian Airlines
3. Citilink Indonesia	8. Wings Abadi	3. Qantas Airways LTD	8. Cathay Pacific Airways LTD
4. Garuda Indonesia	9. Trigana Air	4. Malaysia Airlines Berhad	9. Thai Airways International PCL
5. Super Airjet	10. Airfast Indonesia	5. Qatar Airways	10. China Southern Airlines

#### Maskapai Pelanggan PJNP Terminal Terminal Flight Airlines

Domestik/ Domestic		Internasional/ International	
1. Garuda Indonesia	6. Wings Abadi	1. Singapore Airlines	6. Scoot Tiger Air PTE. LTD
2. Lion Mentari Airlines	7. Indonesia Airasia	2. Uni Arab Emirate	7. Korean Airlines
3. Batik Air Indonesia	8. Trigana Air	3. Saudi Arabian Airlines	8. Malaysia Airlines Berhad
4. Citilink Indonesia	9. Rimbun Abadi Aviasi	4. Qatar Airways	9. Turkish Airlines
5. Super Airjet	10. Sriwijaya Air	5. Jetstar Airways PTY. LTD	10. Air Asia SDN, BHD



## Strategi dan Kegiatan Pemasaran

Sesuai visi, misi, dan tujuan pendirian perusahaan, fokus AirNav Indonesia adalah menyelenggarakan navigasi penerbangan yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, ramah lingkungan, dengan berstandar internasional. Kegiatan pemasaran terutama difokuskan pada keselamatan penerbangan, mengutamakan *On Time Performance* (OTP), prosedur peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar, dan senantiasa memenuhi standar dan regulasi navigasi penerbangan internasional. Perusahaan terus melakukan kampanye keselamatan penerbangan, termasuk sosialisasi dengan komunitas penerbangan balon udara dan pesawat nirawak (*drone*) agar senantiasa memerhatikan keselamatan penerbangan.

Perusahaan telah memasarkan *user preferred route* (UPR), yakni konsep *free route airspace*, di mana pesawat diizinkan mengisi *flight plan* untuk terbang pada suatu bagian ruang udara, melalui titik-titik dengan mempertimbangkan arah angin, turbulensi dan cuaca; yang menurut perhitungannya merupakan lintasan yang paling efisien. Implementasi prosedur UPR mampu mendorong efisiensi penerbangan seperti penghematan konsumsi bahan bakar untuk maskapai sebesar Rp1,50 miliar per tahun dan pengurangan emisi karbon sebesar 120.960 Ton CO<sub>2</sub> / Maskapai. ICAO mengharapkan prosedur UPR dapat diimplementasikan secara regional ke depannya.

Presiden RI mengesahkan persetujuan penyesuaian batas FIR Jakarta dan Singapura melalui Peraturan Presiden RI No. 109 Tahun 2022. Penyesuaian FIR tersebut tentunya menjadi potensi pasar baru, khususnya potensi PJNP lintas udara di Kepulauan Riau dan Natuna. Perusahaan telah mempersiapkan sejumlah instrumen, prosedur, teknologi, infrastruktur, dan SDM, serta melaksanakan program strategis untuk memaksimalkan potensi pasar baru tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung *realignment* FIR Jakarta - FIR Singapura, di antaranya:

- 1 Melakukan finalisasi *Supplement Letter of Operational Coordination Agreement LOCA* (SLOCA) yang meliputi AIS, ASM, MET dan SAR dengan Singapura;
- 2 Melakukan penyusunan materi paparan rapat konsultatif IATS bersama Singapura;
- 3 Melakukan pembahasan prosedur koordinasi ATS (ATS-CP) dengan Malaysia.

## Marketing Strategies and Activities

*In accordance with the company's vision, mission, and goals, AirNav Indonesia's focus is to organize air navigation that prioritizes safety, comfort, and environmental friendliness with international standards. Marketing activities were mainly focused on aviation safety, prioritizing On Time Performance (OTP), procedures for improving jet fuel efficiency, and always complying with international air navigation standards and regulations. The company continued to carry out aviation safety campaigns, including socialization with the hot air balloon and drone communities to always prioritize aviation safety.*

*The company has marketed a user preferred route (UPR) which is the free route airspace concept. The aircraft is permitted to fill in a flight plan to fly in a part of the airspace through certain points by taking into account wind direction, turbulence, and weather. Thus, it takes the most efficient route based on its calculations. Implementation of the UPR procedure was able to boost flight efficiency, such as reducing fuel consumption for airlines by IDR1.50 billion per year and reducing carbon emissions by 120,960 tons of CO<sub>2</sub> / airline. ICAO expects the UPR procedure to be implemented regionally in the future.*

*The President of Indonesia has signed Presidential Regulation No. 109 of 2022 on Ratification of the Flight Information Region (FIR) Agreement between Indonesia and Singapore. The FIR realignment has certainly become a potential for new markets, especially for air navigation charges in Riau and Natuna Islands. The company has prepared a number of instruments, procedures, technology, infrastructure and human resources, as well as implementing strategic programs to maximize the potential of these new markets. To support the realignment of Jakarta FIR and Singapore FIR, the company has conducted some activities, such as:*

- 1 *Finalizing the Supplement Letter of Operational Coordination Agreement LOCA (SLOCA) which includes AIS, ASM, MET and SAR with Singapore;*
- 2 *Preparing material for the presentation of the IATS consultative meeting with Singapore;*
- 3 *Conducting discussions on ATS coordination procedures (ATS-CP) with Malaysia.*



## Kinerja Keuangan Komprehensif Comprehensive Financial Performance

### Laporan Posisi Keuangan

### Statements of Financial Position

#### Posisi Keuangan Financial Position

Posisi Keuangan Financial Position	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Rp Juta/ IDR Million		Rp Juta/ IDR Million	%
<b>Aset/ Assets</b>				
Aset Lancar / Current Assets	2.451.900	1.898.274	553.626	29,16%
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	2.489.816	2.729.328	(239.512)	(8,78)%
Jumlah Aset/ Total Assets	4.941.716	4.627.602	314.114	6,79%
<b>Liabilitas/ Liabilities</b>				
Liabilitas Jangka Pendek/ Current Liabilities	700.455	526.900	173.555	32,94%
Liabilitas Jangka Panjang/ Non-Current Liabilities	65.631	80.141	(14.510)	(18,11)%
Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities	766.086	607.041	159.045	26,20%
Ekuitas/ Equity	4.175.630	4.020.561	155.069	3,86%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas/ Total Liabilities and Equity	4.941.716	4.627.602	314.114	6,79%

#### ASET

Jumlah Aset Perusahaan sebesar Rp4,94 triliun pada periode pelaporan, mengalami peningkatan sebesar Rp314,11 miliar atau setara dengan 6,79% dibandingkan dengan jumlah Aset pada periode sebelumnya, yang sebesar Rp4,63 triliun. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan Aset Lancar, yang meningkat sebesar Rp553,63 miliar atau setara 29,16% dibandingkan periode sebelumnya. Aset Tidak Lancar sebesar Rp2,49 triliun pada periode pelaporan, turun Rp239,51 miliar atau setara dengan 8,78 %, dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp2,73 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas Piutang Jangka Panjang beberapa maskapai yang terkena dampak COVID-19.

#### ASSETS

The Company's Total Assets amounted to IDR4.94 trillion in the reporting period, an increase of IDR314.11 billion or equivalent to 6.79% compared to the Total Assets of IDR4.63 trillion in the previous period. This increase was affected by an increase in Current Assets by IDR553.63 billion or equivalent to 29.16% compared to the previous period. Total Non-Current Assets amounted to IDR2.49 trillion in the reporting period, decreased by IDR239.51 billion or equivalent to 8.78%, compared to the Total Non-Current Assets of IDR2.73 trillion in the previous period. This decrease was due to an increase in the Allowance for Impairment Losses (CKPN) on Long-Term Receivables from several airlines that were affected by COVID-19.



## LIABILITAS

Jumlah Liabilitas Perusahaan sebesar Rp766,09 miliar pada periode pelaporan, mengalami peningkatan sebesar Rp159,05 miliar atau setara dengan 26,20%, dibandingkan Jumlah Liabilitas periode sebelumnya yang sebesar Rp607,04 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan Utang Pajak, Beban Akrua, liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan liabilitas lain-lain jangka pendek. Tercatat jumlah Liabilitas Jangka Panjang pada periode pelaporan sebesar Rp65,63 miliar, turun sebesar Rp14,51 miliar atau setara dengan 18,11% dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp80,14 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan penurunan Liabilitas Sewa Jangka Panjang.

## EKUITAS

Jumlah Ekuitas Perusahaan sebesar Rp4,18 triliun pada periode pelaporan, mengalami peningkatan sebesar Rp155,07 miliar atau setara dengan 3,86%, dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp4,02 triliun. Peningkatan ini disebabkan karena perolehan Laba Perusahaan di tahun berjalan sehingga mengurangi Saldo Laba Belum dicadangkan perusahaan.

## LIABILITIES

The Company's Total Liabilities amounted to IDR766.09 billion in the reporting period, an increase of IDR159.05 billion or equivalent to 26.20%, compared to the Total Liabilities of IDR607.04 billion in the previous period. This increase was mainly due to an increase in Taxes Payable, Accrued Expenses, short-term employee benefits liability and other current liabilities. Total Non-Current Liabilities recorded in the reporting period amounted to IDR65.63 billion, decreased by IDR14.51 billion or equivalent to 18.11% compared to the Total Non-Current Liabilities of IDR80.14 billion in the previous period. This decrease was mainly due to a decrease in Long-term Employee Benefits Liability and a decrease in Long-term Lease Liabilities.

## EQUITY

The Company's Total Equity amounted to IDR4.18 trillion in the reporting period, an increase of IDR155.07 billion or equivalent to 3.86%, compared to the Total Equity of IDR4.02 trillion in the previous period. This increase was due to the acquisition of the company's profit in the current year, thereby reducing the company's unreserved retained earnings.

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

### Statement of Incomes and Other Comprehensive Income

Keterangan Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Rp Juta/ IDR Million		Rp Juta/ IDR Million	%
Pendapatan Usaha/ Operating Revenues	2.231.478	1.347.520	883.958	65,60%
<b>Beban Usaha/ Operating Expenses</b>				
Beban Pegawai/ Employee Expenses	(1.497.420)	(1.266.376)	(231.044)	18,2%
Beban Umum dan Administrasi/ General and Administrative Expenses	(115.238)	(285.874)	170.636	(59,7%)
Beban Usaha Lainnya/ Other Operating Expenses	(446.642)	(422.113)	(24.529)	5,8%
<b>Jumlah Beban Usaha/ Total Operating Expenses</b>	<b>(2.059.300)</b>	<b>(1.974.363)</b>	<b>(84.937)</b>	<b>4,3%</b>
Laba (Rugi) Usaha/ Operating Profit (Loss)	172.178	(626.843)	799.021	127,5%
Pendapatan (Beban) Lain-Lain/ Other Income (Expenses)	37.581	20.186	17.395	86,2%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak/ Profit (Loss) before Tax	209.758	(606.657)	816.415	134,6%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefit (Expense)	(55.233)	116.866	(172.099)	(147,3%)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) For the Year	154.525	(489.791)	644.316	131,5%
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Loss)	544	(1.140)	1.684	147,7%
<b>Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) For the Year</b>	<b>155.069</b>	<b>(490.931)</b>	<b>646.000</b>	<b>131,6%</b>



## PENDAPATAN USAHA

Pembahasan terkait pendapatan usaha telah diuraikan dalam Tinjauan Operasi per Segmen Usaha pada bab ini.

## BEBAN USAHA

Komponen Beban Usaha Perusahaan terdiri dari Beban Pegawai, Beban Umum dan Administrasi, dan Beban Usaha Lainnya. Pada periode pelaporan, Perusahaan mencatat Beban Usaha sebesar Rp2,06 triliun, meningkat Rp84,94 miliar atau setara dengan 4,3%, apabila dibandingkan Beban Usaha tahun 2021 yang sebesar Rp1,97 triliun. Peningkatan terjadi karena peningkatan beban pegawai yakni sebesar Rp231,04 miliar atau setara dengan 18,2% apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp1,27 triliun. Adapun peningkatan beban pegawai dikarenakan pemulihan sebagian besar remunerasi pegawai, sejalan dengan perbaikan kondisi keuangan Perusahaan pascapandemi COVID-19.

Beban Umum dan Administrasi tahun 2022 tercatat sebesar Rp115,24 miliar, turun Rp170,64 miliar, atau setara dengan 59,7% dibandingkan Beban Umum dan Administrasi tahun 2021 sebesar Rp285,87 miliar. Penurunan lebih dipengaruhi oleh pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Beban Usaha Lainnya mencapai Rp446,65 miliar, meningkat Rp24,53 miliar atau setara 5,8%, dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp422,11 miliar. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan beban pemeliharaan guna peningkatan *safety* dan pelayanan.

## LABA (RUGI) USAHA

Perusahaan mencatatkan laba sebesar Rp172,18 miliar pada periode pelaporan, meningkat Rp799,02 miliar atau meningkat 127,5% dibandingkan tahun 2021 yang tercatat rugi sebesar Rp626,84 miliar.

## PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Pendapatan Lain-lain di tahun 2022 diperoleh dari keuntungan selisih kurs, pendapatan optimalisasi pemanfaatan aset, dan pendapatan bunga yang kemudian dikurangkan beban lain-lain. Adapun pendapatan lain-lain tercatat sebesar Rp37,58 miliar, meningkat Rp17,40 miliar atau setara dengan 86,2% apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp20,19 miliar.

## MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Beban Pajak Penghasilan pada tahun pelaporan tercatat sebesar Rp55,23 miliar, turun sebesar Rp172,10 miliar atau setara dengan 147,3% dibandingkan periode tahun sebelumnya yang tercatat sebagai Manfaat Pajak Penghasilan sebesar Rp116,87 miliar. Adapun penurunan

## OPERATING REVENUES

*Discussion on the Company's operating revenue has been described in the Operational Overview by Line of Business Segment in this chapter.*

## OPERATING EXPENSES

*Operating Expenses consist of Employee Expenses, General and Administrative Expenses, and Other Operating Expenses. In the reporting period, the Company recorded Operating Expenses of IDR2.06 trillion, increased by IDR84.94 billion or equivalent to 4,3% compared to IDR1.97 trillion in 2021. This increase was on the back of the hike in employee expenses at IDR231.04 billion or equivalent to 18.2% compared to Rp 1.27 trillion in 2021. In addition, the increasing employee expenses were the result of the recovery of most of the employee remuneration following the improving Company's financial condition post COVID-19 pandemic.*

*General and Administrative Expenses in 2022 were IDR115.24 billion, down by IDR170.64 billion or equivalent to 59.7% compared to IDR285.87 billion in 2021. The decrease was more influenced by the recovery of allowance for impairment losses and receivables. Other Operating Expenses were IDR446.65 billion, up IDR24.53 billion or equivalent to 5.8% compared to IDR422.11 billion in 2021, which was mainly affected by the Company's maintenance expenses in order to improve safety and service.*

## OPERATING PROFIT (LOSS)

*The Company recorded Operating Loss of IDR172,18 billion in the reporting period, increasing by IDR799.02 billion or equivalent to 127,5% compared to operating loss of Rp626.84 billion in 2021.*

## OTHER INCOME (EXPENSES)

*In 2022, Other Income was acquired from profit on foreign exchange, income from optimizing asset utilization, and interest income which is then deducted by other expenses. Other Income was IDR37.58 billion, up by IDR17.40 billion or equivalent to 86.2% when compared to IDR20.19 billion in 2021.*

## INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)

*Income Tax Benefit (Expense) in the reporting period was IDR55.23 billion, down by IDR172.10 billion or equivalent to 147,3% compared to the previous period of IDR116.67 billion. The decrease was due to tax adjustment from the previous period and deferred tax assets, which was influenced by Law*

disebabkan adanya penyesuaian dari pajak sebelumnya serta aset pajak tangguhan, yang antara lain dipengaruhi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## LABA (RUGI) DAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Perusahaan membukukan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp154,53 miliar pada periode pelaporan. Apabila dibandingkan periode tahun sebelumnya, peningkatan laba tercatat sebesar Rp644,32 miliar atau setara dengan 131,5%. Adapun pada tahun 2021, Perusahaan membukukan Rugi Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp489,79 miliar.

Penghasilan Komprehensif Lain pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp544 juta, meningkat Rp1,68 miliar atau setara dengan 147,7%, setelah tercatat sebagai Kerugian Komprehensif Lain sebesar Rp1,14 miliar pada tahun 2021. Penghasilan Komprehensif Lain berpengaruh pada Laba Komprehensif Tahun Berjalan, yang tercatat sebesar Rp155,07 miliar, meningkat sebesar Rp646,00 miliar atau setara dengan 131,6%, dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebagai Rugi Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp490,93 miliar. Adapun Penghasilan Komprehensif Lain dipengaruhi oleh Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja, sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang merupakan kewajiban imbalan kerja. Implikasinya akan menghasilkan keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial yang langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan (beban) komprehensif lain.

Number 7/2021 concerning Tax Regulations Harmonization.

## PROFIT (LOSS) AND COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

The Company recorded Net Profit for the Year of IDR154.53 billion in the reporting period. Compared to the previous period, the increase in net profit was IDR644.32 billion or equivalent to 131,5%. In 2021, the Company recorded a Net Loss for the Year of IDR489.79 billion.

In 2022, Other Comprehensive Income was IDR544 million, rising IDR1.68 billion or equivalent to 147,7% after recorded as Other Comprehensive Loss of IDR1.14 billion in 2021. Other Comprehensive Income was caused by Comprehensive Profit for the Year of IDR155.07 billion, increasing by IDR646 billion or equivalent to 131,6% compared to Comprehensive Loss for the Year in 2021 of IDR490.93 billion. Other Comprehensive Income was affected by Re-Measurement of Employee Benefits Liabilities determined by Law Number 11/2020 on Job Creation. The Company must provide minimum pension benefits as part of employee benefit liabilities. The implication will result in gains and losses on re-measurements arising from adjustments and changes in actuarial assumptions which are immediately recognized in full through other comprehensive income (expenses).



**Perusahaan membukukan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp154,53 miliar pada periode pelaporan. Apabila dibandingkan periode tahun sebelumnya, peningkatan laba tercatat sebesar Rp644,32 miliar atau setara dengan 131,55%.**

*The Company recorded Net Profit for the Year of IDR154.53 billion in the reporting period. Compared to the previous period, the increase in net profit was IDR644.32 billion or equivalent to 131.55%.*



## Laporan Arus Kas

## Statements of Cash Flows

Posisi Keuangan Description	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Rp Juta/ IDR Million		Rp Juta/ IDR Million	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	543.774	(451.630)	995.404	220,40%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(27.852)	(191.373)	163.521	85.45%
Arus Kas dari Aktivitas Keuangan Cash Flows from Financing Activities	(2.745)	(5.321)	2.576	48.41%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	513.177	(648.325)	1.161.502	179,15%
Kas dan Setara Kas Awal Periode Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period	1.092.703	1.744.757	(652.054)	(37.37%)
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Effect of Foreign Currency Exchange Rate Changes	5.901	(3.729)	9.630	258,25%
Kas dan Setara Kas Akhir Periode Cash and Cash Equivalents at End of Period	1.611.781	1.092.703	519.078	47.50%

Perusahaan mencatat Kas dan Setara Kas pada akhir periode pelaporan sebesar Rp1,61 triliun, meningkat Rp519,08 miliar atau setara 47,50%, dibandingkan akhir periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,09 triliun. Adapun peningkatan dipengaruhi oleh penerimaan Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp543,77 miliar, seiring pulihnya lalu lintas penerbangan, dan pengaruh perubahan kurs mata uang asing sebesar Rp5,90 miliar.

Pada periode pelaporan, Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi sebesar Rp27,85 miliar, sedangkan Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan sebesar Rp2,75 miliar. Arus Kas yang digunakan untuk Aktivitas Investasi dan Keuangan naik sebesar 85,45% dan 48,41% apabila dibandingkan tahun 2021, yang sebesar Rp191,37 miliar dan Rp5,32 miliar.

At the end of the reporting period, the Company's Cash and Cash Equivalents was IDR1.61 trillion, up by IDR519.08 billion or equivalent to 47.50% compared to the previous period of IDR1.09 trillion. The increase was due to the Cash Flows from Operating Activities of IDR543.77 billion following the recovery in air traffic as well as the effect of foreign currency exchange rate changes of IDR5.90 billion.

In the reporting period, Net Cash for Investment Activities was IDR27.85 billion, while the one for Funding Activities was IDR2.75 billion. Cash Flows for Investment and Financing Activities rose by 85.45% dan 48.41%, respectively, compared to IDR191.37 billion and IDR5.32 billion, in 2021.



## Kemampuan Menghasilkan Laba Profit Generating Ability

AirNav Indonesia menggunakan rasio operasi dan rasio profitabilitas untuk menganalisis kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba. Pada periode pelaporan, Perusahaan mencatat tingkat perputaran persediaan yang digunakan dalam operasional Perusahaan selama 7 hari, semakin cepat apabila dibandingkan tahun 2021 yang selama 12 hari. Tingkat perputaran total aset yang digunakan dalam

AirNav Indonesia uses the operational ratio as well as profitability ratio to measure the Company's ability to generate profit. In the reporting period, the company recorded its inventory turnover rate in the operational company was 7 (seven) days, faster than the previous year, which was 12 (twelve) days. Total Asset Turnover rate used for Company's revenue was 47.07%, increasing 15.87% when compared to 31.20% in 2021. The



rangka memperoleh pendapatan Perusahaan tercatat sebesar 47,07%, mengalami peningkatan 15,87% apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 31,20%. Komponen rasio operasi berikutnya adalah rasio modal sendiri terhadap total aset, yang tercatat sebesar 39,05%, turun 2,65% apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 41,70%. Adapun penurunan sejalan dengan peningkatan ekuitas sebesar 3,86% dibandingkan peningkatan aset yang sebesar 6,79% di tahun 2022.

Perusahaan menekankan efisiensi anggaran yang menjadi KPI tiap Direktorat. Direksi menggunakan pengukuran Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam rangka penerapan *cost reduction program*. Tercatat BOPO pada periode pelaporan sebesar 92,28%, yang menunjukkan proporsi beban terhadap pendapatan turun 54,24%, apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 146,52%. Penurunan tersebut menunjukkan efektivitas penerapan *cost reduction program* yang dilakukan Perusahaan.

*other operational component is total assets equity to total assets ratio of 39.05%, down by 2.65% when compared to 41.70% in 2021. The drop was in line with the decline in equity of 3.86% when compared to the increase in assets of 6.79% in 2022.*

*The company emphasizes budget efficiency as the KPI for each Directorate. The Board of Directors uses the measurement of Operating Expenses to Operating Revenues (BOPO) as a basis for decision making in the context of implementing cost reduction program. In the reporting period, BOPO was recorded at 92.28%, showing the declining proportion of expenses to income by 54.24% when compared to 2021 of 146.52%. The decrease shows the effectiveness of the Company's implementation of cost reduction program.*

### ○ Rasio Operasi dan Rasio Profitabilitas

*Operational and Profitability Ratios*

dalam % kecuali dinyatakan lain\*  
in %, except stated differently

Keterangan <i>Description</i>	2022	2021	Perubahan <i>Changes</i>
<b>Rasio Operasi/ <i>Operational Ratio</i></b>			
Perputaran persediaan (*hari)/ <i>Inventory Turnover (*days)</i>	7	12	(5)
Perputaran Total Aset (TATO)/ <i>Total Assets Turnover (TATO)</i>	47,07	31,20	15,87
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset/ <i>Total Assets Equity to Total Assets Ratio</i>	39,05	41,70	(2,65)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) <i>Operational Expenses to Operational Revenues (BOPO)</i>	92,28	146,52	(54,24)
<b>Rasio Profitabilitas/ <i>Profitability Ratio</i></b>			
Margin Laba Usaha/ <i>Operating Profit Margin</i>	7,72	(46,52)	54,23
Margin Laba Bersih/ <i>Net Profit Margin</i>	6,92	(36,35)	43,27
Margin EBITDA/ <i>EBITDA Margin</i>	21,43	(26,08)	47,51
Imbalan atas Aset/ <i>Return on Asset (RoA)</i>	3,13	(10,58)	13,71
Imbalan Investasi/ <i>Return on Investment (RoI)</i>	9,75	(7,78)	17,45
Imbalan kepada Pemegang Saham/ <i>Return on Equity (RoE)</i>	8,89	(21,23)	30,12

Perusahaan melakukan perhitungan margin laba usaha, laba bersih, dan EBITDA, serta imbalan atas aset, investasi, dan modal ketika melakukan analisis rasio profitabilitas. Tercatat perolehan margin laba usaha tahun 2022 sebesar 7,72%, mengalami peningkatan 54,23% dibandingkan tahun 2021 sebesar defisit 46,52%. Margin laba bersih tahun 2022 tercatat sebesar 6,92%, meningkat 43,27% apabila dibandingkan tahun 2021 yang tercatat rugi atau defisit 36,35%. Margin EBITDA tercatat sebesar 21,43% meningkat 47,51% apabila dibandingkan tahun 2021 yang tercatat rugi atau defisit 26,08%.

*The Company calculates operating profit margin, net profit and EBITDA, as well as return on assets, investment and capital when conducting a profitability ratio analysis. It was recorded that the acquisition of an operating profit margin in 2022 was 7.72%, an increase of 54.23% compared to a deficit of 46.52% in 2021. The 2022 net profit margin was recorded at 6.92%, an increase of 43.27% when compared to a deficit of 36.35% in 2021. Meanwhile, the EBITDA margin was recorded at 21.43%, an increase of 47.51% when compared to a deficit of 26.08% in 2021.*



Berdasarkan perhitungan Margin, perbandingan laba usaha dan laba bersih masih relatif rendah, meskipun telah menunjukkan pencapaian positif dibandingkan tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan Perusahaan tidak semata-mata berorientasi pada profitabilitas dan tetap melayani wilayah operasi yang berpotensi merugi. Meskipun demikian Perusahaan tetap mengupayakan solusi terbaik, antara lain dengan melakukan peningkatan layanan navigasi penerbangan dari prosedur non-radar (*procedural*) menjadi prosedur radar (*surveillance*) untuk mendukung program sentralisasi pelayanan *surveillance* di 12 lokasi yang menjangkau 37 lokasi seluruh Indonesia. Perusahaan juga meningkatkan *Flight Information Service (FIS)*, dengan konsolidasi pengelolaan ruang udara *uncontrolled* dari 8 lokasi menjadi 6 lokasi. Penyederhanaan pengelolaan ruang udara diharapkan dapat menekan biaya usaha tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun tingkat keselamatan navigasi penerbangan.

Sementara rasio Margin EBITDA merupakan salah satu KPI Direktorat yang menunjukkan profitabilitas dan kemampuan Perusahaan dalam beroperasi. Tercatat Margin EBITDA di tahun 2022 sebesar 21,43%, meningkat 47,51% apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar -26,08%. Adapun realisasi EBITDA tahun 2022 sebesar Rp478,20 miliar, melampaui target RKAP yang sebesar Rp348,22 miliar.

Imbalan atas Aset atau *Return on Asset (RoA)* merupakan ukuran yang digunakan untuk menghitung tingkat profitabilitas Perusahaan atas aset yang dimiliki. RoA tercatat sebesar 3,13% di tahun 2022, meningkat 13,71% apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar -10,58%. Adapun Imbalan Investasi atau *Return on Investment (RoI)* merupakan ukuran yang digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan Perusahaan dalam mengembalikan investasi yang telah ditanamkan. Tercatat RoI di tahun 2022 sebesar 9,67%, meningkat 17,45% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar -7,78%. Rasio selanjutnya, yakni Imbalan kepada Pemegang Saham atau *Return on Equity (RoE)*, digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan Perusahaan dalam rangka mengembalikan keuntungan dari dana yang telah ditanamkan. Tercatat RoE di tahun 2022 sebesar 8,89%, meningkat 30,12% apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar -21,23%.

Hasil analisis RoA, RoI, maupun RoE menunjukkan perbaikan kinerja Perusahaan dibandingkan kinerja di tahun 2021. Meskipun demikian, tingkat RoA, RoI, maupun RoE berpotensi untuk dioptimalkan dengan meningkatkan kinerja Perusahaan. Oleh karenanya, Perusahaan berupaya melakukan optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan, optimalisasi aset non aktif, mencari potensi pendapatan di luar PJNP, serta menerapkan *cost efficiency ratio* pada setiap program Direktorat untuk meningkatkan profitabilitas Perusahaan.

*Based on Margin calculations, the comparison of operating profit and net profit is still relatively low despite showing positive achievements compared to 2021. This is because the Company is not solely focused on profitability, but it also continues to serve operational areas that may incur losses. Nevertheless, the Company continues to strive for the best solution, including improving air navigation services from non-radar procedures (*procedural*) to radar procedures (*surveillance*) to support the centralized program of surveillance services at 12 locations covering 37 locations throughout Indonesia. The Company also increased its Flight Information Service (FIS) by consolidating management of uncontrolled airspace from 8 locations to 6 locations. Simplification of airspace management is expected to reduce business costs without reducing service quality and the level of air navigation safety.*

*While the EBITDA Margin ratio is one of the Directorate KPIs that shows the Company's profitability and ability to operate. The EBITDA margin in 2022 was recorded at 21.43%, an increase of 47.51% compared to -26.08% in 2021. The realization of EBITDA in 2022 was IDR478.20 billion, exceeding the Company WPB target of IDR348.22 billion.*

*Return on Assets (RoA) is a measure used to calculate the level of the Company's profitability for its assets. RoA was recorded at 3.13% in 2022, an increase of 13.71% when compared to 2021 which was -10.58%. Return on Investment (RoI) is a measure used to calculate the level of the Company's ability to return the investment that has been invested. In 2022, RoI was recorded at 9.67%, an increase of 17.45% compared to 2021 at -7.78%. Meanwhile, Return on Equity (RoE) is used to calculate the level of the Company's ability to return profits from the funds that have been invested. The RoE in 2022 was recorded at 8.89%, an increase of 30.12% when compared to 2021 at -21.23%.*

*The RoA, RoI, and RoE analyses show an improvement in the Company's performance compared to 2021. Nonetheless, the levels of RoA, RoI, and RoE have the potential to be optimized by increasing the Company's performance. Therefore, the Company seeks to optimize the utilization of company assets, non-active assets, potential income outside the Navigation Charges as well as apply a cost efficiency ratio in each Directorate program to increase the Company's profitability.*





## Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

### Solvency Ratio and Receivables Collectability Ratio

#### Kemampuan Membayar Utang

Perusahaan melakukan pengukuran kemampuan membayar utang dengan menggunakan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek, sedangkan rasio solvabilitas mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar seluruh utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

#### Solvency Ratio

The Company measures the ability to pay debts by using the ratio of liquidity and solvency. The liquidity ratio is used to measure the Company's ability to pay short-term debts, while the solvency ratio measures the Company's ability to pay all of its debts, both short term and long term.

#### Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas

##### Liquidity Ratio and Solvability Ratio

dalam %/in %

Jenis Rasio Type of Ratio	2022	2021	Perubahan Description
<b>Rasio Likuiditas / Liquidity Ratio</b>			
Rasio Kas / Cash Ratio	234,10	207,20	26,90
Rasio Lancar / Current Ratio	348,84	360,27	(10,23)
<b>Rasio Solvabilitas / Solvability Ratio</b>			
Rasio Total Liabilitas Terhadap Total Aset Ratio of Total Liabilities to Total Assets	15,50	13,12	2,38
Rasio Total Liabilitas Terhadap Total Ekuitas Ratio of Total Liabilities to Total Equity	18,35	15,10	3,25

Perusahaan menggunakan analisis rasio kas dan rasio lancar yang menunjukkan kemampuan kas dan setara kas serta kemampuan aset lancar Perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Adapun rasio kas tahun 2022 tercatat sebesar 230,10%, meningkat 22,72% apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 207,38%. Peningkatan ini menggambarkan peningkatan kemampuan kas Perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sementara rasio lancar tahun 2022 sebesar 350,04%, turun 10,23% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 360,27%. Meskipun terjadi penurunan, Perusahaan tetap memiliki kekuatan aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

The Company uses cash and current ratios analyses which show the ability of cash and its equivalents as well as the Company's current assets to meet its short-term obligations. The cash ratio in 2022 was recorded at 230.10%, an increase of 22.72% when compared to 2021 at 207.38%. Result shows an increase in the Company's cash capacity to meet its short-term obligations. Meanwhile, the current ratio in 2022 was 350.04%, down 10.23% compared to 2021 at 360.27%. Despite the decline, the Company still has sufficient asset strength to meet its short-term obligations.

Perusahaan menggunakan analisis rasio total liabilitas terhadap total aset dan rasio total liabilitas terhadap total ekuitas sebagai komponen rasio solvabilitas. Adapun rasio total liabilitas terhadap total aset maupun terhadap total

The Company uses the analysis of debt to total asset ratio and debt to total equity ratio as the components of the solvency ratio. The ratio of debt to total asset or to total equity was 15.50% and 18.35%, respectively, in 2022. Both ratios



equitas berturut-turut 15,50% dan 18,35% di tahun 2022. Kedua rasio mengalami peningkatan sebesar 2,38% dan 3,25% apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 13,12% dan 15,10%. Peningkatan Rasio Liabilitas terhadap Total Aset lebih disebabkan meningkatnya Aset Lancar efek dari meningkatnya kinerja perusahaan pascapandemi COVID-19.

increased by 2.38% and 3.25% when compared to 2021 at 13.12% and 15.10%, respectively. The higher increase in debt to total asset ratio was due to the increase in Current Assets as a result of the Company's improved performance after the COVID-19 pandemic.

## Tingkat Kolektibilitas Piutang

AirNav Indonesia memanfaatkan teknologi informasi dalam menerbitkan tagihan dan mengumpulkan piutang yang telah jatuh tempo. Tingkat kolektibilitas piutang diukur dengan periode penagihan atau *collection period*. Perusahaan mencatat *average collection period* (ACP) *current* pada tahun 2022 selama 79 hari. Kecepatan periode penagihan meningkat apabila dibandingkan tahun 2021 yang selama 120 hari.

## Receivables Collectability Ratio

AirNav Indonesia utilizes information technology in issuing bills and collecting overdue receivables. Collection period calculation is metrix for the Company's ability in collecting receivables. The Company recorded that the average collection period (ACP) in 2022 was 79 days, translating into faster collection period than in 2021 at 120 days.

### Rincian Umur Piutang Usaha Details of Trade Receivables

Usia Tempo Piutang Usaha Time Limit of Trade Receivables	2022	2021	Perubahan Changes	
	Rp Juta/ IDR million		Rp Juta/ IDR million	%
1 - 30 Hari/ 1 - 30 Days	325.771	232.375	93.396	40,19
>30 - 90 Hari/ >30 - 90 Days	135.266	136.057	(790)	(0,58)
>90 - 180 Hari/ >90 - 180 Days	27.565	150.440	(122.875)	(81,68)
>180 - 360 Hari/ >180 - 360 Days	10.634	323.766	(313.133)	(96,72)
>360 Hari/ >360 Days	1.040.689	655.571	385.119	58,75
Jumlah (Rp Juta)/ Total (Rp million)	1.539.925	1.498.209	41.716	2,78
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Reserves for Impairment Losses	(576.875)	(662.183)	85.038	12,88
<b>Jumlah Piutang Usaha - Bersih/ Total Trade Receivables - Net</b>	<b>963.050</b>	<b>836.026</b>	<b>127.024</b>	<b>15,19</b>





## Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

### Capital Structure and the Management Policy

#### Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Perusahaan mengelola struktur modal dengan memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat sehingga mampu menunjang usaha dan mengoptimalkan imbalan bagi para pemegang saham. Struktur modal Perusahaan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) agar berkontribusi hingga 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Dalam prosesnya, Perusahaan melakukan analisis terhadap pergeseran kondisi ekonomi dan melakukan penyesuaian struktur modal melalui Rapat Pembahasan Bersama (RPB). Perusahaan memiliki kebijakan untuk menjaga struktur permodalan yang sehat, sehingga dapat mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

#### Management Policy of Capital Structure

*The main objective of the Company capital management is to ensure the maintenance of healthy capital ratio to support the business and maximize returns for the shareholders. In addition, the Company is required by the Government Regulation No. 13 of 1998 concerning Public Company (PERUM) to contribute up to 20% of the share capital issued and fully paid into reserve fund that should not be distributed. External capital requirements are reviewed by the Company at Shareholder Meeting. The Company policy is to maintain a healthy capital structure for securing access to funding at reasonable costs.*



**Perusahaan memiliki kebijakan untuk menjaga struktur permodalan yang sehat, sehingga dapat mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.**

*The Company policy is to maintain a healthy capital structure for securing access to funding at reasonable costs.*



#### Struktur Modal Perusahaan

Struktur permodalan AirNav Indonesia berasal dari ekuitas atau permodalan sendiri, yang berasal dari pengalihan BMN Kementerian Perhubungan dan dana APBN sebagaimana telah disampaikan dalam Bab Profil Perusahaan. Perusahaan tidak memiliki utang berbasis bunga yang mempengaruhi permodalan perusahaan. Perincian tentang ekuitas atau modal Perusahaan telah disampaikan dalam Kinerja Keuangan Komprehensif.

#### Company Capital Structure

*AirNav Indonesia's capital structure is obtained from the equity, coming from the transfer of the Ministry of Transportation's State Property and State Budget ("APBN") funds as stated in the Company Profile section. AirNav Indonesia did not have interest-based payables that affected the Company's capital. Details regarding the equity or Company capital have been shared in the Comprehensive Financial Performance.*





## Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

### Material Commitment for Capital Goods Investment

**Perusahaan tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal.**

*The Company has no material commitments for capital goods investment.*



## Realisasi Investasi Barang Modal

### Realized Investment in Capital Goods

**A**

irNav Indonesia menangani total investasi di tahun 2022 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp44,37 miliar.

*In 2022, AirNav Indonesia handled a total investment with a budget ceiling value of IDR 44.37 billion.*

### Investasi Barang Modal

#### Investment In Capital Goods

Investasi Barang Modal Investment In Capital Goods	Tujuan Investasi Investment Purposes	Nilai (Rp Juta) Value (IDR million)
<b>Investasi Rutin/ Routine</b>		
Investasi Carry-Over Carry-Over Investment	Investasi Carry-Over Rutin sebanyak 1 Program Routine carry-over investment of 1 program	7.896
Investasi Usulan Baru Newly Proposed Investment	Investasi Usulan baru Rutin sebanyak 0 program Newly Proposed Routine Investment of 0 program	0
Subtotal Investasi Rutin Subtotal Routine Investment	Investasi Rutin Sebanyak 1 Program Investasi Total Routine investment of 1 program	7.896
<b>Investasi Non-Rutin/ Non-Routine</b>		
Investasi Carry-Over Carry-Over Investment	Investasi Carry-Over Non-Rutin sebanyak 2 Program Non-Routine carry-over investment of 2 program	32.900
Investasi Usulan Baru Newly Proposed Investment	Investasi Usulan Baru Non-Rutin sebanyak 1 Program Newly Proposed Investment of 1 program	3.577
Subtotal Investasi Non-Rutin Subtotal Non-Routine Investment	Investasi Non-Rutin sebanyak 3 Program Investasi Total Non-Routine investment of 3 program	36.477
Jumlah/ Total		44.373



AirNav Indonesia melaksanakan kegiatan investasi barang dan modal dengan tujuan menunjang kelengkapan sarana dan prasarana dalam Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan. Terdapat 4 program investasi dengan total nilai investasi yang sudah terkontrak sebesar Rp39,85 miliar di tahun 2022, dengan 3 program di antaranya merupakan program *carry over* dari tahun sebelumnya dan 1 program baru. Adapun keseluruhan program telah terealisasi 100% secara kontrak dan 75% secara progres fisik, untuk selanjutnya akan dilakukan *carry over* di tahun 2023, yakni penggantian dan pemasangan sistem ATC di Cabang Sentani.

*AirNav Indonesia had made a number of investments in capital goods. The investment was made to support refurbishing of infrastructure for En-route Navigation Charge (PJNP). There were 4 investment programs with a total contracted investment value of IDR39.85 billion in 2022, of which 3 of them were carry over programs from the previous year and followed by 1 new program. The entire program has been realized 100% in contract and 75% in physical progress, henceforth a carry-over will be done in 2023, which is the replacement and installation of the ATC system at the Sentani Branch.*

**Realisasi Investasi 2022**  
*Realized Investment in 2022*

No	Keterangan <i>Description</i>	Nilai (Rp Juta) <i>Value (IDR million)</i>	Physical Realization (%)
1	<b>Kegiatan Rutin</b> <i>Routine Activities</i>	6.247	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan dan Pemasangan Infrastruktur <i>Data Center</i> Airnav Indonesia</li> </ul> <i>Airnav Indonesia Data Center Infrastructure Procurement and Installation</i>		
2	<b>Kegiatan Non-Rutin</b> <i>Non-Routine Activities</i>	33.600	66,7%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan <i>Tower</i> dan Sarana Penunjangnya di Lampung</li> <li>Penggantian dan Pemasangan <i>Chiller</i> di Cabang MATSC</li> <li>Penggantian dan Pemasangan <i>ATC System</i> di Cabang Sentani</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Construction of Towers and Supporting Facilities in Lampung</i></li> <li><i>Chiller Replacement and Installation at MATSC Branches</i></li> <li><i>ATC System Replacement and Installation at the Sentani Branch</i></li> </ul>		
	<b>Total Investasi</b> <i>Total Investment</i>	39.847	75%



## Target dan Realisasi Target and Realization

AirNav Indonesia telah menetapkan rencana dan target yang akan dicapai sepanjang tahun 2022 dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022. RKAP tersebut telah disahkan tanggal 27 Januari 2022 melalui Surat Menteri BUMN No. S-70/MBU/01/2022 tentang Persetujuan RKAP Tahun 2022 Perum LPPNPI. Secara keseluruhan Perusahaan berhasil merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam RKAP 2022.

In the 2022 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), AirNav Indonesia already set plans and targets to be achieved throughout year, which have been ratified on January 27, 2022 through the SOE Minister Letter No. S-70/MBU/01/2022 concerning the Approval of the 2022 RKAP of Perum LPPNPI. Overall, the Company has successfully realized all the targets set in the 2022 RKAP.

### Realisasi RKAP Produksi, Investasi dan Keselamatan Penerbangan Tahun 2022 Realized Corporate Work Plan and Budget on Production, Investment, and Air Navigation Safety in 2022



Keterangan Description		RKAP/ Corporate Work Plan and Budget	Realisasi Realization	Realisasi terhadap RKAP Realization against RKAP
<b>PRODUKSI</b>	<b>PRODUCTION</b>			
<b>Produksi Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Jelajah (Rute)</b>	<i>En-route Navigation Production (Route)</i>			
Penerbangan Domestik	<i>Domestic Flights</i>	108.598.784	125.981.202	116,01%
Penerbangan Internasional	<i>International Flights</i>	24.828.386	54.561.220	219,75%
Penerbangan Lintas Udara	<i>Overflying Flights</i>	74.289.058	97.411.868	131,13%
Total Produksi PJNP Jelajah	<i>Total En-route Navigation Production</i>	207.716.228	277.954.290	133,81%
<b>Produksi Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Terminal (Ton)</b>	<i>Terminal Navigation Production (Ton)</i>			
Penerbangan Domestik	<i>Domestic Flights</i>	27.668.057	33.412.061	120,76%
Penerbangan Internasional	<i>International Flights</i>	3.903.552	7.146.932	183,09%
Total Produksi PJNP Terminal	<i>Total Terminal Navigation Production</i>	31.571.609	40.558.993	128,47%
<b>INVESTASI</b>	<b>INVESTMENT</b>			
Total Alat Produksi (Unit)	<i>Total Production Equipment (Unit)</i>	2.499	2.493	99,76%
Jumlah Program Investasi (Program)	<i>Number of Investment Programs (Program)</i>	4	3	75%
Total Investasi (Rp Juta)	<i>Total Investment (Rp-million)</i>	44.373	39.847	89,80%
<b>PENGELOLAAN OPERASI DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (% (BS))</b>	<b>AVIATION OPERATIONS AND SAFETY MANAGEMENT (% (BS))</b>			
<i>Departure &amp; Arrival Punctuality</i>	<i>Departure &amp; Arrival Punctuality</i>	90,00	99,71	110,79%
<i>Kinerja Keselamatan (Acceptable Level of Safety)</i>	<i>Acceptable Level of Safety</i>	100,00	100,03	110,03%
<i>Availability dan Kehandalan Jaringan, Peralatan dan Fasilitas Produksi 2022</i>	<i>Availability and Reliability of Network, Equipment and Production Facilities in 2022</i>	99,00	99,25	100,25%
<i>Kepuasan Karyawan</i>	<i>Employee Satisfaction</i>	79,00	79,24	100,30%



Pemulihan pergerakan lalu lintas penerbangan mendorong peningkatan produksi PJNP baik Jelajah maupun Terminal. Realisasi produksi PJNP penerbangan internasional tercatat sangat baik, dengan rasio realisasi terhadap RKAP mencapai 219% untuk PJNP Jelajah, dan 183,09% untuk PJNP Terminal. Realisasi nilai investasi terhadap RKAP tercatat sebesar 89,90%, yang disebabkan progres pengerjaan sistem ATC di Cabang Sentani belum selesai sepenuhnya.

The recovery of air traffic movements has encouraged an increase in Navigation Charge production, both En-route and Terminal. The realization of international flights was impressive, with a ratio of realization to RKAP reaching 219% for En-route Navigation Charges, and 183.09% for Terminal Navigation Charges. The realization of the investment value against the RKAP was at 89.90% due to the progress of the ATC system at the Sentani Branch which had not been fully completed.

## Realisasi RKAP Kinerja Keuangan Tahun 2022

Realized Corporate Work Plan and Budget in 2022

Keterangan Description	RKAP Corporate Work Plan and Budget	Realisasi Realization	Realisasi terhadap RKAP Realization against RKAP
	Rp Juta/ IDR million		
<b>Labanya (Rugi) dan Labanya (Rugi) Komprehensif/ Profit (Loss) and Comprehensive Income (Loss)</b>			
PJNP Jelajah/ En-route Navigation Charges	1.410.841	1.982.440	140,52%
PJNP Terminal/ Terminal Navigation Charges	183.067	249.038	136,04%
Jumlah Pendapatan Usaha/ Total Operating Revenues	1.593.908	2.231.478	140,00%
Beban Usaha/ Other Operating Expenses	(1.544.455)	(2.059.575)	133,36%
Labanya/(Rugi) Usaha/ Operating Profit/(Loss)	49.453	171.903	347,61%
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Total Other Income Expenses	(25.104)	37.856	(150,79%)
Labanya/(Rugi) Sebelum Pajak/ Profit/(Loss) Before Tax	24.349	209.758	861,48%
Beban (Manfaat) Pajak/ Tax (Benefit) Expenses	(121)	55.233	(45.735,73%)
Labanya/(Rugi) Bersih – Tahun Berjalan Net Income/(Loss) – For the Year	24.470	154.525	631,50%
Penghasilan/(Kerugian) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income/(Loss)	N/A	544	N/A
Labanya/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan - Setelah Pajak Comprehensive Profit/(Loss) For the Year – After Tax	24.469	155.069	633,73%
<b>Posisi Keuangan/ Financial Position</b>			
Aset/ Assets	4.501.301	4.941.716	109,78%
Liabilitas/ Liabilities	605.621	766.086	126,50%
Ekuitas/ Equity	3.895.680	4.175.630	107,19%

Perusahaan mencatatkan pencapaian kinerja keuangan melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP. Pendapatan usaha dan laba usaha terealisasi 140% dan 347,61% dibandingkan target RKAP. Posisi keuangan, baik aset, liabilitas, dan ekuitas memenuhi target RKAP dengan realisasi masing-masing 109,78%, 126,50%, dan 107,19%.

The Company's financial performance achievements exceeded the RKAP target, with operating income and operating profit realizing 140% and 347.61%, respectively (vs. the RKAP target). The financial position of assets, liabilities, and equity met the targets with realization of 109.78%, 126.50%, and 107.19%, respectively.



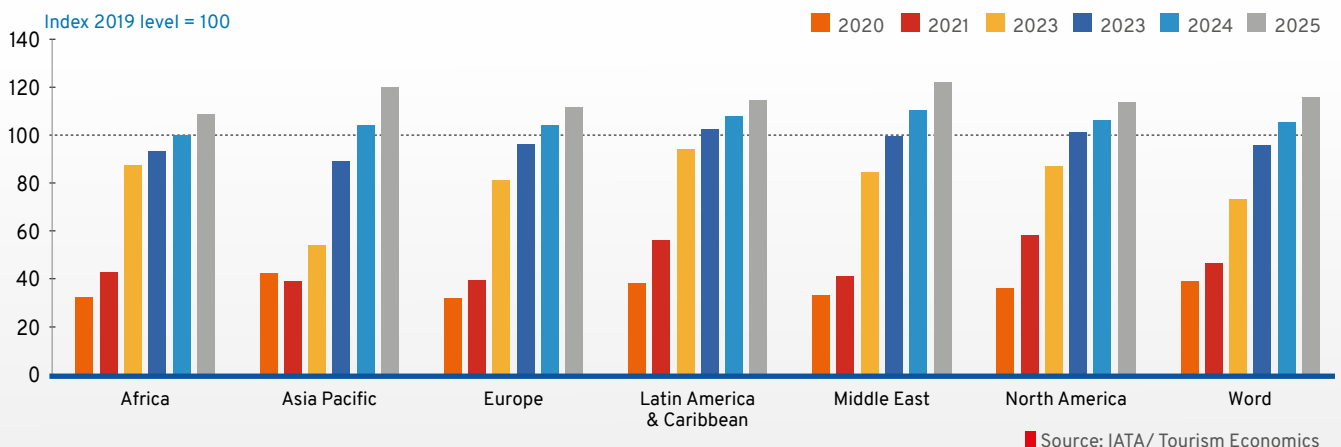
## Prospek Usaha Business Prospect

**A**irNav Indonesia memandang prospek usaha pelayanan jasa navigasi penerbangan terus meningkat dan menguat di tahun 2023. Pemulihan ekonomi global, peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat, dan pelonggaran ketentuan perjalanan udara tentunya mendorong peningkatan lalu lintas penerbangan. International Air Transport Association (IATA) mempublikasikan momentum pemulihan lalu lintas penerbangan global, dan memprediksi pergerakan lalu lintas penerbangan akan mencapai level prapandemi pada tahun 2023-2024.

**A**irNav Indonesia expects to see the business prospects for the air navigation service to gradually improve and grow in 2023. The global economic recovery, the improvement of public health resilience, and the relaxation of air travel regulations will encourage an increase in air traffic. The International Air Transport Association (IATA) publishes the momentum of global aviation traffic recovery and predicts that air traffic will reach pre-pandemic levels in 2023-2024.



### Prediksi Pergerakan Lalu Lintas Penerbangan Prediction of Air Traffic Movements



Estimated year of recovery to 2019 passenger traffic levels

Africa	Asia Pacific	Europe	Latin America & Caribbean	Middle East	North America	Word
2024	2024	2024	2023	2024	2023	2024

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya untuk kembali memulihkan kondisi aktivitas bandara dan penerbangan seperti sebelum terjadinya pandemi. Kemenhub melakukan kerja sama dan kolaborasi antar kementerian/lembaga terkait, dengan melibatkan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan sektor penerbangan untuk memulihkan sektor penerbangan. Upaya yang dilakukan antara lain perbaikan infrastruktur bandara, revitalisasi bandara, kebijakan *blocking seat* dan kepastian penyelenggaraan aktivitas penerbangan.

The government through the Ministry of Transportation has been working towards the recovery of airport and flight activities to pre-pandemic levels. The Ministry of Transportation has carried out cooperation and collaboration between relevant ministries/institutions by involving the local government and aviation stakeholders to restore the aviation sector. Recovery efforts were made, such as repairing airport infrastructure, airport revitalization, blocking seat policies, and ensuring the implementation of flight activities.

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) merencanakan penyelenggaraan 137 event internasional di tahun 2023 untuk mendatangkan

The government through the Ministry of Tourism and Creative Economy plans to hold 137 international events in 2023 to attract foreign tourists and increase the movement

kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan meningkatkan pergerakan wisatawan domestik. Adapun 137 event tersebut terdiri dari 37 sport tourism event, 49 Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE) event, 38 music and creative event, dan 13 special interest event atau event minat khusus. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisman, Pemerintah telah menetapkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (Danau Toba, Tanjung Kelayang, Borobudur, Wakatobi, Morotai, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu & Kota Tua, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, dan Labuan Bajo), dan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yaitu Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Kelima DPSP tersebut diharapkan menjadi daya tarik baru pariwisata Indonesia untuk mendatangkan kunjungan wisatawan, yang berpengaruh pada pergerakan lalu lintas penerbangan.

of domestic tourists. The 137 events consist of 37 sport tourism events, 49 meetings, incentive, Conferences, exhibitions (MICE), 38 music and creative events, as well as 13 special interest events. In addition, as an effort to increase foreign tourist visits, the Government has established 10 Priority Tourism Destinations (Lake Toba, Tanjung Kelayang, Borobudur, Wakatobi, Morotai, Tanjung Lesung, Pulau Seribu & Kota Tua, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, and Labuan Bajo) and 5 Super Priority Tourism Destinations (Borobudur, Likupang, Mandalika, Lake Toba, and Labuan Bajo). The five Super Priority Tourism Destinations are expected to become a new attraction for Indonesian tourism to bring in more visitors, which will affect the air traffic movement.

Dari sisi PJNP, AirNav Indonesia memproyeksikan potensi pendapatan baru dari pengelolaan ruang udara di Kepulauan Riau dan Natuna sebesar Rp11 miliar setiap tahunnya. Pengalihan pengelolaan ruang udara juga memberikan independensi pelayanan terhadap operasional penerbangan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan pesawat negara (TNI, Polri, dan Bea Cukai).

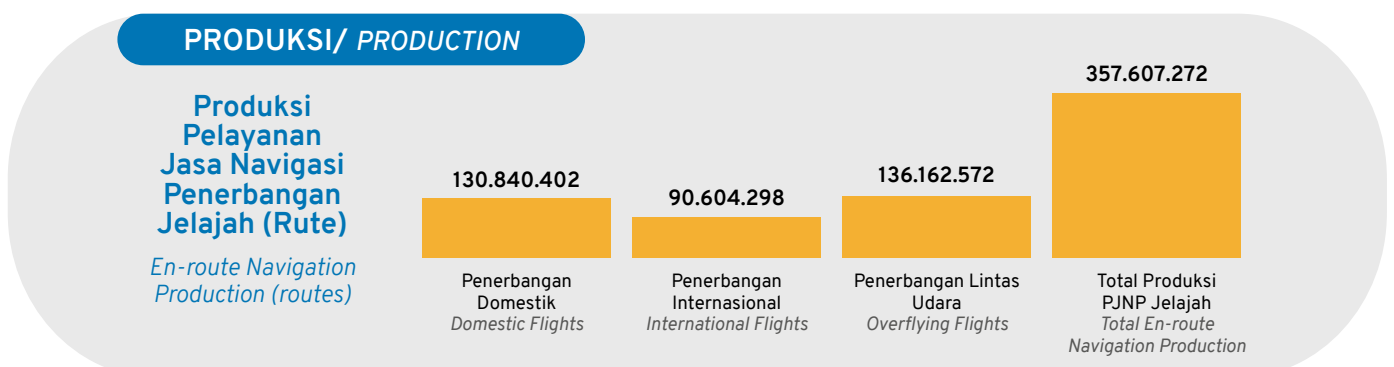
From the Air Navigation Charges side, AirNav Indonesia is projecting new revenue potential from the management of airspace in the Riau and Natuna Islands of IDR11 billion annually. The transfer of airspace management also provides service independence for flight operations, including the activities of state aircraft (TNI, Polri and Customs).

## Proyeksi Tahun 2023 2023 Projection

AirNav Indonesia melakukan perencanaan strategis dan menyusun rencana kerja dan anggaran dalam RKAP 2023. Penyusunan RKAP berpedoman pada RJPP 2020-2024, dengan memerhatikan kondisi makroekonomi, industri, dan kebutuhan Perusahaan. Dasar penyusunan target RKAP dengan mempertimbangkan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RKAP 2022. Adapun RKAP 2023 telah memperoleh pengesahan Menteri BUMN melalui Surat Menteri BUMN nomor S-39/MBU/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Persetujuan RKAP Tahun 2023 Perum LPPNPI.

AirNav Indonesia has organized strategic planning and prepared work and budget plan in the 2023 Company Work and Budget Plan. The Company WBP preparation refers to the 2020-2024 Company Long-Term Plan, taking into account macroeconomic conditions, industry, and the needs of the Company. The basis for setting the Company WBP target by considering the realization of performance in 2022 against the 2022 Company WBP. The 2023 Company WBP has been ratified through the Minister of SOEs Letter No. S-39/MBU/01/2023 dated January 30, 2023, concerning the Approval of the 2023 Company WBP for Perum LPPNPI.

### Target RKAP Tahun 2023 2023 Company WBP Target





### PRODUKSI/ PRODUCTION

**Produksi Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Terminal (Ton)**

*Terminal Navigation Production (tons)*

**35.322.670**

**Penerbangan Domestik**  
*Domestic Flights*

**10.927.580**

**Penerbangan Internasional**  
*International Flights*

**46.250.250**

**Total Produksi PJNP Terminal**  
*Total Terminal Navigation Production*

### INVESTASI/ INVESTMENT

**Total Alat Produksi (Unit)**  
*Total Production Equipment (units)*

**2.441**



**Jumlah Program Investasi (Program)**  
*Number of Investment Programs (programs)*

**25**



**Total Investasi (Rp Juta)**  
*Total Investment (IDR million)*

**788.459**



### PENGELOLAAN OPERASI DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (% (BS)) FLIGHT OPERATIONAL AND SAFETY MANAGEMENT (% (BS))

**90,00**



**Departure & Arrival Punctuality**

**100,00**



**Kinerja Keselamatan**  
*Acceptable Level of Safety*

**99,00**



**Avaibility dan Keandalan Jaringan, Peralatan dan Fasilitas Produksi 2022**  
*Availability and Reliability of Networks, Equipment, and Production Facilities 2022*

**79,00**



**Kepuasan Karyawan**  
*Employee Satisfaction*

### KINERJA KEUANGAN (RP JUTA) FINANCIAL PERFORMANCE (IDR MILLION)

**Laba (Rugi) dan Laba (Rugi) Komprehensif**  
*Profit (Loss) and Comprehensive Profit (Loss)*

**2.617.952**



**Pendapatan PJNP Jelajah**  
*En-route Navigation Revenues*

**301.086**



**Pendapatan PJNP Terminal**  
*Terminal Navigation Revenues*

**2.919.039**



**Jumlah Pendapatan Usaha**  
*Total Operating Revenues*

**2.649.220**



**Beban Usaha**  
*Operating Expenses*

**269.818**



**Laba/(Rugi) Usaha**  
*Operating Profit/(Loss)*

**63.188**



**Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain**  
*Total Other Incomes (Expenses)*



**KINERJA KEUANGAN (RP JUTA)**  
**FINANCIAL PERFORMANCE (IDR MILLION)**

**Laba (Rugi) dan Laba (Rugi) Komprehensif**

*Profit (Loss) and Comprehensive Profit (Loss)*

**333.006**



**Laba/(Rugi) Sebelum Pajak**  
*Profit/(Loss) Before Tax*

**309.153**



**Laba/(Rugi) Bersih - Tahun Berjalan**  
*Net Profit/(Loss) - for the Current Year*

**309.153**



**Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan - Setelah Pajak**  
*Comprehensive Income/(Loss) for the Current Year - After Tax*

**POSISI KEUANGAN (RP JUTA)**  
**FINANCIAL POSITION (IDR MILLION)**

**6.813.447**



**Aset**  
*Assets*

**822.722**



**Liabilitas**  
*Liabilities*

**5.990.725**



**Ekuitas**  
*Equity*

Target RKAP diturunkan kepada masing-masing Direktorat maupun non Direktorat untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja Manajemen (RKM). AirNav Indonesia tetap melakukan *recovery* dengan mengurangi beban usaha dan melakukan optimalisasi pemanfaatan aset Perusahaan, serta mengeksplorasi potensi aliran pendapatan baru.

*Company WBP targets are passed down to each Directorate and non-Directorate to be followed up in the Management Work Plan (RKM). AirNav Indonesia continues to recover by reducing operating expenses and optimizing the utilization of the Company's assets, as well as exploring potential new revenue streams.*



**Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing**  
**Impact of Foreign Currency Exchange Rates**

**A**irNav Indonesia melakukan identifikasi dan mitigasi risiko nilai tukar mata uang asing. Dalam proses bisnisnya, AirNav Indonesia memiliki saldo piutang, utang, dan liabilitas dalam mata uang asing yakni Dolar Amerika Serikat (USD). AirNav Indonesia melakukan mitigasi risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Perusahaan dengan kompensasi deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Mitigasi dilakukan dengan mempertimbangkan kecenderungan perubahan nilai tukar di masa yang akan datang.

**A**irNav Indonesia identifies and mitigates foreign exchange risk. In its business processes, AirNav Indonesia has outstanding receivables, payables, and liabilities in a foreign currency that is United States Dollars (USD). AirNav Indonesia mitigates the risk of an increase in foreign currency exchange rates against the Company's liabilities by compensating for time deposits and receivables in foreign currencies, which are set at a minimum of 25% of liabilities with a maturity of less than 1 (one) year. The mitigation is carried out by considering the trend of exchange rate changes in the future.





AirNav Indonesia mengidentifikasi dan menentukan risiko pasar yang dihadapi sesuai Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai pada BUMN. Perusahaan berpendapat bahwa lindung nilai atas transaksi dalam valuta asing saat ini belum diperlukan. Meskipun demikian, Perusahaan tengah menyusun kebijakan dan prosedur operasional standar mengenai lindung nilai tukar mata uang asing.

*AirNav Indonesia identifies and determines the market risks it faces in accordance with the Minister of SOEs Regulation No.PER-09/MBU/2013 on the General Policy of Hedging Transactions in SOEs. The Company is of the opinion that hedging for transactions in foreign currencies is currently not necessary. Nonetheless, the Company is currently developing policies and standard operating procedures regarding foreign exchange hedging.*



## Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

### **Information and Material Facts Following Date of Accounting Report**

**T**idak terdapat perubahan material yang signifikan dan berdampak pada keuangan AirNav Indonesia mulai dari tanggal laporan akuntan 10 Februari 2023 hingga disahkan Laporan Tahunan ini.

**T**here are no significant material changes that affect AirNav's finances starting from the accountant's report on February 10, 2023 until the ratification of this Annual Report.



## Kebijakan Penggunaan Laba Bersih dan Informasi Setoran Penyisihan Laba Bersih kepada Pemilik Modal

### **Policy on Net Profit Allocation and Information of Deposit of Net Profit Provision to the Shareholders**

#### **Dasar Kebijakan Penggunaan dan Penyisihan Laba Bersih**

PP No. 77 Tahun 2012 tentang Perum LPPNPI mengatur penggunaan laba bersih Perusahaan untuk peningkatan pelayanan navigasi penerbangan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai dana cadangan, hingga mencapai paling sedikit 20% dari modal Perusahaan. Dana cadangan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan. Meskipun demikian dana cadangan tersebut dapat dikelola agar memperoleh laba dengan cara yang baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan setoran penyisihan laba bersih kepada Pemerintah Indonesia selaku pemilik modal. Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20%, maka kelebihan dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perusahaan. Adapun penggunaan laba bersih Perusahaan termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku kuasa pemilik modal.

#### *Basis of Policy on Net Profit Allocation and Provision*

*The Government Regulation No. 77 of 2012 on Perum LPPNPI regulates the use of the Company's net profit to improve air navigation services. The Company has an obligation to set aside a certain amount of net profit as a reserve fund, up to at least 20% of the Company's capital. Reserve funds can only be used to cover the Company's losses. Nevertheless, these reserve funds can be managed in order to obtain profits in a good manner in accordance with the provisions of the laws and regulations.*

*The company has no obligation to deposit net profit allowance to the Government of Indonesia as the shareholder. If the reserve fund exceeds 20%, it will be used for the Company's needs. The use of the Company's net profit, including the allowance for reserve funds, is determined by the Minister of SOEs as the authorized shareholder.*





## Perpajakan dan Kontribusi Terhadap Negara *Taxation and Contribution to the State*

Perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh final, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai kontribusi kepada negara. Kontribusi lainnya yakni pembayaran PNBP kepada Kementerian Perhubungan dan BMKG, yang merupakan bagian dari tagihan PJNP kepada maskapai yang timbul pada saat invoice diterbitkan. Adapun pembayaran kepada Kementerian Perhubungan sebesar 15% untuk PJNP domestik dan 10% untuk PJNP internasional dan lintas udara dari total PJNP, sementara kepada BMKG sebesar 4% dari total PJNP.

The company fulfills the tax obligations of Value Added Tax (VAT), Article 21 Income Tax, Article 22 Income Tax, Article 23 Income Tax, Article 25 Income Tax, Final Income Tax, and Non-Tax State Revenue as contributions to the state. The Company is also obliged to pay Non-Tax Revenue to the Ministry of Transportation and the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency as it is part of the Air Navigation Charges invoiced for airlines. The Company deposits 15% of Air Navigation Charges for domestic flights and 10% for international and overflying flights to the Ministry of Transportation, while 4% of Air Navigation Charges are deposited to Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency.

### Jumlah Pembayaran Pajak dan PNBP Tahun 2022 *Payments of Taxes and Non-Tax Revenue in 2022*



Jenis Pajak <i>Type of Taxes</i>		Jumlah (Rp Juta) <i>Total (IDR million)</i>
<b>Pajak</b>	<b>Tax</b>	
PPh Pasal 21	Article 21 Income Tax	129.363
PPh Pasal 22	Article 22 Income Tax	477
PPh Pasal 23	Article 23 Income Tax	1.299
PPh Final	Final Income Tax	3.528
PPh 25	Article 25 Income Tax	0
PPN	Value Added Tax	104.440
Jumlah Pembayaran Pajak Lainnya	Total Other Tax Payment	59.215
<b>PNPB</b>	<b>Non-Tax Revenue</b>	
PNBP kepada Kementerian Perhubungan	Non-Tax Revenue to the Ministry of Transportation	198.627
PNBP kepada BMKG	Non-Tax Revenue to Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency	47.845
Jumlah Pembayaran PNBP	Total Payment of Non-Tax Revenue	246.472



## Informasi tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) serta Informasi tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

### **Information on Employee Share Ownership Program and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP) and Realization of Public Offering**

Perusahaan tidak melakukan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP), maupun melakukan penawaran efek dalam bentuk apapun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP) maupun realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

The company did not implement the employee stock ownership program and/or management stock ownership program (ESOP/MSOP) and did not offer any securities in any form. Therefore, there is no information regarding the employee stock ownership program and/or management stock ownership program (ESOP/MSOP) or the realization of funds resulting from the public offering.



## Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal

### **Material Information on Investments, Expansion, Divestment, Consolidation/Mergers, Acquisitions, and/or Debt/Capital Restructuring**

Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi berupa investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang maupun modal selama tahun 2022, sehingga tidak terdapat informasi yang disampaikan.

The company did not take any corporate actions in the form of investment, expansion, divestment, mergers and acquisitions, and debt or capital restructuring throughout 2022. Therefore, no information regarding this matter is being reported.



## Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

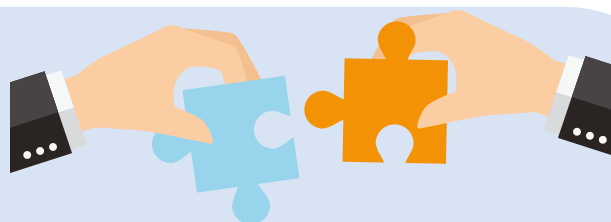
### **Material Transactions Related to Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliations/Related Parties**

Perusahaan telah mengungkapkan seluruh transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam Laporan Keuangan Teraudit tahun 2022 Catatan 28. Transaksi dilakukan dengan institusi keuangan, asosiasi, maupun entitas sepengendali yang kepemilikannya berada pada Pemerintah Republik Indonesia. Adapun nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungannya disampaikan berikut ini.

The company has disclosed all transactions with related parties in the 2022 Audited Financial Statements Note 28. The company performed transactions with financial institutions, associations, or entities under common control whose ownership is with the Government of the Republic of Indonesia. The table below discloses names of the parties involved in the transaction and the nature of the relationship.



**○ Pihak Berelasi dan Sifat Hubungan Transaksi**  
*Affiliation and Nature of Transaction Relations*



Pihak yang Berelasi <i>Affiliation</i>	Sifat Transaksi <i>Nature of Transaction</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan Kas dan Bank, Deposito <i>Placement of Cash and Bank Deposits</i>
PT Bank BNI (Persero) Tbk	Penempatan Kas dan Bank, Deposito, Pendapatan Diterima di Muka <i>Placement of Cash and Bank Deposits, Unearned revenues</i>
PT Bank BRI (Persero) Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia (d/h PT Bank Syariah Mandiri)	Penempatan Kas dan Bank <i>Placement of Cash and Bank Deposits</i>
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Piutang Usaha <i>Trade Receivables</i>
PT Citilink Indonesia	
PT Dirgantara Indonesia	
PT Merpati Nusantara Airlines	
PT Angkasa Pura II (Persero)	Utang Usaha <i>Trade Payables</i>
PT Asuransi Jiwa Taspen	
BPJS Ketenagakerjaan	
PT Pins Indonesia	
Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika <i>Meteorology, Climatology, Geophysics Agency</i>	
Kementerian Perhubungan <i>Ministry of Transportation</i>	
PT Angkasa Pura I (Persero)	Sewa/ Rent
PT Telekomunikasi Selular	

**Alasan Dilakukannya Transaksi Pihak Berelasi dan Kewajaran Transaksi**

Perusahaan melakukan transaksi dengan Pihak Berelasi sebagai bagian dari pengelolaan usaha. Transaksi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan perlakuan pada pihak ketiga, baik penentuan harga, suku bunga maupun persyaratan lainnya, sebagaimana telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

*Reasons for Affiliation Transactions and Fairness of Transactions*

*The company performs transactions with Related Parties as part of business management. Transactions with the same terms and conditions to the third parties, regarding the pricing, interest rates, or other requirements, are disclosed in the financial statements.*



## Kebijakan Perusahaan dan Pemenuhan Peraturan Terkait Mekanisme Transaksi

Penyusunan Laporan Keuangan AirNav Indonesia mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Perusahaan melakukan proses audit dengan melibatkan KAP untuk memastikan akuntabilitas dan kewajaran laporan keuangan Perusahaan. Proses audit juga dilakukan terhadap transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi, dengan menggunakan mekanisme yang diatur dalam PSAK 7 (revisi 2014) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

## Company's Policies and Compliance with Related Regulations for Transaction Mechanisms

AirNav Indonesia's Financial Statements was prepared with reference to the Indonesian Statement of Financial Accounting Standards (SFAS). The company conducted an audit performed by a Public Accounting Firm to ensure the accountability and fairness of the Company's financial statements. All transactions with Related Parties was also audited using the mechanism stipulated in the 2014 Revised SFAS 7 on “Related Party Disclosures”.

## Realisasi Nilai Transaksi Pihak Berelasi

AirNav Indonesia telah mengungkapkan rincian transaksi dengan Pihak Berelasi pada bagian Laporan Keuangan LPPNPI 2022 Catatan 38.

## Realization of Affiliation's Transactions

AirNav Indonesia has disclosed details of transactions with Related Parties in the 2022 LPPNPI Financial Report section Notes 38.

### Realisasi Nilai Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi Realization of Affiliation's Balance and Transactions



Saldo Pihak Berelasi Affiliation's Balance	2022	2021
	Rp Juta/ IDR million	
Kas pada Bank/ Cash in Banks	257.548	117.124
Deposito/ Time Deposits	1.354.000	975.345
<b>Jumlah Setara Kas/ Total Cash Equivalents</b>	<b>1.611.548</b>	<b>1.092.469</b>
Persentase dari Jumlah Aset/ Percentage of Total Assets	32,61%	32,61%
Piutang Usaha/ Trade Receivables	632.166	435.635
Persentase dari Jumlah Aset/ Percentage of Total Assets	12,79%	9,41%
Utang Usaha/ Trade Payables	1.931	825
Persentase dari Jumlah Liabilitas/ Percentage of Total Liabilities	0,25%	0,14%
Pendapatan Diterima di Muka/ Unearned Revenues	540	161
Persentase dari Jumlah Liabilitas/ Percentage of Total Liabilities	0,07%	0,03%
Liabilitas lain - lain/ Other liabilities - others	352.674	295.373
Persentase dari Jumlah Liabilitas/ Percentage of Total Liabilities	46,04%	48,66%





## Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

### Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Tahun 2022 masih dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, meskipun dampaknya menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Invasi Rusia ke Ukraina yang terjadi pada Februari 2022 memicu terjadinya inflasi, khususnya pada sektor energi, termasuk bahan bakar pesawat terbang. Di sisi lain, situasi dunia yang penuh ketidakpastian dan mudah berubah di tengah era *Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity* (VUCA) menimbulkan tantangan dalam pemulihan perekonomian global.

Kondisi tersebut cukup berdampak pada sektor ekonomi dan keuangan global. Sektor ekonomi mengalami volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, ketidakstabilan pasar saham serta terjadi likuiditas yang ketat. Tentunya kondisi tersebut pada jangka panjang akan berdampak pada industri penerbangan maupun keuangan dan operasional Perusahaan. Manajemen melakukan langkah mitigasi yang dibutuhkan bagi operasional Perusahaan serta terus memantau dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian pada masa mendatang.

The year 2022 was still affected by the COVID-19 pandemic although its impact has decreased compared to 2020 and 2021. The Russian invasion of Ukraine in February 2022 triggered inflation, especially in the energy sector, including jet fuel. On the other hand, the world situation which is full of uncertainties and changes in the era of *Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity* (VUCA) posed challenges in the global economic recovery.

These conditions had quite an impact on the global economic and financial sector. The economic sector experienced high volatility in the fair value of financial instruments, unstable stock market, and tight liquidity. In the long term, these conditions will certainly affect the aviation industry as well as the Company's finances and operations. The management has taken necessary mitigation steps for the Company's operations and will continue to monitor and take the necessary steps to address risks and uncertainties in the future.



## Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan dan Dampaknya terhadap Perusahaan

### Changes in Laws and Their Significant Impacts on the Company

Perusahaan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mulai berlaku pada tahun 2022 dan berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan. Adapun peraturan perundang-undangan dan dampaknya kepada Perusahaan disampaikan berikut ini.

The company has identified laws and regulations that were enacted in 2022 and had significant impacts on the company. The laws and regulations as well as their impacts on the Company are presented as follows.

#### 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021, dengan pemberlakuan sebagian pasal pada tahun 2022. AirNav Indonesia melakukan pemenuhan ketentuan perpajakan dengan mengacu kepada UU HPP. Penyesuaian Pajak Penghasilan dan Pemungutan PPN telah dilakukan sesuai ketentuan UU HPP.

#### 1 Law on Harmonization of Tax Regulations

The government has issued Law Number 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations on October 29, 2021, with the enactment of some articles in 2022. AirNav Indonesia fulfills tax provisions by referring to the Law on Harmonization of Tax Regulations. Adjustments to Income Tax and VAT Collection have been made in accordance with the provisions of the Law on Harmonization of Tax Regulations.

#### 2 Undang Undang nomor 28 tahun 2022

Pemerintah telah menerbitkan Undang - Undang nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023, pasal 40 dan 41 yang mengatur tentang ketentuan tata cara penetapan PMN.

#### 2 Law No. 28 of 2022

The government has issued Law No. 28 of 2022 on the State Revenue and Expenditure Budget for the 2023 fiscal year. Articles 40 and 41 regulate the procedure for determining State Capital Participation.



## Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan *Changes in Accounting Policies and Its Impact on the Company*

**P**erubahan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mencakup amendemen dan penyesuaian tahunan hasil konvergensi IFRS yang telah disahkan oleh DSAK IAI. Adapun SAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2022 antara lain:

**C**hanges in Financial Accounting Standards (FAS) include amendments and annual improvements to the IFRS convergence results that have been approved by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI). The following FAS are effective as of January 1, 2022:



- 1 Amendemen PSAK 57 - Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan aset kontinjensi;
- 2 Penyesuaian Tahunan 2020 terhadap PSAK 69, PSAK 71, dan PSAK 73

*Amendments to SFAS 57 - Provisions, Contingent Liabilities, and contingent assets;*

*Annual Improvements 2020 to PSAK 69, PSAK 71, and PSAK 73*

Penerapan dari perubahan standar dan interpretasi akuntansi atas standar akuntansi tersebut di atas relevan bagi Perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan tahun berjalan. Meskipun demikian, manajemen tetap melakukan evaluasi dampak potensial terhadap standar dan interpretasi akuntansi yang baru maupun amendemen dan penyesuaiannya terhadap laporan keuangan perusahaan.

*The adoption of changes in accounting standards and interpretations of the aforementioned accounting standards is relevant to the Company. However, it did not result in significant changes to the Company's accounting policies and did not have a material impact on the value reported in the current year's financial statements. Nonetheless, the management will continue to evaluate the potential impact of the new accounting standards and interpretations as well as amendments and adjustments to the company's financial statements.*



## Tingkat Kesehatan Perusahaan *Organizational Health Index*

**A**irNav Indonesia melakukan pengukuran tingkat kesehatan perusahaan dengan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Terdapat 3 aspek yang menjadi indikator penilaian kinerja, yakni aspek keuangan, operasional, dan administrasi, dengan bobot penilaian terbesar pada aspek keuangan, yakni 50 dari total 100.

**A**irNav Indonesia measures the organizational health index by referring to the the Minister of State-owned Enterprise Decision No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002, on Assessment of the Health Index of State-owned Enterprise. There are 3 aspects that serve as indicators for performance evaluation, such as financial, operational, and administrative aspects. The largest weight of assessment belongs to the financial aspect, which is 50 out of 100.

AirNav Indonesia mencatatkan kinerja keuangan yang cukup baik di tahun 2022, sehingga berkontribusi signifikan terhadap hasil penilaian

*AirNav Indonesia recorded a fairly good financial performance in 2022, contributing significantly to the results of the assessment. The Company obtained a total score of 85.50*



tingkat kesehatan perusahaan. Perusahaan memperoleh total skor 85,50, dengan kategori “SEHAT AA” pada periode pelaporan. Pencapaian ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang sangat terdampak pandemi COVID-19, di mana pada tahun 2020 dan 2021 Perusahaan dikategorikan “SEHAT A”, dengan total skor 67,60 dan 69,00.

or categorized as “HEALTHY AA” in the reporting period. This achievement has improved compared to the previous period which was heavily affected by the COVID-19 pandemic. The Company was categorized as “HEALTHY A” with a total score of 67.60 and 69.00 in 2020 and 2021 respectively.

**Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020-2022**  
Organizational Health Index in 2020-2022



Indikator Indicators	Bobot Weight	Skor 2022 Score in 2022	Skor 2021 Score in 2021	Skor 2020 Score in 2020
<b>ASPEK KEUANGAN/ FINANCIAL ASPECT</b>				
Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) Return on Equity (ROE)	15,00	9,00	1,00	1,00
Imbalan Investasi (ROI) Return on Investment (ROI)	10,00	5,00	0,00	0,00
Rasio Kas Cash Ratio	3,00	3,00	3,00	3,00
Rasio Lancar Current Ratio	4,00	4,00	4,00	4,00
Collection Periods Collection Periods	4,00	3,00	3,00	2,00
Perputaran Persediaan Inventory Turnover	4,00	4,00	4,00	4,00
Perputaran Total Aset Total Asset Turnover	4,00	1,50	1,00	1,00
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Equity to Total Asset Ratio	6,00	6,00	5,50	6,00
<b>Jumlah Skor Aspek Keuangan</b> Total Score of Financial Aspect	<b>50,00</b>	<b>35,50</b>	<b>21,50</b>	<b>21,00</b>
<b>ASPEK OPERASIONAL/ OPERATIONAL ASPECT</b>				
Pengelolaan Ekspektasi Pelanggan Management of Customer Expectation	10,50	10,50	10,50	10,50
Kinerja Keselamatan (Safety Rate-ALoSP) Safety Performance (Safety Rate-ALoSP)	10,50	10,50	10,50	10,50
Facility Readiness Facility Readiness	7,00	7,00	7,00	7,00
Mandatory Certification Level Mandatory Certification Level	7,00	-	-	7,00
Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction		7,00	7,00	-
<b>Jumlah Skor Aspek Operasional</b> Total Score of Operational Aspect	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>



Indikator Indicators	Bobot Weight	Skor 2022 Score in 2022	Skor 2021 Score in 2021	Skor 2020 Score in 2020
<b>ASPEK ADMINISTRASI/ ADMINISTRATION ASPECT</b>				
Laporan Perhitungan Tahunan <i>Annual Financial Statement</i>	3,00	3,00	3,00	3,00
Rancangan RKAP <i>Company WBP</i>	3,00	3,00	3,00	3,00
Laporan Periodik <i>Periodic Report</i>	3,00	3,00	3,00	3,00
Kinerja PUKK dan Efektivitas Penyaluran <i>Small Business and Cooperative Development Program (PUKK) Performance and Distribution Effectiveness</i>	6,00	6,00	6,00	2,00
<b>Jumlah Skor Aspek Administrasi</b> <i>Total Score of Administration Aspect</i>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Jumlah</b> <i>Total</i>	<b>100,00</b>	<b>85,50</b>	<b>70,10</b>	<b>67,00</b>
<b>Kategori</b> <i>Category</i>		<b>SEHAT AA</b>	<b>SEHAT A</b>	<b>SEHAT A</b>



## Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity

Perusahaan senantiasa melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahunan Perusahaan. Realisasi RKAP menjadi salah satu faktor pertimbangan Perusahaan dalam menetapkan rencana strategis Perusahaan tahun berikutnya. Perusahaan juga melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) untuk mengidentifikasi potensi dan risiko serta menghasilkan rencana bisnis secara berkelanjutan. AirNav Indonesia telah menyampaikan program dan kebijakan strategis, prospek usaha, dan proyeksi Perusahaan sebagai bagian dari *Business Continuity Plan*.

AirNav Indonesia telah menandatangani *memorandum of understanding (MoU)* atau kesepakatan bersama dengan IATA pada 18 Oktober 2022 terkait kolaborasi dalam rangka meningkatkan keselamatan dan efisiensi pelayanan navigasi penerbangan. Adapun fokus kesepakatan tersebut pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan pengelolaan *Air Traffic Management (ATM)* dan peningkatan efisiensi pelayanan navigasi penerbangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan rute penerbangan internasional berbasis preferensi operator penerbangan, atau *User-Preferred Routes (UPRs)* yang telah berkontribusi dalam peningkatan efisiensi penerbangan, khususnya pada masa pandemi COVID-19.

The Company has always been evaluating the achievement of the Company's annual performance. Realization of the Company WBP is one of the factors considered in determining the Company's strategic plan for the following year. The Company also conducts strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) analysis to identify potentials and risks as well as make business plans on an ongoing basis. AirNav Indonesia has submitted strategic programs and policies, business prospects, and Company projections as part of the *Business Continuity Plan*.

AirNav Indonesia has signed a *memorandum of understanding (MoU)* or joint agreement with IATA on October 18, 2022, regarding the collaboration to improve the safety and efficiency of air navigation services. The focus of the agreement is on improving the quality of Human Resources (HR), improving *Air Traffic Management (ATM)*, and increasing the efficiency of air navigation services. One of the areas of concern is the development of international flight routes based on airline operator preferences or *User-Preferred Routes (UPRs)*, which have contributed to increasing flight efficiency, especially during the COVID-19 pandemic.

UPRs merupakan metode manajemen ruang udara dengan konsep *free-route airspace*, memberikan opsi rute-rute alternatif yang dapat dipilih maskapai dengan menyesuaikan arah angin, turbulensi, panjang rute dan lain sebagainya. Dengan konsep tersebut, UPRs memiliki potensi tinggi untuk mengurangi emisi gas buang bahan bakar di udara. Sepanjang tahun 2022, emisi karbon yang berhasil direduksi adalah 120,96 ton CO<sub>2</sub>. Hal ini sejalan dengan kebijakan *net zero emission* Pemerintah RI di tahun 2060, dan *net zero emission* penerbangan di tahun 2050.

*UPRs are a method of airspace management with the concept of free-route airspace, providing options for alternative routes that airlines can choose by taking into consideration wind direction, turbulence, route length, and so on. With this concept, UPRs have a high potential to reduce fuel exhaust emissions in the air. In 2022, carbon emissions have been reduced to 120.96 tons of CO<sub>2</sub>. This goal is in line with the Government of Indonesia's net zero emission policy in 2060 and net zero emission from aviation in 2050.*

AirNav Indonesia merupakan satu-satunya penyedia layanan navigasi penerbangan di Indonesia. ICAO memberikan apresiasi terhadap kemampuan Perusahaan untuk bertahan selama masa pandemi, dalam pertemuan ICAO *Thirty-Third Meeting of the Asia/Pacific Air Navigation Planning and Implementation Regional Group* yang ke-33 (APANPIRG/33) yang diselenggarakan di Trans Resort Bali 22-24 November 2022. Lebih lanjut, AirNav Indonesia juga memperoleh apresiasi dari Presiden RI, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, hingga Dewan Pimpinan Legislatif DPR Komisi VI atas penyelenggaraan navigasi penerbangan selama event MotoGP di Mandalika, dan KTT G20 di Bali.

*AirNav Indonesia is the only provider of air navigation service in Indonesia. ICAO gave appreciation for the Company's survivability during the pandemic at the 33rd ICAO Thirty-Third Meeting of the Asia/Pacific Air Navigation Planning and Implementation Regional Group (APANPIRG/33) held at Trans Resort Bali on November 22-24, 2022. Furthermore, AirNav Indonesia also received appreciation from the President of the Republic of Indonesia, the Minister of Transportation, the Minister of SOEs, and the Legislative Body of the DPR Commission VI for organizing air navigation during the MotoGP event in Mandalika and the G20 Summit in Bali.*

Di tahun 2022, Perusahaan memperoleh berbagai penghargaan baik dari media, institusi, dan kementerian BUMN. Penghargaan tersebut membuktikan penerimaan dan pengakuan pemangku kepentingan terhadap kinerja Perusahaan. AirNav Indonesia berkomitmen untuk senantiasa menyelenggarakan pelayanan dengan mengutamakan kualitas keselamatan penerbangan. AirNav Indonesia akan terus membenahi kinerjanya dan melanjutkan kinerja positif dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.

*In 2022, the Company received various awards from the media, institutions, and the Ministry of SOEs. These awards serve as a proof of stakeholder acceptance and recognition of the Company's performance. AirNav Indonesia is committed to always provide air navigation services by prioritizing the quality of flight safety. AirNav Indonesia will continue to improve and maintain positive performance to keep the business continuity.*



Radar AirNav Indonesia merupakan komponen penting dalam sistem navigasi penerbangan modern. Dengan bantuan radar, pengendali lalu lintas udara dapat memantau dan mengendalikan pesawat dengan lebih efektif, memastikan keselamatan penerbangan, serta membantu dalam pengembangan sistem navigasi udara yang lebih canggih.

*AirNav Indonesia's radar is an essential component in a modern air navigation system. With the radar, air traffic controllers can monitor and control aircraft more effectively, ensure flight safety, and assist in the development of more sophisticated air navigation systems.*



# TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE





Tower AirNav Indonesia Cabang Pontianak.  
*AirNav Indonesia Tower at the Pontianak Branch.*





## Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance*

**A**irNav Indonesia menerapkan tata kelola perusahaan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) pada BUMN, serta pedoman umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Perusahaan tengah melakukan sosialisasi pedoman umum governansi sektor publik (PUG-SPI) dan korporat (PUG-KI) Indonesia 2021 untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

**A**irNav Indonesia implements corporate governance following the Minister of State-owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/2012, dated July 6, 2012, concerning Amendments to PER-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance in State-owned Enterprises and Indonesia's Code of GCG by the National Committee on Governance Policy (KNKG). The company is socializing the 2021 Indonesia Public Sector Governance Framework (PUG-SPI) and Corporate Governance (CG) Principles to improve good corporate governance.

### ○ Penerapan Tata Kelola berdasarkan Prinsip GCG *Governance based on GCG Principles*

#### PRINSIP DAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA DI LINGKUP AIRNAV INDONESIA

*PRINCIPLES AND COMMITMENT  
TO IMPLEMENTING GOVERNANCE  
WITHIN AIRNAV INDONESIA*



#### TRANSPARANSI

AirNav Indonesia menerapkan prinsip transparansi dengan cara menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsif bagi para pemangku kepentingan, sehingga informasi terkait kinerja mudah didapat dan dipahami. Prinsip ini telah diterapkan, antara lain melalui:

#### TRANSPARENCY

*AirNav Indonesia applies the principle of transparency by providing effective and responsive means of communication for stakeholders. Thus, performance information is easy to obtain and understand. The implementation of this principle is as follows:*

**a**

Menetapkan kebijakan dan pengaturan tentang keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan.

*The company establishes policies and regulations for information disclosure to stakeholders.*

**b**

Menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan, serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan, dengan tidak mengurangi kewajiban ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Adapun informasi yang diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kinerja keuangan, susunan pengurus, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat memengaruhi kondisi Perusahaan.

*The company provides timely, adequate, clear, accurate, and comparable information that can easily be accessed by stakeholders. However, the principle adoption does not reduce its obligation to comply with the provisions on corporate confidentiality by the applicable regulations. Meanwhile, the disclosed information includes but not limited to the vision, mission, business targets, corporate strategy, financial performance, risk management system, internal oversight and control system, the system for and implementation of GCG as well as the level of compliance, and significant events affecting the company's conditions.*



## Prinsip dan Komitmen Penerapan Tata Kelola

AirNav Indonesia menyadari penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap pemangku kepentingan, sekaligus suatu keharusan bagi keberlanjutan Perusahaan. Oleh karena itu, AirNav Indonesia memiliki komitmen senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola di lingkungan perusahaan.

## Principles and Commitments of Corporate Governance Implementation

AirNav Indonesia realizes that good corporate governance is a form of corporate responsibility to stakeholders and is compulsory for the company's sustainability. Therefore, AirNav Indonesia is committed to continuously implementing corporate governance principles.



### AKUNTABILITAS

AirNav Indonesia menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu, sehingga seluruh aksi dan kegiatan Perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun penerapan prinsip akuntabilitas antara lain melalui:

#### ACCOUNTABILITY

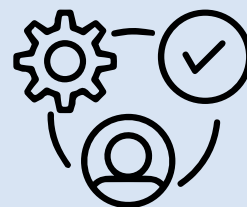
AirNav Indonesia applies the principle of accountability by optimizing everyone's performance and role so that all the company's business operations proceed effectively and efficiently. The implementation of the accountability principle is as follows:

- a Menetapkan ukuran kinerja untuk semua jajaran yang konsisten dengan sasaran usaha Perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

*The company sets performance measures that are consistent with the company's business goals for all levels and applies a reward and punishment system.*

- b Pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan dan standar pelaporan yang berlaku.

*Performance reports and financial statements are prepared following applicable reporting provisions and standards.*





### PERTANGGUNGJAWABAN

AirNav Indonesia menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan terkait, mematuhi peraturan yang berlaku, serta menghindari segala transaksi yang dapat merugikan pihak ketiga, maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati. Adapun penerapan prinsip ini antara lain:

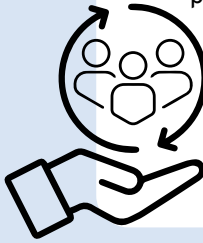
#### RESPONSIBILITY

*AirNav Indonesia applies the principle of responsibility by being accountable to the community and the relevant environment, complying with the applicable regulations, and refraining from any transactions that could be detrimental to third or other parties beyond the agreed provisions. The implementation of this principle is as follows:*

**a**

Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan (*corporate values*), dan strategi Perusahaan. Seluruh insan AirNav Indonesia melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

*The company defines the job descriptions and responsibilities of each corporate body and all employees clearly and in line with the company's vision, mission, corporate values, and company strategy. All AirNav Indonesia personnel performs their duties and responsibilities by adhering to the agreed business ethics and code of conduct.*



**b**

Memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

*The company ensures that an effective internal control system concerning corporate management is in place and ensures its compliance with the applicable regulations.*

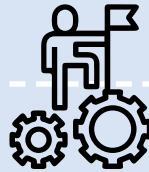


### KEMANDIRIAN

AirNav Indonesia menerapkan prinsip kemandirian dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri, tanpa tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip, dan tata nilai Perusahaan. Perusahaan menetapkan pedoman organisasi dan tata Laksana Perum LPPNPI yang mengatur fungsi masing-masing organ Perusahaan secara jelas, sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) maupun segala pengaruh atau tekanan.

#### INDEPENDENCE

*AirNav Indonesia applies the principle of independence by managing its roles and functions independently without pressure from other parties that are inconsistent with laws and regulations, principles, and corporate values. The company establishes Perum LPPNPI organizational guidelines and governance, which clearly regulate the functions of each corporate body. Therefore, the company is not affected by certain interests, free from conflicts of interest, any influence, or pressure.*



### KEWAJARAN DAN KESETARAAN

AirNav Indonesia menerapkan prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil, sesuai dengan regulasi. Prinsip ini diterapkan antara lain dengan:

#### FAIRNESS AND EQUALITY

*AirNav Indonesia applies the principle of fairness and equality by fairly considering the rights of all Stakeholders following the regulations. The implementation of this principle is as follows:*

**a**

Memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, menyampaikan pendapat, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan lingkup kedudukan masing-masing.

*The company provides fair and equal treatment to all stakeholders to provide input and communicate opinions and grants access to information within the scope of each stakeholder's position.*

**b**

Memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisik.

*The company provides equal opportunity in hiring and careers. Employees perform their duties professionally with no discrimination based on ethnicity, religion, race, social class, gender, or physical condition.*



Sebagai perusahaan yang melayani sektor publik khususnya navigasi penerbangan, AirNav Indonesia telah menerapkan nilai dasar governansi sektor publik yakni kepemimpinan, etika dan kejujuran, supremasi hukum, transparansi, independensi, akuntabilitas, amanah, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun nilai dasar governansi diterapkan ke dalam kebijakan, pedoman perilaku, serta pedoman organisasi dan tata laksana perusahaan.

*As a company that serves the public sector, especially air navigation, AirNav Indonesia has implemented the principle values of public sector governance, namely leadership, ethics and honesty, rule of law, transparency, independence, accountability, trustworthiness, service-oriented, competent, harmonious, loyal, adaptive, and collaborative. The governance principle values are implemented in policies, codes of conduct, organizational guidelines, and corporate governance.*

PUG-KI mengatur tentang prinsip-prinsip governansi korporasi yang dijiwai oleh empat pilar governansi korporat yaitu:

*CG Principles regulates the principles of corporate governance, which are inspired by the four pillars of corporate governance, namely:*

**PERILAKU BERETIKA,**

yang mendasari korporasi untuk senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun, serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten;

**ETHICAL BEHAVIOR,**

*which underlies the corporation to prioritize honesty, treat all parties with respect, fulfill commitments, and build and maintain moral values and beliefs consistently;*

**AKUNTABILITAS,**

yang mendasari korporasi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar;

**ACCOUNTABILITY,**

*which underlies the corporation's responsibility for its performance transparency and fairness;*

**TRANSPARANSI,**

yang mendasari korporasi untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, dengan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan; dan

**TRANSPARENCY,**

*which underlies the corporation to maintain objectivity in conducting business by providing accessible and understandable material and relevant information for stakeholders; and*

**KEBERLANJUTAN,**

yang mendasari korporasi memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sebagai kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

**SUSTAINABILITY,**

*which underlies the corporation's compliance with laws and regulations and commitment to be responsible towards society and the environment, as a contribution to sustainable development.*

AirNav Indonesia telah mengakomodasi keempat pilar governansi korporat tersebut dalam penerapan tata kelolanya. Secara berkala AirNav Indonesia melakukan telaah atas perangkat kebijakan tata kelola untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola.

*AirNav Indonesia has accommodated those four pillars of corporate governance in its governance. AirNav Indonesia periodically reviews governance policy tools to improve its governance quality.*

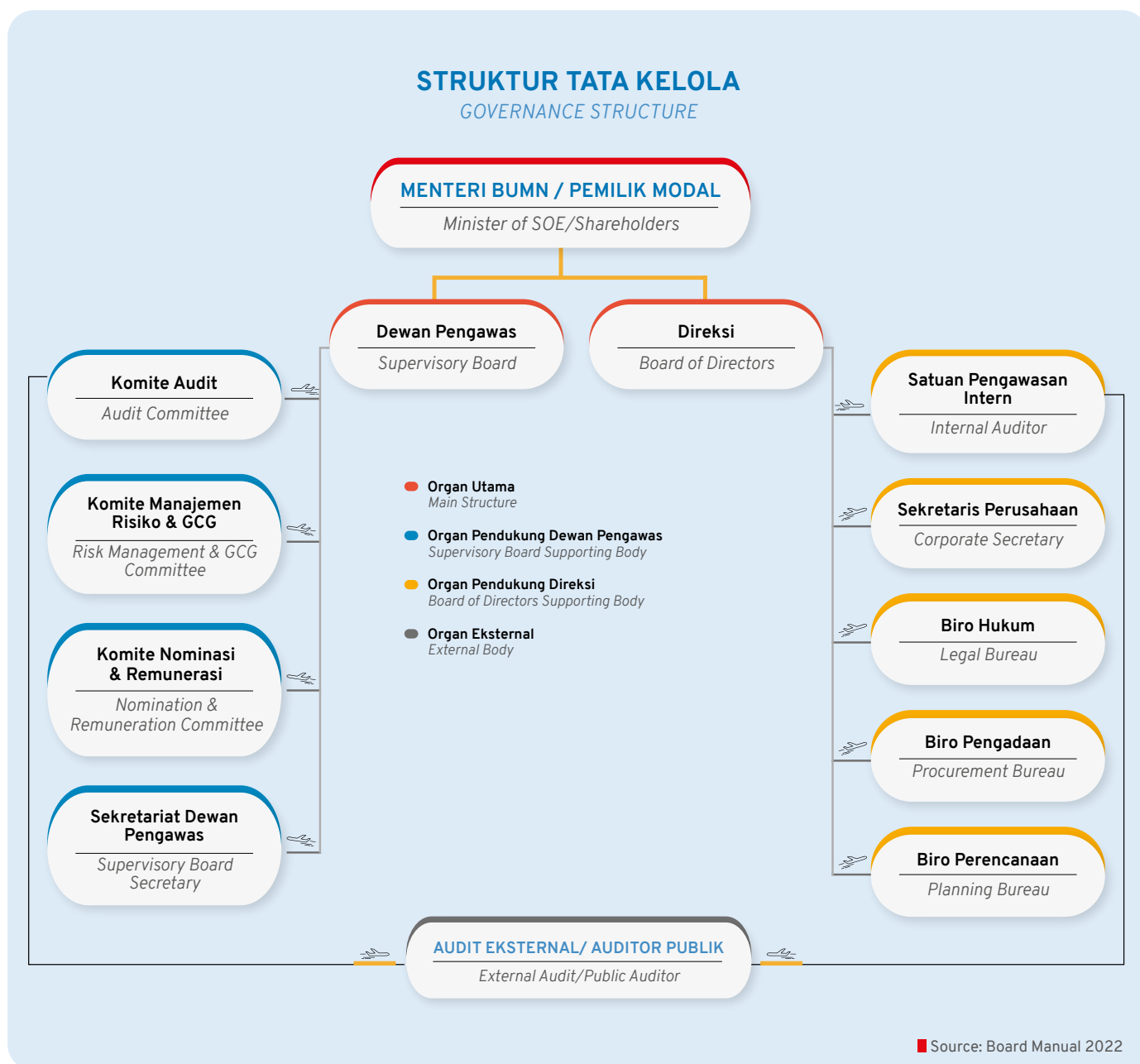


## Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola

AirNav Indonesia menggunakan struktur tata kelola model 2 (dua) badan atau *two tier system*. Pada struktur ini, Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab kepada pemilik modal, yang diwakili oleh Kementerian BUMN melalui Rapat Pembahasan Bersama (RPB). Dewan Pengawas bersama organ pendukung Dewan Pengawas bertanggung jawab atas pengawasan Perusahaan. Sementara Direksi bersama organ pendukung Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan. Untuk memperkuat tata kelola, AirNav Indonesia melibatkan organ eksternal sebagai penilai independen dalam struktur tata kelolanya.

## Governance Structure and Mechanism

AirNav Indonesia adheres to a two-tier system governance structure. In this structure, the Supervisory Board and Directors are responsible to the stakeholder, represented by the Ministry of State-owned Enterprises through a Shareholder Meeting. Together with its supporting bodies, the Supervisory Board is responsible for the Company's oversight. While the Board of Directors, together with its supporting bodies, is responsible for managing the Company. To improve its governance, AirNav Indonesia engages an external body as an independent auditor in its governance structure.



AirNav Indonesia menetapkan perangkat kebijakan atau *soft structure* berupa peraturan internal yang mengatur mekanisme penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun perangkat kebijakan tersebut antara lain Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku, *Board Manual* Dewan Pengawas dan Direksi, Prosedur, Instruksi Kerja, serta kebijakan pendukung lainnya. Kebijakan tersebut diperbarui secara berkala mengacu pada regulasi yang berlaku maupun kebutuhan Perusahaan.

*AirNav Indonesia establishes a policy tool or soft structure, namely internal regulations governing the mechanism for good corporate governance. The policy tools include the Guidelines on Public Corporate Governance, Ethics and Behavior Guidelines, Board Manuals, Work Guidelines for the Supervisory Board and Directors, Procedures, Work Instructions, and other supporting policies. This policy is updated regularly based on the applicable regulations and the company's needs.*

## Perangkat Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Policy Tools

Tanggal Date	Tentang About
02 Januari 2023 January 02, 2023	Board Manual Board Manual
21 Februari 2014 February 21, 2014	Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Policy
12 April 2018 April 12, 2018	Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan ( <i>Enterprise Risk Management/ERM</i> ) Serta Prosedur Pengelolaan Risiko Enterprise Risk Management (ERM) Policy and Guidelines and Risk Management Procedures
29 Januari 2018 January 29, 2018	Piagam Audit Internal Internal Audit Chapter
13 Februari 2015 February 13, 2015	Sistem Pelaporan Pelanggaran ( <i>Whistle Blowing System</i> ) di Lingkungan Perum LPPNPI Whistle Blowing System in Perum LPPNPI
22 Desember 2021 December 22, 2021	Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan Enterprise Information Technology Governance Policy
28 Januari 2019 January 28, 2019	Pedoman Perilaku ( <i>Code Of Conduct</i> ) di Lingkungan Perum LPPNPI Code of Conduct in Perum LPPNPI
5 Januari 2021 January 5, 2021	Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Guidelines on Anti-Bribery Management System
11 Oktober 2021 October 11, 2021	Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Perum LPPNPI Gratification Control Guidelines in Perum LPPNPI

AirNav Indonesia mengunggah pedoman tata kelola perusahaan pada situs web Perusahaan dengan alamat <https://airnavindonesia.co.id/gcg>, sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan.

*AirNav Indonesia uploaded the corporate governance guidelines on the company's website: <https://airnavindonesia.co.id/gcg> as part of information disclosure to stakeholders.*

## Penilaian Penerapan Tata Kelola

Penilaian atas kualitas penerapan tata kelola Perusahaan mengacu pada Surat Sekretaris Kementerian BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. AirNav Indonesia melakukan penilaian secara berkala, dengan metode penilaian secara *assessment* dimana penilaian dilakukan oleh pihak independen, atau *self-assessment* yakni evaluasi yang dilakukan oleh tim internal Perusahaan.

AirNav Indonesia memperoleh rekomendasi atas penilaian penerapan tata kelola tahun 2021 dan telah ditindaklanjuti pada tahun 2022. Penyampaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diterima telah disampaikan secara terperinci kepada Kementerian BUMN, selaku kuasa pemilik modal.

AirNav Indonesia berupaya meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan dengan melakukan perbaikan atas setiap rekomendasi yang diberikan. Di tahun 2022, AirNav Indonesia melakukan penilaian penerapan tata kelola perusahaan dengan menggunakan metode *assessment* oleh pihak ketiga.

## Governance Assessment

*The assessment of the quality of corporate governance refers to the Letter of the Secretary to the Ministry of SOE No.SK-16/S.MBU/2012, dated June 6, 2012, on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-owned Enterprises. AirNav Indonesia conducts periodic assessments using the assessment method where the assessment is administered by an independent party or by the company's internal team, called self-assessment.*

*AirNav Indonesia obtained recommendations for governance evaluation in 2021 and they have been followed up in 2022. Submission of the detailed follow-up has been submitted to the Ministry of State-owned Enterprises as the authorized shareholder.*

*AirNav Indonesia seeks to improve the quality of corporate governance by improving based on the incoming recommendations. In 2022, AirNav Indonesia assessed its corporate governance through a third-party assessment.*

### PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2022 2022 CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Metode Penilaian	Assessment Method	Assessment
Penilai	Assessor	PT Bumi Pertiwi Mandiri
Indikator/Parameter Penilaian	Assessment Indicators/Parameters	SK-16/S.MBU/2012
Tahun Buku Penerapan Fiskal	Fiscal Year	1 Januari - 31 Desember 2022 January 1–December 31, 2022
Periode Penilaian	Assessment Period	Maret – Juni 2023 March–June 2022
Waktu Terbit Laporan	Issued Report Date	27 Juni 2023 June 27, 2023



Aspek Aspect	Bobot Weight	Skor Score	Persentase (%) Percentage	Predikat Predicate
I. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan. <i>Commitment to Sustainable Governance</i>	7,00	6,138	87,685	Sangat Baik <i>Excellent</i>
II. Pemegang Saham dan RPB/ Pemilik Modal <i>Capital Owners and Shareholder Meeting</i>	9,00	8,524	94,714	Sangat Baik <i>Excellent</i>
III. Dewan Pengawas <i>Supervisory Board</i>	35,00	33,760	96,456	Sangat Baik <i>Excellent</i>
IV. Direksi <i>Board of Directors</i>	35,00	30,108	86,022	Sangat Baik <i>Excellent</i>
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Disclosure of Information and Transparency</i>	9,00	8,588	95,426	Sangat Baik <i>Excellent</i>
VI. Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,00	2,5	50	-
<b>Skor Keseluruhan</b> <i>Total Score</i>	<b>100,00</b>	<b>89,618</b>	<b>89,618</b>	<b>Sangat Baik</b> <i>Excellent</i>

Adapun hasil penilaian tahun 2022 mencapai skor keseluruhan sebesar 89,62%, dengan kategori “Sangat Baik”. Hasil tersebut meningkat dari hasil tahun 2021 yang mendapat skor 83,15% dengan kategori “Baik”.

*The overall score for the 2022 assessment was 89.62%, in the Excellent category. This score increased from 2021, at 83.15% or in the Good category.*

## Rekomendasi Penilaian Tata Kelola Perusahaan 2022

AirNav Indonesia memperoleh sejumlah rekomendasi sebagai *area of improvement* atas penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku 2022, di antaranya:

## Recommendations for 2022 Corporate Governance Assessments

*AirNav Indonesia obtained several recommendations for areas of improvement of corporate governance in the 2022 financial year, including:*

### REKOMENDASI PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2022 RECOMMENDATIONS FOR 2022 CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENTS

**I** Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan.

*Commitment to Sustainable Good Corporate Governance:*

1 Agar Direksi dan Dewan Pengawas mengesahkan dan menandatangani Pedoman Perilaku Perusahaan.

1 *The Supervisory Board and the Board of Directors shall ratify the Company Code of Conduct.*

2 Agar Pedoman Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) ditambahkan dengan pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Pengawas.

2 *The Board of Directors and Supervisory Board's statements complement the Company Code of Conduct.*



## REKOMENDASI PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2022 RECOMMENDATIONS FOR 2022 CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENTS

- Agar Direksi Perusahaan merevisi dan melengkapi kebijakan/ peraturan terkait penanggung jawab GCG Perusahaan dengan uraian tugas pokok penanggung jawab sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

- The Board of Directors revises and finalizes policies/regulations related to the person in charge of company CGC and its main job description following the Minister of State-owned Enterprise Decision No. SK-16/S.MBU/2012, dated June 6, 2012, on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-owned Enterprises*

### II

#### Pemegang Saham dan RPB/ Pemilik Modal

- Direkomendasikan kepada Pemilik Modal untuk menginstruksikan Direksi dan Dewan Pengawas untuk menyerahkan rancangan RJPP untuk selanjutnya dilakukan pembahasan/pengkajian terhadap *draft* RJPP dan menyusun Risalah Rapat dalam setiap pembahasan rancangan RJPP dengan Pemilik Modal.
- Pemilik Modal perlu mendorong Dewan Pengawas dan Direksi untuk mempercepat langkah penyusunan rancangan RJPP atau Revisi RJPP agar dapat dilakukan pembahasan dan pengesahan.
- Pemilik Modal direkomendasikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi untuk mempercepat langkah penyusunan rancangan RJPP atau Revisi RJPP agar dapat dilakukan pembahasan dan pengesahan serta memperhatikan batas waktu pengesahan/persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Stakeholders and Shareholder Meeting

- Capital owners are recommended to instruct the Board of Directors and the Supervisory Board to submit the Company's Long-term Plan draft before further discussion/ study of the draft and note minutes in each discussion of the Company's Long-term Plan draft with the Capital Owners.*
- Capital Owners should encourage the Supervisory Board and the Board of Directors to accelerate the preparation stages of the Company's Long-term Plan draft or its revision so that the discussion and approval can proceed.*
- Capital Owners recommend to the Supervisory Board and the Board of Directors to accelerate the preparation stages of the Company's Long-term Plan draft or its revision so that the discussion and approval can proceed within the legalization/approval deadline following applicable regulations.*

### III

#### Dewan Pengawas

- Perum LPPNPI perlu segera mengesahkan buku RJPP sehingga rancangan RKAP dapat diimplementasikan sesuai dan/atau selaras dengan RJPP yang telah disusun.

#### Supervisory Board

- Perum LPPNPI should ratify the Company's Long-term Plan immediately so that the Company WPB draft can be implemented and or aligned with the Company's Long-term Plan prepared.*



## REKOMENDASI PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2022

### RECOMMENDATIONS FOR 2022 CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENTS

2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pengawas perlu dilengkapi perihal rencana kerja dalam membahas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Pengawas.

2 *The Annual Work Program and Budget of the Supervisory Board should elaborate on the work programs in discussing transactions or actions within the scope of the Supervisory Board.*

3 Surat Dewan Pengawas kepada Menteri BUMN perlu mencantumkan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan terhadap penunjukan KAP dalam rangka pemenuhan prinsip transparansi.

3 *The Supervisory Board's letter to the Minister of SOE should mention the honorarium/remuneration proposed for the appointed PAF to fulfill the principle of transparency.*

#### IV

##### Direksi

1 Agar dibuat rencana kerja untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi.

##### The Board of Directors

1 *The Board of Directors makes training programs for members of the Board of Directors.*

2 Agar pada struktur organisasi dicantumkan tentang Spesifikasi pekerjaan menyebutkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan (*knowledge, skill, ability*) yang dibutuhkan untuk setiap jabatan.

2 *The organizational structure should include job specifications, stating the knowledge, skills, and abilities required for each position.*

3 Agar SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan dilaksanakan konsisten dan tidak terdapat penyimpangan atas prosedur.

3 *SOPs for the company's core business processes are implemented consistently, so there are no deviations from the procedures.*

#### V

##### Pengungkapan Informasi dan Transparansi

1 Agar manajemen Perusahaan menetapkan kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhiran *website*.

##### Information Disclosure and Transparency

1 *The company management should establish policies on website management and update.*

2 Agar manajemen Perusahaan menyusun laporan pengelolaan *website* secara berkala sesuai dengan kebijakan pengelolaan dan pemutakhiran *website* yang dimiliki.

2 *The company management should periodically prepare website management reports following the website management and update policies.*

3 Agar Laporan Tahunan Perusahaan periode selanjutnya memuat pernyataan atas kebenaran isi Laporan Tahunan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas yang disajikan dalam lembar terpisah.

3 *The next company's Annual Report should state the accuracy of the contents of the Annual Report, signed by all members of the Board of Directors and the Supervisory Board on separate sheets.*



AirNav Indonesia mempersiapkan sejumlah program perbaikan dan pengembangan GCG sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diterima, antara lain:

- 1 Memutakhirkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- 2 Memutakhirkan Pedoman Perilaku Perusahaan (Code of Conduct).
- 3 Memutakhirkan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System).
- 4 Menyusun rencana kerja untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi.
- 5 Melakukan survey pemasok dengan mengukur tentang kualitas mengenai kemudahan layanan dan fairness.
- 6 Menyusun Laporan Tahunan Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

AirNav Indonesia prepared several GCG improvement and development programs as a follow-up to the incoming recommendations, including:

- 1 Updating the Good Corporate Governance Guidelines;
- 2 Updating the Company's Code of Conduct;
- 3 Updating the Whistleblowing System Policy;
- 4 Preparing training programs for members of the Board of Directors;
- 5 Surveying suppliers by measuring their quality on ease of service and fairness; and
- 6 Preparing the company's Annual Report following the Minister of State-owned Enterprise Decision No. SK-16/S.MBU/2012, dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-owned Enterprises.



## Kepemilikan Modal dan Kementerian Terkait

### Capital Ownership and Related Ministries



**K**epemilikan modal AirNav Indonesia sepenuhnya milik Pemerintah Indonesia. Pemerintah menunjuk dan/atau memberi kuasa kepada Menteri BUMN untuk mewakili Pemerintah sebagai Pemilik Modal. Pemerintah juga menunjuk Menteri Perhubungan selaku kementerian teknis yang bertanggung jawab melakukan pembinaan, penilaian, evaluasi kinerja teknis, dan operasional Perusahaan, dalam rangka kelancaran operasional dan keselamatan penerbangan.

**T**he Government of Indonesia entirely owns AirNav Indonesia's capital. The Minister of State-owned Enterprises has been granted the authority to serve as the representative of the Government as the sole owner of its capital. In addition, the Government has granted authority to the Ministry of Transportation to provide guidance, assessment, and evaluation of the company's technical and operational performance to support smooth operations and aviation safety.



## Wewenang Pemilik Modal

## Authority of the Shareholders



**Menteri BUMN selaku kuasa Pemilik Modal memiliki kewenangan, di antaranya:**  
*THE MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES ACTING AS THE SHAREHOLDER HAS THE AUTHORITIES, SUCH AS:*

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p>  | <p><b>1</b> <i>To appoint and discharge the members of the Supervisory Board and Board of Directors following the applicable regulations;</i></p>  |
| <p><b>2</b> Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), yakni rencana strategis berupa sasaran dan tujuan yang hendak dicapai AirNav Indonesia dalam jangka waktu lima tahun yang diusulkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas;</p>            | <p><b>2</b> <i>To approve the draft of the Company's Long-term Plan, which is a strategic plan consisting of goals and objectives, which were proposed by the Board of Directors and the Supervisory Board, to be achieved by AirNav Indonesia within five years;</i></p>  |
| <p><b>3</b> Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang memuat penjabaran tahunan dari RJPP yang diusulkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas;</p>   | <p><b>3</b> <i>To approve the Company Work Program and Budget (WBP) containing the annual elaboration of the Long-Term Plan proposed by the Board of Directors and the Supervisory Board;</i></p>  |
| <p><b>4</b> Mengesahkan laporan tahunan, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit dan disampaikan oleh Direksi dan Dewan Pengawas;</p>  | <p><b>4</b> <i>To approve the annual report, including the audited financial statements, which has been submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board;</i></p>   |
| <p><b>5</b> Mengesahkan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang dituangkan dalam sebuah Kontrak Manajemen dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas;</p>   | <p><b>5</b> <i>To approve the Key Performance Indicators (KPI), which are outlined in a Management Contract and signed by the Board of Directors and the Supervisory Board;</i></p>  |
| <p><b>6</b> Menilai kinerja Dewan Pengawas dan Direksi, baik secara kolektif maupun masing-masing anggota, termasuk menetapkan tantiem berdasarkan prestasi kinerja;</p>  | <p><b>6</b> <i>To assess the performance of the Supervisory Board and the Board of Directors, both collectively and for each member, and set their bonuses based on their performance;</i></p>   |
| <p><b>7</b> Memastikan penerapan akuntabilitas dan kinerja Dewan Pengawas dan Direksi dalam mengangkat dan memberhentikan Direksi, serta tidak memberhentikan Direksi pada waktu bersamaan agar tidak mengganggu jalannya operasional Perusahaan;</p> | <p><b>7</b> <i>To ensure the accountability and performance of the Supervisory Board and the Board of Directors in the appointment and discharge of the Board of Directors and refrain from discharging multiple members of the Board of Directors at the same time to avoid disruption to the Company's operations;</i></p> |
| <p><b>8</b> Menetapkan Auditor Eksternal dari calon yang diajukan oleh Dewan Pengawas;</p>  | <p><b>8</b> <i>To select an External Auditor from candidates proposed by the Supervisory Board;</i></p>  |
| <p><b>9</b> Memberikan putusan terhadap usulan perbuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan Menteri.</p>   | <p><b>9</b> <i>To decide on the proposed Board of Directors' legal actions, which require approval from the Minister.</i></p>  |





### Menteri Perhubungan selaku kementerian teknis memiliki kewenangan, di antaranya:

*THE MINISTER OF TRANSPORTATION ACTING AS THE TECHNICAL MINISTRY HAS THE AUTHORITIES, SUCH AS:*

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> Mengatur persyaratan teknis tertentu bagi calon anggota Direksi dan Dewan Pengawas terkait dengan kemampuan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan, termasuk persyaratan untuk calon pelaksana tugas anggota Direksi dari pihak selain anggota Direksi yang ada, mantan anggota Direksi atau Dewan Pengawas pada saat terjadi kekosongan;</p> | <p><b>1</b> <i>To set certain requirements for candidates of the Board of Directors and the Supervisory Board relating to capability in organizing navigation services, including for candidates of acting members of the Board of Directors from parties other than the existing members of the Board of Directors, former members of the Board of Directors, or the Supervisory Board when a vacancy occurs;</i></p> |
| <p><b>2</b> Melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi dan Dewan Pengawas untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis serta menyampaikan secara tertulis kepada Menteri untuk ditetapkan;</p>   | <p><b>2</b> <i>To conduct fit and proper tests on candidates of members of the Board of Directors and Supervisory Board to ensure compliance with the technical requirements and submit the written results to the Minister for appointment;</i></p>   |
| <p><b>3</b> Meminta penggantian anggota Direksi dan Dewan Pengawas dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kenavigasian dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan teknis, dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan dengan baik;</p>  | <p><b>3</b> <i>To request a replacement of members of the Board of Directors and Supervisory Board to improve navigation services and/or if they no longer meet the technical requirements and/or are unable to properly perform the task of organizing air navigation services;</i></p>   |
| <p><b>4</b> Mengusulkan jumlah dan pembagian tugas serta kewenangan anggota Direksi.</p>  | <p><b>4</b> <i>To propose the number and allocation of duties and authority of the members of the Board of Directors.</i></p>  |



## Rapat Pembahasan Bersama (RPB) *Shareholder Meeting*

**R**apat Pembahasan Bersama (RPB) merupakan forum pembahasan bersama antara Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi. Melalui RPB, Direksi menyampaikan rancangan RKAP, RJPP, laporan tahunan, dan laporan pengelolaan Perusahaan lainnya, yang telah ditelaah oleh Dewan Pengawas. Menteri BUMN melakukan pengambilan keputusan strategis melalui RPB, di antaranya:

**T**he Shareholder Meeting is a forum between Shareholders, the Supervisory Board, and the Board of Directors. In this meeting, the Board of Directors presents Company WPB, Company's Long-term Plan, annual report, and other reports on company management reviewed by the the Supervisory Board. In the shareholder meeting, the Minister of State-Owned Enterprises makes strategic decisions such as:

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b> Melakukan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya;</p> | <p><b>1</b> <i>Adding state capital inclusion from reserve capitalization and other sources;</i></p> |
|--|--|



- 2 Menetapkan jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas, melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Pengawas, serta mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
- 3 Mengesahkan RJPP, RKAP, dan Laporan Tahunan Perusahaan;
- 4 Mengesahkan auditor eksternal yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dan mengesahkan laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal;
- 5 Menetapkan alokasi penggunaan laba bersih Perusahaan, termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan;
- 6 Menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas sesuai regulasi.

- 2 Arranging the number of the member of the Board of Directors and the Supervisory Board members, evaluating the performance of the Board of Directors and the Supervisory Board, appointing and discharging members of the Board of Directors and the Supervisory Board;
- 3 Approving Company's Long-term Plan, Company WBP, and annual report;
- 4 Approving the external auditor appointed to audit and legalizing their report;
- 5 Arranging the allocation of Company net profit, including provisions for reserves;
- 6 Arranging the income of the Board of Directors and the Supervisory Board.

AirNav Indonesia menyelenggarakan RPB pada tanggal 24 Juni 2022, dengan agenda rapat Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Hasil keputusan RPB telah disampaikan dalam Laporan Tahunan AirNav Indonesia 2021, dan telah ditindaklanjuti oleh Manajemen secara keseluruhan.

*AirNav Indonesia held the shareholder meeting on June 24, 2022, with the agenda for ratification of the Annual Report for the 2021 Fiscal Year of Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. The results of the meeting decisions have been presented in the 2021 Annual Report of AirNav Indonesia and have been followed up by management.*

RPB dengan agenda rapat pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2022 Perum LPPNPI diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2023.

*The shareholder meeting with the agenda for approval of the Annual Report for the 2022 Fiscal Year of Perum LPPNPI was held on June 20, 2023.*



**Rapat Pembahasan Bersama (RPB) tanggal 20 Juni 2023 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia**

*Shareholder Meeting on June 20, 2023 regarding the Approval of the 2022 Annual Report of Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia*

Hari/Tanggal <i>Day/Date</i>	Selasa, 20 Juni 2023 <i>Tuesday, June 20, 2023</i>
Waktu <i>Time</i>	16.00-Selesai <i>16.00-Finish</i>
Tempat <i>Place</i>	Rapat Video Conference dengan Aplikasi Zoom <i>Video Conference on Zoom</i>
Kehadiran <i>Attendance</i>	Kementerian BUMN, Dewan Pengawas, Direksi, Pegawai dari Kementerian BUMN dan Perum LPNPPI <i>The Ministry of SOEs, the Supervisory Board, the Board of Directors, personnel of the Ministry of SOEs and Perum LPNPPI</i>



## Hasil Keputusan RPB Tanggal 20 Juni 2023 Tentang Pengesahan Laporan Tahunan Buku 2022: *The Decisions of the Shareholder Meeting on June 20, 2023, concerning Ratification of the 2022 Annual Report:*

- 1** Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston) sesuai laporannya Nomor: 00020/2.1127/AU.1/10/0797-3/1/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan pendapat "Wajar, dalam Semua Hal yang Material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perum LPPNPI atas tindakan pengurusan dan Dewan Pengawas Perum LPPNPI atas pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

*To approve the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2022, including the Supervisory Board Supervision Report and the Corporate Social Responsibility Report; ratify the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2022, which was audited by the Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston) Public Accounting Firm (PAF) according to the report No. 00020/2.1127/AU.1/10/0797-3/1/II/2023 dated February 10, 2023, with a judgment of "Unqualified Opinion"; release and discharge the Board of Directors of Perum LPPNPI from the responsibility for the management actions and Supervisory Board of Perum LPPNPI for the supervision during the Fiscal Year, which ended on December 31, 2022;*
- 2** Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston) sesuai laporannya Nomor: 00021/2.1127/AU.2/10/0797-3/1/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan pendapat "Wajar, dalam Semua Hal yang Material".

*To ratify the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the fiscal year ending on December 31, 2022, which is part of the Corporate Social Responsibility Report and was audited by Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston) PAF according to the report No. 00021/2.1127/AU.2/10/0797-3/1/II/2023 dated February 10, 2023, with a judgment of "Unqualified Opinion;"*
- 3** Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2022 sebesar Rp154.524.907.318,00,- seluruhnya sebagai saldo laba ditahan.

*To determine the allocation of the entire Company's Net Profit for the Fiscal Year 2022, which amounted to IDR154,524,907,318.00, as retained earnings;*
- 4** Penetapan Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Pengawas berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun Buku 2023, serta Tantiem/ Insentif Kinerja bagi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan atas kinerja Tahun Buku 2022, akan ditetapkan secara tersendiri.

*To determine that the Board of Directors' salaries and the Supervisory Board honorarium along with other facilities and allowances for the Fiscal Year 2023, as well as profit share/performance incentives for the Board of Directors and the Supervisory Board on their performance during the Fiscal Year 2022 will be determined separately;*
- 5** Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 dilakukan secara tersendiri oleh Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal berdasarkan usulan Dewan Pengawas.

*To determine that the Public Accounting Firm (PAF) to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2023 and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the Fiscal Year 2023 will be appointed separately by the Minister of SOEs, who represents the Government as the Shareholder, based on the Supervisory Board recommendation.*





## Dewan Pengawas Supervisory Board

Dewan Pengawas melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan, sebagaimana diatur dalam PP No. 77 Tahun 2012 tentang Perum LPPNPI. Komposisi Dewan Pengawas terdiri dari seorang ketua, yang dijabat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan 4 (empat) orang anggota yang berada di bawah Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan tenaga ahli di bidang penerbangan. Sebagai perwakilan dari pemerintah, Dewan Pengawas memantau dan memastikan efektivitas pengelolaan Perusahaan, baik pelaksanaan strategi, kebijakan, pengambilan keputusan, dan pencapaian target.

### Board Manual Dewan Pengawas

Dewan Pengawas memiliki *Board Manual* sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. *Board Manual* mengatur hal-hal terkait Dewan Pengawas, seperti: susunan, etika jabatan, tugas, kewajiban, wewenang, hak, program pengenalan dan peningkatan kapabilitas, rapat, evaluasi kinerja, hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Pengawas, serta organ pendukung Dewan Pengawas. Secara berkala, *Board Manual* diperbarui sesuai perkembangan Perusahaan, melalui kesepakatan bersama Direksi dan Dewan Pengawas, dengan pembaruan terakhir pada tahun 2022.

*Board Manual* mengatur masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Masa jabatan dapat berakhir apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri, serta tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas termasuk rangkap jabatan yang dilarang berdasarkan Anggaran Dasar dan regulasi.

The Supervisory Board oversees the Company management, as stipulated in the Government Regulation No. 77 of 2012 concerning Perum LPPNPI. The Supervisory Board consists of the Director General of Civil Aviation as chairperson and 4 (four) members who are the representatives of the Minister of Transportation, Minister of SOE, Minister of Finance, and an aviation expert. As the government representatives, the Supervisory Board monitors and ensures the effectiveness of the Company management in implementing strategies and policies, making decisions, and achieving targets.

### Supervisory Board Manual

The Supervisory Board abides by the Board Manual in performing its duties and responsibilities. The Board Manual regulates matters related to the Supervisory Board, such as its composition, position ethics, duties, obligations, authorities, rights, introduction and competency development programs, meetings, performance evaluation, work relations between the Board of Directors and the Supervisory Board, and the supporting bodies of the Supervisory Board. The Board Manual is updated periodically according to company developments through agreement with the Board of Directors and the Supervisory Board. The recent update of the Board Manual was in 2022.

The Board Manual stipulates that the term of office for members of the Supervisory Board is 5 (five) years and can be reappointed for another term of office. The term of office can end if the person concerned dies, resigns, is dismissed based on a ministerial decision, and no longer fulfills the requirements as a member of the Supervisory Board, including his/her concurrent positions are prohibited based on the Articles of Association and regulations.



## Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

## Duties and Responsibilities of the Supervisory Board



### Board Manual mengatur kewajiban, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas, di antaranya:

The Board Manual outlines the duties and responsibilities of the Supervisory Board as follows:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1 Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pengurusan dan jalannya Pengurusan pada umumnya baik mengenai Perum maupun usaha Perum yang dilakukan oleh Direksi.</p>   | <p>1 Supervise the general management policies and management of Perum and Perum's business operations executed by the Board of Directors.</p>   |
| <p>2 Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Anggaran Dasar Perum, Keputusan Menteri, dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Perum sesuai dengan maksud dan tujuan Perum.</p> | <p>2 Advise the Board of Directors on the supervision of the implementation of the Long-term Plan, Company Work Program and Budget (WPB), Perum's Articles of Association, Ministerial Decrees, and provisions of regulations for the company's benefit as expressed in the Perum's purposes and objectives.</p> |
| <p>3 Mematuhi Anggaran Dasar Perum dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.</p>  | <p>3 Comply with Perum's Articles of Association, laws, and regulations and oblige to implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, accountability, and fairness.</p>   |
| <p>4 Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perum.</p>   | <p>4 Advise the Board of Directors on Perum's management.</p>  |
| <p>5 Mengikuti perkembangan kegiatan Perum, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi Pengurusan Perum.</p>  | <p>5 Follow the development of Perum activities and provide the Ministers with opinions and suggestions on any important issues for Perum management.</p>  |
| <p>6 Melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perum.</p>  | <p>6 Report immediately to the Minister if any signs of declining performance in Perum arise.</p>  |
| <p>7 Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada Menteri mengenai laporan tahunan, apabila diminta.</p>  | <p>7 Explain and provide the Minister with opinions and suggestions on the annual report when requested.</p>   |





### Adapun fungsi Dewan Pengawas sebagai fungsi pengawasan di antaranya:

*The following are the supervision functions of the Supervisory Board:*

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1</b> Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.</p>   | <p><b>1</b> <i>Research and review periodic reports and the annual report prepared by the Board of Directors and sign the annual report.</i></p>  |
| <p><b>2</b> Memantau dan memastikan bahwa Good Corporate Governance (GCG) telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.</p>   | <p><b>2</b> <i>Monitor and ensure effective and sustainable implementation of Good Corporate Governance (GCG).</i></p>  |
| <p><b>3</b> Memastikan bahwa dalam laporan tahunan Perum telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perum.</p>   | <p><b>3</b> <i>Ensure that the annual report of Perum covers information on the Supervisory Board's identity, main jobs, position in other companies, the Supervisory Board meetings held in one fiscal year (internal meetings and joint meetings with the Directors), honorarium, facilities, and/or other allowances from Perum.</i></p>   |
| <p><b>4</b> Memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perum terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perum, secara tepat waktu dan relevan.</li> <li>b. Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.</li> <li>c. Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi berlaku umum di Indonesia.</li> <li>d. Kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.</li> <li>e. Kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.</li> <li>f. Pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.</li> </ul> | <p><b>4</b> <i>Provide the Board of Directors with directions on the implementation of Perum's programs and policies related to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Important matters on changes in the business environment that are expected to have a major impact on the business and performance of Perum in a timely and relevant manner;</i></li> <li>b. <i>Policies on and implementation of career development;</i></li> <li>c. <i>Accounting policies and financial statements preparation following general accounting standards in Indonesia;</i></li> <li>d. <i>Procurement policies and their implementation;</i></li> <li>e. <i>Quality and service policies and their implementation;</i></li> <li>f. <i>Supervision of the Board of Directors in following applicable laws, regulations, and agreements with third parties.</i></li> </ul> |

Pembagian lingkup tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah disepakati dalam rapat internal Dewan Pengawas.

*The division of duties and responsibilities of the Supervisory Board has been agreed upon in the internal meeting of the Supervisory Board.*

## Dewan Pengawas dan Lingkup Tugasnya

*The Supervisory Board and Their Duties*

DEWAN PENGAWAS <i>The Supervisory Board</i>	JABATAN <i>Position</i>	LINGKUP TUGAS <i>Duty</i>
Novie Riyanto Rahardjo	Ketua <i>Chairperson</i>	Koordinator <i>Coordinator</i>
Sigit Hani Hadiyanto	Anggota <i>Member</i>	Bidang Teknik dan Operasional <i>Engineering and Operational</i>
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani	Anggota <i>Member</i>	Bidang Risiko <i>Risk</i>
Daryatmo	Anggota <i>Member</i>	Bidang Pembinaan SDM <i>HR Development</i>
Endra Gunawan	Anggota <i>Member</i>	Bidang Keuangan <i>Finance</i>

### Program Pengenalan Perusahaan kepada Dewan Pengawas yang Baru Diangkat

Dewan Pengawas AirNav Indonesia mengalami perubahan komposisi pada periode pelaporan. Sesuai *Board Manual*, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan program perpisahan kepada Bapak Elfi Amir dan pengenalan kepada Bapak Sigit Hani Hadiyanto pada 21 September 2022. Program pengenalan tersebut meliputi profil dan program kerja Perusahaan, tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan Pengawas serta hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Pengawas, organ pendukung dan kewenangan yang didelegasikan, pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal.

### *Induction Program for New Members of the Supervisory Board*

*The composition of the Supervisory Board of AirNav Indonesia changed during the reporting period. According to the Board Manual, the Corporate Secretary held a farewell ceremony for Elfi Amir and an induction program for Sigit Hani Hadiyanto on September 21, 2022. The induction program covered the company profile and work program, duties, authorities, and obligations of the Supervisory Board members and matters related to the Supervisory Board, supporting bodies and their authorities, implementation of GCG principles, internal and external audits, and the internal control system and policies.*

### Program Peningkatan Kompetensi

Dewan Pengawas mengikuti program peningkatan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain terkait perkembangan regulasi, teknologi, dan hal-hal terkait Perusahaan untuk menunjang fungsinya sebagai organ pengawas.

### *Competency Development Program*

*The Supervisory Board participates in competency development programs, such as seminars, workshops, or other activities related to regulatory changes, technology development, and company-related matters to support its function as a supervisory body.*

## ○ Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas *The Supervisory Board Competency Development*

NO	JENIS KEGIATAN <i>Activity</i>	WAKTU PELAKSANAAN <i>Date</i>
1	<i>The Power of Corporate Culture in Driving Corporate Performance (Online Training)</i>	18 Maret 2022 March 18, 2022
2	<i>Strategic Discussion Forum &amp; Critical Business Insight "Business Growth Merger, Acquisition &amp; Strategic Alliances" (Online Training)</i>	10 Oktober 2022 October 10, 2022
3	<i>Onboarding Commissioner Program Angkatan 6 Tahun 2022 (Online Training)</i> <i>Onboarding Commissioner Program Batch 6 Year 2022 (Online Training)</i>	2, 8, 16, 23, 30 November dan 21 Desember 2022 November 2, 8, 16, 23, 30, and December 21, 2022
4	<i>Strategic Business Analysis (Online Training)</i>	6-8 Desember 2022 December 6-8, 2022

## Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui mekanisme surat, rapat, dan kunjungan kerja. Dewan Pengawas telah memberikan saran, rekomendasi, dan keputusan dengan menerbitkan surat-surat sepanjang periode pelaporan, sebagai berikut:

- Surat tanggapan dan pemberian saran sebanyak 45 surat, yang antara lain membahas RKAP 2022, evaluasi atas capaian kinerja tahun 2021, tindak lanjut audit Laporan Keuangan 2021, pembahasan kinerja Perusahaan, RKAP 2023, RJPP, penunjukan KAP, hingga revisi berbagai perangkat kebijakan.
- Keputusan Dewan Pengawas sebanyak 7 surat, antara lain memutuskan tentang:
  1. KEP-01/DW/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Dewan Pengawas Perum LPPNPI;
  2. KEP-02/DW/IV/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Dewan Pengawas Perum LPPNPI;
  3. KEP-03/DW/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Dewan Pengawas Perum LPPNPI;
  4. KEP-04/DW/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua dan Anggota Komite Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance (GCG) Dewan Pengawas Perum LPPNPI;
  5. KEP-05/DW/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Pengangkatan Staf Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas Perum LPPNPI;

## Duty and Responsibility of the Supervisory Board

The Supervisory Board performed its duties and responsibilities through letters, meetings, and site visits. The Supervisory Board provided suggestions, recommendations, and decisions through letters throughout the reporting period. The details are as follows:

- A total of 45 letters of response and advice, regarding discussion of the 2022 Company WBP, evaluation of 2021 performance achievements, follow-up to the 2021 Financial Statements audit, discussion of company's performance, 2023 Company WBP, Company Long-term Plan, appointment of PAF, and revision of various policy instruments
- There are 7 (seven) Supervisory Board Decrees decide on:
  1. KEP-01/DW/I/2022, dated January 3, 2022, concerning Dismissal and Appointment of the Personnel of the Supervisory Board Secretariat of Perum LPPNPI;
  2. KEP-02/DW/IV/2022, dated January 3, 2022, concerning Dismissal and Appointment of the Supervisory Board Secretariat of Perum LPPNPI;
  3. KEP-03/DW/V/2022, dated May 31, 2022, concerning Dismissal and Appointment of the Audit Committee Chairperson of the Supervisory Board Secretariat of Perum LPPNPI;
  4. KEP-04/DW/VI/2022, dated June 26, 2022, concerning the Extension of the Chairperson and Members of Risk Management & GCG Committee of the Supervisory Board Secretariat of Perum LPPNPI;
  5. KEP-05/DW/VII/2022, dated July 13, 2022, concerning the Appointment of the Personnel of Nomination & Remuneration Committee of the Supervisory Board Secretariat of Perum LPPNPI;





6. KEP-06/DW/IX/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Dewan Pengawas Perum LPPNPI;
7. KEP-07/DW/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pemberhentian Sementara Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LPPNPI.

Dewan Pengawas melakukan kunjungan kerja dan pertemuan dengan kantor cabang untuk mengamati langsung dan memeriksa kondisi di lapangan. Melalui kunjungan kerja, Dewan Pengawas dapat mengidentifikasi risiko, peluang, serta memberikan saran dan rekomendasi terkait pengelolaan Perusahaan. Sepanjang periode pelaporan, Dewan Pengawas melakukan 10 kali kunjungan kerja.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas telah menyusun Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas dan telah disampaikan kepada Pemilik Modal melalui surat Ketua Dewan Pengawas nomor: S-51/DW/V/2023 tanggal 29 Mei 2023.

## Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas mengadakan rapat internal Dewan Pengawas, rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Direksi, manajemen, serta RPB bersama Pemilik Modal. Rapat internal Dewan Pengawas dan rapat dengan mengundang Direksi dilaksanakan rutin setiap bulan. Dalam rapat internal, Dewan Pengawas membahas tentang evaluasi kinerja Perusahaan, tindak lanjut usulan pembentukan Biro Perencanaan dan perubahan struktur organisasi cabang Perum LPPNPI, permohonan persetujuan penambahan anggaran pelaksanaan kalibrasi tahun 2022, *key performance indicator* Direktorat tahun 2022, dan laporan manajemen, serta hal-hal yang berkaitan dengan fungsi Dewan Pengawas. Sementara Rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Direksi membahas tentang evaluasi kinerja Perusahaan, laporan manajemen, dan *key performance indicator* Direktorat tahun 2022.

Pada periode pelaporan Dewan Pengawas telah melaksanakan 39 kali rapat, yang terdiri dari 18 kali rapat internal Dewan Pengawas, 15 kali rapat dengan mengundang Direksi, 1 kali rapat dengan Menteri Perhubungan, dan 3 kali rapat dengan Asisten Deputi Jasa Pariwisata & Pendukung Kementerian BUMN. Selain itu, selama tahun 2022, Dewan Pengawas menghadiri pelaksanaan rapat dengan Pemilik Modal sebanyak 2 kali yang terdiri dari Rapat Pembahasan Bersama (RPB) RKAP Perum LPPNPI tahun 2022 dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Direksi dan Dewan Pengawas Perum LPPNPI Tahun Buku 2021.

6. KEP-06/DW/IX/2022, dated September 30, 2022, concerning Dismissal and Appointment of the Supervisory Board Secretariat of Perum LPPNPI;
7. KEP-07/DW/XII/2022, dated December 16, 2022, Temporary Dismissal of Director of Finance and Risk Management of Perum LPPNPI.

The Supervisory Board holds site visits and meetings with branch offices to observe and check conditions in the field directly. Through these site visits, the Supervisory Board can identify risks and opportunities and provide suggestions and recommendations on company management. During the reporting period, the Supervisory Board conducted 10 site visits.

As an embodiment of accountability for its duties, the Supervisory Board has prepared the 2022 Supervisory Board Supervision Report signed by all the members and submitted to the Shareholder through the Supervisory Board Chairperson's Letter No. S-51/DW/V/2023, dated May 29, 2023.

## Supervisory Board Meeting

The Supervisory Board holds monthly Supervisory Board internal meetings and meetings with the Board of Directors. The internal meetings discussed the evaluation of the company performance, follow-up on the proposal for Planning Bureau establishment and changes to the organizational structure of the Perum LPPNPI branches, requests for approval for additional budgets for calibration in 2022, Directorate key performance indicators in 2022, management reports, and matters relating to the Supervisory Board functions. Meanwhile, the meeting with the Board of Directors discussed the evaluation of the company performance, management reports, and the Directorate key performance indicators in 2022.

During the reporting period, the Supervisory Board held 39 meetings, consisting of 18 internal meetings, 15 meetings with the Board of Directors, 1 (one) meeting with the Minister of Transportation, and 3 (three) meetings with the Assistant Deputy for Tourism & Supporting Services of the Ministry of SOEs. In addition, in 2022, the Supervisory Board attended 2 (two) meetings with the Shareholder, namely the 2022 Company WPB meeting and the 2021 Board of Directors and the Supervisory Board's Performance Accountability Report meeting.



## Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi dalam Rapat Dewan Pengawas Attendance of the Supervisory Board and the Board of Directors in the Supervisory Board Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Absence	Kehadiran (%) Attendance %
<b>RAPAT INTERNAL DEWAN PENGAWAS/ THE SUPERVISORY BOARD INTERNAL MEETING</b>					
Novie Riyanto R.	Ketua/ Chairperson	18	15	3	83
Elfi Amir <sup>*1</sup>	Anggota/ Member	13	13	0	100
Sigit Hani Hadiyanto <sup>*2</sup>	Anggota/ Member	5	5	0	100
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani	Anggota/ Member	18	17	1	94
Daryatmo	Anggota/ Member	18	18	0	100
Anindita Eka Wibisono <sup>*3</sup>	Anggota/ Member	6	6	0	100
Endra Gunawan <sup>*4</sup>	Anggota/ Member	12	12	0	100
<b>RAPAT INTERNAL DEWAN PENGAWAS DENGAN MENDANG DIREKSI/ INTERNAL MEETING WITH THE BOARD OF DIRECTORS</b>					
<b>Dewan Pengawas/ The Supervisory Board</b>					
Novie Riyanto R.	Ketua/ Chairperson	15	12	3	80
Elfi Amir <sup>*1</sup>	Anggota/ Member	12	12	0	100
Sigit Hani Hadiyanto <sup>*2</sup>	Anggota/ Member	3	3	0	100
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani	Anggota/ Member	15	14	1	93
Daryatmo	Anggota/ Member	15	15	0	100
Anindita Eka Wibisono <sup>*3</sup>	Anggota/ Member	6	6	0	100
Endra Gunawan <sup>*4</sup>	Anggota/ Member	9	9	0	100
<b>Direksi/ The Board of Directors</b>					
M. Pramintohadi Sukarno <sup>*5</sup>	Direktur Utama President Director	1	0	1	0
Polana Banguningsih Pramesti <sup>*6</sup>		14	14	0	100
Mokhammad Khatim	Direktur Operasi Director of Operations	15	15	0	100
Bambang Rianto	Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standardisasi/Director of Safety, Security, and Standardization	15	15	0	100
Ahmad Nurdin Aulia	Direktur Teknik Director of Engineering	15	15	0	100
Bagus Sunjoyo	Direktur SDM dan Umum/Director of Human Resources & General Affairs	15	15	0	100
Hendroyono <sup>*7</sup>	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	11	11	0	100
Taufik Hendra Kusuma <sup>*8</sup>		4	4	0	100

**Keterangan:**

\*1 Menjabat sampai 31 Agustus 2022  
\*2 Menjabat mulai 31 Agustus 2022  
\*3 Menjabat sampai 17 Mei 2022  
\*4 Menjabat mulai 17 Mei 2022  
\*5 Menjabat sampai 21 Januari 2022  
\*6 Menjabat mulai 21 Januari 2022  
\*7 Menjabat sampai 31 Agustus 2022  
\*8 Menjabat mulai 31 Agustus 2022

**Notes:**

\*1 Serving until August 31, 2022  
\*2 Serving from August 31, 2022  
\*3 Serving until May 17, 2022  
\*4 Serving from May 17, 2022  
\*5 Serving until January 21, 2022  
\*6 Serving from January 21, 2022  
\*7 Serving until August 31, 2022  
\*8 Serving from August 31, 2022



Pada periode pelaporan, komposisi Dewan Pengawas dan Direksi AirNav Indonesia mengalami perubahan, sehingga menyebabkan perbedaan jumlah rapat yang wajib diikuti. Meskipun demikian, seluruh anggota Dewan Pengawas telah memenuhi ketentuan jumlah kehadiran dalam rapat Dewan Pengawas.

*During the reporting period, the composition of the Board of Supervisors and Directors of AirNav Indonesia changed, resulting in a different number of compulsory meetings. Nevertheless, all members of the Supervisory Board have met the provisions for total attendance of the Supervisory Board meetings.*

## Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Penilaian kinerja Dewan Pengawas mengacu pada Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Pemilik Modal, melalui Menteri BUMN menyetujui dan mengesahkan Kontrak Kinerja Dewan Pengawas yang memuat target kinerja kolegal, berdasarkan Persetujuan RKAP yang telah disampaikan oleh Pemilik Modal melalui surat Nomor: S-70/MBU/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang memuat pula persetujuan Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN. Pencapaian kontrak kinerja Dewan Pengawas nantinya disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan dalam forum RPB Tahunan tahun buku 2022.

## Performance Appraisal of the Supervisory Board

*The performance appraisal of the Supervisory Board refers to the Letter of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012, dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-owned Enterprises. The shareholder, represented by the Minister of SOEs, approved and ratified the Supervisory Board Performance Contract containing collegial performance targets based on the 2022 Company WPB Approval submitted to the Shareholder through the letter No. S-70/MBU/01/2022 dated January 27, 2022, concerning Management Contracts and Annual Management Contracts for SOEs Directors. The performance contract achievement of the Supervisory Board will later convey the same thing as the annual report in the Annual RPB forum for the 2022 book.*

### ○ Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Dewan Pengawas Tahun 2022 Key Performance Indicator (KPI) Achievement of the Supervisory Board in 2022

No	Indikator Indicator	Periode Period	Bobot Weight	Output	Target	Capaian Achievement	Persentase Percentage
A	<b>ASPEK PENGAWASAN &amp; PENGARAHAN</b> <i>OVERSIGHT AND DIRECTING ASPECTS</i>		60%				59,86%
1	Memberikan tanggapan/ rekomendasi kepada pemegang saham. <i>Providing responses/ recommendations to the shareholder</i>						
	a. RKAP <i>Company WPB</i>	Tahunan <i>Annually</i>			1	1	3,33%
	b. Laporan Tahunan <i>Annual Report</i>	Tahunan <i>Annually</i>	10%	Surat <i>Letter</i>	1	1	3,33%
	c. Laporan Triwulan <i>Quarterly Report</i>	Triwulanan <i>Quarterly</i>			4	4	3,33%
2	Memberikan nasihat/saran/masukan kepada Direksi sesuai tugas dan fungsi Dewan Pengawas <i>Providing insight/advice/inputs to the Board of Directors based on duties and functions of the Supervisory Board</i>	2 bulan sekali <i>every 2 months</i>	15%	Surat <i>Letter</i>	6	45	15%

No	Indikator Indicator	Periode Period	Bobot Weight	Output	Target	Capaian Achievement	Persentase Percentage
3	Rapat Dewan Pengawas <i>Supervisory Board Meetings</i>						
	a. Jumlah Rapat <i>Total Meetings</i>	Bulanan <i>Monthly</i>		Rapat <i>Meeting</i>	12	39	3,33%
	b. Kehadiran Rapat <i>Meeting Attendance</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	10%	Persentase <i>Percentage</i>	100%	96,19%	3,20%
	c. Jumlah Risalah <i>Total Minutes</i>	Bulanan <i>Monthly</i>		Dokumen <i>Document</i>	12	39	3,33%
4	Rapat Komite Dewan Pengawas <i>The Supervisory Board Committee Meeting</i>	Triwulanan <i>Quarterly</i>	10%	Risalah <i>Minute</i>	8	25	10%
5	Kunjungan Kerja Dewan Pengawas <i>The Supervisory Board Site Visit</i>	Semesteran <i>Semester</i>	15%	Laporan Kunjungan <i>Visit Report</i>	3	7	15%
<b>B</b>	<b>ASPEK PELAPORAN</b> <i>REPORTING ASPECT</i>		25%				25%
1	Menyampaikan Program Kerja (RKA) Dewan Pengawas Tahunan. <i>Submitting Annual Supervisory Board WPB</i>	Tahunan <i>Annually</i>	9%	Laporan <i>Report</i>	1	1	9%
2	Menyampaikan Laporan Realisasi KPI Dewan Pengawas. <i>Submitting KPI Realization Report of the Supervisory Board</i>	Triwulanan <i>Quarterly</i>	8%	Laporan <i>Report</i>	4	4	8%
3	Menyampaikan Laporan Tugas dan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas kepada Pemegang Saham. <i>Submitting the Report on Supervisory Board Oversight Duty and Function to the Shareholder</i>	Tahunan <i>Annually</i>	8%	Laporan <i>Report</i>	1	1	8%
<b>C</b>	<b>ASPEK DINAMIS</b> <i>DYNAMIC ASPECT</i>		15%				14,60%
1	Mengusulkan Auditor Eksternal (KAP) kepada Pemegang Saham. <i>Nominating External Auditor (PAF) to the Shareholder</i>	Tahunan <i>Annually</i>	4%	Surat Usulan <i>Proposal Letter</i>	1	1	4%
2	Peningkatan Kompetensi (melalui partisipasi dalam <i>workshop</i> , seminar, <i>focus group discussion</i> ). <i>Improving competence (through participation in workshop, seminar, and focus group discussion)</i>	Semesteran <i>Semester</i>	3%	Seminar, Training Lokakarya <i>Seminar, Training, Workshop</i>	2	9	3%
3	Hasil Assessment GCG <i>GCG Assessment Result</i>	Tahunan <i>Annually</i>	4%	Skor GCG <i>GCG Score</i>	75	95,83	4%
4	Tindak lanjut temuan GCG yang dilakukan oleh independent <i>Following-up GCG Findings conducted by the GCG Independent Assessor</i>	Tahunan <i>Annually</i>	4%	Persentase <i>Percentage</i>	100%	90%	3,6%
	<b>Jumlah Bobot/ Total Weight</b>		<b>100%</b>				<b>99,32%</b>



## Penilaian Kinerja Organ Pendukung Dewan Pengawas

Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan dukungan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko dan GCG, serta Sekretaris Dewan Pengawas. Setiap organ pendukung bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja organ pendukung dengan berdasarkan KPI organ pendukung Dewan Pengawas. Secara keseluruhan Dewan Pengawas menilai seluruh organ pendukung telah melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dengan baik.

## Performance Appraisal of Supervisory Board Supporting Bodies

*The Supervisory Board performs its duties and responsibilities with the support of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management and GCG Committee, and Supervisory Board Secretary. Each supporting body is directly responsible to the Supervisory Board. The Supervisory Board evaluates its supporting bodies' performance based on the respective KPI. Overall, the Supervisory Board deemed that all supporting organs performed their respective functions, duties, and responsibilities well.*



## Direksi Board of Directors

Direksi melaksanakan aktivitas pengelolaan Perusahaan secara berkelanjutan, selaras dengan visi dan misi Perusahaan. Direksi bertindak mewakili Perusahaan sesuai dengan PP No. 77 Tahun 2012. Komposisi Direksi AirNav Indonesia terdiri dari 6 (enam) orang Direksi, dengan lingkup tugas sesuai bidang keahliannya.

*The Board of Directors sustainably manages the company following the company's vision and mission. The Board of Directors acts on behalf of the company by Government Regulation No. 77 of 2012. The Board of Directors of AirNav Indonesia consists of 6 (six) Directors, with duties according to their areas of expertise.*

## Board Manual Direksi

Direksi memiliki *Board Manual* sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. *Board Manual* mengatur pedoman dan tata tertib kerja Direksi, seperti: susunan, etika jabatan, tugas, kewajiban, wewenang, hak, program pengenalan dan peningkatan kapabilitas, independensi (kemandirian) Direksi, pelaksanaan rapat dan evaluasi kinerja Direksi, hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Pengawas, serta organ pendukung Direksi. *Board Manual* juga mengatur masa jabatan anggota Direksi selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Board Manual for the Board of Directors

*The Board of Directors has a Board Manual as guidelines for conducting their duties and responsibilities. The Board Manual regulates guidelines and SOP for the Board of Directors, such as composition, work ethics, duties, obligations, authorities, rights, induction and competence development program, independence of the Board of Directors, meetings and performance appraisal of the Board of Directors, work relations between the Board of Directors and the Supervisory Board, and the supporting bodies of the Board of Directors. The Board Manual also regulates 5 (five) years as the term of office for members of the Board of Directors and they can be reappointed for another term of office.*



## Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi terdiri atas Direktur Utama yang membawahi fungsi non Direktorat dan 5 (lima) Direksi yang membawahi Direktorat. Setiap anggota Direksi secara kolektif bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan dan pengelolaan Direktorat maupun non Direktorat yang dipimpinnya. Tugas dan tanggung jawab Direksi yang diatur dalam peraturan Direksi, di antaranya:

### DIREKTUR UTAMA

Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama di antaranya:

- 1 Berperan dalam menjalankan tugas pokok perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan melakukan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat Pemilik Modal; dan
- 2 Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan Direksi yang dilakukan oleh para Direktur dan mengendalikan pelaksanaan tugas pengawasan intern, kesekretariatan perusahaan, bidang hukum perusahaan, pelaksanaan tata kelola perusahaan, serta pengadaan barang dan jasa.

### DIREKTUR OPERASI

Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasi di antaranya:

- 1 Pengembangan pelayanan navigasi penerbangan dan ruang udara;
- 2 Pengendalian pelayanan navigasi penerbangan yang meliputi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Center*), Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Services*), Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information*), Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Services/MET*), Informasi Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue/SAR*)
- 3 Pengendalian dan evaluasi personel operasi; dan
- 4 Pencatatan, pelaporan, analisa data serta evaluasi pelayanan navigasi penerbangan.

## Duty and Responsibility of Board of Directors

The Board of Directors consists of a president director, who oversees non-directorate functions, and 5 (five) directors who oversee directorates. Each member of the Board of Directors is collectively responsible for the company management and their respective directorates and non-directorate management. The duties and responsibilities of the Board of Directors regulated in the Board of Directors Regulation are as follows:

### PRESIDENT DIRECTOR

The duties and responsibilities of the President Director are:

- 1 To conduct the main function of the corporation according to the Company's Articles of Association and perform other tasks according to the policies set forth by the Shareholder Meeting; and
- 2 To coordinate the implementation of the Board of Directors' policies by each director and control internal monitoring, corporate secretariat, corporate law, corporate governance, and procurement of goods and services.

### DIRECTOR OF OPERATIONS

The duties and responsibilities of the Director of Operations are:

- 1 Development of air navigation and airspace services;
- 2 Control of air navigation services, including Air Traffic Centers, Aeronautical Telecommunication Services, Aeronautical Information, Aeronautical Meteorological Services (MET), Search and Rescue Information. and Rescue (SAR);
- 3 Control and appraisal of operating personnel; and
- 4 Recording, reporting, data analysis, and evaluation of air navigation services.



## DIREKTUR TEKNIK

Tugas dan tanggung jawab Direktur Teknik di antaranya:

- 1 Perencanaan, pengembangan dan pembangunan fasilitas telekomunikasi penerbangan dan penunjang operasional;
- 2 Pembuatan desain dan rekayasa fasilitas telekomunikasi penerbangan dan penunjang operasional;
- 3 Perencanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengoperasian fasilitas telekomunikasi penerbangan dan penunjang operasional untuk kesiapan pelayanan navigasi penerbangan;
- 4 Pencatatan, pelaporan, analisa dan evaluasi data fasilitas telekomunikasi penerbangan dan penunjang operasional; dan
- 5 Penyediaan logistik dan suku cadang secara efisien dan efektif serta pengendalian personel teknik.

## DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

Tugas dan tanggung jawab Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum di antaranya:

- 1 Pengembangan organisasi yang efektif serta perencanaan, penilaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2 Pendidikan, pelatihan, sertifikasi dan kesiapan Sumber Daya Manusia;
- 3 Pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia yang mencakup pengadaan karyawan, mutasi, remunerasi dan kesejahteraan karyawan;
- 4 Pengelolaan hubungan industrial dan penyusunan aturan di bidang SDM; dan
- 4 Pengelolaan administrasi umum yang mencakup pelayanan umum, fasilitas kerja dan perkantoran termasuk pemeliharaan pengoperasian mekanik, listrik, keamanan dan gedung perkantoran serta tata usaha dan tata laksana dokumen.

## DIRECTOR OF ENGINEERING

The duties and responsibilities of the Technical Director are:

- 1 Planning, development, and construction of aviation telecommunication facilities and operational support;
- 2 Designing and engineering of aviation telecommunication facilities and operational support;
- 3 Planning for procurement, maintenance, and operation of aviation telecommunication facilities and operational support for air navigation service readiness;
- 4 Recording, reporting, analyzing, and evaluating data on aviation telecommunication facilities and operational support; and
- 5 Efficient and effective provision of logistics and spare parts and control of engineering personnel.

## DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES AND GENERAL AFFAIRS

The duties and responsibilities of the Director of Human Resources and General Affairs are:

- 1 Development and planning of effective organization, assessment, and development of human resources;
- 2 Education, training, certification, and readiness of human resources;
- 3 Administrative management of human resources, including employee procurement, transfer, remuneration, and employee welfare;
- 4 Management of industrial relations and preparation of rules in HR; and
- 4 Management of general administration, including public services; work and office facilities covering its operational maintenance of engineering, electricity, security, and office buildings; as well as document administration and management.



## DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan tanggung jawab Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko di antaranya:

- 1 Anggaran Perusahaan;
- 2 Pendapatan dan biaya Perusahaan;
- 3 Akuntansi Keuangan, aset, perpajakan serta pelaporan keuangan Perusahaan;
- 4 Teknologi Informasi Perusahaan; dan
- 5 Analisa risiko korporat.

## DIREKTUR KESELAMATAN, KEAMANAN, DAN STANDARDISASI

Tugas dan tanggung jawab Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standardisasi di antaranya:

- 1 Sistem dan standardisasi keselamatan pelayan navigasi penerbangan, keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan pelayan navigasi penerbangan;
- 2 Penyelenggaraan kegiatan monitoring, supervisi, inspeksi audit, assesmen dan investigasi untuk peningkatan standar mutu keselamatan pelayan navigasi penerbangan, keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan pelayan navigasi penerbangan;
- 3 Pemulihan sertifikasi pelayan navigasi penerbangan;
- 4 Pencatatan, pelaporan, analisa dan evaluasi data keselamatan navigasi penerbangan termasuk prosedur penerbangan;
- 5 Pembuatan rekomendasi keselamatan pelayan navigasi penerbangan, keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan pelayan navigasi penerbangan.

## DIRECTOR OF FINANCE AND RISK MANAGEMENT

The duties and responsibilities of the Director of Finance and Risk Management cover:

- 1 Company Budget;
- 2 Company revenues and expenses;
- 3 Financial accounting, assets, taxation, and corporate financial statements;
- 4 Company Information Technology; and
- 5 Corporate risk analysis.

## DIRECTOR OF SAFETY, SECURITY, AND STANDARDIZATION

The duties and responsibilities of the Director of Safety, Security, and Standardization include:

- 1 System and standardization of safety, security, Occupational Safety and Health in the air navigation service;
- 2 Monitoring, supervision, audit inspection, assessment, and investigation to improve the quality standards of safety, security, Occupational Safety and Health in air navigation service;
- 3 Restoration of air navigation service certifications;
- 4 Recording, reporting, analyzing, and evaluating data on air navigation safety, including flight procedures;
- 5 Recommendations for the safety, security, Occupational Safety and Health in the air navigation service.



Secara kolektif, Direksi memiliki kewajiban mengelola Perusahaan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan, di antaranya:

- 1 Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud, tujuan, serta kegiatan usahanya;
- 2 Menyiapkan RJPP, RKAP, serta perubahannya, dan menyampaikannya kepada Dewan Pengawas dan Menteri untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3 Membuat laporan berkala, laporan tahunan, dan dokumen keuangan lainnya sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan;
- 4 Menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
- 5 Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian internal, serta menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan;
- 6 Membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG;
- 7 Menyiapkan susunan organisasi AirNav Indonesia lengkap dengan perincian dan tugasnya, serta kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan PP No. 77 tahun 2012.

*The Board of Directors must collectively manage the company to achieve its goals and objectives. The obligations are:*

- 1 *to set up and guarantee AirNav Indonesia's business operations according to the company's vision, mission, and line of business;*
- 2 *to prepare the Long-term Plan, Company WPB, and its amendment and present them before the Supervisory Board and the Ministers for Ministerial approval according to applicable regulations;*
- 3 *to prepare periodic reports, an annual report, and other financial documents to express the company management accountability;*
- 4 *to prepare financial statements based on the Financial Accounting Standards and submit them to a Public Accountant for audit;*
- 5 *to prepare an accounting system based on the Financial Accounting Standards and set an effective internal control system to secure the company's investment and assets;*
- 6 *to develop and conduct integrated corporate risk management programs as part of GCG implementation;*
- 7 *to prepare the complete organizational structure of AirNav Indonesia, with the details, job descriptions, and obligations according to the provisions of the Government Regulation No. 77 of 2012.*

## Program Pengenalan Perusahaan kepada Direksi yang Baru Diangkat

Direksi AirNav Indonesia mengalami perubahan komposisi pada periode pelaporan. Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan program pisah sambut Direktur Utama secara virtual pada 9 Februari 2022, serta perpisahan Bapak Hendroyono dan pengenalan Bapak Taufik Hendra Kusuma pada 21 September 2022. Program pengenalan tersebut meliputi profil dan program kerja Perusahaan, tugas, kewenangan dan kewajiban Direksi serta hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengelolaan Perusahaan, organ pendukung dan kewenangan yang didelegasikan, pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, serta manajemen risiko Perusahaan.

## Induction Program for the Newly Appointed Board of Directors

*AirNav Indonesia's board of directors changed during the reporting period. The Corporate Secretary held a virtual announcement for the President Director on February 9, 2022, and a farewell celebration for Hendroyono and introduction of Mr. Taufik Hendra Kusuma on September 21, 2022. The induction program covered the company profile and work programs, duties, authorities, and obligations of the Board of Directors, and matters relating to the company management, supporting bodies and their authorities, implementation of GCG principles, internal and external audits, the internal control system and policies, and the company risk management.*

## Program Peningkatan Kompetensi

Direksi mengikuti program peningkatan kompetensi berupa webinar, *workshop*, pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk menunjang efektivitas pengelolaan Perusahaan. Materi program berkaitan dengan GCG, prinsip hukum korporasi, manajemen strategis, kepemimpinan, SDM, teknologi navigasi penerbangan, maupun materi lain yang relevan dengan Perusahaan.

## Competency Development Program

The Board of Directors participates in competency improvement programs, such as webinars, workshops, training, and other activities to support the effectiveness of the company management. The materials are related to GCG, corporate law principles, strategic management, leadership, HR, air navigation technology, and other materials relevant to the company.

### ○ Peningkatan Kompetensi Direksi

*The Board of Directors' Competency Development*

NO	JENIS KEGIATAN <i>Activity</i>	NAMA <i>Name</i>	WAKTU PELAKSANAAN <i>Date</i>
1	Masterclass GRC Foundation penyelenggara BLMI (BUMN Kadirsehip and Management Insitiution) <i>Masterclass GRC Foundation held by BLMI (BUMN Leadership and Management Institute)</i>	Bambang Rianto, Ahmad Nurdin Aulia	08 Desember 2022 <i>December 8, 2022</i>
2	Management Outlook 2022 penyelenggara BPK <i>Management Outlook 2022 held by Supreme Audit Agency</i>	Bambang Rianto, Ahmad Nurdin Aulia	20 Januari 2022 <i>January 20, 2022</i>
3	Live Meeting and Workshop – Digital Airport Tower	Ahmad Nurdin Aulia	13 Mei 2022 <i>May 13, 2022</i>
4	Workshop “Kerugian Negara Dalam BUMN & BUMD : Resiko Investasi atau Korupsi” Penyelenggara Asia Anti Fraud (AAF) <i>Workshop: "State Losses in SOEs &amp; regional-owned enterprises: Risk of Investment or Corruption" held by Asia Anti Fraud (AAF)</i>	Ahmad Nurdin Aulia	20 Januari 2022 <i>January 20, 2022</i>
5	Exclusive Seminar	Ahmad Nurdin Aulia	29 September 2022 <i>September 29, 2022</i>
6	Webinar ERM Fundamental & Risk Based Audit <i>Webinar ERM Fundamental &amp; Risk-Based Audit</i>	Ahmad Nurdin Aulia	01 Desember 2022 <i>December 1, 2022</i>
7	Workshop tentang Kerugian Negara dalam BUMN & BUMD : Risiko Investasi atau Korupsi” <i>Workshop on "State Losses in SOEs &amp; regional-owned enterprises: Risk of Investment or Corruption"</i>	Mokhammad Khatim	16 s.d. 17 Juni 2022 <i>June 16-17, 2022</i>
8	Onboarding Directorship Program Angkatan 5 Tahun 2022 <i>Onboarding Directorship Program Batch 5 Year 2022</i>	Polana B. Pramesti	20 Juli 2022 <i>July 20, 2022</i>

## Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat internal minimal 1 (satu) kali dalam sebulan untuk membahas pengelolaan Perusahaan. Direksi juga menghadiri Rapat Kinerja Direksi dan Dewan Pengawas untuk membahas pencapaian kinerja Perusahaan dan memperoleh solusi atas masalah-masalah aktual. Selain itu, terdapat Rapat Rutin dan Rapat Kerja

## The Board of Directors Meeting

The Board of Directors holds internal meetings at least 1 (once) a month to discuss company management. The Board of Directors also attends the Board of Directors and Supervisory Board Performance Meetings to discuss the company's performance and find solutions to actual problems. In addition, regular meetings and work meetings are held among Directors



antara Direksi dengan unit kerja terkait untuk membahas pelaksanaan RKAP, pencapaian kinerja korporasi, kontrak manajemen, serta evaluasi laporan manajemen; dan Rapat tidak terjadwal sesuai dengan keperluan.

Sepanjang periode pelaporan, Direksi melaksanakan 39 kali rapat, dengan agenda rapat di antaranya pembahasan temuan BPK, restrukturisasi Biro GCG menjadi Biro Perencanaan, restrukturisasi organisasi, rencana kegiatan kalibrasi tahun 2022, dan pembahasan RKAP tahun 2023.

and related work units to discuss the implementation of the Company WPB, achievement of corporate performance, management contracts, and evaluation of management reports. Unscheduled meetings are also held when necessary.

During the reporting period, the Board of Directors held 39 meetings, with the meeting agenda to discuss Supreme Audit Agency findings, GCG Bureau restructuring into Planning Bureau, organizational restructuring, planning for calibration activities in 2022, and the 2023 Company WPB.

### ○ Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi

*Attendance Rate of the Board of Directors in the Board of Directors Meetings*

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat/ Total Mandatory Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidak hadiran Total Absence	Kehadiran Attendance (%)
Polana Banguningsih Pramesti	Direktur Utama President Director	39	39	0	100%
Mokhammad Khatim	Direktur Operasi Director of Operations	39	37	2	94%
Bambang Rianto	Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standardisasi Director of Safety, Security, and Standardization	39	39	0	100%
Ahmad Nurdin Aulia	Direktur Teknik Director of Engineering	39	39	0	100%
Bagus Sunjoyo	Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs	39	39	0	100%
Hendroyono *1	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	22	22	0	100%
Taufik Hendra Kusuma *2	Director of Finance and Risk Management	11	11	0	100%

**Keterangan :**

\*1 Menjabat sampai 31 Agustus 2022

\*2 Menjabat pada 1 September 2022 s.d 16 Desember 2022

**Notes:**

\*1 Serving until August 31, 2022

\*2 Serving from September 1, 2022 until December 16, 2022

## Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi berpedoman pada Peraturan Kementerian No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara. Sebagai organ yang memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perusahaan, penilaian kinerja Direksi melekat pada KPI korporat. Kinerja Direksi dinilai melalui pencapaian KPI sebagaimana telah disahkan dalam RKAP tahun 2022

## Performance Appraisal of the Board of Directors

The performance appraisal of the Board of Directors follows Ministerial Regulation No. PER-11/MBU/11/2020, dated November 12, 2020, concerning Management Contracts and Annual Management Contracts for SOEs Directors. As a structural body with a central role in the company's growth, the performance appraisal of the Board of Directors is inseparable from the corporate KPIs. The performance of the Board of Directors is assessed based on the KPI achievement as



No. S-70/MBU/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN, serta Tingkat Kesehatan Perusahaan.

enacted in the 2022 Company WPB No. S-70/MBU/01/2022 dated January 27, 2022, concerning Management Contracts and Annual Management Contracts for SOEs Directors, and Organizational Health Index.

## Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Korporat Tahun 2022

2022 Corporate Key Performance Indicator (KPI) Achievement

No	Uraian Description	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Rasio (Realisasi/ Target) (Realization/ Target)	Skor Capaian (Bobot X Rasio) Score (Weight x Ratio)
<b>A</b>	<b>PERSPEKTIF NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA/ ECONOMIC AND SOCIAL VALUE PERSPECTIVE FOR INDONESIA</b>	<b>40,00%</b>				<b>37,63%</b>
<b>a</b>	<b>Finansial/ Financial</b>					
1a	EBITDA	3,00%	Rp348,22	Rp478,20	137,33%	3,30%
1b	Cash Flow from Operating Activities (CFO)	3,00%	Rp263,50	Rp543,77	206,36%	3,30%
2	ROIC-WACC (ROIC = -2,96,00%, WACC = 11,21,00%) Cost Equity = 11,21,00%	5,00%	(8,1)%	(1,41)%	577,85%	5,50%
3	Average Collection Period	5,00%	24	79	30,55%	1,53%
<b>b</b>	<b>Operasional/ Operational</b>					
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Safety Rate</li> </ul>	6,00%	100%		100,03%	6,00%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Airprox CAT A &amp; CAT B ANS Contribution</li> </ul>		1,320	0,887	100,00%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Runway Incurtion CAT A &amp; CAT B ANS Contribution</li> </ul>		0,083	0,080	100,00%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ATC Coordination Error Between ATS Unit</li> </ul>		4,660	0,990	100,00%	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ATC Readback-Hearback Issue</li> </ul>		0,380	0,122	100,00%	
	Ketersediaan Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan Availability of air communication facilities		99,00%	99,13%	100,13%	
5	Peningkatan Pelayanan Flight Information Service Sektor Jakarta dan Sektor Medan Improvement of Jakarta and Medan Flight Information Service	6,00%	100,00%	100,00%	100,00%	6,00%
6	Penyelesaian Kontrak Airlines dan Penyelesaian Restrukturisasi Piutang Airlines Airline Contract Settlement and Airline Settlement Receivables Restructuring	6,00%	100,00%	100,00%	100,00%	6,00%
<b>c</b>	<b>Sosial/ Social</b>					
7	PBN Procedure untuk Papua dan Daerah Lainnya PBN Procedure for Papua and Other Regions	6,00%	100,00%	100,00%	100,00%	6,00%



No	Uraian Description	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Rasio (Realisasi/ Target) (Realization/ Target)	Skor Capaian (Bobot X Rasio) Score (Weight x Ratio)
<b>B</b>	<b>INOVASI MODEL BISNIS</b> <i>BUSINESS MODEL INNOVATION</i>	<b>15,00%</b>				<b>15,40</b>
1a	Implementasi Standar Biaya Operasional Cabang <i>Implementation of Branch Operational Cost Standards</i>	4,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4,00%
1b	Penataan dan Penyederhanaan Organisasi Perusahaan <i>Corporate Organization and Simplification</i>	4,00%	100,00%	133,33%	133,33%	4,00%
2	Penguatan Tata Kelola dan Fungsi Manajemen <i>Enforcement on Governance and Management Functions</i>	7,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7,00%
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI</b> <i>TECHNOLOGICAL LEADERSHIP</i>	<b>15,00%</b>				<b>15,00</b>
1a	Optimalisasi Penggunaan ERP dalam Keputusan Bisnis <i>Optimization of ERP Use in Business Decisions</i>	4,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4,00%
1b	Sistem Informasi Peralatan CNSA dan Aset Perusahaan <i>CNSA Equipment and Company Assets Information System</i>	4,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4,00%
2	Implementasi Host to Host <i>Host-to-Host Implementation</i>	7,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7,00%
<b>D</b>	<b>PENINGKATAN INVESTASI</b> <i>INCREASE IN INVESTMENT</i>	<b>15,00%</b>				<b>15,02</b>
1	Realisasi Investasi tahun 2022 <i>2022 Investment Realization</i>	7,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7,00%
2	Availability dan Keandalan Jaringan, Peralatan dan Fasilitas Produksi tahun 2022 <i>Network, Equipment, and Facility Availability and Reliability in 2022</i>	8,00%	99,00%	99,25%	100,25%	8,02%
<b>E</b>	<b>PENGEMBANGAN TALENTA</b> <i>TALENT DEVELOPMENT</i>	<b>15,00%</b>				<b>15,53</b>
1a	Perempuan dalam Nominated Talent <i>Women in Nominated Talent</i>	4,00%	9,38%	9,68%	103,2%	4,13%
1b	Milenial (<=42 tahun) dalam Nominated Talent <i>Millennial (&lt;=42 years old) in Nominated Talent</i>	4,00%	3,12%	6,45%	206,73%	4,40%
2	Integrasi Career dan Talent Management System <i>Integrated Career and Talent Management System</i>	7,00%	100%	100%	100%	7,00%
<b>JUMLAH/ TOTAL</b>						<b>98,58%</b>

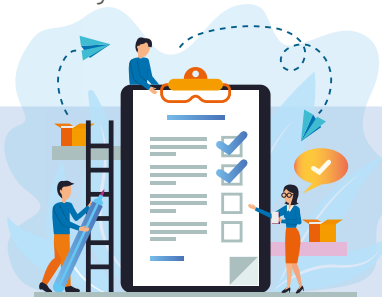
## Penilaian Kinerja Organ Pendukung Direksi

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan dukungan Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern (SPI), Biro Hukum, Biro Pengelolaan Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko & GCG, serta Biro Pengadaan. Organ Pendukung Direksi ini berada dalam organisasi non direktorat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Direksi melakukan penilaian kinerja organ pendukung Direksi berdasarkan pencapaian KPI masing-masing organ. Secara keseluruhan Direksi menilai setiap organ telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga mampu mendukung tugas pengelolaan Perusahaan.

## Performance Appraisal of the Board of Directors Supporting Bodies

The Board of Directors performs its duties and responsibilities with the support of the Corporate Secretary, Internal Audit (IA), Legal Bureau, Corporate Performance Management Bureau, Risk Management, and GCG, and Procurement Bureau. The supporting bodies of the Board of Directors are in a non-directorate organization and are directly responsible to the President Director. The Board of Directors evaluates the performance of these supporting bodies based on their KPI achievement. The Board of Directors assessed each body and stated that they competently performed their duties and responsibilities. Therefore, they could support the company's management.

### Penilaian Kinerja Organ Pendukung Direksi Performance Appraisal of the Board of Directors Supporting Bodies



Organ Pendukung Direksi Board of Directors Supporting Body	Indikator Yang Digunakan Indicator	Skor 2022 2022 Score
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Pelaksanaan sinergi BUMN, pemenuhan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, dan penyaluran PKBL Implementation of SOEs Synergy, the fulfillment of SOE Partnership and Community Development Program (CDP) and its disbursement	98,58%
Satuan Pengawasan Intern (SPI) Internal Audit (IA)	Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan jumlah Temuan yang dikonfirmasi Annual Audit Program and number of confirmed findings	98,58%
Biro Hukum Legal Bureau	Penyelesaian produk dan permasalahan hukum, serta sinkronisasi aturan Pemerintah dengan produk hukum Perusahaan. Completion of legal products, settlement of legal issues, and synchronization of the Government Regulations with the company legal products	98,58%
Biro Pengelolaan Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko & GCG* Corporate Performance, Risk Management, and GCG Bureau	Pemenuhan nilai GCG, pemenuhan nilai KPKU, dan pemenuhan Laporan BUMN melalui Portal BUMN Fulfillment of GCG values and values of Excellent Performance Assessment Criteria, and completion of SOE Reports through the SOE Portal	98,58%
Biro Perencanaan ** Planning Bureau	Pemenuhan Laporan BUMN melalui Portal BUMN, Perencanaan Strategik Jangka Panjang dan pendek, penyusunan RIJP, pengembangan usaha, kinerja Perusahaan, riset dan inovasi Fulfillment of BUMN Reports through the Portal BUMN, Long and Short-term Strategic Planning, preparation of the Long-term Investment Plan, business development, company performance, research, and innovation	98,58%

**Keterangan :**

\* Biro Pengelolaan Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko, dan GCG dibubarkan pada tanggal 1 September 2022

\*\* Biro Perencanaan dibentuk pada tanggal 1 September 2022

**Notes:**

\* Corporate Performance, Risk Management, and GCG Bureau was dissolved on September 1, 2022

\*\* Planning Bureau was formed on September 1, 2022



## Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

### *Nomination and Remuneration of the Supervisory Board and the Board of Directors*

#### Nominasi Dewan Pengawas dan Direksi

Pemerintah melalui Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan memiliki kewenangan untuk melakukan nominasi dan mengangkat Dewan Pengawas dan Direksi. Proses nominasi diawali dengan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Rekomendasi tersebut diberikan kepada Dewan Pengawas sebagai bahan pertimbangan nominasi. Selanjutnya Dewan Pengawas mengajukan nominasi calon kepada Menteri Perhubungan untuk diuji kelayakan dan kepatutan sesuai persyaratan kemampuan penyelenggaraan pelayanan navigasi yang telah ditetapkan. Menteri BUMN melakukan pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Menteri Perhubungan.

#### *Nomination of the Supervisory Board and the Board of Directors*

*The government, represented by the Minister of SOEs and the Minister of Transportation, has the authority to nominate and appoint the Supervisory Board and the Board of Directors. At the early stage of the nomination process, the Nomination and Remuneration Committee recommends candidates for members of the Supervisory Board and Board of Directors. The recommendation is submitted to the Supervisory Board for consideration. Furthermore, the Supervisory Board continues the candidates to the Minister of Transportation for fit and proper tests based on the determined competence requirements to provide navigation services. The Minister of SOEs appoints members of the Supervisory Board and the Board of Directors based on the fit and proper tests administered by the Minister of Transportation.*

#### Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi

Dewan Pengawas dan Direksi AirNav Indonesia memiliki keberagaman latar belakang pendidikan, keahlian, serta pengalaman profesional. Keberagaman ini memungkinkan pengambilan keputusan di lingkup Perusahaan dilakukan secara objektif berdasarkan keberagaman sudut pandang.

#### *Diversity in the Composition of the Supervisory Board and Board of Directors*

*AirNav Indonesia's Supervisory Board and the Board of Directors come from various educational backgrounds, expertise, and professional experience. This diversity enables objective decision-making within the company by considering various perspectives.*

Nama Name	Kualifikasi Akademik Academic Qualifications	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
<b>DEWAN PENGAWAS/ SUPERVISORY BOARD</b>					
Novie Riyanto R.	Magister (S2) Teknik Aeronautika <i>Master's degree in Aeronautical Engineering</i>	Berkarier di lingkungan Kementerian Perhubungan, saat ini menjabat Direktur Jenderal Perhubungan Udara <i>Having a career in the Ministry of Transportation, currently serving as Director General of Civil Aviation</i>	Hukum <i>Law</i>	56	Laki-laki <i>Male</i>
Sigit Hani Hadiyanto	Magister (S2) Transportasi <i>Master's degree in Transportation</i>	Berkarier di lingkungan Kementerian Perhubungan, saat ini menjabat Direktur Navigasi Penerbangan <i>Having a career in the Ministry of Transportation, currently serving as Director of Air Navigation</i>	Ahli Lalu Lintas Udara <i>Air Traffic Expert</i>	48	Laki-laki <i>Male</i>



Nama Name	Kualifikasi Akademik Academic Qualifications	Pengalaman Profesional Professional Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani	Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum <i>Master's degree in Law</i>	Berkarier di lingkungan Kementerian Keuangan, saat ini menjabat Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara <i>Having a career in the Ministry of Finance, currently serving as Director of Law and Public Relations of the Directorate General of State Assets</i>	Hukum & GCG <i>Legal and GCG</i>	57	Perempuan <i>Female</i>
Daryatmo	Pendidikan Militer AU <i>Air Force Military Education</i>	Berkarier pada TNI Angkatan Udara (AU) <i>Having a career in Indonesian Air Force</i>	SDM <i>HR</i>	67	Laki-laki <i>Male</i>
Endra Gunawan	Magister (S2) Ekonomi <i>Master's degree in Economy</i>	Berkarier di lingkungan Kementerian BUMN, saat ini menjabat Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung <i>Having a career in the Ministry of SOE, currently serving as Acting Assistant Deputy for Tourism and Supporting Services</i>	Akuntansi/Manajemen Operasi <i>Accounting/Operations Management</i>	40	Laki-laki <i>Male</i>
<b>DIREKSI/ BOARD OF DIRECTORS</b>					
Polana Banguningsih Pramesti	Magister (S2) Transportasi <i>Master's degree in Transportation</i>	Berkarier di lingkungan Kementerian Perhubungan PT Angkasa Pura I <i>Having a career at PT Angkasa Pura I in the Ministry of Transportation</i>	Teknik Sipil, Aerodrome Engineering dan Master Transportasi <i>Civil Engineering, Aerodrome Engineering, and a transportation expert</i>	61	Perempuan <i>Female</i>
Mokhammad Khatim	Magister (S2) Manajemen SDM <i>Master's degree in HR Management</i>	Berkarier di PT Angkasa Pura I <i>Having a career at PT Angkasa Pura I</i>	SDM/ Manajemen Operasi <i>HR/Operations Management</i>	56	Laki-laki <i>Male</i>
Ahmad Nurdin Aulia	Magister (S2) Teknik Informatika <i>Master's degree in Information Technology</i>	Berkarier di lingkungan Kementerian Perhubungan <i>Having a career in the Ministry of Transportation</i>	Aeronautical telecommunication engineer expert	58	Laki-laki <i>Male</i>
Bambang Rianto	Magister (S2) Manajemen <i>Master's degree in Management</i>	Berkarier di Perusahaan sejak berdirinya Perusahaan. Sebelumnya berkarier di PT Angkasa Pura I <i>Having a career in the company since its establishment and at PT Angkasa Pura I previously</i>	Manajemen Operasi <i>Operations Management</i>	60	Laki-laki <i>Male</i>
Bagus Sunjoyo	Magister (S2) Manajemen <i>Master's degree in Management</i>	Berkarier di lingkungan Kementerian Perhubungan <i>Having a career in the Ministry of Transportation</i>	SDM <i>HR</i>	60	Laki-laki <i>Male</i>





## Remunerasi Dewan Pengawas Dan Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengajukan usul besaran remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi dalam rapat Dewan Pengawas. Pengajuan usul mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Perhitungan usulan besaran remunerasi juga wajib mempertimbangkan hasil survei industri sejenis, tingkat inflasi, dan kemampuan Perusahaan. Hasil usulan remunerasi tersebut kemudian diberikan kepada menteri BUMN. Selanjutnya Menteri BUMN melalui RPB akan menetapkan besaran remunerasi bagi Dewan pengawas dan Direksi.

## Remuneration of the Supervisory Board and the Board of Directors

The Nomination and Remuneration Committee proposes the remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors at the Supervisory Board meeting. The proposal refers to the Minister of State-owned Enterprises Regulation No. PER-12/MBU/11/2020, dated November 25, 2020, on the Fifth Amendment to the Minister of State-owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Establishing Income of State-owned Enterprises' Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board. The calculation of the proposed remuneration must also consider survey results of similar industries, the inflation rate, and the company's capacity. Then, the remuneration proposal is submitted to the Minister of SOEs. Next, the Minister of SOEs will determine the remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors in the Shareholder Meeting.

## Struktur Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Berdasarkan SR-50/Wk2.MBU.F/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022, tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum LPPNPI tahun 2022, struktur remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi, terdiri dari honorarium/gaji, tunjangan, fasilitas, dan tantiem atau insentif kinerja.

## Remuneration Structure of the Supervisory Board and the Board of Directors

Based on SR-50/Wk2.MBU.F/08/2022, dated August 31, 2022, concerning Income Determination for the Board of Directors and the Supervisory Board Perum LPPNPI in 2022, the remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors consists of honorarium/salary, allowances, facilities, and profit share or performance incentives.

## STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### REMUNERATION STRUCTURE OF THE SUPERVISORY BOARD AND THE BOARD OF DIRECTORS

DEWAN PENGAWAS <i>Supervisory Board</i>		DIREKSI <i>Board of Directors</i>	
<b>HONORARIUM / GAJI / HONORARIUM/SALARY</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ketua Dewan Pengawas memperoleh honorarium sebesar 45% dari gaji Direktur Utama</li> <li>● Anggota Dewan Pengawas memperoleh honorarium sebesar 90% dari honorarium Ketua Dewan Pengawas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>The chairperson of the Supervisory Board receives an honorarium of 45% of the president director's salary.</i></li> <li>● <i>Members of the Supervisory Board receive an honorarium of 90% of chairperson's honorarium.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Direktur Utama memperoleh gaji sesuai pedoman internal yang ditetapkan Menteri BUMN.</li> <li>● Anggota Direksi lainnya memperoleh gaji sebesar 85% dari Gaji Direktur Utama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>The president director receives a salary according to the internal guidelines set by the Minister of SOEs.</i></li> <li>● <i>Other members of the Board of Directors receive 85% of the president director's salary.</i></li> </ul>
<b>TUNJANGAN/ ALLOWANCE</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tunjangan hari raya keagamaan (THR)</li> <li>● Tunjangan komunikasi</li> <li>● Tunjangan santunan purna jabatan</li> <li>● Tunjangan pakaian</li> <li>● Tunjangan transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Religious Holiday Allowance</i></li> <li>● <i>Communication Allowance</i></li> <li>● <i>Post-Service Compensation</i></li> <li>● <i>Clothing Allowance</i></li> <li>● <i>Transportation Allowance</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tunjangan hari raya keagamaan (THR)</li> <li>● Tunjangan perumahan</li> <li>● Tunjangan komunikasi</li> <li>● Asuransi purna jabatan</li> <li>● Tunjangan pakaian</li> <li>● Tunjangan cuti tahunan dan cuti besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Religious Holiday Allowance</i></li> <li>● <i>Housing allowance</i></li> <li>● <i>Communication Allowance</i></li> <li>● <i>Post-Service Compensation</i></li> <li>● <i>Clothing Allowance</i></li> <li>● <i>Annual leave and sabbatical allowance</i></li> </ul>
<b>FASILITAS/ FACILITY</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemeliharaan kesehatan</li> <li>● Kepesertaan dan perkumpulan profesi</li> <li>● Bantuan Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Health care</i></li> <li>● <i>Professional membership and association</i></li> <li>● <i>Legal aid</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kendaraan dinas</li> <li>● Pemeliharaan kesehatan</li> <li>● Kepesertaan dan perkumpulan profesi</li> <li>● Representasi Direksi mewakili Perusahaan</li> <li>● Bantuan Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>An official vehicle</i></li> <li>● <i>Health care</i></li> <li>● <i>Professional membership and association</i></li> <li>● <i>Company representative</i></li> <li>● <i>Legal aid</i></li> </ul>
<b>TANTIEM ATAU INSENTIF KINERJA/ PROFIT SHARE OR PERFORMANCE INCENTIVES</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ketua Dewan Pengawas memperoleh tantiem sebesar 45% dari tantiem Direktur Utama</li> <li>● Anggota Dewan Pengawas memperoleh tantiem sebesar 90% dari tantiem Ketua Dewan Pengawas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>The chairperson of the Supervisory Board receives 45% of the president director's profit share.</i></li> <li>● <i>The member of the Supervisory Board receives 90% of the chairperson's profit share.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Direktur Utama memperoleh tantiem sesuai keputusan RPB, dengan pertimbangan pencapaian KPI dan tingkat kesehatan Perusahaan.</li> <li>● Anggota Direksi memperoleh tantiem sebesar 85% dari Direktur Utama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>The president director receives a profit sharing as decided in the Shareholder Meeting, considering KPI achievement and the organizational health index.</i></li> <li>● <i>The member of the Board of Directors receives 85% of the president director's profit share.</i></li> </ul>



## Organ Pendukung Dewan Pengawas *Supporting Bodies of the Supervisory Board*

**D**ewan Pengawas membentuk organ pendukung Dewan Pengawas sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/04/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Organ pendukung kinerja Dewan Pengawas terdiri dari Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan GCG, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Sekretariat Dewan Pengawas. Seluruh organ pendukung Dewan Pengawas bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

**T**he Supervisory Board forms its supporting bodies following the Minister of State-owned Enterprises Regulation No. PER-06/MBU/04/2021 concerning the amendment to Minister of State-owned Enterprises Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Bodies for SOEs Board of Commissioners/Supervisory Board. The supporting bodies are the Audit Committee, the Risk Management and GCG Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Secretariat of the Supervisory Board. All the supporting bodies are directly responsible to the Supervisory Board.

### KOMITE AUDIT *Audit Committee*



Komite Audit mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dengan memberikan pendapat profesional dan independen terkait laporan dan informasi keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Komite Audit beranggotakan 4 (empat) orang, termasuk seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Pengawas. Masa jabatan Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Pengawas mengikuti masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas. Sementara masa jabatan anggota Komite Audit lainnya adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

The Audit Committee supports the duties of the Supervisory Board by providing professional and independent opinions on financial statements and information, the effectiveness of internal controls, and the company's compliance with applicable regulations. The Audit Committee has 4 (four) members, including a chairperson, who is also a member of the Supervisory Board. The tenure of the Audit Committee, who is also a Supervisory Board member, follows his tenure as a Supervisory Board member. Meanwhile, the tenure of other Audit Committee members is 3 (three) years and can be extended once for another 2 (two) years, without prejudice to the right of the Supervisory Board to terminate it at any time.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam/Charter Komite Audit yang disahkan oleh Ketua Dewan Pengawas pada Agustus 2017. Piagam ini mengatur hal-hal mendasar terkait Komite Audit, antara lain Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan Komite; Pembentukan, Organisasi dan Masa Jabatan; Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan; serta Rapat, Pelaporan, dan Anggaran.

To perform its duties and responsibilities, the Audit Committee follows the Audit Committee Charter, which was approved by the Supervisory Board chairperson in August 2017. This charter regulates essential matters related to the Audit Committee, including the committee's legal basis, purposes, and objectives; formation, organization, and tenure; duties, responsibilities, and authorities; and meetings, reporting, and budgets.



## INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit bertindak secara independen dan bebas dari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas pelaksanaan tugasnya. Komite Audit secara independen memberikan pandangan, arahan dan masukan mengenai aspek audit yang akan menjadi materi pertimbangan terkait pengawasan kinerja Direksi maupun untuk perumusan kebijakan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Seluruh anggota komite menjunjung tinggi prinsip GCG dengan bersikap objektif, profesional, dan independen. Pada periode pelaporan, komposisi Komite Audit mengalami perubahan dikarenakan perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas.

## AUDIT COMMITTEE INDEPENDENCE

The Audit Committee acts independently and is free from conflicts of interest that may affect its objectivity in performing its duties. The Audit Committee independently provides opinions, guidance, and inputs on audit, which shall be considered in monitoring the performance of the Board of Directors and the formulation of company policies implemented by the Board of Directors. All committee members uphold GCG principles by being objective, professional, and independent. During the reporting period, the composition of the Audit Committee changed due to changes in the Supervisory Board members.

**Komposisi Komite Audit per 31 Desember 2022**  
The Composition of the Audit Committee as of December 31, 2022

NAMA Name	JABATAN Position	DASAR PENGANGKATAN Legal Basis	MASA JABATAN Tenure	PERIODE Term of Office
Daryatmo	Ketua Chairperson	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-03/DW/V/2022, tanggal 31 Mei 2022 Supervisory Board Decree No. KEP-03/DW/V/2022 on May 31, 2022	31 Mei 2022 s.d 7 Januari 2024 May 31, 2022 to January 7, 2024	Ke-1 First
Endra Gunawan	Wakil Ketua Vice-chair	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-03/DW/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 Supervisory Board Decree No. KEP-03/DW/V/2022 on May 31, 2022	17 Mei 2022 s.d 16 Mei 2027 May 17, 2022 to May 16, 2027	Ke-1 First
Aria Farah Mita	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-04/DW/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Supervisory Board Decree No. KEP-04/DW/VIII/2020 on August 24, 2020	24 Agustus 2020 s.d 23 Agustus 2023 August 24, 2020 to August 23, 2023	Ke-1 First
Ika Setyawati	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-06/DW/XI/2020, tanggal 27 November 2020 Supervisory Board Decree No. KEP-06/DW/XI/2020 on November 27, 2020	27 November 2020 s.d 26 November 2023 November 27, 2020 to November 26, 2023	Ke-1 First



## PROFIL KOMITE AUDIT

Profil Komite Audit yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas, yakni Daryatmo dan Endra Gunawan telah disampaikan pada bagian Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

## PROFILE OF COMMITTEE AUDIT

The profiles of the Audit Committee, who serve as members of the Supervisory Board, namely Daryatmo and Endra Gunawan, have been presented in the Company Profile section of this Annual Report.



### ARIA FARAH MITA

Anggota Komite Audit  
Member of Audit Committee



<b>Kewarganegaraan</b> Nationality	WNI Indonesian
<b>Usia</b> Age	44 tahun 44 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia

#### Pendidikan

Education

- **Doktor (S3) bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (2015)**  
*Doctorate in Accounting at the University of Indonesia (2015)*

#### Riwayat Profesi

Professional History

- **Anggota Komite Audit PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2017-saat ini)**  
*Audit Committee Member of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2017-Present)*
- **Anggota Komite Audit PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia (2015-saat ini)**  
*Audit Committee Member of PT Asuransi Tugu Pratama (2015-Present)*
- **Anggota Komite Audit PT Phapros Tbk. (2016-2017)**  
*Audit Committee Member of PT Phapros Tbk. (2016-2017)*
- **Anggota Komite Audit PT Bank Jabar Banten Tbk. (2010-2011)**  
*Audit Committee Member of PT Bank Jabar Banten Tbk. (2010-2011)*

#### Rangkap Jabatan

Concurrent Position

- **Anggota Komite Audit PT Perusahaan Perdagangan Indonesia**  
*Audit Committee Member of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia*
- **Anggota Komite Audit PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia**  
*Audit Committee Member of PT Asuransi Tugu Pratama*





**IKA SETYAWATI**

Anggota Komite Audit  
Member of Audit Committee



■ <b>Kewarganegaraan</b> Nationality	WNI Indonesian
■ <b>Usia</b> Age	37 tahun 37 years old
■ <b>Domisili</b> Domicile	Tangerang Selatan, Banten Indonesia South Tangerang, Banten, Indonesia

**Pendidikan**

Education

- ✈ **Magister (S2) Manajemen Bisnis** dari Institut Pertanian Bogor (masih berjalan)  
*Master's degree in Business Management at Bogor Agricultural University (in progress)*
- ✈ **Sarjana (S1) Angewandte Informatik** dari Berufsakademie Stuttgart, Jerman (2009)  
*Bachelor of Angewandte Informatics at Berufsakademie Stuttgart, Germany (2009)*
- ✈ **Diploma (D4) Teknologi Informasi** dari Politeknik (PENS) ITS Surabaya (2008) **Riwayat Profesi Sekretaris Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2015-2020)**  
*Associate Degree of Information Technology from Polytechnic (PENS) ITS Surabaya (2008)*

**Riwayat Profesi**

Professional History

- ✈ **Pengendali Subfungsi (09 Juni 2020 – sekarang)**  
*Subfunction Controller (June 9, 2020–present)*
- ✈ **Sekretaris Dekom /Dewas PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Desember 2015 - sekarang)**  
*Secretary of Commissioner Board/Supervisory Board of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (December 2015–present)*
- ✈ **Kepala Subbidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi (22 Oktober 2015 - 08 Juni 2020)**  
*Subdivision Head of Information Technology Planning and Policy (October 22, 2015–June 08, 2020)*
- ✈ **Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan (09 Mei 2014 - 21 Oktober 2015)**  
*Subdivision Head of Planning and Policy (May 9, 2014–October 21, 2015)*

**Rangkap Jabatan**

Concurrent Position

- ✈ **Pengendali Subfungsi**  
*Subfunction Controller (June 9, 2020–present)*
- ✈ **Sekretaris Dekom / Dewas PT Permodalan Nasional Madani (Persero)**  
*Secretary of Commissioner Board/Supervisory Board of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (December 2015–present)*



## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam piagam Komite, di antaranya:

- 1 Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal, serta efektivitas sistem pengendalian internal;
- 2 Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern dan auditor eksternal, serta memberikan rekomendasi terkait penyempurnaan sistem dan pelaksanaan pengendalian manajemen;
- 3 Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- 4 Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas;
- 5 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas, sesuai lingkup tugas dan kewajiban dan regulasi yang berlaku.

## DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF AUDIT COMMITTEE

The duties and responsibilities of the Audit Committee have been regulated in the committee charter. They are:

- 1 to assist the Supervisory Board in ensuring effective delivery of external and internal auditor duties and the effectiveness of the internal control system;
- 2 to assess the process and results of the audit conducted by the Internal Audit or external auditor and recommend improvement on control system management and its implementation;
- 3 to ensure that satisfactory review procedures are in place for every information released by the company;
- 4 to identify matters that require the attention of the Supervisory Board;
- 5 to perform other tasks delegated by the Supervisory Board within their scope of duties and obligations based on the applicable regulations.

## PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI

Komite Audit mengikuti peningkatan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

## COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Audit Committee participated in competency development programs, such as seminars, workshops, or other activities to support duty completion.

### ○ Peningkatan Kompetensi Komite Audit 2022 *Audit Committee Competency Development in 2022*

NO	KEGIATAN <i>Activity</i>	NAMA <i>Name</i>	WAKTU PELAKSANAAN <i>Date</i>
1	Workshop Digital Transformation & New Emerging Risk/ <i>Digital Transformation &amp; New Emerging Risk Workshop</i>	Sdri. Ika Setyawati (Anggota Komite Audit)/ <i>Ika Setyawati (Member of the Audit Committee)</i>	30 Mei 2022 <i>May 30, 2022</i>
2	Workshop Cyber Security/Cyber Security Workshop	Sdri. Ika Setyawati (Anggota Komite Audit)/ <i>Ika Setyawati (Member of the Audit Committee)</i>	6 Juni 2022 <i>June 6, 2022</i>
3	Workshop Data Protection & Managing Third Party Risk/ <i>Workshop on Data Protection and Managing Third Party Risk</i>	Sdri. Ika Setyawati (Anggota Komite Audit)/ <i>Ika Setyawati (Member of the Audit Committee)</i>	13 Juni 2022 <i>June 13, 2022</i>
4	Webinar: Konsep dan Implementasi ICOFR di Entitas Induk dan Anak/ <i>Webinar on ICOFR Concept and Its Implementation in Parent Companies and Their Subsidiaries</i>	Sdri. Aria Farah Mita (Anggota Komite Audit)/ <i>Aria Farah Mita (Member of the Audit Committee)</i> Sdri. Ika Setyawati (Anggota Komite Audit)/ <i>Ika Setyawati (Member of the Audit Committee)</i>	1 Agustus 2022 <i>August 1, 2022</i>



## RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya melalui rapat komite. Pelaksanaan rapat komite disesuaikan dengan kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit. Pada periode pelaporan, Komite Audit telah melaksanakan 17 kali rapat, dengan agenda rapat di antaranya pembahasan kinerja *cashflow* dan persiapan implementasi *host to host*, evaluasi realisasi program kerja dan pengelolaan *cashflow*, pembahasan *update* progres audit 2021 Perum LPPNPI, dan pembahasan tindak lanjut temuan BPK dan progres Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Terdapat perbedaan jumlah wajib rapat yang dihadiri oleh masing-masing Komite Audit, dikarenakan menyesuaikan perubahan komposisi komite.

## AUDIT COMMITTEE MEETING

The Audit Committee coordinates its duties and responsibilities through committee meetings. The committee meetings are held when necessary, as outlined in the Audit Committee Charter. During the reporting period, the Audit Committee held 17 meetings with the meeting agenda to discuss cash flow performance and preparation of host to host, evaluation of work program realization and cash flow management, the progress update of the 2021 Perum LPPNPI audit, and the follow-up of Supreme Audit Agency findings and progress of the Annual Audit Program. There are differences in the number of mandatory meetings attended by each Audit Committee due to adjustments to the committee's composition.

### Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Recap and Attendance Rate of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat / Total Mandatory Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidak hadiran Total Absence	(%)
Daryatmo	Ketua Komite Audit Chair of the Audit Committee	17	17	0	100
Endra Gunawan	Wakil Ketua Komite Audit Vice-chair of the Audit Committee	17	17	0	100
Aria Farah Mita	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	17	17	0	100
Ika Setiawati	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	17	17	0	100

## PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

Sepanjang periode pelaporan, Komite Audit melaksanakan penugasan Dewan Pengawas, kegiatan rutin, dan kegiatan non rutin berupa pendampingan pelaksanaan audit Kantor Cabang dan Cabang Pembantu atau Unit Pelayanan, dengan uraian singkat sebagai berikut:

## THE ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

During the reporting period, the Audit Committee completed assignments from the Supervisory Board and performed routine and non-routine activities by assisting audits at Branch Offices and Sub-Branch Offices or Service Units. The following is a brief description of Audit Committee activities.

1 Pembahasan kesesuaian perhitungan PSAK 24 dan PKB dalam proses audit laporan keuangan tahun 2021 oleh KAP;

1 Discussion on the compatibility of SFAS 24 and CLA calculations in the 2021 financial statements audit conducted by PAF;





2 Pembahasan tindak lanjut temuan BPK dan progres program kerja pengawasan tahunan (PKPT);

3 Pembahasan penyelesaian audit laporan keuangan tahun buku 2021 dan *update* pengelolaan program kerja Direktorat Keuangan;

4 Rapat kerja Komite Audit dan Satuan Pengawasan Intern Perum LPPNPI.

2 Discussion on the follow-up of Supreme Audit Agency findings and the progress of the Annual Audit Program;

3 Discussion on the completion of the 2021 financial statements audit and updates on the management of the Directorate of Finance's work program;

4 Working meeting of the Audit Committee and Internal Auditor of Perum LPPNPI.

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

*Risk Management and GCG Committee*



Komite Manajemen Risiko dan GCG mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dengan memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Komite Manajemen Risiko dan GCG beranggotakan 3 (tiga) orang, termasuk seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Pengawas. Masa jabatan Ketua Komite Manajemen Risiko dan GCG mengikuti masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas. Sementara masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko dan GCG berpedoman pada Piagam/Charter Komite Manajemen Risiko dan GCG yang disahkan oleh Ketua Dewan Pengawas pada 8 Mei 2019. Piagam tersebut mengatur hal-hal mendasar terkait Komite Manajemen Risiko dan GCG, antara lain Pembentukan, Organisasi dan Masa Jabatan; Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan; serta Rapat, Pelaporan, dan Anggaran.

*The Risk Management and GCG Committee is established to assist the duties of the Supervisory Board by ensuring the effectiveness of risk management and the implementation of good corporate governance. The Risk Management and GCG Committee consists of 3 (three) members, including a Chairperson who is a member of the Supervisory Board. The Chair of Risk Management & GCG Committee has the same tenure as the Supervisory Board. However, the Risk Management & GCG Committee members' tenure lasts for 3 (three) years and can be extended for another term for 2 (two) years, without prejudice to the right of the Supervisory Board to terminate it at any time.*

*In conducting its tasks and duties, the Risk Management and GCG Committee is guided by the Risk Management and GCG Committee Charter which was set forth by the Chair of the Supervisory Board on May 8, 2019. This charter regulates basic matters related to the Risk Management & GCG Committee, including the legal basis as well as its vision and mission; establishment, organization and tenure; duties, responsibilities, and authorities; and meetings, reports, and the budget plan.*



## INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

Komite Manajemen Risiko dan GCG bertindak secara independen dan bebas dari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas pelaksanaan tugasnya. Komite Manajemen Risiko dan GCG secara independen memberikan pandangan, arahan dan masukan mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen, yang terkait dengan manajemen risiko dan GCG. Seluruh anggota komite menjunjung tinggi prinsip GCG dengan bersikap objektif, profesional, dan independen. Pada periode pelaporan, tidak terdapat perubahan komposisi Komite Manajemen Risiko dan GCG.

## RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE INDEPENDENCE

The Risk Management and GCG Committee acts independently and is free from conflicts of interest that may affect the objectivity of conducting its duties. The Risk Management and GCG Committee independently provides opinions, guidance, and inputs on the improvement of the management control system, which is related to risk management and GCG. All committee members uphold the principles of GCG by being objective, professional, and independent. During the reporting period, there was no change in the composition of the Risk Management and GCG Committee.

### Komposisi Komite Manajemen Risiko dan GCG per 31 Desember 2022

The Composition of Risk Management & GCG Committee as of December 31, 2022

NAMA Name	JABATAN Position	DASAR PENGANGKATAN Legal Basis	MASA JABATAN Tenure	PERIODE Term of Office
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani	Ketua Chair	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP- 04/DW/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 Supervisory Board Decree No. KEP-04/DW/V/2022, dated May 31, 2022	31 Mei 2022 s.d 30 Mei 2024 May 31, 2022 to May 30, 2024	Ke-2 Second
Amran Alinuddin	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP- 04/DW/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 Supervisory Board Decree No. KEP-04/DW/V/2022, dated May 31, 2022	31 Mei 2022 s.d 30 Mei 2024 May 31, 2022 to May 30, 2024	Ke-2 Second
Sri Yuwono Hari Sarjito	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP- 04/DW/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 Supervisory Board Decree No. KEP-04/DW/V/2022, dated May 31, 2022	31 Mei 2022 s.d 30 Mei 2024 May 31, 2022 to May 30, 2024	Ke-2 Second

## PROFIL KOMITE MANAJEMEN RISIKO & GCG

Profil Ketua Komite Manajemen Risiko dan GCG yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas, yakni Tri Wahyuningsih Retno Mulyani telah disampaikan pada bagian Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

## PROFILE OF RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE

The Chairperson of the Risk Management and GCG Committee, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, also serves as a member of the Supervisory Board. Her profile has been disclosed in the Company Profile section of this Annual Report.



**AMRAN ALINUDDIN**

Anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG  
Member of Risk Management & GCG Committee



<b>Kewarganegaraan</b> Nationality	WNI Indonesian
<b>Usia</b> Age	58 tahun 58 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Tangerang, Banten, Indonesia Tangerang, Banten, Indonesia

**Pendidikan**

Education

- ✈ **Master (S2) jurusan Risk Management dari University of New South Wales Sydney (2003)**  
*Master's degree in Risk Management at University of New South Wales Sydney (2003)*
- ✈ **Sarjana (S1) jurusan Pendidikan dari IAIN Pekanbaru (1993)**  
*Bachelor's degree in Education at IAIN Pekanbaru (1993)*

**Riwayat Profesi**

Professional History

Beliau berkarier di PT Angkasa Pura II, dengan pengalaman jabatan Communication Officer Directorate General of Air Communication (1987-1994), Air Traffic Controller and Flight Service Officer (1994-2004), Junior Staff Planning & IT Department (2004-2006), Assistant Manager of Statistic, Research, and Development (2006- 2007), Coordinator of Risk Management (2007-2008), Master Plan and Corporate Plan Manager (2008-2009), Vice President of Aviation Business (2009-2012), General Manager (2012-2013), dan Adviser to the Board of Directors AirNav Indonesia (2015-2016). Selain itu, beliau juga bertugas pada Tim Gugus Peningkatan Pelayanan Navigasi Penerbangan AirNav Indonesia (2016-saat ini) dan Pro-Staff PPM Manajemen (2018-saat ini).

*During his career at PT Angkasa Pura II, he held the position of Communication Officer of Directorate General of Air Communication (1987- 1994), Air Traffic Controller and Flight Service Officer (1994-2004), Junior Staff Planning & IT Department (2004-2006), Assistant Manager of Statistics, Research, and Development (2006- 2007), Coordinator of Risk Management (2007- 2008), Master Plan and Corporate Plan Manager (2008-2009), Vice President of Aviation Business (2009-2012), General Manager (2012-2013), and Adviser to the Board of Directors of AirNav Indonesia (2015-2016). He also has been serving at Task Force Team for Air Navigation Service Improvement (2016-present) and Pro-Staff PPM Management (2018-present) in AirNav Indonesia.*

**Rangkap Jabatan**

Concurrent Position

- ✈ **Tim Gugus Peningkatan Pelayanan Navigasi Penerbangan AirNav Indonesia**  
*Task Force Team for Air Navigation Service Improvement in AirNav Indonesia*
- ✈ **Pro-Staff PPM Manajemen AirNav Indonesia**  
*Pro-Staff PPM Management in AirNav Indonesia*





**SRI YUWONO HARI SARJITO**

Anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG  
Member of Risk Management & GCG Committee



<b>Kewarganegaraan</b> Nationality	WNI Indonesian
<b>Usia</b> Age	47 tahun 47 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Tangerang, Banten, Indonesia Tangerang, Banten, Indonesia

**Pendidikan**

Education

- ✈ **Master of Economic Development, Magister (S2) Ekonomika Pembangunan dari Universitas Gajah Mada (2009)**  
*Master of Economic Development at Gadjah Mada University (2009)*
- ✈ **Diploma (D4) Akuntansi bidang/jurusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2001)**  
*Associate Degree in Accounting at the State College of Accountancy (2001)*

**Riwayat Profesi**

Professional History

Beliau berkarier di Kementerian Keuangan sejak tahun 1996 hingga sekarang. Pengalaman kerja lain sebagai anggota Komite Audit sekaligus Komite Manajemen Risiko PT Sarana the Multigriya Finansial (2012-2016) dan Sekretaris Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial (2015).

*He has had a long career in the Ministry of Finance since 1996. Besides that, he also has experience as the members of the Audit Committee and the Risk Management Committee of PT Sarana Multigriya Finansial (2012-2016), Secretary to the Commissioner of PT Sarana Multigriya Finansial (2015).*

**Rangkap Jabatan**

Concurrent Position

Kementerian Keuangan  
*The Ministry of Finance*



## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

Komite Manajemen Risiko dan GCG memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam piagam Komite, di antaranya:

- 1 Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya yang terkait dengan Manajemen Risiko dan GCG;
- 2 Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memperhatikan risiko dan GCG terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
- 3 Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya;
- 4 Membantu Dewan Pengawas memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik;
- 5 Melakukan penelaahan atas informasi mengenai perusahaan, investasi perusahaan, RJPP dan RKAP terkait manajemen risiko dan GCG;
- 6 Melaksanakan tugas khusus sesuai penugasan Dewan Pengawas.

## TASKS AND DUTIES OF RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE

The Risk Management and GCG Committee has tasks and duties that have been regulated in the Committee charter, including:

- 1 Recommend improvement on the management control system and its application related to Risk Management & GCG;
- 2 Ensure that satisfactory review procedures are in place for every information that is released by the Company;
- 3 Identify matters that require the attention of the Supervisory Board and their relevant tasks;
- 4 Assist the Supervisory Board to ensure the effectiveness of risk management and good corporate governance;
- 5 Review information about the company, company investments, Company Long-term Plan, and Company WBP related to risk management and GCG;
- 6 Conduct other tasks assigned by the Supervisory Board.

## PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI

Komite Manajemen Risiko dan GCG mengikuti peningkatan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

## COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Risk Management and GCG Committee participates in competency development program, such as seminars, workshops, or other activities to support its job execution.

### ○ Peningkatan Kompetensi Komite Manajemen Risiko dan GCG 2022

*Competency Development for the Risk Management and GCG Committee in 2022*

NO	KEGIATAN <i>Activity</i>	NAMA <i>Name</i>	WAKTU PELAKSANAAN <i>Date</i>
1	Seminar and Master Class Sailing in The Multiverse of Uncertainty <i>Seminar and Master Class on Sailing in The Multiverse of Uncertainty</i>	Sdr. Amran (Anggota Komite Manris &GCG) <i>Amran (Member of Risk Management &amp; GCG Committee)</i>	25-26 Agustus 2022 <i>August 25-26, 2022</i>



## RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

Komite Manajemen Risiko dan GCG melakukan koordinasi program kerja melalui rapat komite yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan, sesuai kebutuhan Komite, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko dan GCG. Rapat Komite dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dengan materi rapat, dengan persetujuan Dewan Pengawas dan sepengetahuan anggota Direksi terkait. Pada periode pelaporan, Komite Manajemen Risiko dan GCG telah melaksanakan 2 kali rapat komite. Adapun agenda rapat antara lain laporan bulanan monev program manajemen risiko dan GCG, *progress pending matters* tahun 2021, temuan BPK RI tahun 2019 - 2020, dan wawancara kandidat Top Talent BoD-1/Selected Talent Perum LPPNPI tahun 2022.

## RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE MEETING

The Risk Management and GCG Committee coordinates work programs through committee meetings which are held at least once a month, according to the needs of the Committee, as stipulated in the Risk Management and GCG Committee Charter. Committee meetings may invite other parties related to the meeting agenda, with the approval of the Supervisory Board and the knowledge of the relevant members of the Board of Directors. During the reporting period, the Risk Management and GCG Committee held 2 committee meetings. The meeting agenda includes monthly monitoring and evaluation reports on risk management and GCG programs, pending progress matters for 2021, Finance and Development Supervisory Agency findings for 2019-2020, and interviews for Top Talent BoD-1/Selected Talent candidates for Perum LPPNPI in 2022.

### Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko dan GCG Meeting Recap and Attendance of Risk Management & GCG Committee

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidak hadiran Total Absence	Kehadiran Attendance (%)
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani	Ketua Chair	2	2	0	100
Amran Alinuddin	Anggota Member	2	2	0	100
Sri Yuwono Hari Sarjito	Anggota Member	2	2	0	100

## PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

Komite Manajemen Risiko dan GCG melaksanakan tugas melalui realisasi kegiatan rutin, kegiatan non rutin, dan penugasan Dewan Pengawas lainnya, di antaranya:

- Melakukan reviu atas Laporan Manajemen Risiko Perum LPPNPI tahun 2021;
- Menindaklanjuti arahan Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN RI mengenai mitigasi risiko keselamatan penerbangan Perum LPPNPI;

## THE RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE ACTIVITIES

The Risk Management and GCG Committee conducts its tasks through the realization of routine activities, non-routine activities, and other activities assigned by the Supervisory Board, including:

- Reviewed the 2021 Risk Management Report of Perum LPPNPI;
- Followed up on the directions of the Assistant Deputy for Tourism and Supporting Services of the Ministry of SOEs regarding mitigating flight safety risks of Perum LPPNPI;



3 Memberikan pendapat/saran kepada Dewan Pengawas atas usulan pembentukan Biro Perencanaan dan perubahan struktur organisasi cabang Perum LPPNPI;

4 Menyampaikan usulan kepada Dewan Pengawas untuk menyampaikan saran dan rekomendasi kepada Direksi Perum LPPNPI sebagai tindak lanjut hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Keselamatan bertema *Runway Incursion*;

5 Mengikuti FGD Keselamatan bertema *Runway Incursion*.

3 *Provided opinions/suggestions to the Supervisory Board on the proposal to form a Planning Bureau and the changes in the organizational structure of Perum LPPNPI branches;*

4 *Suggested the Supervisory Board provide suggestions and recommendations for the Board of Directors of Perum LPPNPI as a follow-up to the Safety Focus Group Discussion (FGD) with the theme "Runway Incursion";*

5 *Participated in a Safety FGD with the theme "Runway Incursion".*

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

*Nomination and Remuneration Committee*



Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas terkait fungsi nominasi dan remunerasi. KNR memastikan proses nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta bidang manajemen SDM dilaksanakan secara efektif, transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Terkait fungsi nominasi, KNR sekaligus berperan sebagai Talent Committee untuk eksekutif BUMN (Direksi dan satu tingkat di bawah Direksi).

KNR beranggotakan 6 orang, termasuk 1 Ketua, 1 Sekretaris, 3 anggota, dan 1 staf yang seluruhnya adalah anggota Dewan Pengawas dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Pengawas. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, KNR berpedoman pada Piagam/*Charter* Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan oleh Ketua Dewan Pengawas pada 20 Juni 2020. Piagam tersebut mengatur hal-hal mendasar terkait KNR, antara lain Pembentukan, Organisasi dan Masa Jabatan; Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan; serta Rapat, Pelaporan, dan Anggaran.

*The Nomination and Remuneration Committee is established to support the implementation of the Supervisory Board's tasks related to the nomination and remuneration function. The Nomination and Remuneration Committee ensures that the nomination and remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board members as well as the HR management are conducted effectively, transparently, professionally, and responsibly. Regarding the nomination function, the Nomination and Remuneration Committee also acts as a Talent Committee to the SOE executives (Board of Directors and one level below the Board of Directors).*

*The Nomination and Remuneration Committee consists of 6 persons, including 1 chairperson, 1 secretary, 3 members, and 1 staff all of whom are members of the Supervisory Board. They have same tenure as the Supervisory Board. In conducting its tasks and duties, the Committee is guided by the Nomination and Remuneration Committee Charter which was set forth by the Chair of the Supervisory Board on June 20, 2020. The charter regulates basic matters related to the Committee, including Formation, Organization and Tenure; Tasks, Duties and Authorities; and Meetings, Reporting, and Budgets.*



## INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan representasi dari Pemilik Modal, sebagaimana ketentuan PP No. 77 tahun 2012. Meskipun demikian, KNR bertindak secara independen dan bebas dari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas pelaksanaan tugasnya. Seluruh anggota komite menjunjung tinggi prinsip GCG dengan bersikap objektif, profesional, dan independen. Pada periode pelaporan, terdapat perubahan komposisi KNR yang disebabkan perubahan komposisi Dewan Pengawas.

## NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE INDEPENDENCE

The Nomination and Remuneration Committee is a representative of the Shareholders, as stipulated in the Government Regulation No. 77 of 2012. Nonetheless, the Committee acts independently and is free from conflicts of interest that could affect the objectivity of conducting its duties. All committee members uphold the principles of GCG by being objective, professional, and independent. During the reporting period, there was a change in the composition of the Committee due to a change in the composition of the Supervisory Board.

### Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2022 Composition of Nomination and Remuneration Committee as per December 31, 2022

NAMA Name	JABATAN Position	DASAR PENGANGKATAN Legal Basis	MASA JABATAN Tenure
Novie Riyanto R.	Ketua Chair	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-02/ DW/IV/2020 tanggal 20 Juni 2020/ Supervisory Board Decree No. KEP-02/DW/IV/2020, dated June 20, 2020	Mengikuti masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Based on the tenure as a Member of the Supervisory Board
Sigit Hani Hadiyanto	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-02/ DW/IV/2020 tanggal 20 Juni 2020 (anggota Komite adalah seluruh anggota Dewan Pengawas)/Supervisory Board Decree No. KEP-02/ DW/IV/2020, dated June 20, 2020 (members of the committee are all members of the Supervisory Board)	
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-02/ DW/IV/2020 tanggal 20 Juni 2020/Supervisory Board Decree No. KEP-02/DW/IV/2020, dated June 20, 2020	
Daryatmo	Sekretaris Secretary	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-02/ DW/IV/2020 tanggal 20 Juni 2020/Supervisory Board Decree No. KEP-02/DW/IV/2020, dated June 20, 2020	
Endra Gunawan	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-02/ DW/IV/2020 tanggal 20 Juni 2020 (anggota Komite adalah seluruh anggota Dewan Pengawas)/Supervisory Board Decree No. KEP-02/ DW/IV/2020, dated June 20, 2020 (members of the committee are all members of the Supervisory Board)	
Okta Kurnia Putra	Staf Staff	Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-05/DW/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Pengangkatan Staf Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas Perum LPPNPI Supervisory Board Decree No. KEP-05/DW/VII/2022, dated July 13, 2022, concerning Personnel Appointment of Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Perum LPPNPI	

## PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi telah disampaikan pada bagian Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

## PROFILE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The profile of Nomination And Remuneration Committee has been disclosed in the Company Profile section of this Annual Report.





## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam piagam Komite, di antaranya:

- 1 Memberikan masukan, nasihat, rekomendasi, atau saran atas permohonan persetujuan dari Direksi atas kegiatan terkait dengan fungsi nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas, meliputi:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terkait komposisi anggota, usulan calon, kebijakan dan kriteria proses nominasi, serta kebijakan evaluasi kinerja.
  - b. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
  - c. Melaksanakan *talent classification* untuk mendapatkan *top talent* BUMN yang akan diusulkan kepada Pemilik Modal.
- 2 Memberikan masukan, nasihat, rekomendasi, atau saran atas permohonan persetujuan dari Direksi atas kegiatan terkait dengan fungsi remunerasi, meliputi struktur, kebijakan, besaran remunerasi, evaluasi penilaian kinerja dengan kesesuaiannya terhadap besaran remunerasi yang diterima anggota Direksi dan dewan pengawas.
- 3 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

## PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI

Kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti anggota KNR pada periode pelaporan telah disampaikan pada bagian peningkatan kompetensi Dewan Pengawas dalam Bab Tata Kelola Perusahaan Laporan Tahunan ini.

## RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

KNR melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, sesuai kebutuhan Komite, sebagaimana diatur dalam piagam Komite. Pada periode pelaporan, KNR telah melaksanakan 4 kali rapat, dengan agenda rapat di antaranya wawancara hingga pembahasan hasil penilaian kandidat *top talent* BoD-1/*Selected Talent* Perum LPPNPI tahun 2022, penilaian individu Direksi Perum LPPNPI, dan pembahasan usulan pembentukan Biro Perencanaan dan perubahan struktur organisasi cabang.

## TASKS AND DUTIES OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee has tasks and duties that have been regulated in the Committee charter, including:

- 1 Provide inputs, advice, recommendations, or suggestions for approval from the Board of Directors on activities related to the nomination function of nominating members of the Board of Directors and/or Supervisory Board, including:
  - a. Provide recommendations to the Supervisory Board on the composition of members, proposed candidates, policies, and criteria for the nomination, as well as performance evaluation policies.
  - b. Conduct performance appraisal of the Board of Directors and the Supervisory Board members.
  - c. Conduct talent classification to get SOE top talent to be proposed to the Shareholders.
- 2 Provide inputs, advice, recommendations, or suggestions for approval from the Board of Directors on activities related to the remuneration function, including structure, policies, remuneration amounts, evaluation of performance appraisal with conformity to the amount of remuneration received by the Board of Directors and the Supervisory Board members.
- 3 Conduct other tasks assigned by the Chair of Supervisory Board.

## COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Competency development activities participated in by Nomination and Remuneration Committee (KNR) members during the reporting period have been presented in the competency improvement section of the Supervisory Board in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

## MEETINGS OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee holds meetings at least 1 (once) in 3 (three) months depending on the needs of the Committee as stipulated in the Committee charter. During the reporting period, the Nomination and Remuneration Committee held 4 (four) meetings with agenda including interviews to discussion of the results of the 2022 top talent BoD-1/*Selected Talent* candidate of Perum LPPNPI, individual assessment of the Board of Directors of Perum LPPNPI, and the discussion of proposals for the establishment of a Planning Bureau as well as changes to branch organizational structure.



## Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Recapitulation and Attendance Level of KNR and Remuneration

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Absence	Kehadiran Attendance (%)
Novie Riyanto R.	Ketua Chair of Supervisory Board	4	4	0	100
Daryatmo	Anggota Member of Supervisory Board	4	4	0	100
Elfi Amir	Anggota Member of Supervisory Board	4	4	0	100
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani	Anggota Member of Supervisory Board	4	4	0	100
Anindita Eka Wibisono* <sup>1</sup>	Anggota Member of Supervisory Board	3	3	0	100
Endra Gunawan* <sup>2</sup>	Anggota Member of Supervisory Board	1	1	0	100

**Keterangan :**

\*1 Menjabat sampai 17 Mei 2022

\*2 Menjabat mulai 17 Mei 2022

**Remarks :**

\*1 Serving period until May 17, 2022

\*2 Serving period from May 17, 2022

## PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas melalui realisasi kegiatan rutin maupun kegiatan non rutin sepanjang tahun 2022, di antaranya:

- Melakukan *monitoring* realisasi program kerja KNR tahun 2021 dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan KNR, baik triwulan maupun tahunan;
- Memberikan rekomendasi serta melakukan wawancara calon Sekretaris Dewan Pengawas dan anggota Komite pendukung Dewan Pengawas;
- Memberikan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas Tahun 2022;
- Melakukan validasi atas daftar Top Talent BUMN (BOD-1);
- Mengikuti rapat-rapat pembahasan internal Dewan Pengawas dan rapat Dewan Pengawas-Direksi dengan menyampaikan kajian dan masukan kepada Dewan Pengawas serta rekomendasi kepada Direksi;
- Melakukan kunjungan, rapat dan pertemuan untuk membahas restrukturisasi organisasi, tata kelola, efisiensi biaya SDM, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

## IMPLEMENTATION AND REMUNERATION OF COMMITTEE ACTIVITIES

The Nomination and Remuneration Committee performed several work programs (routine and non-routine) as follows:

- Monitored the realization of the 2021 KNR work program and submitted reports on the implementation of KNR activities, both quarterly and annually;
- Provided recommendations and conducted candidates interviews for the Secretary of the Supervisory Board and members of the Committees supporting the Supervisory Board;
- Provided recommendations for remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2022;
- Validated the Top Talent SOE (BOD-1);
- Participated in internal discussion meetings of the Supervisory Board and Board of Directors Supervisory meetings by submitting studies and input to the Supervisory Board as well as recommendations to the Board of Directors;
- Conducted visits, meetings, and gatherings to discuss organizational restructuring, governance, HR cost efficiency, and settlement of industrial relations disputes.



**Dalam proses suksesi direksi, KNR berperan sebagai Komite Talenta, yakni memberikan rekomendasi *top talent* BUMN (calon Direksi dan jabatan satu tingkat di bawah Direksi) yang memiliki potensi, keahlian dan kompetensi kepemimpinan kepada Menteri BUMN.**

*During the process, KNR serves as a Talents Committee, recommending SOE top talent (candidates for the Board of Directors and positions of one level below the Directors) who have potential, expertise, and leadership competencies to the Minister of SOE.*



**KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI**

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab dalam mempersiapkan regenerasi kepemimpinan untuk periode jabatan berikutnya atau suksesi Direksi. Perencanaan suksesi Direksi sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan Perusahaan, menjaga kualitas kepemimpinan, dan memastikan kesuksesan yang berkelanjutan. Dalam proses suksesi direksi, KNR berperan sebagai Komite Talenta, yakni memberikan rekomendasi *top talent* BUMN (calon Direksi dan jabatan satu tingkat di bawah Direksi) yang memiliki potensi, keahlian dan kompetensi kepemimpinan kepada Menteri BUMN.

Pencalonan dan penetapan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-7/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. KNR merekomendasikan calon Direksi yang berasal dari talenta Perusahaan dan talenta kementerian BUMN, di mana setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan promosi jabatan. Calon Direksi yang telah memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lainnya kemudian diuji kelayakan dan kepatutannya (UKK) oleh tim dan/atau lembaga profesional yang dibentuk dan/atau ditunjuk oleh Menteri BUMN dengan berkordinasi bersama Menteri Teknis. Selanjutnya calon yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan akan dipilih oleh Tim Evaluasi Kementerian BUMN dan ditetapkan melalui mekanisme keputusan Menteri BUMN.

**THE BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY**

*The Nomination and Remuneration Committee is responsible for preparing leadership regeneration for the next term of office or succession of the Board of Directors. Succession planning for the Board of Directors is necessary to increase the resilience of the Company, maintain leadership quality, and ensure sustainable success. During the process, KNR serves as a Talents Committee, recommending SOE top talent (candidates for the Board of Directors and positions of one level below the Directors) who have potential, expertise, and leadership competencies to the Minister of SOE.*

*The nomination and appointment of the Board of Directors refer to the Minister of SOE Regulation No. PER-7/MBU/09/2022 dated September 20, 2022 concerning Amendment to the Minister of SOE Regulation No. PER-11/MBU/07/2021 regarding Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of SOEs. KNR recommends Board of Directors candidates from corporate talents and SOE ministry talents, where each candidate has the same opportunity to get a promotion. Candidates who have fulfilled the formal requirements and other requirements are then tested for fit and proper test (UKK) by a professional team and/or institution formed and/or appointed by the Minister of SOE in coordination with the Technical Minister. Furthermore, candidates who have passed the fit and proper test will be selected by the Evaluation Team of the Ministry of SOE and determined through the Minister of SOE decision mechanism.*



## SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS

Secretariat of Supervisory Board



Sekretariat Dewan Pengawas mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dalam hubungannya dengan fungsi protokoler dan kesekretariatan. Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengawas dengan dibantu staf sekretariat Dewan Pengawas. Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

*The Secretariat of the Supervisory Board supports the implementation of the Supervisory Board's duties in terms of protocol and secretarial functions, which is led by Supervisory Board Secretary and assisted by secretariat staff of the Supervisory Board. The term of office for the Supervisory Board Secretary is a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of the Supervisory Board to dismiss at any time.*

### PEJABAT SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pada periode pelaporan terdapat pergantian Sekretaris Dewan Pengawas, yang disebabkan berakhirnya periode jabatan serta promosi jabatan Sekretaris Dewan Pengawas sebelumnya.

### OFFICIAL OF SUPERVISORY BOARD SECRETARY

*During the reporting period, there have been changes in the Supervisory Board Secretary due to the end of the term of office and the promotion of the previous Supervisory Board Secretary.*

### Sekretaris Dewan Pengawas 2022

2022 Supervisory Board Secretary

NAMA Name	DASAR PENGANGKATAN Basis of Appointment	MASA JABATAN Tenure
Okta Kurnia Putra	SK Dewan Pengawas KEP-03/DW/IV/2020 tanggal 27 April 2020 <i>Supervisory Board Decree KEP-03/DW/IV/2020 dated April 27, 2020</i>	27 April 2020 – 1 April 2022 <i>April 27, 2020 – April 1, 2022</i>
Sigit Hani Hadiyanto	SK Dewan Pengawas KEP-02/DW/IV/2022 tanggal 1 April 2022 <i>Supervisory Board Decree KEP-02/DW/IV/2022 dated April 1, 2022</i>	1 April 2022 – 31 Agustus 2022 <i>April 1, 2022 – August 31, 2022</i>
Hendra Ahmad Firdaus	SK Dewan Pengawas KEP-03/DW/IX/2022 tanggal 30 September 2022 <i>Supervisory Board Decree KEP-03/DW/IX/2022 dated September 30, 2022</i>	30 September 2022- 29 September 2025 <i>September 30, 2022- September 29, 2025</i>



## PROFIL SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

### PROFILE OF SUPERVISORY BOARD SECRETARY



#### **HENDRA AHMAD FIRDAUS**

Sekretaris Dewan Pengawas  
Supervisory Board Secretary



■ **Kewarganegaraan** WNI  
Nationality Indonesian

■ **Usia** 40 tahun  
Age 40 years old

■ **Domisili** Jakarta  
Domicile

#### **Pendidikan**

Education

S1 Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta  
Bachelor of Geodesy Engineering Gadjah Mada University  
Yogyakarta

#### **Riwayat Profesi**

Professional History

✈️ PT Tigenco Graha Persada / Surveyor 01 Januari 2007 –  
31 Januari 2009

*PT Tigenco Graha Persada/Surveyor January 1, 2007–  
January 31, 2009*

✈️ Kementerian Perhubungan / Staf PNS 1 Desember 2009  
– 28 Februari 2013

*Ministry of Transportation/Government Civil Servant  
December 1, 2009–February 28, 2013*

✈️ Kementerian Perhubungan/ Analis Kebijakan dan  
Program Standarisasi Penerbangan 01 Maret 2013 – 30  
November 2016

*Ministry of Transportation/ Analyst of Aviation  
Standardization Policy and Program March 1, 2013–  
November 30, 2016*

✈️ Kementerian Perhubungan / Inspektur Navigasi  
Penerbangan Level IV 1 Desember 2016 – 31 Mei 2020

*Ministry of Transportation/Air Navigation Inspector Level IV  
December 1, 2016–May 31, 2020*

✈️ Kementerian Perhubungan / Inspektur Navigasi  
Penerbangan Level V 1 Juni 2020 – 30 Maret 2021

*Ministry of Transportation/Air Navigation Inspector Level V  
June 1, 2020–March 30, 2021*

✈️ Kementerian Perhubungan / Sub Koordinator Bidang  
Navigasi Penerbangan di Kementerian Perhubungan 1  
Januari 2022 - Sekarang

*Ministry of Transportation/Sub-coordinator for Air  
Navigation at the Ministry of Transportation January 1,  
2022–present*

#### **Rangkap Jabatan**

Concurrent Position

Menjabat sebagai Sub Koordinator Bidang Navigasi  
Penerbangan di Kementerian Perhubungan

*He is serving as Sub-coordinator for Air Navigation at the  
Ministry of Transportation*



## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS

Sekretariat Dewan Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1 Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Pengawas, termasuk menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan terkait dengan Dewan Pengawas;
- 2 Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dan rapat/ pertemuan antara Dewan Pengawas dengan Pemilik modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya, termasuk menyiapkan risalah rapat Dewan Pengawas;
- 3 Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Pengawas dan komite-komite di lingkungan Dewan Pengawas yang berkaitan dengan:
  - a. Pengawasan tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Pengawas.
  - b. Bahan dan materi yang bersifat administrasi mengenai kegiatan laporan pengelolaan Perusahaan.
  - c. Dukungan administrasi serta pemantauan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Pengawas sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan.
- 4 Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite-komite dan tenaga ahli internal Dewan Pengawas untuk keperluan Dewan Pengawas.

## DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF SECRETARIAT OF SUPERVISORY BOARD

Secretariat of Supervisory Board has duties and responsibilities as follows:

- 1 Organize administrative activities within the Supervisory Board, including manage and keep Company documents pertaining to the Supervisory Board;
- 2 Organize the Supervisory Board meeting and meeting/conference between the Supervisory Board, Board of Directors, and other relevant parties, including preparing minutes of the Supervisory Board meetings;
- 3 Provide data/information required by the Supervisory Board and committees within the Supervisory Board related to:
  - a. Monitoring the follow-up to the Supervisory Board decision, recommendation, and directive.
  - b. Administrative materials concerning Board of Directors report on Company management.
  - c. Administrative support and monitoring of issues that require the approval or recommendation of the Supervisory Board related to the Company management by the Board of Directors.
- 4 Compile technical data from the Supervisory Board committees and internal experts as required by the Supervisory Board.



## PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS

Sekretariat Dewan Pengawas melaksanakan fungsi kesekretariatan melalui kegiatan rutin dan non rutin, meliputi:

- 1 Menyiapkan dan mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan Dewan Pengawas dan Komite Dewan Pengawas dengan target penyelesaian disesuaikan arahan dan kebutuhan Dewan Pengawas dan Komite Dewan Pengawas, di antaranya:
  - a. Menyiapkan bahan rapat;
  - b. Menyiapkan surat-surat Dewan Pengawas dan dokumentasi lainnya yang akan disampaikan kepada Pemilik Modal, Direksi, Regulator, dan Rapat Pembahasan Bersama (RPB);
  - c. Menyiapkan dukungan kegiatan perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan.
  - d. Penyiapan dukungan kegiatan pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas dan Komite Dewan Pengawas.
- 2 Penyiapan risalah rapat internal Dewan Pengawas dan risalah rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi yang wajib disampaikan kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah tanggal pelaksanaan rapat.
- 3 Peningkatan kompetensi pengetahuan personel Sekretariat Dewan Pengawas melalui seminar dan pelatihan.

## IMPLEMENTATION OF SECRETARIAT OF SUPERVISORY BOARD ACTIVITIES

The Secretariat of Supervisory Board carries out secretarial functions through routine and non-routine activities, including:

- 1 Prepare and support the implementation of all activities of the Supervisory Board and its Committees with completion targets based on the directions and needs of the Supervisory Board and its Committees, including:
  - a. Organizing meeting materials;
  - b. Organizing Supervisory Board letters and other documentation to be submitted to Shareholders, Directors, Regulators, and Joint Discussion Meetings (RPB);
  - c. Organizing support for business trips, education, and training activities.
  - d. Preparing support for the education and training of the Supervisory Board and Supervisory Board Committees.
- 2 Prepare the minutes of internal meetings of the Supervisory Board as well as the joint meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors which must be submitted to the Supervisory Board no later than three working days after the date of the meeting.
- 3 Enrich the knowledge of the Secretariat of Supervisory Board's personnel through seminars and training.



## Organ Pendukung Direksi Board of Directors Supporting Organs

Direksi menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan dengan didukung oleh organ Sekretaris Perusahaan, Biro Pengelolaan Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko dan GCG (per 1 September 2022, menjadi Biro Perencanaan); Biro Hukum, Biro Pengadaan, dan Satuan Pengawasan Intern, dengan pertanggungjawaban langsung kepada Direktur Utama. Pengangkatan dan pemberhentian organ berada di bawah kewenangan Direktur Utama, sesuai peraturan dan mekanisme internal, dengan persetujuan Dewan Pengawas. Struktur organisasi organ pendukung Direksi diatur dalam Peraturan Direksi No.PER.009/LPPNPI/IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Perum LPPNPI Kantor Pusat.

The Board of Directors carries out the management function of the Company with the support of the Corporate Secretary organs, Bureau of Corporate Performance, Risk Management, and GCG (as per September 1, 2022, become Planning Bureau); Legal Bureau, Procurement Bureau, and Internal Control Unit, with direct accountability to the President Director. The appointment and dismissal of organs is under the authority of the President Director based on internal regulations and mechanisms as well as the approval of the Supervisory Board. The organizational structure of the supporting organs of the Board of Directors is regulated in Directors Regulation No. 009/LPPNPI/IX/2022 dated September 1, 2022 concerning Organization and Administration of Perum LPPNPI Head Office.



## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary



Sekretaris Perusahaan mendukung efektivitas kinerja Direksi dalam kaitannya dengan fungsi kesekretariatan. Sekretaris Perusahaan juga berperan sebagai penghubung (*liaison officer*), yakni menyampaikan keterbukaan informasi Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, serta membangun hubungan baik Perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan.

*The Corporate Secretary supports the effectiveness of the performance of the Board of Directors in relation to its secretarial functions. It also acts as a liaison officer, disclosing Company information in accordance with corporate governance principles as well as building good relations between the Company and all stakeholders.*

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan telah diatur dalam *Board Manual AirNav Indonesia*, di antaranya:

- 1 Menghadiri rapat Direksi dan membuat risalah rapat;
- 2 Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Rapat Pembahasan Bersama (RPB);
- 3 Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- 4 Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan- laporan/kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar;
- 5 Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perum;
- 6 Memperbaharui Daftar Khusus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; dan
- 7 Menyelenggarakan rapat-rapat dalam lingkungan Direksi.

### DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY

*The AirNav Indonesia Board Manual regulates the tasks and duties of the Corporate Secretary, including:*

- 1 *Attending Board of Directors meetings and making minutes of meetings;*
- 2 *Being responsible for organizing a Shareholder Meeting;*
- 3 *Providing the information needed by the Board of Directors and Supervisory Board periodically and/or on request;*
- 4 *Preparing necessary materials for reports/routine activities of the Board of Directors to be submitted to external parties;*
- 5 *Preparing the necessary materials on matters regarding Perum's management, which requires the Board of Directors' decision;*
- 6 *Updating the Special List at least once a year; and*
- 7 *Holding meetings within the Board of Directors,*

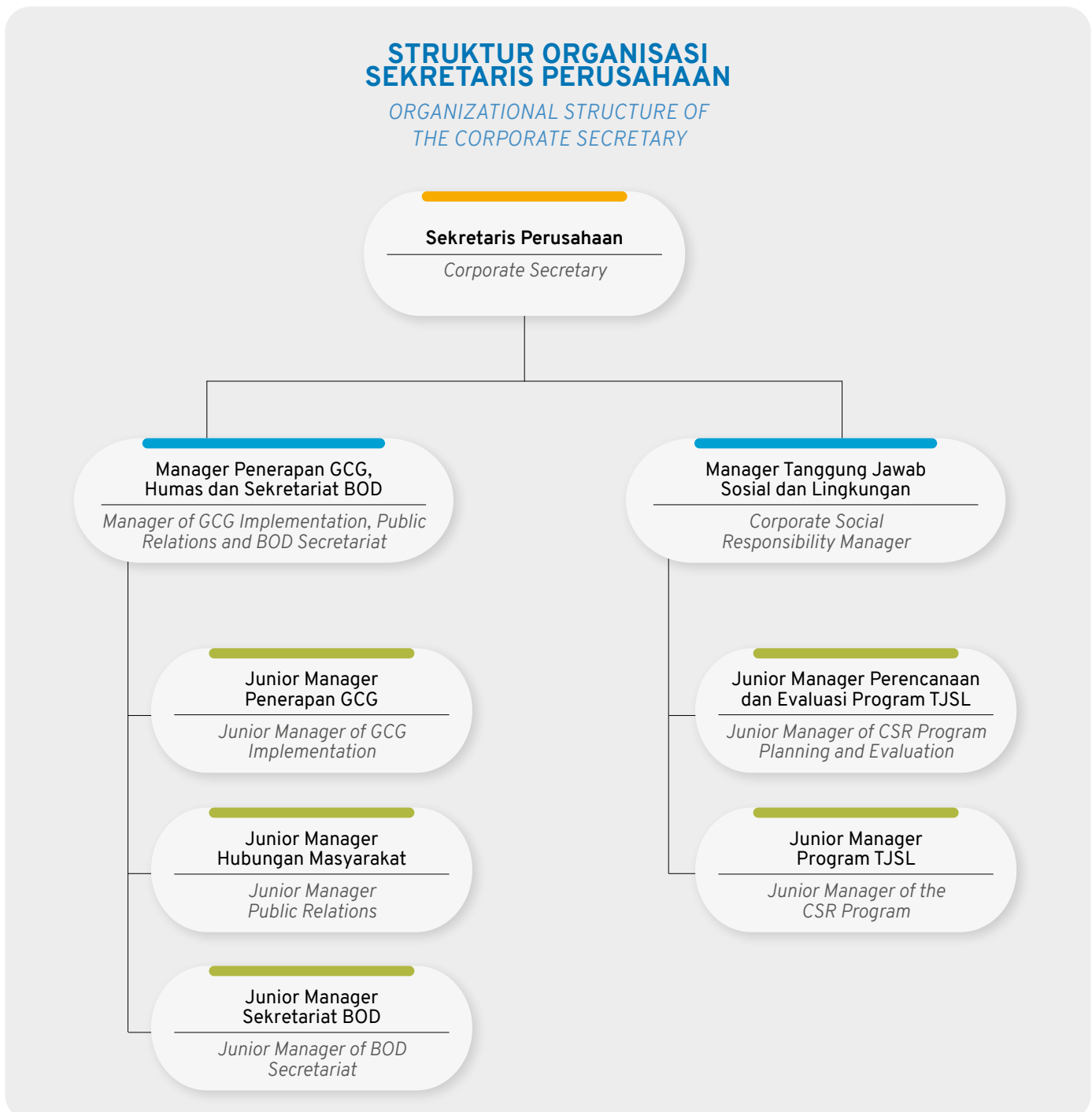


## STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Organ Sekretaris Perusahaan dipimpin oleh Sekretaris Perusahaan, dengan dibantu Manager, Junior Manager, Staf Administrasi, dan Sekretaris Direksi yang secara keseluruhan berjumlah 37 orang. Sekretaris Perusahaan memiliki 4 fungsi yakni Penerapan GCG, Humas, Sekretariat BOD, dan Protokoler serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menangani kemitraan dan partisipasi serta relasi komunitas.

## ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary organ is led by the Corporate Secretary and assisted by Managers, Junior Managers, Administrative Staff, and Board of Directors Secretary, totaling 37 people. The Corporate Secretary has 4 functions namely GCG Implementation, Public Relations, BOD Secretariat, and Protocol as well as Social and Environmental Responsibility which handles partnerships and participation as well as community relations.



## PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

### PROFILE OF THE CORPORATE SECRETARY



**ROSEDI**  
Sekretaris Perusahaan  
Corporate Secretary



<b>Kewarganegaraan</b> Nationality	WNI Indonesian
<b>Usia</b> Age	51 tahun 51 years old
<b>Domisili</b> Domicile	Tangerang, Banten Tangerang, Banten
<b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Legal Basis of Appointment	Keputusan Direksi No. KEP.5622/U/LPPNPI/PER.08/XI/ 2019 tanggal 26 November 2019 Board of Directors Decree No. KEP.5622/U/LPPNPI/PER.08/XI/ 2019 dated November 26, 2019

#### Pendidikan

Education

- Magister (S2) Administrasi Publik dari STIAM I (2015)  
Master's Degree in Public Administration from STIAM I (2015)
- Sarjana (S1) Administrasi Publik, STIA - LAN (2008)  
Bachelor's Degree in Public Administration, STIA - LAN (2008)
- Diploma IV (D4) Ahli Lalu Lintas Udara dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) (2009)  
Associate Degree (D4) in Air Traffic Expert from Indonesian Civil Aviation Institute (STPI) (2009)

#### Sertifikasi Profesi

Professional Certification

- Workshop on ERM, Risk Based Decision Making and Tone at the Top-Perum LPPNPI (2019)
- Preparation for Executive Talent Course - Perum LPPNPI (2020)

#### Riwayat Profesi

Professional History

Bergabung di AirNav Indonesia sejak 1 Oktober 2013. Sebelum menjabat Sekretaris Perusahaan, Beliau menjabat sebagai General Manager (GM) Cabang MATSC (2019), GM Cabang Denpasar (2018-2019), GM Cabang Surabaya (2017-2018), Kasubdiv. Pengendalian Pelayanan Navigasi Penerbangan (2016-2017), Manager Air Traffic Flow Management (2015-2016), dan Manager Approach Control Services (2013-2015)

Joined AirNav Indonesia since October 1, 2013. Prior to serving as Corporate Secretary, he served as General Manager (GM) of MATSC Branch (2019), GM of Denpasar Branch (2018-2019), GM of Surabaya Branch (2017-2018), Head of Subsidv. Control of Aviation Navigation Services (2016-2017), Manager of Air Traffic Flow Management (2015-2016), and Manager of Approach Control Services (2013-2015)

#### Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan  
No concurrent position

## PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI

Sekretaris Perusahaan mengikuti program peningkatan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

## COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Corporate Secretary participates in competency development program in the form of seminars, workshops, or other activities to support the implementation of its duties.

### ○ Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Competence Development of Corporate Secretary

NO	PROGRAM PELATIHAN/SERTIFIKASI Training/Certification Program	PENYELENGGARA Organizer	TANGGAL Date
1	Board Ready “High Performance Boards” Nomor Sertifikat 0103/PTC-STF-BR/ XI/2022 <i>Certificate Number 0103/PTC-STF-BR/ XI/2022</i>	PPM Manajemen	24 s.d. 25 November 2022 <i>November 24-25, 2022</i>
2	Optimizing the Future Role of Corporate Secretary Nomor Sertifikat 0051/PTC-STF-CS/ XI/2022 <i>Certificate Number 0051/PTC-STF-CS/ XI/2022</i>	PTC Pertamina Training & Consulting	03 s.d. 04 November 2022 <i>November 3-4, 2022</i>
3	High Performance Leadership Nomor Sertifikat 9198 <i>Certificate Number 9198</i>	PTC Pertamina Training & Consulting	24 s.d. 25 November 2022 <i>November 24-25, 2022</i>

## PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugasnya melalui sejumlah program kerja baik rutin, non rutin, maupun penugasan Direksi, di antaranya:

- 1 *Updating Board Manual*
- 2 Mendampingi wajib lapor baru dalam pelaporan LHKPN
- 3 Pelaporan berkala terkait *monitoring* LHKPN kepada KPK-RI
- 4 Konsinyering persiapan audit monitoring dan evaluasi penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- 5 Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
- 6 Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL)

## IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY DUTIES

The Corporate Secretary has carried out its duties through a number of routine and non-routine work programs as well as assignments from the Board of Directors, including:

- 1 *Updating Board Manual*
- 2 *Accompanying the new mandatory report in LHKPN reporting*
- 3 *Regular reporting related to LHKPN monitoring to the KPK-RI*
- 4 *Consignment audit preparation monitoring and evaluation of the implementation of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System*
- 5 *The implementation of AntiBribery Management System*
- 6 *Responsible for CSR*



## SATUAN PENGAWASAN INTERN

The Internal Auditor



Satuan Pengawasan Intern (SPI) mendukung kinerja Direksi dengan memastikan efektivitas sistem manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan proses tata kelola Perusahaan. SPI memiliki fungsi melakukan audit, evaluasi, dan telaah yang sistematis terhadap kinerja dan operasional Perusahaan secara independen dan objektif. SPI juga bertanggung jawab menangani dan menindaklanjuti hasil audit yang dilaksanakan oleh pengawas fungsional internal maupun eksternal, dengan memberikan konsultasi dalam rangka perbaikan kepada unit kerja terkait.

The Internal Auditor (IA) is a supporting body for the Board of Directors that is in charge of ensuring the effectiveness of risk management system, internal control system, and Company governance processes. SPI has the function of conducting systematic audits, evaluations, and reviews of the Company's performance and operations independently and objectively. SPI is also responsible for handling and following up on audit results from internal and external functional auditors by providing consultations for improvement to related work units.

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SPI

SPI memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah dijabarkan dalam *Board Manual*, di antaranya:

1. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perum, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perum, serta memberikan saran perbaikannya;
2. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perum;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan Perum lainnya;
4. Memberikan laporan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern kepada Direktur Utama; dan
5. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

### DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF IA

The duties and responsibilities of IA are outlined in the *Board Manual* as follows.

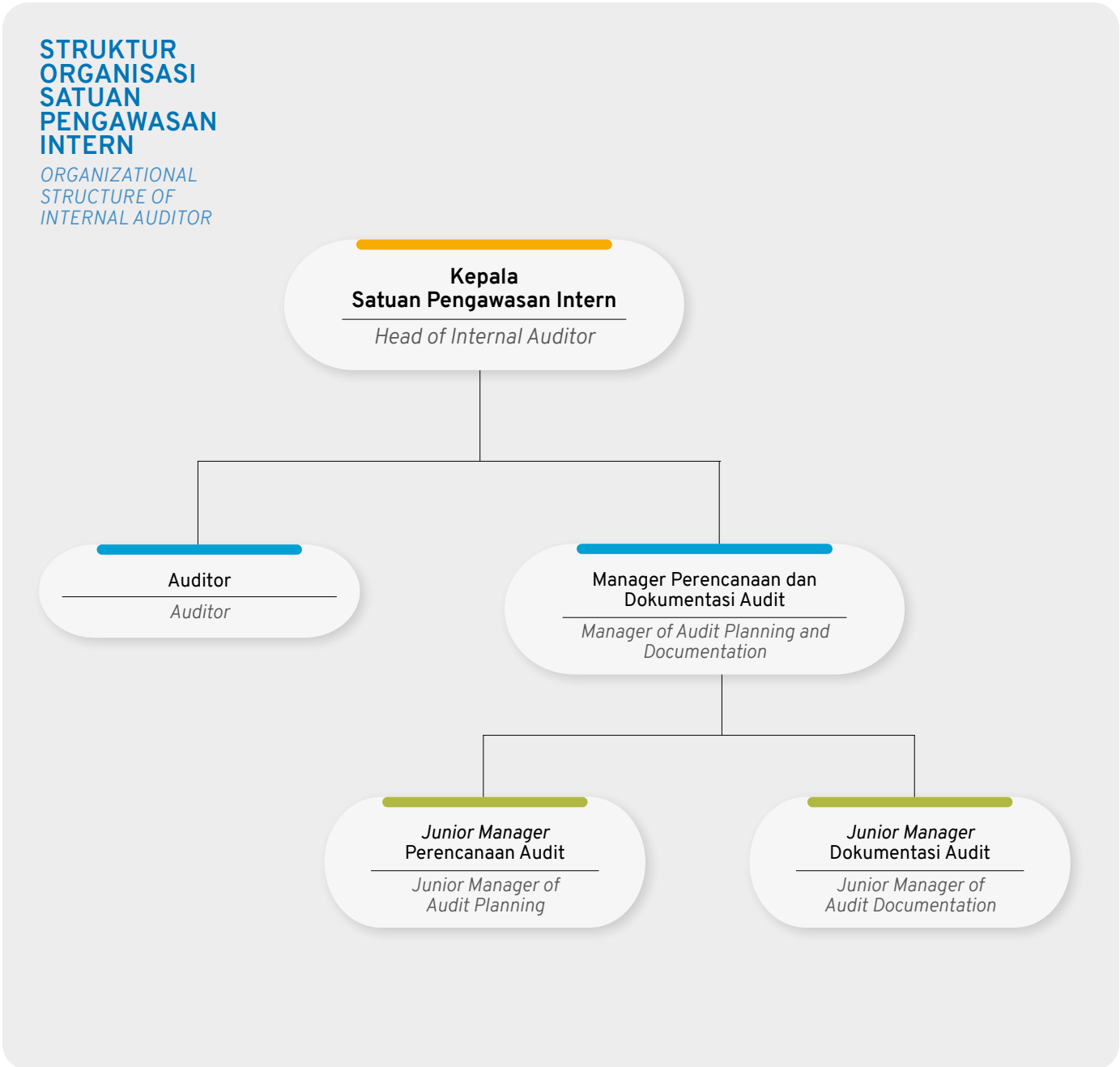
1. Assist the President Director in conducting Perum's operational and financial investigation; assess control, management, and its implementation in Perum; and offer constructive feedback.
2. Evaluate the effectiveness of internal control, risk management, and corporate governance processes following laws, regulations, and Perum's policies;
3. Evaluate and assess the efficiency and effectiveness of finance, operations, human resources, information technology, and other Perum activities;
4. Report the results of the inspection or the duties performance of the Internal Audit to the Main Director; and
5. Monitor the follow-up on the inspection results reported.

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENGAWASAN INTERN**

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh Kepala SPI, dengan dibantu Manager, Junior Manager, Senior Auditor, Auditor, Junior Auditor, dan staf SPI yang secara keseluruhan berjumlah 21 orang. Kepala SPI membawahi Auditor, dan Manajer Perencanaan dan Dokumentasi Audit.

**ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INTERNAL AUDITOR**

The Internal Audit Unit is led by the Head of IA, assisted by Manager, Junior Manager, Senior Auditors, Auditors, Junior Auditors, and IA staff, with a total of 21 people. The Head of IA oversees the Auditor and the Manager of Audit Planning and Documentation.



## PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

### PROFILE OF HEAD OF INTERNAL AUDITOR



**ARI SURYADHARMA**  
Kepala Satuan Pengawasan Intern  
Head of Internal Audit



■ <b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	WNI Indonesian citizen
■ <b>Usia</b> Age	50 tahun 50 years old
■ <b>Domisili</b> Domicile	Tangerang Selatan, Banten South Tangerang, Banten
■ <b>Dasar Hukum Penunjukan</b> Legal Basis of Appointment	Keputusan Direksi No. Kep.5603/U/ LPPNPI/ PER.08 /XI/2019 tanggal 26 November 2019 Decree of the Board of Directors No. Kep.5603/U/ LPPNPI/PER.08 /XI/2019 dated November 26, 2019

#### Pendidikan

Education

Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen dari Universitas Trisakti (2000)

*Bachelor in Management Economics at Trisakti University (2000)*

#### Riwayat Profesi

Professional History

Bergabung di AirNav Indonesia tanggal 1 Maret 2015, dengan jabatan Sekretaris Perusahaan, dilanjutkan menjadi Kepala Biro Pengelolaan Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko, dan GCG (2016-2019). Pengalaman kerja beliau sebelumnya: Controller British Airways (1996-1998), Customer Relations Supervisor British Airways (1998- 2002), Customer Relations Supervisor PT Jasa Angka Semesta (2002-2003), Airport Service Manager Cathay Pacific Airways Ltd (2003-2006), Airport Service Manager – Riyadh, Saudi Arabia Cathay Pacific Airways (2006-2011), General Manager PT Pelangi Tatakarsa (2011- 2013), General Manager PT Aerofood ACS (2013- 2014), General Manager In Flight Services Total Solution PT Garuda Indonesia (2014- 2015).

*He joined AirNav Indonesia on March 1, 2015 as the Corporate Secretary, continued to serve as Head of Corporate Performance, Risk Management, and GCG Bureau of AirNav Indonesia (2016-2019). His previous work experience includes: Controller British Airways (1996-1998), Customer Relations Supervisor British Airways (1998- 2002), Customer Relations Supervisor PT Jasa Angka Semesta (2002-2003), Airport Service Manager Cathay Pacific Airways Ltd (2003- 2006), Airport Service Manager – Riyadh, Saudi Arabia Cathay Pacific Airways (2006-2011), General Manager PT Pelangi Tatakarsa (2011- 2013), General Manager PT Aerofood ACS (2013- 2014), General Manager In Flight Services Total Solution PT Garuda Indonesia (2014- 2015).*

#### Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan

*No concurrent position*



## PIAGAM DAN KODE ETIK AUDIT INTERNAL

### PIAGAM AUDIT INTERN

SPI memiliki Piagam sebagai pedoman pelaksanaan tugas, yang disahkan oleh Direktur Utama pada 29 Januari 2018. Piagam tersebut mengatur hal-hal terkait SPI, yang meliputi: latar belakang, visi dan misi, struktur organisasi, kedudukan, tugas dan tanggung jawab, kode etik, hubungan dengan pihak lain, serta tindak lanjut hasil audit dan hasil telaah.

### KODE ETIK AUDIT INTERN

SPI menjunjung integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi; sebagai kode etik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### 1. INTEGRITAS

- Menghormati dan menjunjung tinggi hukum, etika perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menunjukkan loyalitas terhadap Perusahaan, dan tidak terlibat secara sadar dalam kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum;
- Tidak terlibat tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi Pengawas Intern atau mendiskreditkan Perusahaan;
- Menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.

#### 2. OBJEKTIVITAS

- Menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan Perusahaan, atau kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan prasangka, yang dapat meragukan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari kegiatan audit dan pihak lain yang terkait dengan pekerjaan audit yang diduga dapat memengaruhi pertimbangan profesionalnya;
- Tidak memiliki rasa keberpihakan, ketakutan, dan ambisi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang dilakukan, sehingga dapat memengaruhi tanggung jawab penugasan;
- Bebas dari intervensi terhadap kepentingan individu atau kelompok tertentu atas kesimpulan hasil pemeriksaan untuk kepentingan Perusahaan;

## INTERNAL AUDITOR CHARTER AND CODE OF ETHICS

### INTERNAL AUDIT CHARTER

*SPI has a Charter as a guideline for implementing tasks, which was set forth by the President Director on January 29, 2018. The Charter regulates several matters related to IA, including the background, vision and mission; organizational structure, position, tasks, and duties; code of ethics; relationships with other parties; and follow-up to audit and review results.*

### INTERNAL AUDIT CODE OF ETHICS

*IA upholds integrity, objectivity, confidentiality and competency; as a code of ethics in conducting its tasks and duties.*

#### 1. INTEGRITY

- *Respect and uphold applicable laws, corporate ethics, rules, and regulations.*
- *Demonstrate loyalty to the Company, and refrain from voluntarily being involved in various improper and illegal activities.*
- *Prohibited from being involved in any actions or activities that may discredit the profession of Internal Auditor or the Company.*
- *Demonstrate honesty, objectivity, and sincerity in performing its tasks and fulfilling its professional duties.*

#### 2. OBJECTIVITY

- *Refrain from activities that may incur conflict with the Company's interests or activities that may potentially arise suspicion and cast doubt on Internal Auditor's ability to conduct its tasks and fulfill its professional duties objectively.*
- *Refrain from accepting objects of any shape or form during audit from other parties relevant to the audit work, which might be construed as interference with IA professional consideration.*
- *Refrain from harboring partiality, fear, ambitions, or other sentiments that may interfere with ongoing activities and compromise responsibility for the task at hand.*
- *Be independent of intervention by an individual or collective interest over the conclusion of investigation done in the interest of the Company.*



- Melaporkan hasil tugasnya dengan berdasar pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menutupi praktik penyimpangan.

- Report the results of task execution based on verifiable facts and without concealing improper practices.

### 3. KERAHASIAAN

- Bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh serta menjaga kerahasiaan dalam pelaksanaan tugasnya;
- Tidak menggunakan informasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika yang berlaku, yang dapat menimbulkan kerugian Perusahaan.

### 3. CONFIDENTIALITY

- Be cautious and prudent in the use of collected information and maintain confidentiality in executing its tasks.
- Prohibited from using information for personal gain or any activities that are against the applicable law and ethics, which might cause damage to the Company.

### 4. KOMPETENSI

- Melaksanakan setiap penugasan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kompetensi profesional yang dimilikinya;
- Meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, serta wajib mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan.

### 4. COMPETENCY

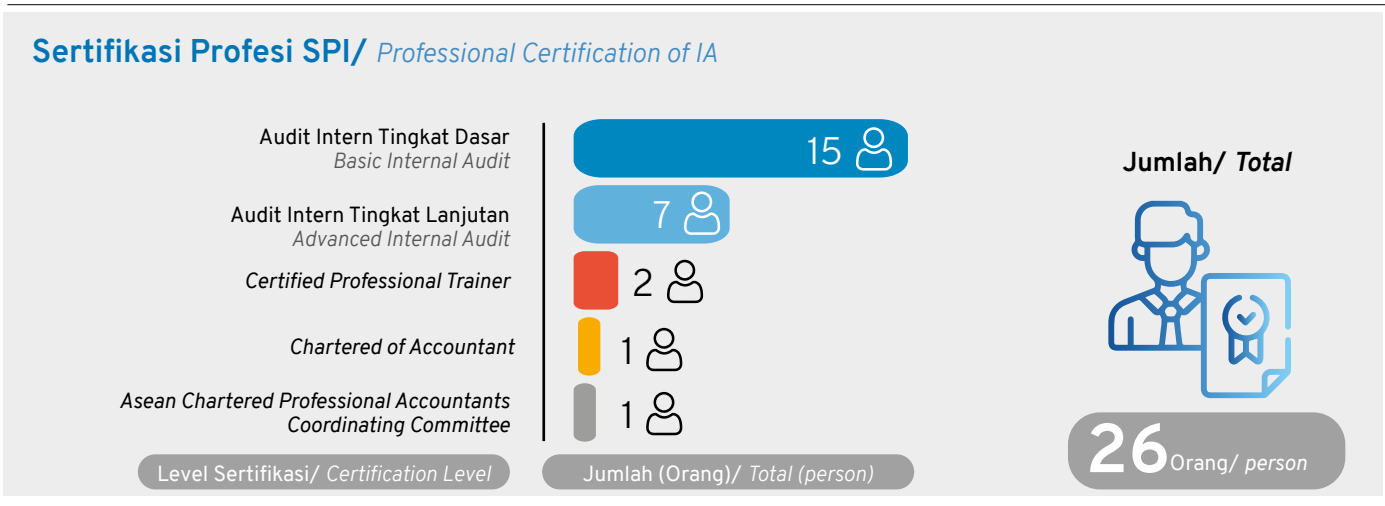
- Conduct every assignment using every knowledge, expertise, and professional competence.
- Develop competence, effectiveness, and quality of job execution as well as take part in mandatory continuing professional education.

## SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI

SPI melengkapi personelnya dengan sertifikasi profesi, yang menjadi kualifikasi dalam menjalankan profesinya sebagai auditor.

## PROFESSIONAL CERTIFICATION AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

IA equips its personnel with professional certification, which is a qualification in conducting their profession as an auditor.



Selain sertifikasi, SPI juga memberikan kesempatan kepada personelnya untuk mengikuti program peningkatan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

In addition to certification, IA also provides opportunities for its personnel to participate in competency development programs in the form of seminars, workshops, or other activities to support the implementation of their duties.





## **○ Peningkatan Kompetensi SPI** *Competency Development of IA*

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN</b> <i>Training Program</i>	<b>PENYELENGGARA</b> <i>Organizer</i>	<b>JUMLAH PESERTA</b> <i>Number of Participants</i>	<b>TANGGAL</b> <i>Date</i>
1	Seminar Nasional Internal Audit <i>National Seminar on Internal Audit</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit <i>Internal Audit Education Foundation</i>	2 peserta <i>2 participants</i>	30 November s.d. 01 Desember 2022 <i>November 30–December 1, 2022</i>
2	Audit Intern Tingkat Dasar <i>Basic Internal Audit</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit <i>Internal Audit Education Foundation</i>	2 peserta <i>2 participants</i>	04 s.d. 18 Juli 2022 <i>July 4–18, 2022</i>
3	Pelatihan Certified Information System Auditor (CISA) <i>Training on Certified Information System Auditor (CISA)</i>	Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia <i>Computer Science Center at University of Indonesia</i>	1 peserta <i>1 participant</i>	22 Oktober s.d. 10 Desember 2022 <i>October 22–December 10, 2022</i>
4	Audit Intern Tingkat Lanjutan <i>Advanced Internal Audit</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit <i>Internal Audit Education Foundation</i>	1 peserta <i>1 participant</i>	04 s.d. 18 Juli 2022 <i>July 4–18, 2022</i>

## **PELAKSANAAN TUGAS SPI**

SPI telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan RKM dan Program kerja SPI tahun 2022, sebagaimana diatur dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 2022, di antaranya:

1. Pendampingan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2021 di Tahun 2022
2. Persiapan serta Pendampingan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2022
3. Audit Khusus Pendapatan
4. Audit Khusus Penghapusan Aset
5. Audit Pengadaan ERP dan Asuransi Aset
6. Audit Atas Aset Dalam Konstruksi dan Asesmen Atas Aset Produktif
7. Reviu Penanganan Piutang Korporasi
8. Penyusunan SOP
9. Reviu Dan Monitoring Atas Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri / Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
10. Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Audit
11. Fasilitasi Hubungan dengan Komite Audit

## **IA TASK**

IA has performed its duties in accordance with the 2022 Management Work Plan and IA work program, as stipulated in the 2022 Annual Audit Program (PKPT), including:

1. Assisting the Public Accounting Firm (PAF) in auditing for the 2021 Fiscal Year in 2022
2. Preparing and Assisting Public Accounting Firm (PAF) in auditing for the 2022 Fiscal Year
3. Conducting Revenue Special Audit
4. Conducting Asset Write-Off Special Audit
5. Conducting ERP Procurement Audit and Asset Insurance
6. Conducting Audit of Assets Under Construction and Assessment of Earning Assets
7. Reviewing the Corporate Receivables Handling
8. Preparing SOPs
9. Reviewing and Monitoring the Implementation of the Domestic Product Usage/Domestic Component Level
10. Monitoring the Follow Up on Audit Findings
11. Facilitating Relations with the Audit Committee





## Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

**A**irNav Indonesia menerapkan sistem pengendalian internal dengan mengacu pada kerangka Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). Terdapat 5 komponen pengendalian internal yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan; yang kemudian dijabarkan menjadi 17 prinsip pengendalian internal. Dewan Pengawas, Direksi, dan manajemen AirNav Indonesia selaku Lingkungan Pengendalian terlibat secara aktif dalam memastikan tercapainya tujuan pengendalian internal, yakni: efektivitas dan efisiensi operasi (*operational objectives*), keandalan pelaporan keuangan (*information objectives*), pengamanan aset (*security objectives*), serta kepatuhan terhadap regulasi (*compliance objectives*).

**A**irNav Indonesia implements an internal control system based on the framework of the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). Five components of internal control covers environment control, risk assessment, activity control, information and communication, and monitoring; which are then translated into 17 principles of internal control. The Supervisory Board, the Board of Directors, and the management of AirNav Indonesia as the Environment Control are actively involved in ensuring the achievement of internal control objectives, including: operational effectiveness and efficiency (*operational objectives*), reliability of financial reporting (*information objectives*), securing assets (*security objectives*), and compliance with regulations (*compliance objectives*).

### Sistem Pengendalian Operasional dan Keuangan

Perusahaan menerapkan sistem pengendalian keuangan dan operasional secara sistematis dan terintegrasi dengan melibatkan Dewan Pengawas, Direksi, Komite Audit dan Satuan Pengawasan Intern sesuai fungsinya, yakni:

- 1 Dewan Pengawas melakukan pengawasan dan pemberian saran terkait proses pengelolaan Perusahaan, pengembangan usaha, dan pengelolaan risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian;
- 2 Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal Perusahaan agar dapat berfungsi secara efektif, untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan;
- 3 Komite Audit melakukan tugas penilaian pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilakukan audit internal, memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas;
- 4 Satuan Pengawasan Internal membantu Direktur Utama dalam melaksanakan audit internal terhadap keuangan dan operasional Perusahaan, serta mengevaluasi pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya, serta memberikan saran-saran perbaikan.

### Operational and Financial Control System

The company implements a systematic and integrated financial and operational control system involving the Supervisory Board, the Board of Directors, the Audit Committee, and the Internal Auditor according to their functions, such as:

- 1 The Supervisory Board is tasked with monitoring and advising the Company management processes, business development, and risk management by applying the principle of prudence.
- 2 The Board of Directors is tasked with developing an internal control system that functions effectively to secure Company's investment and assets.
- 3 The Audit Committee is tasked with assessing the implementation and results of internal audits, offering recommendations to refine the management control system and identify issues that require the attention of the Supervisory Board.
- 4 The Internal Auditor is tasked with assisting the President Director in internal financial and operational audits; evaluation of control, management, and its implementation; and provision of recommendations for improvement.

## Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dengan Kerangka COSO dan Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan

AirNav Indonesia melakukan evaluasi terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan secara berkala dengan pengujian menggunakan kerangka COSO, meliputi:

### 1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Komponen ini menjadi struktur fundamental dari sistem pengendalian internal yang mencakup komitmen terhadap integritas dan nilai etika, pengawasan yang bertanggung jawab, penetapan struktur, wewenang dan tanggung jawab, komitmen terhadap kompetensi, serta penegakan akuntabilitas. AirNav Indonesia menerapkan komponen lingkungan pengendalian dalam:

- Struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab (sesuai dengan PER10, PER14, PER16);
- Kebijakan dan praktik sumber daya manusia (sesuai dengan peraturan dan keputusan Direksi yang sudah diatur dan diterapkan di AirNav Indonesia);
- Pakta integritas dan nilai etika (sesuai dengan Per 007 Tahun 2015);
- Komitmen terhadap kompetensi (sesuai dengan PER 041 Tahun 2014, PER 30 Tahun 2015), dan
- Fungsi auditor (sesuai dengan PKPT dan realisasi PKPT yang dilaksanakan oleh SPI).

### 2. PENILAIAN RISIKO

Komponen penilaian risiko merupakan identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh manajemen terhadap risiko terkait dengan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Penilaian risiko organisasi meliputi identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko-risiko yang relevan, termasuk penilaian risiko atas *fraud*, serta risiko organisasi yang berasal dari perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi baru, pertumbuhan organisasi yang cepat, teknologi baru, dan lain-lain.

AirNav Indonesia telah melaksanakan penilaian risiko sejak tahun 2016. Aktivitas penilaian risiko yang dilakukan antara lain:

- Pengelolaan aspek keselamatan penerbangan melalui Direktorat Keselamatan, Keamanan, dan Standardisasi;
- Implementasi peningkatan *Safety Management System*;
- Implementasi Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management) yang mengacu pada ISO 31000:2018 melalui Biro Pengelolaan Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko & GCG.

## Compatibility of Internal Monitoring System with Coso Framework and Evaluation on the Effectiveness of Company's Internal Control System

AirNav Indonesia periodically evaluates the effectiveness of the Company's Internal Control System by using the COSO framework, including:

### 1. ENVIRONMENT CONTROL

This element forms the fundamental structure of the internal control system which includes a commitment to integrity and ethical values; responsible monitoring; establishment of structure, authority and responsibility; commitment to competence; and upholding accountability. AirNav Indonesia implements the control environment components in:

- Organization structure, provision of authority and responsibility (in accordance with PER10, PER14, PER16);
- Human resources policies and practices (according to the Board of Director's regulation and decisions that are set down and implemented within AirNav Indonesia);
- Integrity and ethical value (according to Per 007 of 2015);
- Commitment to competence (according to PER 041 of 2014, PER 30 of 2015); and
- Auditor function (according to Annual Audit Program and its realization by IA).

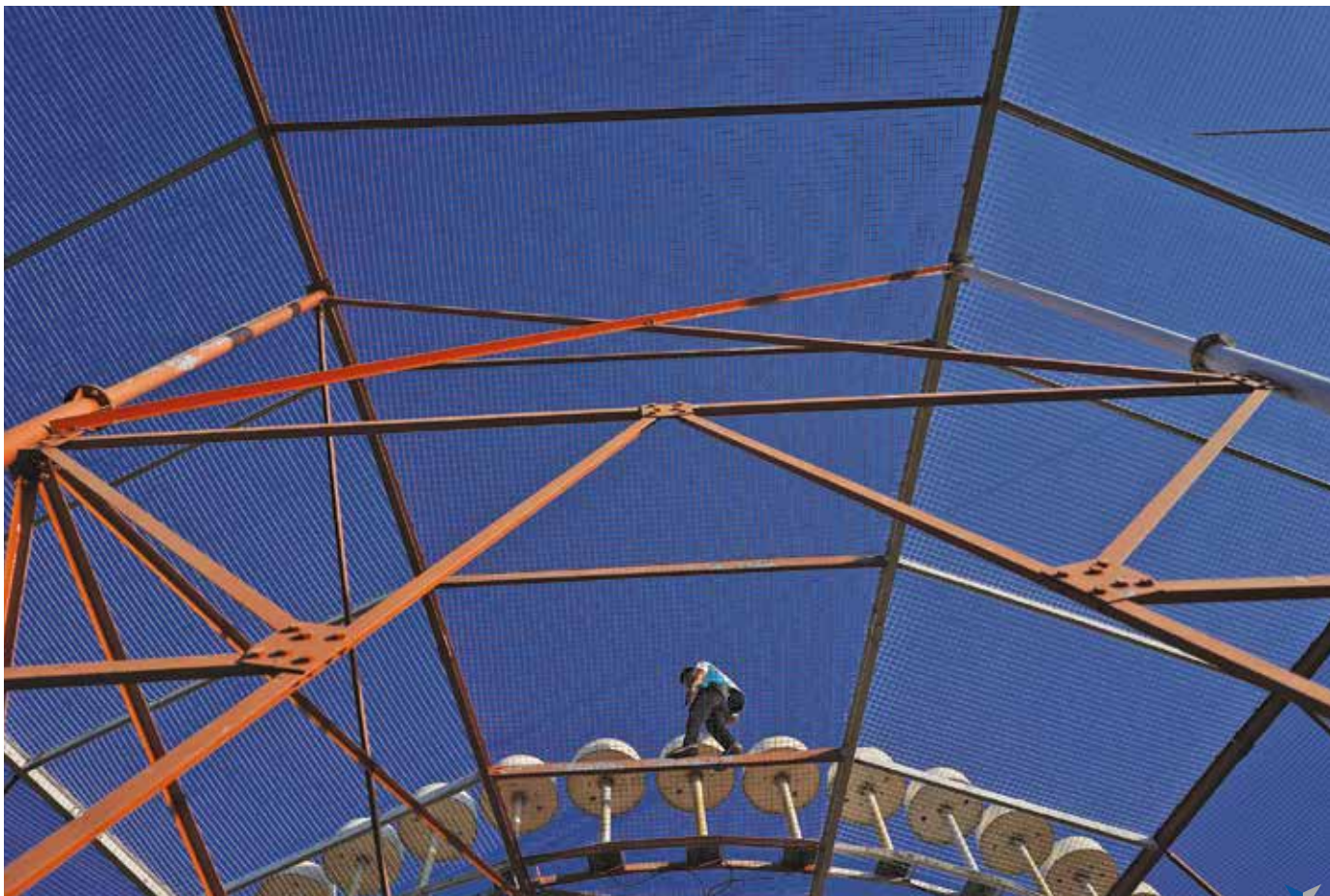
### 2. RISK ASSESSMENT

Risk assessment is the identification and analysis conducted by the management on risks to the achievement of the goals that have been set for the organization. Assessment of risk to the organization is done by identifying, analyzing, and managing risks that are relevant including risk assessment of *fraud*, as well as risks to the organization that may arise from changes to the operational environment, new information systems, rapid organizational growth, new technology, etc.

AirNav Indonesia has been conducting risk assessments since 2016. The risk assessment took the following forms:

- Management of flight safety aspect through the Directorate of Safety, Security, and Standardization;
- The implementation of Safety Management System improvement;
- The implementation of Enterprise Risk Management with reference to ISO 31000:2018 through the Corporate Performance Management, Risk Management & GCG Bureau.





Petugas teknik AirNav Indonesia melakukan pemeliharaan perangkat navigasi DVOR di Kantor Cabang Kupang.  
*An engineer is doing maintenance of DVOR navigation devices at the Kupang Branch Office.*

### 3. KEGIATAN PENGENDALIAN

Komponen kegiatan pengendalian meliputi kegiatan, kebijakan, prosedur dan praktik yang berlangsung untuk pencapaian tujuan Perusahaan. Penjabaran komponen ini dalam prinsip pemilihan dan pengembangan kegiatan pengendalian, pemilihan dan pengembangan pengendalian terhadap teknologi, serta implementasi melalui kebijakan dan prosedur.

AirNav Indonesia melakukan kegiatan pengendalian dimulai dari pengesahan, kewenangan, verifikasi, rekonsiliasi, pengkajian ulang kinerja, pengamanan aktiva, pemisahan tugas, pengolahan informasi, dan pengendalian fisik. Kegiatan pengendalian diatur oleh Direksi AirNav Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan keputusan yang telah diatur oleh Perusahaan, di antaranya adalah PER 010 Tahun 2014, PER 33 Prosedur Operasi Standar Keuangan Kantor Pusat, PER 028 Tahun 2015 Tata Cara Penyampaian Permohonan Pengeluaran dan Penerimaan Uang.

### 3. ACTIVITY CONTROL

*Activity control encompasses activities, policies, procedures, and practices that ensure the achievement of the organization's goals. The element is performed in the principle of selection and development of activity control, selection and development of control over technology, as well as implementation through policies and procedures.*

*AirNav Indonesia conducts activity control starting with approval, authorization, verification, reconciliation, securing assets, task separation, information processing, and physical control. Activity control is regulated by the AirNav Indonesia Board of Directors and conducted according to the regulations and decisions set by the Company, including PER 010 of 2014, PER 33 in Head Office Financial Standard Operating Procedures, PER 028 of 2015 on Procedures for Submitting Requests for Expending and Receiving Funds.*

## 4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Komponen informasi dan komunikasi merupakan komponen penting bagi komponen pengendalian lainnya. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik dari sumber internal maupun eksternal.

AirNav Indonesia memiliki sistem informasi yang membantu penyediaan laporan-laporan kegiatan organisasi, keuangan dan informasi terkait dengan kepatuhan. Informasi tersebut dibutuhkan AirNav Indonesia dalam menjalankan dan mengendalikan organisasi. AirNav Indonesia mengomunikasikan tanggung jawab pengendalian informasi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan realisasi manajemen.

Dalam konteks sistem pengendalian internal, AirNav Indonesia mengomunikasikan tanggung jawab pengendalian kepada seluruh SDM dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh SDM dalam menyelesaikan tugasnya terkait sistem pengendalian internal.

## 5. PEMANTAUAN

Komponen pemantauan mewajibkan manajemen melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah serta mengevaluasi dan mengomunikasikan kelemahan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal bertujuan memastikan sistem berjalan sebagaimana seharusnya, serta telah sesuai dengan perubahan situasi. Pemantauan mencakup aspek kualitas personel yang memiliki akses merancang dan melaksanakan pengendalian internal, agar tindakan perbaikan dilakukan tepat waktu. Metodologi pemantauan berupa pemeriksaan prosedur atau standar yang biasa dijalankan oleh karyawan.

AirNav Indonesia melakukan pemantauan dengan melibatkan pihak eksternal, yaitu KAP, BPK, dan BPKP yang melakukan telaah terhadap proses keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan.

Hasil evaluasi berkala yang dilakukan Perusahaan menunjukkan sistem pengendalian internal perusahaan telah sesuai dengan kerangka COSO. Perusahaan menilai sistem pengendalian internal telah berjalan dengan efektif dan memiliki kecukupan dalam menunjang kelangsungan Perusahaan. AirNav Indonesia mencatat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan senantiasa mengupayakan perbaikan pada sistem pengendalian internal Perusahaan.

## 4. INFORMATION AND COMMUNICATION

*Information and communication are essential elements in other control components. Management must obtain, produce, and use relevant and quality information, both from internal and external sources.*

*AirNav Indonesia has an information system that helps provide reports on organization activities, finances, and information related to compliance. This information is required by AirNav Indonesia in running and controlling the organization. AirNav Indonesia communicates control responsibility through financial statements and a report on management realization.*

*In the context of the internal control system, AirNav Indonesia communicates control responsibility to all employees and provides information needed by the employees in their performance of internal control system duties.*

## 5. MONITORING

*The monitoring element requires management to perform ongoing and/or separate evaluations and to evaluate and communicate internal control system weaknesses. Monitoring of the internal control system aims to ensure that the existing system is working as intended and has been adjusted according to situational changes. The supervision of the quality of the internal control system should be administered on an ongoing basis. This supervision covers the quality of personnel with access to internal control design and its implementation to make necessary and timely improvements. The method of monitoring is in the form of assessment of procedures and standards that are commonly applied by the employees.*

*AirNav Indonesia conducts monitoring by involving external parties, namely a Public Accountant Firm/PAF, Supreme Audit Agency, and Finance and Development Supervisory Agency, which review the Company's financial processes and procurement of goods and services.*

*The results of periodic evaluations conducted by the Company show that the Company's internal control system is in line with the COSO framework. The Company assesses that the internal control system has been working effectively and is sufficient to support Company sustainability. AirNav Indonesia notes several aspects that need to be improved and continuously seeks improvements to the Company's internal control system.*





## Akuntan Publik Public Accountant

**A**kuntan Publik berperan sebagai pihak eksternal yang melakukan pemantauan terhadap laporan keuangan Perusahaan melalui proses audit. AirNav Indonesia menunjuk akuntan publik yang merupakan auditor independen untuk melakukan proses audit terhadap laporan keuangan Perusahaan. Akuntan publik memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran transaksi, kepatuhan, dan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

### Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

Akuntan publik melakukan audit laporan keuangan dengan prosedur dan standar audit sebagai berikut:

- Audit dilakukan sesuai dengan standar profesional akuntan publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu;
- Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI/ Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
- Akuntan publik melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari proses audit;
- Apabila ditemukan kejadian atau indikasi pelanggaran perundang-undangan dan/atau hal-hal yang dianggap membahayakan keuangan Perusahaan atau terindikasi melanggar peraturan maupun undang-undang, auditor eksternal wajib melaporkan keadaan tersebut kepada pemegang saham, Direksi, Dewan Pengawas, dan/atau fungsi Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan akuntan publik atas Perusahaan untuk ditinjau oleh badan atau otoritas terkait;
- Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah Indonesia, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

**A** Public Accountant acts as an external party monitoring the Company's financial statements through an audit. AirNav Indonesia appoints a public accountant who is an independent auditor to conduct an audit of the Company's financial statements. Public accountants provide independent and objective opinions regarding the fairness of transactions, compliance, and conformity of financial statements based on Financial Accounting Standards.

### External Audit Procedures and Auditing Standards

Public accountants conduct audits of financial statements with the following audit procedures and standards:

- An audit is conducted according to professional standards of public accountants, including all audit procedures deemed necessary.
- An audit includes assessing and evaluating the internal control system; examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements; assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management; and evaluating the overall financial statement presentation based on the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) issued by the Institute of Indonesia Chartered Accountants /Indonesian Institute of Certified Public Accountants.
- As part of the audit process, a public accountant may raise questions to the management regarding what they presented in the financial statements.
- In case of discovery of incident or indication of law violations and/or matters considered harmful to the Company's finances or indicative of legal infringement, an external auditor shall report the situation to the shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, and/or Internal Auditor within 7 (seven) working days.
- The management approves the public accountant's audit working papers on the Company to be reviewed by the relevant body or authority.
- In the event of the Government of Indonesia providing financial assistance, the audit is conducted based on the State Financial Audit Standards issued by the Supreme Audit Agency.



## Sistem Manajemen Risiko Risk Management System

**A**irNav Indonesia menerapkan sistem manajemen risiko dengan mengacu pada Keputusan Direksi No.KEP.1564/LPPNPI/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No. KEP.2406.1/LPPNPI/XII/2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management/ERM*) serta Prosedur Pengelolaan Risiko. Penerapan manajemen risiko perusahaan (ERM) dilakukan pada seluruh proses bisnis dan fungsi-fungsi yang ada di Perusahaan, pada semua level organisasi, unit, dan kantor cabang. Adapun tujuan penerapan ERM adalah:

1. Memastikan seluruh risiko di Perusahaan telah diidentifikasi, dianalisis, dikelola dan dimitigasi secara terkoordinasi dan terintegrasi;
2. Melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan mengamankan aset perusahaan yang meliputi sumber daya manusia, modal, aktiva, dan reputasi;
3. Mendorong manajemen agar bertindak proaktif untuk mengurangi risiko kerugian serta memberikan dasar yang jelas dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi;
4. Mendorong setiap individu agar bertindak tepat dan cermat dalam menghadapi risiko perusahaan, sehingga memaksimalkan nilai perusahaan dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan lainnya.

Proses manajemen risiko mengacu kepada ISO 31000:2009, yang terdiri dari 5 tahapan, yakni:

1. Komunikasi dan Konsultasi, tahapan untuk melakukan evaluasi atau asesmen dokumen serta koordinasi internal dengan Pemilik Modal dan Manajemen;
2. Penetapan Konteks, yakni tahapan untuk menetapkan konteks yang meliputi tujuan, sasaran dan ruang lingkup dalam melakukan pengelolaan risiko;
3. Penilaian Risiko, yakni tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, berupa tahapan pengisian daftar risiko, rekapitulasi dan analisis data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) pada Kantor Cabang dan Pusat;
4. Perlakuan Risiko, yakni tahapan evaluasi kolaboratif dan melakukan validasi bersama perwakilan masing-masing unit untuk menghasilkan Profil Risiko;
5. *Monitoring and Reviu*, yakni tahapan pemantauan (*surveillance*) atas efektivitas mitigasi risiko.

Dalam perkembangannya, sistem manajemen risiko perusahaan diperbarui sesuai rujukan ISO 31000:2018 tentang Risk Management Principles and Guidelines yang disesuaikan dengan konteks bisnis AirNav Indonesia.

**A**irNav Indonesia implements a risk management system with reference to the Decree of the Board of Directors No. KEP.1564/LPPNPI/IV/2018, dated April 12, 2018, on the Amendments to the Decree of the Board of Directors No. KEP.2406.1/LPPNPI/XII/2014 on Management Policies and Guidelines for Enterprise Risk Management/ERM and Risk Management Procedures. The enterprise risk management (ERM) is applied in all business processes and functions in the Company, at all organizational levels, units, and branch offices. The objectives of implementing ERM are:

1. Ensuring that all risks in the Company have been identified, analyzed, managed, and mitigated in a coordinated and integrated manner;
2. Protecting the company from significant risks that hinder the achievement of company goals and securing company assets which include human resources, capital, assets, and reputation;
3. Encouraging management to act proactively in order to reduce the risk of loss and provide a clear basis for the decision-making process at all levels of the organization;
4. Encouraging each individual to act appropriately and carefully in dealing with company risks, thereby maximizing corporate value and meeting the expectations of other stakeholders.

The risk management process refers to ISO 31000:2009, which consists of the following five stages:

1. *Communication and Consultation*, is the stage for evaluating or assessing documents as well as internal coordination with Shareholders and Management;
2. *Context Establishment*, is the stage for establishing the context which includes goals, targets, and scope in conducting risk management;
3. *Risk Assessment*, is the stage of identification, analysis, and evaluation of risk, in the form of filling out the risk list, data recapitulation, and data analysis through in-depth interviews at Branch Offices and the Head Office;
4. *Risk Treatment*, is the stage of collaborative evaluation and validation with representatives of each unit to produce a Risk Profile.
5. *Monitoring and Review*, is the stage of monitoring (*surveillance*) on the effectiveness of risk mitigation.

In its development, the company's risk management system is updated in reference to ISO 31000:2018 on Risk Management Principles and Guidelines which have been adapted to the business context of AirNav Indonesia.



## Peta Jalan, Penerapan, dan Pengembangan Sistem Manajemen Risiko

### Roadmap, Implementation and Development of Risk Management System

Kementerian BUMN menetapkan *Roadmap Risk Maturity Index* BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-8/MBU/08/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2024. Peraturan tersebut antara lain mengatur tentang target skor RMI BUMN. AirNav Indonesia telah menindaklanjuti peraturan tersebut, dengan menetapkan target RMI tahun 2020-2024.

*The Ministry of SOE determines SOE Roadmap Risk Maturity Index (“RMI BUMN”) as stated in the SOE Minister Regulation No.PER-8/MBU/08/2020 regarding the Strategic Plan of SOE for 2024. This includes the target score for RMI BUMN. AirNav Indonesia has followed up on these regulations by setting RMI targets for 2020-2024, which have been achieved by the reporting period.*



### Target Skor RMI BUMN dan AirNav Indonesia

*Risk Maturity Index Target Score for BUMN and AirNav Indonesia*

	2020	2021	2022	2023	2024
Target Skor RMI BUMN <i>RMI BUMN Target Score</i>	3,6 Defined	3,8 Defined	4,0 Defined	4,1 Managed	4,2 Managed
Target Skor RMI AirNav Indonesia <i>RMI AirNav Indonesia Target Score</i>	3,8 Defined	3,9 Defined	4,0 Defined	4,1 Managed	4,2 Managed

AirNav Indonesia telah menerapkan ERM di seluruh unit kerja dan telah memiliki sejumlah data tentang risiko Perusahaan. Namun pendekatan yang digunakan masih bersifat kualitatif dan subjektif. AirNav Indonesia telah merancang peta jalan implementasi ERM tahun 2020 – 2024 yang terstruktur dan sistematis. Peta jalan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai berbagai aspek penerapan ERM yang perlu dikembangkan, dan diharapkan mampu mendorong tercapainya tingkat kematangan penerapan ERM. Penyusunan peta jalan dengan memperhatikan kesiapan Perusahaan, baik dari aspek *awareness*, pemahaman, dan kelengkapan infrastruktur ERM yang dimiliki Perusahaan.

*AirNav Indonesia has implemented Enterprise Risk Management (ERM) in all work units and already has a number of data on Company risks. However, the approach used is still qualitative and subjective. The Company has designed a structured and systematic roadmap, namely ERM Implementation Roadmap for 2020 – 2024 to provide an overview of various aspects that need to be developed which can help achieve the maturity level of ERM implementation. This roadmap was designed by considering the Company readiness in the awareness, understanding, and completeness of the Company’s ERM infrastructure.*



**Roadmap Manajemen Risiko AirNav Indonesia**  
*AirNav Indonesia Risk Management Roadmap*

**2021**  
**RISK ENHANCEMENT**



- Perusahaan menetapkan dan mengesahkan perubahan kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko Perusahaan agar sesuai dengan ISO 31000:2018 dan *better practices* yang dapat diterapkan.  
*The Company stipulates and ratifies changes to Risk Management policies and guidelines of the Company to*

*comply with ISO 31000:2018 and applicable better practices*

- Sosialisasi Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan  
*Socialization of Company Risk Management Policy and Guidelines*
- Pengembangan sistem Manajemen Risiko Perusahaan berbasis Informasi Teknologi  
*Development of Information Technology-based Company Risk Management system*

**2024**  
**RISK INTELLIGENCE**



- Perusahaan mengembangkan berbagai indikator kuantitatif dalam bentuk *Key Risk Indicator (KRI)*, *risk modelling*, dan *Early Warning System (EWS)* yang terintegrasi dengan sistem ERP Perusahaan dan sistem lainnya.  
*The Company develops various quantitative indicators in the form of key risk indicators (KRI), risk modeling, and early warning systems (EWS) which are integrated with ERP system and other systems of the Company.*



**2020**  
**RISK IMPROVEMENT**

- Evaluasi dan analisis terhadap implementasi Manajemen Risiko  
*Evaluate and analyze the implementation of Risk Management*

- Analisis, kaji dan rumuskan *draft* perubahan Kebijakan serta pedoman Manajemen Risiko Perusahaan  
*Analyze, review, and draft the changes to the Risk Management Policy and Guidelines of the Company*

- Perumusan Konsep Manajemen Risiko Perusahaan berbasis Informasi Teknologi  
*Drafting of Information Technology-based Company Risk Management Concept*



**2022**  
**RISK RESILIENT**

- Perusahaan mengembangkan *Loss Event Database (LED)*, program induksi manajemen risiko, KPI manajemen risiko dan *Business Continuity Management System (BCMS)* berbasis ISO 22301:2019.  
*The Company developed Loss Event Database (LED), a risk management induction program, risk management KPI and Business Continuity Management System (BCMS) based on ISO 22301:2019.*



**2023**  
**STANDARDIZATION AND INTEGRATION**

- Perusahaan menstandarkan kemampuan seluruh Risk Taking Unit dalam pengelolaan risiko melalui standarisasi, sertifikasi kompetensi, dan penguatan pengelolaan risiko untuk manajemen ICT, proyek, dan likuiditas.  
*The Company standardizes the capabilities of all Risk-Taking Units in risk management through standardization, competency certification, and strengthening of risk management for ICT, project, and liquidity management.*

Peta jalan tersebut masih belum tercapai sepenuhnya karena adanya program kerja yang seharusnya dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, ditangguhkan akibat dari pandemi COVID-19 dan dilaksanakan pada tahun 2022. Adapun program kerja yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1 Melakukan asesmen Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Perusahaan tahun 2022
- 2 Penyusunan Profil Risiko Perusahaan RKAP tahun 2023
- 3 Sosialisasi manajemen risiko, untuk seluruh pegawai melalui webinar ERM
- 4 Melakukan kajian risiko investasi untuk investasi usulan tahun 2023
- 5 Kajian risiko lainnya. Pada tahun 2022 telah dilakukan berbagai kajian risiko sebagai salah satu pertimbangan untuk mengambil keputusan, antara lain:
  - Mendasari Nota Dinas pelaksana tugas Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko Nomor: 001/KS/KRT.01.02/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal Undangan Rapat Pembahasan Analisa Risiko Kajian Host to Host Perum LPPNPI
  - Mendasari Nota Dinas Sekretaris Perusahaan Nomor: 584/KS/GCG.06/VII/2022 tanggal 2 Desember 2022 Perihal Kajian Pengisian Risk Register Anti Penyuapan dalam Rangka Kegiatan Konsinyering Persiapan Audit Monitoring atau Surveillance SMAP
- 6 Kegiatan lainnya:
  - Asesmen risiko RKAP Tahun 2022
  - Monitoring mitigasi risiko Korporat bulanan
  - Mengkaji revisi PER Enterprise Risk Management (ERM)
  - Penyampaian URS Aplikasi IT untuk implementasi manajemen risiko

*The road map has not been completely achieved because work programs from the previous years were suspended due to the COVID-19 pandemic and were implemented in 2022. The work programs running in 2022 are as follows.*

- 1 *Assessed the 2022 Company Risk Maturity Level.*
- 2 *Prepare the Company Risk Profile for the 2023 Company WPB.*
- 3 *Socialized management for all employees through an ERM webinar.*
- 4 *Conducted investment risk studies for proposed investments in 2023.*
- 5 *Conducted other risk assessments. In 2022, various risk studies were conducted as one of the considerations for decision-making, including:*
  - *A basis for the Official Memo of the Acting Division Head of Strategic Planning and Risk Management No. 001/KS/KRT.01.02/I/2023, dated January 2, 2023, concerning the Invitation to the Meeting for Discussing the Study of Risk Analysis Host to Host Study of Perum LPPNPI;*
  - *A basis for the Official Memo of Corporate Secretary No. 584/KS/GCG.06/VII/2022, dated December 2, 2022, concerning the Study of Filling Risk Register Consignment for Anti-Bribery in Audit Monitoring or Surveillance of Anti-Bribery Management System .*
- 6 *Other activities:*
  - *Conducted a risk assessment of the 2022 Company WPB;*
  - *Monitored monthly corporate risk mitigation;*
  - *Studied the revised PER of Enterprise Risk Management (ERM);*
  - *Socialized URS IT Application for risk management.*



Pemantauan dan pengawasan implementasi manajemen risiko menjadi kewenangan Divisi Manajemen Risiko, Anggaran, dan Pengelolaan Keuangan. Sementara identifikasi risiko menjadi tanggung jawab Fungsi Manajemen Risiko. Adapun tugas Fungsi Manajemen Risiko berdasarkan PER.009/LPPNPI/IX/2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Pusat tanggal 1 September 2022, yaitu bertanggung jawab atas analisis risiko korporat dalam setiap kegiatan lini usaha dan melakukan kegiatan penanganan atas setiap risiko secara memadai.

*Monitoring and supervising the implementation of risk management is the authority of the Risk Management, Budget, and Financial Management Division. Meanwhile, risk identification is the responsibility of the Risk Management Function. Based on PER.009/LPPNPI/IX/2022 concerning the Organization and Administration of Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Head Office, dated September 1, 2022, the duties of the Risk Management Function involve being responsible for corporate risk analysis in all lines of business and adequately managing each risk.*

### Identifikasi Jenis Risiko dan Pengelolannya

Perusahaan melakukan identifikasi risiko pada seluruh proses bisnis dan seluruh tingkat, baik Korporasi maupun Unit kerja di Kantor Pusat dan kantor Cabang.

### *Risk Types Identification and Management*

*The Company identifies risks in all business processes and levels, both the Corporation and work units at the Head Office and Branch offices.*



**Analisa Risiko dan Pengelolaannya**  
*Risk Analysis and Management*

JENIS Type	PENJELASAN RISIKO Risk Explanation	PENGELOLA RISIKO Risk Manager	MITIGASI Mitigation	
<p>Risiko Keuangan</p> <p><i>Risk of Finance</i></p>	<p>Rendahnya Cash In</p> <p><i>Low in Cash In</i></p>	<p>Divisi Transaksi Keuangan</p> <p><i>Financial Transaction Division</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perjanjian restrukturisasi piutang</li> <li>Melakukan asesmen Cadangan Penurunan Piutang Atas Piutang sesuai dengan PSAK 71 yang ditindaklanjuti dengan proaktif melakukan penagihan</li> <li>Melakukan evaluasi Kepatuhan Kinerja Pembayaran Pengguna Jasa</li> <li>Pembuatan Peraturan Perusahaan terkait penerapan sanksi bagi Airlines</li> <li>Mengusulkan kepada regulator terkait dengan regulasi untuk pemberlakuan sanksi / law enforcement bagi airlines yang tidak membayar utang</li> <li>Pemberlakuan Pembayaran Tunai Bagi Airlines Yang Memiliki Piutang Tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Implementing receivable restructuring agreement</li> <li>Conducting an assessment of the Allowance for Reducation in Receivables in accordance with PSAK 71 which is proactively followed up by conducting billing</li> <li>Evaluating Service User Payment Performance Compliance</li> <li>Drafting of Company Regulations regarding the implementation of sanctions for Airlines</li> <li>Proposing regulations for sanctions/law enforcement for airlines that do not pay debts to regulators</li> <li>Enforcement of cash payments for airlines with high debt</li> </ol>
<p>Risiko Finansial</p> <p><i>Risk of Finance</i></p>	<p>Tingginya Cash Out</p> <p><i>High in Cash Out</i></p>	<p>Divisi Manajemen Risiko, Anggaran dan Pengelolaan Keuangan</p> <p><i>Risk Management, Budget and Financial Management Division</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan aset peralatan navigasi terhadap kebakaran, kerusakan, dan gempa bumi.</li> <li>Melakukan <i>monitoring</i> kondisi peralatan secara berkala guna memastikan tidak ada kerusakan alat mendadak.</li> <li>Setiap ada usulan perubahan tarif utilitas harus di sepakati dalam Berita Acara oleh GM dengan konsultasi terlebih dahulu dengan Pembina di Kantor Pusat.</li> <li>Penundaan pembayaran tunjangan kepada karyawan.</li> <li>Pengajuan <i>exemption</i> untuk peralatan yang masuk dalam daftar stimulus kalibrasi tahun 2022.</li> <li>Perlindungan Perusahaan (asuransi) dari gugatan pihak ketiga atas kerugian akibat terjadinya insiden/accident kontribusi oleh Perum LPPNPI.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan Balai Kalibrasi, pelaksanaan kalibrasi super prioritas dan pembayaran disepakati dengan kalibrasi untuk waktu pembayarannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Protection of navigational equipment assets against fire, damage, and earthquakes.</li> <li>Regularly monitoring the equipment condition to ensure that there is no sudden equipment damage.</li> <li>Any proposed changes in utility rates should be agreed upon in the Minutes by the GM with prior consultation with the Supervisor at the Head Office.</li> <li>Delay in payment of allowances to employees.</li> <li>Application for exemption for equipment included in the 2022 calibration stimulus list.</li> <li>Company protection (insurance) from third party claims for losses due to incidents/accident contributed by Perum LPPNPI.</li> <li>Coordination with the Calibration Center, super priority calibration implementation, and agreement on payment of calibration fee</li> </ol>



JENIS Type	PENJELASAN RISIKO Risk Explanation	PENGELOLA RISIKO Risk Manager	MITIGASI Mitigation	
<p><b>Risiko Operasional</b></p> <p><i>Risk of Operational</i></p>	<p><b>Terganggunya Hubungan Industrial</b></p> <p><i>Disruption of Industrial Relations</i></p>	<p><b>Divisi Administrasi SDM dan Hubungan Industrial</b></p> <p><i>HR Administration and Industrial Relations Division</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mitigasi terkait risiko cash in (PIC ref terkait top risk no 1)</li> <li>Meningkatkan komunikasi formal/informal yang lebih intens antara Manajemen dengan Serikat Pekerja, Asosiasi Profesi, dan Stakeholder terkait tentang peningkatan cash in masih diupayakan (kondisi keuangan perusahaan)</li> <li>Mengupayakan pengembalian kesejahteraan karyawan seperti semula, apabila kondisi keuangan sudah membaik. Mitigasi terkait risiko keamanan (PIC ref terkait risiko keamanan).</li> <li>Meningkatkan pengamanan fasilitas obyek vital dengan melibatkan aparat TNI-POLRI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mitigation related to cash in risk (PIC ref related to top risk no 1)</li> <li>Developing more intense formal/informal communication between Management and Trade Unions, Professional Associations, and related Stakeholders regarding the increase in cash in is still being pursued (company's financial condition)</li> <li>Striving for the return of employee welfare to normal, when financial conditions have improved. Mitigation of security risks (PIC ref. related to security risks).</li> <li>Improving the security of vital object facilities by involving TNI-POLRI officers</li> </ol>
<p><b>Risiko Operasional</b></p> <p><i>Risk of Operational</i></p>	<p><b>Restrukturisasi Organisasi</b></p> <p><i>Organizational Restructuring</i></p>	<p><b>Divisi Organisasi dan Pengembangan SDM</b></p> <p><i>HR Organization and Development Division</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan restrukturisasi organisasi cabang sesuai dengan konsep pelayanan, sehingga diharapkan resistensi akan perubahan organisasi bisa dapat diminimalisir.</li> <li>Mengusulkan penggunaan konsultan untuk melaksanakan workload dan job analysis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Conducting branch organizational restructuring in accordance with the service concept, so that it is hoped that resistance to organizational change can be minimized.</li> <li>Suggesting hiring consultants to carry out workload and job analysis.</li> </ol>
<p><b>Risiko Strategis</b></p> <p><i>Risk of Strategy</i></p>	<p><b>Keamanan Data dan Keamanan Siber</b></p> <p><i>Data and Cyber Security</i></p>	<p><b>Divisi Teknologi Informasi</b></p> <p><i>Information Technology Division</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerbitkan master plan IT yang berisi kebijakan, pedoman dan SOP pengelolaan IT.</li> <li>Asesmen sistem manajemen keamanan informasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Publish an IT master plan that contains IT management policies, guidelines and SOPs.</li> <li>Information security management system assessment.</li> </ol>
<p><b>Risiko Operasional</b></p> <p><i>Risk of Operational</i></p>	<p><b>Kelengkapan Prosedur Pelayanan Navigasi Penerbangan</b></p> <p><i>Completeness of Aviation Navigation Service Procedures</i></p>	<p><b>Divisi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Navigasi</b></p> <p><i>Planning and Development of Navigation Services Division</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan Prosedur Penerbangan Untuk Bandara Internasional dan Domestik</li> <li>Usulan restrukturisasi (penggabungan) antara Unit Perancang Prosedur Penerbangan pada Divisi SS dan Cabang PIA</li> <li>Penyusunan dan Reviu Dokumen Standar Pelayanan Navigasi Penerbangan</li> <li>Melakukan evaluasi terhadap PKS dan/atau LOCA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Creating Flight Procedures for International and Domestic Airports</li> <li>Proposing a restructuring (merger) between the Aviation Procedure Design Unit in the SS Division and the PIA Branch</li> <li>Standar Pelayanan Navigasi Penerbangan Compilation and Document Review of Aviation Navigation Service Standards</li> <li>Evaluations on PKS and/or LOCA</li> </ol>




JENIS Type	PENJELASAN RISIKO Risk Explanation	PENGELOLA RISIKO Risk Manager	MITIGASI Mitigation	
Risiko Strategis <i>Risk of Strategy</i>	Keamanan / Keselamatan Di Lingkungan Kerja dan Aset Kritis  <i>Security / Safety in the Work Environment and Critical Assets</i>	Divisi Keamanan, kesehatan dan Lingkungan Kerja  <i>Security, Health and Work Environment Division</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengawasan keamanan (internal/eksternal) pelayanan navigasi penerbangan dan upaya pemenuhan tindaklanjutnya.</li> <li>Penyusunan SOP Prosedur Keamanan pada lokasi-lokasi yang belum memiliki dokumen tersebut.</li> <li>Penyusunan Manual / SOP SMK3 pada lokasi - lokasi yang belum memiliki dokumen tersebut.</li> <li>Pelaksanaan Audit internal SMK3 di Kantor Cabang.</li> <li>Melakukan analisa risiko keamanan pelayanan navigasi penerbangan di Wilayah Papua.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Conducting security supervision (internal/external) of flight navigation services and efforts to fulfill its follow-up</li> <li>Preparation of SOP for Security Procedures at locations that are yet to have the document.</li> <li>Preparation of SMK3 Manual / SOP in locations that are yet to have the document.</li> <li>Conducting SMK3 internal audit at Branch Offices.</li> <li>Conducting security risk analysis of flight navigation services in the Papua Region.</li> </ol>
Risiko Operasional <i>Risk of Operational</i>	Kerusakan dan Penurunan Performa Peralatan  <i>Equipment Damage and Performance Degradation</i>	Divisi Kesiapan Fasilitas Teknik  <i>Engineering Facility Readiness Division</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reviu <i>maintenance plan</i>/ konsep pemeliharaan fasilitas (CNSA dan Support) serta sinkronisasi regulasi di internal Perum LPPNPI maupun regulasi nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</li> <li>Optimalisasi penggunaan aset non aktif sebagai alat produksi</li> <li>Optimalisasi penggunaan suku cadang eksisting yang dikuasai oleh AirNav Indonesia</li> <li>Mengurangi pelaksanaan perbaikan melalui pihak ke-3 dengan memaksimalkan upaya-upaya perbaikan secara mandiri oleh teknisi AirNav Indonesia</li> <li>Memaksimalkan teknisi expert yang dimiliki AirNav Indonesia untuk pelaksanaan perbaikan fasilitas di seluruh lokasi AirNav Indonesia dibawah kendali Kantor Pusat dengan dukungan para General Manager</li> <li>Reviu implementasi aplikasi LASIMI</li> <li>Pelaksanaan kalibrasi dengan skala prioritas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta upaya pengajuan <i>exemption</i> kalibrasi yang digantikan dengan pelaksanaan <i>ground inspection</i> Permohonan stimulus kalibrasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reviewing the maintenance plans/ facility maintenance concepts (CNSA and Support) as well as synchronization of internal regulations at Perum LPPNPI and national regulations stipulated by the Directorate General of Civil Aviation</li> <li>Optimizing the use of inactive assets as production tools</li> <li>Optimizing the use of existing spare parts controlled by AirNav Indonesia</li> <li>Reducing the implementation of repairs through 3rd parties by maximizing the repair efforts independently by AirNav Indonesia technicians</li> <li>Maximizing AirNav Indonesia's expert technicians to repair facilities at all AirNav Indonesia locations under the control of the Head Office with the support of General Managers</li> <li>Reviewing the implementation of LASIMI application</li> <li>Implementation of calibration on a priority scale based on budget availability and efforts to submit calibration exemptions which are replaced by performing ground inspection Requests for calibration stimulus.</li> </ol>
Risiko Operasional <i>Risk of Operational</i>	Readiness (Kecakapan dan Jumlah) Sumber Daya Manusia  <i>Readiness (Proficiency and Number) of Human Resources</i>	Divisi Organisasi dan Pengembangan SDM  <i>HR Organization and Development Division</i>	Accept	Accept

## Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Perusahaan melakukan penilaian terhadap *Risk Maturity Index* (RMI) dengan mengacu kepada standar ISO 31000:2018 *Risk Management Guidelines* dengan model yang digunakan adalah dikembangkan dan dimodifikasi dari *Risk Maturity Index* AON. Hal yang berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu untuk responden asesmen *Risk Maturity* tahun 2022 dilakukan dengan melibatkan seluruh pegawai Perum LPPNPI dari semua level. Walaupun terjadi peningkatan jumlah responden yang sangat signifikan (sekitar 9x lipat), total capaian RMI tahun 2022 tidak berbeda jauh dengan capaian tahun 2021 yaitu dari 3,72 menjadi 3,82 di tahun 2022. Di tahun 2022, *Risk Maturity* level Perum LPPNPI masih pada level *Defined*.

## Evaluation of the Risk Management System Effectiveness

Similar to the previous years, the company assessed the *Risk Maturity Index* (RMI), referring to the ISO 31000:2018 *Risk Management Guidelines* standard with the model developed and modified by AON *Risk Maturity Index*. The difference in the assessment from the previous year is that the 2022 *Risk Maturity Assessment* respondents were all employees of Perum LPPNPI at all levels. Despite a significant increase in respondents (around nine times), the total RMI score in 2022 is similar to that in 2021. The 2022 RMI score was 3.82 and 3.72 in 2021. In 2022, Perum LPPNPI's *Risk Maturity* remained at the *Defined* level.

	Jenis Type	Capaian 2022 2022 Achievement	Capaian 2021 2021 Achievement	Capaian 2020 2020 Achievement
	Semua Cabang <i>All Branch Offices</i>	3,41	3,80	4,04
	Kantor Pusat <i>Head Office</i>	4,23	3,55	3,52
	Capaian Keseluruhan AirNav Indonesia <i>AirNav Indonesia Total Achievement</i>	3,82	3,72	3,88

Pencapaian ini menunjukkan Perusahaan telah menerapkan ERM di seluruh unit kerja dan telah melaksanakan ERM dengan efektif. Perusahaan menargetkan level maturitas ERM dalam jangka waktu 2 tahun ke depan dapat mencapai level 4 "*Managed*". Level ini memerlukan dukungan SDM yang kuat sehingga diperlukan program peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan budaya sadar risiko perusahaan. Perusahaan meningkatkan kompetensi SDM melalui:

- Peningkatan kompetensi tentang *risk assessment technic*;
- Penetapan Person in Charge (PIC) pada masing-masing unit kerja di Kantor Pusat dan Cabang;
- Pembangunan sistem Manajemen Risiko Perusahaan berbasis IT;
- Risk Awareness Campaign*.

Direksi dan manajemen terlibat secara aktif untuk memastikan penerapan sistem manajemen risiko dilakukan dengan baik, sesuai peta jalan manajemen risiko perusahaan dan mampu memenuhi target skor RMI yang telah ditetapkan.

This achievement shows that the Company has implemented ERM in all work units effectively. The Company targets the ERM maturity level in the next 2 years to reach level 4 "*Managed*". This level requires strong support from HR and programs to improve HR competence and develop a culture of risk awareness. The Company improves HR competency through:

- Increased competency regarding *risk assessment technic*;
- Appointment of Person in Charge (PIC) for each work unit at the Head Office and Branch Offices;
- Development of an IT-based Enterprise Risk Management system;
- Risk Awareness Campaign*.

The Board of Directors and management are actively involved to ensure that the risk management system is implemented properly by following the Company's risk management roadmap as well as to meet the RMI score target.

## Perkara Hukum Lawsuit

AirNav Indonesia menghadapi perkara hukum yang tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan. AirNav Indonesia mengupayakan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui Biro Hukum Perusahaan.

AirNav Indonesia is facing a lawsuit which has no significant effect on the continuity of the Company's business. AirNav Indonesia seeks to resolve legal issues in accordance with applicable legal provisions through the Corporate Law Bureau.



### Permasalahan Hukum Legal Issues

Permasalahan Hukum Legal Issues	2022		2021		2020	
	Pidana Civil	Perdata Criminal	Pidana Civil	Perdata Criminal	Pidana Civil	Perdata Criminal
<b>AirNav Indonesia</b>						
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Completed and has fixed legal force</i>	0	0	1	0	0	0
Dalam proses penyelesaian <i>In the settlement process</i>	1	1	1	0	2	0
<b>Dewan Pengawas dan Direksi/ The Supervisory Board and the Board of Directors</b>						
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Completed and has fixed legal force</i>	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian <i>In the settlement process</i>	0	0	0	0	0	0

### Sanksi Administrasi

AirNav Indonesia tidak menerima sanksi administrasi yang dikenakan oleh otoritas terkait selama periode pelaporan.

### Administrative Sanctions

During the reporting period, there were no administrative sanctions imposed by the relevant authorities either to the Company.





**Perincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:**

*Details of legal issues faced by the Company in 2022 are as follows:*

NO	NOMOR PERKARA Case Number	POSISI AIRNAV INDONESIA AirNav Indonesia Position	POKOK GUGATAN Merits of the Case	STATUS PERKARA Case Status	PENGARUH TERHADAP AIRNAV INDONESIA Impact on AirNav Indonesia
1	41/2021/BANI Bandung	Termohon <i>Defendant</i>	Tuntutan PT Delima Agung Utama akibat pemutusan Perjanjian Pembangunan Gedung Tower di Bandara Kertajati. Tuntutan berupa kerugian materiil senilai Rp6.478.273.600,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan kerugian immateriil senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).  <i>PT Delima Agung Utama's lawsuit was filed due to the termination of the Tower Building Development Agreement at Kertajati Airport. Claims is in the form of material losses of IDR6,478,273,600 (six billion four hundred seventy eight million two hundred seventy three thousand and six hundred rupiahs) and immaterial losses of IDR1,000,000,000 (one billion rupiahs).</i>	Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap  <i>Completed and has fixed legal force</i>	Perum LPPNPI melakukan pembayaran terhadap sisa pekerjaan PT. Delima Agung Utama sesuai hasil quantity survey oleh pihak ketiga.  <i>Perum LPPNPI pays for the remaining work of PT. Delima Agung Utama according to the results of a quantity survey by a third party.</i>
2	Perkara Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.122/PDT/2022N/PT.BTN. tanggal 31 Mei 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : (283/Pdt.G/2019/PN.Tng).  <i>Cassation case on Court Judgment of Banten High Court No. 122/PDT/2022N/PT.BTN., dated May 31, 2022 in conjunction with Court Judgment of Tangerang District Court No. (283/Pdt.G/2019/PN.Tng.</i>	Termohon Kasasi <i>defendant for cassation</i>	Perbuatan melawan hukum sehubungan dengan hubungan hukum yang timbul berdasarkan Perjanjian Nomor : PJJ.06.02.02/00/LPPNPI/01/2018/001 tentang Pembangunan Gedung Tower Beserta Sarana Pendukungnya di Banjarmasin. dalam gugatannya PT. lyhamulik Bangkang Turan mengajukan penggantian kerugian materiil sebesar Rp2.424.790.030,- dan kerugian imateriil sebesar Rp23.081.416.460,-  <i>Unlawful act in connection with a legal relation under the Agreement No. PJJ.06.02.02/00/LPPNPI/01/2018/001 concerning Tower Construction Building and its Supporting Facilities in Banjarmasin. In the lawsuit, PT. lyhamulik Bangkang Turan is suing for material loss of IDR2,424,790,030 and immaterial losses of IDR23,081,416,460.</i>	Dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung RI. <i>In the settlement process at Supreme Court of Indonesia</i>	-
3	Perkara Perdata Nomor :338/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Tim. <i>Civil Case No. 338/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Tim.</i>	Turut Tergugat I <i>Defendant I</i>	Perbuatan melawan hukum sehubungan dengan kerugian yang di klaim dialami oleh Penggugat (PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk.) akibat adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kecelakaan pesawat udara.  <i>Unlawful act in connection with the loss claimed by the Plaintiff (PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk.) which resulted in an airplane accident.</i>	Dalam proses penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.  <i>In the settlement process at East Jakarta District Court</i>	-





## Kode Etik Code of Ethics

**A**irNav Indonesia menerapkan pilar governansi perilaku beretika dalam aktivitas bisnisnya. Standar perilaku beretika berlandaskan pada visi, misi, dan budaya Perusahaan yang kemudian dituangkan dalam Kode Etik Perusahaan. Kode Etik atau *code of conduct* adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari budaya Perusahaan serta pedoman perilaku yang membentuk dan mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Perusahaan. Kode etik berlaku bagi seluruh individu yang bertindak atas nama Perusahaan, serta menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan hubungan dengan Perusahaan.

**A**irNav Indonesia implements the pillars of ethical behavior governance in its business activities. Standards of ethical behavior are based on the Company's vision, mission, and culture, which are then stated in the Company's Code of Ethics. Code of Ethics or code of conduct is a set of commitments consisting of the Company's culture and Code of Conduct to form and direct behavior to conform to the culture and values of the Company. This applies to all individuals acting on behalf of the Company and its subsidiaries, as well as reference for all stakeholders with relationships with the Company.

### Penetapan dan Pokok-Pokok Isi Pedoman Perilaku

Direksi menetapkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) berdasarkan Peraturan Direksi No. PER.003/LPPNPI/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, yang berlaku bagi seluruh insan AirNav Indonesia. Pedoman perilaku mengatur tentang etika perusahaan, etika kerja dan perilaku, pernyataan kepatuhan, dan penegakan pedoman perilaku.

### Determination and Main Contents of the Code of Conduct

The Code of Conduct is determined based on the Board of Directors Regulation No. PER.003/LPPNPI/I/2019 dated January 28, 2019. The Code of Conduct applies to all AirNav Indonesia personnel, including the Board of Directors, Supervisory Board, and all employees. The Code of Conduct regulates corporate ethics, work ethics and behavior, compliance statement, and enforcement of the code of conduct.

#### Pokok-Pokok Isi Pedoman Perilaku Perusahaan meliputi: The contents of the Company's Code of Conduct include the following:

**1 Pedoman Etika Perusahaan**, mencakup Etika Usaha, Etika Perusahaan terhadap Negara, Pemerintah, Lembaga Legislatif, Pemilik Modal, Penyedia Barang dan Jasa, Pelanggan, Mitra Kerja, Insan AirNav Indonesia, Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) dan Lindungan Lingkungan; Serikat Karyawan, Organisasi Profesi, Media Massa, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan, serta Masyarakat dan Lingkungan Hidup.

*Corporate Ethics Guidelines, including Business Ethics, Corporate Ethics towards the State, Corporate Ethics towards the Government, Corporate Ethics towards Legislative Institutions, Corporate Ethics towards Shareholders, Corporate Ethics towards Goods and Service Providers, Corporate Ethics towards Customers, Corporate Ethics towards Business Partners, Corporate Ethics towards AirNav Indonesia Personnel, Corporate Ethics towards Health, Safety, Security (OHS) and Environmental Protection, Corporate Ethics towards Employee Unions, Corporate Ethics towards Professional Organizations, Corporate Ethics towards Mass Media, and Corporate Ethics towards NGO and Community Organizations, as well as Corporate Ethics towards society and the environment.*

**2 Pedoman Etika Kerja dan Tata Perilaku**, mencakup Etika Kerja, Integritas Laporan Keuangan, Suap, Donasi, Jamuan dan Hadiah, Biaya Perjalanan Dinas, Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Kerja, Kontribusi dan Aktivitas Politik, Perilaku sebagai Pimpinan, Perilaku sebagai Bawahan, serta Perilaku terhadap Sesama Insan AirNav Indonesia.

*Guidelines for Work Ethics and Code of Conduct, covering Work Ethics, Integrity of Financial Statements, Bribes, Donations, Meals and Gifts, Official Travel Expenses, Daily Official Uniform and Work Uniform, Political Contributions and Activities, Behavior as Leaders, Behavior as Subordinates, and Behavior towards Fellow AirNav Indonesia Personnel.*

**3 Penerapan Pedoman Perilaku**, mencakup Organisasi, Sosialisasi Pedoman Perilaku, Pernyataan Kepatuhan Insan AirNav Indonesia, Pembaharuan/Revisi Pedoman Perilaku, Penegakan Pedoman Perilaku, serta Sanksi Terhadap Pelanggaran Pedoman Perilaku.

*Implementation of the Code of Conduct, including Organization, Socialization of the Code of Conduct, Statement of Compliance of AirNav Indonesia Personnel, Update/Revision of the Code of Conduct, Enforcement of the Code of Conduct, and Sanctions for Violations of the Code of Conduct.*

## Internalisasi dan Penegakan Kode Etik

AirNav Indonesia melaksanakan internalisasi kode etik melalui kegiatan sosialisasi secara rutin dan menyeluruh baik di kantor pusat maupun cabang. Perusahaan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi segenap insan Perusahaan untuk memperoleh informasi tentang kode etik perusahaan. Hal tersebut bertujuan menciptakan kesepahaman dan komitmen bersama dari segenap jajaran internal Perusahaan untuk menaati dan menjalankan kode etik Perusahaan. Komitmen terhadap kode etik dinyatakan melalui penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen Insan Perum LPPNPI yang diperbaharui kembali setiap tahunnya.

Setiap pelanggaran terhadap kode etik Perusahaan akan mendapatkan sanksi berupa surat peringatan, penurunan level jabatan dua tingkat lebih rendah atau lebih, dan pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan karyawan sendiri. Setiap insan yang melakukan pelanggaran memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung. Sanksi diberikan apabila pelanggar terbukti kuat melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai Kode Etik Perusahaan.

## Transparansi Pelanggaran Kode Etik

Perusahaan secara konsisten menegakkan Kode Etik di lingkungan Perusahaan. Rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etik selama 3 (tiga) tahun terakhir disampaikan dalam tabel berikut:

Jenis Sanksi Sanction	2022	2021	2020
Surat Peringatan Warning Letter	14	12	23
Penurunan level jabatan dua tingkat lebih rendah atau lebih Demotion by two levels or more	0	0	0
Memberhentikan dengan hormat bukan atas permintaan karyawan sendiri Honorable dismissal not at the employee request	0	1	1
Skorsing/pembebasan tugas sementara selama 6 bulan Suspension/temporary dismissal for 6 months	1	0	0
Pembebasan dari jabatan struktural atau jabatan struktural lainnya Suspension from structural positions or other structural positions	1	0	0
Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Dishonorable discharge	1	0	0
<b>Jumlah/Total</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>24</b>

## Internalization and Enforcement of the Code of Ethics

AirNav Indonesia conducts internalization of the Code of Ethics through regular and comprehensive socialization at the head office or branch offices. The Company provides the widest possible access for all Company personnel to obtain this information. The goal is to create mutual understanding and commitment from all levels within the Company to comply with and properly implement the Code of Conduct. The Code of Conduct is also socialized through the signing of Letter of Commitment of Perum LPPNPI Personnel which is renewed each year.

Any violation of the Company's code of ethics will be subject to sanctions in the form of a warning letter, demotion of two levels lower or more, and honorable dismissal not at the request of the employee himself. Personnel of Perum LPPNPI committed the Code of Conduct violation have the right to convey their explanation to the direct superior prior to coaching or disciplinary action. Sanctions are given if the violator is proven to have committed a violation against the values of the Company's Code of Ethics. Any employee who has been found, with strong evidence, to have violated the values of the Company's Code of Ethics shall be firmly penalized.

## Transparency of Code of Conduct Violations

AirNav Indonesia consistently enforces the Code of Ethics within the Company. The following table is sanctions imposed regarding the enforcement of the Code of Ethics for the last 3 (three) years:



## Akses Informasi dan Data Perusahaan

### Access to Company Information and Data

Perusahaan menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan akses informasi kepada pemangku kepentingannya melalui situs web Perusahaan [www.airnavindonesia.co.id](http://www.airnavindonesia.co.id). Perusahaan melakukan pemutakhiran informasi secara berkala sesuai kegiatan dan perubahan informasi Perusahaan. Adapun informasi yang disediakan meliputi:

1. Profil Perusahaan: Sejarah, Visi & Misi, Susunan Dewan Pengawas, Susunan Direksi, Struktur Organisasi, dan Penghargaan;
2. Layanan yang diberikan: Jenis Pelayanan, Alamat Kantor Cabang, Fasilitas, Ruang Udara, dan Kemitraan;
3. Informasi Publik dan Regulasi;
4. Tata Kelola Perusahaan;
5. Media, Siaran Pers, dan Artikel Kegiatan Perusahaan; dan
6. Buletin Keselamatan.

AirNav Indonesia upholds the principle of transparency to stakeholders on Company website [www.airnavindonesia.co.id](http://www.airnavindonesia.co.id). The Company regularly updates all information related to Company activities and changes in Company information. The scope of information includes:

1. Company Profile: History, Vision and Mission, Supervisory Board Profile, Board of Directors Profile, Organization Structure, and Award;
2. Services Provided: Type of Services, Address of Branch Offices, Facilities, Air Space and Partnership;
3. Public Information and Regulations;
4. Corporate Governance;
5. Media, Press Releases and Articles on Company Activities; and
6. Safety Bulletins.

Perusahaan juga membuka akses informasi lainnya, yang relevan dan dapat dibagikan kepada pemangku kepentingan, dengan menghubungi:  
*Stakeholders may also access additional information by contacting the following:*

#### Gedung AirNav Indonesia/ AirNav Indonesia Building

Jl. Ir. H. Juanda No. 1,  
Kecamatan Tangerang, Banten  
15121



Telepon | Phone  
+62 21 5591 5000



Faksimile | Facsimile  
+62 21 5591 5000



Surel | Email  
[humas@airnavindonesia.co.id](mailto:humas@airnavindonesia.co.id)

## Korespondensi dan Laporan Berkala

Perusahaan melakukan korespondensi dengan Kementerian Perhubungan selaku kementerian teknis, Kementerian BUMN selaku kuasa pemilik modal, dan lembaga terkait lainnya sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban. Korespondensi yang dilakukan berupa surat, laporan, dan kebijakan, baik yang ditujukan secara langsung maupun berupa tembusan. Pada periode pelaporan Perusahaan telah melakukan korespondensi sebanyak 16.107 kali.

## Correspondence and Periodic Reports

The Company maintains correspondence with the Ministry of Transportation as the technical ministry, the SOE Ministry as the authorized shareholders, and other relevant institutions as a commitment to information disclosure and accountability. The correspondence is in the form of letters, reports, and policies addressed directly and in the form of copies. During the reporting period, the Company has created 16.107 correspondences.



## Hubungan Media

AirNav Indonesia memperhatikan pentingnya penyampaian informasi, regulasi, dan ketentuan keselamatan penerbangan kepada pemangku kepentingannya. AirNav Indonesia berupaya membangun hubungan yang baik dengan media melalui berbagai kegiatan baik formal maupun informal. Pada tahun 2022 AirNav Indonesia yang diwakilkan Unit Hubungan Masyarakat tidak melakukan kegiatan/aktivitas bersama Media seperti Media Gathering dikarenakan masih berlakunya kebijakan PPKM. Namun, AirNav Indonesia tetap aktif melakukan pemberitaan seputar perusahaan dan kegiatannya melalui penyebar luasan siaran berita (*pers release*) yang dilakukan melalui *Whatsapp Group* dan *Blast Email* guna menjaga citra positif perusahaan. Adapun pemberitaan yang disebar AirNav Indonesia Tahun 2022 di antaranya sebagai berikut:

## Media Relations

AirNav Indonesia pays attention to the importance of providing aviation safety information, regulations, and provisions to stakeholders. AirNav Indonesia seeks to build good relations with the media through various activities, both formal and informal. The Public Relations Unit of AirNav Indonesia did not perform any activities with the Media in 2022, such as Media Gathering, because of the policy of Imposing Restrictions on Community Activities (PPKM). However, AirNav Indonesia remained active in publishing press releases about the company and its activities through the *Whatsapp Group* and *Email Blast* in order to maintain a positive image of the company. In 2022, AirNav Indonesia released a number of headlines, including:

TANGGAL Date	TAJUK Headline	SUMBER Source
5 Januari 2022 <i>January 5, 2022</i>	SP.001/HMS/I/2022 : AIRNAV Indonesia Layani 52.871 Pergerakan Pesawat Udara Selama Periode Nataru 2021-2022 <i>SP.001/HMS/I/2022 : AIRNAV Indonesia Serves 52,871 Air Traffic Movements During Nataru Period 2021-2022</i>	<a href="https://industri.kontan.co.id/news/selama-libur-nataru-airnav-indonesia-layani-52871-pergerakan-pesawat">https://industri.kontan.co.id/news/selama-libur-nataru-airnav-indonesia-layani-52871-pergerakan-pesawat</a>
22 Januari 2022 <i>January 22, 2022</i>	Diangkat Menjadi Dirut AirNav, Polana Dirut Wanita Pertama dalam Sejarah AirNav <i>Appointed as CEO of AirNav, Polana is the first female CEO in AirNav's history</i>	<a href="https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1342432520/diangkat-menjadi-dirut-airnav-polana-dirut-wanita-pertama-dalam-sejarah-airnav">https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1342432520/diangkat-menjadi-dirut-airnav-polana-dirut-wanita-pertama-dalam-sejarah-airnav</a>
10 Maret 2022 <i>March 10, 2022</i>	Dukung MOTOGP Mandalika, Airnav Himbau untuk Tidak Menerbangkan Drone Liar <i>In support of MOTOGP Mandalika, Airnav Urges Not to Fly Illegal Drones</i>	<a href="https://koran-jakarta.com/masyarakat-diimbau-tak-terbangkan-drone-di-mandalika?page=all">https://koran-jakarta.com/masyarakat-diimbau-tak-terbangkan-drone-di-mandalika?page=all</a>
24 Maret 2022 <i>March 24, 2022</i>	Sukses Turunkan Angka Laporan Balon Udara Liar, Strategi Komunikasi AirNav Raih Juara BCOMSS 2022 <i>Successfully Reducing the Number of Reports of Illegal Air Balloons, AirNav's Communication Strategy Wins the 2022 BCOMSS Champion</i>	<a href="https://halobanten.com/43/ragam/sukses-turunkan-angka-laporan-balon-udara-liar-airnav-sabet-juara-bcomss-2022/">https://halobanten.com/43/ragam/sukses-turunkan-angka-laporan-balon-udara-liar-airnav-sabet-juara-bcomss-2022/</a>
30 April 2022 <i>April 30, 2022</i>	Tembus 1000 Flight, Rekor Traffic Harian Airnav di Bandara Soetta Sejak Pandemi Melanda <i>Reaching 1,000 Flights, Airnav's Daily Traffic Record at Soetta Airport since the Pandemic Hit</i>	<a href="https://bisnis.tempo.co/read/1587495/penerbangan-harian-tembus-1-000-di-bandara-soetta-airnav-rekor-tertinggi">https://bisnis.tempo.co/read/1587495/penerbangan-harian-tembus-1-000-di-bandara-soetta-airnav-rekor-tertinggi</a>
11 Mei 2022 <i>May 11, 2022</i>	Posko Monitoring Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022 Berakhir, AirNav Catatkan Sejumlah Cerita Menarik Selama Periode Posko <i>The 2022 Eid Air Transport Monitoring Post Ends, AirNav Records a Number of Interesting Stories During the Period</i>	<a href="https://mediaindonesia.com/ekonomi/491620/airnav-indonesia-catatkan-sejumlah-cerita-menarik-selama-periode-posko">https://mediaindonesia.com/ekonomi/491620/airnav-indonesia-catatkan-sejumlah-cerita-menarik-selama-periode-posko</a>



TANGGAL Date	TAJUK Headline	SUMBER Source
18 Juni 2022 <i>June 18, 2022</i>	Peduli Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, AirNav Salurkan Bantuan Modal dan Pelatihan Kepada Yayasan Pupa di Bengkulu <i>Caring for Victims of Violence Against Women and Children, AirNav Distributes Capital and Training Assistance to the Pupa Foundation in Bengkulu</i>	<a href="https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343692823/peduli-korban-tindak-kekerasan-airnav-salurkan-bantuan-modal-pelatihan">https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343692823/peduli-korban-tindak-kekerasan-airnav-salurkan-bantuan-modal-pelatihan</a>
26 Juni 2022 <i>June 26, 2022</i>	Gelar Pelatihan Kewirausahaan, AirNav Indonesia Berdayakan Masyarakat Lokal Pekalongan <i>Holds Entrepreneurship Training, AirNav Indonesia Empowers Pekalongan Local Communities</i>	<a href="https://pekalongankota.go.id/berita/gelar-pelatihan-kewirausahaan-perum-lppnpi-berdayakan-masyarakat-lokal-pekalongan.html">https://pekalongankota.go.id/berita/gelar-pelatihan-kewirausahaan-perum-lppnpi-berdayakan-masyarakat-lokal-pekalongan.html</a>
1 Agustus 2022 <i>August 1, 2022</i>	Raih Tiga Penghargaan HCREA 2022 Sekaligus, Bukti Komitmen Airnav Pada Isu Strategis Human Capital <i>Winning Three 2022 HCREA Awards Simultaneously, Evidence of Airnav's Commitment to Human Capital Strategic Issues</i>	<a href="https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/yNLOEvqK-33-perusahaan-raih-penghargaan-human-capital-on-resilience-excellence-award">https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/yNLOEvqK-33-perusahaan-raih-penghargaan-human-capital-on-resilience-excellence-award</a>
1 September 2022 <i>September 1, 2022</i>	Revitalisasi Bandara Selesai, Airnav Siap Layani Kembali Penerbangan Komersial Di Bandara Halim Perdanakusuma <i>Airport Revitalization Completed, Airnav Ready to Serve Commercial Flights Again at Halim Perdanakusuma Airport</i>	<a href="https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1344349053/revitalisasi-bandara-selesai-airnav-siap-layani-kembali-penerbangan-komersial-di-bandara-halim-perdanakusuma">https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1344349053/revitalisasi-bandara-selesai-airnav-siap-layani-kembali-penerbangan-komersial-di-bandara-halim-perdanakusuma</a>
13 September 2022 <i>September 13, 2022</i>	Peringatan Satu Dekade AirNav Indonesia: Sepuluh Tahun Mengabdikan, Sebuah Persembahkan untuk Ibu Pertiwi <i>AirNav Indonesia's One Decade Commemoration: Ten Years of Service, A Dedication to Motherland</i>	<a href="https://www.beritatrans.com/artikel/229586/Airnav-Peringati--1-Dekade-Mengabdikan-untuk-Ibu-Pertiwi/">https://www.beritatrans.com/artikel/229586/Airnav-Peringati--1-Dekade-Mengabdikan-untuk-Ibu-Pertiwi/</a>
18 Oktober 2022 <i>October 18, 2022</i>	Tingkatkan Kualitas Layanan dan Keselamatan Penerbangan, AirNav Tandatangani MOU dengan IATA <i>To Improve Service Quality and Aviation Safety, AirNav Signs MOU with IATA</i>	<a href="https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1345238092/tingkatkan-kualitas-layanan-dan-keselamatan-penerbangan-airnav-tandatangani-mou-dengan-iata">https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1345238092/tingkatkan-kualitas-layanan-dan-keselamatan-penerbangan-airnav-tandatangani-mou-dengan-iata</a>
8 November 2022 <i>November 8, 2022</i>	Gandeng CT Arsa dalam Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, AirNav Terus Salurkan Manfaat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat <i>Collaborating with CT Arsa in the Environmental Social Responsibility Program, AirNav Continues to Distribute Benefits to Improve Community Welfare</i>	<a href="https://news.detik.com/berita/d-6394213/ct-arsa-gandeng-airnav-demi-pendidikan-dan-kesehatan-merata-ke-pelosok">https://news.detik.com/berita/d-6394213/ct-arsa-gandeng-airnav-demi-pendidikan-dan-kesehatan-merata-ke-pelosok</a>
14 November 2022 <i>November 14, 2022</i>	AirNav Indonesia Siap Sukseskan Penyelenggaraan KTT G20 <i>AirNav Indonesia is Ready to Succeed in Organizing the G20 Summit</i>	<a href="https://www.metrotvnews.com/play/bzGCgpx8-airnav-indonesia-siap-sukseskan-ktt-g20-bali">https://www.metrotvnews.com/play/bzGCgpx8-airnav-indonesia-siap-sukseskan-ktt-g20-bali</a>
28 November 2022 <i>November 28, 2022</i>	Kuatkan Korban Gempa Cianjur, AirNav Peduli Kirimkan Relawan dan Bantuan <i>Support for Cianjur Earthquake Victims, AirNav Cares to Send Volunteers and Aid</i>	<a href="https://mediaindonesia.com/nusantara/540645/kuatkan-korban-gempa-cianjur-airnav-peduli-kirim-relawan-dan-bantuan">https://mediaindonesia.com/nusantara/540645/kuatkan-korban-gempa-cianjur-airnav-peduli-kirim-relawan-dan-bantuan</a>
1 Desember 2022 <i>December 1, 2022</i>	Raih Top Financial Performance BUMN 2022, AirNav Paparkan Rahasia Melewati Masa Pandemi Yang Sulit <i>Achieving Top SOEs Financial Performance in 2022, AirNav Reveals Secrets of Getting Through a Difficult Pandemic Period</i>	<a href="https://www.banten-news.com/raih-top-financial-performance-bumn-2022-airnav-paparkan-rahasia-melewati-masa-pandemi-yang-sulit/">https://www.banten-news.com/raih-top-financial-performance-bumn-2022-airnav-paparkan-rahasia-melewati-masa-pandemi-yang-sulit/</a>

AirNav Indonesia menyampaikan keterbukaan informasi melalui Rilis Media dan situs web Perusahaan. Rilis media secara lengkap dapat diakses pada <https://airnavindonesia.co.id/siaran/pers>.  
*AirNav Indonesia provides information through Media Releases and the Company's website which can be accessed at <https://airnavindonesia.co.id/siaran/pers>.*



## Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System*

**A**irNav Indonesia memiliki mekanisme sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS), yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang indikasi pelanggaran dalam lingkungan Perusahaan, dengan berdasar pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan WBS mengacu pada Peraturan Direksi No. PER.006/LPPNPI/II/2015 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) di Lingkungan Perum LPPNPI.

Sistem pelaporan pelanggaran menangani pengaduan tindakan yang berpotensi merugikan Perusahaan, meliputi penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, serta gratifikasi. Adapun saluran pengaduan WBS yang disediakan Perusahaan, sebagai berikut:

**A**irNav Indonesia has a whistleblowing system (WBS), which a system to file a report about any indications of violations within the Company based on accountable evidence. WBS is implemented according to the Board of Directors Regulation No. PER.006/LPPNPI/II/2015, on the Whistleblowing System in Perum LPPNPI.

The WBS handles reports of actions deemed harmful to the Company, such as deviations from the applicable laws and regulations, abuse of power for other interests outside the Company, extortion, fraudulent acts, conflicts of interest, and gratifications. AirNav Indonesia has set up WBS reporting channels as follows:



Telepon | Phone  
+62 21 5591 5000



Faksimile | Facsimile  
+62 21 5591 5001



Situs Web | Website  
[www.airnavindonesia.co.id](http://www.airnavindonesia.co.id)



Surel | Email  
[wbs.airnavindonesia@gmail.com](mailto:wbs.airnavindonesia@gmail.com)

### Perlindungan bagi Pelapor

AirNav Indonesia memastikan jaminan perlindungan bagi Pelapor, sehingga mendorong insan AirNav Indonesia berani melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, Perusahaan dapat menangani pelanggaran maupun potensi pelanggaran sesegera mungkin untuk memitigasi risiko yang lebih besar. Adapun jaminan perlindungan tersebut meliputi:

- 1 Kerahasiaan identitas pelapor;
- 2 Perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, maupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun;
- 3 Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut.

### Protection Of Whistleblower

AirNav Indonesia guarantees protection for Whistleblowers to encourage AirNav Indonesia personnel any form of violations without the fear of risks or repercussions. Thus, the Company can handle violations or any slight indication as soon as possible to prevent grave consequences. The guarantee of protection includes:

- 1 Confidentiality of the whistleblower's identity;
- 2 Protection of the whistleblower from any form of threats, intimidation, or unacceptable behavior from any parties, as long as the whistleblower maintains the confidentiality of the reported violation;
- 3 Protection of the whistleblower also applies to parties, who are conducting investigations or providing information related to the report/disclosure.



## Pihak yang Mengelola Pengaduan dan Prosedur Pengelolaan WBS

Satuan Pengawasan Intern (SPI) berwenang untuk mengelola administrasi pengaduan pelanggaran di lingkungan internal Perusahaan. Unit SPI menerima aduan pelanggaran yang disampaikan melalui saluran WBS. Pengaduan yang diterima kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan indikasi dan prosedur, termasuk melakukan audit khusus atau audit operasional dan keuangan apabila diperlukan.

Perusahaan membentuk tim investigasi apabila diperlukan, untuk melakukan pengumpulan data atau bukti terkait pelanggaran. Tim investigasi dimungkinkan beranggotakan investigator eksternal sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Perusahaan telah menetapkan pihak yang menindaklanjuti pengaduan melalui WBS, sebagai berikut:

- 1 Pengaduan/penyungkapan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh insan AirNav Indonesia, selain pengelola administrasi pelaporan pelanggaran, tim investigasi, Dewan Pengawas dan Direksi akan ditindaklanjuti oleh Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan (*compliance*).
- 2 Pengaduan/penyungkapan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh pengelola administrasi pelaporan pelanggaran dan tim investigasi akan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama.
- 3 Pengaduan/penyungkapan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Ketua Dewan Pengawas.
- 4 Pengaduan/penyungkapan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Dewan Pengawas akan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama.

## Report Manager and WBS Management Procedure

*The Internal Auditor (IA) is in charge of handling reports of violations within the Company's internal environment. The IA Unit receives reports of violations submitted through the WBS channel. Reports will then be followed up according to indications and procedures, such as conducting special audits or operational and financial audits if deemed necessary.*

*The Company may form an investigation team if it is deemed necessary to collect data or evidence related to violations. The investigation team may consist of external investigators according to the needs of the Company.*

*The company has established the report management procedure through the WBS, as follows:*

- 1 *A report/disclosure of a violation related to and/or committed by AirNav Indonesia personnel, except for the Violation Report Administration Management, the Investigation Team, the Supervisory Board, and the Board of Directors, shall be followed up by the director in charge of compliance.*
- 2 *A report/disclosure of a violation related to and/or committed by the Violation Report Administration Management and the Investigation Team shall be followed up by the President Director.*
- 3 *A report/disclosure of a violation related to and/or committed by the Board of Directors shall be followed up by the Chair of Supervisory Board.*
- 4 *A report/disclosure of a violation related to and/or committed by the Supervisory Board shall be followed up by the President Director.*



Sementara prosedur pengelolaan pengaduan adalah sebagai berikut:

- 1 Unit SPI menerima dan menyaring laporan pengaduan/penyingkapan pelanggaran, untuk menentukan apakah pengaduan telah memenuhi indikasi awal, atau sesuai dengan kriteria laporan WBS dan dapat ditindaklanjuti. Laporan pengaduan/penyingkapan diteruskan sesuai dengan kewenangan penanganan pelaporan apabila dapat ditindaklanjuti, dan dianggap selesai apabila tidak sesuai kriteria dan tidak perlu ditindaklanjuti.
- 2 Unit SPI menetapkan rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan investigasi lanjutan oleh tim investigasi. Apabila diperlukan, tim investigasi melakukan investigasi lanjutan terhadap pengaduan/penyingkapan dan melaporkan hasilnya kepada pemberi rekomendasi.
- 3 Dari laporan investigasi lanjutan oleh tim investigasi, ditetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Jika tidak terbukti atau selesai, maka laporan pengaduan/penyingkapan akan ditutup. Namun, apabila pengaduan/penyingkapan tersebut terbukti memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku.
- 4 Seluruh proses investigasi atau pengaduan/penyingkapan wajib dibuatkan Berita Acara, dan seluruh proses sistem pelaporan pelanggaran wajib didokumentasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Sanksi

AirNav Indonesia mengenakan sanksi yang tegas terhadap pelapor yang telah terbukti secara kuat melakukan pelanggaran. Adapun sanksi pelanggaran terhadap peraturan Perusahaan ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perusahaan. Sementara pelanggaran di luar peraturan Perusahaan atau tindakan melawan hukum akan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, berdasarkan regulasi yang berlaku.

## Pelaporan Pelanggaran Tahun 2022 dan Tindak Lanjut

AirNav Indonesia tidak memperoleh pelaporan pelanggaran yang masuk melalui sistem pelaporan pelanggaran di tahun 2022, sehingga tidak terdapat informasi yang dapat diungkapkan.

*AirNav Indonesia did not receive any violation reports from the WBS mechanism in 2022, so there is no information to be disclosed.*

*The procedure for report management is as follows:*

- 1 *The IA Unit receives and screens the report/disclosure of violations to determine whether it has met an initial indication or whether it fits the WBS criteria and requires a follow-up. If a follow-up is necessary, the report/disclosure will be forwarded to the party authorized to handle it. If there is no follow-up, the case can be concluded.*
- 2 *The IA Unit determines whether or not a follow-up investigation by the Investigation Team is necessary. If a follow-up is necessary, the Investigation Team will conduct further investigations on the report/disclosure and submit their findings to the party that issues the recommendation.*
- 3 *Based on the findings submitted by the Investigation Team, a recommendation is made as to what measure to take next. If the allegation has not been proven or solved, the report/disclosure case will be concluded. If the report/disclosure requires a follow-up, a sanction will be imposed according to the applicable regulations or forwarded to the authorized party for further processing according to applicable laws and regulations.*
- 4 *The entire investigation process or report/disclosure shall be documented in an Official Report. In addition, the entire Violation Report System shall be well-documented and accountable.*

## Sanction

*AirNav Indonesia imposed a strict penalty on the Reported Party who had been proven to have committed a violation. The penalty for violating the Company regulations are determined based on the Company rules and regulations. Meanwhile, violations beyond the Company regulations or unlawful acts shall be followed up by the authorities according to the applicable laws and regulations.*

## Violation Report in 2022 and Follow-up





## Kebijakan Antikorupsi Anti-corruption Policy

**A**irNav Indonesia mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMN. Dukungan tersebut diwujudkan dalam kebijakan antikorupsi dan komitmen seluruh insan Perusahaan untuk menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kebijakan terkait pencegahan korupsi diatur dalam Kode Etik Perusahaan, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 370001:2016, Komitmen Manajemen tentang SMAP, serta *whistleblowing system*. Perusahaan juga mewajibkan dan memfasilitasi seluruh karyawan yang memenuhi persyaratan pelaporan LHKPN untuk melaporkan LHKPN setiap tahunnya.

### Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi

Perusahaan secara tegas melarang praktik gratifikasi melalui Kebijakan Anti-Gratifikasi, yang berlaku untuk seluruh insan AirNav Indonesia. Apabila pada suatu kondisi, karyawan sulit menolak dan terpaksa menerima gratifikasi, maka individu yang bersangkutan wajib membuat laporan pengungkapan (*disclosure*) kepada Perusahaan. Laporan tersebut diterima dan dikelola oleh unit Biro Pengelolaan Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko dan GCG, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direksi. Secara periodik Direksi melaporkan hasil pengelolaan dan pengendalian gratifikasi kepada Dewan Pengawas. Individu yang terbukti melakukan pelanggaran gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan.

**A**irNav Indonesia supports the implementation of Presidential Regulation No. 54 of 2018 concerning the National Strategy for Prevention of Corruption in SOEs. This support is manifested in the anti-corruption policy and the commitment of every Company personnel to implement good corporate governance, which is clean and free from corruption, collusion, and nepotism.

Policies related to preventing corruption are regulated in the Company's Code of Ethics, Gratification Control Policy, Guidelines for Implementing an Anti-Bribery Management System (SMAP) based on SNI ISO 370001: 2016, Management Commitment on SMAP, and a *whistleblowing system*. The company also requires and facilitates every employee who meets the Asset Declaration for Public Officials (LHKPN) reporting requirements to submit the report annually.

### Gratification Management and Control

The company strictly prohibits the practice of gratification through the Anti-Gratification Policy, which applies to every AirNav Indonesia personnel. If under certain conditions, the employee has no other choice but to accept gratification, the individual concerned is required to make a disclosure report to the Company. The Bureau of Corporate Performance Bureau, Risk Management, and GCG receives and manages reports on receipt of gratification, which will then be submitted to the Board of Directors. Periodically the Board of Directors submits a report regarding the management and control of gratification to the Supervisory Board. Individuals proven to have committed violations related to gratification will be subject to sanctions according to the Company regulations.

#### PERUSAHAAN MENCATAT JUMLAH LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI SELAMA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR, SEBAGAI BERIKUT:

*AirNav Indonesia recorded the following number of reports on receipt of gratification for the last 3 (three) years.*



2022	2021	2020
2	3	5

Perusahaan menerima 2 (dua) laporan penerimaan gratifikasi pada periode pelaporan. Adapun gratifikasi berupa barang pecah belah ditetapkan statusnya menjadi milik negara dan gratifikasi berupa makanan dan parcel disalurkan ke panti asuhan serta yang lebih membutuhkan.

The company received 2 (two) reports on receipt of gratification in the reporting period. The received gratification in the form of glassware is recorded as state property and the other gratification in the form of food and parcels are distributed to orphanages and those in greater need.





# Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

## Asset Declaration for Public Officials (LHKPN)

### Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

LHKPN merupakan daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan setiap tahun. Kewajiban pelaporan ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. AirNav Indonesia telah mewajibkan seluruh karyawan yang memiliki kewajiban pelaporan, yakni Direksi, Pejabat Struktural, dan pejabat fungsional level 16-19 untuk melaporkan LHKPN.

### Basic Principles of Asset Declaration for Public Officials

LHKPN is a public official's list of all assets reported annually. This reporting obligation is regulated in the Corruption Eradication Commission Regulation No. 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of Public Officials' Assets. AirNav Indonesia has required its employees with reporting obligations, namely Directors, Structural Officers, and functional officials at levels 16-19, to submit LHKPN.

### Dasar Hukum dan Peraturan Penerapan LHKPN

Kewajiban pelaporan LHKPN mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3 Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya.
- 4 Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.
- 5 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

### Legal Basis and Regulation of Asset Declaration for Public Officials Implementation

The obligation to submit a Asset Declaration for Public Officials refers to the following legal basis:

- 1 Law No. 28 of 1999 on State Administrator that is Free from Corruption, Collusion, and Nepotism
- 2 Law No. 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission
- 3 Minister of SOEs Regulation No. PER-01/BUMN/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and its amendments
- 4 Secretary of the Minister of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of GCG
- 5 KPK Regulation No. 2 of 2020 on Amendments to KPK Regulation No. 07 of 2016 on Procedures for Registration, Announcement, and Examination of a Asset Declaration for Public Officials.



Pada lingkup internal, Perusahaan menerbitkan Pedoman Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diatur dalam Peraturan Direksi No. PER.002/LPPNPI/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Wajib Lapor di Lingkungan Perum LPPNPI.

*The Company has set up internal guidelines for Reporting Obligations of State Administrators Wealth. The guidelines are regulated in the Board of Directors Regulation No. PER.002/LPPNPI/I/2019 dated January 22, 2019, on the Obligation to Report State Administrators Wealth for Obligatory Report in Perum LPPNPI.*

## Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2022

### Asset Declaration for Public Officials Transparency of Corporate Officials in 2022

Pada periode pelaporan, pejabat wajib lapor yang telah menyampaikan LHKPN sebanyak 324 orang, dari total 324 orang pejabat wajib lapor, dengan perincian disampaikan dalam tabel berikut:

*Out of a total of 324 Obligatory Reporting Officials, all of them have submitted Asset Declaration for Public Officials during the reporting period, with details presented in the following table:*



Pejabat Wajib Lapor Obligatory Reporting Officials	Jumlah Wajib Lapor Number of Obligatory Reporting	Jumlah Yang Telah Melaporkan Number of Reported	
		Jumlah/ Total	%
Dewan Pengawas/ Supervisory Board	5	5	100
Direksi/ Board of Directors	5	5	100
Pejabat Struktural/ Structural Officer	290	290	100
Pejabat Fungsional Level 16 s.d. Level 19 Functional Officer Level 16 to 19	24	24	100
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>100</b>



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

**A**irNav Indonesia mengemban peran sebagai agen pembangunan yang mewakili Pemerintah Indonesia untuk membangun kesejahteraan ekonomi, sosial, kesehatan, maupun lingkungan di sekitar Perusahaan. Perusahaan melaksanakan peran ini melalui pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) kepada seluruh pemangku kepentingannya.

**A**irNav Indonesia assumes the role of an Agent of Development representing the Government of Indonesia to develop economic, social, health, and environmental welfare around the Company. This realization is achieved through the execution of Corporate Social Responsibility to all stakeholders.

### PROGRAM TJSL DILAKSANAKAN BERDASARKAN PILAR UTAMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YAKNI:

*The CSR program is implemented based on the main pillars of sustainable development, such as:*



Pilar sosial untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;

*The social pillar is intended to achieve the fulfillment of high quality basic human rights in a fair and equal manner to improve the community's welfare;*



Pilar lingkungan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;

*The environmental pillar is intended to achieve sustainable management of natural resources and the environment for all;*



Pilar ekonomi untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan

*The economic pillar is intended to achieve a high quality of economic growth through sustainable employment and business opportunities, innovation, inclusive industry, adequate infrastructure, affordable clean energy, and supported by partnership; and*



Pilar hukum dan tata kelola untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

*The pillar of laws and governance is intended to achieve the realization of legal certainty and effective, transparent, accountable, and participatory governance to create stable security and achieve a constitutional state.*



## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



**AirNav Indonesia telah mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan secara terpisah melalui Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) AirNav Indonesia Tahun 2022. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.**

*AirNav Indonesia has presented detailed information on its Corporate Social Responsibility separately in the 2022 AirNav Indonesia Sustainability Report, which is an integral part of this Annual Report.*



Perusahaan melaksanakan TJSL kepada masyarakat sekitar melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil atau program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil (UMK). Program pendanaan UMK diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja usaha kecil termasuk usaha mikro dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Pendanaan UMK menjangkau para pengusaha kecil yang belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*) atau lembaga keuangan non bank agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Sedangkan pelaksanaan TJSL di lingkungan Perusahaan dilaksanakan melalui pemenuhan hak asasi manusia (HAM), operasi yang adil dan bertanggung jawab, ketenagakerjaan serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3), keselamatan navigasi penerbangan, dan pengembangan teknologi.

*The Company has implemented its Corporate Social Responsibility for the community through the SOEs partnership program with small enterprises or the funding program for small and micro enterprises (SMEs). The SMEs funding program aims to improve the capabilities and performance of small entrepreneurs and cooperatives so that they become strong and independent through the use of funds from SOEs' profits. The SMEs Funding Program reaches small entrepreneurs who have not met the requirements of banks (*non-bankable*) or non-bank financial institutions. Therefore, these business actors of SMEs and cooperatives can contribute to improve the community's economy. Meanwhile, Corporate Social Responsibility within the Company is implemented through the fulfillment of human rights, fair and responsible operations, employment and occupational health and safety (OHS), air navigation safety, and technology development.*



# LAMPIRAN

APPENDIX



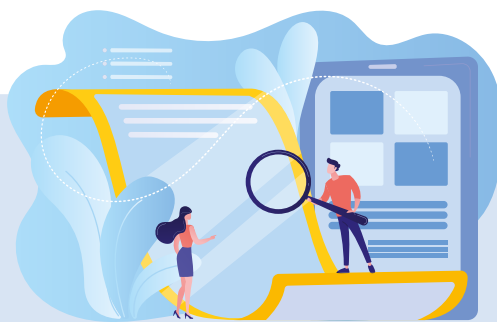




No	URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN Description of Content of the Annual Report	HALAMAN Page
<b>IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING/ FINANCIAL HIGHLIGHTS</b>		
1	<p>Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 tahun, paling sedikit memuat, pendapatan, laba (rugi), jumlah aset, liabilitas, ekuitas, dan rasio-rasio keuangan.</p> <p><i>Financial information is presented in a comparative form over a period of 3 (three) financial years; if the Issuer or Public Company has been established less than 3 years, the information shall include at least includes revenue, profit (loss), total assets, liabilities; equity, and financial ratios.</i></p>	14
<b>INFORMASI SAHAM/ INFORMATION ON SHARES</b>		
1	<p>Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) jumlah saham yang beredar;</li> <li>b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan;</li> <li>c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan</li> <li>d) volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.</li> </ul> <p>Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek.</p> <p><i>Issued shares for each quarter presented in a comparative form of at least 2 financial years at least include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) number of outstanding shares;</li> <li>b) market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares are listed;</li> <li>c) the highest, lowest, and closing share price based on the Stock Exchange where the shares are listed; and</li> <li>d) trading volume at the Stock Exchange where the shares are listed.</li> </ul> <p><i>Information in the sections b), c, and d is disclosed if the shares are listed on the stock exchange.</i></p>	N/A
2	<p>Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1.</p> <p><i>In the event of corporate action causes changes in shares such as stock split, reverse stock, stock dividend, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion stock, and increasing and decreasing interests; information on shares as stated in point 1.</i></p>	22
3	<p>Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.</p> <p><i>In the event of suspension and/or delisting in the financial year, the Issuer or Public Company shall explain the reasons for the suspension and/or delisting.</i></p>	N/A
4	<p>Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3, dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.</p>	N/A



**Reference to SEOJK 16/POJK.04/2021  
regarding the Form and Content of Reports  
of Issuers or Public Companies**



No	URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN <i>Description of Content of the Annual Report</i>	HALAMAN <i>Page</i>
	<i>In the event that suspension and/or delisting as referred to point 3 is still ongoing until the end of the Annual Report period, the Issuer or Public Company shall explain the actions taken to resolve the suspension and/or delisting.</i>	
<b>LAPORAN DIREKSI/ REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS</b>		
1	<p>Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) strategi dan kebijakan strategis;</li> <li>b) peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis;</li> <li>c) proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi;</li> <li>d) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan;</li> <li>e) kendala yang dihadapi.</li> </ul> <p><i>Performance of Issuer or Public Company, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>strategies and Strategic Policy;</i></li> <li>b) <i>the role of the Board of Directors in the formulation of strategies and strategic policy;</i></li> <li>c) <i>processes carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of strategies and strategic policy;</i></li> <li>d) <i>comparison between realization and target; and</i></li> <li>e) <i>obstacle faced by Issuer or Public Company.</i></li> </ul>	<b>32-39</b>
2	<p>Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p><i>Views on business prospect of Issuer or Public Company; and</i></p>	
3	<p>Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p><i>Implementation of good governance of Issuer or Public Company.</i></p>	
<b>LAPORAN DEWAN KOMISARIS/ REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS</b>		
1	<p>Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi yang dilakukan oleh Direksi.</p> <p><i>Performance evaluation of the Board of Directors regarding management of Issuer or Public Company, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Company carried out by the Board of Directors.</i></p>	<b>26-31</b>
2	<p>Pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi.</p> <p><i>Views on business prospect of Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors.</i></p>	
3	<p>Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p><i>Views on the implementation of governance of Issuer or Public Company.</i></p>	

No	URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN <i>Description of Content of the Annual Report</i>	HALAMAN <i>Page</i>
<b>PROFIL EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK/ PROFILE OF ISSUER OR PUBLIC COMPANY</b>		
1	<p>Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku.</p> <p><i>Name of Issuer or Public Company, including name change, reason of the change, and effective date of the name change in the financial year.</i></p>	42
2	<p>Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik, dan alamat situs web.</p> <p><i>Access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office that allows public to obtain information regarding Issuer or Public Company, including: address; phone number, email address, and web address.</i></p>	43, 251
3	<p>Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p><i>Brief history of Issuer or Public Company.</i></p>	44
4	<p>Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai perusahaan.</p> <p><i>Vision and mission of Issuer or Public Company and its corporate culture or values;</i></p>	47
5	<p>Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan.</p> <p><i>Business activities according to the latest article of association, business activities conducted within the financial year, and type of goods and/or services.</i></p>	48
6	<p>Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.</p> <p><i>Operational area of Issuer or Public Company; operational area is an area or region for carrying out operational activities or the range of operational activities.</i></p>	56
7	<p>Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.</p> <p><i>Organizational structure of Issuer or Public Company in the form of a chart, at least until 1 (one) level below the Board of Directors, including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, along with name and position.</i></p>	58
8	<p>Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.</p> <p><i>A list of industry association memberships on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance.</i></p>	60



No	<p style="text-align: center;"><b>URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN</b> Description of Content of the Annual Report</p>	<p style="text-align: center;"><b>HALAMAN</b> Page</p>
9	<p>Profil Direksi, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;</li> <li>b) foto terbaru;</li> <li>c) usia;</li> <li>d) kewarganegaraan;</li> <li>e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi</li> <li>f) riwayat jabatan, meliputi informasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dasar hukum pengangkatan;</li> <li>• rangkap jabatan;</li> <li>• pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;</li> </ul> </li> <li>g) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung; dan</li> <li>h) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya.</li> </ol> <p><i>Profile of the Board of Directors, at least includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) name and position in accordance with the duties and responsibilities;</li> <li>b) recent photograph;</li> <li>c) age;</li> <li>d) citizenship;</li> <li>e) education background and/or certification;</li> <li>f) position history, including information on: <ul style="list-style-type: none"> <li>• legal basis of appointment as a member of the Board of Directors of Issuer or Public Company;</li> <li>• concurrent positions;</li> <li>• work experience and period of service inside and outside Issuer or Public Company;</li> </ul> </li> <li>g) affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners.</li> <li>h) changes in the composition of members of the Board of Directors and the reasons for the changes.</li> </ol>	68
10	<p>Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nama dan jabatan;</li> <li>b) foto terbaru;</li> <li>c) usia;</li> <li>d) kewarganegaraan;</li> <li>e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;</li> <li>f) riwayat jabatan, meliputi informasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris;</li> <li>• dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen;</li> <li>• rangkap jabatan; dan</li> <li>• pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;</li> </ul> </li> <li>g) hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung;</li> <li>h) pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 periode; dan</li> <li>i) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya.</li> </ol> <p><i>Profile of the Board of Commissioners, at least includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) name and position in accordance with the duties and responsibilities;</li> <li>b) recent photograph;</li> <li>c) age;</li> <li>d) citizenship;</li> <li>e) education background and/or certification;</li> <li>f) position history, including information on: <ul style="list-style-type: none"> <li>• legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners;</li> <li>• concurrent positions;</li> <li>• work experience and period of service inside and outside Issuer or Public Company;</li> </ul> </li> </ol>	61-67

No	URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN Description of Content of the Annual Report	HALAMAN Page
	<p>g) affiliation with other members of the Board of Commissioners, major and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners.</p> <p>h) independence statement of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served for more than 2 terms; and</p> <p>i) changes in the composition of members of the Board of Directors and the reasons for the changes.</p>	
11	<p>Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya.</p> <p><i>In the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the financial year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the composition of the latest and previous members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.</i></p>	61-78
12	<p>Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku.</p> <p><i>Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contract) in the financial year.</i></p>	21, 43, 81
13	<p>Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:</p> <p>a) pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih;</p> <p>b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham; dan</p> <p>c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5%.</p> <p><i>Names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the financial year, at least includes information on:</i></p> <p>a) <i>shareholders owning 5% or more shares of Issuer or Public Company;</i></p> <p>b) <i>members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares in Issuers or Public Companies; and</i></p> <p>c) <i>public shareholders group who has ownership less than 5% of shares of the Issuer or Public Company.</i></p>	N/A
14	<p>Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p> <p><i>The percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year. If all members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.</i></p>	N/A
15	<p>Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: kepemilikan institusi lokal; institusi asing; individu lokal; dan individu asing.</p> <p><i>Number of shareholders and percentage of ownership at the end of the financial year based on the classification: local institution ownership; foreign institution ownership; local individual ownership; and foreign individual ownership.</i></p>	N/A



No	<b>URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN</b> <i>Description of Content of the Annual Report</i>	<b>HALAMAN</b> <i>Page</i>
16	<p>Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.</p> <p><i>Information on major and controlling shareholders of Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners, presented in the form of a scheme or chart.</i></p>	86, 174
17	<p>Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.</p> <p><i>Name of subsidiary, associated company, joint venture where Issuer or Public Company has a jointly controlled entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture.</i></p>	
18	<p>Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).</p> <p><i>Chronology of share listing, number of shares, par value, and offering price from the beginning of listing to the end of the financial year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, stock dividend, bonus shares, and changes in the par value of shares, implementation of conversion stock, implementation of capital additions and subtractions (if any).</i></p>	
19	<p>Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18, yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbalance hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada).</p> <p><i>Information on the listing of other securities other than securities as referred to in point 18), that have not matured within the financial year at least includes name of securities, issuance year, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any).</i></p>	
20	<p>Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: nama dan alamat; periode penugasan; informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; biaya jasa (<i>fee</i>); dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut.</p> <p><i>Information on the use of public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and its networks/associations/alliances include: Name and address; Assignment period; Information on audit and/or non-audit services provided; audit and/or non-audit fee for each assignment during the financial year. If the appointed AP and KAP and its network/association/alliance do not provide non-audit services, then the matter shall be disclosed.</i></p>	88
21	<p>Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.</p> <p><i>Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.</i></p>	

No	<b>URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN</b> <i>Description of Content of the Annual Report</i>	<b>HALAMAN</b> <i>Page</i>
<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN/ MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS</b>		<b>94</b>
1	<p>Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;</li> <li>b) pendapatan/penjualan; dan</li> <li>c) profitabilitas.</li> </ul> <p><i>Overview of operations per business segment according to the type of industry of Issuer or Public Company, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>production, including process, capacity, and growth;</i></li> <li>b) <i>sales/revenue; and</i></li> <li>c) <i>profitability.</i></li> </ul>	112
2	<p>Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;</li> <li>b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;</li> <li>c) ekuitas;</li> <li>d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan</li> <li>e) arus kas.</li> </ul> <p><i>Comprehensive financial performance, including comparison of financial performance in the last 2 (two) financial years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>current assets, non-current assets, and total assets;</i></li> <li>b) <i>current liabilities, non-current liabilities, and total liabilities;</i></li> <li>c) <i>equity;</i></li> <li>d) <i>revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and</i></li> <li>e) <i>cash flow.</i></li> </ul>	134
3	<p>Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.</p> <p><i>Ability to pay debts or liabilities by presenting the relevant ratio calculations.</i></p>	141
4	<p>Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.</p> <p><i>Collectability level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations.</i></p>	141
5	<p>Struktur modal dan kebijakan manajemen atas struktur modal tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud.</p> <p><i>Capital structure and management policy on capital structure along with the basis for determining the policy.</i></p>	143
6	<p>Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tujuan dari ikatan tersebut;</li> <li>b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;</li> <li>c) mata uang yang menjadi denominasi; dan</li> <li>d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.</li> </ul> <p><i>Discussion on material commitment for capital goods investment with description, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>objectives of the commitment;</i></li> </ul>	144



No	<b>URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN</b> <i>Description of Content of the Annual Report</i>	<b>HALAMAN</b> <i>Page</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) <i>expected source of funds to fulfill the commitment;</i></li> <li>c) <i>the denominated currency; and</i></li> <li>d) <i>steps planned by Issuer or Public Company to protect the position of related currency from any risks.</i></li> </ul>	
7	<p>Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) jenis investasi barang modal;</li> <li>b) tujuan investasi barang modal; dan</li> <li>c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan.</li> </ul> <p><i>Discussion on capital goods investment realized in the latest financial year, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>types of capital goods investment;</i></li> <li>b) <i>objectives of capital goods investment; and</i></li> <li>c) <i>values of the issued capital goods investment.</i></li> </ul>	87
8	<p>Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada).</p> <p><i>Material information and facts occurring after the due date of accountant report (if any).</i></p>	152
9	<p>Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.</p> <p><i>Business prospects of Issuer or Public Company related to the general conditions of industry, economy, and international market as well as quantitative supporting data from reliable data sources.</i></p>	148
10	<p>Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pendapatan/penjualan;</li> <li>b) laba (rugi);</li> <li>c) struktur modal; atau</li> <li>d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.</li> </ul> <p><i>Comparison between target/projection at the beginning of the financial year and realization, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>revenue/sales;</i></li> <li>b) <i>profit (loss);</i></li> <li>c) <i>capital structure; or</i></li> <li>d) <i>other matters deemed important to Issuer or Public Company.</i></li> </ul>	146-147
11	<p>Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 tahun mendatang, mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pendapatan/penjualan;</li> <li>b) laba (rugi);</li> <li>c) struktur modal;</li> <li>d) kebijakan dividen; atau</li> <li>e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;</li> </ul> <p><i>Target/projection to be achieved by Issuer or Public Company for the following 1 year, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>revenue/sales;</i></li> <li>b) <i>profit (loss);</i></li> <li>c) <i>capital structure;</i></li> <li>d) <i>dividend policy; or</i></li> <li>e) <i>other matters deemed important to Issuer or Public Company.</i></li> </ul>	149-151
12	<p>Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.</p>	132



No	URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN <i>Description of Content of the Annual Report</i>	HALAMAN <i>Page</i>
	<i>Marketing aspects of goods and/or services of Issuer or Public Company, at least including marketing strategy and market share.</i>	
13	<p>Uraian mengenai dividen selama 2 tahun buku terakhir, paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;</li> <li>tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;</li> <li>jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan</li> <li>jumlah dividen per tahun yang dibayar.</li> </ol> <p><i>Description on dividends for the last 2 financial years, at least including:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>dividend policy, including information on the percentage of total dividends distributed to net income;</i></li> <li><i>date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;</i></li> <li><i>amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and</i></li> <li><i>amount of paid dividends per year.</i></li> </ol>	N/A
14	<p>Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan</li> <li>dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.</li> </ol> <p><i>Realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>in the event that during the financial year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the financial year; and</i></li> <li><i>if there is a change in the use of proceeds as regulated in the Financial Services Authority Regulation on the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change.</i></li> </ol>	N/A
15	<p>Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tanggal, nilai, dan objek transaksi;</li> <li>nama pihak yang melakukan transaksi;</li> <li>sifat hubungan afiliasi (jika ada);</li> <li>penjelasan mengenai kewajaran transaksi;</li> <li>pemenuhan ketentuan terkait; dan</li> <li>dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum; dan</li> <li>peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai;</li> </ul> </li> <li>untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan;</li> <li>untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;</li> <li>dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</li> </ol>	154



No	<b>URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN</b> <i>Description of Content of the Annual Report</i>	<b>HALAMAN</b> <i>Page</i>
	<p><i>Material information (if any) on investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, that occur during the financial year, at least includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a) date, value, and object of transaction;</i></li> <li><i>b) name of the party making the transaction;</i></li> <li><i>c) nature of affiliated relationship (if any);</i></li> <li><i>d) description on fairness of the transaction;</i></li> <li><i>e) compliance with related provisions; and</i></li> <li><i>f) If there is an affiliated relationship, other than disclosing the information as referred to in letter (a) to letter (e), the Issuer or Public Company shall also disclose information on:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• statement of the Board of Directors that the affiliate transaction has been through adequate procedures to ensure that the affiliated transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices;</i></li> <li><i>• role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions.</i></li> </ul> </li> <li><i>g) as for the routine, repeated, and/or sustainable affiliated or material transactions that are parts of operational activities conducted to gain revenues, there shall be an added information stating that those transactions are routine, repeated, and/or sustainable affiliated or material transactions that are parts of operational activities conducted to gain revenues;</i></li> <li><i>h) as for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS to approve the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions shall be added;</i></li> <li><i>i) If there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this matter shall be disclosed.</i></li> </ol>	
16	<p>Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).</p> <p><i>Changes in the provisions of laws and regulations that have a significant impact on Issuer or Public Company and its impact on financial statements (if any).</i></p>	157
17	<p>Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).</p> <p><i>Changes in accounting policies, reasons, and impact on financial statements (if any).</i></p>	158
<b>TATA KELOLA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK/ ISSUER OR PUBLIC COMPANY GOVERNANCE</b>		
1	<p>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 tahun sebelum tahun buku meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan</li> <li>• keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;</li> </ul> </li> <li>b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</li> </ol> <p><i>Issuer or Public Company governance shall at least include a brief description of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Information on GMS resolutions in the financial year and 1 year before the financial year, including:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• GMS resolution in the financial year and 1 year before the financial year realized in the financial year; and</i></li> <li><i>• GMS resolutions in the financial year and 1 year before the financial year that have not been realized and the reasons for not realizing the resolutions;</i></li> </ul> </li> <li>b) <i>If Issuer or Public Company uses an independent party during the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed.</i></li> </ol>	176
2	<p>Direksi, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;</li> <li>b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi;</li> </ol>	189

No	URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN Description of Content of the Annual Report	HALAMAN Page
	<p>c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;</p> <p>d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi;</p> <p>e) penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;</p> <p>f) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p> <p><i>Board of Directors, at least includes:</i></p> <p>a) <i>duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;</i></p> <p>b) <i>statement that the Board of Directors has Board of Directors Charter;</i></p> <p>c) <i>policy and frequency of BOD meetings, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and attendance rate of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;</i></p> <p>d) <i>training and/or competency development of members of the Board of Directors;</i></p> <p>e) <i>Board of Directors' appraisal on the performance of the committees supporting the implementation of the Board of Directors' duties;</i></p> <p>f) <i>If Issuer or Public Company does not have committees to support the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.</i></p>	
3	<p>Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <p>a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;</p> <p>b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris;</p> <p>c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;</p> <p>d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris;</p> <p>e) penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;</p> <p>f) penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku.</p> <p><i>Board of Commissioners, at least includes:</i></p> <p>a) <i>duties and responsibilities of the Board of Commissioners;</i></p> <p>b) <i>statement that the Board of Commissioners has the Board of Commissioners Manual or Charter;</i></p> <p>c) <i>policy and frequency of Board of Commissioners meetings, joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors and attendance rate of members of the Board of Commissioners in the meetings, including attendance at the GMS;</i></p> <p>d) <i>training and/or competency development of members of the Board of Commissioners;</i></p> <p>e) <i>performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners;</i></p> <p>f) <i>the Board of Commissioners' appraisal on the performance of the Committees to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners.</i></p>	179
4	<p>Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <p>a) prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan</p> <p>b) prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p><i>Nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least include:</i></p> <p>a) <i>nomination procedure, including a brief description of the nomination policies and processes of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and</i></p> <p>b) <i>procedures and implementation of remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i></p>	198, 201
5	<p>Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar (jika ada).</p> <p><i>Sharia Supervisory Board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association.</i></p>	N/A



No	<p style="text-align: center;"><b>URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN</b> Description of Content of the Annual Report</p>	<p style="text-align: center;"><b>HALAMAN</b> Page</p>
6	<p>Komite audit, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;</li> <li>b) usia;</li> <li>c) kewarganegaraan;</li> <li>d) riwayat pendidikan;</li> <li>e) riwayat jabatan;</li> <li>f) periode dan masa jabatan anggota komite audit;</li> <li>g) pernyataan independensi komite audit;</li> <li>h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);</li> <li>i) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan</li> <li>j) pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite audit.</li> </ul> <p><i>The audit committee, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) name and position in committee membership;</li> <li>b) age;</li> <li>c) citizenship;</li> <li>d) educational background;</li> <li>e) position history;</li> <li>f) period and tenure of the audit committee members;</li> <li>g) independence statement of the audit committee;</li> <li>h) training and/or competency development attended in the financial year (if any);</li> <li>i) policy and frequency of audit committee meetings and attendance rate of audit committee members in the meetings; and</li> <li>j) implementation of the audit committee's activities in the financial year in accordance with the audit committee guidelines or charter.</li> </ul>	202
7	<p>Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;</li> <li>b) usia;</li> <li>c) kewarganegaraan;</li> <li>d) riwayat pendidikan;</li> <li>e) riwayat jabatan;</li> <li>f) periode dan masa jabatan anggota komite;</li> <li>g) pernyataan independensi komite;</li> <li>h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);</li> <li>i) uraian tugas dan tanggung jawab;</li> <li>j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>);</li> <li>k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;</li> <li>l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan</li> <li>m) dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) sampai dengan huruf (l), mohon dijelaskan alasannya.</li> </ul> <p><i>Nomination and remuneration committee or function of Issuer or Public Company, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) name and position in the committee membership;</li> <li>b) age;</li> <li>c) citizenship;</li> <li>d) educational background;</li> <li>e) position history;</li> <li>f) period and tenure of the committee members;</li> <li>g) independence statement of the committee;</li> <li>h) training and/or competency development attended in the financial year (if any);</li> <li>i) description of duties and responsibilities;</li> <li>j) statement that the committee has guidelines or charter;</li> <li>k) policy and frequency of meetings and attendance rate of the committee members at the meeting;</li> <li>l) brief description of the implementation of activities in the financial year; and</li> <li>m) in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company as referred to in letter (i) to letter (l), shall disclose the reason.</li> </ul>	214

No	URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN <i>Description of Content of the Annual Report</i>	HALAMAN <i>Page</i>
8	<p>Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.</p> <p><i>Other committees owned by Issuer or Public Company to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees to support the functions and duties of the Board of Commissioners.</i></p>	208-214
9	<p>Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama;</li> <li>domisili;</li> <li>riwayat jabatan;</li> <li>riwayat pendidikan;</li> <li>pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan</li> <li>uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.</li> </ol> <p><i>Corporate secretary, at least includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>name;</i></li> <li><i>domicile;</i></li> <li><i>position history;</i></li> <li><i>educational background;</i></li> <li><i>training and/or competency development attended in the financial year; and</i></li> <li><i>brief description on the implementation of corporate secretary's duties in the financial year;</i></li> </ol>	223
10	<p>Unit audit internal, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama kepala unit audit internal;</li> <li>riwayat jabatan</li> <li>kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);</li> <li>pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku;</li> <li>struktur dan kedudukan unit audit internal;</li> <li>uraian tugas dan tanggung jawab;</li> <li>pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit audit internal; dan</li> <li>uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.</li> </ol> <p><i>Internal audit unit, at least includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>name of the Internal Audit Unit head;</i></li> <li><i>position history;</i></li> <li><i>qualification or certification as an internal audit (if any);</i></li> <li><i>training and/or competency development attended in the financial year;</i></li> <li><i>structure and position of the internal audit unit;</i></li> <li><i>description of duties and responsibilities;</i></li> <li><i>statement that the internal audit unit has guidelines or charter; and</i></li> <li><i>brief description on the implementation of the internal audit unit's duties in the financial year, including policy and frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee.</i></li> </ol>	227
11	<p>Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;</li> <li>tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan</li> <li>pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.</li> </ol> <p><i>Description on internal control system applied by Issuer or Public Company, at least includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;</i></li> <li><i>review on effectiveness of the internal control system; and</i></li> <li><i>statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;</i></li> </ol>	233



No	<b>URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN</b> <i>Description of Content of the Annual Report</i>	<b>HALAMAN</b> <i>Page</i>
12	<p>Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko;</li> <li>b) jenis risiko dan cara pengelolaannya;</li> <li>c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko; dan</li> <li>d) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.</li> </ul> <p><i>Risk management system implemented by Issuer or Public Company, at least includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>general description on the risk management system of Issuer or Public Company;</i></li> <li>b) <i>types of risks and management methods;</i></li> <li>c) <i>review on effectiveness of the risk management system of Issuer or Public Company; and</i></li> <li>d) <i>statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system.</i></li> </ul>	238
13	<p>Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pokok perkara/gugatan;</li> <li>b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan</li> <li>c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik.</li> </ul> <p><i>Legal proceedings that have a material impact faced by Issuer or Public Company, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>merits of case/lawsuit;</i></li> <li>b) <i>status of the case/lawsuit settlement; and</i></li> <li>c) <i>impact on the condition of Issuer or Public Company.</i></li> </ul>	247
14	<p>Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada).</p> <p><i>Information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities in the financial year (if any).</i></p>	247
15	<p>Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pokok-pokok kode etik;</li> <li>b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan</li> <li>c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan.</li> </ul> <p><i>Information on the code of conduct of Issuer or Public Company, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>key Principles of Code of conduct;</i></li> <li>b) <i>the form of dissemination of the code of conduct and its enforcement efforts; and</i></li> <li>c) <i>statement that the code of conduct applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuer or Public Company.</i></li> </ul>	249
16	<p>Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>).</p> <p><i>Brief description on the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP).</i></p>	154

No	URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN <i>Description of Content of the Annual Report</i>	HALAMAN <i>Page</i>
17	<p>Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan</li> <li>pelaksanaan atas kebijakan dimaksud.</li> </ol> <p><i>Brief description on information disclosure policy regarding:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners shall be no later than 3 working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of Public Company; and</i></li> <li><i>implementation of the policy.</i></li> </ol>	N/A
18	<p>Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>cara penyampaian laporan pelanggaran;</li> <li>perlindungan bagi pelapor;</li> <li>penanganan pengaduan;</li> <li>pihak yang mengelola pengaduan; dan</li> <li>hasil dari penanganan pengaduan.</li> </ol> <p><i>Description on whistleblowing system in Issuer or Public Company, at least includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>method of submitting a violation report;</i></li> <li><i>protection for whistleblowers;</i></li> <li><i>complaint handling;</i></li> <li><i>the party in charge to manage complaint; and</i></li> <li><i>result of complaint handling.</i></li> </ol>	254
19	<p>Uraian mengenai kebijakan anti korupsi, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan</li> <li>pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;</li> </ol> <p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.</p> <p><i>Description on Anti-Corruption Policy of Issuer or Public Company, at least includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>programs and procedures to overcome corruption practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in Issuer or Public Company; and</i></li> <li><i>anti-corruption training/socialization to all employees of Issuer or Public Company.</i></li> </ol>	257
20	<p>Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau</li> <li>penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).</li> </ol> <p><i>Implementation of Public Company governance guidelines for Issuer that issues equity securities or Public Company, including:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>statement regarding the recommendations that have been realized; and/or</i></li> <li><i>description on recommendations that have been realized, along with reasons and alternative implementations (if any).</i></li> </ol>	174



No	<b>URAIAN ISI LAPORAN TAHUNAN</b> <i>Description of Content of the Annual Report</i>	<b>HALAMAN</b> <i>Page</i>
<b>TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK</b> <i>SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITIES OF ISSUER OR PUBLIC COMPANY</i>		
1	<p>Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.</p> <p><i>Information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.</i></p>	260
2	<p>Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p><i>The Sustainability Report as referred to in point 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as stated in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular.</i></p>	260
<b>LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN YANG TELAH DIAUDIT</b> <i>AUDITED ANNUAL FINANCIAL REPORT</i>		
1	<p>Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.</p> <p><i>The annual financial statements included in the Annual Report shall be prepared in accordance with Indonesian financial accounting standards and have been audited by a public accountant registered in the Financial Services Authority. The annual financial report shall contain a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation on the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector regulating the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.</i></p>	282
<b>SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN</b> <i>STATEMENT LETTER OF THE BOARD OF DIRECTORS AND F THE BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS ON ACCOUNTABILITY FOR ANNUAL REPORT</i>		
1	<p>Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p><i>Statement letter of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners Members on Accountability for Annual Report shall be prepared in accordance with the format of Statement Letter of the Board of Directors and the Board of Commissioners Members on Accountability for Annual Report as set forth in Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular.</i></p>	280





**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022  
PERUSAHAAN UMUM  
LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA  
(PERUM LPPNPI) ATAU AIRNAV INDONESIA**

*Directors' Statement Letter  
on the Accountability of 2022 Annual Report  
Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia  
(Perum LPPNPI) or AirNav Indonesia*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia tahun 2022 telah dimuat secara lengkap, dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

*We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2022 Annual Report of Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) or AirNav Indonesia has been presented in full, and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.  
*This statement is made truthfully.*

**Jakarta, Juli 2023**  
*Jakarta, July 2023*

**Direksi Perusahaan Umum  
Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia  
(Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia**

*Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia  
(Perum LPPNPI) or AirNav Indonesia Board of Directors*

**Polana Banguningsih Pramesti**  
*Direktur Utama/ President Director*

**Mokhammad Khatim**  
*Direktur Operasi/ Director of  
Operations*

**Bambang Rianto**  
*Direktur Keselamatan, Keamanan,  
dan Standardisasi/ Director of  
Safety, Security, and Standardization*

**Ahmad Nurdin Aulia**  
*Direktur Teknik/ Director of  
Engineering*

**Bagus Sunjoyo**  
*Direktur SDM dan Umum/ Director  
of Human Resources and  
General Affairs*

**Bagus Sunjoyo**  
*PT Direktur Keuangan dan Manajemen  
Risiko/ Director of Finance and  
Risk Management*



**SURAT PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022  
PERUSAHAAN UMUM  
LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA  
(PERUM LPPNPI) ATAU AIRNAV INDONESIA**

*Supervisory Board's Statement Letter  
on the Accountability of 2022 Annual Report  
Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia  
(Perum LPPNPI) or AirNav Indonesia*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia tahun 2022 telah dimuat secara lengkap, dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

*We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2022 Annual Report of Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) or AirNav Indonesia has been presented in full, and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.  
*This statement is made truthfully.*

**Jakarta, Juli 2023**  
*Jakarta, July 2023*

**Dewan Pengawas Perusahaan Umum  
Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia  
(Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia**

*Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia  
(Perum LPPNPI) or AirNav Indonesia Supervisory Board*

**Novie Riyanto R.**

*Ketua/ Chair of Supervisory Board*

**Sigit Hani Hadiyanto**

*Anggota/ Member*

**Tri Wahyuningsih Retno Mulyani**

*Anggota/ Member*

**Daryatmo**

*Anggota/ Member*

**Endra Gunawan**

*Anggota/ Member*



# LAPORAN KEUANGAN AUDIT

AUDITED  
FINANCIAL  
STATEMENTS



# Kinerja Keuangan Kinerja Produksi

## ENC



## TNC



Charges (Jasa Pelayanan Penerbangan)  
Charges (Jasa Pelayanan Terminal)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN  
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA  
(PERUM LPPNPI)**

**Laporan Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
pada Tanggal Tersebut**

**Dan Laporan Auditor Independen**

***Financial Statements  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years Then Ended***

***And Independent Auditor's Report***

<b>Daftar Isi</b>	<b>Halaman/ <u>Page</u></b>	<b>Table of Contents</b>
<b>Surat Pernyataan Direksi</b>		<b><i>Directors' Statement Letter</i></b>
<b>Laporan Auditor Independen</b>		<b><i>Independent Auditor's Report</i></b>
<b>Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut</b>		<b><i>Financial Statements As of December 31, 2022 and 2021 and For the Years Then Ended</i></b>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	6	<i>Notes to the Financial Statements</i>



**AirNav Indonesia**

**Perum LPPNPI**

Gedung Kantor Pusat  
Jalan Ir. H. Juanda  
Karanganyar, Neglasari  
Tangerang 15121 - Indonesia  
Telepon : 021-5591 5000  
Fax : 021-55915102  
[www.airnavindonesia.co.id](http://www.airnavindonesia.co.id)

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN  
KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

***DIRECTORS' STATEMENT LETTER  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022 AND 2021***

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)**

***PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)***

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

*We, the undersigned:*

Nama	:	Polana Banguningsih Pramesti	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. Ir. H. Juanda No. 1, Neglasari, Tangerang, 15121	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Jl. Darmawangsa X No. 50, RT/RW 009/004, Kec. Kebayoran Baru, Kel. Cipete Utara, Jakarta Selatan	:	Domicile Address
NIK	:	3174074211610001	:	NIK
Nomor Telepon, Fax,	:	021-55915000 / 021-55915100	:	Phone Number, Fax,
Email	:	Polana.makawi@gmail.com	:	Email
Jabatan	:	Direktur Utama / President Director	:	Position
Nama	:	Bagus Sunjoyo*)	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. Ir. H. Juanda No. 1, Neglasari, Tangerang, 15121	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Kavling Hankam, Jln. Strategi 5 Blok B1 No.8, RT.006 RW.02, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat	:	Domicile Address
NIK	:	3173051408620003	:	NIK
Nomor Telepon, Fax,	:	+62 811-853-362	:	Phone Number, Fax,
Email	:	bagus.sunjoyo@airnavindonesia.co.id	:	Email
Jabatan	:	Plt Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/ Act of Director of Finance and Risk Management	:	Position

Menyatakan bahwa:

*State that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PERUM LPPNPI);
  2. Laporan keuangan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PERUM LPPNPI) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
  3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PERUM LPPNPI) telah dimuat secara lengkap dan benar;
1. *We are responsible in the preparation and the presentation of the financial statements of Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PERUM LPPNPI);*
  2. *The financial statements of Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PERUM LPPNPI) have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
  3. a. *All information in the financial statements of Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PERUM LPPNPI) has been disclosed in a complete and truthful manner;*

- b. Laporan keuangan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PERUM LPPNPI) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PERUM LPPNPI).

b. *The financial statements of Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PERUM LPPNPI) do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and*

4. *We are responsible for Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (PERUM LPPNPI) internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta dalam rangka memenuhi prinsip – prinsip *good corporate governance*.

*This statement letter is made truthfully and could be accounted legally and in order to meet the principles of good corporate governance.*

Jakarta, 10 Februari 2023/ *February 10, 2023*

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia  
(Perum LPPNPI)

Direktur Utama/ *President Director*

Plt Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/  
*Act of Director of Finance and Risk Management*

Polana Banguningsih Pramesti

Bagus Sunjoyo



\*) Diangkat sebagai Plt Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor: S-125/DW/XII/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LPPNPI tertanggal 16 Desember 2022

\*) *Appointed as Act of Director of Finance and Risk Management effective December 16, 2022 based on the Decree of the Board of Supervisors Number: S-125/DW/XII/2022 concerning Dismissal and Appointment of the Acting Director of Finance and Risk Management of Perum LPPNPI dated December 16, 2022.*



The original report included herein is in the Indonesian language.

**Laporan Auditor Independen**  
***Independent Auditor's Report***

No. : 00020/2.1127/AU.1/10/0797-3/1/II/2023

**Pemegang Saham, Dewan Pengawas  
dan Direksi  
PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)**

***To the Shareholders, Board of Supervisory,  
and Directors  
PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)***

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

***Opinion***

*We have audited the accompanying financial statements of Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) as of December 31, 2022, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

***Basis for Opinion***

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statement in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

*The original report included herein is in the Indonesian language.*

**Halaman 2**

**Page 2**

### **Hal Lain**

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal disampaikan secara terpisah kepada manajemen dalam laporan kami No. AU020/01/LJ/III/23 dan No. AU021/01/LJ/III/23 tanggal 10 Februari 2023.

### **Tanggung Jawab Manajemen Dan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

### **Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit Atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

### **Other Matter**

*The reports of compliance to certain regulations and internal controls, are submitted to the management separately in our reports No. AU020/01/LJ/III/23 and No. AU021/01/LJ/III/23 dated February 10, 2023.*

### **Responsibilities Of Management And Those Charged With Governance For The Financial Statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.*

### **Auditor's responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

The original report included herein is in the Indonesian language.

**Halaman 3****Page 3**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*

*The original report included herein is in the Indonesian language.*

**Halaman 4**

**Page 4**

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*



HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO



**Leknor Joni, CPA**

No. Ijin AP. 0797 / License No. AP. 0797

10 Februari 2023 / February 10, 2023

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2022 and 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan Setara Kas	4, 28	1.611.780.688.844	1.092.703.262.848	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha				Trade Receivables
Pihak Ketiga	5	571.844.515.794	258.279.103.729	Third Parties
Pihak Berelasi	5, 28	186.587.606.003	401.154.977.522	Related Parties
Pendapatan Akrual	6, 28	--	71.366.548	Accrued Revenues
Persediaan	8	42.325.387.380	44.912.284.034	Inventories
Pajak Dibayar di Muka	15.a	29.960.646.202	93.994.332.640	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar di Muka dan				Prepaid Expenses and
Uang Muka	9	7.451.811.926	6.216.833.504	Advances
Piutang Lain-lain	7, 28	1.949.046.471	941.630.236	Other Receivables
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>2.451.899.702.620</b>	<b>1.898.273.791.061</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Piutang Jangka Panjang				Long-term Receivables
Pihak Ketiga	5.b	152.462.288.711	35.605.317.716	Third Parties
Pihak Berelasi	5.b, 28	52.155.721.379	140.986.222.661	Related Parties
Aset Tetap	10, 11	1.916.432.358.123	2.132.501.172.461	Fixed Assets
Aset Pajak Tangguhan	15.d	368.765.806.424	420.235.174.211	Deferred Tax Assets
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>2.489.816.174.637</b>	<b>2.729.327.887.049</b>	<b>Total Non-Current Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>4.941.715.877.257</b>	<b>4.627.601.678.110</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang Usaha				Trade Payables
Pihak Ketiga	12	8.154.059.761	17.554.170.484	Third Parties
Pihak Berelasi	12, 28	1.931.290.517	825.992.739	Related Parties
Utang Pajak	15.b	29.823.715.287	16.479.902.082	Taxes Payable
Beban Akrual	13	74.362.139.450	55.250.146.113	Accrued Expenses
Liabilitas Imbalan Kerja -				Employee Benefit Obligations -
Bagian Jangka Pendek	16.a	202.068.458.234	112.602.727.952	Short Term Portion
Pendapatan Diterima Dimuka	17, 28	23.804.005.322	16.308.840.767	Unearned revenues
Liabilitas Sewa -				Lease Liabilities -
Bagian Jangka Pendek	18	642.908.747	1.034.314.101	Short Term Portion
Liabilitas Lain-lain - Jangka Pendek	14.a	359.668.534.873	306.843.780.856	Other Liabilities - Short-Term
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>700.455.112.191</b>	<b>526.899.875.094</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas Sewa -				Lease Liabilities -
Bagian Jangka Panjang	18	1.248.986.792	2.733.956.641	Long Term Portion
Liabilitas Imbalan Kerja -				Employee Benefit Obligations -
Bagian Jangka Panjang	16.b	64.382.216.605	70.405.754.646	Long-Term Portion
Liabilitas Lain-lain - Jangka Panjang	14.b	--	7.001.401.512	Other Liabilities - Long-Term
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>65.631.203.397</b>	<b>80.141.112.799</b>	<b>Total Non-Current Liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>766.086.315.588</b>	<b>607.040.987.893</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal Pemerintah Republik Indonesia	19	2.446.042.977.444	2.446.042.977.444	<i>The Republic of Indonesia Government Capital</i>
Tambahan Modal Disetor	20, 11	(516.195.099.909)	(516.195.099.909)	<i>Additional Paid-in Capital</i>
Saldo Laba:				<i>Retained Earnings:</i>
Dicadangkan	21	3.126.575.884.905	3.126.575.884.905	<i>Appropriated</i>
Belum Dicadangkan		(854.131.268.477)	(1.008.656.175.795)	<i>Unappropriated</i>
Komponen Ekuitas Lainnya	22	(26.662.932.294)	(27.206.896.428)	<i>Other Equity Component</i>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>4.175.629.561.669</b>	<b>4.020.560.690.217</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>4.941.715.877.257</b>	<b>4.627.601.678.110</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal  
31 Desember 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended  
December 31, 2022 and 2021  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
<b>PENDAPATAN USAHA</b>				<b>OPERATING REVENUES</b>
Jasa Pelayanan Penerbangan	23	1.982.439.734.291	1.180.799.085.277	Air Navigation Services
Jasa Pelayanan Terminal	23	249.037.939.196	166.721.206.829	Terminal Navigation Services
<b>Jumlah</b>		<b>2.231.477.673.487</b>	<b>1.347.520.292.106</b>	<b>Total</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				<b>OPERATING EXPENSES</b>
Beban Pegawai	24	(1.497.419.920.493)	(1.266.375.994.822)	Employee Expenses
Beban Umum dan Administrasi	25	(115.237.929.525)	(285.874.018.649)	General and Administrative Expenses
Beban Usaha Lainnya	26	(446.642.272.381)	(422.113.157.443)	Other Operating Expenses
<b>Jumlah</b>		<b>(2.059.300.122.399)</b>	<b>(1.974.363.170.914)</b>	<b>Total</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>		<b>172.177.551.088</b>	<b>(626.842.878.808)</b>	<b>OPERATING PROFIT (LOSS)</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				<b>OTHER INCOME (EXPENSE)</b>
Pendapatan Lain-lain	27	74.829.796.311	61.434.379.683	Other Income
Beban Lain-lain	27	(37.249.224.249)	(41.248.794.806)	Other Expenses
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain - Bersih</b>		<b>37.580.572.062</b>	<b>20.185.584.877</b>	<b>Total Other Income - Net</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		<b>209.758.123.150</b>	<b>(606.657.293.931)</b>	<b>PROFIT (LOSS) BEFORE TAX</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>	15.c	<b>(55.233.215.832)</b>	<b>116.866.231.989</b>	<b>INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>154.524.907.318</b>	<b>(489.791.061.942)</b>	<b>PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)</b>
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				Items that Will Not be Reclassified Subsequently to Profit or Loss:
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja - Setelah Pajak	22	543.964.134	(1.139.770.974)	Remeasurement of Employee Benefit Obligations - Net of Tax
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>155.068.871.452</b>	<b>(490.930.832.916)</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN  
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal  
31 Desember 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN  
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

For the Years Ended  
December 31, 2022 and 2021  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Pemerintah Republik Indonesia/ <i>The Republic of Indonesia Government Capital</i>	Tambahannya Modal Disetor/ <i>Additional Paid-in Capital</i>	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>		Komponen Ekuitas Lain/ <i>Other Equity Components</i>	Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	
			Dicadangkan/ <i>Appropriated</i>	Belum Dicadangkan/ <i>Unappropriated</i>			
Saldo per 31 Desember 2020	2.446.042.977.444	(516.195.099.909)	3.126.575.884.905	(518.865.113.853)	(26.067.125.454)	4.511.491.523.133	<i>Balance as of December 31, 2020</i>
Rugi Tahun Berjalan	--	--	--	(489.791.061.942)	--	(489.791.061.942)	<i>Loss for the Year</i>
Rugi Komprehensif Lain	--	--	--	--	(1.139.770.974)	(1.139.770.974)	<i>Other Comprehensive Loss</i>
Saldo per 31 Desember 2021	2.446.042.977.444	(516.195.099.909)	3.126.575.884.905	(1.008.656.175.795)	(27.206.896.428)	4.020.560.690.217	<i>Balance as of December 31, 2021</i>
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	154.524.907.318	--	154.524.907.318	<i>Profit for the Year</i>
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	--	543.964.134	543.964.134	<i>Other Comprehensive Income</i>
Saldo per 31 Desember 2022	2.446.042.977.444	(516.195.099.909)	3.126.575.884.905	(854.131.268.477)	(26.662.932.294)	4.175.629.561.669	<i>Balance as of December 31, 2022</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal  
31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the Years Ended

December 31, 2022 and 2021

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
<b>ARUS KAS DARI</b>			<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan Kas dari Pelanggan	2.697.236.831.247	1.366.700.676.394	Cash Receipts from Customers
Pembayaran kepada Pemasok	(926.125.530.604)	(722.081.994.836)	Payment to Suppliers
Pembayaran kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan	(1.085.558.499.417)	(930.336.759.302)	Payments to Boards of Supervisors, Directors and Employees
Pembayaran Pajak Penghasilan	(240.313.324.606)	(225.561.158.695)	Payment of Income Tax
Penerimaan Restitusi Pajak	60.419.293.352	19.724.299.088	Cash Receipt from Tax Refund
Penerimaan Bunga	25.372.968.834	34.533.121.616	Cash Receipts from Interest Income
Penerimaan lainnya	12.742.281.408	5.391.334.994	Other Receipts
<b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b><u>543.774.020.214</u></b>	<b><u>(451.630.480.741)</u></b>	<b>Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Perolehan Aset Tetap	(27.851.660.711)	(191.372.900.989)	Acquisition of Fixed Assets
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b><u>(27.851.660.711)</u></b>	<b><u>(191.372.900.989)</u></b>	<b>Net Cash Used in Investing Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Pembayaran Liabilitas Sewa	(2.745.496.740)	(5.321.480.555)	Cash Payments for Lease Liabilities
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b><u>(2.745.496.740)</u></b>	<b><u>(5.321.480.555)</u></b>	<b>Net Cash Used in Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>513.176.862.763</b>	<b>(648.324.862.285)</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b><u>1.092.703.262.848</u></b>	<b><u>1.744.757.413.506</u></b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR</b>
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	5.900.563.233	(3.729.288.373)	Effect of Foreign Currency Exchange Rates Changes
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b><u><u>1.611.780.688.844</u></u></b>	<b><u><u>1.092.703.262.848</u></u></b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM**

**1. a. Pendirian dan Informasi Umum**

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau Perum LPPNPI (Airnav Indonesia) selanjutnya disebut "Perusahaan", yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.77 Tahun 2012, tanggal 13 September 2012, dan telah dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2012.

Perusahaan adalah badan usaha yang menyelenggarakan Pelayanan Navigasi Penerbangan di Indonesia, berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

**1. b. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melaksanakan penyediaan jasa pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penerbangan dalam lingkup nasional dan internasional.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service/ATS*) yang terdiri dari:
  - a) Pelayanan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Control Service*);
  - b) Pelayanan Informasi Penerbangan (*Flight Information Service*); dan
  - c) Pelayanan Kesiagaan (*Alerting Service*).

**1. GENERAL**

**1. a. Establishment and General Information**

*Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia or Perum LPPNPI (Airnav Indonesia) here in after referred to as "the Company", which was established based on Government Regulation (PP) No. 77 of 2012, dated September 13, 2012, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 176 of 2012.*

*The Company is a sole entity that provides Aviation Navigation Services in Indonesia, in the form of State-Owned Enterprises (or also called 'BUMN') whose capital is owned by the state in the form of state assets separated and not divided into shares in accordance with Law Number 19 of 2003, on State-Owned Enterprises ('BUMN').*

**1. b. Purpose and Objectives**

*The purpose and objective of the Company is to carry out the provision of flight navigation services in accordance with applicable standards to achieve flight efficiency and effectiveness nationally and internationally.*

*To achieve the above purpose and objectives, the Company carry out the following activities:*

- 1) *Service Flying Traffic (Air Traffic Service/ATS) consisting of:*
  - a) *Air Traffic Control Service;*
  - b) *Flight Information Service; and*
  - c) *Alerting Service.*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada

Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021

and For the Years

Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1. b. Maksud dan Tujuan (Lanjutan)**

2) Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication/COM), yang terdiri dari:

- a) Pelayanan Aeronautika Tetap;
- b) Pelayanan Aeronautika Bergerak; dan
- c) Pelayanan Radio Navigasi Aeronautika.

3) Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services/AIS) terdiri dari:

- a) Pelayanan Informasi Aeronautika dan Peta Penerbangan;
- b) Penerbitan dan Penyebarluasan Notam (Notice to Airmen); dan
- c) Pelayanan Informasi Aeronautikal Bandar Udara.

4) Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Services/MET); dan

5) Pelayanan Informasi Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue/SAR).

Perusahaan menyelenggarakan Pelayanan Navigasi Penerbangan dengan ketentuan:

- 1) Mengutamakan keselamatan penerbangan;
- 2) Tidak berorientasi pada keuntungan;
- 3) Secara finansial dapat mandiri; dan
- 4) Biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk biaya investasi, biaya operasional dan peningkatan kualitas pelayanan.

**1. GENERAL (Continued)**

**1. b. Purpose and Objectives (Continued)**

2) Aeronautical Telecommunication (COM), consisting of:

- a) Aeronautical Fixed Service (AFS);
- b) Aeronautical Mobile Services (AMS); and
- c) Aeronautical Radio Nav. Service (ARNS).

3) Aeronautical Information Services (AIS), consisting of:

- a) Information Service Aeronautics and Map Flight;
- b) Publishing and Dissemination of Notam (Notice to Airmen); and
- c) Information Service Aeronautics Airport.

4) Aeronautical Meteorological Services (MET); and

5) Search and Rescue (SAR).

The Company organizes Flight Navigation Services with provisions:

- 1) Prioritizing flight safety;
- 2) Not profit oriented;
- 3) Financially independent; and
- 4) Costs withdrawn from users are returned for investment costs, operational costs and improving service quality.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1. b. Maksud dan Tujuan (Lanjutan)**

**Visi, Misi dan Nilai-Nilai Dasar  
Perusahaan**

Visi Perusahaan adalah "**Menjadi  
Penyedia Jasa Pelayanan Navigasi  
Penerbangan Bertaraf Internasional**".

**Misi Perusahaan**

Menyediakan layanan lalu lintas  
penerbangan yang mengutamakan  
keselamatan, kenyamanan dan ramah  
lingkungan demi memenuhi ekspektasi  
pengguna jasa.

**Nilai-nilai Dasar**

*Integrity* : Mengutamakan  
kebenaran dan  
menjunjung etika  
tinggi dalam  
pergaulan bisnis.

*Solidity* : Mengutamakan  
kebersamaan dan  
kerjasama tim  
dalam  
menjalankan  
segala aktivitas  
bisnis.

*Accountability* : Berani  
memperjuangkan  
kebenaran,  
kejujuran, dan  
senantiasa  
bertanggungjawab.

*Focus on Safety* : Mengutamakan  
keselamatan  
dalam setiap  
aktivitas bisnis.

*Excellent Service* : Selalu berusaha  
memberikan  
pelayanan terbaik  
bagi pelanggan  
dan mitra kerja.

**1. GENERAL (Continued)**

**1. b. Purpose and Objectives (Continued)**

**Vision, Mission and Basic Values of  
the Company**

The Company's vision is "**To Become an  
International Flight Navigation Service  
Provider**".

**The Company's Mission**

Providing aviation navigation service that  
prioritizes safety, convenience, and  
environment friendly to meet the  
expectations of service users.

**Basic Values**

*Integrity* : Prioritizing the truth  
and upholding high  
ethics in business  
relationships.

*Solidity* : Prioritizing  
togetherness and  
teamwork in  
carrying out all  
business activities.

*Accountability* : Dare to fight for  
truth, honesty, and  
always be  
responsible.

*Focus on Safety* : Prioritizing safety in  
every business  
activity.

*Excellent Service* : Always try to  
provide the best  
service for  
customers and  
partners.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1. c. Tempat Kedudukan dan Lokasi Usaha**

Perusahaan berkedudukan dan berdomisili di Tangerang dan kantor pusat di Jalan Ir. H. Juanda No.1 Kecamatan Neglasari, Tangerang, Provinsi Banten.

**1. d. Dewan Pengawas dan Direksi**

**Dewan Pengawas**

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-89/MBU/03/2020, tanggal 20 Maret 2020. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, mengangkat Novie Riyanto Rahardjo sebagai Ketua Dewan Pengawas. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-117/MBU/05/2022, tanggal 17 Mei 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum LPPNPI, memberhentikan Anindita Eka Wibisono dan mengangkat Endra Gunawan sebagai anggota Dewan Pengawas. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-187/MBU/08/2022, tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum LPPNPI, memberhentikan Elfi Amir dan mengangkat Sigit Hani Hadiyanto sebagai anggota Dewan Pengawas.

**1. GENERAL (Continued)**

**1. c. Office and Business Location**

The Company is domiciled in Tangerang and headquartered at Jalan Ir. H. Juanda No.1 Neglasari District, Tangerang, Banten Province.

**1. d. Boards of Supervisors and Directors**

**Board of Supervisors**

Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-89/MBU/03/2020, dated March 20, 2020, concerning the Termination and Appointment of the Chairman of Supervisory Board of Perum LPPNPI, appoints Novie Riyanto Rahardjo as Chairman of the Supervisory Board. Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-117/MBU/05/2022, dated May 17, 2022, concerning the Termination and Appointment of the Member of Supervisory Board of Perum LPPNPI, terminated Anindita Eka Wibisono and appointed Endra Gunawan as a Member of the Supervisory Board. Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-187/MBU/08/2022, dated August 31, 2022, concerning the Termination and Appointment of the Member of Supervisory Board of Perum LPPNPI, terminated Elfi Amir and appointed Sigit Hani Hadiyanto as a Member of the Supervisory Board.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1. d. Dewan Pengawas dan Direksi  
(Lanjutan)**

Susunan Dewan Pengawas untuk tahun  
31 Desember 2022 dan 2021 adalah  
sebagai berikut:

**1. GENERAL (Continued)**

**d. Board of Supervisors and Directors  
(Continued)**

The composition of Supervisory Board  
for December 31, 2022 and 2021 are as  
follows:

**2022**

Ketua	Novie Riyanto Rahardjo	Chairman
Anggota	Tri Wahyuningsih Retno Mulyani	Member
Anggota	Capt. Sigit Hani Hadiyanto	Member
Anggota	Daryatmo	Member
Anggota	Endra Gunawan	Member

**2021**

Ketua	Novie Riyanto Rahardjo	Chairman
Anggota	Tri Wahyuningsih Retno Mulyani	Member
Anggota	Elfi Amir	Member
Anggota	Daryatmo	Member
Anggota	Anindita Eka Wibisono	Member

Dalam menjalankan penugasannya Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas mendapat penghasilan berupa honorarium yang besarnya ditetapkan melalui Surat Menteri BUMN No. S-23/Wk.2.MBU.F/08/2020, tanggal 4 Agustus 2020, Honorarium untuk Ketua Dewan Pengawas sebesar 45% dari gaji Direktur Utama dan honorarium Anggota Dewan Pengawas sebesar 90% dari honorarium Ketua Dewan Pengawas. Selain itu, juga menerima tunjangan dan fasilitas sebagaimana terlampir pada surat tersebut.

In carrying out its assignment, the Board of Supervisors and Secretary of the Board of Supervisors receive income in the form of honorariums, the amount of which is determined by a Minister of SOE Letter No. S-23/Wk.2.MBU.F/08/2020, dated August 4, 2020. Honorarium for the Chairman of the Board of Supervisors is 45% of the salary of the President Director and honorarium for the Members of the Board of Supervisors is 90% of the Honors of the Chairman of the Board of Supervisors. In addition, they also receive benefits and facilities as attached to the letter.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1. d. Dewan Pengawas dan Direksi  
(Lanjutan)**

Pada akhir masa jabatan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan santunan purna jabatan yang berupa pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang besaran beban preminya/iuran tahunannya tidak boleh melebihi 25% dari honorarium selama satu tahun. Selain fasilitas yang diberikan tersebut di atas dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB) melimpahkan kewenangan kepada Dewan Pengawas untuk menetapkan fasilitas lain sesuai dengan aspek kepastian dan kemampuan Perusahaan yang dalam penetapannya terlebih dahulu harus dikonsultasikan kepada Pemilik Modal.

**Direksi**

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-219/MBU/06/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perum LPPNPI, mengubah nomenklatur jabatan dari Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-28/MBU/01/2022, tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perum LPPNPI, memberhentikan Mohamad Pramintohadi Sukarno dan mengangkat Polana Banguningsih Pramesti sebagai Direktur Utama Perum LPPNPI.

**1. GENERAL (Continued)**

**d. Board of Supervisors and Directors  
(Continued)**

At the end of the term, the Board of Supervisors and the Secretary of the Board of Supervisors may be given full-time compensation in the form of participation in an insurance or pension savings program, the amount of which premiums / annual contributions may not exceed 25% of the honorarium for one year. In addition to the facilities provided above in the Joint Discussion Meeting (RPB), the authority is delegated to the Board of Supervisors to determine other facilities in accordance with the aspects of appropriateness and capability of the Company which in its determination must first be consulted to the Capital Owners.

**Directors**

Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-219/MBU/06/2021, dated June 30, 2021, concerning Changes in the Nomenclature of Position and Function Diversion of the Board of Directors of Perum LPPNPI, changed the nomenclature of Director of Finance to Finance and Risk Management Director.

Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-28/MBU/01/2022, dated January 21, 2022 concerning the Termination and Appointment of the President Director of Perum LPPNPI, terminated Mohamad Pramintohadi Sukarno and appointed Polana Banguningsih Pramesti as the President Director of Perum LPPNPI.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1. d. Dewan Pengawas dan Direksi  
(Lanjutan)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-186/MBU/08/2022, tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum LPPNPI, memberhentikan Hendroyono dan mengangkat Taufik Hendra Kusuma sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LPPNPI.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-07/DW/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022 tentang Pemberhentian sementara Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dan Penetapan Pelaksana Tugas Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LPPNPI, menyetujui untuk memberhentikan sementara Taufik Hendra Kusuma sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LPPNPI dan menetapkan Bagus Sunjoyo, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum untuk merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LPPNPI.

Susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**1. GENERAL (Continued)**

**1. d. Board of Supervisors and Directors  
(Continued)**

Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-186/MBU/08/2022, dated August 31, 2022 concerning the Termination and Appointment of Director of Perum LPPNPI, terminated Hendroyono and appointed Taufik Hendra Kusuma as the Finance and Risk Management Director of Perum LPPNPI.

Based on the Supervisory Board Decree No. KEP-07/DW/XII/2022, dated December 16, 2022 concerning the Temporary Termination of the Finance and Risk Management Director and Appointment of Officials Temporary Replacement for Perum LPPNPI's Finance and Risk Management Director, agreed to temporary terminate Taufik Hendra Kusuma as Finance and Risk Management Director and assigning Bagus Sunjoyo, Human Resources and General Affairs to concurrently serve as Task Executor of Finance and Risk Management Director of Perum LPPNPI.

The composition of the Board of Directors as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

**2022**

Direktur Utama	Polana Banguningsih Pramesti	President Director
Direktur Teknik	Ahmad Nurdin Aulia	Director of Engineering
Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standarisasi	Bambang Rianto	Director of Safety, Security, and Standardization
Plt. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Bagus Sunjoyo	Otr. Director of Finance and Risk Management
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Bagus Sunjoyo	Director of Human Resources and General Affairs
Direktur Operasi	Mokhammad Khatim	Director of Operation



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1. d. Dewan Pengawas dan Direksi  
(Lanjutan)**

**1. GENERAL (Continued)**

**1. d. Board of Supervisory and Directors  
(Continued)**

**2021**

Direktur Utama	Mohamad Pramintohadi Sukarno	<i>President Director</i>
Direktur Teknik	Ahmad Nurdin Aulia	<i>Director of Engineering</i>
Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standarisasi	Bambang Rianto	<i>Director of Safety, Security, and Standardization</i>
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Hendroyono	<i>Director of Finance and Risk Management</i>
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Bagus Sunjoyo	<i>Director of Human Resources and General Affairs</i>
Direktur Operasi	Mokhammad Khatim	<i>Director of Operation</i>

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-23/Wk.2.MBU.F/08/2020, tanggal 4 Agustus 2020, gaji Direktur Utama ditetapkan dan gaji Direksi lainnya ditetapkan sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.

*Based on the Letter of the Minister of State Owned Enterprises No. S-23/Wk.2.MBU.F/08/2020, dated August 4, 2020, salary for the President Director is determined and the salaries of other Directors are set at 85% of the salary of the President Director.*

Selain itu, juga menerima tunjangan yang berupa tunjangan jabatan sebesar 20% dari gaji untuk setiap bulannya, kendaraan jabatan untuk Direksi serta fasilitas pengobatan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku.

*In addition, 20% of the salary for each month is also received in the form of positional allowance, vehicle allowance for the Directors and medical facilities in accordance with the Company's capabilities and applicable regulations.*

Pada akhir masa jabatan, Direksi diberikan santunan purna jabatan yang berupa pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang besaran beban preminya/ iuran tahunannya tidak boleh melebihi 25% dari gaji selama satu tahun.

*At the end of the term, the Directors are given fulltime compensation in the form of a participation in the insurance or pension savings program, the amount of which premium / annual fee may not exceed 25% of the salary for one year.*

**Komite Audit**

Untuk membantu tugas-tugas pengawasan, Dewan Pengawas membentuk dan mengangkat anggota Komite Audit, sebagai berikut:

**Audit Committee**

*To assist supervisory tasks, the Supervisory Board forms and appoints Audit Committee members, as follows:*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1. d. Dewan Pengawas dan Direksi  
(Lanjutan)**

**Komite Audit (Lanjutan)**

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum LPPNPI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Dewan Pengawas Perum LPPNPI No. KEP-03/DW/V/2022, tanggal 31 Mei 2022 memberhentikan dengan hormat Anindita Eka Wibisono sebagai ketua komite audit serta mengangkat Daryatmo sebagai ketua komite audit.

Komposisi Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**1. GENERAL (Continued)**

**1. d. Board of Supervisory and Directors  
(Continued)**

**Audit Committee (Continued)**

Perum LPPNPI's Supervisory Board Decree concerning Termination and Appointment of the Chairman of Perum LPPNPI Supervisory Board Audit Committee No. KEP-03/DW/V/2022, dated May 31, 2022, honorably terminate Anindita Eka Wibisono as chairman of the audit committee and appointed Daryatmo as chairman of the audit committee.

The composition of the Audit Committee as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

**2022**

Ketua	Daryatmo	Chairman
Anggota	Endra Gunawan	Member
Anggota	Aria Farah Mita	Member
Anggota	Ika Setyawati	Member

**2021**

Ketua	Anindita Eka Wibisono	Chairman
Anggota	Aria Farah Mita	Member
Anggota	Ika Setyawati	Member

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1. e. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Komposisi Sumber Daya Manusia di Perum LPPNPI pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Karyawan Perum LPPNPI	4.223	4.235	Employee of Perum LPPNPI
Perbantuan PT Angkasa Pura I (Persero)	--	1	Assistant from PT Angkasa Pura I (Persero)
Perbantuan PT Angkasa Pura II (Persero)	1	2	Assistant from PT Angkasa Pura II (Persero)
Perbantuan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	599	630	Assistant from Civil Servants (PNS)
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	2	6	Employment Agreement of Specified Time (PKWT)
Peserta Magang	1	26	The Internship Participant
Penugasan	4	5	Assignment
<b>Jumlah</b>	<b>4.830</b>	<b>4.905</b>	<b>Total</b>

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013, "Pasal 8" Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang diperbantukan pada Perum LPPNPI dan PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (3) tetap dikenakan potongan iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

**1. f. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)**

Berdasarkan prognosa *diagnostic assessment* terhadap penerapan GCG pada Perum LPPNPI untuk periode tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

**1. GENERAL (Continued)**

**1. e. Human Resources (HR)**

The composition of Human Resources in Perum LPPNPI as of December 31, 2022 and 2021 is as follows:

In accordance with the Regulation of the Head of State Civil Service Agency No. 21 of 2013, dated July 31, 2013, "Article 8" Civil Servants of the Ministry of Transportation are seconded to Perum LPPNPI and PT Angkasa Pura I (Persero) and PT Angkasa Pura II (Persero) as referred to in Article 1 and Article 3 paragraph (3) will still be subjected to contribution deductions in accordance with the applicable provisions for Civil Servants.

**1. f. Implementation of Good Corporate Governance (GCG)**

Based on the prognosis results of the *diagnostic assessment* of the implementation of GCG at Perum LPPNPI for the period of 2022 can be concluded as follows:

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM**

**1. f. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* (Lanjutan)**

- Bahwa penerapan *GCG* pada Perum LPPNPI secara umum termasuk dalam kategori "baik" dari lima kategori tingkatan, yaitu: sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang, dengan skor capaian aktual 81,96 dari skor maksimal 100.
- Enam aspek *governance* yang telah dinilai berdasarkan prognosa tersebut, meliputi (1) Komitmen, dengan capaian skor 5,53 (2) RUPS, dengan capaian skor 7,63; (3) Dewan Pengawas, dengan capaian skor 33,50; (4) Direksi, dengan capaian skor 28,19; (5) Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure*), dengan capaian skor 7,12; dan (6) Aspek lainnya, dengan capaian skor 0,00.

**1. g. Modal Awal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.77, Tahun 2012, Pasal 14, bahwa modal awal Perusahaan sebesar Rp97.952.690.300 yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang Pengadaannya bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dan 2011, dengan perincian:

**1. GENERAL (Continued)**

**1. f. *Implementation of Good Corporate Governance (GCG)* (Continued)**

- That the implementation of *GCG* at Perum LPPNPI is generally included in the category of "good" levels of five categories, namely: excellent, good, sufficient, or less, and much less, with scores of actual achievements is 81.96 from the maximum score of 100.
- Six aspects of *governance* that have been assessed based on the prognosis include: (1) Commitment, with a score of 5.53 (2) GMS, with a score of 7.63; (3) Supervisory Board, with a score of 33.50; (4) Directors, with a score of 28.19; (5) Disclosure and Transparency (*Disclosure*), with a score of 7.12; and (6) Other aspects, with a score of 0.00.

**1. g. *Initial Capital***

Based on Government Regulation (PP) No. 77, 2012, Article 14, the initial capital of the Company is Rp97,952,690,300 originating from the transfer of State Property to the Ministry of Transportation which Procurement comes from the Budget of the 2010 State Budget and 2011, with details as follows:

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1. g. Modal Awal (Lanjutan)**

**1. GENERAL (Continued)**

**1. g. Initial Capital (Continued)**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Nilai/ Value (Rp)</b>	<b>Description</b>
1.	Peralatan navigasi pada Bandar Udara Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah berupa antena pemancar dan penerima MF, alat komunikasi navigasi <i>Instrument Landing System</i> , alat komunikasi navigasi, fasilitas komunikasi penerbangan dan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.	22.441.164.000	<i>Navigation equipment in the Iskandar Airport at the Pangkalan Bun, Central Kalimantan of antenna transmitter and receiver MF, a means of communication navigation Instrument Landing System, a means of communication navigation, facilities communication flight and facilities navigation and observation flight.</i>
2.	Peralatan navigasi pada Bandar Udara Juwata di Tarakan, Kalimantan Timur berupa unit <i>Transceiver Very High Frequency Stationery</i> dan <i>Secondary Surveillance Radar</i> .	22.457.185.000	<i>Navigation equipment at Juwata Airport in Tarakan, East Kalimantan in the form of Very High Frequency Stationery Transceiver units and Secondary Radar.</i>
3.	Peralatan navigasi pada Bandar Udara Sentani, Jayapura, Papua penerima MF + AF, unit <i>Transceiver Ultra High Frequency Portable</i> , unit <i>Transceiver Very High Frequency Portable</i> , <i>Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range</i> , alat komunikasi navigasi dan <i>Voice Switching Communication System</i> .	48.658.401.000	<i>Navigation equipment in the sentani airport in Jayapura, Papua of receiving instrument MF + AF, unit Ultra High Frequency Portable Transceiver, Very High Frequency Portable Transceiver unit, Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range, a means of communication navigation and Voice Switching Communication System.</i>
4.	Peralatan navigasi pada Bandar Udara Dewadaru di Karimun Jawa, Jawa Tengah berupa <i>Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range</i> .	4.395.940.300	<i>Navigation equipment in the Dewadaru Airport in Karimun Jawa, Central Java of Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range.</i>
	<b>Jumlah</b>	<b>97.952.690.300</b>	<b>Total</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

<b>2. IKHTISAR PENTING</b>	<b>KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	<b>2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES</b>
<b>2. a. Kepatuhan terhadap Akuntansi Keuangan</b>	<b>Standar</b>	<b>2. a. Compliance with the Financial Accounting Standards</b>
Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah mematuhi dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").		<i>The financial statements of December 31, 2022 and for the year then ended have complied with and are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SFAS"), which includes the Statement and Interpretation issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("FASB-IAI").</i>
<b>2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan</b>		<b>2. b. Basis of Preparation of the Financial Statements</b>
Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.		<i>The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.</i>
Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.		<i>The statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.</i>
Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.		<i>Figures in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified.</i>
Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.		<i>The accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended December 31, 2021, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.</i>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan  
(Lanjutan)**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

**2. c. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan**

Efektif tanggal 1 Januari 2022, Perusahaan menerapkan PSAK baru yang berlaku efektif pada tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

Penerapan standar baru dan Amendemen yang relevan dengan operasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 57 - Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi;
- Penyesuaian PSAK 71 - Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK 73 - Sewa

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. b. Basis of Preparation of the Financial  
Statements (Continued)**

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

**2. c. Changes to The Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards**

Effective January 1, 2022, the Company adopted new SFAS that are effective for application from that date. Changes to the Company's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards.

The adoption of the following new standards and amendment which are relevant to the Company's operations are as follows:

- Amendment to SFAS 57 - Provisions, contingent liabilities, and contingent assets;
- Annual Improvement to SFAS 71- Financial Instruments; and
- Amendment to SFAS 73 - Leases

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. c. Perubahan pada Pernyataan Standar  
Akuntansi Keuangan dan Interpretasi  
Pernyataan Standar Akuntansi  
Keuangan (Lanjutan)**

Dampak dari penerapan standar  
akuntansi baru ini adalah sebagai berikut:

Amendemen PSAK 57 - Provisi, Liabilitas  
kontinjensi dan Aset Kontinjensi.

PSAK 57 mendefinisikan kontrak yang  
memberatkan sebagai kontrak dimana  
biaya yang tidak dapat dihindari untuk  
memenuhi kewajiban Perusahaan  
melebihi manfaat ekonomi yang akan  
diterima berdasarkan kontrak tersebut.  
Biaya yang tidak dapat dihindari adalah  
yang lebih rendah dari biaya bersih untuk  
keluar dari kontrak dan biaya untuk  
memenuhi kontrak. Amendemen tersebut  
mengklarifikasi arti 'biaya untuk  
memenuhi kontrak'.

Amendemen ini menjelaskan bahwa  
biaya langsung untuk memenuhi kontrak  
terdiri dari:

- biaya inkremental untuk memenuhi  
kontrak tersebut (misalnya tenaga  
kerja langsung dan material); dan
- alokasi biaya lain yang berhubungan  
langsung untuk memenuhi kontrak  
(misalnya alokasi biaya penyusutan  
atas aset tetap yang digunakan  
dalam memenuhi kontrak tersebut).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. c. Changes to The Statements of  
Financial Accounting Standards and  
Interpretations of Statement of  
Financial Accounting Standards  
(Continued)**

*Impact of adoption to these new  
accounting standards are follows:*

*Amendment to SFAS 57 - Provisions,  
Contingent liabilities and Contingent  
Assets.*

*SFAS 57 defines an onerous contract as  
one in which the unavoidable costs of  
meeting the Company's obligations  
exceed the economic benefits to be  
received under that contract.  
Unavoidable costs are the lower of the  
net cost of exiting the contract and the  
costs to fulfil the contract. The  
amendment clarifies the meaning of  
'costs to fulfil a contract'.*

*The amendment explains that the direct  
cost of fulfilling a contract comprises:*

- *the incremental costs of fulfilling that  
contract (for example, direct labor  
and materials); and*
- *an allocation of other costs that relate  
directly to fulfilling contracts (for  
example, an allocation of the  
depreciation charge for an item of  
PPE used to fulfil the contract).*



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. c. Perubahan pada Pernyataan Standar  
Akuntansi Keuangan dan Interpretasi  
Pernyataan Standar Akuntansi  
Keuangan (Lanjutan)**

Amendemen tersebut juga mengklarifikasi bahwa, sebelum provisi terpisah untuk kontrak yang memberatkan ditetapkan, entitas mengakui kerugian penurunan nilai yang terjadi atas aset yang digunakan dalam memenuhi kontrak, bukan atas aset yang didedikasikan untuk kontrak tersebut.

Penyesuaian PSAK 71 - Instrumen Keuangan

Amendemen PSAK 71 mengatur biaya mana yang harus dimasukkan dalam pengujian 10% untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Biaya atau fee dapat dibayarkan kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman. Berdasarkan amendemen tersebut, biaya atau biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga tidak akan dimasukkan dalam tes 10%.

Selain itu, amendemen ini juga mengklarifikasi perlakuan akuntansi untuk imbalan tersebut dalam kondisi modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan dan tidak memenuhi penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Jika modifikasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan, imbalan tersebut harus dimasukkan dalam perhitungan suku bunga. Jika modifikasi mengakibatkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal, maka imbalan tersebut dibebankan langsung ke laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. c. Changes to The Statements of  
Financial Accounting Standards and  
Interpretations of Statement of  
Financial Accounting Standards  
(Continued)**

*The amendment also clarifies that, before a separate provision for an onerous contract is established, an entity recognizes any impairment loss that has occurred on assets used in fulfilling the contract, rather than on assets dedicated to that contract.*

*Annual Improvement to SFAS 71 –  
Financial Instruments*

*The amendment to SFAS 71 addresses which fees should be included in the 10% test for derecognition of financial liabilities. Costs or fees could be paid to either third parties or the lender. Under the amendment, costs or fees paid to third parties will not be included in the 10% test.*

*In addition, this amendment also clarifies the accounting treatment for those fees in the condition for the modification resulting in derecognition and does not meet derecognition of financial liabilities. If the modification does not result in derecognition of financial liabilities, those fees should be included in the effective interest rate calculation. If the modification results in derecognition of initial financial liabilities, those fees are charged directly to profit or loss.*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

<b>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)</b>	<b>2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)</b>
<b>2. c. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Lanjutan)</b>	<b>2. c. Changes to The Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards (Continued)</b>
Penyesuaian PSAK 73 - Sewa	Annual Improvement to SFAS 73- Leases
DSAK-IAI telah menghilangkan ilustrasi pembayaran dari lessor terkait dengan prasarana. Alasan Amendemen tersebut adalah untuk menghilangkan potensi kebingungan tentang perlakuan insentif leasing.	DSAK- IAI has removed the illustration of payments from the lessor relating to leasehold improvements. The reason for the amendment is to remove any potential confusion about the treatment of lease incentives.
Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan, di diskusikan di Catatan 35.	Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended December 31, 2022 and have not been early adopted by the Company, are discussed in Note 35.
<b>2. d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing</b>	<b>2. d. Foreign Currency Transaction and Balances</b>
Laporan keuangan Perusahaan diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan Perusahaan.	The financial statements of the Company is measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The financial statements of the Company are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the financial statements.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang  
Asing (Lanjutan)**

Dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan, transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir setiap periode pelaporan:

- Pos Moneter valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut;
- Pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali; dan
- Pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan.

Akun aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs pada tanggal neraca sebagai berikut:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
1,00 Dollar AS	15.592	14.269	1.00 US Dollar

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laba-rugi periode tahun berjalan.

Selanjutnya, untuk pungutan dan penyetoran pajak-pajak (PPN dan PPh) berkenaan dengan tagihan dan kewajiban dalam mata uang asing dibayarkan dengan rupiah, dan dicatat sesuai dengan "kurs pajak mingguan" yang berlaku pada tanggal diterbitkannya faktur pajak yang bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. d. Foreign Currency Transaction and  
Balances (Continued)**

*In preparing the financial statements of the Company, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each the reports:*

- *Monetary items in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date;*
- *Non-monetary items measured at historical cost in foreign currencies are not retranslated; and*
- *Non-monetary item in foreign currencies measured at fair value are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined.*

*Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting period are translated into Rupiah using rate at the reporting date as follows:*

*Gains and losses arising from foreign currency transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the profit and loss for the current year period.*

*Furthermore, for the collection and remittance of taxes (VAT and income tax) denominated in foreign currency will be paid in Rupiah and are recorded using 'weekly tax rate' prevailing at the date of issuance of respected tax invoice.*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Pihak Berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

1) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- c) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, berikutnya terkait dengan entitas lain).
- b) Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)**

**2. e. Transactions with Related Parties**

*Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:*

1) *Person or immediate family member who is related to a reporting entity if that person:*

- a) *Has control or joint control over the reporting entity;*
- b) *Has significant influence over the reporting entity; or*
- c) *Key management personnel of the reporting entity or parent entity reporting.*

2) *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:*

- a) *Entity and the reporting entity is a member of the same Company (which means a parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
- b) *An entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company, which the other entity is a member).*
- c) *Both entities are joint ventures of the same third party.*
- d) *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. e. Transaksi dengan Pihak-pihak  
Berelasi (Lanjutan)**

2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (Lanjutan)

e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas pelapor juga berelasi dengan entitas pelapor.

f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).

g) Orang yang diidentifikasi dalam butir 1) huruf a memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga normal, persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan Catatan 28.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. e. Transactions with Related Parties  
(Continued)**

2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply: (Continued)

e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the reporting entity is also related to the reporting entity.

f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in paragraph a).

g) The person identified in item 1) letter a has significant influence over the entity or the entity's key management personnel (or the parent of the entity).

h) The entity, or any member of a the Company of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant transactions with related parties, whether or not conducted with the interest rate or the normal price, terms and conditions with third parties, are disclosed in the financial statements Note 28.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. e. Transaksi dengan Pihak-pihak  
Berelasi (Lanjutan)**

Berikut ini penjelasan dengan pihak-pihak berelasi dalam laporan keuangan:

- 1) Entitas anak dan yang dibawahinya;
- 2) Perusahaan Asosiasi/Terafiliasi;
- 3) Ventura Bersama;
- 4) Manajemen Kunci;
- 5) Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- 6) Institusi keuangan yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
- 7) Anggota keluarga dekat dari individu.

**2. f. Instrumen Keuangan**

**Aset Keuangan**

**1. Klasifikasi**

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. e. Transactions with Related Parties  
(Continued)**

The following is an explanation on the related parties in the financial statements:

- 1) Subsidiaries and subordinate;
- 2) Associates/Affiliated Companies;
- 3) Joint Venture Companies;
- 4) Key Management;
- 5) Other entities that are controlled by the Government of Republic Indonesia;
- 6) Financial institutions that are controlled by the Government of Republic Indonesia; and
- 7) Immediate family members of individuals.

**2. f. Financial Instruments**

**Financial Assets**

**1. Classification**

The Company classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:

- those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and
- those to be measured at amortized cost.

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Aset Keuangan (Lanjutan)**

**1. Klasifikasi (Lanjutan)**

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah perusahaan telah melakukan pemilihan takterbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

**2. Pengukuran**

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. f. Financial Instruments (Continued)**

**Financial Assets (Continued)**

**1. Classification (Continued)**

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Company has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Company reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

**2. Measurement**

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Aset Keuangan (Lanjutan)**

**2. Pengukuran (Lanjutan)**

**Instrumen utang**

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran dimana Perusahaan mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, pendapatan akrual dan piutang lain-lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. f. Financial Instruments (Continued)**

**Financial Assets (Continued)**

**2. Measurement (Continued)**

**Debt instrument**

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Company's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Company classifies its debt instruments:

- Amortized cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortized cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortized cost and is not part of a hedging relationship is recognized in profit or loss when the asset is derecognized or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.

The Company's financial assets consist of cash and cash equivalents, account receivables, accrued revenues and other receivables.



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Aset Keuangan (Lanjutan)**

**Penghentian Pengakuan Aset  
Keuangan**

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, direklasifikasi ke laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. f. Financial Instruments (Continued)**

**Financial Assets (Continued)**

**Derecognition of Financial Assets**

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is reclassified to profit or loss.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Aset Keuangan (Lanjutan)**

**Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis *forward-looking* untuk seluruh saldo piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Selain untuk piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE.

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas Risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. f. Financial Instruments (Continued)**

**Financial Assets (Continued)**

**Impairment of Financial Assets**

The Company applies the "simplified approach" to measure the Expected Credit Loss ("ECL") which uses a lifetime expected loss allowance on a forward-looking basis for all trade receivables and contract assets without significant financing component. Other than trade receivables and contract assets without significant financing component, the Company applies general model to ensure ECL.

At each reporting date, the Company assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

When making the assessment, the Company consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Aset Keuangan (Lanjutan)**

**Penurunan Nilai Aset Keuangan  
(Lanjutan)**

Untuk kas dan setara kas, Perusahaan menerapkan penyederhanaan risiko kredit rendah. Kemungkinan gagal bayar dan kerugian karena gagal bayar tersedia untuk umum dan dianggap sebagai investasi berisiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Perusahaan untuk mengukur ECL pada instrumen tersebut dalam basis 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak origination, penyisihan akan didasarkan pada ECL seumur hidup. Perusahaan menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat kredit terkemuka untuk menentukan apakah instrumen utang memiliki SICR dan untuk memperkirakan ECL.

**Definisi Gagal Bayar**

Perusahaan menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Perusahaan, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. f. Financial Instruments (Continued)**

**Financial Assets (Continued)**

**Impairment of Financial Assets  
(Continued)**

For cash and cash equivalents, the Company applies the low credit risk simplification. Default possibilities and losses due to default are publicly available and are considered low credit risk investments. It is the Company's policy to measure ECL on these instruments on a 12 months basis. However, if there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on ECL for life. Companies use ratings from leading credit rating agencies to determine whether a debt instrument has an SICR and to estimate ECL.

**Definition of Default**

The Company considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- when there is a breach of financial covenants by the debtor; or
- information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Company, in full (without taking into account any collateral held by the Company).

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Aset Keuangan (Lanjutan)**

**Penurunan Nilai Aset Keuangan  
(Lanjutan)**

**Definisi Gagal Bayar (Lanjutan)**

Terlepas dari analisis di atas, Perusahaan menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Perusahaan menilai dengan basis *forward-looking* kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

**Kebijakan Penghapusan**

Perusahaan menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau untuk hal piutang usaha, ketika jumlahnya sudah lebih dari 120 hari tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas penagihan dalam prosedur pemulihan Perusahaan, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. f. Financial Instruments (Continued)**

**Financial Assets (Continued)**

**Impairment of Financial Assets  
(Continued)**

**Definition of Default (Continued)**

Irrespective of the above analysis, the Company considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Company has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

The Company assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortized cost and FVOCI. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

**Write-off Policy**

The Company writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, or in the case of trade accounts receivable, when the amounts are over 120 days past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Company's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan**

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontingen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**Metode suku bunga efektif**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. f. Financial Instruments (Continued)**

**Financial Liabilities**

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities through profit or loss or financial liabilities at amortized cost using the effective interest method. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

*Financial liabilities at amortized cost*

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

*Effective interest method*

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, beban akrual, liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek dan liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**Penghentian Pengakuan Liabilitas  
Keuangan**

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kedaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Ketika Perusahaan bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Perusahaan memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. f. Financial Instruments (Continued)**

**Financial Liabilities**

The Company's financial liabilities consist of trade payables, accrued expenses, short-term employee benefits liability and lease liabilities classified as financial liabilities at amortized cost. The Company has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

**Derecognition of Financial Liabilities**

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

When the Company exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Company accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10% different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Penghentian Pengakuan Liabilitas  
Keuangan (Lanjutan)**

Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

**Reklasifikasi Instrumen Keuangan**

Perusahaan diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Perusahaan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Perusahaan seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, Perusahaan perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah: (a) perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar), (b) hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan, dan (c) pengalihan aset keuangan antara bagian dari Perusahaan dengan model bisnis berbeda.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. f. Financial Instruments (Continued)**

**Derecognition of Financial Liabilities  
(Continued)**

If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

**Reclassification of Financial  
Instruments**

The Company is allowed to reclassify the financial assets owned if the Company changes the business model for the management of financial assets and the Company is not allowed to reclassify the financial liabilities.

Changes in the business model should significantly impact the Company's operational activities such as acquiring, releasing or ending a line of business. In addition, the Company needs to prove the change to external parties.

The following are not considered as change in business model: (a) the change of intention relating to certain financial assets (even in situations of significant changes in market conditions), (b) temporary loss of certain markets for financial assets, and (c) the transfer of financial assets between parts of the Company and different business models.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)**

**Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensinya untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hak saling hapus harus ada pada saat ini daripada bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan, atau kebangkrutan.

**2. g. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

**2. h. Piutang Usaha dan Piutang Non-Usaha**

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. f. Financial Instruments (Continued)**

**Offsetting of Financial Instruments**

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Company has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

A right to offset must be currently available rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency, or bankruptcy.

**2. g. Cash and Cash Equivalents**

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

**2. h. Trade and Non-Trade Receivables**

Trade receivables are amounts due from customers for services rendered in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. h. Piutang Usaha dan Piutang Non-  
Usaha (Lanjutan)**

Piutang non-usaha dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Perusahaan.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

**2. i. Persediaan**

Persediaan dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih.

Biaya perolehan persediaan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Penyisihan atas persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal laporan. Cadangan keusangan atau kerugian persediaan, ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

**2. j. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka**

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan metode garis lurus.

Uang muka adalah bagian dari kontrak karena dibayar atau diterima di muka untuk barang atau jasa. Uang muka dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. h. Trade and Non-Trade receivables  
(Continued)**

Non-trade receivables from related parties are receivables balance reflecting loan given to related parties of the Company.

Trade and non-trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

**2. i. Inventories**

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value (NRV).

Cost of inventories is determined using the weighted average method.

The allowance for the obsolete inventories is determined using the periodic review on the condition of the inventory on the reporting date. Allowance for inventory obsolescence/losses is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable value.

**2. j. Prepaid Expenses and Advances**

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

Advances is part of contractually due that is paid or received in advance for goods or services. Advances are recorded as asset on the statement of financial position.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. k. Aset Tetap**

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal aset tetap kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	<b>Tahun/ Years</b>	
Bangunan dan Lapangan	20	<i>Building and Field</i>
Bangunan Gedung	30 - 40	<i>Building</i>
Alat Bantu Navigasi	10 - 15	<i>Navigational - Aids Equipment</i>
Alat-alat Kantor	5 - 10	<i>Office Equipment</i>
Instalasi dan Jaringan	5 - 15	<i>Installation and Network</i>
Alat Pengangkutan	5	<i>Transport Equipment</i>

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. k. Fixed Assets**

*Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.*

*When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.*

*After initial recognition, fixed assets except land are carried at its cost less any accumulated depreciation and accumulated impairment losses.*

*Depreciation of fixed assets start when it is available for use and computed using the straight-line method, based on the estimated useful lives of the related assets, as follows:*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. k. Aset Tetap (Lanjutan)**

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Konstruksi" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis, dan disesuaikan secara prospektif jika terjadi perubahan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. k. Fixed Assets (Continued)**

*Self-constructed fixed assets are presented as part of the fixed assets under "Asset Under Construction" and are stated at its cost. All cost incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.*

*The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.*

*The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.*

*At the end of each reporting period, the Company makes a regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions, and adjusted prospectively if appropriate.*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

<b>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)</b>	<b>2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)</b>
<p><b>2. I. Pajak Penghasilan Kini dan Tanggihan</b></p> <p>Pajak Kini</p> <p>Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Perusahaan untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.</p> <p>Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan profesional pajak dalam Perusahaan yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut.</p> <p>Beban pajak kini merupakan perhitungan kewajiban pajak penghasilan badan Perusahaan pada satu tahun fiskal sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dengan memperhitungkan (a) penghasilan neto komersial, (b) penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, (c) penyesuaian fiskal positif dan negatif, dan (d) pengurangan penghasilan neto.</p>	<p><b>2. I. Current and Deferred Income Tax</b></p> <p><i>Current Tax</i></p> <p><i>The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Company's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.</i></p> <p><i>A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Company supported by previous experience in respect of such activities.</i></p> <p><i>Current tax expense is the calculation of corporate income tax liability in a fiscal year in accordance taxation laws in force in Indonesia, taking into account (a) the commercial net income, (b) income subject to income tax. final and that does not include tax object, (c) positive and negative fiscal adjustment, and (d) reduction of net income.</i></p>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)	AKUNTANSI	2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
2. I. Pajak Penghasilan Tangguhan (Lanjutan)	Kini dan	2. I. Current and Deferred Income Tax (Continued)
Pajak Tangguhan		Deferred Tax
<p>Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.</p>		<p><i>Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized.</i></p>
<p>Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.</p>		<p><i>Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.</i></p>
<p>Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.</p>		<p><i>The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.</i></p>
<p>Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.</p>		<p><i>The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.</i></p>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. I. Pajak Penghasilan Kini dan  
Tanggungan (Lanjutan)**

Pajak kini dan pajak tanggungan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi, atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan PPh final, tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak dan semua beban terkait dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan.

Penghasilan (beban) pajak penghasilan merupakan jumlah agregat (i) pajak kini dan (ii) pajak tanggungan yang diperhitungkan dalam laporan laba - rugi komprehensif. Akun ini disajikan dengan merinci unsur-unsur beban pajak kini dan penghasilan (beban) pajak tanggungan.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP), atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Aset dan liabilitas pajak tanggungan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tanggungan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. I. Current and Deferred Income Tax  
(Continued)**

*Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination, in the case of a business combination.*

*In accordance with the tax laws, income subject to final income tax are no longer reported as taxable income and all expenses relating to income subject to final income tax can not be deducted.*

*Other income (expense) income tax is the aggregate amount of (i) Current tax and (ii) Deferred tax are taken into account in the profit - or loss. This account is presented by detailing the elements of current tax expense and other income (expense) tax deferred.*

*Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received (SKP), or if appealed against, when the results of the appeal is decided. Deferred tax assets and liabilities are offset in the statement of financial position, except for deferred tax assets and liabilities for the different entities, in accordance with the presentation of current tax assets and liabilities.*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. I. Pajak Penghasilan (Lanjutan)**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari hasil perhitungan pendapatan (beban) pajak tangguhan pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca), harus disajikan tersendiri sebagai aset "tidak lancar" (*non-current*) atau liabilitas jangka panjang, serta jumlahnya di-*offset* dan disajikan secara neto (Catatan 15).

**2. m. Liabilitas Imbalan Kerja**

**Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Pendek**

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek ketika jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah jasa tersebut diberikan.

**Imbalan Pasca Kerja**

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang didanai yang ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Pada bulan April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19: Employee Benefits. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19)*.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. I. Income Taxes (Continued)**

*Deferred tax assets and liabilities arising from the calculation of income (expense) deferred tax on the statement of financial position (balance sheet) should be presented separately as non-current assets or long-term liabilities, and amounts are offset and presented on a net basis (Note 15).*

**2. m. Employee Benefits Liabilities**

**Short term Employment Benefit Liabilities**

*The Company recognizes short-term employee benefits liability when services are rendered and the compensation for such services are to be paid within 12 months after such services are rendered.*

**Post-Employment Benefits**

*The Company has a defined benefit retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and a funded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA).*

*In April 2022, FASB-IAI (Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board) issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with SFAS 24: Employee Benefits which was adopted from IAS 19 Employee Benefits. The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19).*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. m. Imbalan Kerja (Lanjutan)**

**Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)**

Perusahaan telah menerapkan materi penjelasan tersebut dan karenanya mengubah kebijakan akuntansinya mengenai atribusi imbalan ke periode jasa yang sebelumnya diterapkan dalam laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Pada umumnya, program imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. m. Employee Benefits (Continued)**

**Post-Employment Benefits (Continued)**

The Company has adopted the said explanatory material and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied in the financial statements of the Company as of December 31, 2021 and for the year then ended.

A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. m. Imbalan Kerja (Lanjutan)**

**Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)**

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari Amendemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laporan laba rugi sebagai biaya jasa lalu.

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku (UU Cipta Kerja /"UUCK" No. 11/2020, sebelumnya UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003), yang merupakan kewajiban imbalan kerja. Jika imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari kewajiban imbalan pensiun.

**Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya**

Perusahaan juga memberikan imbalan pascakerja lainnya untuk pensiunannya berupa penghargaan purnabakti, penghargaan pengabdian dan kompensasi bagi karyawan dengan perjanjian waktu tertentu (PKWT). Imbalan ini biasanya diberikan kepada pekerja yang tetap bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. m. Employee Benefits (Continued)**

**Post-Employment Benefits (Continued)**

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit or loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognized immediately in a profit or loss as past service costs.

The Company is required to provide a minimum pension benefit as stipulated in the applicable Law (Omnibus Law No. 11/2020, previously Labor Law No. 13 Year 2003), which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on applicable Law are higher than those based on the existing pension plan, the difference is recorded as part of the pension benefits obligation.

**Other Long-Term Employee Benefits**

The Company also provide other post employment benefits to their retirees, which consist of pension award, services award and compensation for employee with specific time work agreements. The entitlement to these benefits is usually conditional on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. m. Imbalan Kerja (Lanjutan)**

**Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya  
(Lanjutan)**

Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini diakru selama masa kerja dengan menggunakan metode projected unit credit. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang memenuhi syarat.

**Kesejahteraan Karyawan**

Perusahaan melaksanakan program manfaat karyawan lainnya yang terdiri dari:

**Jasa Produksi**

Perusahaan dapat memberikan jasa produksi untuk karyawan berdasarkan laba Perusahaan dan ditetapkan berdasarkan kemampuan Perusahaan serta dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik modal.

Besaran jasa produksi ditetapkan berdasarkan produktivitas karyawan baik kantor pusat maupun cabang.

**Cuti Tahunan, Cuti Besar dan  
Tunjangan Cuti Tahunan**

Perusahaan memberikan kesempatan cuti tahunan kepada karyawan yang telah bekerja minimal 12 bulan, selama 12 hari atau lebih per tahun, sesuai ketentuan masa kerja dan cuti besar bagi mereka yang telah mencapai masa kerja tertentu yang diatur dalam PKB, yang diberikan selama 90 hari untuk setiap enam tahun. Untuk melengkapi pelaksanaan cuti tersebut, Perusahaan memberikan tunjangan cuti karyawan yang jumlahnya diatur dalam PKB.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. m. Employee Benefits (Continued)**

**Other Long-Term Employee Benefits  
(Continued)**

The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment using projected unit credit method. These obligations are valued annually by independent qualified actuaries.

**Employee Welfare**

The Company provides other employee benefit program consisting of:

**Production service**

The company provides production services for employees based on the company's profit and determined based on the company's ability and paid at the latest 1 (one) month after obtaining approval from the shareholder.

The amount of production services is determined based on the productivity of employees at both the head office and branch offices.

**Annual Leave, Long Leave and Annual  
Leave Allowance**

The company provides annual leave opportunities for employees who have worked at least 12 months, for 12 days or more per year, in accordance with the terms of service and major leave for those who have reached a certain period of service as stipulated in the CLA, which is given for 90 days for every six years. To complete the implementation of the leave, the Company provides employee leave allowances, the amount of which is regulated in the CLA.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. m. Imbalan Kerja (Lanjutan)**

**Pemeliharaan Kesehatan**

Perusahaan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dari baik itu rawat jalan atau rawat inap, Perusahaan mempunyai ketetapan dan kebijakan untuk karyawan dan keluarganya atas jaminan kesehatan tersebut (yang meliputi suami/istri dan maksimum tiga anak di bawah umur 21 tahun dan belum menikah).

**Asuransi Jiwa dan BPJS  
Ketenagakerjaan**

Perusahaan membiayai program asuransi jiwa bagi karyawan. Perusahaan bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi untuk mendukung program tersebut. Perusahaan juga mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan.

**2. n. Penggunaan Saldo Laba Berdasarkan  
Keputusan Rapat Pembahasan  
Bersama**

Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar keputusan/Risalah Rapat Pembahasan Bersama (RPB) direalisasikan sesuai dengan isi keputusan tersebut. Penggunaan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada pembagian tantiem, penyisihan saldo laba ke cadangan, dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK). Pembagian laba tersebut tidak diperlakukan sebagai beban melainkan sebagai distribusi / pengurang saldo laba.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. m. Employee Benefits (Continued)**

**Health Care**

The Company provides health care insurance from outpatient or inpatient care. The Company has provisions and policies for employees and their families for health insurance (which includes husband/wife and a maximum of three children under 21 years old and unmarried).

**Life Insurance and BPJS  
Ketenagakerjaan**

The Company finances a life insurance program for employees. The Company works with several insurance companies to support the program. The Company also includes its employees in the employment guarantee program at BPJS Ketenagakerjaan.

**2. n. The Use of Profit Balance Based on  
Joint Discussion Meeting Decisions**

The use of retained earnings is based on a decision/Minutes of the Joint Discussion Meeting (JDM) realized in accordance with the contents of the decision. Such uses include, but are not limited to, the distribution of bonuses, appropriation of retained earnings to general reserves, and Micro and Small Business Funding Program (UMK). The distribution of profits is not treated as an expense but rather as a distribution /deduction of the retained earnings.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. o. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Perusahaan memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
4. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. o. Revenue and Expense Recognition**

From January 1, 2020, the Company has applied SFAS 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. o. Pengakuan Pendapatan dan Beban  
(Lanjutan)**

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi  
dalam kondisi sebagai berikut:

- a Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan); atau
- b Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Perusahaan memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.
- c Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. o. Revenue and Expense Recognition  
(Continued)**

A performance obligation may be  
satisfied at the following:

- a A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.
- c Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognised once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognised once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. o. Pengakuan Pendapatan dan Beban  
(Lanjutan)**

**Pendapatan Layanan Navigasi  
Penerbangan:**

Layanan navigasi penerbangan merupakan aktivitas yang diatur secara ekonomi yang dikelola dengan ijin layanan lalu lintas udara Perusahaan. Layanan tersebut termasuk untuk layanan navigasi udara en-route dan terminal dan layanan navigasi udara untuk lalu lintas penerbangan. Masing-masing layanan tersebut memiliki pola transfer yang sama kepada pelanggan. Masing-masing pendapatan dari layanan penerbangan diakui sepanjang waktu karena pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan semua manfaat yang diberikan oleh Perusahaan yang bertepatan ketika layanan telah diberikan dan data produksi yang dihasilkan telah diverifikasi, meliputi register penerbangan, faktor berat dan faktor jarak telah diperoleh dan dihitung secara akurat.

Tarif jasa layanan navigasi penerbangan ditetapkan oleh regulator.

Pendapatan yang diakui tidak termasuk jumlah yang dipungut atas nama pihak ketiga atau pemerintah yang terdiri dari komponen biaya jasa navigasi (PJNP) yang menjadi hak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (KEMENHUB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Indonesia.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. o. Revenue and Expense Recognition  
(Continued)**

**Revenue from Air Navigation Services:**

Air navigation services are economically regulated activities which are governed by the Company's air traffic services licence. These include for both en-route and terminal air navigation services and air navigation services for overflying traffic. Each of these services has the same pattern of transfer to the customer. Revenue from each service is recognised over time (as the customer simultaneously receives and consumes all of the benefits provided by the company as the company performs) and this coincides when the services has been rendered and the resulting production data has been verified, namely flight registers, weight factors and distance factors have been obtained accurately.

Unit rate of charges for navigation services are those determined and approved by regulator.

Revenue excludes amounts collected on behalf of third parties or government which consist of navigation service charges (PJNP) component entitle to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia (KEMENHUB) and the Indonesian Agency for Meteorological, Climatological and Geophysics (BMKG).

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. o. Pengakuan Pendapatan dan Beban  
(Lanjutan)**

**Pendapatan Layanan Navigasi  
Penerbangan: (Lanjutan)**

Ketentuan pembayaran umum Perusahaan menetapkan periode pembayaran selama 14 hari untuk layanan navigasi penerbangan, tetapi ketentuan pembayaran yang lebih pendek diberlakukan jika keadaan pelanggan memungkinkan. Kebijakan kredit Perusahaan juga mensyaratkan pembayaran di muka atau jaminan yang memuaskan untuk diposkan dalam keadaan tertentu, terutama untuk penerbangan tidak terjadwal.

Pendapatan yang Ditangguhkan

Penerimaan kas dari pelanggan sehubungan dengan keseluruhan jasa di atas, yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan, dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan Diterima di Muka" dalam laporan posisi keuangan.

Penghasilan Bunga

Pendapatan bunga dari aset keuangan pada FVPL dimasukkan dalam keuntungan/ (kerugian) nilai wajar bersih atas aset tersebut. Pendapatan bunga dari aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan pada FVOCI yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari pendapatan lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. o. Revenue and Expense Recognition  
(Continued)**

**Revenue from Air Navigation Services:  
(Continued)**

The Company's general payment terms provide for payment periods of fourteen days for air navigation services, but shorter payment terms are imposed where customer circumstances warrant. The Company's credit policies also require payments in advance or satisfactory security to be posted under certain circumstances, particularly for those unscheduled flight.

Deferred Revenues

Cash received from customers related to all above services which have not yet fulfilled the criteria for revenue recognition are recorded as part of "Unearned Revenues" in the statement of financial position.

Interest income

Interest income from financial assets at FVPL is included in the net fair value gains/(losses) on these assets. Interest income on financial assets at amortised cost and financial assets at FVOCI calculated using the effective interest method is recognised in the statement of profit or loss as part of other income.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. o. Pengakuan Pendapatan dan Beban  
(Lanjutan)**

Penghasilan Bunga (Lanjutan)

Pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit. Untuk aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit, suku bunga efektif diterapkan ke nilai tercatat bersih dari aset keuangan (setelah dikurangi penyisihan kerugian).

Pendapatan bunga disajikan sebagai pendapatan keuangan yang diperoleh dari aset keuangan yang dimiliki untuk tujuan pengelolaan kas. Pendapatan bunga lainnya dimasukkan ke dalam pendapatan lain.

Pengakuan beban

Beban diakui bilamana jasa dan pembelian barang dari pihak lain telah diterima oleh Perusahaan berdasarkan perjanjian atau kontrak. Demikian pula, beban yang belum diketahui jumlahnya secara pasti sampai penutupan buku, dilakukan penghitungan taksasi oleh unit teknis, dan diakui sebagai biaya yang masih harus dibayar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. o. Revenue and Expense Recognition  
(Continued)**

Interest income (Continued)

Interest income is calculated by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset except for financial assets that subsequently become credit impaired. For credit-impaired financial assets the effective interest rate is applied to the net carrying amount of the financial asset (after deduction of the loss allowance).

Interest income is presented as finance income where it is earned from financial assets that are held for cash management purposes. Any other interest income is included in other income.

Expenses recognition

Expenses are recognized when services and purchases of goods from other parties have been received by the Company based on an agreement or contract. Likewise, unidentified value of the expenses up to the closing period, an estimate is made by the technical unit, and is recognized as accrued costs.



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. p. Sewa**

Pada tanggal permulaan, penyewa akan mengakui liabilitas untuk melakukan pembayaran sewa (yaitu, liabilitas sewa) dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasarinya selama masa sewa (yaitu, aset hak pakai atau ROU). Lessee mengakui secara terpisah beban bunga liabilitas sewa dan beban penyusutan aset ROU. Setelah terjadinya peristiwa tertentu (misalnya, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa masa depan yang disebabkan oleh perubahan indeks atau tarif yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut), lessee diharuskan untuk mengukur kembali liabilitas sewa dan mengakui pengukuran kembali sebagai penyesuaian pada aset ROU. Akuntansi lessor berdasarkan PSAK 73 secara substansial tidak berubah dibandingkan dengan akuntansi berdasarkan PSAK 30 dan interpretasi terkait.

Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal insepasi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. p. Lease**

At the commencement date, a lessee will recognize a liability to make lease payments (i.e., lease liability) and an asset representing the right to use the underlying asset during the lease term (i.e., right-of-use or ROU asset). Lessees are required to separately recognize the interest expense on the lease liability and the depreciation expense on the ROU asset. Upon occurrence of certain events (e.g., a change in the lease term, a change in the future lease payments resulting from a change in an index or rate used to determine those payments), lessees are required to remeasure the lease liability and recognize the remeasurement as an adjustment to the ROU asset. Lessor accounting under SFAS 73 is substantially unchanged in comparison to the accounting under SFAS 30 and related interpretations.

The Company as a lessee

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. p. Sewa (Lanjutan)**

Perusahaan sebagai penyewa (Lanjutan)

Perusahaan menyewa aset tetap tertentu. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk jangka waktu tetap 2 hingga 3 tahun tetapi mungkin memiliki perpanjangan.

Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non-sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri. Akan tetapi, untuk sewa *real estate* di mana Perusahaan merupakan penyewa, ia telah memilih untuk tidak memisahkan komponen sewa dan non-sewa dan sebagai gantinya memperhitungkannya sebagai komponen sewa tunggal.

Persyaratan sewa dinegosiasikan pada basis individu dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Perusahaan. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara kewajiban dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode. Aset hak pakai disusutkan selama masa manfaat aset yang lebih pendek dan masa sewa atas dasar garis lurus.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. p. Lease (Continued)**

The Company as a lessee (Continued)

The Company leases certain fixed asset. Rental contracts are typically made for fixed periods of 2 to 3 years but may have extension.

Contracts may contain both lease and non-lease components based on their relative stand-alone prices. However, for leases of real estate for which the Company is a lessee, it has elected not to separate lease and non-lease components and instead accounts for these as a single lease component.

Lease terms are negotiated on an individual bases and contain a wide range of different terms and conditions. The lease agreements do not impose any covenants other than the security for borrowing purposes.

Leases are recognized as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date at which the leased asset is available for use by the Company. Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The right-of use asset is depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. p. Sewa (Lanjutan)**

Perusahaan sebagai penyewa (Lanjutan)

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan pembelian opsi, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak pakai juga mengalami penurunan nilai. Lihat kebijakan akuntansi di bagian Penurunan Nilai aset non-keuangan.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa sertakan nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif, awalnya diukur menggunakan indeks atau tarif pada tanggal dimulainya
- jumlah yang diharapkan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai sisa
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk melaksanakannya opsi, dan
- pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. p. Lease (Continued)**

The Company as a lessee (Continued)

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also subject to impairment. Refer to the accounting policies in Impairment of non-financial assets section.

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable
- variable lease payment that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date
- amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees
- the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option, and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. p. Sewa (Lanjutan)**

Perusahaan sebagai penyewa (Lanjutan)

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, yang umumnya terjadi pada sewa dalam Perusahaan, suku bunga pinjaman tambahan lessee digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh lessee untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama ke aset hak guna dalam lingkungan ekonomi yang serupa dengan syarat, keamanan, dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Perusahaan:

- Jika memungkinkan, gunakan pembiayaan pihak ketiga terbaru yang diterima oleh penyewa individu sebagai permulaan poin, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima.
- Menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Perusahaan, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini, dan
- Membuat penyesuaian khusus untuk sewa, misalnya jangka waktu, negara, mata uang dan keamanan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. p. Lease (Continued)**

The Company as a lessee (Continued)

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Company, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Company:

- Where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received.
- Uses a build-up approach that starts with a risk free interest rate adjusted for credit risk for Leases held by the Subsidiary, which does not have recent third-party financing, and
- Makes adjustments specific to the lease, eg term, country, currency and security.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. p. Sewa (Lanjutan)**

Perusahaan sebagai penyewa (Lanjutan)

Perusahaan dihadapkan pada potensi kenaikan masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam kewajiban sewa sampai diberlakukan. Saat penyesuaian untuk sewa pembayaran berdasarkan indeks atau nilai berlaku, kewajiban sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak pakai.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan kepada laba atau rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode.

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal kewajiban sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- biaya langsung awal, dan
- biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan selama masa manfaat aset yang lebih pendek dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Perusahaan cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. p. Lease (Continued)**

The Company as a lessee (Continued)

The Company is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- the amount of the initial measurement of lease liability;
- any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;
- any initial direct costs, and
- restoration costs.

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Company is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying assets's useful life.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. p. Sewa (Lanjutan)**

Perusahaan sebagai penyewa (Lanjutan)

Pembayaran yang terkait dengan sewa guna usaha jangka pendek dan sewa guna aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari Peralatan dan perabot kantor kecil.

Opsi Perpanjangan dan Penghentian

Opsi perpanjangan dan penghentian termasuk dalam sejumlah properti dan peralatan sewa Perusahaan. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan penghentian yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan dan bukan oleh lessor yang bersangkutan.

Perusahaan sebagai Lessor

Sewa di mana Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengannya kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan di laporan laba rugi karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. p. Lease (Continued)**

The Company as a lessee (Continued)

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a term of 12 months or less. Low-value assets comprise Itequipment and small items of office furniture.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases of the Company. These terms are used to maximize operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Company and not by the respective lessor.

The Company as Lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income is accounted on a straightline basis over the lease term and is included in revenue in the statement of profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. q. Provisi**

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas (ketika pengaruh nilai waktu uang bersifat material).

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

**2. r. Modal Saham**

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. q. Provision**

*Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

*The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of time value of money is material).*

*When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.*

**2. r. Share Capital**

*Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PENTING (Lanjutan)**

**2. s. Kontinjensi**

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Namun pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika adanya kemungkinan arus masuk dari manfaat ekonomi.

**2. t. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca**

Peristiwa setelah tanggal neraca yang menyediakan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan jika material. Peristiwa setelah tanggal neraca yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
DAN PERTIMBANGAN**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direvisi secara berkala. Revisi terhadap estimasi akuntansi diakui pada periode saat estimasi tersebut direvisi dan pada periode mendatang yang dipengaruhinya. Estimasi dan asumsi yang memiliki risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan kewajiban dalam 12 (dua belas) bulan ke depan dibahas di bawah ini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

**2. s. Contingencies**

*Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.*

**2. t. Events After the Reporting Period**

*Post year-end events that provide additional information about the Company at the reporting date (adjusting events) are reflected in the financial statements when material. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.*

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
AND JUDGMENT**

*The preparation of the financial statements in conformity with SFAS requires management to make judgments, estimates and assumption that affect the application of accounting policies and amounts reported in the financial statements. Actual results may differ from these estimates.*

*Estimates and underlying assumptions are reviewed on an on going basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimates are revised and in the future period affected. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 (twelve) months are addressed below.*



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)**

**Pertimbangan**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, selain dari yang melibatkan estimasi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Pengakuan Pendapatan atas Jasa

Pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 mencakup penerapan penilaian dan estimasi signifikan dalam: (a) identifikasi kontrak pendapatan yang akan memenuhi persyaratan PSAK 72; (b) penilaian kewajiban kinerja dan probabilitas bahwa entitas akan mengumpulkan pertimbangan dari pembeli; (c) menentukan metode untuk memperkirakan pertimbangan variabel dan menilai kendala; dan (d) pengakuan pendapatan karena Perusahaan memenuhi kewajiban kinerja.

a) Keterjadian kontrak

Perusahaan membuat kontrak dengan pelanggan melalui pesanan pembelian jasa yang disetujui dan merupakan kontrak yang valid karena terdapat rincian spesifik seperti kuantitas, harga, syarat kontrak dan kewajiban masing-masing diidentifikasi dengan jelas. Selain itu, bagian dari proses penilaian Perusahaan sebelum pengakuan pendapatan adalah untuk menilai kemungkinan bahwa Perusahaan akan mengumpulkan imbalan yang menjadi haknya untuk ditukar dengan jasa yang diserahkan kepada pelanggan.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
AND JUDGMENT (Continued)**

**Judgments**

*In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments, apart from those involving estimations, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements.*

Timing of Satisfaction of Performance Obligations

*Revenue recognition under SFAS 72 involves the application of significant judgment and estimation in the: (a) identification of the contract for sale of goods that would meet the requirements of SFAS 72; (b) assessment of performance obligation and the probability that the entity will collect the consideration from the buyer; (c) determining method to estimate variable consideration and assessing the constraint; and (d) recognition of revenue as The Company satisfies the performance obligation.*

a) *Existence of a contract*

*The Company enters into a contract with customer through an approved purchase order which constitutes a valid contract as specific details such as the quantity, price, contract terms and their respective obligations are clearly identified. In addition, part of the assessment process of the Company before revenue recognition is to assess the probability that the Company will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the services sold that will be transferred to the customer.*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)**

**Pertimbangan (Lanjutan)**

Pengakuan Pendapatan atas Jasa (Lanjutan)

b) Identifikasi kewajiban kinerja

Perusahaan mengidentifikasi kewajiban kinerja dengan mempertimbangkan apakah barang atau jasa yang disepakati dalam kontrak merupakan barang atau jasa yang berbeda. Suatu barang atau jasa menjadi berbeda ketika pelanggan dapat memperoleh keuntungan dari barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia bagi pelanggan dan kewajiban Perusahaan untuk mentransfer barang atau jasa tersebut kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari kewajiban yang lain dalam kontrak.

Berdasarkan penilaian manajemen, jasa pelayanan navigasi penerbangan dan jasa pelayanan terminal yang diidentifikasi sebagai kewajiban kinerja.

c) Pengakuan pendapatan ketika Perusahaan memenuhi kewajiban kinerja

Perusahaan mengakui pendapatannya untuk semua aliran pendapatan pada satu waktu, saat jasa sudah diberikan dan data produksi yang dihasilkan telah diverifikasi.

Identifikasi apakah suatu kontrak mengandung sewa

Pada saat dimulainya kontrak, Perusahaan menilai apakah suatu kontrak adalah, atau berisi, sewa. Suatu kontrak adalah, atau berisi, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk suatu periode waktu sebagai imbalan untuk imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset teridentifikasi, Perusahaan menilai apakah:

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
AND JUDGMENT (Continued)**

**Judgments (Continued)**

Timing of Satisfaction of Performance Obligations (Continued)

b) Identifying performance obligation

The Company identifies performance obligations by considering whether the promised goods or services in the contract are distinct goods or services. A good or service is distinct when the customer can benefit from the good or service on its own or together with other resources that are readily available to the customer and the Company's promise to transfer the good or service to the customer is separately identifiable from the other promises in the contract.

Based on the management assessment, flight navigation services and terminal navigation services are identified as performance obligations.

c) Recognition of revenue as the Company satisfies the performance obligation

The Company recognizes its revenue for all revenue streams at a point in time, when services are already rendered and the resulting production data has been verified.

Identifying whether a contract contains a lease

At inception of a contract, the Company assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether:

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)**

**Pertimbangan (Lanjutan)**

Identifikasi apakah suatu kontrak mengandung sewa (Lanjutan)

- 1) Kontrak tersebut melibatkan penggunaan aset yang diidentifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan harus berbeda secara fisik atau mewakili secara substansial semua kapasitas aset yang secara fisik berbeda. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- 2) Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- 3) Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset. Perusahaan memiliki hak ini jika memiliki hak pengambilan keputusan yang paling tinggi untuk mengubah cara dan tujuan penggunaan aset. Dalam kasus yang jarang terjadi di mana keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset jika salah satu dari berikut:
  - Perusahaan berhak untuk mengoperasikan aset; atau
  - Perusahaan menetapkan aset dengan cara yang menentukan bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut akan digunakan.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
AND JUDGMENT (Continued)**

**Judgments (Continued)**

Identifying whether a contract contains a lease (Continued)

- 1) *The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represents substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has a substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- 2) *The Company has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- 3) *The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In rare cases where the decision about how and for what purpose the asset is used is predetermined, the Company has the right to direct the use of the asset if either:*
  - *The Company has the right to operate the asset; or*
  - *The Company designated the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)**

**Pertimbangan (Lanjutan)**

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Perusahaan beroperasi. Perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya, antara lain, mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan, biaya dan pendanaan, dan mata uang di mana penerimaan dari aktivitas operasi biasanya dipakai.

Berdasarkan substansi ekonomi yang mendasari keadaan yang relevan terhadap Perusahaan, mata uang fungsional yang telah ditentukan adalah Rupiah.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Situasi dan asumsi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
AND JUDGMENT (Continued)**

**Judgments (Continued)**

Functional Currency

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. The Company considers some factors in determining its functional currency, among others, the currency that mainly influences the revenue, cost and financing activities, and the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Company, the functional currency has been determined to be Rupiah.

**Estimates and Assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company bases its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)**

Penilaian Ekspektasi Kerugian Kredit (ECL)  
pada Piutang Dagang

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam penghitungan ECL, awalnya menggunakan matriks provisi berdasarkan tarif *default* historis untuk piutang dagang. Matriks provisi menentukan tingkat provisi tergantung pada jumlah hari piutang usaha telah lewat jatuh tempo. Perusahaan juga menggunakan pengelompokan yang tepat jika historis pengalaman kerugian kredit menunjukkan pola kerugian yang berbeda secara signifikan untuk segmen pelanggan yang berbeda. Perusahaan kemudian menyesuaikan historis pengalaman kerugian kredit dengan informasi berwawasan ke depan berdasarkan data yang dapat diobservasi saat ini yang mempengaruhi setiap segmen pelanggan untuk mencerminkan pengaruh kondisi ekonomi saat ini dan yang diperkirakan.

Perusahaan menyesuaikan tarif *default* historis ke tarif *default* berwawasan ke depan dengan menentukan faktor ekonomi terkait yang memengaruhi setiap segmen pelanggan. Perusahaan secara teratur meninjau metodologi dan asumsi yang digunakan untuk memperkirakan ECL untuk mengurangi perbedaan antara estimasi dan pengalaman kerugian kredit yang sebenarnya.

Penentuan hubungan antara tingkat gagal bayar historis dan kondisi ekonomi yang diperkirakan merupakan estimasi akuntansi yang signifikan. Oleh karena itu, ketentuan ECL pada piutang usaha sensitif terhadap perubahan asumsi tentang prakiraan kondisi ekonomi.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
AND JUDGMENT (Continued)**

**Estimates and Assumptions (Continued)**

Assessment for Estimated Credit Loss (ECL)  
on Trade Receivables

The Company, applying the simplified approach in the computation of ECL, initially uses a provision matrix based on historical default rates for trade receivables. The provision matrix specifies provision rates depending on the number of days that a trade receivable is past due. The Company also uses appropriate grouping if its historical credit loss experience showed significantly different loss patterns for different customer segments. The Company then adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information on the basis of current observable data affecting each customer segment to reflect the effects of current and forecasted economic conditions.

The Company adjusts historical default rates to forward-looking default rate by determining the closely related economic factor affecting each customer segment. The Company regularly reviews the methodology and assumptions used for estimating ECL to reduce any differences between estimates and actual credit loss experience.

The determination of the relationship between historical default rates and forecasted economic conditions is a significant accounting estimate. Accordingly, the provision for ECL on trade receivables is sensitive to changes in assumptions about forecasted economic conditions.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)**

Penilaian ECL atas Aset Keuangan Lainnya  
pada Biaya Amortisasi

Perusahaan menentukan penyisihan ECL menggunakan pendekatan umum berdasarkan estimasi tertimbang probabilitas dari nilai sekarang dari semua kekurangan kas selama perkiraan umur aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi. ECL diberikan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh kemungkinan peristiwa gagal bayar dalam 12 bulan ke depan kecuali ada peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal di mana dalam hal ini ECL diberikan berdasarkan ECL seumur hidup.

Ketika menentukan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan, Perusahaan mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya dan yang relevan untuk instrumen keuangan tertentu yang sedang dinilai seperti, tetapi tidak terbatas pada, faktor-faktor berikut:

- Penurunan peringkat kredit eksternal dan internal aktual atau yang diharapkan;
- Perubahan merugikan yang ada atau yang diperkirakan terjadi dalam bisnis, keuangan atau kondisi ekonomi; dan
- Perubahan merugikan signifikan yang aktual atau yang diharapkan dalam hasil operasi peminjam.

Perusahaan mempertimbangkan *rebuttable presumption* bahwa aset keuangan yang telah lewat lebih dari 330 hari sebagai titik terakhir di mana ECL seumur hidup harus diakui kecuali dapat menunjukkan bahwa hal ini tidak mewakili risiko yang signifikan dalam risiko kredit seperti ketika non-pembayaran adalah administrasi. pengawasan daripada akibat kesulitan keuangan peminjam.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
AND JUDGMENT (Continued)**

**Estimates and Assumptions (Continued)**

Assessment for ECL on Other Financial  
Assets at Amortized Cost

The Company determines the allowance for ECL using general approach based on the probability weighted estimate of the present value of all cash shortfalls over the expected life of financial assets at amortized cost. ECL is provided for credit losses that result from possible default events within the next 12-months unless there has been a significant increase in credit risk since initial recognition in which case ECL is provided based on lifetime ECL.

When determining if there has been a significant increase in credit risk, the Company considers reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort and that is relevant for the particular financial instrument being assessed such as, but not limited to, the following factors:

- Actual or expected external and internal credit rating downgrade;
- Existing or forecasted adverse changes in business, financial or economic conditions; and
- Actual or expected significant adverse changes in the operating results of the borrower.

The Company considers *rebuttable presumption* that financial assets that are more than 330 days past due to be the latest point at which lifetime ECL should be recognized unless it can demonstrate that this does not represent a significant risk in credit risk such as when non-payment was an administrative oversight rather than resulting from financial difficulty of the borrower.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)**

Perusahaan telah menilai bahwa *ECL* atas aset keuangan lainnya kas di bank dan setara kas pada biaya perolehan diamortisasi tidak material karena transaksi yang berkaitan dengan aset keuangan ini dilakukan oleh Perusahaan hanya dengan bank dan perusahaan terkemuka dengan reputasi kredit yang baik dan risiko gagal bayar yang relatif rendah. Oleh karena itu, tidak ada penyisihan untuk *ECL* atas aset keuangan lainnya sebesar biaya perolehan diamortisasi yang diakui pada tahun 2022. Namun, Perusahaan telah menetapkan bahwa ia memiliki pemulihan atas *ECL* yang diberikan untuk piutang lainnya dengan biaya perolehan diamortisasi pada tahun 2022.

**Penentuan Jangka Waktu Sewa**

Perusahaan menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika secara wajar dipastikan akan dilaksanakan, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk mengakhiri sewa, jika cukup dipastikan untuk tidak dilakukan.

**Manfaat Karyawan dan Pensiun**

Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang tepat dan kenaikan gaji di masa depan pada setiap akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini estimasi arus kas masa depan diharapkan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai.

Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah dalam mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang mendekati ketentuan kewajiban pensiun yang bersangkutan.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
AND JUDGMENT (Continued)**

**Estimates and Assumptions (Continued)**

The Company has assessed that *ECL* over other financial assets, cash in banks and cash equivalents at amortized cost, is immaterial because transactions related to these financial assets are carried out by the Company only with reputable banks and companies with good credit reputations and relatively low default risk. Therefore, there is no provision for *ECL* for other financial assets at the amortized cost recognized in 2022. However, the Company has determined that it has recoveries from *ECL* for other receivables at amortized cost in 2022.

**Determination of Lease Term**

The Company determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

**Pension and Employees' Benefits**

The Company determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations.

In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)**

**Manfaat Karyawan dan Pensiun (Lanjutan)**

Untuk tingkat kenaikan gaji di masa depan, Perusahaan mengumpulkan semua data historis yang berkaitan dengan perubahan gaji pokok dan menyesuaikan untuk rencana bisnis masa depan.

Beban dari program pensiun iuran pasti dan nilai kini dari kewajiban pensiun Perusahaan dihitung berdasarkan penilaian aktuaris dengan menggunakan asumsi-asumsi tersebut diantaranya tingkat diskonto, tingkat pengembalian dana yang diharapkan, tingkat kenaikan kompensasi dan tingkat kematian. Kewajiban iuran pasti sangat sensitif terhadap perubahan asumsi. Nilai tercatat liabilitas telah diungkapkan dalam Catatan 16.

Estimasi Nilai Persediaan Yang Dapat Direalisasikan

Dalam menentukan nilai realisasi bersih (NRV) persediaan, Perusahaan mempertimbangkan persediaan usang, kerusakan, kerusakan fisik, atau penyebab lainnya untuk mengidentifikasi persediaan yang harus diturunkan ke NRV. Perusahaan menyesuaikan biaya persediaan ke jumlah terpulihkan pada tingkat yang dianggap cukup untuk mencerminkan penurunan pasar dalam nilai persediaan.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
AND JUDGMENT (Continued)**

**Estimates and Assumptions (Continued)**

**Pension and Employees' Benefits (Continued)**

For the rate of future salary increases, the Company collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

The cost of defined contribution pension plan and present value of the pension obligation are determined based actuarial valuation which makes use of various assumptions such as discount rates, expected rates of return on plan assets, rates of compensation increases and mortality rates. The defined contribution pension plan obligation is highly sensitive to changes in the assumptions. The carrying amount of the obligation is disclosed in Note 16.

Estimating Net Realizable Value Of Inventories

In determining the net realizable value (NRV) of inventories, the Company considers inventory obsolescence, damages, physical deterioration, or other causes to identify inventories which are to be written down to NRV. The Company adjusts the cost of inventories to recoverable amount at a level considered adequate to reflect market decline in the value of the inventories.



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)**

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Perusahaan mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perusahaan terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Perusahaan mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 40 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
AND JUDGMENT (Continued)**

**Estimates and Assumptions (Continued)**

Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The Company estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected market behavior. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Company's assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each of ending financial period and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The Company estimates the useful lives of fixed assets between 5 and 40 years. This is the age that is generally expected in the industry in which the Company does business. Changes in the level of usage and technological development can affect the economic useful life and the residual value of assets, and therefore future depreciation costs may be revised.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)**

Penurunan Nilai atas Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan dan amortisasi yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 10.

Penentuan Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Manajemen menggunakan teknik penilaian, termasuk model diskonto arus kas dalam mengukur nilai wajar dari instrumen keuangan dimana penawaran pasar aktif tidak tersedia.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
AND JUDGMENT (Continued)**

**Estimates and Assumptions (Continued)**

Impairment of Fixed Assets

The useful life of each item of the Company's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation and amortization expense, respectively, and decrease in the carrying values of these assets.

The carrying values of fixed assets are disclosed in Notes 10.

Determining Fair Value of Financial Instruments

Management uses valuation techniques, including the discounted cash flow model in measuring the fair value of financial instruments where active market quotes are not available.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)**

Penentuan Nilai Wajar atas Instrumen  
Keuangan

Dalam menerapkan teknik penilaian, Manajemen memanfaatkan input pasar semaksimal mungkin, dan menggunakan estimasi dan asumsi, yang sejauh mungkin, sesuai dengan data yang dapat diobservasi oleh pelaku pasar akan digunakan di dalam penentuan harga instrumen. Dalam hal data yang berlaku tidak dapat dicermati, maka manajemen akan menggunakan estimasi terbaik dimana asumsi akan digunakan oleh pelaku pasar. Perkiraan ini mungkin berbeda dengan harga sebenarnya yang akan dicapai dalam transaksi wajar pada tanggal pelaporan.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Penentuan provisi untuk pajak penghasilan badan memerlukan pertimbangan yang signifikan dari manajemen. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Perusahaan mengakui liabilitas atas masalah pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak penghasilan badan akan terutang. Jika hasil pajak final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dibuat.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
AND JUDGMENT (Continued)**

**Estimates and Assumptions (Continued)**

Determining Fair Value of Financial  
Instruments

In applying the valuation techniques, Management makes maximum use of market inputs, and uses estimates and assumptions that are, as far as possible, consistent with observable data that market participants would use in pricing the instrument. Where applicable data is not observable, management uses its best estimate about the assumptions that market participants would make. These estimates may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

Income Taxes

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Determining provision for corporate income tax requires significant judgment by management. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amount that are initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
DAN PERTIMBANGAN (Lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)**

Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan

Perusahaan melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai aset tersebut sebesar mungkin yang tidak dapat direalisasikan, dimana ketersediaan penghasilan kena pajak memungkinkan untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Perusahaan atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dikurangkan berdasarkan tingkat dan waktu dari taksiran penghasilan kena pajak untuk periode pelaporan berikutnya. Estimasi tersebut didasarkan pada pencapaian Perusahaan di masa lalu dan ekspektasi masa depan terhadap pendapatan dan beban, serta dengan strategi perencanaan pajak di masa depan. Namun tidak ada kepastian bahwa Perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Provisi dan Kontijensi

Perusahaan, dalam kegiatan usaha normal, menjalankan sesuai ketentuan untuk kewajiban hukum maupun konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan pada ketentuan dan kontinjensi. Dalam pengakuan dan pengukuran ketentuan, manajemen mengambil pertimbangan risiko dan ketidakpastian.

Perusahaan tidak mengakui provisi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
AND JUDGMENT (Continued)**

**Estimates and Assumptions (Continued)**

Realization of Deferred Tax Assets

The Company conducted a review of the carrying amount of deferred tax assets at each end of reporting period and reduce the value of such assets by as much as possible which cannot be realized, where the availability of taxable income allows to use all or part of the deferred tax assets. The Company's review on the recognition of deferred tax assets for deductible temporary difference can be deductible based on the level and timing from the estimated taxable income for the next reporting period. The estimation is based on the achievement of the Company in the past and future expectation toward income and expenses, as well as with the tax planning strategies in the future. But there is no certainty that the Company can generate sufficient taxable income to allow to use part or all of these deferred tax assets.

Provisions and Contingencies

The Company, in the ordinary course of business, sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties into account.

The Company has not recognized any provision as at December 31, 2022 and 2021.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. KAS DAN SETARA KAS**

Rincian saldo kas dan setara kas terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kas	232.053.018	234.129.912
Bank		
Rupiah	37.496.029.001	41.588.056.240
Dolar Amerika Serikat (2022: USD14.113.176,36 dan 2021: USD5.293.719,00)	<u>220.052.606.825</u>	<u>75.536.076.696</u>
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>257.548.635.826</u></b>	<b><u>117.124.132.936</u></b>
Deposito Berjangka		
Rupiah	1.354.000.000.000	904.000.000.000
Dolar Amerika Serikat (2022: Nihil dan 2021: USD5.000.000,00)	<u>--</u>	<u>71.345.000.000</u>
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>1.354.000.000.000</u></b>	<b><u>975.345.000.000</u></b>
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b><u>1.611.780.688.844</u></b>	<b><u>1.092.703.262.848</u></b>

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

Balance of cash and cash equivalents consist of:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cash on Hand		
Cash in Banks		
Rupiah		
United States Dollar (2022: USD14,113,176.36 and 2021: USD5,293,719.00)	<u>220.052.606.825</u>	<u>75.536.076.696</u>
<b>Sub Total</b>	<b><u>257.548.635.826</u></b>	<b><u>117.124.132.936</u></b>
Time Deposits		
Rupiah		
United States Dollar (2022: Nil and 2021: USD5,000,000.00)	<u>--</u>	<u>71.345.000.000</u>
<b>Sub Total</b>	<b><u>1.354.000.000.000</u></b>	<b><u>975.345.000.000</u></b>
<b>Total Cash and Cash Equivalents</b>	<b><u>1.611.780.688.844</u></b>	<b><u>1.092.703.262.848</u></b>

Rincian saldo bank adalah sebagai berikut:

Details of the bank accounts balance are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
<b>Pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.363.902.983	11.995.084.505	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.473.769.531	10.103.458.018	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.350.434.507	19.485.724.892	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri)	<u>3.307.921.980</u>	<u>3.788.825</u>	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank Syariah Mandiri)
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>37.496.029.001</u></b>	<b><u>41.588.056.240</u></b>	<b>Sub Total</b>
<b>Dolar Amerika Serikat</b>			<b>United States Dollar</b>
<b>Pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2022: USD10.241.042,94 dan 2021: USD4.074.531,00)	159.678.341.520	58.139.482.125	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2022: USD10,241,042.94 and 2021: USD4,074,531.00)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2022: USD2.019.883,91 dan 2021: USD1.126.807,00)	31.494.029.925	16.078.406.800	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2022: USD2,019,883.91 and 2021: USD1,126,807.00)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2022: USD1.852.249,51 dan 2021: USD92.381,00)	<u>28.880.235.380</u>	<u>1.318.187.771</u>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2022: USD1,852,249.51 and 2021: USD92,381.00)
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>220.052.606.825</u></b>	<b><u>75.536.076.696</u></b>	<b>Sub Total</b>
<b>Jumlah</b>	<b><u>257.548.635.826</u></b>	<b><u>117.124.132.936</u></b>	<b>Total</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)**

Rincian saldo deposito adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Rupiah</b>		
<b>Pihak Berelasi</b>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	519.000.000.000	399.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	380.000.000.000	330.000.000.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri)	255.000.000.000	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	<u>200.000.000.000</u>	<u>175.000.000.000</u>
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>1.354.000.000.000</u></b>	<b><u>904.000.000.000</u></b>
<b>Dolar Amerika Serikat</b>		
<b>Pihak Berelasi</b>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (31 Desember 2022 dan 2021: 2022: Nihil dan 2021: USD5.000.000,00)	<u>--</u>	<u>71.345.000.000</u>
<b>Jumlah Deposito</b>	<b><u>1.354.000.000.000</u></b>	<b><u>975.345.000.000</u></b>

Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas pada bank dan deposito bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Rupiah	2,65% - 5,06%	2,50% - 3,25%
Dolar Amerika Serikat	--	0,20%
Jatuh Tempo	1 Bulan/Month	1 Bulan/Month

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan dan dibatasi penggunaannya.

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS  
(Continued)**

Details of time deposits accounts are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Rupiah</b>		
<b>Related Parties</b>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank Syariah Mandiri)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
<b>Sub Total</b>		
<b>United States Dollar</b>		
<b>Related Parties</b>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (December 31, 2022 and 2021: 2022: Nil and 2021: USD5,000,000.00)		
<b>Total Deposits</b>		

Contractual interest rates on cash in banks and short-term bank deposits are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Rupiah	2,65% - 5,06%	2,50% - 3,25%
Dolar Amerika Serikat	--	0,20%
Jatuh Tempo	1 Bulan/Month	1 Bulan/Month

As of December 31, 2022 and 2021, there is no balance of cash and cash equivalents which is pledged as collateral and restricted in use.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PIUTANG USAHA**

Piutang usaha merupakan tagihan yang telah difakturkan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian per debitur sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Pihak Ketiga</b>		
<b><u>Rupiah</u></b>		
PT Lion Mentari Airlines	153.558.688.550	250.749.465.064
PT Batik Air Indonesia	123.594.454.062	246.813.062.604
PT Indonesia Airasia	63.904.433.418	52.930.931.676
PT Super Air Jet	26.814.666.148	3.063.770.119
PT Sriwijaya Air	23.855.230.045	3.198.968.482
PT Wings Abadi	20.300.742.774	45.680.012.406
PT ASI Pudjiastuti Aviation	18.333.867.165	9.040.248.059
Saudi Arabian Airlines	14.969.147.716	764.057.275
Kalstar Aviation	10.274.245.068	5.940.404.729
PT Trigana Air	9.401.579.688	9.863.645.726
Travel Express	5.779.868.972	5.779.868.972
Malindo Airways Sdn. Bhd	5.661.415.574	5.072.925.498
Qatar Airways	5.266.672.267	4.609.708.114
Lain-lain (Masing-masing Dibawah Rp5.000.000.000)	83.160.215.310	61.345.413.669
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>564.875.226.757</u></b>	<b><u>704.852.482.393</u></b>
<b><u>Dolar Amerika Serikat</u></b>		
Air Asia X Bhd	25.507.920.596	27.610.610.742
Singapore Airlines	18.800.829.391	11.191.655.427
Qantas Airways Ltd.	9.211.475.750	4.971.892.992
Cathay Pacific Airways Limited	9.081.979.825	3.849.713.758
Malaysia Airlines Berhad	7.206.018.211	7.253.442.223
Lain-lain (Masing-masing Dibawah Rp5.000.000.000)	81.561.067.048	48.953.095.468
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>151.369.290.821</u></b>	<b><u>103.830.410.610</u></b>
<b>Jumlah Pihak Ketiga</b>	<b><u>716.244.517.578</u></b>	<b><u>808.682.893.003</u></b>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Pihak Ketiga	(144.400.001.784)	(550.403.789.274)
<b>Jumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga - Bersih</b>	<b><u>571.844.515.794</u></b>	<b><u>258.279.103.729</u></b>

**5. TRADE RECEIVABLES**

Trade receivables represent invoices that have been billed in the following details:

The details of the debtor are as follows:

<b>Third Parties</b>
<b><u>Rupiah</u></b>
PT Lion Mentari Airlines
PT Batik Air Indonesia
PT Indonesia Airasia
PT Super Air Jet
PT Sriwijaya Air
PT Wings Abadi
PT ASI Pudjiastuti Aviation
Saudi Arabian Airlines
Kalstar Aviation
PT Trigana Air
Travel Express
Malindo Airways Sdn. Bhd
Qatar Airways
Others (Each Less Than Rp5,000,000,000)
<b>Sub Total</b>
<b><u>United States Dollar</u></b>
Air Asia X Bhd
Singapore Airlines
Qantas Airways Ltd.
Cathay Pacific Airways Limited
Malaysia Airlines Berhad
Others (Each Less Than Rp5,000,000,000)
<b>Sub Total</b>
<b>Total Third Parties</b>
Allowance for Impairment Losses - Third Parties
<b>Total Third Parties Receivable - Net</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)**

Rincian per debitur: (Lanjutan)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Pihak Berelasi</b>		
<b><u>Rupiah</u></b>		
PT Citilink Indonesia	209.682.536.180	250.561.884.975
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	98.271.769.051	180.158.240.372
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	2.688.774.800	2.688.774.800
PT Garuda Angkasa	--	99.980.232
Merpati Pilot School	--	82.441.391
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>310.643.080.031</u></b>	<b><u>433.591.321.770</u></b>
<b><u>Dolar Amerika Serikat</u></b>		
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	2.021.710.174	1.802.449.533
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	155.422.303	10.808.044
PT Citilink Indonesia	34.498.392	184.037.980
Merpati Pilot School	--	46.957.065
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>2.211.630.869</u></b>	<b><u>2.044.252.622</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b><u>312.854.710.900</u></b>	<b><u>435.635.574.392</u></b>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Pihak Berelasi	(126.267.104.897)	(34.480.596.870)
<b>Jumlah Piutang Usaha Pihak Berelasi - Bersih</b>	<b><u>186.587.606.003</u></b>	<b><u>401.154.977.522</u></b>

**5. TRADE RECEIVABLES (Continued)**

The details of the debtor: (Continued)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Related Parties</b>		
<b><u>Rupiah</u></b>		
PT Citilink Indonesia		
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk		
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)		
PT Garuda Angkasa		
Merpati Pilot School		
<b>Sub Total</b>		
<b><u>United States Dollar</u></b>		
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)		
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk		
PT Citilink Indonesia		
Merpati Pilot School		
<b>Sub Total</b>		
<b>Total Related Parties</b>		
Allowance for Impairment Losses - Related Parties		
<b>Total Related Parties Receivable - Net</b>		



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)**

**Restrukturisasi Piutang**

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Sesuai Perjanjian Restrukturisasi Utang No.IG/PERJ/DF-4082/2021/NON-LEG dan No. PJJ.001/K/00/LPPNPI/KEU.07/II/2021 antara Perusahaan dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang berlaku efektif sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama untuk merestrukturisasi Utang melalui surat permohonan restrukturisasi utang No.GARUDA/JKTDF/20442/2020 pada tanggal 3 Agustus 2020, atas Utang per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp243.973.060.615 dan USD52,19 dengan jangka waktu 3 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Termin pembayaran dilakukan dengan Skema *Balloon Payment* dengan proporsi besaran per tahun yaitu, 1% sebelum akhir tahun 2021, 5% sebelum akhir tahun 2022, dan 94% akan dibayarkan sebelum akhir tahun 2023.

Berdasarkan Rencana Perdamaian atas Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tanggal 17 Juni 2022, nilai utang kepada Perusahaan yang direstrukturisasi adalah sebesar Rp326.390.831.027 yang akan jatuh tempo pada 22 tahun setelah tanggal Homologasi dengan bunga sebesar 0,1% per tahun yang dibayar tunai setiap setengah tahun.

**5. TRADE RECEIVABLES (Continued)**

**Receivables Restructuring**

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Based on the Debt Restructuring Agreement No.IG/PERJ/DF-4082/2021/NON-LEG and No.PJJ.001/K/00/LPPNPI/KEU.07/II/2021 between the Company and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk effective from January 29, 2021 to December 31, 2023, the Company has made a mutual agreement to restructure the debt by debt restructuring letter No.GARUDA/JKTDF/20442/2020 dated August 3, 2020, on debt as of December 31, 2020 amounting to Rp243,973,060,615 and USD52.19 with a period of 3 years until December 31, 2023. The payment term was made with the *Balloon Payment Scheme* with a proportion of the amount per year were 1% before the end of 2021, 5% before the end of 2022, and 94% will be paid before the end of 2023.

Based on the PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk's Composition Plan of Suspension of Debt Payment Obligation No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst dated June 17, 2022, the restructured debt to the Company amounted to Rp326,390,831,027 which will become due in 22 years after the date of Homologation with interest of 0.1% p.a, paid in cash per semester.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)**

**Restrukturisasi Piutang (Lanjutan)**

PT Citilink Indonesia

Sesuai Perjanjian Restrukturisasi Utang No. PJJ.014/K/00/LPPNPI/KEU.07/IV/2021 antara Perusahaan dan PT Citilink Indonesia yang berlaku efektif sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2022, Perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama untuk merestrukturisasi utang melalui surat permohonan restrukturisasi utang No.CITILINK/JKTDZQG/LTR-20029/0221 pada tanggal 11 Februari 2021, atas Utang per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp198.160.263.646 dan USD2.072,49 dengan jangka waktu 2 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Termin pembayaran dilakukan dengan Skema *Balloon Payment* dengan proporsi besaran per tahun yaitu, 40% pada tahun 2021, 60% pada tahun 2022.

PT NAM Air

Sesuai Perjanjian Restrukturisasi Utang No. PJJ.139/K/00/LPPNPI/KEU.11.02/XI/2021 dan No.055/DZ/NAMAIR/XII/2021 antara Perusahaan dan PT Nam Air pada tanggal 30 November 2021, Perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama untuk merestrukturisasi Utang melalui surat permohonan relaksasi pembayaran Utang No.281/EXT/DIR/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang disetujui melalui surat No.2113/K/00/LPPNPI/KEU.07/VI/2021 pada tanggal 30 Juni 2021, atas utang PT Nam Air per 31 Oktober 2021 sebesar Rp8.562.925.467 dengan jangka waktu 3 tahun sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024.

Termin pembayaran dilakukan dengan Skema *Balloon Payment* dengan proporsi besaran per tahun yaitu, 10% pada tahun pertama, 25% pada tahun kedua, dan 65% pada tahun ketiga. Untuk tiap-tiap termin pembayaran utang dikenakan bunga sebesar 8% dari nilai cicilan per tahun.

**5. TRADE RECEIVABLES (Continued)**

**Receivables Restructuring (Continued)**

PT Citilink Indonesia

Based on the Debt Restructuring Agreement No. PJJ.014/K/00/LPPNPI/KEU.07/IV/2021 between the Company and PT Citilink Indonesia effective from April 28, 2021 to December 31, 2022, the Company has made a mutual agreement to restructure the debt by debt restructuring letter No.CITILINK/JKTDZQG/LTR-20029/0221 dated February 11, 2021, on debt as of December 31, 2020 amounting to Rp198,160,263,646 and USD2,072.49 with a period of 2 years until December 31, 2022. The payment term was made with the *Balloon Payment Scheme* with a proportion of the amount per year were 40% of 2021, 60% of 2022.

PT NAM Air

Based on the Debt Restructuring Agreement No. PJJ.139/K/00/LPPNPI/KEU.11.02/XI/2021 and No.055/DZ/NAMAIR/XII/2021 between the Company and PT Nam Air dated November 30, 2021, the Company has made a mutual agreement to restructure the debt by debt payment relaxation letter No.281/EXT/DIR/VI/2021 dated June 14, 2021 approved by the letter No.2113/K/00/LPPNPI/KEU.07/VI/2021 on June 30, 2021, on PT Nam Air's debt as of October 31, 2021 amounting to Rp8,562,925,467 with a period of 3 years until October 30, 2024.

The payment term was made with the *Balloon Payment Scheme* with a proportion of the amount per year were 10% in the first year, 25% in the second year, and 65% in the third year. For each term of debt payment is subject to interest of 8% of the installment value per year.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)**

**Restrukturisasi Piutang (Lanjutan)**

PT Sriwijaya Air

Sesuai Perjanjian Restrukturisasi Utang No.PJJ.138/K/00/LPPNPI/KEU.11.02/XI/ 2021 dan No.242/PER-SJ/DIR/XII/2021 antara Perusahaan dan PT Sriwijaya Air pada tanggal 30 November 2021, Perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama untuk merestrukturisasi Utang melalui surat permohonan relaksasi pembayaran utang No.281/EXT/DIR/VI/2021 pada tanggal 14 Juni 2021 dan disetujui melalui surat No.2113/K/00/LPPNPI/KEU.07/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, atas Utang PT Sriwijaya Air per tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp41.736.206.618 dengan jangka waktu 3 tahun sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024. Untuk tiap-tiap termin pembayaran utang dikenakan bunga sebesar 8% dari nilai cicilan per tahun.

Tanggal 31 Oktober 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan No. 247/Pdt.SusPKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara PT Sriwijaya Air. Perusahaan telah memasukan tagihan kepada tim pengurus PKPU sementara PT Sriwijaya Air sebesar Rp53.460.516.089.

PT Indonesia AirAsia

Sesuai Perjanjian Restrukturisasi Utang No: PJJ.009/K/00/LPPNPI/KEU.11.02/VI/2022 dan No:IAA/LEG/5-2022/015 antara Perusahaan dengan PT Indonesia AirAsia tanggal 25 Mei 2022 yang berlaku efektif sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 24 Mei 2025, Perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama untuk merestrukturisasi utang PT Indonesia AirAsia kepada Perusahaan sebesar Rp50.153.790.813 yang akan dibayarkan dalam jangka 3 tahun dengan rincian sebagai berikut: 26% dari jumlah utang akan dibayarkan pada tahun pertama, 34% dari jumlah utang akan dibayarkan pada tahun kedua dan 40% dari jumlah utang akan dibayarkan pada tahun ketiga.

**5. TRADE RECEIVABLES (Continued)**

**Receivables Restructuring (Continued)**

PT Sriwijaya Air

Based on the Debt Restructuring Agreement No.PJJ.138/K/00/LPPNPI/KEU.11.02/XI/ 2021 and No.242/PER-SJ/DIR/XII/2021 between the Company and PT Sriwijaya Air dated November 30, 2021, the Company has made a mutual agreement to restructure the debt by debt payment relaxation No.281/EXT/DIR/VI/2021 dated June 14, 2021 approved by letter No.2113/K/00/LPPNPI/KEU.07/VI/2021 on June 30, 2021, on PT Sriwijaya Air's debt as of October 31, 2021 amounting to Rp41,736,206,618 with a period of 3 years until October 30, 2024. For each term of debt payment is subject to interest of 8% of the installment value per year.

On October 31, 2022, the Commercial Court at the Central Jakarta District Court issued a decision No. 247/Pdt.SusPKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst regarding the temporary Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) for PT Sriwijaya Air. The Company has submitted invoices to PKPU administrator for PT Sriwijaya Air amounting to Rp53,460,516,089.

PT Indonesia AirAsia

Based on the Debt Restructuring Agreement No: PJJ.009/K/00/LPPNPI/KEU.11.02/VI/2022 and No:IAA/LEG/5-2022/015 between the Company and PT Indonesia AirAsia dated May 25, 2022 which is effective from May 25, 2022 to May 24, 2025, the Company has made a mutual agreement to restructure the debt of PT Indonesia AirAsia to the Company amounting to Rp50,153,790,813 which will be paid within 3 years with the following details: 26% of total debt will be paid in the first year, 34% of total debt will be paid in the second year and 40% of the total debt will be paid in the third year.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)**

**Restrukturisasi Piutang (Lanjutan)**

PT Indonesia AirAsia

Untuk tiap-tiap termin pembayaran utang dikenakan bunga sebesar 2.5% dari nilai cicilan per tahun.

Malindo Airways Sdn Bhd

Sesuai Perjanjian Restrukturisasi Utang No: PJJ.115/KT/00/LPPNPI/KEU.07/X/2022 dan No: 009/OD-DZ/PKS/X/2022 antara Perusahaan dengan Malindo Airways Sdn Bhd tanggal 31 Oktober 2022 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama untuk merestrukturisasi utang Malindo Airways Sdn Bhd kepada Perusahaan sebesar Rp5.294.827.931 dan USD95.246,60 yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 3 tahun dengan pembayaran tiap bulan minimal sebesar Rp147.078.553,64 dan USD2.645,74.

PT Lion Mentari Airlines

Sesuai Perjanjian Restrukturisasi Utang No: PJJ.106/KT/00/LPPNPI/KEU.07/X/2022 dan No: 243/JT-DZ/PKS/X/2022 antara Perusahaan dengan PT Lion Mentari Airlines tanggal 31 Oktober 2022 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama untuk merestrukturisasi utang PT Lion Mentari Airlines kepada Perusahaan sebesar Rp226.151.686.487 yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 3 tahun dengan pembayaran tiap bulan minimal sebesar Rp6.281.991.291,31.

**5. TRADE RECEIVABLES (Continued)**

**Receivables Restructuring (Continued)**

PT Indonesia AirAsia

For each term of debt payment is subject to interest of 2,5% of the installment value per year.

Malindo Airways Sdn Bhd

Based on the Debt Restructuring Agreement No: PJJ.115/KT/00/LPPNPI/KEU.07/X/2022 and No: 009/OD-DZ/PKS/X/2022 between the Company and Malindo Airways Sdn Bhd dated October 31, 2022 which is effective from January 1, 2022 to December 31, 2024, the Company has made a mutual agreement to restructure the debt of Malindo Airways Sdn Bhd to the Company amounting to Rp5,294,827,931 and USD95,246.60 which will be paid within 3 years with monthly minimum payments of Rp147,078,553.64 and USD2,645.74.

PT Lion Mentari Airlines

Based on the Debt Restructuring Agreement No: PJJ.106/KT/00/LPPNPI/KEU.07/X/2022 and No: 243/JT-DZ/PKS/X/2022 between the Company and PT Lion Mentari Airlines dated October 31, 2022 which is effective from January 1, 2022 to December 31, 2024, the Company has made a mutual agreement to restructure the debt of PT Lion Mentari Airlines to the Company amounting to Rp226,151,686,487 which will be paid within 3 years with monthly minimum payment of Rp6,281,991,291.31

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)**

**Restrukturisasi Piutang (Lanjutan)**

PT Batik Air Indonesia

Sesuai Perjanjian Restrukturisasi Utang No: PJJ.104/KT/00/LPPNPI/KEU.07/X/2022 dan No: 166/ID-DZ/PKS/X/2022 antara Perusahaan dengan PT Batik Air Indonesia tanggal 31 Oktober 2022 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama untuk merestrukturisasi utang PT Batik Air Indonesia kepada Perusahaan sebesar Rp227.448.677.127 yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 3 tahun dengan pembayaran tiap bulan minimal sebesar Rp6.318.018.809,08.

PT Wings Abadi

Sesuai Perjanjian Restrukturisasi Utang No: PJJ.107/KT/00/LPPNPI/KEU.07/X/2022 dan No: 253/IW-DZ/PKS/X/2022 antara Perusahaan dengan PT Wings Abadi tanggal 31 Oktober 2022 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama untuk merestrukturisasi utang PT Wings Abadi kepada Perusahaan sebesar Rp40.935.947.517 yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 3 tahun dengan pembayaran tiap bulan minimal sebesar Rp1.137.109.653,25.

**5. TRADE RECEIVABLES (Continued)**

**Receivables Restructuring (Continued)**

PT Batik Air Indonesia

Based on the Debt Restructuring Agreement No: PJJ.104/KT/00/LPPNPI/KEU.07/X/2022 and No: 166/ID-DZ/PKS/X/2022 between the Company and PT Batik Air Indonesia dated October 31, 2022 which is effective from January 1, 2022 to December 31, 2024, the Company has made a mutual agreement to restructure the debt of PT Batik Air Indonesia to the Company amounting to Rp227,448,677,127 which will be paid within 3 years with monthly minimum payment of Rp6,318,018,809.08.

PT Wings Abadi

Based on the Debt Restructuring Agreement No: PJJ.107/KT/00/LPPNPI/KEU.07/X/2022 and No: 253/IW-DZ/PKS/X/2022 between the Company and PT Wings Abadi dated October 31, 2022 which is effective from January 1, 2022 to December 31, 2024, the Company has made a mutual agreement to restructure the debt of PT Wings Abadi to the Company amounting to Rp40,935,947,517 which will be paid within 3 years with monthly minimum payment of Rp1,137,109,653,25.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)**

**Restrukturisasi Piutang (Lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian-perjanjian diatas pada tanggal 31 Desember 2022 Perusahaan mengelompokkan piutang usaha sebagai berikut:

a. Bagian Lancar

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Pihak Ketiga</b>		
Piutang Usaha	716.244.517.578	808.682.893.003
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(144.400.001.784)	(550.403.789.274)
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>571.844.515.794</u></b>	<b><u>258.279.103.729</u></b>
<b>Pihak Berelasi</b>		
Piutang Usaha	312.854.710.900	435.635.574.392
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(126.267.104.897)	(34.480.596.870)
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>186.587.606.003</u></b>	<b><u>401.154.977.522</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b><u>758.432.121.797</u></b>	<b><u>659.434.081.251</u></b>

b. Bagian Jangka Panjang

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Pihak Ketiga</b>		
Piutang Usaha	191.513.794.529	42.280.438.407
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(39.051.505.818)	(6.675.120.691)
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>152.462.288.711</u></b>	<b><u>35.605.317.716</u></b>
<b>Pihak Berelasi</b>		
Piutang Usaha	319.312.084.852	211.609.793.830
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(267.156.363.473)	(70.623.571.169)
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>52.155.721.379</u></b>	<b><u>140.986.222.661</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b><u>204.618.010.090</u></b>	<b><u>176.591.540.377</u></b>

**5. TRADE RECEIVABLES (Continued)**

**Receivables Restructuring (Continued)**

Based on the above agreements as of December 31, 2022, the Company classifies trade receivables as follows:

a. Current Portion

<b>Third Parties</b>
Trade Receivables
Allowance for Impairment Losses
<b>Sub Total</b>
<b>Related Parties</b>
Trade Receivables
Allowance for Impairment Losses
<b>Sub Total</b>
<b>Total</b>

b. Long Term Portion

<b>Third Parties</b>
Trade Receivables
Allowance for Impairment Losses
<b>Sub Total</b>
<b>Related Parties</b>
Trade Receivables
Allowance for Impairment Losses
<b>Sub Total</b>
<b>Total</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)**

**Restrukturisasi Piutang (Lanjutan)**

**b. Bagian Jangka Panjang (Lanjutan)**

Rincian per debitur:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Pihak Ketiga</b>		
<b>Rupiah</b>		
PT Batik Air Indonesia	72.937.823.258	--
PT Lion Mentari Airlines	72.732.506.008	--
PT Sriwijaya Air	26.136.821.692	35.053.458.875
PT Wings Abadi	10.883.841.348	--
PT Nam Air	5.397.572.745	7.226.979.532
Malindo Airways Sdn, Bhd	1.879.748.695	--
PT Indonesia Air Asia	1.545.480.783	--
<b>Jumlah Pihak Ketiga</b>	<b>191.513.794.529</b>	<b>42.280.438.407</b>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Pihak Ketiga	(39.051.505.818)	(6.675.120.691)
<b>Jumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga Jangka Panjang - Bersih</b>	<b>152.462.288.711</b>	<b>35.605.317.716</b>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Pihak Berelasi</b>		
<b>Rupiah</b>		
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	319.301.283.026	211.609.049.274
<b>Jumlah Rupiah Pihak Berelasi Jangka Panjang</b>	<b>319.301.283.026</b>	<b>211.609.049.274</b>
<b>Dolar Amerika Serikat</b>		
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	10.801.826	744.556
<b>Jumlah Dolar Amerika Serikat Pihak Berelasi Jangka Panjang</b>	<b>10.801.826</b>	<b>744.556</b>
<b>Jumlah Pihak Berelasi</b>	<b>319.312.084.852</b>	<b>211.609.793.830</b>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Pihak Berelasi	(267.156.363.473)	(70.623.571.169)
<b>Jumlah Piutang Usaha Pihak Berelasi Jangka Panjang - Bersih</b>	<b>52.155.721.379</b>	<b>140.986.222.661</b>

**5. TRADE RECEIVABLES (Continued)**

**Receivables Restructuring (Continued)**

**b. Long Term Portion (Continued)**

The details of the debtor:

<b>Third Parties</b>
<b>Rupiah</b>
PT Batik Air Indonesia
PT Lion Mentari Airlines
PT Sriwijaya Air
PT Wings Abadi
PT Nam Air
Malindo Airways Sdn, Bhd
PT Indonesia Air Asia
<b>Total Third Parties</b>
Allowance for Impairment Losses - Third Parties
<b>Total Third Parties Long-Term Receivable - Net</b>
<b>Related Party</b>
<b>Rupiah</b>
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
<b>Total Rupiah - Related Party Long-Term</b>
<b>United States Dollar</b>
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
<b>Total United States Dollar - Related Party Long-Term</b>
<b>Total Related Party</b>
Allowance for Impairment Losses - Related Party
<b>Total Related Party Long-Term Receivable - Net</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)**

Rincian umur piutang usaha berdasarkan usia jatuh tempo piutang usaha, sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
1 - 30 Hari	325.770.579.614	232.374.660.333
>30 - 90 Hari	135.266.173.459	136.056.638.059
>90 - 180 Hari	27.565.358.449	150.440.340.915
>180 - 360 Hari	10.633.647.305	323.766.351.090
>360 Hari	1.040.689.349.032	655.570.709.235
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(576.874.975.972)	(662.183.078.004)
<b>Jumlah</b>	<b><u>963.050.131.887</u></b>	<b><u>836.025.621.628</u></b>

Mutasi pada saldo cadangan penurunan nilai piutang usaha sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Bagian Lancar</b>		
Saldo Awal	584.884.386.144	523.818.114.200
Pemulihan Cadangan Penurunan Nilai	(314.217.279.463)	--
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	--	61.066.271.944
<b>Saldo Akhir Bagian Lancar</b>	<b><u>270.667.106.681</u></b>	<b><u>584.884.386.144</u></b>
<b>Bagian - Jangka Panjang</b>		
Saldo Awal	77.298.691.860	--
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	228.909.177.431	77.298.691.860
<b>Saldo Akhir Bagian Jangka Panjang</b>	<b><u>306.207.869.291</u></b>	<b><u>77.298.691.860</u></b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b><u>576.874.975.972</u></b>	<b><u>662.183.078.004</u></b>

Titipan PNBK Kemenhub dan BMKG dalam saldo piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp278.227.285.517 dan Rp252.018.065.452 (Catatan 14).

Berdasarkan hasil penelaahan kolektibilitas akun piutang usaha pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai piutang usaha di atas adalah cukup.

**6. PENDAPATAN AKRUAL**

Pendapatan akrual merupakan tagihan yang belum difakturkan pada bulan Desember 2021 atas tagihan kepada PT Smart Cakrawala Aviation sebesar Rp71.366.548. Per tanggal 31 Desember 2022 saldo pendapatan akrual adalah nihil.

**5. TRADE RECEIVABLES (Continued)**

Details of the aging of trade receivables based on the maturity of trade receivables, are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
1 - 30 Days	325.770.579.614	232.374.660.333
>30 - 90 Days	135.266.173.459	136.056.638.059
>90 - 180 Days	27.565.358.449	150.440.340.915
>180 - 360 Days	10.633.647.305	323.766.351.090
>360 Days	1.040.689.349.032	655.570.709.235
Allowance for Impairment Losses	(576.874.975.972)	(662.183.078.004)
<b>Total</b>	<b><u>963.050.131.887</u></b>	<b><u>836.025.621.628</u></b>

Changes in the allowance for impairment losses on trade receivables is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Current Portion</b>		
Beginning Balance	584.884.386.144	523.818.114.200
Recovery for Impairment Losses	(314.217.279.463)	--
Provision for Impairment Losses	--	61.066.271.944
<b>Ending Balance - Short Term</b>	<b><u>270.667.106.681</u></b>	<b><u>584.884.386.144</u></b>
<b>Long-term - Portion</b>		
Beginning Balance	77.298.691.860	--
Allowance for Impairment Losses	228.909.177.431	77.298.691.860
<b>Ending Balance - Long Term</b>	<b><u>306.207.869.291</u></b>	<b><u>77.298.691.860</u></b>
<b>Ending Balance</b>	<b><u>576.874.975.972</u></b>	<b><u>662.183.078.004</u></b>

Deposits to PNBK Kemenhub and BMKG that were included in account receivable balance as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp278,227,285,517 and Rp252,018,065,452 respectively (Note 14).

Based on the review of collectibility of the trade receivables at end of the year, the management believes that the above allowance for impairment losses on receivables is sufficient.

**6. ACCRUED REVENUES**

Accrued revenues represents unbilled revenue on December 2021 of invoice to PT Smart Cakrawala Aviation amounting to Rp71,366,548. As of December 31, 2022 accrued revenues amounted to nil.



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Piutang Karyawan	199.156.558	114.544.659
Lainnya – Kepada :		
Pihak Ketiga	1.748.074.913	827.085.577
Pihak Berelasi	1.815.000	--
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.949.046.471</u></b>	<b><u>941.630.236</u></b>

**7. OTHER RECEIVABLES**

This account consists of:

Employee Receivables  
Others to:  
    Third Parties  
    Related Parties  
**Total**

**8. PERSEDIAAN**

Persediaan terutama terdiri dari suku cadang dan *consumable material* yang terkait dengan peralatan navigasi, komunikasi dan operasional lainnya. Rincian persediaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Peralatan Navigasi	16.795.342.820	17.784.885.471
Peralatan Pengamatan	14.195.984.536	13.331.151.857
Peralatan Komunikasi	11.247.660.024	13.709.846.706
Peralatan Mekanikal Elektrikal	86.400.000	86.400.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>42.325.387.380</u></b>	<b><u>44.912.284.034</u></b>

**8. INVENTORIES**

Inventories held mainly consist of spareparts, and consumable materials related to navigation, communication and other operational equipment. Details of inventories as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Navigation-Aids Equipment  
Surveillance Equipment  
Communication Equipment  
Mechanical Electrical  
Equipment  
**Total**

Persediaan Perusahaan tidak diasuransikan.

The Company's inventories are not covered by any insurance.

**9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Biaya Dibayar Dimuka</b>		
Asuransi	7.016.638.747	5.973.171.296
Sewa	6.706.400	150.000.001
Lain-lain	34.185.350	33.569.587
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>7.057.530.497</u></b>	<b><u>6.156.740.884</u></b>

**9. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES**

Prepaid Expenses  
Insurance  
Rent  
Others  
**Sub Total**

Pada tahun 2022, biaya asuransi dibayar di muka merupakan ANSP Liabilitas sebesar Rp3.672.750.000 dan Aset sebesar Rp2.332.750.000, asuransi purna jabatan direksi, dewan pengawas, dan komite audit sebesar Rp1.011.138.747.

In 2022, the prepaid insurance were ANSP Liabilities amounting to Rp3,672,750,000 and Assets amounting to Rp2,332,750,000, post retirement insurance for directors, supervisory boards and audit committees amounting to Rp1,011,138,747.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA (Lanjutan)**

Pada tahun 2021, biaya asuransi dibayar di muka merupakan ANSP Liabilitas sebesar Rp4.471.308.796, dan asuransi purna jabatan direksi, dewan pengawas, dan komite audit sebesar Rp1.501.862.500.

**9. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES (Continued)**

In 2021, the prepaid insurance were ANSP Liabilities amounting to Rp4,471,308,796, and post retirement insurance for directors, supervisory boards and audit committees amounting to Rp1,501,862,500.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
<b>Uang Muka Kantor Cabang</b>			<b>Advances Branch Office</b>
Umum	385.397.379	40.592.710	General
Pemeliharaan	6.205.000	12.309.500	Maintenance
Perlengkapan	2.339.400	7.003.500	Supplies
Utilitas	339.650	186.910	Utility
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>394.281.429</u></b>	<b><u>60.092.620</u></b>	<b>Sub Total</b>
<b>Jumlah Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka</b>	<b><u>7.451.811.926</u></b>	<b><u>6.216.833.504</u></b>	<b>Total Prepaid Expenses and Advances</b>

Saldo uang muka yang memiliki umur diatas 100 hari per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar nihil.

Advances balance that has an age of more than 100 days as of December 31, 2022 and 2021 amounts to nil.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. ASET TETAP**

Biaya perolehan aset tetap, akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta nilai buku aset tetap sebagai berikut:

**10. FIXED ASSETS**

The cost of fixed assets, accumulated depreciation and impairment, as well as the book value of fixed assets are as follows:

	2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<b>Nilai Perolehan:</b>						<b>Acquisition Cost:</b>
Tanah	32.720.868.824	--	--	--	32.720.868.824	Land
Bangunan dan Lapangan	85.454.903.231	--	--	2.364.799.373	87.819.702.604	Building and Field
Bangunan Gedung	699.869.427.125	--	--	39.302.373.896	739.171.801.021	Building
						Navigational - Aids
Alat Bantu Navigasi	2.635.929.326.280	--	--	19.865.959.308	2.655.795.285.588	Equipments
Alat-alat Kantor	139.540.928.344	--	--	2.566.158.360	142.107.086.704	Office Equipment
Instalasi dan Jaringan	648.982.205.963	--	--	29.519.748.811	678.501.954.774	Installation and Network
Alat Pengangkutan	2.317.019.852	--	--	--	2.317.019.852	Transport Equipment
Sub Jumlah	4.244.814.679.619	--	--	93.619.039.748	4.338.433.719.367	Sub Total
<b>Aset Hak Guna:</b>						<b>Right of Use Assets:</b>
Bangunan Gedung	667.212.754	196.769.818	326.861.352	--	537.121.220	Building
Kendaraan	15.910.606.272	1.644.888.227	10.414.016.528	--	7.141.477.971	Vehicles
Sub Jumlah	16.577.819.026	1.841.658.045	10.740.877.880	--	7.678.599.191	Sub Total
<b>Aset dalam Konstruksi</b>	<b>112.391.087.413</b>	<b>18.821.395.039</b>	<b>(528.925.204)</b>	<b>(93.619.039.748)</b>	<b>37.064.517.500</b>	<b>Asset Under Construction</b>
<b>Jumlah</b>	<b>4.373.783.586.058</b>	<b>20.663.053.084</b>	<b>10.211.952.676</b>	<b>--</b>	<b>4.383.176.836.058</b>	<b>Total</b>
<b>Akumulasi Penyusutan:</b>						<b>Accumulated Depreciation:</b>
Bangunan dan Lapangan	32.964.526.667	4.515.737.287	--	--	37.480.263.954	Building and Field
Bangunan Gedung	122.930.638.765	21.673.633.461	--	--	144.604.272.226	Building
						Navigational - Aids
Alat Bantu Navigasi	1.630.795.826.137	140.630.405.265	--	--	1.771.426.231.402	Equipments
Alat-alat Kantor	84.828.018.252	15.683.260.740	--	--	100.511.278.992	Office Equipment
Instalasi dan Jaringan	355.006.550.110	49.752.224.892	--	--	404.758.775.002	Installation and Network
Alat Pengangkutan	1.969.414.776	221.847.466	--	--	2.191.262.242	Transport Equipment
Sub Jumlah	2.228.494.974.707	232.477.109.111	--	--	2.460.972.083.818	Sub Total
<b>Aset Hak Guna:</b>						<b>Right of Use Assets:</b>
Gedung	514.148.867	234.449.196	326.861.352	--	421.736.711	Building
Kendaraan	12.273.290.023	3.491.383.911	10.414.016.528	--	5.350.657.406	Vehicles
Sub Jumlah	12.787.438.890	3.725.833.107	10.740.877.880	--	5.772.394.117	Sub Total
<b>Jumlah</b>	<b>2.241.282.413.597</b>	<b>236.202.942.218</b>	<b>10.740.877.880</b>	<b>--</b>	<b>2.466.744.477.935</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>2.132.501.172.461</b>				<b>1.916.432.358.123</b>	<b>Net Book Value</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. ASET TETAP (Lanjutan)**

**10. FIXED ASSETS (Continued)**

	2021				Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification		
<b>Nilai Perolehan:</b>						<b>Acquisition Cost:</b>
Tanah	32.720.868.824	--	--	--	32.720.868.824	Land
Bangunan dan Lapangan Gedung	84.015.789.991 692.061.431.614	-- --	-- --	1.439.113.240 7.807.995.511	85.454.903.231 699.869.427.125	Building and Field Building
Alat Bantu Navigasi	2.469.587.207.283	--	--	166.342.118.997	2.635.929.326.280	Navigational - Aids Equipments
Alat-alat Kantor	137.034.718.294	--	--	2.506.210.050	139.540.928.344	Office Equipment
Instalasi dan Jaringan	616.202.387.878	--	--	32.779.818.085	648.982.205.963	Installation and Network
Alat Pengangkutan	2.317.019.852	--	--	--	2.317.019.852	Transport Equipment
Sub Jumlah	4.033.939.423.736	--	--	210.875.255.883	4.244.814.679.619	Sub Total
<b>Aset Hak Guna</b>						<b>Right of Use Assets</b>
Bangunan Gedung	249.061.354	418.151.400	--	--	667.212.754	Building
Kendaraan	12.307.440.399	3.603.165.873	--	--	15.910.606.272	Vehicles
Sub Jumlah	12.556.501.753	4.021.317.273	--	--	16.577.819.026	Sub Total
Aset dalam Konstruksi	120.340.329.827	212.113.919.517	9.187.906.048	(210.875.255.883)	112.391.087.413	Asset Under Construction
<b>Jumlah</b>	<b>4.166.836.255.316</b>	<b>216.135.236.790</b>	<b>9.187.906.048</b>	<b>--</b>	<b>4.373.783.586.058</b>	<b>Total</b>
<b>Akumulasi Penyusutan:</b>						<b>Accumulated Depreciation:</b>
Bangunan dan Lapangan Gedung	28.879.705.771 103.371.206.675	4.084.820.896 19.559.432.090	-- --	-- --	32.964.526.667 122.930.638.765	Building and Field Building
Alat Bantu Navigasi	1.492.653.104.690	138.142.721.447	--	--	1.630.795.826.137	Navigational - Aids Equipments
Alat-alat Kantor	68.022.918.398	16.805.099.854	--	--	84.828.018.252	Office Equipment
Instalasi dan Jaringan	309.786.531.158	45.220.018.952	--	--	355.006.550.110	Installation and Network
Alat Pengangkutan	1.731.736.015	237.678.761	--	--	1.969.414.776	Transport Equipment
Sub Jumlah	2.004.445.202.707	224.049.772.000	--	--	2.228.494.974.707	Sub Total
<b>Aset Hak Guna</b>						<b>Right of Use Assets</b>
Bangunan dan Gedung	206.460.975	307.687.892	--	--	514.148.867	Building
Kendaraan	6.490.376.433	5.782.913.590	--	--	12.273.290.023	Vehicles
<b>Jumlah</b>	<b>2.011.142.040.115</b>	<b>230.140.373.482</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.241.282.413.597</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>2.155.694.215.201</b>				<b>2.132.501.172.461</b>	<b>Net Book Value</b>

Beban penyusutan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang dibebankan pada beban usaha lainnya adalah masing - masing sebesar Rp236.202.942.218 dan Rp230.140.373.482 (Catatan 26).

Depreciation expenses for the years then ended December 31, 2022 and 2021 that was charged as other operating expense amounted to Rp236,202,942,218 and Rp230,140,373,482, respectively (Note 26).

Rincian aset dalam konstruksi berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

The details of assets under construction by type are as follows:

	2022	2021	
Bangunan Gedung	28.498.628.851	74.100.973.373	Building
Instalasi dan Jaringan	6.564.072.480	15.413.753.039	Installation and Network
Bangunan dan Lapangan	2.001.816.169	2.017.509.768	Building and Field
Alat Bantu Navigasi	--	19.865.958.632	Navigational - Aids Equipments
Alat-alat Kantor	--	992.892.601	Office Equipment
<b>Jumlah</b>	<b>37.064.517.500</b>	<b>112.391.087.413</b>	<b>Total</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. ASET TETAP (Lanjutan)**

Berdasarkan hasil inventarisasi fisik aset tetap di lapangan, bahwa tidak ada potensi penurunan nilai aset tetap yang berdampak signifikan kepada penyajian laporan keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Selanjutnya, tidak ada aset tetap yang sedang dalam penjaminan pinjaman kepada pihak lain.

Rincian aset dalam konstruksi per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

**10. FIXED ASSETS (Continued)**

Based on the results of the physical check of fixed assets, there is no potential impairment value of fixed assets that has significant impact on the presentation of financial statements at the statement of financial position date.

Furthermore, there are no fixed assets that are under loan guarantees to other parties.

The details of construction in progress as of December 31, 2022, is as follows:

No./ Num	Nama Kontraktor/ Name of Contractor	Uraian Pekerjaan/ Job Description	Progres/ Progress	Nilai/ Value
1	PT Arkonin	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tower di Kantor Pusat/ <i>Planning Consultation Service of Tower Development in Head Office</i>	100%	635.383.750
2	Swakelola (PU)	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Baru Kantor Pusat / <i>Construction Permit of New Building in Head Office</i>	100%	244.545.481
3	PT Brantas Abipraya (Persero)	Pembangunan Gedung Baru Kantor Pusat 2017-2018/ <i>Construction of New Buildings at Head Office 2017-2018</i>	22,22%	15.238.650.224
4	PT Intimulya Multikencana	Jasa Konsultasi Pengawasan Gedung Baru - Kantor Pusat / <i>Supervision Consultation Service in Head Office - New Building</i>	22,22%	268.949.257
5	PT Mudamitra Indonusa	Pembangunan Gedung Tower Beserta Sarana Pendukungnya di Lampung / <i>Construction of Tower Buildings and Supporting Facilities in Lampung</i>	65,10%	10.186.032.842
		Jalan dan Fasilitas Pendukung Tower di Lampung / <i>Roads and Supporting Facilities in Lampung</i>	58,38%	6.470.190.333
6	PT Nusantara Citra Konsultan	Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan ATC Tower dan sarana penunjangnya di Luwuk/ <i>ATC Tower Development Planning Consultancy Services and its supporting facilities in Luwuk</i>	100%	491.100.000
		Jasa Konsultansi Pembangunan ATC Tower Lampung/ <i>ATC Tower Lampung Construction Consultancy Services</i>	100%	491.120.000
7	PT Amsecon Berlian	Manajemen Konstruksi Tower di Lampung / <i>Construction Management Tower in Lampung</i>	37%	210.226.544
8	PT Architeam Design Center	Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Tower Lampung Lanjutan / <i>Advance Consultation Services of Construction Management Lampung Tower</i>	100%	229.609.050
9	PT Sugi Jaya Teknologi	Kegiatan Pendukung Pengadaan ERP Modul Keuangan dan Human Resource - Implementasi E-Strip 32 Lokasi/ <i>Activities Supporting Procurement of ERP Financial Modules and Human Resources - Implementation of E-Strip 32 Locations</i>	100%	2.160.490.000
10	PT Amara Cisdane	Penyusunan Dokumen Addendum Andal & RKL-RPL Gedung JAATS / <i>Preparation of Andal and RKL-RPL Addendum Documents for JAATS Building</i>	100%	247.750.000
11	PT Telehouse Engineering	Menara Pengawas Afis Soedirman Purbalingga dan Sarana Pendukungnya / <i>Afis Controller Tower Soedirman Purbalingga and Supporting Facilities</i>	38,42%	190.470.019
<b>Jumlah/ Total</b>				<b>37.064.517.500</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. ASET TETAP (Lanjutan)**

Perolehan aset tetap Perusahaan bersumber dari:

1. Modal Dasar Perusahaan yang tertuang dalam PP 77 Tahun 2012, tanggal 13 September 2012, dalam bentuk:

No./ Num	Uraian	Nilai/ Value	Description
1)	Peralatan navigasi pada Bandar Udara Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah berupa antena pemancar dan penerima MF, alat komunikasi navigasi Instrument Landing System, alat komunikasi navigasi, fasilitas komunikasi penerbangan dan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.	22.441.164.000	Navigation equipment at Iskandar Airport in Pangkalan Bun, Central Kalimantan in the form of MF transmitting and receiving antennas, navigation instruments, Instrument Landing System, navigation communication devices, flight communication facilities and flight navigation and observation facilities.
2)	Peralatan navigasi pada Bandar Udara Juwata di Tarakan, Kalimantan Timur berupa unit Transceiver Very High Frequency Stationery dan Secondary Surveillance Radar.	22.457.185.000	Navigation equipment at Juwata Airport in Tarakan, East Kalimantan in the form of Transceiver units Very High Frequency Stationery and Secondary Radar Surveillance
3)	Peralatan navigasi pada Bandar Udara Sentani di Jayapura, Papua berupa alat penerima MF + AF, unit Transceiver Ultra High Frequency Portable, unit Transceiver Very High Frequency Portable, Doopler Very High Frequency Omnidirectional Range (DVOR), alat komunikasi navigasi dan Voice Switching Communication System.	48.658.401.000	Navigation equipment at Sentani Airport in Jayapura, Papua in the form of MF + AF receivers, Ultra High Frequency Portable Transceiver units, Very High Frequency Portable Transceiver units, Dooplers Very High Frequency Omnidirectional Range (DVOR), navigation communication devices and Voice Switching Communication System.
4)	Peralatan navigasi pada Bandar Udara Dewadaru di Karimun Jawa, Jawa Tengah berupa Doopler Very High Frequency Omnidirectional Range (DVOR).	4.395.940.300	Navigation equipment at Dewadaru Airport in Karimun Jawa, Central Java in the form of a Very High Frequency Omnidirectional Doopler (DVOR).
	<b>Jumlah</b>	<b>97.952.690.300</b>	<b>Total</b>

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Penyertaan Modal Negara No. 15/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Perum LPPNPI sebesar Rp375.512.760.000 yang merupakan Peralihan BPYBDS Gedung JATSC Tahun 2017.

3. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMN hasil penarikan BPYBDS pada PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II No.BA.21, tahun 2014, tanggal 20 Januari 2014 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Perum LPPNPI untuk dioperasionalkan dengan nilai sebesar Rp218.376.457.642 dan €46.191.791, atau semula Rp975.506.099.662 atas BMN tersebut telah ada hasil pengharmonisasian.

**10. FIXED ASSETS (Continued)**

The Company's fixed assets was derived from:

1. The Company's Authorized Capital as stipulated in Government Regulation 77 of 2012, dated September 13, 2012, in the form of:

2. Based on Government Regulation (PP) Participation of State Capital No. 15/2017 concerning Addition of State Capital Inclusion to Perum LPPNPI in the amount of Rp375,512,760,000 which is the Transitional of Undefined Status Government Assistance of JATSC Building in 2017.

3. Based on the Minutes of Receiving State Owned Assets from of the Undefined Status Government Assistance from PT Angkasa Pura I and PT Angkasa Pura II No.BA. 21, Year 2014, dated January 20, 2014 from the Directorate General of Civil Aviation to Perum LPPNPI for operation with a value of Rp218,376,457,642 and €46,191,791, or previously Rp975,506,099,662 of the Stated Owned Assets has been harmonized.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. ASET TETAP (Lanjutan)**

Perolehan aset tetap Perusahaan bersumber dari: (Lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Perum LPPNPI nomor: BA-03 / KN.3 / REKON.BPYBDS.SEM /2020 tanggal 22 Juli 2020, terdapat penyesuaian nilai BPYBDS dari semula Rp975.506.099.661,70 menjadi Rp904.692.510.333,20 sesuai dengan laporan hasil reuiu BPKP Nomor LHA-6416/PW09/4/2011 tanggal 10 Agustus 2011. Penyesuaian terutama pada BPYBDS di Surabaya yang semula nilainya Rp133.769.868.064,36 menjadi Rp62.956.278.735,86, sehingga terdapat pengurangan senilai Rp70.813.589.328,50.

Terhadap aset ini, telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 tahun 2020 dan telah di catat dalam Modal Pemerintah yang sebelumnya di catat sebagai BPYBDS.

4. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jendral Perhubungan Udara berupa Bangunan dan Peralatan Navigasi Penerbangan kepada Perum LPPNPI untuk Dipergunakan dalam Tugas-tugas Operasional, nomor: BA.488 Tahun 2017.

**10. FIXED ASSETS (Continued)**

The Company's fixed assets was derived from: (Continued)

Based on the Minutes of Reconciliation between the Ministry of Finance, Ministry of Transportation and Perum LPPNPI number: BA-03 / KN.3 / REKON.BPYBDS.SEM / 2020 dated 22 July 2020, there was an adjustment in the value of Undefined Status Government Assistance from Rp975,506,099,661.70 to Rp904,692,510,333.20 according to the BPKP review report. LHA-6416 / PW09 / 4/2011 dated August 10, 2011. The adjustment was mainly for Undefined Status Government Assistance in Surabaya, which was originally valued at Rp133,769,868,064.36 to Rp62,956,278,735.86, so that there was a reduction of Rp70,813,589,328.50.

For this asset, the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 65 year 2020 has been issued and has been recorded in Government Capital which previously recorded as BPYBDS.

4. Based on the Minutes of Operational Handover State Property (BMN) of the Directorate General of Air Transportation in the form of Buildings and Aviation Navigation Equipment to Perum LPPNPI for operational use, number: BA.488 2017.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. ASET TETAP (Lanjutan)**

Perolehan aset tetap Perusahaan bersumber dari: (Lanjutan)

**Pasal 2 :**

Pihak Kedua menerima Barang Milik Negara (BMN) berupa Bangunan dan Peralatan Navigasi Penerbangan untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional Perum LPPNPI dan selanjutnya berkewajiban menyediakan biaya pemeliharaan/ pengoperasian Peralatan Navigasi Penerbangan sebagaimana terlampir serta berhak menerima/ mengelola pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian aset dimaksud.

**Pasal 3 :**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

- 1) Pengalihan Penyertaan Modal Negara dari Kementerian Perhubungan kepada Perum LPPNPI akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
- 2) Pengalihan pencatatan aset akan dilakukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua setelah Peraturan Pemerintah Penyertaan Modal Negara (PP PMN) terbit.

**10. FIXED ASSETS (Continued)**

The Company's fixed assets was derived from: (Continued)

**Article 2 :**

The Second Party accepts State Property (BMN) in the form of Buildings and Aviation Navigation Equipment to be used in the operational tasks of Perum LPPNPI and is subsequently obliged to provide maintenance / operation costs of the Flight Navigation Equipment as attached and has the right to receive / manage income obtained from the operation of these assets.

**Article 3 :**

First Party and Second Party agreed to conduct follow-up as follows :

- 1) The transfer of the Investment of the Ministry of Transportation to Perum LPPNPI will be conducted in accordance with the provisions of the Indonesian Government Regulation No. 27 Year 2014 concerning Management of State / Regional;
- 2) The transfer of asset record will be carried out by the First Party and the Second Party after the Government Regulation on State Capital Participation (PP PMN) is issued.



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. ASET TETAP (Lanjutan)**

Perolehan aset tetap Perusahaan bersumber dari: (Lanjutan)

**Pasal 4 :**

Berita Acara Serah Terima Bangunan dan Peralatan Navigasi Penerbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kepada Perum LPPNPI untuk Dipergunakan dalam Tugas-tugas Operasional Nomor : BA.22 Tahun 2014, tanggal 20 Januari 2014 dan Nomor: BA.282 tahun 2016, tanggal 1 November 2016 dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Berita Acara ini.

5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) untuk dijadikan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perum LPPNPI.

Pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam PP No 46 Tahun 2018, dilakukan pada:

- (1) PT Angkasa Pura I (Persero) sebesar Rp232.133.499.141,50.  
(2) PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp317.188.226.335,23.

**Pengalihan Aset**

Berdasarkan Laporan hasil reuiu BPKP No. SP-1346/D4/02/2019 tanggal 9 Desember 2019 poin h menyatakan bahwa Kementerian BUMN dapat (secara bersinergi dengan Kementerian Perhubungan) memberikan landasan kebijakan pengenaan tarif sewa Rp0 kepada Perum LPPNPI terhadap pemanfaatan lahan dan/atau bangunan oleh Perum LPPNPI.

**10. FIXED ASSETS (Continued)**

The Company's fixed assets was derived from: (Continued)

**Article 4 :**

Minutes of Building and Flight Navigation Equipment Handover from the Directorate General of Civil Aviation to Perum LPPNPI For Use in Operational Tasks Number: BA.22 Year 2014 dated January 20, 2014 and Number: BA. 282 year 2016 dated November 1, 2016 was declared invalid with the publication of this Minutes.

5. Based on Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia Number 46 year 2018 concerning Reduction of State Equity Participation of the Republic of Indonesia in PT Angkasa Pura I (Persero) and PT Angkasa Pura II (Persero) to be used as Addition to the State Capital Participation of the Republic of Indonesia into Perum LPPNPI.

Reduction of the State Capital Participation as referred to in PP No. 46 year 2018, is carried out on:

- (1) PT Angkasa Pura I (Persero) amounting to Rp232,133,499,141.50.  
(2) PT Angkasa Pura II (Persero) amounting to Rp317,188,226,335.23.

**Assets Transfer**

Based on the BPKP review report No. SP-1346/D4/02/2019 dated December 9, 2019 point h stated that the Ministry of State-Owned Enterprises could (in synergy with the Ministry of Transportation) provide basis for a policy of imposing a rental rate of Rp0 to Perum LPPNPI for the use of land and/or buildings by Perum LPPNPI.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. ASET TETAP (Lanjutan)**

**Pengalihan Aset (Lanjutan)**

Berikut ini aset tetap - bangunan yang didirikan diatas lahan pihak lain (di atas lahan PT Angkasa Pura I (Persero); PT Angkasa Pura II (Persero); dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) sebagai berikut:

- Pembangunan Jalan Menuju Gedung Radar dan Pagar Masuk di Area Radar di Cabang Sentani, sebesar Rp2.240.737.000.
- Pembangunan Gedung AOC JATSC di Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp19.038.000.000.
- Pembangunan Kantin di JATSC, sebesar Rp960.658.000.
- Pembangunan Area Parkir di JATSC, sebesar Rp488.755.000.

**Program Pengampunan Pajak**

Perusahaan telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 15 November 2016, rincian aset sebagai berikut: (Catatan 11).

<b>No./ Num</b>	<b>Uraian/ Details</b>	<b>Lokasi/ Location</b>	<b>Nilai Aset Tetap/ Value of Fixed Assets (Rp)</b>
1.	Alat Bantu Navigasi / <i>Navigational Aids</i>	Makassar	1.073.647.000
2.	Instalasi dan Jaringan / <i>Instalation and Network</i>	Sentani	564.740.000
3.	Alat Bantu Navigasi / <i>Navigational Aids</i>	Balikpapan	480.454.425
4.	Instalasi dan Jaringan / <i>Instalation and Network</i>	Pangkal Pinang	249.350.000
<b>Jumlah Aset Pengampunan Pajak / Total Tax Amnesty Assets</b>			<b>2.368.191.425</b>

**Aset Tetap yang Diasuransikan**

Berdasarkan Property All Risks Insurance Policy Nomor 703.297.110.22.00188/000/000 Perusahaan mengasuransikan seluruh aset tetap yang berasal dari Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Unit dengan nilai pertanggungan sebesar Rp2.584.277.944.834,07 dengan Premi sebesar Rp1.761.850.691,78 pada periode 11 Agustus 2022 hingga 11 Agustus 2023.

**10. FIXED ASSETS (Continued)**

**Assets Transfer (Continued)**

The following are fixed assets - buildings that was built on another party's land (on the land of PT Angkasa Pura I (Persero); PT Angkasa Pura II (Persero); and Directorate General of Civil Aviation) as follows:

- Construction of Road to the Radar Building and Fence Entrance in the Radar Area at the Sentani Branch, amounting to Rp2,240,737,000.
- Construction of the AOC JATSC Building at Soekarno Hatta Airport, amounting to Rp19,038,000,000.
- Construction of a dining area at JATSC, amounting to Rp960,658,000.
- Construction of a Parking Area at JATSC, amounting to Rp488,755,000.

**Tax Amnesty Program**

The Company has submitted Asset Declaration Letter for Tax Amnesty and has been accepted by the Tax Office on November 15, 2016. Details of the assets are as follows: (Note 11).

**Insured Fixed Assets**

Based on Property All Risks Insurance Policy Number 703.297.110.22.00188/000/000, the Company insures all fixed assets originating from Head Office, Branch Offices, Sub-Branch Offices and Units in the amount of Rp2.584.277.944.834,07 with Premiums of Rp1.761.850.691,78 from the period August 11, 2022 to August 11, 2023.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. ASET TETAP (Lanjutan)**

**Aset Tetap yang Diasuransikan (Lanjutan)**

Berdasarkan *Earthquake Insurance Policy* Nomor Polis 703.203.110.22.00189/000/000 Perusahaan mengasuransikan aset tetap untuk gempa bumi berupa bangunan/gedung dan alat navigasi yang berasal dari Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Unit dengan nilai pertanggungan sebesar Rp2.584.277.944.834,07 dengan Premi sebesar Rp2.237.149.308,22 pada periode 11 Agustus 2022 hingga 11 Agustus 2023.

Informasi Ko-Asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai *leader* dengan Persentase sebesar 50%, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia sebesar 35% dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sebesar 15%.

Seluruh aset dan kepemilikan bangunan dari bertanggung atau aset lain yang menjadi tanggung jawab maupun yang dianggap menjadi tanggung jawab pemilik yang berada dalam lokasi bertanggung, termasuk dan tidak terbatas pada:

- 1) Bangunan dan Instalasi;
- 2) Isi Bangunan; dan
- 3) Peralatan, Pekerjaan Infrastruktur & Fasilitas: Semua peralatan mekanis dan listrik, termasuk tetapi tidak terbatas untuk Lift, Tangga Elevator, peralatan komunikasi, peralatan navigasi, pengontrol lalu lintas udara - ATC, jaringan listrik, Sistem Radar Pengawasan, Peralatan Meteorologi, UPS, teropong penglihatan malam dan semua fasilitas lain peralatan dan properti dari setiap keterangan dimana bertanggung memiliki tanggung jawab.

Beban asuransi aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.299.681.330 dan Rp2.940.176.394 (Catatan 25).

**10. FIXED ASSETS (Continued)**

**Insured Fixed Assets (Continued)**

Based on *Earthquake Insurance Policy* Number 703.203.110.22.00189/000/000, the Company insures its fixed assets for earthquakes in the form of buildings and navigation equipment originating from Head Office, Branch Offices, Sub-Branch Office and Units in the amount of Rp2.584.277.944.834,07 with Premiums of Rp2.237.149.308,22 in the period August 11, 2022 to August 11, 2023.

Information on Co-Insurance of PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) as leader with a percentage of 50%, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia of 35% and PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) of 15%.

All assets and property of the insured buildings or other assets that are the responsibility and are considered to be the responsibility of the owner who is in the location of the insured, including but not limited to:

- 1) *Building and Installation;*
- 2) *Building Contents; and*
- 3) *Equipment, Works of Infrastructure & Facilities, all mechanical equipment and electrical, including but not limited to the lifts, Stair elevators, communications equipment, navigation equipment, air traffic control - ATC, electricity networks, Radar System Monitoring, equipment Meteorology, UPS, binocular vision night and all the other amenities of equipment and property of every description where the insured own the responsibility.*

Insurance expenses for fixed assets for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp3,299,681,330 and Rp2,940,176,394, respectively (Note 25).

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. ASET TETAP (Lanjutan)**

**Penyesuaian Nilai Aset Tetap**

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Perum LPPNPI No. BA-03/KN.3/REKON.BPYBDS.SEM/2020 tanggal 22 Juli 2020, terdapat penyesuaian nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) dari semula Rp975.506.099.661 menjadi Rp904.692.510.332 sesuai dengan laporan hasil reviu BPKP No. LHA-6416/PW09/4/2011 tanggal 10 Agustus 2011 (Catatan 19).

Penyesuaian BPYBDS dilakukan pada aset di cabang Surabaya senilai Rp133.769.868.064 menjadi Rp62.956.278.735, sehingga terdapat penyesuaian senilai Rp70.813.589.328. Penyesuaian nilai aset ini telah disetujui sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2020 tanggal 10 November 2020 dan telah dicatat dalam Modal Pemerintah yang sebelumnya di catat sebagai BPYBDS.

**11. ASET PENGAMPUNAN PAJAK**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dengan Nomor: KET-1303/PP/WPJ.19/2016 tanggal 22 November 2016 dengan nilai aset pengampunan sebesar Rp2.368.191.425 (Catatan 10).

**10. FIXED ASSETS (Continued)**

**Fixed Assets Adjustment**

Based on the Minutes of Reconciliation between the Ministry of Finance, the Ministry of Transportation and Perum LPPNPI No. BA-03/KN.3/REKON.BPYBDS.SEM/2020 dated July 22, 2020, there is an adjustment on Undefined Status Government Assistance (BPYBDS) from Rp975,506,099,661 to Rp904,692,510,332 according to the BPKP review report Number LHA-6416/PW09/4/2011 dated August 10, 2011 (Note 19).

The BPYBDS adjustment was made to assets in the Surabaya branch amounting to Rp133,769,868,064 to Rp62,956,278,735, resulting in an adjustment of Rp70,813,589,328. The adjustment has been approved in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 65 of 2020 dated November 10, 2020 and has been recorded in Government Capital which was previously recorded as BPYBDS.

**11. TAX AMNESTY ASSETS**

The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia issued a Certificate of Tax Amnesty Number: KET- 1303/PP/WPJ.19/2016, dated November 22, 2016 with amnesty assets amounting Rp2,368,191,425 (Note 10).

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**12. UTANG USAHA**

Akun ini terdiri dari:

**12. TRADE PAYABLES**

This account consists of:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
PT Daikin Applied Solutions	2.077.880.408	--	PT Daikin Applied Solutions
RS Awal Bros	453.457.704	297.387.160	RS Awal Bros
RSIA Paramount	215.532.000	--	RSIA Paramount
PT Nabila Cahaya Abadi	200.716.707	460.780.517	PT Nabila Cahaya Abadi
PT Permata Indah Utama	180.570.626	--	PT Permata Indah Utama
Darmawisata Indonesia	177.718.966	5.630.672	Darmawisata Indonesia
RS JIH Yogyakarta	176.423.356	--	RS JIH Yogyakarta
PT Elpo Indonesia	162.038.887	--	PT Elpo Indonesia
PT Cyndi Eratama Sejati	148.209.726	55.721.671	PT Cyndi Eratama Sejati
PT Cipta Kompak Buana Mandiri	145.493.372	--	PT Cipta Kompak Buana Mandiri
PT Kimia Farma Apotek	144.876.845	107.479.045	PT Kimia Farma Apotek
PT Persona Prima Utama	143.198.734	10.794.124	PT Persona Prima Utama
PT Interprima Indocom	141.976.520	--	PT Interprima Indocom
PT Madina Persada Mandiri	115.139.239	62.315.656	PT Madina Persada Mandiri
PT Serasi Autoraya	162.902.000	18.950.000	PT Serasi Autoraya
RS Hermina Padang	106.696.549	55.960.470	RS Hermina Padang
PT Sahabat Sejati Utama	103.043.000	--	PT Sahabat Sejati Utama
PT Pertamina Bina Medika	102.989.359	125.596.400	PT Pertamina Bina Medika
PT Candra Adyalaksana	--	8.354.697.438	PT Candra Adyalaksana
PT Mudamitra Indonusa	--	2.666.244.432	PT Mudamitra Indonusa
UPBU Gorontalo	--	750.368.446	UPBU Gorontalo
PT Siloam International Hospitals Tbk	--	739.213.598	PT Siloam International Hospitals Tbk
PT Triagung Kurnia Perkasa	--	494.985.413	PT Triagung Kurnia Perkasa
RS Siloam Dhirga Surya	--	285.138.999	RS Siloam Dhirga Surya
RS Stella Maris	--	165.675.612	RS Stella Maris
Lain-lain (Masing-masing Dibawah Rp100.000.000)	3.251.195.763	2.897.230.831	Others (Each Less Than Rp100,000,000)
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>8.154.059.761</u></b>	<b><u>17.554.170.484</u></b>	<b>Sub Total</b>
<b>Pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
Operasional Cabang	1.148.170.851	389.742.234	Branch Operational
PT Angkasa Pura II (Persero)	165.490.692	--	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Pertamina Bina Medika IHC	139.175.551	--	PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Angkasa Pura I (Persero)	106.654.963	--	PT Angkasa Pura I (Persero)
Lain-lain (Masing-masing Dibawah Rp100.000.000)	371.798.460	436.250.505	Others (Each Less Than Rp100,000,000)
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>1.931.290.517</u></b>	<b><u>825.992.739</u></b>	<b>Sub Total</b>
<b>Jumlah</b>	<b><u>10.085.350.278</u></b>	<b><u>18.380.163.223</u></b>	<b>Total</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**13. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Biaya Pembelian	52.607.548.130	39.208.500.878
Biaya Umum	10.563.204.656	5.757.137.552
Biaya Utilitas	5.251.040.375	4.644.441.134
Biaya Pemeliharaan	1.523.502.903	733.213.881
Biaya Sewa	369.552.500	371.163.091
Lain-lain	4.047.290.886	4.535.689.577
<b>Jumlah</b>	<b>74.362.139.450</b>	<b>55.250.146.113</b>

**13. ACCRUED EXPENSES**

This account consists of:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Purchase Expense	52.607.548.130	39.208.500.878
General Expense	10.563.204.656	5.757.137.552
Utility Expenses	5.251.040.375	4.644.441.134
Maintenance Expense	1.523.502.903	733.213.881
Rent Expense	369.552.500	371.163.091
Others	4.047.290.886	4.535.689.577
<b>Total</b>	<b>74.362.139.450</b>	<b>55.250.146.113</b>

**14. LIABILITAS LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

a) Jangka Pendek

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Titipan PJNP Rupiah</b>		
Kementerian Perhubungan	193.729.901.563	180.283.406.395
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	42.941.185.152	38.370.796.068
<b>Dolar Amerika Serikat</b>		
Kementerian Perhubungan (2022: USD1.879.656,10 dan 2021: USD1.662.689,57)	29.307.597.911	23.724.917.444
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (2022: USD785.569,7 dan 2021: USD675.516,54)	12.248.600.891	9.638.945.545
<b>Sub Jumlah</b>	<b>278.227.285.517</b>	<b>252.018.065.452</b>
<b>Utang PJNP Rupiah</b>		
Kementerian Perhubungan	36.099.008.060	24.253.988.726
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	9.857.503.943	6.314.849.699
<b>Dolar Amerika Serikat</b>		
Kementerian Perhubungan (2022: USD1.307.541 dan 2021: USD640.426,9)	20.387.179.116	9.138.251.016
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (2022: USD519.698 dan 2021: USD255.682,8)	8.103.131.528	3.648.337.426
<b>Sub Jumlah</b>	<b>74.446.822.647</b>	<b>43.355.426.867</b>

**14. OTHER LIABILITIES**

This account consists of:

a) Short-Term

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>PJNP Deposits Rupiah</b>		
Ministry of Transportation Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency	193.729.901.563	180.283.406.395
<b>United States Dollar</b>		
Ministry of Transportation (2022: USD1,879,656.10 and 2021: USD1,662,689.57)	29.307.597.911	23.724.917.444
Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency (2022: USD785,569.6 and 2021: USD675,516.54)	12.248.600.891	9.638.945.545
<b>Sub Total</b>	<b>278.227.285.517</b>	<b>252.018.065.452</b>
<b>PJNP Payable Rupiah</b>		
Ministry of Transportation Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency	36.099.008.060	24.253.988.726
<b>United States Dollar</b>		
Ministry of Transportation (2022: USD1,307,541 and 2021: USD640,426.9)	20.387.179.116	9.138.251.016
Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency (2022: USD519,698 and 2021: USD255,682.8)	8.103.131.528	3.648.337.426
<b>Sub Total</b>	<b>74.446.822.647</b>	<b>43.355.426.867</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**14. LIABILITAS LAIN-LAIN (Lanjutan)**

a) Jangka Pendek (Lanjutan)

Lain-lain		
Retensi	6.788.630.253	11.262.493.088
Jaminan Pelaksanaan	55.000.000	55.000.000
Jaminan Penawaran	31.962.600	31.962.600
Lain-lain	118.833.856	120.832.849
<b>Sub Jumlah</b>	<b>6.994.426.709</b>	<b>11.470.288.537</b>
<b>Jumlah</b>	<b>359.668.534.873</b>	<b>306.843.780.856</b>

Titipan PNPB kepada KEMENHUB dan BMKG merupakan bagian dari tagihan kepada maskapai yang timbul pada saat invoice diterbitkan. Jumlah tersebut mengurangi jumlah pendapatan Perusahaan dari total piutang yang ditagihkan ke Maskapai. Besar titipan PJNP PNPB KEMENHUB adalah 15% untuk pendapatan Domestik dan 10% untuk pendapatan penerbangan internasional dan lintas dari total biaya jasa navigasi penerbangan, sedangkan besar titipan PJNP PNPB BMKG adalah 4% dari total biaya jasa navigasi penerbangan. Titipan PNPB kepada KEMENHUB dan BMKG akan direklasifikasi sebagai utang PNPB kepada KEMENHUB dan BMKG pada saat piutang terkait telah dibayarkan oleh Maskapai.

b) Jangka Panjang

Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dalam Surat Menteri BUMN No. S-491/MBU/07/2020 mengenai Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perum LPPNPI Tahun 2019 tanggal 13 Juli 2020 terkait penetapan gaji/ honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Pengawas tahun buku 2020 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas, cadangan tantiem atas Direksi dan Dewan Pengawas tahun 2019 masing-masing sebesar Rp2.017.172.558 dan Rp4.984.228.954, berdasarkan Surat dari Kementerian BUMN No. S-23/Wk2.MBU.F/8/2020 atas cadangan tantiem tersebut akan dibayarkan pada tahun 2023.

**14. OTHER LIABILITIES (Continued)**

a) Short-Term (Continued)

Others
Retention
Performance Guarantee
Bid Guarantee
Others
<b>Sub Total</b>
<b>Total</b>

The PNPB deposit to KEMENHUB and BMKG is part of the bill to the airline that arises at the time the invoice was issued. This amount subtracts the total of the Company's revenue from the total receivables billed to the Airlines. The amount of PJNP PNPB KEMENHUB is 15% for Domestic revenue and 10% for international and cross flight revenue from the total of air navigation service expense, while the amount of PJNP PNPB BMKG is 4% from the total of air navigation service expense. The PNPB deposit to KEMENHUB and BMKG will be reclassified to PNPB payable to KEMENHUB and BMKG at the time related receivables has been paid by the Airlines.

b) Long Term

Based on Joint Discussion Meeting (RPB) on the letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-491/MBU/07/2020 regarding Approval of the Annual Report and Financial Report of Perum LPPNPI for 2019 dated July 13, 2020, in connection with the determination of the salary/honorarium along with other facilities and benefits for the Directors and Board of Supervisory for the 2020 financial year as well as tantiem for the Directors and Board of Supervisory in 2019 amounted to Rp2,017,172,558 and Rp4,984,228,954, respectively, based on the letter from the Ministry of State-Owned Enterprises No. S-23/Wk2MBU.F/8/2020 the tantiem allowance will be paid in 2023.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**15. PERPAJAKAN**

**a. Pajak Dibayar di Muka**

Akun ini merupakan pajak dibayar atau diperhitungkan dimuka dan taksiran atas restitusi pajak dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Taksiran Restitusi Pajak - 2022	8.431.166.174	--	Estimated Tax Restitution – 2022
Taksiran Restitusi Pajak - 2021	12.920.869.824	12.920.869.824	Estimated Tax Restitution – 2021
Taksiran Restitusi Pajak - 2020	--	64.336.567.177	Estimated Tax Restitution – 2020
Pajak Pertambahan Nilai	8.608.592.355	16.706.775.538	Value Added Tax
Lainnya	17.849	30.120.101	Others
<b>Jumlah</b>	<b><u>29.960.646.202</u></b>	<b><u>93.994.332.640</u></b>	<b>Total</b>

**b. Utang Pajak**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pajak Pertambahan Nilai	7.121.178.647	5.239.425.335	Value Added Tax
PPN Wajib Pungut	3.092.960.370	3.621.747.648	VAT WAPU
Pajak Penghasilan:			Withholding Tax:
Pasal 4 (2)	234.889.363	684.867.287	Article 4 (2)
Pasal 21	18.849.047.749	6.581.475.585	Article 21
Pasal 22	86.623.545	160.154.526	Article 22
Pasal 23	439.015.613	192.231.701	Article 23
<b>Jumlah</b>	<b><u>29.823.715.287</u></b>	<b><u>16.479.902.082</u></b>	<b>Total</b>

**c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pajak Kini	--	--	Current Tax
Pajak Kini - Penyesuaian dari Tahun Sebelumnya	(3.917.273.825)	--	Current Tax - Prior Year Adjustment
Pajak Tangguhan	(51.315.942.007)	116.866.231.989	Deferred Tax
<b>Jumlah</b>	<b><u>(55.233.215.832)</u></b>	<b><u>116.866.231.989</u></b>	<b>Total</b>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang disajikan dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

**a. Prepaid Taxes**

This account represents tax paid or charged in advance and estimated claim for tax refund with the following details:

**b. Taxes Payable**

**c. Income Tax Benefit (Expense)**

The reconciliation between the profit before income tax as shown in statement of profit or loss and other comprehensive income and the Company's estimated taxable income for the years ended December 31, 2022 and 2021 is as follows:



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**15. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**c. Beban (Penghasilan) Pajak (Lanjutan)**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	209.758.123.150	(606.657.293.931)
<b>Beda Waktu</b>		
Penyusutan Aset Tetap	(41.092.008.413)	(65.205.120.815)
Imbalan Pasca Kerja	(2.808.083.943)	8.047.499.152
Tunjangan Pegawai	135.155.840.181	17.306.328.487
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(85.308.102.032)	138.364.963.805
Beban Umum Lainnya	44.378.900.497	(25.076.345.719)
Aset Hak Guna	1.255.315.258	1.261.941.439
<b>Jumlah Beda Waktu</b>	<b>51.581.861.548</b>	<b>74.699.266.349</b>
<b>Beda Tetap</b>		
Beban Tunjangan Karyawan, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas	11.316.080.265	69.345.614.114
Beban Umum Lainnya	18.656.713.624	10.550.495.894
Beban Pajak	140.336.472	345.124.107
Pendapatan Lain-lain - Bersih	(15.325.833.743)	(4.794.084.801)
<b>Jumlah Beda Tetap</b>	<b>14.787.296.618</b>	<b>75.447.149.314</b>
<b>Laba (Rugi) Fiskal</b>	<b>276.127.281.316</b>	<b>(456.510.878.268)</b>
<b>Taksiran Laba (Rugi) Fiskal (Pembulatan)</b>	<b>276.127.281.000</b>	<b>(456.510.878.000)</b>
Penyesuaian rugi fiskal dan koreksi tahun 2020	8.708.862.135	--
<b>Akumulasi rugi fiskal pada awal tahun</b>	<b>(1.066.006.320.020)</b>	<b>(609.495.442.020)</b>
<b>Akumulasi rugi fiskal pada akhir tahun</b>	<b>(781.170.176.885)</b>	<b>(1.066.006.320.020)</b>
Dikurangi:		
Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka:		
Pasal 23	8.431.166.174	12.920.869.824
<b>Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan</b>	<b>(8.431.166.174)</b>	<b>(12.920.869.824)</b>
Kompensasi Rugi Fiskal		
Taksiran Tagihan Restitusi Pajak	8.431.166.174	12.920.869.824
<b>Jumlah Pajak Penghasilan</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**15. TAXATION (Continued)**

**c. Tax Expense (Income) (Continued)**

<i>Profit (Loss) Before Tax</i>
<b>Temporary Difference</b>
<i>Depreciation of Fixed Assets</i>
<i>Provision for Post-Employment Benefit</i>
<i>Employees Allowance</i>
<i>Impairment Losses on Receivable</i>
<i>Other General Expenses</i>
<i>Right of Use Asset</i>
<b>Total Temporary Difference</b>
<b>Permanent Difference</b>
<i>Allowance for Employee, Boards of Supervisors and Directors</i>
<i>Miscellaneous Expenses</i>
<i>Tax Expense</i>
<i>Other (Income) - Net</i>
<b>Total Permanent Difference</b>
<b>Taxable Income (Loss)</b>
<b>Estimated Taxable Income (Loss) (Rounded)</b>
<i>Tax loss adjustment and prior year correction - 2020</i>
<b>Accumulated tax losses at the beginning of the year</b>
<b>Accumulated tax losses at the end of the year</b>
<i>Deduct:</i>
<i>Prepaid Taxes:</i>
<i>Article 23</i>
<b>Over Payment Of Corporate Income Tax</b>
<i>Estimated Claim for Tax Refund</i>
<b>Total Income Taxes</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**15. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**15. TAXATION (Continued)**

**d. Aset Pajak Tangguhan**

**d. Deferred Tax Assets**

2022				
Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan ke Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income (Loss)	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance
<b>Aset Pajak Tangguhan</b>				
<i>Cadangan Kerugian</i>				
Penurunan Nilai Piutang	157.472.034.506	(18.767.782.447)	--	138.704.252.059
Imbalan Pasca Kerja	24.834.683.934	(617.778.467)	(153.425.780)	24.063.479.687
Aset Hak Guna	310.373.409	276.169.357	--	586.542.766
Tunjangan Pegawai	8.954.919.069	29.734.284.840	--	38.689.203.909
Beban Umum Lainnya	1.856.598.586	9.763.358.109	--	11.619.956.695
Rugi Fiskal	234.521.390.463	(60.748.001.820)	(1.915.949.728)	171.857.438.915
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan</b>				
Penyusutan Aset Tetap	(7.714.825.756)	(9.040.241.851)	--	(16.755.067.607)
<b>Jumlah</b>	<b>420.235.174.211</b>	<b>(49.399.992.279)</b>	<b>(1.915.949.728)</b>	<b>368.765.806.424</b>

**Deferred Tax Assets**  
Allowance for Impairment  
Losses on Receivable  
Post Employment Benefits  
Right of Use Assets  
Employee Allowance  
Other General Expense  
Fiscal Loss

**Deferred Tax Liabilities**  
Fixed Assets Depreciation  
**Total**

2021				
Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan ke Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income (Loss)	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<b>Aset Pajak Tangguhan</b>				
<i>Cadangan Kerugian</i>				
Penurunan Nilai Piutang	127.031.742.469	30.440.292.037	--	157.472.034.506
Imbalan Pasca Kerja	22.742.760.258	1.770.449.813	321.473.863	24.834.683.934
Aset Hak Guna	32.746.292	277.627.117	--	310.373.409
Tunjangan Pegawai	5.147.526.802	3.807.392.267	--	8.954.919.069
Beban Umum Lainnya	7.373.394.644	(5.516.796.058)	--	1.856.598.586
Rugi Fiskal	134.088.997.244	100.432.393.219	--	234.521.390.463
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan</b>				
Penyusutan Aset Tetap	6.630.300.650	(14.345.126.406)	--	(7.714.825.756)
<b>Jumlah</b>	<b>303.047.468.359</b>	<b>116.866.231.989</b>	<b>321.473.863</b>	<b>420.235.174.211</b>

**Deferred Tax Assets**  
Allowance for Impairment  
Losses on Receivable  
Post Employment Benefits  
Right of Use Assets  
Employee Allowance  
Other General Expense  
Fiscal Loss

**Deferred Tax Liabilities**  
Fixed Assets Depreciation  
**Total**

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**15. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**d. Aset Pajak Tangguhan (Lanjutan)**

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, dan pengurangan tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari sebelumnya 10% menjadi 11% efektif mulai dari 1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

**e. Surat Ketetapan Pajak**

Tahun Pajak 2019

Pada tahun 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Kurang Bayar (SKPLB dan KB) PPh Pasal 25/29 Badan dan Kurang Bayar PPN untuk tahun pajak 2019 dengan jumlah total lebih bayar yang dapat direstitusi sebesar Rp21.379.990.551, Perusahaan sudah menerima restitusi atas lebih bayar pajak tersebut sebesar Rp19.724.299.088. Perusahaan telah membukukan Taksiran Restitusi Pajak pada tahun 2019 sebesar Rp26.212.467.439 atas selisih tersebut Perusahaan membukukan sebagai penyesuaian utang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp6.488.168.351.

**15. TAXATION (Continued)**

**d. Deferred Tax Assets (Continued)**

On October 29, 2021, the Government issue Law of the Republic of Indonesia No. 7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic tax payers and business establishments of 22% which will be effective from the fiscal year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements and increase of the value added tax rate from previously 10% to become 11% effective from April 1, 2022 and become 12% no later than January 1, 2025.

**e. Tax Assessment Letter**

Tax Year 2019

In 2021, the Company has received Tax Assessment Letter for Overpayment and Underpayment for fiscal year 2019 from the tax office pertaining Income Tax 25/29 and VAT with resulting net claim totalling to Rp21,379,990,551. In current year, the Company has received related tax refund. The Company has received restitution for the tax overpayment amounted to Rp19,724,299,088. The Company has recorded an Estimated Tax Restitution in 2019 of Rp26,212,467,439 for the differences, Company has recorded an adjustment amounted to Rp6,488,168,351 to VAT payable.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**15. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**e. Surat Ketetapan Pajak (Lanjutan)**

No./ Num.	Jenis Surat/ Tax Letter	Tax Assessment Letters No.	Tanggal Surat/ Date Issued	Periode/ Period	Jumlah/ Total
1	Lebih Bayar PPh 25/29 Overpayment Tax Return Income Tax 25/29	KEP-00128.PPH/WPJ.19/KP.04/2022	11 Agustus 2022/ August 11, 2022	2020	(60.419.293.352)

Pada tahun 2022, Perusahaan menerima Surat Hasil Pembahasan Akhir atas restitusi pajak PPh Pasal 25/29 Badan untuk tahun pajak 2020 dengan hasil rugi menurut pajak sebesar Rp600.786.579.885 dan jumlah total Lebih Bayar yang dapat direstitusi sebesar Rp60.419.293.352. Perusahaan telah membukukan Taksiran Restitusi Pajak pada tahun 2020 sebesar Rp64.336.567.177, atas selisih tersebut Perusahaan membukukan sebagai penyesuaian beban pajak sebesar Rp3.917.273.825.

**15. TAXATION (Continued)**

**e. Tax Assessment Letter (Continued)**

In 2022, the Company received a Letter of Final Discussion on the tax refund for Article 25/29 Corporate Income Tax for the 2020 fiscal year with the result of fiscal loss amounting to Rp600,786,579,885 and the total amount of overpayment which will be refunded amounting to Rp60,419,293,352. The Company has recorded an Estimated Tax Restitution in 2020 of Rp64,336,567,177 and loss from tax refund amounting to Rp3,917,273,825 as an adjustment to tax expense.

**16. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

**a. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek**

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek diakui dan dibukukan pada saat terutang pada karyawan. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek terutama terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun, dan akrual tunjangan rutin lainnya untuk karyawan.

Akun ini terdiri dari:

	2022	2021
Pegawai	172.808.430.572	99.152.727.944
Dewan Pengawas dan Direksi	29.260.027.662	13.450.000.008
<b>Jumlah</b>	<b>202.068.458.234</b>	<b>112.602.727.952</b>

**16. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES**

**a. Short-Term Employee Benefits Liability**

Short-term employee benefits liabilities are recognized and recorded at the time incurred to the employee. Short-term employee benefits liabilities mainly consist of BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pension Plan, and accrual for other fringe benefits for employee.

This account consists of:

Employees  
Board of Supervisors and Directors  
**Total**

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)**

**b. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang**

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2022 dan 2021 yang dihitung dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit* (PUC) oleh Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal dalam laporannya Nomor 22349/LPPNPI/EP/12/2022, tanggal 30 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Penghargaan Purnabakti	54.165.338.812	46.487.125.217
Pengabdian	10.204.961.126	13.858.181.942
Imbalan Pascakerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	--	10.054.614.153
	11.916.667	5.833.334
<b>Jumlah</b>	<b>64.382.216.605</b>	<b>70.405.754.646</b>

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2022	2021
<b>Liabilitas Imbalan Pasca Kerja</b>		
Saldo awal	70.405.754.646	60.177.904.125
Biaya Imbalan Pasti		
Jumlah yang Diakui di Laba Rugi	5.253.996.224	13.984.088.607
Pengukuran Kembali Liabilitas/ Aset Periode Berjalan	(2.923.295.785)	1.461.244.838
Pembayaran Imbalan Kerja Oleh Perusahaan	(8.354.238.480)	(5.217.482.924)
<b>Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Akhir Periode</b>	<b>64.382.216.605</b>	<b>70.405.754.646</b>

**Rincian per Program:**

**a. Penghargaan Purnabakti**

Program Penghargaan Purnabakti yang diberikan Perusahaan kepada karyawan/ Pekerja yang mencapai usia pensiun normal dan Pekerja Meninggal Dunia akan diberikan oleh Perusahaan manfaat berupa emas 22 karat seberat 25 gram dan Dana Wirausaha sebesar Rp25.000.000.

**16. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)**

**b. Long-Term Employee Benefits Liability**

The Company recognized post-employment benefits liability as of December 31, 2022 and 2021 which were calculated using *Projected-Unit-Credit* (PUC) method by independent actuary Enny Diah Awal on its report Number 22349/LPPNPI/EP/12/2022 dated December 30, 2022 with details as follows:

	2022	2021
Pension Award	54.165.338.812	46.487.125.217
Services Award	10.204.961.126	13.858.181.942
Post Employment Benefits Employee Agreement for a Specific Period	--	10.054.614.153
	11.916.667	5.833.334
<b>Total</b>	<b>64.382.216.605</b>	<b>70.405.754.646</b>

The reconciliation of beginning and ending balance of liabilities recognized in the statements of financial position are as follows:

	2022	2021
<b>Post-Employment Benefits Liability</b>		
Beginning Balance	70.405.754.646	60.177.904.125
Defined Benefit Cost		
Amount Recognized in Profit Loss	5.253.996.224	13.984.088.607
Remeasurement on Current Liabilities/ Assets	(2.923.295.785)	1.461.244.838
Payment of Employee Benefits by Company	(8.354.238.480)	(5.217.482.924)
<b>Post-Employment Benefits Liability - End of Period</b>	<b>64.382.216.605</b>	<b>70.405.754.646</b>

**Detail based on program:**

**a. Pension Award**

Pension Award provided by company to employees/workers who reach normal retirement age and death will be provided by pension benefit Company in the form of 22 carat gold weighing 25 grams and Entrepreneurial Funds of Rp25,000,000.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)**

Rincian per Program: (Lanjutan)

**a. Penghargaan Purnabakti (Lanjutan)**

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir penghargaan purnabakti yang diakui adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Penghargaan Purnabakti</b>		
Saldo awal	46.487.125.217	40.811.959.850
Biaya Imbalan Pasti		
Jumlah yang Diakui di		
Laba Rugi	7.993.307.725	6.900.877.610
Pengukuran Kembali Liabilitas/ Aset		
Periode Berjalan	2.225.905.870	2.598.329.695
Pembayaran Imbalan Kerja Oleh		
Entitas	<u>(2.541.000.000)</u>	<u>(3.824.041.938)</u>
<b>Liabilitas yang Diakui Pada Laporan</b>		
<b>    Posisi Keuangan</b>	<b><u>54.165.338.812</u></b>	<b><u>46.487.125.217</u></b>

Rincian beban Penghargaan Purnabakti sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Penghargaan Purnabakti</b>		
Biaya Jasa Kini	4.556.844.209	4.061.182.072
Biaya Bunga	<u>3.436.463.516</u>	<u>2.839.695.538</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>7.993.307.725</u></b>	<b><u>6.900.877.610</u></b>

Keuntungan/kerugian aktuarial yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Penghargaan Purnabakti</b>		
Kerugian Aktuarial yang Belum		
Diakui Awal Periode	13.230.563.598	10.632.233.903
Kerugian Aktuarial		
Bersih Tahun Berjalan-Kewajiban	<u>2.225.905.870</u>	<u>2.598.329.695</u>
<b>Akumulasi Jumlah</b>		
<b>    Pengukuran Kembali</b>	<b><u>15.456.469.468</u></b>	<b><u>13.230.563.598</u></b>

**16. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)**

Detail based on program: (Continued)

**a. Pension Award (Continued)**

The reconciliation of beginning and ending balance of pension award are as follows:

<b>Pension Award</b>
Beginning Balance
Defined Benefit Cost
Amount that Recognized in
Profit Loss
Remeasurement on Current
Liabilities/ Assets
Payment of Employee Benefits by
Entity
<b>Liabilities Recognized in The</b>
<b>Statement of Financial Position</b>

Details of Pension Award is as follows:

<b>Pension Award</b>
Current Service Cost
Interest Cost
<b>Total</b>

Actuarial gain/loss recognized in other comprehensive income are:

<b>Pension Award</b>
Unrealized Actuarial
Loss-Beginning
Current Year Actuarial
Loss - net Liability
<b>Accumulated of</b>
<b>    Remeasurement Amount</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)**

Rincian per Program: (Lanjutan)

**b. Pengabdian**

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa satu kali penghasilan jika Karyawan mencapai masa kerja 25 tahun.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir liabilitas pengabdian yang diakui adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Pengabdian</b>		
Saldo awal	13.858.181.942	13.651.091.488
Biaya Imbalan Pasti		
Jumlah yang Diakui di		
Laba Rugi	(890.267.527)	865.919.445
Pembayaran Imbalan Kerja Oleh Perusahaan	<u>(2.762.953.289)</u>	<u>(658.828.991)</u>
<b>Liabilitas yang Diakui Pada Laporan Posisi Keuangan</b>	<b><u>10.204.961.126</u></b>	<b><u>13.858.181.942</u></b>

Rincian beban Pengabdian sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Pengabdian</b>		
Biaya Jasa Kini	1.138.540.665	1.218.281.747
Biaya Bunga (Keuntungan) / Kerugian Aktuarial	923.276.192	959.160.743
	<u>(2.952.084.384)</u>	<u>(1.311.523.045)</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>(890.267.527)</u></b>	<b><u>865.919.445</u></b>

**c. Imbalan Pasca Kerja**

Ringkasan dari nilai kini liabilitas dan jumlah aset program per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Imbalan Pasca Kerja</b>		
Nilai Kini Liabilitas	9.880.416.767	23.509.916.596
Aset Program	(12.831.574.784)	(13.455.302.443)
Batas atas Aset	2.951.158.017	--
<b>Liabilitas yang diakui</b>	<b><u>--</u></b>	<b><u>10.054.614.153</u></b>

**16. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)**

Detail based on program: (Continued)

**b. Service Award**

The Company provides severance benefits in cases where Employees reach 25 years of working time.

The reconciliation of beginning and ending balance of service award liabilities are as follows:

<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<b>Service Award</b>
	Beginning Balance
	Defined Benefit Cost
	Amount that Recognized in Profit Loss
	Payment of Employee Benefits by Company
	<b>Liabilities Recognized in The Statement of Financial Position</b>

Details of Service Award expenses is as follows:

<u>2022</u>	<u>2021</u>	
		<b>Service Award</b>
		Current Service Cost
		Interest Cost
		Actuarial (Gain)/ Loss
		<b>Total</b>

**c. Post-Employment Benefit**

The summary of the present value of liabilities and its asset program as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

<u>2022</u>	<u>2021</u>	
		<b>Post-employment Benefits</b>
		Present Value of Liabilities
		Asset Program
		The Asset Ceiling
		<b>Liabilities recognized</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)**

Rincian per Program: (Lanjutan)

**c. Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)**

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menghitung beban dan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Data dan Asumsi:</b>		
Biaya Jasa Kini	1.798.762.134	5.821.087.304
Kewajiban Kini - Saldo Awal	10.054.614.153	5.714.852.787
Kewajiban Kini - Saldo Akhir	--	10.054.614.153
Tingkat Diskonto	7,40% per Tahun/ per Year	7,60% per Tahun/ per Year
Tingkat Kenaikan Penghasilan	5% per Tahun/ per Year	8% per Tahun/ per Year
Tingkat Kemungkinan Meninggal	TMI IV - Tahun/ Year 2019	TMI IV - Tahun/ Year 2019
Tingkat Kecacatan	10% dari Mortalitas	of Mortality
Tingkat Kemunduran Diri	3,00% pada usia 20 tahun s.d 30 Tahun 3,00% age 20 until 30 Year	
Harga Emas 22 Karat Per Gram	940.500	860.750
Tingkat Inflasi Harga Emas	9%	9%
Usia Pensiun Normal	58 Tahun/ Year	58 Tahun/ Year

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir liabilitas imbalan pascakerja yang diakui adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Imbalan Pasca Kerja</b>		
Saldo awal	10.054.614.153	5.714.852.787
Biaya Imbalan Pasti		
Jumlah yang Diakui di		
Laba Rugi	(4.081.033.178)	6.211.458.220
Pengukuran Kembali Liabilitas/ Aset		
Periode Berjalan	(2.923.295.785)	(1.137.084.857)
Pembayaran Imbalan Kerja Oleh		
Entitas	(3.050.285.190)	(734.611.997)
<b>Liabilitas yang Diakui Pada</b>		
<b>  Laporan Posisi Keuangan</b>	<u><u>--</u></u>	<u><u>10.054.614.153</u></u>

**16. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)**

Detail based on program: (Continued)

**c. Post-Employment Benefit (Continued)**

The actuarial assumptions used to determine the post-employment benefits liabilities and expenses are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Data and the Assumption:</b>		
Current Service Cost		
Current Liabilities - Beginning Balance		
Current Liabilities - Ending Balance		
Discount Rate		
Rate of Increase in Income		
Mortality Rate		
Disability Rate		
Resignation Rate		
The Price of 22 Carat Gold Per Gram		
Inflation Rate of Gold Prices		
Normal Retirement Age		

The reconciliation of beginning and ending balance of post-employment benefits liabilities are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Post-employment Benefits</b>		
Beginning Balance		
Defined Benefit Cost		
Amount that is Recognized in		
Profit Loss		
Remeasurement on Current		
Liabilities/ Assets		
Payment of Employee Benefits by		
Entity		
<b>Liabilities Recognized in The</b>		
<b>  Statement of Financial Position</b>	<u><u>--</u></u>	<u><u>10.054.614.153</u></u>



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)**

Rincian per Program: (Lanjutan)

Rincian beban Imbalan Pasca Kerja  
sebagai berikut:

**c. Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)**

	2022	2021
<b>Imbalan Pasca Kerja</b>		
Biaya Jasa Kini	1.798.762.134	5.821.087.304
Biaya Bunga	639.710.367	390.370.916
Biaya Jasa Lalu	(6.519.505.679)	--
<b>Jumlah</b>	<b>(4.081.033.178)</b>	<b>6.211.458.220</b>

Keuntungan/kerugian aktuarial yang diakui  
dalam penghasilan komprehensif lain  
adalah:

	2022	2021
<b>Imbalan Pasca Kerja</b>		
Kerugian Aktuarial yang Belum Diakui Awal Periode	22.480.239.152	23.617.324.009
(Keuntungan)/Kerugian Aktuarial Bersih Tahun Berjalan-Kewajiban	(2.923.295.785)	(1.137.084.857)
<b>Akumulasi Jumlah Pengukuran Kembali</b>	<b>19.556.943.367</b>	<b>22.480.239.152</b>

**d. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu**

Perusahaan memberikan kompensasi  
kepada Karyawan dengan Perjanjian Kerja  
Waktu Tertentu sebesar masa kerja dibagi  
12 dikalikan dengan 1 bulan upah.

	2022	2021
<b>Perjanjian Kerja Waktu Tertentu</b>		
Saldo awal	5.833.334	--
Biaya Imbalan Pasti Jumlah yang Diakui di Laba Rugi	6.083.333	5.833.334
<b>Liabilitas yang Diakui Pada Laporan Posisi Keuangan</b>	<b>11.916.667</b>	<b>5.833.334</b>

**16. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES  
(Continued)**

Detail based on program: (Continued)

Details of Post-employment Benefit  
expenses is as follows:

**c. Post-Employment Benefit (Continued)**

	2022	2021
<b>Post-employment Benefits</b>		
Current Service Cost	1.798.762.134	5.821.087.304
Interest Cost	639.710.367	390.370.916
Past Service Cost	(6.519.505.679)	--
<b>Total</b>	<b>(4.081.033.178)</b>	<b>6.211.458.220</b>

Actuarial gain/loss recognized in other  
comprehensive income are:

	2022	2021
<b>Post-employment Benefits</b>		
Unrealized Actuarial Loss-Beginning	22.480.239.152	23.617.324.009
Current Year Actuarial (Gain)/Loss - net Liability	(2.923.295.785)	(1.137.084.857)
<b>Accumulation of Remeasurement Amount</b>	<b>19.556.943.367</b>	<b>22.480.239.152</b>

**d. Employee Agreement for a Specific  
Period**

The Company provides compensation to  
Employees with a Specific Time Work  
Agreement in the amount of years of  
service divided by 12 multiplied by 1  
month's wages.

	2022	2021
<b>Employee Agreement for a Specific Period</b>		
Beginning Balance	5.833.334	--
Defined Benefit Cost Amount that Recognized in Profit Loss	6.083.333	5.833.334
<b>Liabilities Recognized in The Statement of Financial Position</b>	<b>11.916.667</b>	<b>5.833.334</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)**

**d. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  
(Lanjutan)**

Rekonsiliasi beban Imbalan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Imbalan Pasca Kerja</b>		
Biaya Jasa Kini	6.083.333	4.166.666
Biaya Jasa Lalu	--	1.666.668
<b>Jumlah</b>	<b><u>6.083.333</u></b>	<b><u>5.833.334</u></b>

**Risiko Tingkat Suku Bunga**

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi pemerintah. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

**Risiko Gaji**

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

**16. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES  
(Continued)**

**d. Employee Agreement for a Specific Period (Continued)**

Reconciliation of Employee Agreement for a Specific Period expenses is as follows:

<b>Post-employment Benefits</b>
Current Service Cost
Past-Service Service Cost
<b>Total</b>

**Interest Risk**

The present value of the defined benefit liabilities is calculated using a discount rate determined by reference to yields on government bonds. A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

**Salary Risk**

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)**

**16. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES  
(Continued)**

**Analisa Sensitivitas**

**Sensitivity Analysis**

	<b>2022</b>	
Analisa Sensitivitas Tingkat Diskonto		<i>Discount Rate Sensitivity Analysis</i>
Jika Tingkat +1,00%	65.966.651.128	<i>If Rate +1,00%</i>
Jika Tingkat -1,00%	84.344.139.444	<i>If Rate -1,00%</i>
Analisa Sensitivitas Kenaikan Gaji		<i>Salary Increment Sensitivity Analysis</i>
Jika Tingkat +1,00%	75.728.118.123	<i>If Rate +1,00%</i>
Jika Tingkat -1,00%	72.939.568.450	<i>If Rate -1,00%</i>
	<b>2021</b>	
Analisa Sensitivitas Tingkat Diskonto		<i>Discount Rate Sensitivity Analysis</i>
Jika Tingkat +1,00%	75.620.711.975	<i>If Rate +1,00%</i>
Jika Tingkat -1,00%	93.809.000.828	<i>If Rate -1,00%</i>
Analisa Sensitivitas Kenaikan Gaji		<i>Salary Increment Sensitivity Analysis</i>
Jika Tingkat +1,00%	94.219.608.971	<i>If Rate +1,00%</i>
Jika Tingkat -1,00%	75.073.129.540	<i>If Rate -1,00%</i>

Perkiraan jumlah manfaat imbalan kerja yang akan jatuh tempo sesuai dengan rata-rata durasi tertimbang adalah sebagai berikut:

*Expected maturity analysis of undiscounted future cashflows are as follows:*

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	Manfaat Jatuh Tempo/ <i>Defined Benefit</i>	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ <i>Present Value of Liabilities</i>	Manfaat Jatuh Tempo/ <i>Defined Benefit</i>	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ <i>Present Value of Liabilities</i>
	Rp	Rp	Rp	Rp
Jangka Waktu/ <i>Time Periode</i>				
- < 1	4.662.056.477	4.426.321.711	9.078.772.722	8.503.264.887
- 1 < 2	5.264.466.220	4.391.335.237	8.060.688.247	6.481.474.260
- 2 < 3	6.424.596.845	4.719.245.699	8.331.489.776	5.894.166.699
- 3 < 4	6.381.477.682	4.051.879.280	10.366.355.508	6.335.979.134
- 4 < 5	4.523.329.212	2.502.163.705	11.730.458.653	6.038.966.778
- > 5	875.203.250.709	54.159.771.073	867.165.282.208	50.601.371.995

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Pihak Berelasi</b>		
Pendapatan Sewa	540.266.133	221.606.482
<b>Pihak Ketiga</b>		
PJNP Domestik	8.307.334.679	7.045.716.298
PJNP Internasional	14.956.404.510	9.041.517.987
<b>Sub Jumlah</b>	<u>23.263.739.189</u>	<u>16.087.234.285</u>
<b>Jumlah</b>	<u>23.804.005.322</u>	<u>16.308.840.767</u>

Rincian atas pendapatan diterima di muka berdasarkan mata uang:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Rupiah	13.673.743.997	9.197.584.255
Dollar Amerika Serikat	10.130.261.325	7.111.256.512
<b>Jumlah</b>	<u>23.804.005.322</u>	<u>16.308.840.767</u>

**17. UNEARNED REVENUES**

This account consists of:

**Related Parties**  
Rent Income

**Third Parties**  
PJNP Domestic  
PJNP International

**Sub Total**

**Total**

Details of unearned revenue based on currency:

**Rupiah**  
**US Dollar**  
**Total**

**18. LIABILITAS SEWA**

Rincian atas liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Liabilitas Sewa</b>		
Bagian Jangka Pendek	642.908.747	1.034.314.101
Bagian Jangka Panjang	1.248.986.792	2.733.956.641
<b>Jumlah</b>	<u>1.891.895.539</u>	<u>3.768.270.742</u>

**18. LEASE LIABILITIES**

Details of lease liabilities are as follows:

**Lease Liabilities**  
Short Term Portion  
Long Term Portion  
**Total**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Liabilitas Sewa</b>		
Jumlah Pembayaran Sewa Masa Depan	2.033.473.405	3.948.533.636
Dikurangi Beban Bunga di Masa Depan	(141.577.866)	(180.262.894)
<b>Nilai Kini Liabilitas Sewa</b>	<u>1.891.895.539</u>	<u>3.768.270.742</u>
Dikurangi:		
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	642.908.747	1.034.314.101
<b>Bagian jangka panjang</b>	<u>1.248.986.792</u>	<u>2.733.956.641</u>

**Lease Liabilities**  
Future Rent Payment Amount  
Less Interest Expense in the Future  
**Present Value of Lease Liability**  
Deducted by:

**Maturity in 1 year**  
**Long term portion**

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. LIABILITAS SEWA (Lanjutan)**

Tidak ada batasan signifikan yang diberlakukan oleh perjanjian sewa antara lessor dan Perusahaan atas penggunaan aset atau pemeliharaan kinerja keuangan tertentu.

Eksposur maksimum risiko likuiditas pada akhir periode pelaporan adalah nilai tercatat dari setiap kelas liabilitas sewa yang diungkapkan pada Catatan 30.

**18. LEASE LIABILITIES (Continued)**

*There is no significant restriction imposed by lease arrangements between lessor and the Company on use of the assets or maintenance of certain financial performance.*

*The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of lease liabilities is disclosed in Note 30.*

**19. MODAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

Akun ini merupakan modal yang terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo Awal	2.446.042.977.444	2.446.042.977.444
Penambahan Modal Pemerintah Republik Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	--	--
<b>Saldo Akhir</b>	<b><u>2.446.042.977.444</u></b>	<b><u>2.446.042.977.444</u></b>

**Modal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2012 menyatakan besarnya modal Perusahaan pada saat pendirian sebesar Rp97.952.690.300, yang berasal dari Pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dan 2011 yang berbentuk Peralatan Navigasi Udara.

Pada tanggal 20 April 2017, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2017 yang menyatakan penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan, dengan nilai sebesar Rp375.512.760.000, yang sebelumnya di catat sebagai Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya (BPYBDS) oleh Perusahaan.

**19. THE REPUBLIC OF INDONESIA GOVERNMENT CAPITAL**

Capital account details are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo Awal	2.446.042.977.444	2.446.042.977.444
Penambahan Modal Pemerintah Republik Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	--	--
<b>Saldo Akhir</b>	<b><u>2.446.042.977.444</u></b>	<b><u>2.446.042.977.444</u></b>

**Capital**

*Under Indonesian Government Regulation number 77 of 2012 states the amount of capital the Company at the moment is the establishment of Rp97,952,690,300, which is derived from the diversion of State at the Ministry of Transportation procured sourced of funds from the State Budget for Fiscal Year 2010 and 2011, Air Navigation Equipment.*

*On April 20, 2017, the Government issued Government Regulation number 15 of 2017 stating the addition of capital participation of the Republic of Indonesia into the Company's capital, amounting to Rp375,512,760,000, previously recorded as Government Assistance not yet determined (BPYBDS) by the Company.*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. MODAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (Lanjutan)**

Pada tanggal 27 September 2018, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2018 yang menyatakan Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) untuk dijadikan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perum LPPNPI dengan nilai Rp1.067.885.016.812 yang sebelumnya dicatat sebagai Modal Disetor Lainnya - Pengalihan Aset dengan nilai Rp549.216.004.386.

Pada tanggal 6 November 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Perum LPPNPI dengan nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp904.692.510.332.

**19. THE REPUBLIC OF INDONESIA GOVERNMENT CAPITAL (Continued)**

On September 27, 2018, the Government issued Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia Number 46 of 2018 which stated the Reduction of the State Capital Participation of the Republic of Indonesia in the PT Angkasa Pura I (Persero) and PT Angkasa Pura II (Persero) to become an Addition of State Capital of the Republic of Indonesia to Perum LPPNPI with a value of Rp1,067,885,016,812 that was previously recorded as Other Paid Up Capital - Transfer of assets with a value of Rp549,216,004,386.

On November 6, 2020, the Government issued Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia Number 65 of 2020 stated additional participation of government capital of the Republic of Indonesia to Perum LPPNPI with an additional value of government capital participation of Rp904,692,510,332.

**20. TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Akun ini terdiri dari:

**20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL**

This account is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pengampunan Pajak (Catatan 11)	2.368.191.425	2.368.191.425	Tax Amnesty (Note 11)
Selisih Nilai Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	<u>(518.563.291.334)</u>	<u>(518.563.291.334)</u>	Difference in Value of Transactions Between Business Combinations of Entities Under Common Control
<b>Jumlah</b>	<b><u>(516.195.099.909)</u></b>	<b><u>(516.195.099.909)</u></b>	<b>Total</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan)**

Pada tanggal 3 November 2016, Perusahaan berpartisipasi dalam program Pengampunan Pajak dengan dasar pengenaan uang tebusan sebesar Rp2.368.191.425 dan telah membayarkan uang tebusan sebesar Rp71.045.743. Pada tanggal 22 November 2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dengan Nomor: KET1303/PP/WPJ.19/2016 yang menerangkan bahwa Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 15 November 2016.

Perusahaan menerapkan PSAK 38 dalam mencatat Selisih Nilai Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali sebesar Rp518.563.291.334 yang merupakan selisih dari Nilai Wajar Aset Kenavigasian Ex PT Angkasa Pura I dan II berdasarkan PP No.46/2018 sebesar Rp1.067.885.016.811 dengan Nilai Buku berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor BA.445/KU.21/2013/PD-B dan Nomor BAC.06.04/00/09/2013/869 sebesar Rp549.321.725.477.

**21. SALDO LABA YANG DICADANGKAN**

Mutasi saldo laba yang dicadangkan adalah sebagai berikut:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Saldo Awal	3.126.575.884.905	3.126.575.884.905
Pembentukan Cadangan	--	--
<b>Saldo Akhir</b>	<b>3.126.575.884.905</b>	<b>3.126.575.884.905</b>

**20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (Continued)**

On November 3, 2016, the Company participated in the Tax Amnesty program on the basis of a amnesty payment of Rp2,368,191,425 and paid a ransom of Rp71,045,743. On November 22, 2016, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia issued a Tax Amnesty Certificate with Number: KET-1303/PP/ WPJ.19/2016 stating that the Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia had submitted a Statement of Assets for Tax Amnesty that had been received by Tax Office on November 15, 2016.

The Company applied SFAS 38 in recording Difference in Transaction Value of Combined Business Entities under Common Control amounting to Rp518,563,291,334 which is the difference between the Fair Value of Navigation Assets Ex PT Angkasa Pura I and II based on PP No.46/2018 amounting to Rp1,067,885,016,811 with Book Value based on the Official Report on the Handover of Assets Number BA.445 / KU.21 / 2013 / PD-B and BAC.06.04 / 00/09/2013/869 amounting to Rp549,321,725,477.

**21. RETAINED EARNING APPROPRIATED TO GENERAL RESERVES**

The movement of retained earning appropriated to general reserves are as follows:

Beginning Balance  
Reclassification Reserves  
Ending Balance

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. SALDO LABA YANG DICADANGKAN**  
(Lanjutan)

Berdasarkan surat nomor S-491/MBU/07/2020, tanggal 13 Juli 2020 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perum LPPNPI Tahun Buku 2019, menyatakan bahwa penggunaan laba bersih tahun buku 2019 sebesar Rp500.175.128.076 seluruhnya untuk Cadangan.

**21. RETAINED EARNING APPROPRIATED TO GENERAL RESERVES** (Continued)

Based on letter number S-491/MBU/07/2020, dated July 13, 2020 concerning Approval of Annual Reports and Financial Statements of Perum LPPNPI for the Year 2019, states that the use of net income for the financial year 2019 is Rp500,175,128,076 for Reserves.

**22. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA**

Merupakan komponen penghasilan komprehensif lain, dengan uraian:

**22. OTHER COMPONENT OF EQUITY**

A component of other comprehensive income, with the description as follows:

	2022	2021	
Saldo Awal	(27.206.896.428)	(26.067.125.454)	Beginning Balance
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja (Catatan 16)	543.964.134	(1.139.770.974)	Items that Will Not be Reclassified to Profit or Loss: Remeasurement of Employment Benefit Liabilities (Note 16)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>(26.662.932.294)</b>	<b>(27.206.896.428)</b>	<b>Ending Balance</b>

**23. PENDAPATAN USAHA**

Akun ini terdiri dari:

**23. OPERATING REVENUES**

This account consists of:

	2022	2021	
<b>Jasa Pelayanan Penerbangan Domestik</b>			<b>Air Navigation Services Domestic</b>
Terjadwal	697.874.978.254	539.995.771.549	Scheduled
Tidak Terjadwal	18.210.839.973	19.772.004.511	Unscheduled
<b>Internasional</b>			<b>International</b>
Terjadwal	423.541.568.741	164.202.104.868	Scheduled
Tidak Terjadwal	32.676.949.581	12.582.201.782	Unscheduled
<b>Lintas</b>			<b>Overflying</b>
Terjadwal	810.135.397.742	444.247.002.567	Scheduled
<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.982.439.734.291</b>	<b>1.180.799.085.277</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Jasa Pelayanan Terminal</b>			<b>Terminal Navigation Services</b>
Jasa TNC Domestik	183.919.284.208	137.527.080.131	Domestic
Jasa TNC Internasional	65.118.654.988	29.194.126.698	International
<b>Sub Jumlah</b>	<b>249.037.939.196</b>	<b>166.721.206.829</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.231.477.673.487</b>	<b>1.347.520.292.106</b>	<b>Total</b>



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)**

Jasa pelayanan terminal merupakan jasa yang dikenakan atas pelayanan navigasi penerbangan dalam area 20 Km cakupan pelayanan terhadap pesawat udara yang melakukan pendaratan di bandar udara atau *aerodrome*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KP 853 Tahun 2018, tanggal 25 Mei 2018, terdapat kenaikan tarif penerbangan dalam negeri sebagai berikut:

- 1) Sejak 30 hari peraturan ini terbit tarif penerbangan dalam negeri dari Rp3.000 per *route unit* menjadi Rp4.000 per *route unit*.
- 2) Sejak 120 hari peraturan ini terbit tarif penerbangan dalam negeri dari Rp4.000 per *route unit* menjadi Rp5.000 per *route unit*.
- 3) Sejak 210 hari peraturan ini terbit tarif penerbangan dalam negeri dari Rp5.000 per *route unit* menjadi Rp6.000 per *route unit*.
- 4) Sejak 01 Januari 2019, tarif penerbangan dalam negeri sebesar Rp7.000 per *route unit*.

Tarif layanan jasa navigasi penerbangan dalam negeri yang berlaku tahun 2019 mengacu kepada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 63 Tahun 2019, tanggal 14 Maret 2019, menetapkan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan, dimana terdapat penundaan tarif, untuk tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019 menggunakan tarif sebesar Rp6.000 per *route unit*, dan mulai 1 Juli 2019 dan seterusnya menggunakan tarif sebesar Rp7.000 per *route unit*.

**23. OPERATING REVENUES (Continued)**

*Terminal navigation services are aeronautical navigation services to customers within 20 Km of service coverage charged to any airline landed on the aerodrome on all over Indonesia.*

*Based on the Minister of Transportation Regulation No. KP 853 2018, on May 25, 2018, there were increased in domestic flight fares as follows:*

- 1) *Effectively 30 days after the date of issuance of this regulation, domestic flight fares increased from Rp3,000 per route unit to Rp4,000 per route unit.*
- 2) *Effectively 120 days after the date of issuance of this regulation, domestic flight fares increased from Rp4,000 per route unit to Rp5,000 per route unit.*
- 3) *Effectively 210 days after the date of issuance of this regulation, domestic flight fares increased from Rp5,000 per route unit to Rp6,000 per route unit.*
- 4) *Effective from January 1, 2019, domestic flight fares are Rp7,000 per route unit.*

*The rate for domestic flight navigation services in 2019 refers to the Decree of the Minister of Transportation No. KM 63 Year 2019, dated March 14, 2019, concerning the Cost of Flight Navigation Services, where there is a delay in tariff increases, for January 1 to June 30, 2019 uses a tariff of Rp6,000 per route unit, and from July 1, 2019 onwards, a tariff of Rp7,000 per route unit.*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**24. BEBAN PEGAWAI**

Akun ini terdiri dari:

**24. EMPLOYEE EXPENSES**

This account is composed of the following:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Gaji, Upah, dan Insentif	577.620.376.239	587.425.297.528	Salaries, Wages, and Incentives
Pajak Penghasilan	126.571.946.532	95.499.603.791	Income Tax
Tunjangan Kinerja	106.353.071.257	--	Performance Allowance
Tunjangan Profesi	100.570.364.917	77.723.956.080	Professional Allowance
JHT (Jaminan Hari Tua)			JHT (Pension Guarantee)
Taspen Life	84.338.694.509	83.874.977.696	Taspen Life
Pengobatan Karyawan	80.539.078.251	78.538.059.333	Employee Medication
Tunjangan Perumahan	63.323.839.484	51.630.533.472	Housing Allowance
Tunjangan Jasa Produksi	48.620.248.727	--	Production Service Allowance
Tunjangan Hari Raya	47.291.757.720	48.050.264.760	Festive Allowance
Tunjangan Kesejahteraan			
Keluarga	42.666.176.416	34.997.931.298	Staff Welfare
Tunjangan Cuti	42.477.393.517	47.697.283.455	Leave Allowance
Jamsostek	40.155.166.908	39.461.750.271	Jamsostek
Tunjangan Transportasi	34.867.942.750	33.552.675.000	Transportation Allowance
Tunjangan Mobilitas	31.433.250.000	27.950.650.000	Mobility Allowance
Tunjangan Uang Makan	26.465.020.286	23.347.950.000	Meals Allowance
Seragam	17.328.570.190	--	Uniform
Tunjangan Pengabdian	7.103.040.189	7.782.302.520	Services Allowance
Tunjangan Staf	6.764.356.130	4.694.962.392	Staff Allowance
Sumbangan	6.426.709.649	7.309.017.669	Donations
Tunjangan Kemahalan	5.619.400.000	6.022.650.000	Cost of Living Allowance
Tunjangan Komunikasi	4.964.550.000	5.333.450.000	Communication Allowance
Dana Pensiun	(4.081.033.178)	5.482.679.557	Pension Fund Benefits
<b>Jumlah</b>	<b>1.497.419.920.493</b>	<b>1.266.375.994.822</b>	<b>Total</b>

Pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah karyawan sebanyak 75 orang, yang terdiri dari karyawan Perum LPPNPI sebanyak 12 orang, 31 orang yang ditahun sebelumnya dari perbantuan Pegawai Negeri Sipil, 4 orang yang ditahun sebelumnya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, 25 orang yang ditahun sebelumnya dari Peserta Magang, 1 orang yang ditahun sebelumnya dari Perbantuan PT Angkasa Pura I, 1 orang yang ditahun sebelumnya dari Perbantuan PT Angkasa Pura II dan 1 orang yang ditahun sebelumnya dari Penugasan.

In 2022 there is a decrease of 75 in the Company's number of employees, which consists of 12 employees from Perum LPPNPI, 31 employees previously from assistance of Civil Servants, 4 employees previously from Specific Time Work Agreements, 25 employees previously from Internship Program, 1 employee previously from Assistance of PT Angkasa Pura I, 1 employee previously from Assistance of PT Angkasa Pura II and 1 employee previously from Assignment.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**24. BEBAN PEGAWAI (Lanjutan)**

Pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah karyawan sebanyak 100 orang, yang terdiri dari karyawan Perum LPPNPI sebanyak 48 orang, 47 orang yang ditahun sebelumnya dari perbantuan Pegawai Negeri Sipil, 8 orang yang ditahun sebelumnya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, 4 orang dari gugus tugas, serta terjadi peningkatan Peserta Magang sebanyak 3 orang, dari penugasan 4 orang

Sejak tahun 2016 Perum LPPNPI mengikuti program TASPEN Life bagi Karyawan Perum LPPNPI monostatus (bukan karyawan yang diperbantukan), dengan dasar hukum Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 88 dan 111.

**24. EMPLOYEE EXPENSES (Continued)**

In 2021 there is a decrease of 100 in the Company's number of employees, which consists of 48 employees from Perum LPPNPI, 47 employees previously from assistance of Civil Servants, 8 employees previously from Specific Time Work Agreements, 4 person from task forces, and an increase in Internship Participants by 3 person, from assignment 4 person.

Since 2016, Perum LPPNPI has maintained TASPEN Life program for employees Perum LPPNPI monostatus (not an employee seconded), in accordance with the Law No. 13 of 2003 on labor chapters 88 and 111.

**25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Akun ini terdiri dari:

**25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

This account is composed of the following:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Gaji dan Tunjangan dan Dewan Pengawas dan Direksi	61.290.345.244	42.555.059.040	Provision (Recovery) for Salaries, Allowance and Supervisory Board and Directors
Outsourcing	32.786.786.877	43.390.160.003	Outsourcing
Pajak	20.667.631.101	1.435.428.915	Taxes
Perjalanan Dinas	21.239.124.628	8.807.607.046	Business Trip
Diklat	17.524.810.052	15.361.379.007	Training
Rapat	9.336.464.367	4.560.536.192	Meeting
Honor	7.419.748.465	7.835.333.436	Salary
Tenaga Ahli	6.803.366.522	4.283.349.390	Professional
Sewa	5.622.523.709	4.799.965.647	Rent
Asuransi:			Insurance:
Asuransi Liabilitas	4.715.500.003	4.656.875.000	Liabilities Insurance
Asuransi Aset	3.299.681.330	2.940.176.394	Assets Insurance
Iklan dan Promosi	2.822.093.047	1.720.506.951	Advertising and Promotion
Cadangan (Pemulihan) Kerugian			Impairment Losses
Penurunan Nilai Piutang	(85.308.102.033)	138.364.963.804	(Recovery) on Trade Receivables
Lain-lain	7.017.956.213	5.162.677.824	Others
<b>Jumlah</b>	<b><u>115.237.929.525</u></b>	<b><u>285.874.018.649</u></b>	<b>Total</b>

Beban umum lain-lain merupakan beban olahraga, beban bimbingan rohani, beban pengiriman, dan beban umum lainnya.

Others consist of sports expenses, spiritual guidance expenses, shipping expenses, and other general expenses.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**26. BEBAN USAHA LAINNYA**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Penyusutan (Catatan 10)	236.202.942.218	230.140.373.482	Depreciation (Note 10)
Utilitas	101.636.875.122	104.556.885.319	Utilities
Pemeliharaan	92.229.603.174	71.355.704.614	Maintenance
Perlengkapan	16.572.851.867	16.060.194.028	Supplies
<b>Jumlah</b>	<b>446.642.272.381</b>	<b>422.113.157.443</b>	<b>Total</b>

**26. OTHER OPERATING EXPENSES**

This account is as follows:

**27. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN**

Rincian pendapatan (beban) lain-lain sebagai berikut:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>Other Income</b>
Keuntungan			Unrealized Gain on
Selisih Kurs	21.315.959.090	1.843.299.078	Foreign Exchange
Hasil dari Restrukturisasi	21.273.431.565	64.372.100	Restructuring Income
Pendapatan Optimalisasi			Income from Optimization
Pemanfaatan Aset	632.523.339	1.390.876.542	of Asset Utilization
Denda Kontrak	145.382.724	3.577.026.065	Contract's Penalty
Lainnya	6.083.569.611	20.013.150.773	Others
<b>Sub Jumlah</b>	<b>49.450.866.329</b>	<b>26.888.724.558</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Pendapatan Bunga</b>			<b>Interest Income</b>
Deposito Berjangka	24.510.948.191	33.727.595.539	Time Deposit
Jasa Giro	867.981.791	818.059.586	Checking Account
<b>Sub Jumlah</b>	<b>25.378.929.982</b>	<b>34.545.655.125</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Jumlah</b>	<b>74.829.796.311</b>	<b>61.434.379.683</b>	<b>Total</b>

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
<b>Beban Lain-lain</b>			<b>Other Expenses</b>
Kerugian atas Hasil			Restructuring Loss
Restrukturisasi	(31.959.051.143)	(24.613.059.599)	Social and Environmental
Tanggung Jawab Sosial			Sustainability (TJSL)
dan Lingkungan (TJSL)	(4.027.470.467)	(6.019.296.603)	TJSL Operational
Operasional TJSL	(472.113.330)	(180.373.126)	Bank Administration
Administrasi bank	(292.441.797)	(277.045.538)	Interest Expense on
Beban Bunga			Lease Liabilities
Liabilitas Sewa	(274.978.897)	(492.820.512)	Others
Lainnya	(223.168.615)	(9.666.199.428)	
<b>Sub Jumlah</b>	<b>(37.249.224.249)</b>	<b>(41.248.794.806)</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Jumlah</b>	<b>37.580.572.062</b>	<b>20.185.584.877</b>	<b>Total</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**27. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN**  
(Lanjutan)

Pendapatan lain-lain pada tahun 2022 sebesar Rp6.083.569.611 sebagian besar merupakan pendapatan atas klaim asuransi sebesar Rp2.975.044.216.

Pembayaran kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan seperti kegiatan CSR Perusahaan. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah disalurkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp4.027.470.467.

Pendapatan lain-lain pada tahun 2021 sebesar Rp20.013.150.773 sebagian besar merupakan pendapatan atas koreksi PPN Masukan, Piutang PPN Wapu, dan PPN Keluaran sebesar Rp9.588.668.904, rekonsiliasi penyelesaian saldo titipan pegawai sebesar Rp4.942.516.589 dan koreksi utang pajak penghasilan pasal 21 dan 23 sebesar Rp1.770.573.424.

Pembayaran kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan seperti kegiatan CSR Perusahaan. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah disalurkan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp6.019.296.603.

Beban lain-lain pada tahun 2021 sebesar Rp9.666.199.428 sebagian besar merupakan beban penghapusan Aset Dalam Penyelesaian yang tidak dilanjutkan sebesar Rp8.721.214.060.

**27. OTHER INCOME (EXPENSES)** (Continued)

*Other income in 2022 amounting to Rp6,083,569,611 primarily consists of insurance claim amounting to Rp2,975,044,216.*

*The payment for the Social and Environmental Sustainability is carried out as a Corporate CSR activity. The Social and Environmental Sustainability distributed in 2022 amounting to Rp4,027,470,467.*

*Other income in 2021 amounting to Rp20,013,150,773 primarily consists of income arising from the correction of VAT IN, VAT WAPU, and VAT OUT amounting to Rp9,588,668,904, reconciliation of the settlement of employee deposits amounting to Rp4,942,516,589 and correction of tax income payable article 21 and 23 amounting to Rp1,770,573,424.*

*The payment for the Social and Environmental Sustainability is carried out as a Corporate CSR activity. The Social and Environmental Sustainability distributed in 2021 amounting to Rp6,019,296,603.*

*Other expense in 2021 amounting to Rp9,666,199,428 primarily consists of writeoff Assets Under Construction amounting to Rp8,721,214,060.*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

Saldo yang berhubungan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal laporan keuangan adalah sebagai berikut:

**28. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

Balances with related parties at the reporting date of financial statements is as follows:

	2022	2021	
<b>Aset</b>			<b>Assets</b>
<b>Setara Kas (Catatan 4)</b>			<b>Cash Equivalents (Note 4)</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.363.902.983	11.995.084.505	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.473.769.531	10.103.458.018	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.350.434.507	19.485.724.892	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia (d/h PT Bank Syariah Mandiri)	3.307.921.980	3.788.825	PT Bank Syariah Indonesia (formerly PT Bank Syariah Mandiri)
<b>Sub Jumlah</b>	<b>37.496.029.001</b>	<b>41.588.056.240</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Dolar Amerika Serikat</b>			<b>United States Dollar</b>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	159.678.341.520	58.139.482.125	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	31.494.029.925	16.078.406.800	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	28.880.235.380	1.318.187.771	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
<b>Sub Jumlah</b>	<b>220.052.606.825</b>	<b>75.536.076.696</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Deposito</b>			<b>Deposits</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	519.000.000.000	399.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	380.000.000.000	330.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia	255.000.000.000	--	PT Bank Syariah Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	200.000.000.000	175.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sub Jumlah Deposito dalam Rupiah	1.354.000.000.000	904.000.000.000	Sub Total Deposits in Rupiah
<b>Dolar Amerika Serikat</b>			<b>United States Dollar</b>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	71.345.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<b>Sub Jumlah Deposito</b>	<b>1.354.000.000.000</b>	<b>975.345.000.000</b>	<b>Sub Total Deposits</b>
<b>Jumlah Setara Kas</b>	<b>1.611.548.635.826</b>	<b>1.092.469.132.936</b>	<b>Total Cash Equivalents</b>
<b>Persentasi dari Jumlah Aset</b>	<b>32,61%</b>	<b>23,61%</b>	<b>Percentage from Total Assets</b>
<b>Piutang Usaha (Catatan 5)</b>			<b>Trade Receivables (Note 5)</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	417.573.052.077	180.158.240.372	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Citilink Indonesia	209.682.536.180	250.561.884.975	PT Citilink Indonesia
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	2.688.774.800	2.688.774.800	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Gapura Angkasa	--	99.980.232	PT Gapura Angkasa
Merpati Pilot School	--	82.441.391	Merpati Pilot School
<b>Sub Jumlah</b>	<b>629.944.363.057</b>	<b>433.591.321.770</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Dolar Amerika Serikat</b>			<b>United States Dollar</b>
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	2.021.710.174	1.802.449.533	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Citilink Indonesia	34.498.392	184.037.980	PT Citilink Indonesia
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	166.224.129	10.808.044	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Merpati Pilot School	--	46.957.065	Merpati Pilot School
<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.222.432.695</b>	<b>2.044.252.622</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Jumlah Piutang Usaha</b>	<b>632.166.795.752</b>	<b>435.635.574.392</b>	<b>Total Trade Receivables</b>
<b>Persentasi dari Jumlah Aset</b>	<b>12,79%</b>	<b>9,41%</b>	<b>Percentage from Total Assets</b>
<b>Piutang Lain-lain (Catatan 7)</b>			<b>Other Receivables (Note 7)</b>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.815.000	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>1.815.000</b>	<b>--</b>	<b>Total</b>
<b>Persentasi dari Jumlah Aset</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>Percentage from Total Assets</b>
<b>Liabilitas</b>			<b>Liability</b>
<b>Utang Usaha (Catatan 12)</b>			<b>Trade Payable (Note 12)</b>
Pihak Berelasi	1.931.290.517	825.992.739	Related Parties
<b>Persentase dari Jumlah Liabilitas</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,14%</b>	<b>Percentage from Total Liabilities</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)**

**28. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)**

	2022	2021	
<b>Pendapatan Diterima di Muka (Catatan 17)</b>			<b>Unearned Revenues (Note 17)</b>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	188.440.708	77.095.730	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	120.858.925	60.252.864	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Selular	160.377.441	--	PT Telekomunikasi Selular
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	63.636.364	24.242.425	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	6.952.695	--	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>540.266.133</b>	<b>161.591.019</b>	<b>Total</b>
<b>Persentase dari Jumlah Liabilitas</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,03%</b>	<b>Percentage from Total Liabilities</b>
<b>Liabilitas Lain-lain (Catatan 14)</b>			<b>Other Liabilities (Note 14)</b>
Kementerian Perhubungan (PNBP PJP)	279.523.686.650	237.400.563.581	Ministry of Transportation (PNBP PJP)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (PNBP PJP)	73.150.421.514	57.972.928.738	Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency (PNBP PJP)
<b>Jumlah</b>	<b>352.674.108.164</b>	<b>295.373.492.319</b>	<b>Total</b>
<b>Persentase dari Jumlah Liabilitas</b>	<b>46,04%</b>	<b>48,66%</b>	<b>Percentage from Total Liabilities</b>

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak berelasi, sebagai berikut:

Details of the nature and type of material transactions with related parties are as follows:

No./ Num	Pihak Berelasi/ Related Parties	Hubungan/ Relationship	Sifat Hubungan/ Nature of Transactions
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Institusi Keuangan Yang Dikendalikan oleh Pemerintah RI/ Financial Institution Controlled by The Government of Republik Indonesia	Penempatan Kas dan Bank, Deposito/ Placement of Cash and Bank, Deposits
2.	PT Bank BNI (Persero) Tbk	Institusi Keuangan Yang Dikendalikan oleh Pemerintah RI/ Financial Institution Controlled by The Government of Republik Indonesia	Pendapatan Diterima di Muka/ Unearned Revenues
3.	PT Bank BRI (Persero) Tbk	Institusi Keuangan Yang Dikendalikan oleh Pemerintah RI/ Financial Institution Controlled by The Government of Republik Indonesia	Penempatan Kas dan Bank, Deposito, Placement of Cash and Bank Deposits, Unearned Revenues
4.	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri)	Institusi Keuangan Yang Dikendalikan oleh Pemerintah RI/ Financial Institution Controlled by The Government of Republik Indonesia	Penempatan Kas dan Bank/ Placement of Cash and Bank
5.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Perum Asosiasi/ Associations	Transaksi Piutang Usaha / Trade Receivable Transaction
6.	PT Citilink Indonesia	Asosiasi/ Associates	Piutang Usaha / Trade Receivables
7.	PT Merpati Nusantara Airlines	Asosiasi/ Associates	Piutang Usaha / Trade Receivables
8.	PT Garuda Angkasa	Asosiasi/ Associates	Piutang Usaha / Trade Receivables
9.	Merpati Pilot School	Asosiasi/ Associates	Piutang Usaha / Trade Receivables
10.	PT Angkasa Pura II (Persero)	Asosiasi/ Associates	Utang Usaha / Trade Payable
11.	PT Asuransi Jiwa Taspen	Asosiasi/ Associates	Utang Usaha / Trade Payable
12.	BPJS Ketenagakerjaan	Asosiasi/ Associates	Utang Usaha / Trade Payable
13.	PT Pins Indonesia	Asosiasi/ Associates	Utang Usaha / Trade Payable
14.	Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika	Entitas Sepengendali/ Entity Under Common Control	Utang Usaha / Trade Payable
15.	Kementerian Perhubungan	Entitas Sepengendali/ Entity Under Common Control	Utang Usaha / Trade Payable
16.	PT Angkasa Pura I (Persero)	Asosiasi/ Associates	Utang Usaha / Trade Payable
17.	PT Telekomunikasi Selular	Asosiasi/ Associates	Sewa/ Rent

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**29. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM  
MATA UANG ASING**

Rincian aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

**29. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES  
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY**

Detail of assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

			2022					
Aset	Jenis Valas/ Forex Type	Jumlah Valas/ Total of Foreign	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Assets				
Kas dan Setara Kas (Catatan 4)	USD	14.113.176	220.052.606.825	Cash and Cash Equivalents (Note 4)				
Piutang Usaha Jangka Pendek (Catatan 5)	USD	9.849.982	153.580.921.690	Short-term Trade Receivables (Note 5)				
Piutang Usaha Jangka Panjang (Catatan 5)	USD	693	10.801.826	Long-term Trade Receivables (Note 5)				
<b>Jumlah Aset</b>		<b><u>23.963.851</u></b>	<b><u>373.644.330.341</u></b>	<b>Total Assets</b>				
				2021				
Liabilitas	Jenis Valas/ Forex Type	Jumlah Valas/ Total of Foreign	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Liabilities				
Titipan PNBPN (Catatan 14)	USD	2.665.226	41.556.198.802	PNBP Deposit (Note 14)				
Utang PNBPN (Catatan 14)	USD	1.827.239	28.490.310.644	PNBP Debt (Note 14)				
Pendapatan diterima dimuka (Catatan 17)	USD	649.709	10.130.261.325	Unearned Revenues (Note 17)				
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b><u>5.142.174</u></b>	<b><u>80.176.770.771</u></b>	<b>Total Liabilities</b>				
Aset	Jenis Valas/ Forex Type	Jumlah Valas/ Total of Foreign	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Assets				
Kas dan Setara Kas (Catatan 4)	USD	10.293.719	146.881.076.696	Cash and Cash Equivalents (Note 4)				
Piutang Usaha (Catatan 5)	USD	7.419.960	105.875.407.788	Trade Receivables (Note 5)				
<b>Jumlah Aset</b>		<b><u>17.713.679</u></b>	<b><u>252.756.484.484</u></b>	<b>Total Assets</b>				
Liabilitas	Jenis Valas/ Forex Type	Jumlah Valas/ Total of Foreign	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Liabilities				
Titipan PNBPN (Catatan 14)	USD	2.338.206	33.363.862.989	PNBP Deposit (Note 14)				
Utang PNBPN (Catatan 14)	USD	896.110	12.786.588.442	PNBP Debt (Note 14)				
Pendapatan diterima dimuka (Catatan 17)	USD	498.371	7.111.256.512	Unearned Revenues (Note 17)				
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b><u>3.732.687</u></b>	<b><u>53.261.707.943</u></b>	<b>Total Liabilities</b>				

**30. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL**

**Manajemen Modal**

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Perusahaan pada Rapat Pembahasan Bersama ("RPB").

**30. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL  
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT**

**Capital Management**

The main objective of capital management of the Company is to ensure the maintenance of a healthy ratio of capital to support the business and maximize return for shareholders. External capital requirements are considered by the Company at the Joint Discussion Meeting ("RPB").



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**30. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL  
(Lanjutan)**

**Manajemen Modal (Lanjutan)**

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

**Manajemen Risiko Keuangan**

Aktivitas Perusahaan mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perusahaan bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

**30. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL  
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT  
(Continued)**

**Capital Management (Continued)**

*The Company manages the capital structure and make adjustments to changing economic conditions. To maintain and adjust its capital structure, the Company may seek funding through loans. There was no change in the objectives, policies and processes as of December 31, 2022 and 2021. The Company policy is to maintain a healthy capital structure for securing access to funding at reasonable cost.*

**Financial Risk Management**

*The Company's activities contain various financial risks such as market risk (including the risk of foreign currency exchange rate and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Overall, financial risk management program of the Company aims to minimize losses on the value of assets and liabilities arising from the movement of foreign currency exchange rate and interest rate movements. Management has a written policy for the management of foreign currency risk mainly through deposits placements and hedging against risk of foreign exchange fluctuations for a period of 3 to 12 months.*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**30. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL  
(Lanjutan)**

**Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)**

Berikut ini risiko-risiko keuangan yang dimitigasi oleh Perusahaan.

**a. Risiko nilai tukar mata uang asing**

Perusahaan mempunyai saldo piutang, utang, dan liabilitas dalam mata uang asing yang diantaranya adalah Dollar Amerika Serikat (*USD*). Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Perusahaan diharapkan dapat dikompensasi dengan deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun dengan memperhatikan kecenderungan perubahan nilai tukar di masa yang akan datang.

Perusahaan telah memperhatikan sungguh-sungguh Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2013, tanggal 25 September 2013, tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai pada BUMN. Selanjutnya, Perusahaan telah mengidentifikasi dan menetapkan risiko pasar yang dihadapi dan sampai dengan saat ini Perusahaan berpendapat bahwa, lindung nilai atas transaksi dalam valuta asing khususnya untuk saat ini tidak diperlukan.

**b. Risiko tingkat suku bunga**

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perusahaan melakukan analisis pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

**30. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL  
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT  
(Continued)**

**Financial Risk Management (Continued)**

Financial risks that are mitigated by the Company are as follows:

**a. Risk of foreign currency exchange rate**

The Company had outstanding receivables, debts, and liabilities denominated in foreign currencies that include the U.S. Dollar (*USD*). Increase in the risk of foreign currency exchange rates against the Company's liabilities are expected to be offset by time deposits and receivable in foreign currencies are set at least 25% of the liabilities that will mature in less than 1 (one) year with respect to changes in the value trend exchange in the future.

The Company has paid attention to the Minister BUMN No.PER-09/MBU/2013 Regulation, dated September 25, 2013 on Common Policy of Hedging Transaction at BUMN. Hereinafter, the Company have identified and specified market risk faced and up to in this time. The Company have a notion that hedging for transaction in foreign currency, specially to in this time, is not needed.

**b. Interest rate risk**

Interest rate movements are monitored to minimize any negative impact on its financial position. To measure the market risk of interest rate movements, the Company conducts analysis on interest margin and the maturity profile of financial assets and liabilities based on schedule changes in interest rates.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**30. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL  
(Lanjutan)**

**Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)**

**c. Risiko kredit**

Perusahaan terpapar risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan piutang usaha dan piutang lain-lain.

**30. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL  
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT  
(Continued)**

**Financial Risk Management (Continued)**

**c. Credit Risk**

The Company is exposed to credit risk mainly from trade receivables and other receivables. Credit risk is controlled by the continuous monitoring and billing accounts receivable balances and other receivables.

<b>31 Desember 2022 / December 31, 2022</b>			
	<b>Nilai tercatat/ Carrying Amount</b>	<b>Sampai dengan Satu Tahun/ Up to a Year</b>	<b>Lebih dari Satu Tahun/ More Than One Year</b>
<b>Aset Keuangan</b>			
Kas dan Setara Kas (Catatan 4)	1.611.780.688.844	1.611.780.688.844	--
Piutang Usaha (Catatan 5)	1.539.925.107.859	488.602.111.522	1.051.322.996.337
Piutang Lain-lain (Catatan 7)	1.949.046.471	1.949.046.471	--
<b>Jumlah</b>	<b><u>3.153.654.843.174</u></b>	<b><u>2.102.331.846.837</u></b>	<b><u>1.051.322.996.337</u></b>
			<b>Financial Asset Cash and Cash Equivalents (Note 4) Trade Receivables (Note 5) Other Receivables (Note 7) Total</b>
<b>31 Desember 2021 / December 31, 2021</b>			
	<b>Nilai tercatat/ Carrying Amount</b>	<b>Sampai dengan Satu Tahun/ Up to a Year</b>	<b>Lebih dari Satu Tahun/ More Than One Year</b>
<b>Aset Keuangan</b>			
Kas dan Setara Kas (Catatan 4)	1.092.703.262.848	1.092.703.262.848	--
Piutang Usaha (Catatan 5)	1.498.208.699.632	518.871.639.307	979.337.060.325
Pendapatan Akrua (Catatan 6)	71.366.548	71.366.548	--
Piutang Lain-lain (Catatan 7)	941.630.236	941.630.236	--
<b>Jumlah</b>	<b><u>2.591.924.959.264</u></b>	<b><u>1.612.587.898.939</u></b>	<b><u>979.337.060.325</u></b>
			<b>Financial Asset Cash and Cash Equivalents (Note 4) Trade Receivables (Note 5) Accrued Revenues (Note 6) Other Receivables (Note 7) Total</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**30. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL  
(Lanjutan)**

**Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)**

**d. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas timbul apabila Perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Perusahaan. Perusahaan secara terus menerus melakukan analisa untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain, rasio likuiditas, rasio *debt equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang.

**30. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL  
RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT  
(Continued)**

**Financial Risk Management (Continued)**

**d. Liquidity Risk**

Liquidity risk arises when the Company has difficulty to satisfy financial liabilities as financial liabilities are due. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents in order to fulfill the financial obligations of the Company. The Company continuously analyzes the statement of financial position to monitor liquidity ratios, such as, among others, liquidity ratio, debt equity ratio to the requirements of its debt agreements.

	31 Desember 2022/ December 31, 2022			
	Nilai tercatat/ Carrying Amount	Sampai dengan Satu Tahun/ Up to a Year	Lebih dari Satu Tahun/ More Than One Year	
<b>Liabilitas Keuangan</b>				<b>Financial Liabilities</b>
Utang Usaha (Catatan 12)	10.085.350.278	10.085.350.278	--	Accounts Payables (Note 12)
Beban Akrual (Catatan 13)	74.362.139.450	74.362.139.450	--	Accrued Expenses (Note 13)
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya (Catatan 14)	359.668.534.873	359.668.534.873	--	Other Short-Term Liabilities (Note 14)
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek (Catatan 16)	202.068.458.234	202.068.458.234	--	Short-Term Employee Benefits Liability (Note 16)
Liabilitas Sewa (Catatan 18)	1.891.895.539	642.908.747	1.248.986.792	Lease Liabilities (Note 18)
<b>Jumlah</b>	<b>648.076.378.374</b>	<b>646.827.391.582</b>	<b>1.248.986.792</b>	<b>Total</b>
	31 Desember 2021/ December 31, 2021			
	Nilai tercatat/ Carrying Amount	Sampai dengan Satu Tahun/ Up to a Year	Lebih dari Satu Tahun/ More Than One Year	
<b>Liabilitas Keuangan</b>				<b>Financial Liabilities</b>
Utang Usaha (Catatan 12)	18.380.163.223	18.380.163.223	--	Accounts Payables (Note 12)
Beban Akrual (Catatan 13)	55.250.146.113	55.250.146.113	--	Accrued Expenses (Note 13)
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya (Catatan 14)	306.843.780.856	306.843.780.856	--	Other Short-Term Liabilities (Note 14)
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek (Catatan 16)	112.602.727.952	112.602.727.952	--	Short-Term Employee Benefits Liability (Note 16)
Liabilitas Sewa (Catatan 18)	3.768.270.742	1.034.314.101	2.733.956.641	Lease Liabilities (Note 18)
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	7.001.401.512	--	7.001.401.512	Other Long-Term Liabilities
<b>Jumlah</b>	<b>503.846.490.398</b>	<b>494.111.132.245</b>	<b>9.735.358.153</b>	<b>Total</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**31. INFORMASI SEGMENT OPERASI**

Informasi segmen berdasarkan wilayah operasi  
sebagai berikut:

**31. OPERATION SEGMENT INFORMATION**

The segment information based on  
geographical segment is as follows:

	2022					
	JATSC	Denpasar	MATSC	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Total Aset	265.241.204.891	69.537.922.919	197.249.191.294	4.409.687.558.153	4.941.715.877.257	Total Assets
Total Liabilitas	10.762.153.578	4.033.450.382	9.014.140.562	742.276.571.066	766.086.315.588	Total Liabilities
Total Ekuitas	254.479.051.313	65.504.472.537	188.235.050.732	3.667.410.987.087	4.175.629.561.669	Total Equity
Pendapatan Usaha	981.178.570.625	190.228.561.138	523.740.239.800	536.330.301.924	2.231.477.673.487	Operating Revenues
Beban Usaha	312.879.817.083	81.428.490.753	200.038.584.866	1.464.953.229.697	2.059.300.122.399	Operating Expenses
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>668.298.753.542</b>	<b>108.800.070.385</b>	<b>323.701.654.934</b>	<b>(928.622.927.773)</b>	<b>172.177.551.088</b>	<b>Operating (Loss) Profit</b>

	2021					
	JATSC	Denpasar	MATSC	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Total Aset	296.209.112.575	76.376.362.508	219.453.781.864	4.035.562.421.163	4.627.601.678.110	Total Assets
Total Liabilitas	10.225.195.598	2.587.279.545	5.741.457.307	588.487.055.443	607.040.987.893	Total Liabilities
Total Ekuitas	285.983.916.977	73.789.082.963	213.712.324.557	3.447.075.365.720	4.020.560.690.217	Total Equity
Pendapatan Usaha	546.640.160.409	40.955.748.678	351.864.651.662	408.059.731.357	1.347.520.292.106	Operating Revenues
Beban Usaha	291.826.890.543	75.001.651.874	181.956.057.292	1.425.578.571.205	1.974.363.170.914	Operating Expenses
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>254.813.269.866</b>	<b>(34.045.903.196)</b>	<b>169.908.594.370</b>	<b>(1.017.518.839.848)</b>	<b>(626.842.878.808)</b>	<b>Operating (Loss) Profit</b>

**32. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS  
KEUANGAN**

Berikut adalah ikhtisar nilai tercatat dan estimasi  
nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan  
yang dinyatakan dalam laporan posisi  
keuangan:

**32. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND  
LIABILITIES**

Below is an overview of the carrying value and  
estimated fair values of financial instruments of  
the Company that are stated in the statement  
of financial position:

	2022		2021		
	Nilai Wajar/ Fair Value *)	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value *)	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	
<b>Aset Keuangan</b>					<b>Financial Assets</b>
Kas dan Setara Kas	1.611.780.688.844	1.611.780.688.844	1.092.703.262.848	1.092.703.262.848	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	963.050.131.887	963.050.131.887	836.025.621.628	836.025.621.628	Trade Receivables
Pendapatan Akrua	--	--	71.366.548	71.366.548	Accrued Revenues
Piutang Lain-lain	1.949.046.471	1.949.046.471	941.630.236	941.630.236	Other Receivables
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>2.576.779.867.202</b>	<b>2.576.779.867.202</b>	<b>1.929.741.881.260</b>	<b>1.929.741.881.260</b>	<b>Total Financial Assets</b>

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**32. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS  
KEUANGAN (Lanjutan)**

**32. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND  
LIABILITIES (Continued)**

	2022		2021		
	Nilai Wajar/ Fair Value *)	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value *)	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	
<b>Liabilitas Keuangan</b>					<b>Financial Liabilities</b>
Utang Usaha	10.085.350.278	10.085.350.278	18.380.163.223	18.380.163.223	Trade Payables
Beban Akrua	74.362.139.450	74.362.139.450	55.250.146.113	55.250.146.113	Accrued Expenses
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	202.068.458.234	202.068.458.234	112.602.727.952	112.602.727.952	Short Term Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	359.668.534.873	359.668.534.873	306.843.780.856	306.843.780.856	Other Short-Term Financial Liabilities
Liabilitas Sewa - Bagian Jangka Pendek	642.908.747	642.908.747	1.034.314.101	1.034.314.101	Lease Liabilities - Short Term Portion
Liabilitas Sewa - Bagian Jangka Panjang	1.248.986.792	1.248.986.792	2.733.956.641	2.733.956.641	Lease Liabilities - Long Term Portion
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	--	--	7.001.401.512	7.001.401.512	Other Long-Term Liabilities
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>648.076.378.374</b>	<b>648.076.378.374</b>	<b>503.846.490.398</b>	<b>503.846.490.398</b>	<b>Total Financial Liabilities</b>

Seluruh nilai tercatat instrumen keuangan mendekati nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut. Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar dari setiap golongan instrumen keuangan Perusahaan:

The entire carrying amount of financial instruments approaching fair value of these financial instruments. The following are the methods and assumptions used in estimating the fair value of each class of financial instruments the Company:

- Kas dan setara kas, piutang lain-lain dan pendapatan akrual. Seluruh aset keuangan di atas merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut telah mencerminkan nilai wajar dari aset keuangan tersebut.
- Piutang usaha dihitung berdasarkan nilai wajar dan diturunkan melalui akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- Cash and cash equivalents, other receivables and accrued revenues are financial assets in the short term that will expire within 12 months. The carrying amount of financial assets has reflected the fair value of the asset.
- Trade receivable is calculated based on the fair value and reduced through an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)  
As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**32. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)**

- Liabilitas keuangan jangka pendek terdiri dari biaya akrual, utang usaha, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, liabilitas sewa jangka pendek. Seluruh liabilitas keuangan tersebut merupakan kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut telah mencerminkan nilai wajar dari liabilitas keuangan.

**33. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS**

Informasi transaksi non kas yang signifikan yang tidak mempengaruhi aktivitas arus kas sebagai berikut:

Penambahan aset tetap yang berasal dari pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa sebesar Rp1.841.658.045. Penambahan ini tidak mempengaruhi arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan Perusahaan.

**32. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued)**

- Short-term financial liabilities consist of accrued expenses, trade payables, short-term employee benefits liabilities, other short-term financial liabilities, short term lease liabilities and other short-term financial liabilities. All financial liabilities that are short-term obligations will mature within 12 months. The carrying amount of the financial liabilities has reflected the fair value of financial liabilities.

**33. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS**

Significant non-cash transactions that do not affect the cash flows activities are as follows:

Addition in fixed assets amounting to Rp1,841,658,045 that arise from recognition of right of used assets and lease liabilities. This change does not affect to cash flows from investing and financing activities of the Company.

	Arus Kas/ Cash Flow		Perubahan Nonkas/Non-cash Changes		31 Desember/ December 31, 2022		
	31 Desember/ December 31, 2021	Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Penambahan Aset Hak Guna/ Additional of Right of Use Assets			Penghentian Kontrak/ Termination of the Contract
Liabilitas Sewa	3.768.270.742	--	(2.745.496.740)	1.841.658.045	(972.536.508)	1.891.895.539	Lease Liabilities

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI PENTING LAINNYA**

1) Kontrak

- a. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan (Badan Sar Nasional) Ambon No. PJJ.004/G/29/LPPNPI/KRT.02.07/VII/2022 tentang sewa gedung untuk operasional cabang Ambon dengan jangka waktu selama 5 tahun sejak kontrak ditandatangani.
- b. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan Ahmad Sholihuddin No. PJJ.002/G/30/LPPNPI/KRT.02.07/IV/2021 tentang sewa kantor cabang Wamena dengan jangka waktu selama 2 tahun sejak tanggal 1 April 2021.
- c. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan Antonious Uyuto No. PROC.002/G/33/LPPNPI/KRT.02.03/I/2022 tentang sewa rumah dinas General Manager cabang Merauke dengan jangka waktu selama 1 tahun sejak tanggal 13 Januari 2023.
- d. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan CV Prima Pradana No. SPK/PGD.02.03/21/LPPNPI/XII/2021/001 tentang sewa kendaraan operasional cabang Solo dengan jangka waktu selama 1 tahun sejak tanggal 4 Januari 2022.
- e. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan CV Saireri Jaya Abadi ADD- No. PROC.008/G/33/LPPNPI/PGD.02.03/III/2022 tentang sewa kendaraan operasional cabang Merauke dengan jangka waktu 1 tahun sejak tanggal 1 Maret 2022.

**34. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION**

1) Contract

- a. The Company has made a mutual agreement with Search and Rescue Office (Badan Sar Nasional) No.PJJ.004/G/29/LPPNPI/KRT.02.07/VII/2022 regarding building rental for operational Ambon branch, with a period of 5 years, starting from the signing of contract.
- b. The Company has made a mutual agreement with Ahmad Sholihuddin No. PJJ.002/G/30/LPPNPI/KRT.02.07/IV/2021 regarding office rental Wamena branch with a period of 2 years, starting from April 1, 2021.
- c. The Company has made a mutual agreement with Antonious Uyuto No. PROC.002/G/33/LPPNPI/KRT.02.03/I/2022 regarding official residence of General Manager rental Merauke branch with a period of 1 year starting from January 13, 2023.
- d. The Company has made a mutual agreement with CV Prima Pradana No. SPK/PGD.02.03/21/LPPNPI/XII/2021/001 regarding vehicle operational rental Solo branch with a period of 1 year, starting from January 4, 2022.
- e. The Company has made a mutual agreement with CV PT Serasi Autoraya No. ADD PROC.008/G/33/LPPNPI/PGD.02.03/III/2022 regarding vehicle operational rent Merauke branch with a period 1 year, starting from March 1, 2022.



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

1) Kontrak (Lanjutan)

- f. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan CV Wisata Jatim No. SPK017/G/06/LPPNPI/PGD.02.03/XII/2020 tentang sewa kendaraan operasional untuk cabang Balikpapan dengan jangka waktu selama 2 tahun sejak tanggal 1 Januari 2021.
- g. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan CV Berkah Utama Habibi No. ADDI-SPK.001/G/31/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2022 tentang sewa kendaraan cabang Nabire dengan jangka waktu 1 tahun sejak 1 April 2022.
- h. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan CV Wangi Cendana Utama, No. SPK.005/G/24/LPPNPI/PGD.02.03/VII/2022 tentang pengadaan sewa kendaraan operasional roda empat di Perum LPPNPI cabang Tarakan, dengan jangka waktu 1 tahun, sejak tanggal 2 Juli 2022.
- i. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan John Hattu No. PJJ.001/G//30/LPPNPI/KRT.02.07/III/2021 tentang sewa rumah dinas cabang Wamena dengan jangka waktu selama 2 tahun sejak tanggal 8 Februari 2021.
- j. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan Koperasi Karyawan AIRNAV Indonesia No. PJJ.008/G/23/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2022 tentang sewa kendaraan cabang Palangkaraya dengan jangka waktu selama 2 tahun sejak tanggal 1 April 2022. Sewa kendaraan kantor pusat dengan perjanjian SPK.027/PU/00/LPPNPI/PGD.02.02/IX/2022 jangka waktu selama 1 tahun sejak tanggal 1 Oktober 2022.

**34. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION  
(Continued)**

1) Contract (Continued)

- f. The Company has made a mutual agreement with CV Wisata Jatim No.SPK017/G/6/LPPNPI/PGD.02.03/XII/2020 regarding vehicle rental Balikpapan branch, with a period of 2 years, starting from the date of January 1, 2021.
- g. The Company has made mutual agreement with CV Berkah Utama Habibi No. ADDI-SPK.001/G/31/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2022 regarding vehicle rental Nabire branch with a period of 1 year starting from April 1, 2022.
- h. The Company has made a mutual agreement with CV Wangi Cendana Utama, No. SPK.005/G/24/LPPNPI/PGD.02.03/VII/2022, regarding the procurement of four-wheeled operational vehicle rentals at Perum LPPNPI Tarakan branch, with a period of 1 year, starting from July 2, 2022.
- i. The Company has made a mutual agreement with John Hattu No. PJJ.001/G//30/LPPNPI/KRT.02.07/III/2021 regarding official residence rental Wamena branch with a period of 2 years starting from February 8, 2021.
- j. The Company has made a mutual agreement with Koperasi Karyawan AIRNAV Indonesia No. PJJ.008/G/23/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2022 regarding vehicle rental Palangkaraya branch with a period 2 years starting from April 1, 2022. Vehicle rental for Head Office SPK.027/PU/00/LPPNPI/PGD.02.02/IX/2022 with a period of 2 years starting from October 1, 2022.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

1) Kontrak (Lanjutan)

- k. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan PT Agung Solusi Trans No. ADD.002/SPK.002/G/12/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2022 tentang sewa kendaraan dinas cabang pembantu Bengkulu dengan jangka waktu selama 1 tahun sejak tanggal 2 Februari 2022. Sewa kendaraan cabang Semarang No. AST/SMR-K/0722/RENT00033 dengan jangka waktu selama 6 bulan sejak 5 Juli 2022, dan No. AST/SMR-K/0822/RENT00037 dengan jangka waktu selama 6 bulan sejak 1 Agustus 2022. Sewa kendaraan cabang Pekanbaru No. PROC.026/G/13/LPPNPI/PGD.02.03/IX/2021 dengan jangka waktu selama 2 tahun sejak tanggal 1 Oktober 2022.
- l. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan PT Angkutan Lancar Bangunan, No. SPK.006/G/10/LPPNPI/PGD.02.02/IX/2021, tentang sewa 2 unit kendaraan operasional cabang Pontianak, dengan jangka waktu 2 tahun, sejak 17 Oktober 2021.
- m. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan PT BSC Advertising No. PROC.004/G/19/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2022 tentang sewa kendaraan dinas operasional Perum LPPNPI cabang Bandung, dengan jangka waktu 3 tahun, sejak tanggal 2 April 2022.

**34. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION  
(Continued)**

1) Contract (Continued)

- k. The Company has made a mutual agreement with PT Agung Solusi Trans No. ADD.002/SPK.002/G/12/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2022 regarding vehicle rental Bengkulu sub branch with a period of 1 year starting from February 2, 2022. Vehicle rental Semarang branch No. AST/SMR-K/0722/RENT00033 with a period of 6 months starting from July 5, 2022 and No. AST/SMR-K/0822/RENT00037 with a period of 6 months starting from August 1, 2022. Vehicle rental Pekanbaru branch No. PROC.026/G/13/LPPNPI/PGD.02.03/IX/2021 with a period of 2 years starting from October 1, 2022.
- l. The Company has made a mutual agreement with PT Angkutan Lancar Bangunan, No. SPK.006/G/10/LPPNPI/PGD.02.02/IX/2021 regarding the lease of 2 units of technical operational vehicle at Pontianak Branch, with a 2-year period, starting from October 17, 2021.
- m. The Company has made a mutual agreement with PT BSC Advertising. No. PROC.004/G/19/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2022, regarding vehicle rental for Perum LPPNPI Bandung branch, with a period of 3 years, starting from April 2, 2022.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

1) Kontrak (Lanjutan)

n. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan PT Bumi Jasa Utama, tentang pengadaan jasa sewa kendaraan dinas operasional di cabang Manado No. SPK.003/G/25/LPPNPI/PGD.02.03/III/2022 dengan jangka waktu 1 tahun, sejak tanggal 1 Maret 2022. Kantor cabang Kendari No. SPK.004/G/26/LPPNPI/PGD.02.03/IX/2022, dengan jangka waktu 1 tahun 1 bulan sejak tanggal 21 September 2022. Kantor cabang Ambon No. PROC.010/G/29/LPPNPI/PGD.02.03/XII/2021, dengan jangka waktu 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari 2022. Kantor cabang Balikpapan No. PROC.002/G/08/LPPNPI/PGD.02.03/II/2021 addendum No. ADD-PROC.005/G/08/LPPNPI/PGD.02.03/XII/2022 dengan jangka waktu 2 tahun, sejak tanggal 1 Februari 2021. Kantor cabang Yogyakarta No. SPK.001/G/05/LPPNPI/PGD/II/2022 addendum No. ADD-SPK.003/G/05/LPPNPI/PGD.02/IV/2022 dengan jangka waktu 1 tahun sejak tanggal 1 Februari 2022.

o. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan PT Jaya Indo Mandiri. No. SPK.002/6/18/LPPNPI/IX/2020 dan addendum No. ADD.BAC.006/G/18/LPPNPI/KRT.02.02/IV/2022, tentang jasa sewa kendaraan dinas operasional kantor cabang Halim, dengan jangka waktu 2 tahun, sejak 6 April 2022. Kantor Cabang JATSC No. SPK.001/G/01/LPPNPI/PGD.02.03/III/2022 dan Addendum No. ADD-SPK.002/G/01/LPPNPI/PGD.02.03/III/2022 tentang jasa sewa kendaraan dinas operasional jangka waktu 1 tahun, sejak 1 Maret 2022.

**34. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION  
(Continued)**

1) Contract (Continued)

n. The Company has made a mutual agreement with PT Bumi Jasa Utama, regarding the procurement of operational service vehicle rental services in Manado branch No. SPK.003/G/25/LPPNPI/PGD.02.03/III/2022 with a period of 1 year, starting from March 1, 2022. Kendari branch office No. SPK.004/G/26/LPPNPI/PGD.02.03/IX/2022 with a period of 1 year, starting from September 21, 2022. Ambon branch office No. PROC.010/G/29/LPPNPI/PGD.02.03/XII/2021, with a period of 1 year, starting from January 1, 2022. Balikpapan branch No. PROC.002/G/08/LPPNPI/PGD.02.03/II/2021 addendum No. ADD-PROC.005/G/08/LPPNPI/PGD.02.03/XII/2022 with a period of 2 years, starting from February 1, 2021. Yogyakarta branch No. SPK.001/G/05/LPPNPI/PGD/II/2022 addendum No. ADD-SPK.003/G/05/LPPNPI/PGD.02/IV/2022 with a period 1 year starting from February 1, 2022.

o. The Company has made a mutual agreement with PT Jaya Indo Mandiri. No. SPK.002/6/18/LPPNPI/IX/2020 and Addendum No. ADD.BAC.006/G/18/LPPNPI/KRT.02.02/IV/2022, concerning Halim Branch Office Operational Service Vehicle Rental Services, with a period of 2 years, starting from the date of April 6, 2022. JATSC branch office, No. SPK.001/G/01/LPPNPI/PGD.02.03/III/2022 and Addendum No. ADD-SPK.002/G/01/LPPNPI/PGD.02.03/III/2022 with a period of 1 year, starting from March 1, 2022.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

1) Kontrak (Lanjutan)

p. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan PT Serasi Autoraya, tentang pengadaan sewa kendaraan operasional di Perum LPPNPI kantor cabang Medan, No. SPK.PGD.02.03/03/LPPNPI/XII/2019/02 2 dengan addendum No. ADD.006/G/03/LPPNPI/PGD.02.03/V/2020, Addendum II No. ADD-SPK.001/G/03/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2021, Addendum III No. ADD-SPK.002/G/03/LPPNPI/PGD.02.03/XII/2021 dan Addendum IV No. ADD-SPK.001/G/03/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2022 dengan jangka waktu selama 2 tahun, sejak 6 Desember 2019. Kantor Cabang Pangkal Pinang, No PROC.001/G/17/LPPNPI/PGD.02.03/XII/2021, dengan jangka waktu selama 1 tahun sejak 01 Januari 2022. Kantor cabang Banjarmasin No. SPK.001/G/22/LPPNPI/PGD.02.03/III/2021 dan Addendum No. ADD-SPK.001/G/22/LPPNPI/PGD.02.03/XII/2021 dengan jangka waktu 2 tahun sejak 1 April 2021. Kantor Cabang Sentani No. PJJ.012/G/09/LPPNPI/HUK.07/XI/2021 dengan jangka waktu 1 tahun sejak 1 Desember 2021. Kantor Cabang Padang No. SPK.002/G/16/LPPNPI/PGD.02.03/III/2022 dengan jangka waktu 1 tahun sejak 1 April 2022. Kantor cabang Aceh No. PJJ.001/P/00/LPPNPI/PER02.02/III/2022 dan Addendum No. ADD.PJJ.003.1/LPPNPI/PER.02.02/III/2022 dengan jangka waktu 1 tahun sejak 4 Maret 2022.

**34. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION  
(Continued)**

1) Contract (Continued)

p. The Company has made a mutual agreement with PT Serasi Autoraya, regarding the procurement of operational vehicle rentals at Perum LPPNPI Medan branch office, No SPK.PGD.02.03/03/LPPNPI/XII/2019/022 with addendum No. ADD.006/G/03/LPPNPI/PGD.02.03/V/2020, Addendum II No. ADD-SPK.001/G/03/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2021, Addendum III No. ADD-SPK.002/G/03/LPPNPI/PGD.02.03/XII/2021 and Addendum IV No. ADD-SPK.001/G/03/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2022 with a period of 2 years, starting from December 6, 2019. Pangkal Pinang branch office, No PROC.001/G/17/LPPNPI/PGD.02.03/XII/2021, with a period of 1 year, starting from January 1, 2022. Banjarmasin branch office No. SPK.001/G/22/LPPNPI/PGD.02.03/III/2021 and Addendum No. ADD-SPK.001/G/22/LPPNPI/PGD.02.03/XII/2021 with a period of 2 years starting from April 1, 2021. Sentani branch office No. PJJ.012/G/09/LPPNPI/HUK.07/XI/2021 with a period 1 year starting from December 1, 2021, Padang branch office No. SPK.002/G/16/LPPNPI/PGD.02.03/III/2022 with a period 1 year starting from April 1, 2022. Aceh branch office No. PJJ.001/P/00/LPPNPI/PER02.02/III/2022 and Addendum No. ADD.PJJ.003.1/LPPNPI/PER.02.02/III/2022 with a period of 1 year starting from March 4, 2022.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

1) Kontrak (Lanjutan)

- q. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan PT Nabila Cahaya Abadi, tentang pengadaan jasa sewa kendaraan operasional Perum LPPNPI kantor cabang Medan No SPK.003/G/03/LPPNPI/PGD.02.03/V/2022, dengan jangka waktu 1 tahun, sejak tanggal 6 Mei 2022.
- r. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan PT Angkasa Pura I (Persero), No. 0003010005368/HK.06.02/2021/EM.KO.E.B tentang perjanjian penggunaan utilitas cabang Kupang, dengan jangka waktu selama 1 tahun, sejak 1 Januari 2022.
- s. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan PT Adi Sarana Armada Tbk, tentang Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Roda Empat Perum LPPNPI kantor cabang Denpasar No. SPK.013/G/07/LPPNPI/PGD.02.03/XII/2022 dengan jangka waktu 2 tahun sejak 1 Januari 2023.

**34. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION  
(Continued)**

1) Contract (Continued)

- q. The Company has made a mutual agreement with PT Nabila Cahaya Abadi regarding the procurement of operational vehicle rental services for Perum LPPNPI Medan branch office No SPK.003/G/03/LPPNPI/PGD.02.03/V/2022 with a period of 1 year, starting from May 6, 2022.
- r. The Company has made a mutual agreement with PT Angkasa Pura I (Persero) No 0003010005368/HK.06.02/2021/EM.KOE.B on utility use agreement Kupang branch with a period of 1 year, starting from January 1, 2022.
- s. The Company has made a mutual agreement with PT Adi Sarana Armada Tbk regarding the Procurement of Four-Wheeled Operational Vehicle Rentals for Perum LPPNPI Denpasar branch office No. SPK.013/G/07/LPPNPI/PGD.02.03/XII/2022 with a period of 2 year starting from January 1, 2023.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

1) Kontrak (Lanjutan)

t. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan PT Permata Indo Sejahtera No. SPK.001/G/16/LPPNPI/PGD.02.03/III/2022 dan Addendum No. ADD SPK.001/G/PO/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2022 tentang pengadaan jasa tenaga kerja outsourcing PERUM LPPNPI kantor cabang Padang selama 1 tahun sejak 1 Maret 2022.

u. Perusahaan telah melakukan kesepakatan kerja bersama dengan PT Agung Solusi Trans Batam atas sewa kendaraan cabang Tanjung Pinang No. SPK.003/G/14/LPPNPI/PGD.02.03/VI/2022 dengan jangka waktu selama 1 tahun sejak tanggal 1 Juli 2022.

**34. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION  
(Continued)**

1) Contract (Continued)

t. The Company has made a mutual agreement with PT Permata Indo Sejahtera, No. SPK.001/G/16/LPPNPI/PGD.02.03/III/2022 and Addendum No. ADD-SPK.001/G/PO/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2022 regarding procurement services outsourcing at PERUM LPPNPI Padang branch, with a period of 1 year, starting from the date of March 1, 2022.

u. The Company has made a mutual agreement with PT Agung Solusi Trans Batam regarding vehicle rental Tanjung Pinang branch No. SPK.003/G/14/LPPNPI/PGD.02.03/VI/2022 with a period of 1 year starting from July 1, 2022.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

1) Kontrak (Lanjutan)

v. Perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama dengan PT CSM Corporatama, tentang Pengadaan Sewa Kendaraan Direksi untuk lokasi Kantor Pusat, No. PROC.063/US/00/LPPNPI/PGD.02.03/XI/2019 dengan jangka waktu 3 tahun, terhitung mulai dari tanggal 8 Januari 2020. Kendaraan operasional Kantor Cabang Palembang, No. PJJ.033.2/G/04/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2020 dan Addendum I No. PJJ.003/G/04/LPPNPI/PGD.02.03/AD-I/IV/2021 dengan jangka waktu 2 tahun, terhitung mulai dari tanggal 2 April 2020 untuk 2 unit mobil dan tanggal 15 Mei 2020 untuk 1 unit mobil. Kantor Cabang Palembang Addendum II No. PJJ.007.3/G/04/LPPNPI/PGD.02.03/ADD-II/XI/2021 yang terdiri atas 1 unit Toyota G MT jangka waktu 578 hari dimulai tanggal 1 April 2020 dan 1 unit Toyota Hilux DC dengan jangka waktu 548 hari dimulai tanggal 15 Mei 2020. Kantor Cabang Jambi, No. SPK/PGD.02.03/12/01/2019/003 dengan jangka waktu 2 Tahun, terhitung mulai dari tanggal 15 Januari 2019, Kantor MATSC, addendum BAC.002/G/LPPNPI/PGD.02.03/VII/2020 dengan jangka waktu 2 Tahun, terhitung mulai dari tanggal 12 Juni 2019 dan Kantor Cabang MATSC, No. PJJ.PGD.02.03/02/LPPNPI/05/2019/073, Addendum I No. A-PROC.031/G/02/LPPNPI/PGD.02.03/V/2020 dan Addendum II No. A-PROC.016/G/02/LPPNPI/PGD.02.03/III/2021 terdiri atas 1 unit warna putih dan 1 unit warna hitam dengan masa sewa 30 bulan dimulai tanggal 1 Juli 2020, 1 unit warna putih dengan masa sewa 2 tahun dimulai tanggal 12 April 2021.

**34. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION  
(Continued)**

1) Contract (Continued)

v. The Company entered into a mutual agreement with PT CSM Corporatama, regarding the Procurement of Directors' Vehicle Leases for Head Office locations, No. PROC.063/US/00/LPPNPI/PGD.02.03/XI/2019 with a term of 3 years, starting from January 8, 2020, operational vehicle of the Palembang Branch Office, No. PJJ.033.2/G/04/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2020 and Addendum I No. PJJ.003/G/04/LPPNPI/PGD.02.03/ADD-I/IV/2021 with a period of 2 years, starting from the date of April 2, 2020 for 2 cars and May 15, 2020 for 1 car, Palembang Branch Office Addendum II No. PJJ.007.3/G/04/LPPNPI/PGD.02.03/AD-II/XI/2021 for Toyota G MT with a period of 578 days starting from April 1, 2020 and Toyota Hilux DC with a period of 548 days starting from Mei 15, 2020. Jambi Branch Office, No. SPK/PGD.02.03/12/01/2019/003 with a period of 2 years, starting from January 15, 2019, MATSC Office, addendum BAC.002/G/LPPNPI/PGD.02.03/VII/2020 with a period of 2 years, starting from the June 12, 2019, and MATSC Branch Office, No. PJJ.PGD.02.03/02/LPPNPI/05/2019/073, Addendum I A-PROC.031/G/02/LPPNPI/PGD.02.03/V/2020 and Addendum II A-PROC.016/G/02/LPPNPI/PGD.02.03/III/2021 which consists of 2 cars with a period of 30 months starting from July 1, 2020 and 1 car with a period of 2 years, starting from April 12, 2021.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

1) Kontrak (Lanjutan)

w. Perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama dengan PT BSC Advertising No.PROC.002/G/19/LPPNPI/PGD.02.03/III/2022, dan Addendum No.PROC.004G/19/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2022 tentang Sewa Kendaraan Dinas Operasional Perum LPPNPI Cabang Bandung, dengan jangka waktu 3 tahun, terhitung mulai dari tanggal 2 April 2022.

x. Kantor Cabang Kupang No 2100061372 addendum No. 312/G/28/LPPNPI/PGD.02/VI/2020 dengan jangka waktu 2 tahun, terhitung mulai dari tanggal 6 Mei 2019, Kantor Cabang Sentani No.PJJ.010.1/G/09/LPPNPI/PGD.02/XII/2019 dengan jangka waktu 2 Tahun, terhitung mulai dari tanggal 1 Desember 2019. Kantor Cabang Banjarmasin No. SPK.001/G/22/LPPNPI/PGD.02.03/III/2021 dengan jangka waktu 2 tahun terhitung mulai 3 Maret 2021.

**34. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION  
(Continued)**

1) Contract (Continued)

w. The Company has made a mutual agreement with PT BSC Advertising No.PROC.002/G/19/LPPNPI/PGD.02.03/III/2022, and Addendum No.PROC.004G/19/LPPNPI/PGD.02.03/IV/2022, regarding Vehicle Rental for Perum LPPNPI Bandung Branch Office, with a period of 3 years, starting from April 2, 2022.

x. Kupang Branch Office, No 2100061372 addendum No. 312/G/28/LPPNPI/PGD.02/VI/2020 with a period of 2 years, starting from May 6, 2019, Sentani Branch Office, No.PJJ.010.1/G/09/LPPNPI/PGD.02/XII/2019 with a period of 2 years, starting from December 1, 2019. Banjarmasin Branch Office No.SPK.001/G/22/LPPNPI/PGD.02.03/III/2021 with a period of 2 years starting from March 3, 2021.



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

1) Kontrak (Lanjutan)

- y. Perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama dengan PT Bumi Jasa Utama, tentang Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional di Cabang Manado No. SPK.PGD.02.03/25/LPPNPI/02/2019/02 dengan jangka waktu 2 tahun, terhitung mulai dari tanggal 11 Februari 2019, Kantor Caban Kendari No. SPK.PGD.02.03/26/LPPNPI/04/2019/01 addendum No. PROC.001/26/LPPNPI/PGD.02.03/04/2020, dengan jangka waktu 2 tahun, terhitung mulai dari tanggal 21 April 2019 dan BAC.PGD.02.02/261/LPPNPI/08/2021/006 atas sewa 2 unit kendaraan operasional dengan jangka waktu 13 bulan. Kantor Cabang Ambon No. SPK.PGD.02/29/PANPEL/12/2018/026 addendum No. ADD-SPK.003/G/29/LPPNPI/PGD.02.03/2020, dengan jangka waktu 2 Tahun, terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2019, Kantor Cabang Balikpapan No PJJ/GAK/002/02/2019 addendum No. ADD PROC.004/G/08/LPPNPI/PGD.02.03/VI/2020 dengan jangka waktu 2 tahun, terhitung mulai dari tanggal 1 Februari 2019, addendum No. PROC.002/G/08/LPPNPI/PGD.02.03/II/2021 dengan jangka waktu 730 hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021.
- z. Perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama dengan PT Serasi Autoraya No.PJJ.001/P/00/LPPNPI/PER02.02/III/2022 dan telah dilakukan addendum No. ADD.PJJ.003.1/LPPNPI/PER.02.02/III/2022, tentang Sewa Kendaraan Operasional Roda Empat Cabang Banda Aceh, dengan jangka waktu 12 bulan, terhitung mulai dari tanggal 4 Maret 2022.

**34. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION  
(Continued)**

1) Contract (Continued)

- y. The Company has made a mutual agreement with PT Bumi Jasa Utama, regarding the Procurement of Operational Service Vehicle Rental Services in Manado Branch No SPK.PGD.02.03/25/LPPNPI/02/2019/02 with a period of 2 years, starting from February 11, 2019, Kendari Branch Office No. SPK.PGD.02.03/26/LPPNPI/04/2019/01 addendum No. PROC.001/26/LPPNPI/PGD.02.03/04/2020, with a period of 2 years, starting from April 21, 2019, and BAC.PGD.02.02/261/LPPNPI/08/2021/006 for 2 unit of Vehicle with period of 13 months. Ambon Branch Office No. SPK.PGD.02/29/PANPEL/12/2018/026 addendum No. ADDSPK.003/G/29/LPPNPI/PGD.02.03/2020, with a period of 2 years, starting from January 1, 2019, Balikpapan Office Branch No PJJ/GAK/002/02/2019 addendum No ADD-PROC.004/G/08/LPPNPI/PGD.02.03/VI/2020 with a period of 2 years, starting from February 1, 2019, adendum No. PROC.002/G/08/LPPNPI/PGD.02.03/II/2021 with a period of 730 days starting from February 1, 2021.
- z. The Company has made an agreement with PT Serasi Autoraya, No.PJJ.001/P/00/LPPNPI/PER02.02/III/2022 with an adendum No.ADD. PJJ.003.1/LPPNPI/PER.02.02/III/2022, on Lease Four Wheel Vehicle Operations Branch of Banda Aceh, with a period of 12 months, counting from March 4, 2022.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

1) Kontrak (Lanjutan)

aa. Perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama dengan PT Bumi Jasa Utama No. PROC.003/G/25/LPPNPI/PGD.02.03/II/2021 dan addendum No.SPK.003/G/25/LPPNPI/PGD.02.03/III/2022, tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional Double Cabin Perum LPPNPI Cabang Manado, dengan jangka waktu 12 bulan, terhitung mulai dari tanggal 1 Maret 2022.

ab. Perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama dengan PT Bumi Jasa Utama No.SPK.004/G/26/LPPNPI/PGD.02.03/IX/2022, tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa 2 Unit Kendaraan Operasional Perum LPPNPI Cabang Kendari, dengan jangka waktu 13 bulan, terhitung mulai dari tanggal 21 September 2022.

2) Perikatan

a. Perusahaan melakukan kesepakatan bersama dengan Badan Pengembangan SDM Perhubungan melalui perjanjian Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Navigasi Penerbangan, perjanjian No. HK/201/3/10 BPSDMP-18 dan No. PJJ.04.07.01/00/LPPNPI/11/2018/320, tanggal 8 November 2018, berlaku untuk jangka waktu 5 tahun.

**34. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION  
(Continued)**

1) Contract (Continued)

aa. The Company has made an agreement with PT Bumi Jasa Utama No. PROC.003/G/25/LPPNPI/PGD.02.03/II/2021 and addendum No.SPK.003/G/25/LPPNPI/PGD.02.03/III/2022, regarding the Procurement of Double Cabin Operational Vehicle Rentals for Perum LPPNPI Manado branch office, with a period of 12 months, counting from March 1, 2022.

ab. The Company has made an agreement with PT Bumi Jasa Utama No.SPK.004/G/26/LPPNPI/PGD.02.03/IX/2022, regarding the Procurement of Rental Services for 2 Units of Operational Vehicles for Perum LPPNPI Kendari branch office, with a period of 13 months, counting from September 21, 2022.

2) Engagement

a. The Company entered into an agreement with the Transportation Human Resources Development Agency through the Human Resources Development Agreement in the Field of Aviation Navigation, agreement No. HK / 201/3/10 BPSDMP-18 and No. PJJ.04.07.01 / 00 / LPPNPI / 11/2018/320, dated November 8, 2018, valid for a period of 5 years.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

2) Perikatan (Lanjutan)

- b. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, No: PM.47 Tahun 2015, No: Kerma/6/II/2015, tentang Bantuan TNI kepada Kementerian Perhubungan, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai dari tanggal 20 Februari 2015.

Saat ini sedang dilakukan proses finalisasi Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia dengan Perum LPPNPI.

- c. Perusahaan telah melakukan kesepakatan bersama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), No: KNKT/025/X/MOU/2015 dan No: PJJ.04.07.01/00/LPPNPI/10/2015/001, tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Pelayanan Navigasi Penerbangan, dengan Jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai dari tanggal 2 Oktober 2015.

Kesepakatan ini telah diperpanjang dengan kesepakatan No: KNKT/049/X/MOU/2020 dan No: MOU.003/U/00/LPPNPI/HUK.07/X/2020 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai dari tanggal 1 Oktober 2020.

- d. Perusahaan telah melakukan Kesepahaman bersama dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, No: 12/SPJ/KA/7/2015 dan No: PJJ.04.07.01/00/LPPNPI/07/2015/001, tentang Pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara Hang Nadim - Batam, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 9 Juli 2015.

**34. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION  
(Continued)**

2) *Engagement (Continued)*

- b. *Memorandum of understanding between The Ministry of Transportation of The Republic of Indonesia and The National Army of Indonesia, No: PM.47, 2015, No: Kerma/6/II/2015, about assistance TNI to the ministry of transportation, with the term of the 5 (five) years, starting from of February 20, 2015*

*Currently, the process of finalizing the Memorandum of Understanding between the Indonesian National Armed Forces and Perum LPPNPI is in progress.*

- c. *The Company has made an agreement with National Committee Transport Safety (KNKT), No: KNKT/025/x/MOU/2015 and No: PJJ.04.07.01/00/LPPNPI/10/2015/001, on Utilization of Natural Resources in the Context of Improving Flight Navigation Safety Services, with the term of 5 (five) years, starting from October 2, 2015.*

*This Agreement has been extended with agreement No: KNKT/049/X/MOU/2020 and No: MOU.003/U/00/LPPNPI/HUK.07/X/2020 for a period of 3 (three) years, starting from October 1, 2020.*

- d. *The Company has agreed to a mutual understanding with Freeport Batam No: 12/SPJ/KA/7/2015 and No: PJJ.04.07.01/00/LPPNPI/07/2015/001, now about the navigation flight at the airport Hang Nadim - Batam, with a period of 5 (five) years, starting from the date of July 9, 2015.*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

2) Perikatan (Lanjutan)

- d. Kesepakatan ini telah diperpanjang dengan kesepakatan No: MOU.002 /U/00/LPPNPI/HUK.07/VI/2022 dan No: 27/SPJ/KA/6/2022 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai dari tanggal 24 Juni 2022.
- e. Perusahaan melakukan kesepakatan bersama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, No. PJJ.04.04.03/00/LPPNPI/11/2018/316 dan No.K.TEL.62/HK.840/TEL-00000000/2018 tanggal 7 November 2018 tentang Sinergi Pemanfaatan Sumber Daya Perum, dengan jangka waktu 3 tahun, terhitung mulai 7 November 2018.

Perjanjian ini tidak diperpanjang.

- f. Perusahaan telah melakukan perjanjian Kerja Bersama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), No: KS.303/009/RO.3/XII/2014 dan No: PJJ.04.04/00/LPPNPI/12/2014/003, tentang Mekanisme Penarikan, Penerimaan, Penyetoran, dan Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan, dengan Jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 4 Desember 2014.

Perjanjian ini telah diperbaharui dengan perjanjian Kerjasama No PKS/006/KRU/DN/II/2020 dan No PKS.003/K/00/LPPNPI/HUK.07/II/2020 dengan Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal tanggal 28 Februari 2020.

**34. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION  
(Continued)**

2) Engagement (Continued)

- d. This Agreement has been extended with agreement No: MOU.002 /U/00/LPPNPI/HUK.07/VI/2022 and No: 27/SPJ/KA/6/2022 for a period of 5 (five) years, starting from June 24, 2022.
- e. The Company entered into a joint agreement with PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, No. PJJ.04.04.03 / 00 / LPPNPI / 11/2018/316 and No. K. Tel.62 / HK.840 / TEL-00000000/2018 dated November 7, 2018 concerning Synergy in Utilizing Perum Resources, with a period of 3 years, starting from November 7, 2018.

This Agreement is unextended.

- f. The Company has done work with Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG), No: KS.303/009/RO.3/XII/2014 and No: PJJ.04.04/00/LPPNPI/12/2014/003, concerning the mechanism withdrawal, revenue, payment, and reconciliation non-tax state income (PNBP) for services provided meteorology information flight, with the term of the 5 (five) years, starting from December 4, 2014.

This agreement has been updated with agreement No. PKS/006/KRU/DN/II/2020 and No. PKS.003/K/00/LPPNPI/HUK.07/II/2020 with the term of 5 (five) years, starting from February 28, 2020.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

2) Perikatan (Lanjutan)

- g. Perusahaan telah melakukan perjanjian Kerja Bersama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), No: KS.303/001/SU/II/2015 dan No: PJJ.12.01/00/LPPNPI/01/2015/004, tentang Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan, dengan Jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 21 Januari 2015.

Perjanjian ini telah diperbaharui dengan perjanjian Kerjasama No PKS/005 /SU/DN/II/2020 dan No PKS.004/S /00/LPPNPI/HUK.07/II/2020 dengan Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal tanggal 28 Februari 2020.

- h. Pada tanggal 1 Agustus 2020, Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan PT Bali Widya Dirgantara No.BAC.031.1/G/06/LPPNPI/KEU/07/VIII/2020 dan No. 008/BWD/CFO-PKS/VIII/2020 dengan kesepakatan untuk mengalihkan penagihan PJNP atas penerbangan tidak berjadwal dengan mekanisme autodebet TMT mulai 1 Agustus 2020. Dana deposit minimal Rp30.000.000.

**34. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION  
(Continued)**

2) Engagement (Continued)

- g. The Company has a mutual agreement with Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG), with the agreement No: KS.303/001/SU/II/2015 and No: PJJ.12.01/00/LPPNPI/01/2015/004, on the implementation of the provision of services meteorology information flight, with the term of 5 (five) years, starting from January 21, 2015.

This agreement has been updated with agreement No PKS/005 /SU/DN/II/2020 and No PKS.004/S /00/LPPNPI/HUK .07/II/2020 with the term of 5 (five) years, starting from February 28, 2020.

- h. On August 1, 2020, the Company has signed an agreement with PT Bali Widya Dirgantara No.BAC.031.1/G/06/LPPNPI/KEU/07/VIII/2020 and No. 008/BWD/CFO-PKS/VIII/2020 that agreed to transfer PJNP invoices for un-scheduled flights with TMT autodebit mechanism starting August 1, 2020 with a minimum deposit of Rp30,000,000.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

2) Perikatan (Lanjutan)

- i. Pada tahun 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian tentang mekanisme pembayaran atas pelayanan jasa navigasi dengan beberapa pelanggan yaitu PT Bali Widya Dirgantara, PT Ersa Eastern Aviation, PT Intan Angkasa Air Service, PT AMA, PT Semuwa Aviasi Mandiri, PT Smart Cakrawala Aviation dan PT Trigana Air Service dengan kesepakatan bahwa Perusahaan akan mengirimkan invoice melalui aplikasi A-CARE dan akan diunduh oleh pelanggan-pelanggan tersebut untuk memastikan kebenaran. Invoice dikirimkan setiap 10 hari kelender setelah pelayanan diberikan dengan jatuh tempo pembayaran 7 hari. Pembayaran dilakukan dengan mendebet rekening. Perusahaan berhak menerima pembayaran biaya PJNP, bukti potong PPh 23 dan mendapatkan pembayaran meskipun pelanggan-pelanggan tersebut dinyatakan pailit.
- j. Selama tahun berjalan, Perusahaan menandatangani perjanjian terkait sistem pembayaran deposit dengan beberapa pelanggan, yaitu PT Gapura Angkasa, PT Global Jasa Angkasa, PT Tri MG Airlines, PT Aeroflyer Institute dan Akademi Penerbangan Banyuwangi dengan kesepakatan bahwa pelanggan-pelanggan tersebut diharuskan menyetorkan deposit untuk penerbangan tidak terjadwal dengan jumlah yang telah ditentukan dan Perusahaan berkewajiban memberikan informasi terkait rincian pemakaian deposito dan pelanggan-pelanggan tersebut berkewajiban untuk melakukan pengisian kembali atas saldo deposit ke jumlah yang telah disepakati.

**34. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION  
(Continued)**

2) Engagement (Continued)

- i. In 2020, the Company signed agreements regarding the payment mechanism for navigation services with certain customers: PT Bali Widya Dirgantara, PT Ersa Eastern Aviation, PT Intan Angkasa Air Service, PT AMA, PT Semuwa Aviasi Mandiri, PT Smart Cakrawala Aviation and PT Trigana Air Service, with an agreement that the Company will send invoices through the A-CARE application and will be downloaded by these customers to ensure correctness. Invoices are sent every 10 calendar days after the service is provided with a payment due of 7 days. Payment is made by debiting the account. The company is entitled to receive payment of PJNP fees, proof of income taxes article 23 and receive payment though the customers are declared bankrupt.
- j. During the year, the Company signed agreements regarding deposit payment systems with certain customers: PT Gapura Angkasa, PT Global Jasa Angkasa, PT Tri MG Airlines, PT Aeroflyer Institute and Banyuwangi Aviation Academy, with an agreement that these customers are required to make deposits for un-scheduled flights corresponding to the predetermined amount and the Company is obliged to provide information regarding the details of the use of deposits and these customers are obliged to repay on the deposit balance to the agreed amount.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

2) Perikatan (Lanjutan)

k. Selama tahun berjalan, Perusahaan menandatangani perjanjian tentang mekanisme pembayaran atas pelayanan jasa navigasi dengan beberapa pelanggan yaitu PT Ekspres Transportasi Antarbenua (Premi Air), PT Hevilift Aviation Indonesia, PT National Aviation Management, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, PT Sriwijaya Air, PT Surya Air, Yayasan Jasa Aviasi Indonesia, Yayasan Aviasi Nusantara, Yayasan Helvida Indonesia, Akademi Penerbangan Banyuwangi, PT Nam Air, PT Pelita Air Service, PT Matthew Air Nusantara, PT Transnusa Aviation Mandiri, PT Angkasa Super Services, PT Batik Air Indonesia, PT Wings Abadi, PT Lion Mentari, PT Derazona Air Service, PT Mitra Aviasi Perkasa, PT Weststar Aviation Indonesia, PT Global Aviasi, PT My Indo Airlines, dan PT Pegasus Air Services dengan kesepakatan bahwa Perusahaan akan mengirimkan *invoice* melalui aplikasi A-CARE dan akan diunduh oleh pelanggan-pelanggan tersebut untuk memastikan kebenaran. Invoice dikirimkan setiap 10 hari kelender setelah pelayanan diberikan dengan jatuh tempo pembayaran 7 hari. Pembayaran dilakukan dengan mendebet rekening. Perusahaan berhak menerima pembayaran biaya PJNP, bukti potong PPh 23 dan mendapatkan pembayaran meskipun pelanggan-pelanggan tersebut dinyatakan pailit.

**34. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION  
(Continued)**

2) Engagement (Continued)

k. During the year, the Company signed agreements regarding the payment mechanism for navigation services with certain customers: PT Ekspres Transportasi Antarbenua (Premi Air), PT Hevilift Aviation Indonesia, PT National Aviation Management, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, PT Sriwijaya Air, PT Surya Air, Yayasan Jasa Aviasi Indonesia, Yayasan Aviasi Nusantara, Yayasan Helvida Indonesia, Akademi Penerbangan Banyuwangi, PT Nam Air, PT Pelita Air Service, PT Matthew Air Nusantara, PT Transnusa Aviation Mandiri, PT Angkasa Super Services, PT Batik Air Indonesia, PT Wings Abadi, PT Lion Mentari, PT Derazona Air Service, PT Mitra Aviasi Perkasa, PT Weststar Aviation Indonesia, PT Global Aviasi, PT My Indo Airlines and PT Pegasus Air Services, with an agreement that the Company will send invoices through the A-CARE application and will be downloaded by these customers to ensure correctness. Invoices are sent every 10 calendar days after the service is provided with a payment due of 7 days. Payment is made by debiting the account. The company is entitled to receive payment of PJNP fees, proof of income taxes article 23 and receive payment though the customers are declared bankrupt.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**35. STANDAR AKUNTANSI DAN INTERPRETASI  
STANDAR YANG TELAH DISAHKAN  
NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru. Standar akuntansi tersebut akan berlaku efektif atau diterapkan pada laporan keuangan Perusahaan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1 - Penyajian laporan keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi dan Klasifikasi liabilitas sebagai lancar dan tidak lancar;
- Amendemen PSAK 16 - Aset tetap: tentang hasil sebelum penggunaan yang dimaksudkan;
- Amendemen PSAK 46 - Pajak penghasilan tentang Pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal;
- Amendemen PSAK 25 - Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan ini, manajemen Perusahaan masih mengevaluasi dampak potensial terhadap standar dan interpretasi akuntansi yang baru dan direvisi ini terhadap laporan keuangannya.

**36. KASUS HUKUM**

- a) Pada tahun 2019 PT Iyhamulik Bengkang Turan mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Perum LPPNPI, PT BRI (Persero) Tbk KC Martapura dan Perum Jamkrindo KC Banjarmasin ke Pengadilan Negeri Tangerang melalui Perkara Gugatan No. 283/Pdt.G/2019/PN.Tng.

**35. NEW ACCOUNTING STANDARDS AND  
INTERPRETATION OF STANDARD WHICH  
HAVE BEEN ISSUED BUT NOT YET  
EFFECTIVE**

The Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI) has issued new or amendments to the following Indonesian Financial Accounting Standards ("SFAS") and its Interpretation to Financial Accounting Standards ("IFAS"). The accounting standards will be effective or applicable on the Company's financial statements for the period beginning on or after January 1, 2023:

- Amendment to SFAS 1 - Presentation of financial statements: Disclosure of Accounting Policies and Classification of liabilities as current and non-current;
- Amendment to SFAS 16 - Fixed assets regarding proceeds before intended use;
- Amendment to SFAS 46 - Income tax regarding Deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction;
- Amendment to SFAS 25 - Accounting, Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates.

As of authorization date of these financial statements, the Company's management is still evaluating the potential impact on these new and revised accounting standards and interpretations on its financial statements.

**36. LEGAL CASE**

- a) In 2019 PT Iyhamulik Bengkang Turan registered a Lawsuit against the Law with Perum LPPNPI, PT BRI (Persero) Tbk Martapura Branch and Perum Jamkrindo Banjarmasin Branch to the Tangerang District Court through Lawsuit Case No. 283 /Pdt.G/2019/PN.Tng.



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. KASUS HUKUM (Lanjutan)**

Adapun nilai gugatan tersebut adalah sebesar Rp25.506.206.490, yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp2.424.790.030 dan kerugian immateril sebesar Rp23.081.416.460.

Terhadap Gugatan yang terdaftar dengan register Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2019/PN.Tng. tersebut telah diputus di Pengadilan Negeri Tangerang yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Atas putusan tersebut Pihak Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten dan telah diputus oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya menolak permohonan banding PT Iyhamulik Bengkang Turan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi yang disampaikan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Agustus 2022, diinformasikan bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut, PT Iyhamulik Bengkang Turan mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PT Iyhamulik Bengkang Turan mengajukan Memori Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Memeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No: 122/PDT/2022/PT.BTN., tanggal 31 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No: 283/Pdt.G/2019/PN.Tng., tanggal 3 Juni 2020.

**36. LEGAL CASE (Continued)**

*The claim amounted to Rp25,506,206,490, which consists of material losses amounting to Rp2,424,790,030 and immaterial loss of Rp23,081,416,460.*

*Against the lawsuit registered with the case register Number: 283/Pdt/2019/PN.Tng. has been decided in the Tangerang District Court which in essence rejected the Plaintiff's claim in its entirety. Based on this decision, the Plaintiff filed an appeal to the Banten High Court and has been decided by the Panel of Judges which principally rejected PT Iyhamulik Bengkang Turan's appeal application and affirm the Tangerang District Court's Decision.*

*Based on Notification Letter of Cassation submitted by the Bailiff at the Tangerang District Court on August 31, 2022, informed that regarding the decision of the Banten High Court, PT Iyhamulik Bengkang Turan filed petition for cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.*

*PT Iyhamulik Bengkang Turan submitted a Memorandum of Cassation to the Head of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, principally requesting the Panel of Supreme Court Judges of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, who examining the case, to render a decision which principally cancels the Banten High Court Decision No: 122/PDT/2022/PT.BTN., dated May 31, 2022 which affirm the Decision of the Tangerang District Court No: 283/Pdt.G/2019/PN.Tng., dated June 3, 2020.*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. KASUS HUKUM (Lanjutan)**

Terhadap Memori Kasasi sebagaimana dimaksud, Perum LPPNPI sebagai Termohon Kasasi telah menyampaikan Kontra Memori Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 September 2022.

Bahwa sampai tanggal Laporan Keuangan ini diterbitkan, terhadap perkara kasasi sebagaimana dimaksud di atas, masih sedang dalam tahap pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- b) Pada tahun 2021 PT Delima Agung Utama mengajukan permohonan arbitrase kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) kantor perwakilan Bandung melawan Perusahaan terkait pemutusan kontrak pekerjaan pembangunan Gedung Tower di Bandara Kertajati. Pemutusan kontrak tersebut dilakukan karena PT Delima Agung Utama lalai untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak.

Adapun nilai gugatan yang diajukan oleh PT Delima Agung Utama adalah sebesar Rp7.478.273.600, yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp6.478.273.600 dan kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000.

Terhadap perkara arbitrase tersebut, telah diputuskan oleh majelis arbitrase berdasarkan Putusan BANI No: 41/2021/BANI BANDUNG tanggal 19 Mei 2022, yang pada pokoknya mengakomodir hal-hal yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon selama proses penyelesaian perkara. Dalam Putusan BANI diperintahkan untuk melakukan proses quantity survey terhadap sisa pekerjaan Pembangunan Gedung Tower di Kertajati oleh PT Delima Agung Utama. Hasil quantity survey dimaksud akan digunakan sebagai dasar pembayaran oleh Perum LPPNPI kepada PT Delima Agung Utama terhadap sisa pekerjaan Pembangunan Gedung Tower di Kertajati.

**36. LEGAL CASE (Continued)**

*Regarding the Cassation Memorandum referred to, Perum LPPNPI as the Defendant of the Cassation has submitted a Counter-Memorandum of Cassation to the Head of Supreme Court of the Republic of Indonesia through the Registrar's Office of the Tangerang District Court on September 12, 2022.*

*Up to the issuance date of this Financial Statements, the Cassation case referred above, is still under examination by the Supreme Court of the Republic of Indonesia.*

- b) *In 2021, PT Delima Agung Utama request for arbitration to Indonesian National Board of Arbitration (BANI), Bandung representative office against the Company regarding the termination of the construction work for Tower Building in Kertajati Airport. The termination due to PT Delima Agung Utama failed to fulfill its obligations in accordance with the terms of the contract.*

*The claim submitted by PT Delima Agung Utama amounted to Rp7,478,273,600, which consists of material losses of Rp6,478,273,600 and immaterial losses of Rp1,000,000,000.*

*Regarding this arbitration case, it has been decided by the arbitration council based on BANI Decision No: 41/2021/BANI BANDUNG dated May 19, 2022, which principally accommodates agreed points by the Petitioner and Respondent during the case settlement process. In the BANI decision, it was demanded to perform a quantity survey process for the remaining work on the construction of tower building in Kertajati by PT Delima Agung Utama. The results of those quantity survey will be used as a payment basis by Perum LPPNPI to PT Delima Agung Utama for the remaining work on the Tower Building Construction in Kertajati.*

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. KASUS HUKUM (Lanjutan)**

Bahwa proses quantity survey telah selesai dilaksanakan dan telah dituangkan dalam Berita Acara No. BAC.1047/TF/00/LPPNPI/PGD.02.02/XII/2022 dan No. 079/YFH-PPH/BA/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Perum LPPNPI dan PT Delima Agung Utama. Namun proses tindak lanjut pembayaran oleh Perum LPPNPI terkendala sehubungan dengan status pailit PT Delima Agung Utama. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini Perum LPPNPI sedang berkoordinasi dengan Kurator PT Delima Agung Utama (Dalam Pailit) terkait proses pembayaran terhadap sisa pekerjaan dimaksud.

- c. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 9 Desember 2021 Keputusan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, pihak berelasi dari Perusahaan.

Pada tanggal 21 Januari 2022 dilakukan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU Tetap selama 60 hari kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selanjutnya menawarkan Rencana Perdamaian kepada seluruh Kreditor, dimana setelah melalui proses negosiasi akhirnya tercapai kesepakatan antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan seluruh kreditornya.

**36. LEGAL CASE (Continued)**

The quantity survey has been completed and has been disclosed in Minutes No. BAC.1047/TF/00/LPPNPI/PGD.02.02/XII/2022 dated December 15, 2022, was signed by Perum LPPNPI and PT Delima Agung Utama. The payment process by Perum LPPNPI was constrained by the bankruptcy status of PT Delima Agung Utama. In this regard, currently Perum LPPNPI is coordinating with the Curator of PT Delima Agung Utama regarding the payment process for the remaining work.

- c. Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

On December 9, 2021 the Decision of the Commercial Court Judge at the Central Jakarta District Court granted the Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) application of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, related party of the Company.

On January 21, 2022, a consultative session of the PKPU Court Judges of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. The Panel of Judges granted PKPU permanent application for 60 days to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. from January 21, 2022 to March 21, 2022.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk offered a Composition Plan to all Creditors, after going through the negotiation process, thus agreement made between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk with all its Creditor.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. KASUS HUKUM (Lanjutan)**

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan para Kreditornya melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 425/Pdt.Sus PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2022.

Homologasi juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pdt.Sus Pailit/2022 tanggal 26 September 2022.

- d. Pada tanggal 16 Juni 2022 PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan registrasi perkara No. 338/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk sebagai Penggugat melawan PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, sebagai Tergugat I; PT Transnusa Aviation Mandiri sebagai Tergugat II; Perum LPPNPI sebagai Turut Tergugat I; PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai Turut Tergugat II.

Gugatan diajukan sehubungan dengan kerugian yang timbul terhadap peristiwa kecelakaan antara pesawat yang dioperasikan oleh PT Batik Air Indonesia dengan pesawat yang dioperasikan oleh PT Transnusa Aviation Mandiri.

Penggugat adalah penanggung asuransi dari PT Batik Air Indonesia menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mengajukan ganti rugi kepada para Tergugat dalam perkara No. 338/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.

**36. LEGAL CASE (Continued)**

Furthermore, the Panel of Judges of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court has approved the Composition Plan (Homologation) between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and its Creditors through Decision of the Central Jakarta Commercial Court No. 425/Pdt.Sus PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst. dated June 27, 2022.

Homologation was also affirm by the Supreme Court of the Republic of Indonesia in a Supreme Court Decision No.1454 K/Pdt.Sus Bankruptcy/2022 dated September 26, 2022.

- d. On June 16, 2022, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia filed a lawsuit to the East Jakarta District Court with case registration No.338/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk as Plaintiff against PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, as Defendant I; PT Transnusa Aviation Mandiri as Defendant II; Perum LPPNPI as Co-Defendant I; PT Angkasa Pura II (Persero) as Co-Defendant II.

The lawsuit was filed in relation to losses from an accident between an airplane operated by PT Batik Air Indonesia and an airplane operated by PT Transnusa Aviation Mandiri.

The plaintiff is the insurer of PT Batik Air Indonesia that bears losses caused by the accident. In this regard, the Plaintiff filed for compensation to the Defendants in case No. 338/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. KASUS HUKUM (Lanjutan)**

Nilai gugatan yang diajukan adalah sebesar USD15.839.725,13. Bahwa saat ini penanganan perkara No. 338/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Tim. sedang dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

- e. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Sriwijaya Air

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 247/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst tanggal 31 Oktober 2022 mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara PT Sriwijaya Air, pelanggan pihak ketiga dari Perusahaan.

**37. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI**

Panitia anggaran DPR RI dan pemerintah sepakat menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3% seperti yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo. Inflasi diproyeksikan akan meningkat secara signifikan pada tahun 2022 dan akan tetap tinggi pada tahun 2023. Inflasi yang rata-rata mencapai 1,6% tahun lalu, diperkirakan akan meningkat menjadi 4,6% pada tahun 2022 karena kenaikan harga komoditas dan kenaikan harga bahan bakar baru-baru ini. Diproyeksikan menjadi hampir 6,0% hingga Juni 2023 dan turun ke bawah 4,0% pada akhir 2023.

Perekonomian Indonesia mengatasi ancaman terhadap pertumbuhan dengan baik. Namun, harga komoditas yang tinggi juga memicu inflasi. Untuk tahun 2023, risikonya menurun karena pertumbuhan global yang lebih lambat, volatilitas keuangan global, kebijakan ekonomi makro yang lebih ketat di Indonesia, dan berlanjutnya kejutan dari invasi Rusia ke Ukraina.

**36. LEGAL CASE (Continued)**

The plaintiff submitted claim amounting to USD15,839,725.13. Currently, case No. 338/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim is still on hearing process at the East Jakarta District Court.

- e. Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) of PT Sriwijaya Air

Based on Central Jakarta Court Decision No. 247/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst dated October 31, 2022 granted the temporary Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) PT Sriwijaya Air, a third party customer of the Company.

**37. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY**

Indonesia's parliamentary budget committee and the government agreed to set a 2023 economic growth target of 5.3% as proposed by President Joko Widodo. Inflation is projected to increase significantly in 2022 and to remain elevated in 2023. Inflation, which averaged 1.6% last year, is forecast to rise to 4.6% in 2022 due to of higher commodity prices and the recent fuel price increases. It is projected to be almost 6.0% through June 2023 and to ease to below 4.0% by end 2023.

The Indonesian economy is coping well with threats to growth. However, high commodity prices have also spurred inflation. For 2023, the risks are on the downside due to slower global growth, global financial volatility, tighter macroeconomic policy in Indonesia, and continuing shocks from the Russian invasion of Ukraine.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA  
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

As of December 31, 2022 and 2021  
and For the Years  
Then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**38. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI  
(Lanjutan)**

Panitia dan pemerintah juga menyepakati pengeluaran 2023 sebesar 3.061,2 triliun rupiah (\$205,31 miliar), sedikit lebih tinggi dari anggaran yang diusulkan. Permintaan konsumen yang kuat mampu mengimbangi pengeluaran pemerintah yang lebih rendah. Namun permintaan ekspor komoditas Indonesia juga sehat, mendukung pertumbuhan dan menghasilkan pendapatan fiskal.

**39. TANGGUNG-JAWAB MANAJEMEN DAN  
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan laporan keuangan Perum LPPNPI (Airnav Indonesia) tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang diotorisasi oleh Direksi untuk terbit pada tanggal 10 Februari 2023.

**38. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY  
(Continued)**

The committee and the government also agreed on 2023 spending of 3,061.2 trillion rupiah (\$205.31 billion), slightly higher than the proposed budget. Robust consumer demand has more than offset lower government spending. But demand for Indonesia's commodity exports has also been healthy, supporting growth and generating a fiscal revenue windfall.

**39. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND  
APPROVAL FOR THE ISSUANCE OF THE  
FINANCIAL STATEMENTS**

The Management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Perum LPPNPI (Airnav Indonesia) as of December 31, 2022 and for the year then ended which were authorized by Directors for issuance on February 10, 2023.





Gedung AirNav Indonesia  
Jl. Ir. H. Juanda No.1 Tangerang 15121  
Banten - Indonesia

P. +62 21 5591 5000 F. +62 21 5591 5000